


# RPJMD 2025-2029 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Peraturan Daerah**
**Provinsi Kalimantan Tengah**
**Nomor 3 Tahun 2025**




**PALANGKA RAYA**
**27 AGUSTUS 2025**

SALINAN

# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## NOMOR 3 TAHUN 2025

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah Terpilih dilantik;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Visi Misi Kepala Daerah selama 5 tahun yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program prioritas beserta kerangka anggarannya yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;

jdih.kalteng.go.id

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

jdih.kalteng.go.id

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

jdih.kalteng.go.id

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182)
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria;
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

jdih.kalteng.go.id

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Operasionalisasi Prosedur Konsolidasi Tanah;
35. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

jdih.kalteng.go.id

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

jdih.kalteng.go.id

17. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025- sampai dengan Tahun 2045.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

jdih.kalteng.go.id

31. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
32. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
34. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berpedoman pada pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
   a. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; dan
   b. Tujuan, sasaran, kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah disertai pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   BAB I : PENDAHULUAN;
   BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
   BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
   BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
   BAB V : PENUTUP.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

jdih.kalteng.go.id

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dan acuan kepada:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2026-2030.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan

   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :

   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

   c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

   d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

jdih.kalteng.go.id

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target capaian sasaran akhir pembangunan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang RPJMD belum diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMN.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Agustus 2025
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIAR SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Agustus 2025
**Plt. SEKRETARIS DAERAH**
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**LEONARD S. AMPUNG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 3**
**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: (3-100/2025)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**MASKUR, S.H., M.H.**
**NIP. 19691025 199603 1 003**

jdih.kalteng.go.id

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi Misi Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan

jdih.kalteng.go.id

penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Sistematika RPJMD berpedoman pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 123**

jdih.kalteng.go.id

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR GAMBAR ..... vi

DAFTAR TABEL ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1-1**

1.1 Latar Belakang ..... 1-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 1-3

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya ..... 1-8

1.3.1 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... 1-10

1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 ..... 1-14

1.3.3 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ..... 1-16

1.3.4 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 ..... 1-18

1.3.5 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) Provinsi Kalimantan Tengah ..... 1-20

1.4 Maksud dan Tujuan ..... 1-20

1.4.1 Maksud ..... 1-20

1.4.2 Tujuan ..... 1-20

1.5 Sistematika Penulisan ..... 1-21

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... 2-1**

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... 2-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah ..... 2-1
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam ..... 2-12
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ..... 2-22
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ..... 2-43
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas ..... 2-54
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ..... 2-65
2.1.7 Demografi ..... 2-74

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 2-85
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi ..... 2-85
2.2.2 Kesehatan untuk Semua ..... 2-95
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata ..... 2-104
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif ..... 2-108
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ..... 2-110
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ..... 2-113

2.3 Aspek Daya Saing Daerah ..... 2-118
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia ..... 2-118
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ..... 2-119
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru ..... 2-128
2.3.4 Transformasi Digital ..... 2-132
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ..... 2-139
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ..... 2-142
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro ..... 2-152

2.4 Aspek Pelayanan Umum ..... 2-158
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif ..... 2-158
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial ..... 2-159
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ..... 2-164

2.4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... 2-165

2.5 Gambaran Umum Keuangan Daerah ..... 2-206

2.5.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ..... 2-206

2.5.2 Neraca Daerah ..... 2-216

2.5.3 Proyeksi Keuangan Daerah ..... 2-220

2.5.4 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) ..... 2-202

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah ..... 2-229

2.6.1 Permasalahan Daerah ..... 2-229

2.6.2 Isu-Isu Pembangunan ..... 2-258

2.6.3 Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2029 ..... 2-285

**BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ..... 3-1**

3.1 Visi ..... 3-1

3.2 Misi ..... 3-3

3.3 Tujuan dan Sasaran ..... 3-6

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan ..... 3-18

3.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan ..... 3-19

3.4.2 Pentahapan Pembangunan ..... 3-101

3.4.3 Arah Pembangunan Kebijakan Kewilayahan ..... 3-102

3.5 Program Prioritas Daerah ..... 3-118

3.5.1 Kalteng Bermartabat ..... 3-118

3.5.2 Betang Maju ..... 3-120

3.5.3 Betang Makmur ..... 3-122

3.5.4 Betang Cerdas ..... 3-123

3.5.5 Betang Sehat ..... 3-124

3.5.6 Betang Harmoni ..... 3-125

3.5.7 Alur Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) ..... 3-126

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... 4-1**

4.1 Program Perangkat Daerah ..... 4-1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... 4-174

**BAB V PENUTUP..... 5-1**

5.1 Spirit Pembangunan Kalimantan Tengah ..... 5-1

5.2 Kaidah Pelaksanaan ..... 5-2

5.3 Skema Monitoring dan Evaluasi ..... 5-2

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.3.1 | *Cascading* dokumen perencanaan pembangunan dan posisi RPJMD diantara dokumen perencanaan pembangunan lainnya ..... | 1-9 |
| Gambar 1.3.2 | Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 1-12 |
| Gambar 1.3.3 | Periodisasi Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 ..... | 1-16 |
| Gambar 2.1.1 | Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-2 |
| Gambar 2.1.2 | Peta Bentang Alam Kalimantan Tengah ..... | 2-4 |
| Gambar 2.1.3 | Peta Persebaran Formasi Geologi di Kalimantan Tengah.. | 2-6 |
| Gambar 2.1.4 | Peta Pembagian Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Tengah ..... | 2-9 |
| Gambar 2.1.5 | Produksi dan Produktivitas Produksi Padi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2024 ..... | 2-12 |
| Gambar 2.1.6 | Produksi Jagung di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... | 2-13 |
| Gambar 2.1.7 | Produksi Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-16 |
| Gambar 2.1.8 | Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah | 2-19 |
| Gambar 2.1.9 | Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-21 |
| Gambar 2.1.10 | Persentase Tutupan Hutan dan Tutupan Non Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 dan 2023 ..... | 2-22 |
| Gambar 2.1.11 | Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Kalimantan Tengah ..... | 2-24 |
| Gambar 2.1.12 | Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kalimantan Tengah ..... | 2-28 |
| Gambar 2.1.13 | Peta Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air (P1) Tahun 2003 (peta) dan Tahun 2022 (peta b) Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-33 |
| Gambar 2.1.14 | Peta Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-33 |
| Gambar 2.1.15 | Peta Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (P1) Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-34 |
| Gambar 2.1.16. | Peta Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-35 |
| Gambar 2.1.17 | Peta Indeks Jasa Ekosistem Tata aliran Air dan Banjir (R3A) Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-36 |
| Gambar 2.1.18 | Peta Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-37 |
| Gambar 2.1.19 | Peta Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Kualitas Udara (R1)Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-38 |
| Gambar 2.1.20 | Peta Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Kualitas Udara Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-39 |

Gambar 2.1.21 Peta Indeks Jasa Ekosistem Cultural Budaya dan Identitas (C3)Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-40
Gambar 2.1.22 Peta Indeks Jasa Ekosistem Cultural Budaya dan Identitas Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-41
Gambar 2.1.23 Peta Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversity Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-42
Gambar 2.1.24 Peta Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversity Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-43
Gambar 2.1.25 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2024..... 2-44
Gambar 2.1.26 Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN..... 2-45
Gambar 2.1.27 Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan (Surya) di Kalimantan Tengah..... 2-46
Gambar 2.1.28 Potensi Energi Surya Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah (Megawatt) ..... 2-47
Gambar 2.1.29 Peta Potensi Energi Baru Terbarukan (Biomassa) di Kalimantan Tengah..... 2-48
Gambar 2.1.30 Peta Potensi Energi Biomassa Berdasarkan PLTU di Kalimantan Tengah..... 2-49
Gambar 2.1.31 Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan (Hydro) di Kalimantan Tengah..... 2-50
Gambar 2.1.32 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024..... 2-52
Gambar 2.1.33 Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024 2-53
Gambar 2.1.34 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024 2-54
Gambar 2.1.35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 ..... 2-56
Gambar 2.1.36 Perbandingan Nilai IKLH Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024..... 2-57
Gambar 2.1.37 Peta Wilayah Kawasan Heart of Borneo di Indonesia..... 2-59
Gambar 2.1.38 Timbulan Sampah Tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional ..... 2-60
Gambar 2.1.39 Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional ..... 2-61
Gambar 2.1.40 Pengelolaan Sampah Kalimantan Tengah Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2024) ..... 2-62
Gambar 2.1.41 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak ..... 2-64
Gambar 2.1.42 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Terakses Sanitasi Aman Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik..... 2-65

Gambar 2.1.43 Indeks Ketahanan Daerah Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026 ..... 2-66
Gambar 2.1.44 Nilai Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024 ..... 2-67
Gambar 2.1.45 Peta Tingkat Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah ..... 2-69
Gambar 2.1.46 Peta Tingkat Risiko Banjir Kalimantan Tengah ..... 2-70
Gambar 2.1.47 Peta Tingkat Risiko Longsor Kalimantan Tengah ..... 2-71
Gambar 2.1.48 Peta Kerentanan Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah. 2-74
Gambar 2.1.49 Piramida Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2025 (dalam ribu jiwa) ..... 2-76
Gambar 2.1.50 Proyeksi Proporsi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ..... 2-82
Gambar 2.1.51 Proyeksi Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur..... 2-83
Gambar 2.1.52 Proyeksi Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ..... 2-84
Gambar 2.1.53 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ..... 2-85
Gambar 2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 ..... 2-86
Gambar 2.2.2 Perkembangan PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 ..... 2-88
Gambar 2.2.3 Kondisi TPAK dan TPT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... 2-89
Gambar 2.2.4 Persentase dan jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024..... 2-90
Gambar 2.2.5 Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-91
Gambar 2.2.6 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... 2-92
Gambar 2.2.7 Nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-93
Gambar 2.2.8 Indeks Harga yang Diterima dan Indeks Harga yang Dibayar Petani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... 2-94
Gambar 2.2.9 Nilai Tukar Petani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... 2-95
Gambar 2.2.10 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-111
Gambar 2.2.11 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023..... 2-112
Gambar 2.2.12 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional ..... 2-114
Gambar 2.2.13 Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-115
Gambar 2.2.14 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022 ..... 2-116
Gambar 2.2.15 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-118

Gambar 2.3.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-120
Gambar 2.3.2 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-121
Gambar 2.3.3 Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 ..... 2-122
Gambar 2.3.4 Rasio Kewirausahaan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024 ..... 2-123
Gambar 2.3.5 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024..... 2-125
Gambar 2.3.6 Peta Kondisi Berkelanjutan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022..... 2-130
Gambar 2.3.7 Peta Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2022 ..... 2-131
Gambar 2.3.8 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 ..... 2-133
Gambar 2.3.9 Jumlah BTS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023..... 2-134
Gambar 2.3.10 Jumlah *Blank Spot* Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ..... 2-135
Gambar 2.3.11 Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022..... 2-136
Gambar 2.3.12 Indeks Transformasi Digital Nasional..... 2-137
Gambar 2.3.13 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024.... 2-140
Gambar 2.3.14 Jumlah dan Nilai Proyek Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-140
Gambar 2.3.15 Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024 ..... 2-141
Gambar 2.3.16 Kualitas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022 ..... 2-143
Gambar 2.3.17 Peta Sebaran Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-144
Gambar 2.3.18 Peta Sebaran Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah.. 2-146
Gambar 2.3.19 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021-2024..... 2-147
Gambar 2.3.20 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023..... 2-148
Gambar 2.3.21 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 ..... 2-149
Gambar 2.3.22 Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022..... 2-150
Gambar 2.3.23 Jumlah Desa berdasarkan Klasifikasi Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024 ..... 2-151
Gambar 2.3.24 Laju Inflasi Bulanan Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-152
Gambar 2.3.25 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Untuk Makanan dan Nonmakanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... 2-157
Gambar 2.4.1 Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2023 ..... 2-159

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.4.2 | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 | 2-160 |
| Gambar 2.4.3 | Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2021-2023 | 2-161 |
| Gambar 2.4.4 | Frekuensi Penegakan Perda Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026 | 2-162 |
| Gambar 2.4.5 | Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Kalimantan Tengah Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalteng 2021-2026 | 2-163 |
| Gambar 2.5.1 | Proporsi Jenis Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah | 2-209 |
| Gambar 2.5.2 | Proporsi Jenis Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah | 2-213 |
| Gambar 2.6.1 | Isu Pembangunan Global | 2-272 |
| Gambar 2.6.2 | Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000 – 2024 | 2-277 |
| Gambar 3.2.1 | Keterhubungan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 | 3-3 |
| Gambar 3.4.1 | Daftar Indikatif Proyek Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah | 3-29 |
| Gambar 3.4.2 | Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Kalimantan Tengah | 3-30 |
| Gambar 3.4.3 | Pentahapan Pembangunan Kalimantan Tengah 2025-2030 | 3-101 |
| Gambar 3.4.4 | Posisi Geostrategi dan Geoekonomi Kalimantan Tengah | 3-103 |
| Gambar 3.4.5 | Koridor Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah | 3-104 |
| Gambar 3.4.6 | Sebaran Wilayah Perhatian Penanganan Kemiskinan | 3-105 |
| Gambar 3.4.7 | Sebaran Wilayah Perhatian Penanganan Desa Tertinggal | 3-106 |
| Gambar 3.4.8 | Sebaran Wilayah Perhatian Penanganan Kasus Stunting | 3-107 |
| Gambar 3.4.9 | Pembagian Zona Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah | 3-108 |
| Gambar 3.4.10 | Peta Klaster Pangkalan Bun | 3-110 |
| Gambar 3.4.11 | Peta Klaster Sampit | 3-111 |
| Gambar 3.4.12 | Peta Klaster Palangkaraya | 3-113 |
| Gambar 3.4.13 | Peta Klaster Kuala Kapuas | 3-114 |
| Gambar 3.4.14 | Peta Klaster Buntok | 3-116 |
| Gambar 3.4.15 | Peta Klaster Muara Teweh | 3-117 |
| Gambar 3.5.1 | Program Prioritas Daerah Huma Betang Sejahtera | 3-118 |
| Gambar 3.5.2 | Alur Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) | 3-127 |
| Gambar 3.5.3 | Pohon Kinerja RPJMD | 3-225 |
| Gambar 3.5.4 | Cascading Kinerja RPJMD | 3-243 |
| Gambar 5.3.1 | Alur Pendetailan Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi | 5-5 |

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1.1 | Tema Pembangunan Lima Tahunan Periode 2025-2045 ..... | 1-2 |
| Tabel 1.3.1 | Delapan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029. | 1-10 |
| Tabel 1.3.2 | Indikatif Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 1-13 |
| Tabel 2.1.1 | Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-1 |
| Tabel 2.1.2 | Bentang Alam dan Luasannya Provinsi Kalimantan Tengah.. | 2-4 |
| Tabel 2.1.3 | Formasi Geologi dan Luasannya di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-6 |
| Tabel 2.1.4 | Nama Sungai Besar menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di..... | 2-8 |
| Tabel 2.1.5 | Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020..... | 2-11 |
| Tabel 2.1.6 | Produksi Padi Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-13 |
| Tabel 2.1.7 | Produksi Komoditas Ternak di Provinsi Kalimantan Tengah.. | 2-14 |
| Tabel 2.1.8 | Produksi Komoditas Unggas di Provinsi Kalimantan Tengah. | 2-15 |
| Tabel 2.1.9 | Produksi Komoditas Kelapa Sawit per Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah..... | 2-16 |
| Tabel 2.1.10 | Produksi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-17 |
| Tabel 2.1.11 | Luasan Kawasan Hutan dan Non Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah..... | 2-20 |
| Tabel 2.1.12 | Luas Area Dengan Status Ketersediaan Air di Provinsi Kalimantan Tengah..... | 2-24 |
| Tabel 2.1.13 | Hasil Analisis Selisih Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air | 2-26 |
| Tabel 2.1.14 | Luas Area Dengan Status Ketersediaan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah..... | 2-29 |
| Tabel 2.1.15 | Daya Dukung Lahan Permukiman Tahun 2020 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-30 |
| Tabel 2.1.16 | Prediksi Daya Dukung Lahan Permukiman Tahun 2030 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah | 2-31 |
| Tabel 2.1.17 | Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Penyedia Air Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah..... | 2-32 |
| Tabel 2.1.18 | Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Penyedia Pangan Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah. | 2-34 |
| Tabel 2.1.19 | Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah..... | 2-36 |
| Tabel 2.1.20 | Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah..... | 2-38 |
| Tabel 2.1.21 | Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Warisan Budaya dan Identitas Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-40 |
| Tabel 2.1.22 | Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Pendukung Biodiversity Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 2-42 |

Tabel 2.1.23 Potensi Energi Biomassa PLTU ..... 2-49
Tabel 2.1.24 Rencana Titik Bendungan dan Hasil Perhitungan Potensi Energi Air ..... 2-51
Tabel 2.1.25 Keberadaan TPA/TPST pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah ..... 2-63
Tabel 2.1.26 Kelas Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Desa Tahun 2013-2025..... 2-72
Tabel 2.1.27 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan..... 2-75
Tabel 2.1.28 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur ..... 2-75
Tabel 2.1.29 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah . 2-77
Tabel 2.1.30 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-78
Tabel 2.1.31 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di ..... 2-79
Tabel 2.1.32 Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur Periode 2026-2030 (dalam ribu jiwa)..... 2-80
Tabel 2.1.33 Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ..... 2-81
Tabel 2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-85
Tabel 2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-87
Tabel 2.2.3 Capaian Indikator Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023 ..... 2-95
Tabel 2.2.4 Capaian Indikator Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 ..... 2-104
Tabel 2.2.5 Indikator Kinerja terkait Perlindungan Sosial yang Adaptif ... 2-109
Tabel 2.2.6 Capaian Indikator Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023..... 2-113
Tabel 2.2.7 Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 ..... 2-117
Tabel 2.3.1 Angka Ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah..... 2-119
Tabel 2.3.2 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023..... 2-126
Tabel 2.3.3 Perkembangan Skor IDSD di Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024 ..... 2-127
Tabel 2.3.4 Kondisi Eksisting Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Daerah (TTIS) ..... 2-127
Tabel 2.3.5 Aspek-Aspek dan Komponen Keberlanjutan Perekonomian .. 2-128
Tabel 2.3.6 Kondisi Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ..... 2-129
Tabel 2.3.7 Capaian Bauran Energi Baru dan Energi Terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-132
Tabel 2.3.8 Tabel Perhitungan Koefisien Static Location Quotient Provinsi Kalimantan Tengah..... 2-153
Tabel 2.3.9 Tabel Angka Pengganda Hasil Updating Tabel Input-Output Tahun 2022..... 2-154

Tabel 2.3.10 Tabel Angka Pengganda Output Provinsi di Indonesia berdasarkan ..... 2-155
Tabel 2.4.1 Proporsi Penduduk Merasa Berjalan Aman di Lingkungan Tempat Tinggalnya Tahun 2014-2020 ..... 2-164
Tabel 2.4.2 Capaian IDSD Provinsi Kalimantan Tengah 2022 dan 2023 .. 2-165
Tabel 2.4.3 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-167
Tabel 2.4.4 Capaian SPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 2-202
Tabel 2.5.1 Rincian Komponen Pendapatan dalam APBD ..... 2-206
Tabel 2.5.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rp) ..... 2-208
Tabel 2.5.3 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rp)..... 2-212
Tabel 2.5.4 Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-214
Tabel 2.5.4.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024..... 2-215
Tabel 2.5.5 Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 ..... 2-217
Tabel 2.5.6 Proyeksi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026-2030 (dalam Rp)..... 2-221
Tabel 2.5.7 Proyeksi Belanja per Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026-2030 (dalam Rp) ..... 2-222
Tabel 2.6.1 Masalah dan Akar Masalah Usia Harapan Hidup ..... 2-229
Tabel 2.6.2 Masalah dan Akar Masalah Angka Kematian Ibu ..... 2-230
Tabel 2.6.3 Masalah dan Akar Masalah Eliminasi Penyakit Tuberkulosis dan Malaria ..... 2-231
Tabel 2.6.4 Masalah dan Akar Masalah Stunting ..... 2-231
Tabel 2.6.5 Masalah dan Akar Masalah Pendidikan dan Literasi ..... 2-232
Tabel 2.6.6 Masalah dan Akar Masalah Kepesertaan dan Tingkat Penyelesaian Jenjang Pendidikan ..... 2-232
Tabel 2.6.7 Masalah dan Akar Masalah Pendidikan Angkatan Kerja..... 2-233
Tabel 2.6.8 Masalah dan Akar Masalah Pengentasan Kemiskinan..... 2-233
Tabel 2.6.9 Masalah dan Akar Masalah Perlindungan Ketenagakerjaan .. 2-234
Tabel 2.6.10 Masalah dan Akar Masalah Kesempatan Bagi Kelompok Rentan ..... 2-234
Tabel 2.6.11 Masalah dan Akar Masalah Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi ..... 2-235
Tabel 2.6.12 Masalah dan Akar Masalah Ekonomi Berkelanjutan ..... 2-236
Tabel 2.6.13 Masalah dan Akar Masalah Hilirisasi ..... 2-237
Tabel 2.6.14 Masalah dan Akar Masalah Perencanaan dan Penggunaan Anggaran APBD ..... 2-238
Tabel 2.6.15 Masalah dan Akar Masalah Pariwisata Jasa Lingkungan..... 2-239
Tabel 2.6.16 Masalah dan Akar Masalah Sentra Pangan Terpadu ..... 2-240
Tabel 2.6.17 Masalah dan Akar Masalah Ketenagalistrikan ..... 2-241
Tabel 2.6.18 Masalah dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informasi ..... 2-241
Tabel 2.6.19 Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Desa ..... 2-242
Tabel 2.6.20 Masalah dan Akar Masalah Penyediaan Perumahan..... 2-242

Tabel 2.6.21 Masalah dan Akar Masalah Belanja Pemerintah ..... 2-243
Tabel 2.6.22 Masalah dan Akar Masalah Kepegawaian ..... 2-244
Tabel 2.6.23 Masalah dan Akar Masalah Kondisi Regulasi ..... 2-244
Tabel 2.6.24 Masalah dan Akar Masalah Akses Pelayanan Publik Bagi Masyarakat ..... 2-245
Tabel 2.6.25 Masalah dan Akar Masalah Risiko Korupsi dalam Pembangunan ..... 2-245
Tabel 2.6.26 Masalah dan Akar Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum ..... 2-246
Tabel 2.6.27 Masalah dan Akar Masalah Demokrasi ..... 2-247
Tabel 2.6.28 Masalah dan Akar Masalah Reformasi Birokrasi ..... 2-247
Tabel 2.6.29 Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Kebudayaan ..... 2-248
Tabel 2.6.30 Masalah dan Akar Masalah Kerukunan Umat Beragama ..... 2-248
Tabel 2.6.31 Masalah dan Akar Masalah Kualitas Keluarga ..... 2-249
Tabel 2.6.32 Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Kepemudaan ..... 2-249
Tabel 2.6.33 Masalah dan Akar Masalah Ketimpangan Gender ..... 2-250
Tabel 2.6.34 Masalah dan Akar Masalah Pengelolaan Sampah ..... 2-250
Tabel 2.6.35 Masalah dan Akar Masalah Infrastruktur Sumber Daya Air ... 2-251
Tabel 2.6.36 Masalah dan Akar Masalah Kualitas Lingkungan Hidup ..... 2-252
Tabel 2.6.37 Masalah dan Akar Masalah Pertambangan ..... 2-253
Tabel 2.6.38 Masalah dan Akar Masalah Pemanfaatan Hutan ..... 2-254
Tabel 2.6.39 Masalah dan Akar Masalah Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit ..... 2-255
Tabel 2.6.40 Masalah dan Akar Masalah Lahan Gambut ..... 2-255
Tabel 2.6.41 Masalah dan Akar Masalah Dokumen Perencanaan Tata Ruang ..... 2-256
Tabel 2.6.42 Masalah dan Akar Masalah Bidang Konektivitas dan Aksesibilitas ..... 2-257
Tabel 2.6.43 Matriks Identifikasi Isu Strategis Daerah ..... 2-260
Tabel 2.6.44 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas ..... 2-269
Tabel 2.6.45 Isu Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 ..... 2-276
Tabel 2.6.46 Isu Regional Kalimantan Tengah ..... 2-281
Tabel 2.6.47 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah ..... 2-286
Tabel 3.3.1 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Indikator di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030 . 3-8
Tabel 3.4.1 Strategi Intensifikasi Pajak ..... 3-20
Tabel 3.4.2 Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah ..... 3-23
Tabel 3.4.3 Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus ..... 3-32
Tabel 3.4.4 Visi, Misi, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan ..... 3-42
Tabel 3.4.5 Pembagian Tema Pembangunan Zona dan Klaster ..... 3-108
Tabel 3.4.6 Indikator Pembangunan Makro Klaster Pangkalan Bun ..... 3-110
Tabel 3.4.7 Indikator Pembangunan Makro Klaster Sampit ..... 3-112
Tabel 3.4.8 Indikator Pembangunan Makro Klaster Palangkaraya ..... 3-113
Tabel 3.4.9 Indikator Pembangunan Makro Klaster Kuala Kapuas ..... 3-115
Tabel 3.4.10 Indikator Pembangunan Makro Klaster Buntok ..... 3-116
Tabel 3.4.11 Indikator Pembangunan Makro Klaster Muara Teweh ..... 3-118

Tabel 3.5.1 Program Prioritas Daerah, termasuk mandat Kegiatan Prioritas Utama, di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ..... 3-131
Tabel 3.5.1.1 Penyelarasan Visi dan Misi terhadap Nomenklatur..... 3-206
Tabel 3.5.2 Daftar Kegiatan Prioritas Utama di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 ..... 3-226
Tabel 3.5.3 Daftar Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025 – 2029..... 3-230
Tabel 3.5.4 Penyelarasan Program Prioritas Gubernur terhadap Program Prioritas RPJMN..... 3-235
Tabel 3.5.5 Persandingan Kinerja RPJMD terhadap Astacita dan 17 Program Prioritas Nasional..... 3-244
Tabel 4.1.1 Program Perangkat Daerah ..... 4-2
Tabel 4.1.1.1 Rekap Pagu Program Perangkat Daerah..... 4-121
Tabel 4.1.1.2 Rekap Data Perangkat Daerah..... 4-138
Tabel 4.1.2 Rincian Anggaran per Urusan per Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025..... 4-143
Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030 ..... 4-175
Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030..... 4-180
Tabel 5.3.1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 ..... 5-3
Tabel 5.3.2 Jenis Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029..... 5-4

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan menjadi salah satu upaya transformasi yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk di dalamnya aspek politik, ekonomi, lingkungan, hingga budaya. Dalam pelaksanaannya, daerah yang dalam hal ini provinsi, memiliki kewenangan yang luas di dalam pembangunan seiring dengan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tetapi dengan tetap memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional. Salah satu proses penting dalam pembangunan adalah perencanaan. Proses perencanaan di dalam pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan mandat bahwa setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka tersebut secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, baik di level nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana pembangunan yang disusun dalam jangka waktu lima tahun di daerah disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini, periode perencanaan pembangunan menengah periode 2021 – 2026 dianggap telah berakhir seiring dengan penyesuaian periode pembangunan dalam RPJPD. Di samping itu, hal ini telah membuka periode pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah berikutnya, yaitu 2025 – 2029, seiring dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil gubernur hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Substansi pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah pada dasarnya merupakan penjabaran visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada periode 2025 – 2029. Penjabaran visi dan misi ini juga kemudian berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045. Di dalamnya, terdapat periodisasi pembangunan lima tahunan, sebagaimana tampak pada tabel 1.1.1, yang dimulai pada tahun 2025 – 2029 dengan tema besar berkenaan dengan Penguatan Pondasi Transformasi. Tema ini menjadi awalan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025 – 2045 "Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan".

**Tabel 1.1.1 Tema Pembangunan Lima Tahunan Periode 2025-2045**

| **Tahun 2025-2029 (Periode I)** | **Tahun 2030 - 2034 (Periode II)** | **Tahun 2035 - 2039 (Periode III)** | **Tahun 2040 - 2044 (Periode IV)** |
|---|---|---|---|
| Penguatan Fondasi Transformasi | Pengembangan *Big Push Transformation* | Ekspansi Transformasi Pembangunan | Perwujudan Kalteng Tangguh dan Berdaya Saing dalam Kerangka Indonesia Emas 2045 |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2045

Dokumen RPJMD ini memuat substansi penting berkaitan dengan upaya pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini termasuk di dalamnya identifikasi potensi wilayah, permasalahan dan isu strategis, kondisi keuangan daerah, visi dan misi daerah, hingga arah kebijakan yang diturunkan menjadi program lima tahun. Upaya pembangunan ini kemudian didasarkan pada langkah transformatif dalam aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola yang diukur melalui indikator utama pembangunan. Perencanaan ini juga kemudian disinkronisasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya,

termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Secara lebih detail, dengan disusunnya dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045, hal ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran, dan program kerja di urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam mewujudkan partisipasi publik seluas-luasnya, dokumen RPJMD ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya, seperti komunitas, akademisi, dan masyarakat pada umumnya.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD ini diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182)
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 25);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);
37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan

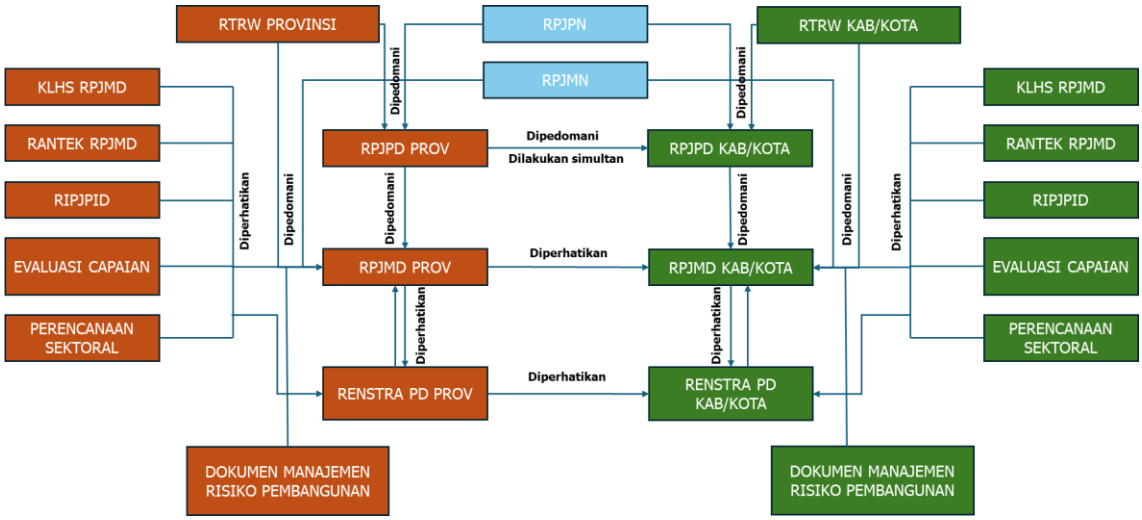
Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);

38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10); dan

## 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Secara umum, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen turunan dari RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2045. Dokumen RPJMD ini juga merupakan hasil *cascading* dengan

dokumen perencanaan lainnya hingga pada level nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang disinkronisasi agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan nasional pada periode tersebut. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 akan turut memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kalimantan Tengah yang telah disusun sebelumnya. Secara *cascading* perencanaan pembangunan, posisi RPJMD dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:




**Gambar 1.3.1 *Cascading* dokumen perencanaan pembangunan dan posisi RPJMD diantara dokumen perencanaan pembangunan lainnya**

Selain keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pada level nasional, dokumen RPJMD ini juga akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025-2029. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang dapat menjawab tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan di dalam RPJMD. Renstra yang disusun oleh perangkat daerah kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja (Renja) bagi perangkat daerah untuk jangka waktu tahunan. Dokumen perencanaan tersebut kemudian akan menjadi gambaran untuk penyusunan anggaran pembangunan

sebagaimana yang tercantum di dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya.

### 1.3.1 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Salah satu dokumen yang perlu menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar terjadi sinkronisasi pembangunan antara nasional dengan daerah sekaligus memastikan bahwa arahan pembangunan yang dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan kepada Provinsi Kalimantan tengah sesuai dengan arahan nasional sekaligus memperhatikan konteks pembangunan lokal. Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 telah disahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

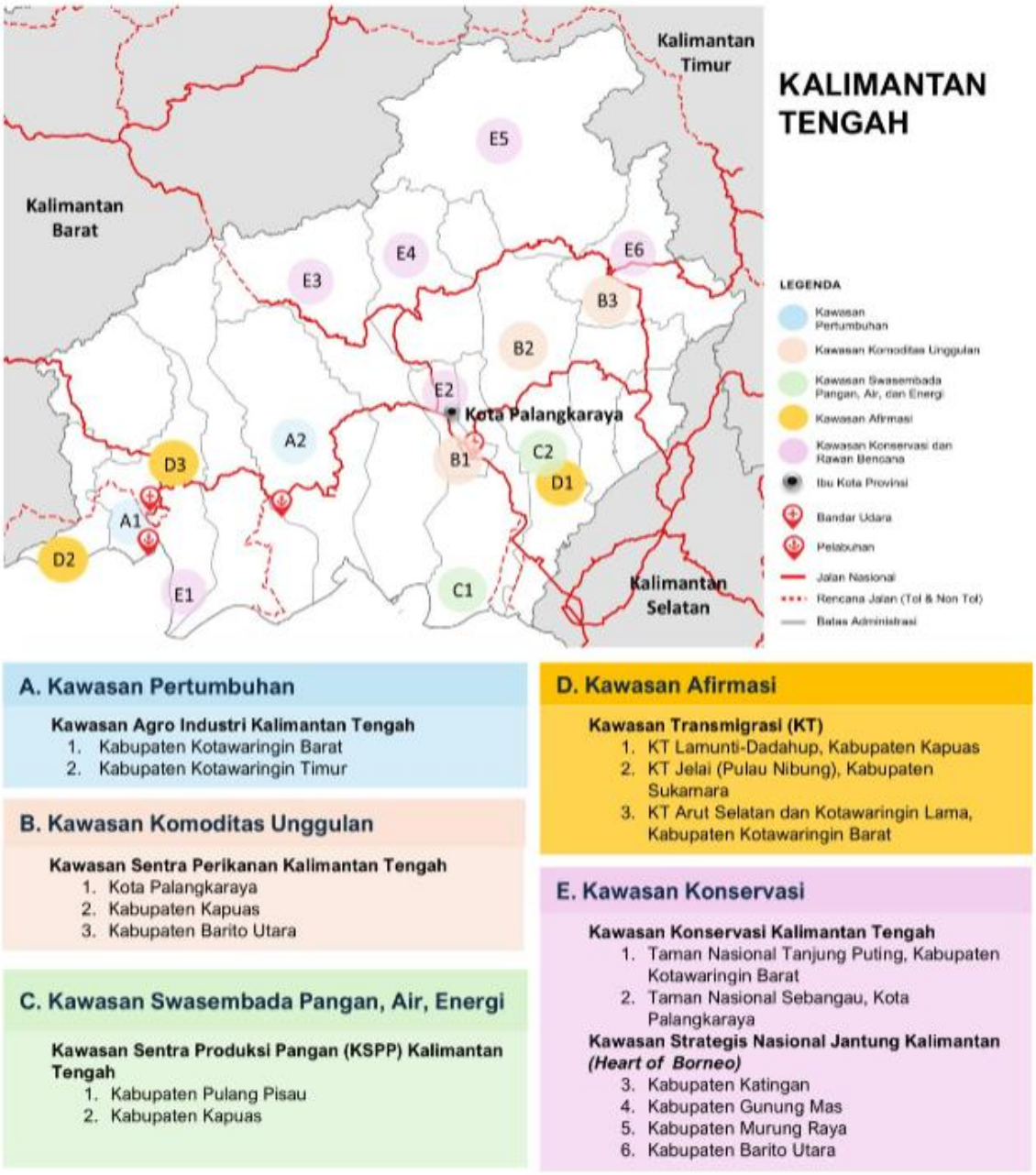
Terdapat beberapa hal yang relevan kaitannya dengan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 tersebut. Secara umum, pemerintah pusat mencanangkan adanya 8 prioritas nasional yang merupakan hasil pengejawantahan dari asta cita misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, yaitu:

**Tabel 1.3.1 Delapan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

| Urutan | Deskripsi |
|---|---|
| Prioritas 1 | Memperkokog ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) |
| Prioritas 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| Prioritas 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kerwirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |

| Urutan | Deskripsi |
|---|---|
| Prioritas 4 | Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas |
| Prioritas 5 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| Prioritas 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan |
| Prioritas 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan |
| Prioritas 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur |

Secara potensi pembangunan, RPJMN Tahun 2025-2029 memberikan gambaran potensi perekonomian Pulau Kalimantan yang didorong melalui pengembangan superhub ekonomi Nusantara, pembangunan IKN, pengembangan KSPP Kalimantan Tengah, serta hilirisasi bauksit dan kelapa sawit. Secara lebih rinci, RPJMN Tahun 2025-2029 kemudian memandatkan beberapa kawasan prioritas yang dibagi berdasarkan fungsinya. Kawasan-kawasan tersebut mencakup kawasan pertumbuhan untuk agro industri, kawasan komoditas unggulan untuk sentra perikanan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi untuk Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), kawasan afirmasi untuk kawasan transmigrasi, hingga kawasan konservasi taman nasional dan kawasan strategis nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). Pembagian kawasan tersebut terlihat sebagaimana gambar berikut.




**A. Kawasan Pertumbuhan**

**Kawasan Agro Industri Kalimantan Tengah**
1. Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kabupaten Kotawaringin Timur

**B. Kawasan Komoditas Unggulan**

**Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah**
1. Kota Palangkaraya
2. Kabupaten Kapuas
3. Kabupaten Barito Utara

**C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi**

**Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah**
1. Kabupaten Pulang Pisau
2. Kabupaten Kapuas

**D. Kawasan Afirmasi**

**Kawasan Transmigrasi (KT)**
1. KT Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas
2. KT Jelai (Pulau Nibung), Kabupaten Sukamara
3. KT Arut Selatan dan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat

**E. Kawasan Konservasi**

**Kawasan Konservasi Kalimantan Tengah**
1. Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Taman Nasional Sebangau, Kota Palangkaraya

**Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan *(Heart of Borneo)***
3. Kabupaten Katingan
4. Kabupaten Gunung Mas
5. Kabupaten Murung Raya
6. Kabupaten Barito Utara

**Gambar 1.3.2 Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam mendukung potensi tersebut, pemerintah pusat kemudian memandatkan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi daya ungkit pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Indikasi PSN sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 yang dimandatkan ke Provinsi Kalimantan Tengah (baik sebagai PSN cakupan nasional maupun spesifik Provinsi Kalimantan Tengah) tampak sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1.3.2 Indikatif Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Proyek | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Nasional |
| 2 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas | Nasional |
| 3 | Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul | Nasional |
| 4 | Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota | Nasional |
| 5 | Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan *Food Estate* | Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan |
| 6 | Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat | Nasional |
| 7 | Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional | Nasional |
| 8 | Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi | Nasional |
| 9 | Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu | Nasional |
| 10 | Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia | Nasional |
| 11 | Kawasan Industri Kumai Multi Energi | Kalimantan Tengah |
| 12 | Kawasan Industri Tabuk | Kalimantan Tengah |
| 13 | Kawasan Industri Rimau | Kalimantan Tengah |
| 14 | Pembangunan 3 Juta Rumah | Nasional |

Keselarasan Visi RPJMN dan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 :







### 1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Konteks penting dalam hubungan antara dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2045 adalah upaya sinkronisasi visi, misi, dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahap I. Sebagaimana tercantum dalam rancangan akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2045, visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

| **VISI** |
| --- |
| Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan |

| MISI |
| --- |
| 1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif |
| 2) Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global |
| 3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan |
| 4) Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah |
| 5) Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi |
| 6) Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan |
| 7) Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan |
| 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antarperiode |

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah membagi periodisasi pembangunan menjadi 4 (empat) tahap pembangunan setiap lima tahun dengan pembagian sebagai berikut.




**Gambar 1.3.3 Periodisasi Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045**

Terlihat pada gambar di atas bahwa pada tahap pertama RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2045 adalah **penguatan fondasi** untuk upaya transformasional yang akan dilakukan pada tahap kedua. Artinya, arah kebijakan yang harus dilakukan pada tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam rancangan akhir RPJPD tersebut adalah proses pembangunan, perbaikan, maupun pengembangan sektor-sektor mendasar yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan di periode-periode selanjutnya. Hal ini mencakup aspek infrastruktur dasar, kualitas sumber daya manusia, hingga aspek lingkungan dalam mendukung pembangunan rendah karbon dalam mewujudkan tema pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025 - 2029 sebagai lumbung pangan nasional dan pusat konservasi internasional.

### 1.3.3 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 harus turut serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagai basis penataan ruang yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. Setidaknya, ada 2 (dua) peraturan terkait penataan ruang yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Sebagai catatan, peraturan perundang-undangan tersebut mengatur rencana

tata ruang nasional hingga tahun 2027 sehingga akan ada dokumen rencana tata ruang nasional baru yang akan berlaku untuk periode 2028 dan seterusnya yang sampai saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh kementerian/lembaga terkait di pemerintah pusat.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012, salah satu fungsi dari rencana tata ruang Pulau Kalimantan adalah sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan di Pulau Kalimantan. Terdapat setidaknya 9 (sembilan) tujuan penataan ruang di Pulau Kalimantan, yaitu untuk mewujudkan:

1) Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia;
2) Kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
3) Pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan;
4) Pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan;
5) Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;
6) Pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air;
7) Kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan;
8) Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; dan
9) Swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 juga telah memberikan gambaran arahan kebijakan terkait penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah. Arahan kebijakan tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan penataan ruang khusus pada Pulau Kalimantan sebagaimana terlihat pada daftar tujuan di atas. Peraturan tersebut juga melakukan pengaturan terkait dengan penempatan atau lokasi pembangunan atau pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung proses pembangunan di Pulau Kalimantan, terkhusus Provinsi Kalimantan Tengah. Ini menjadi penting sebagai basis atau fondasi penting yang diperlukan bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka panjang.

### 1.3.4 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Selain pada dokumen RTRW nasional, penyusunan RPJMD ini perlu berpedoman pada RTRW yang disusun oleh Provinsi Kalimantan Tengah sebagai gambaran yang lebih detail mengenai arahan penataan ruang pada skala regional provinsi. Saat ini, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035. Walaupun demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara pararel saat ini sednag melakukan proses penyusunan revisi atas rencana tata ruang wilayah tersebut untuk menyesuaikan periodisasi pembangunan di dalam RPJPD Tahun 2025 - 2045. Revisi terhadap RTRW tersebut disesuaikan untuk periode tahun 2024 - 2044.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015, disebutkan bahwa tujuan dari penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal tersebut lalu diejawantahkan ke dalam arah

kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi 8 (delapan) hal yang meliputi:

1) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
3) Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
4) Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
5) Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
6) Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
7) Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasna strategis provinsi; dan
8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Setiap masing-masing arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih rinci lagi ke dalam poin-poin kebijakan teknis yang mengarah pada program dan kegiatan. Dokumen RTRW provinsi juga telah memberikan gambaran yang detail mengenai peta distribusi sarana dan prasarana di seluruh wilayah yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan. Hal tersebut mencakup berbagai aspek dari segi jaringan jalan, jaringan transportasi, hingga jaringan-jaringan lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur dasar di dalam pembangunan. Setiap jaringan tersebut perlu menjadi perhatian di dalam proses pembangunan yang dicanangkan nantinya di dalam RPJMD sehingga upaya pembangunan sinkron dengan dokumen RTRW provinsi dan sesuai dengan peruntukkan kawasannya sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

### 1.3.5 Hubungan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, disampaikan bahwa penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 juga memperhatikan dan mempedomani RIPJPID sebagai dokumen yang memberikan arah pelaksanaan program riset dan inovasi di daerah guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, dan daya saing daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, RIPJPID menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD. Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun RIPJPID dengan fokus penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah dalam pengembangan produk unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan daerah. Dokumen RIPJPID Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029 memiliki usulan program-program unggulan pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk produk unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan daerah berdasarkan hasil kajian yang menjadi salah satu masukan program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pembangunan dalam jangka menengah bagi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman umum arah pembangunan bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan yang diharapkan;
2. Menjamin sinkronisasi dan keberlanjutan pembangunan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam suatu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan daerah kabupaten/kota di dalam provinsi, provinsi yang berbatasan, dan pembangunan nasional;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
8. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) berupa program, target, dan pagu indikatif yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program, target, dan pagu indikatif dalam rangka penyusunan prioritas daerah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

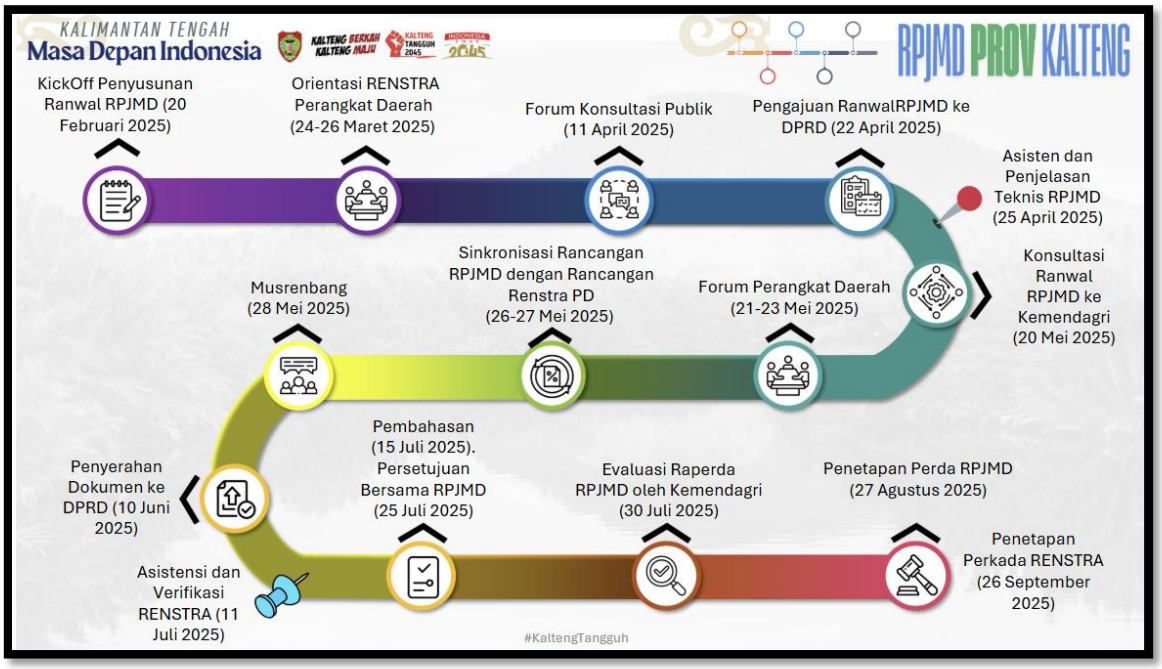
Sistematika dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029, sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terlihat sebagai berikut:

1. **Bab 1 Pendahuluan**, berisi latar belakang penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, dasar hukum, hubungan antara RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen.
2. **Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah**, berisi data dan informasi aspek-aspek pembangunan, termasuk evaluasi capaiannya dan terdiri dari gambaran aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum yang diintegrasikan dengan tujuan pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Selain itu, bab ini turut menjelaskan gambaran umum keuangan daerah beserta dengan proyeksinya dan gambaran permasalahan muncul dari analisis gambaran umum kondisi daerah, laporan kajian lingkungan hidup strategis, maupun penjaringan aspirasi masyarakat serta isu strategis yang (isu global, nasional, dan regional) yang memengaruhi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. **Bab 3 Visi, Misi, dan Program Prioritas Daerah**, berisi penjelasan dari visi dan misi kepala daerah yang disinkronisasi dengan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan penjelasan tujuan dan sasaran turunan dari visi dan misi kepala daerah.
4. **Bab 4 Program Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, berisi strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pentahapan per tahunnya disertai penjelasan mengenai program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini termasuk pula rekapitulasi program pemerintah daerah per perangkat daerah yang masuk di dalam rencana strategis perangkat daerah dan indikator serta target pembangunan yang akan dicapai oleh pemerintah daerah.

5. **Bab 5 Penutup**, berisi kaidah pelaksanaan dari dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045.

## 1.6 Garis Waktu Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.



## 1.7 Mandatory Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

KALIMANTAN TENGAH
Masa Depan Indonesia

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU Bappenda

**MANDATORI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

| | |
|---|---|
| UU 25/2004 - SPN | • Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan antar daerah serta antara pusat dan daerah (Pasal 2, ayat 4)<br>• Perencanaan pembangunan nasional merupakan perencanaan terpadu K/L dan Pemda (Pasal 3, ayat 2) |
| UU 23/2014 - Pemda | • Kepala daerah dan wakilnya wajib melaksanakan program strategis nasional (Pasal 67, poin f)<br>• Kepala daerah dan wakilnya akan dikenakan sanksi administratif (ayat 1) sampai dengan pemberhentian (ayat 3) jika tidak melaksanakan program strategis nasional (Pasal 68)<br>• K/L melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional (Pasal 258, ayat 3)<br>• Perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan disusun berpedoman pada dokumen perencanaan nasional sesuai dengan periodenya (Pasal 263, ayat 2-4)<br>• Pencapaian sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah diselaraskan dengan pencapaian K/L untuk tercapainya pembangunan nasional (Pasal 272, ayat 3) |
| UU 1/2022 - HKPD | • Program pembangunan daerah disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 141, ayat 2)<br>• Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 170, ayat 1).<br>• Penyelarasan oleh Pemda dilakukan melalui penyelarasan target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah dengan prioritas nasional (Paasal 171). |
| UU 59/2024 - RPJPN | • Penyusunan rencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan wajib selaras dan berdasarkan pada dokumen perencanaan nasional sesuai dengan periodenya (Pasal 10, ayat 2, 4 dan 6)<br>• Jika RPJPD tidak disusun sesuai ketentuan, kepala daerah dan anggota DPRD dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 11, ayat 5). |
| PERPRES 12/2025 - RPJMN | • RPJMN menjadi dasar hukum penyusunan RPJMD (Pasal 2, ayat 6b)<br>• Pemda melaksanakan RPJMN yang dijabarkan dalam RPJMD (Pasal 3, ayat 1) |



# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

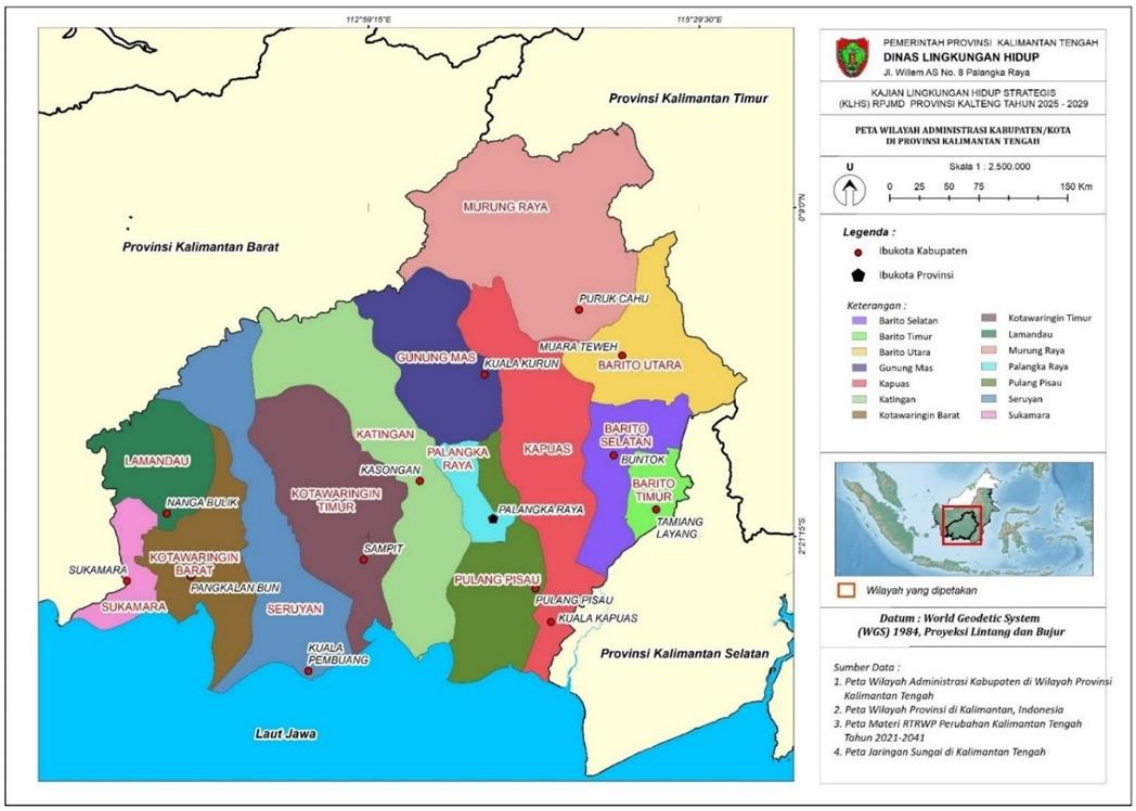
#### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan, dan 1.432 desa yang memiliki ibukota provinsi di Kota Palangkaraya. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 153.430,36 $km^2$ dengan Kabupaten Murung Raya memiliki luas wilayah terbesar yaitu 23,575,33 $km^2$, sedangkan Kota Palangkaraya memiliki luas wilayah terkecil yaitu 2.848,67 $km^2$**.** Berikut merupakan rincian nama kabupaten/kota dengan luas wilayah masing-masing beserta peta batas administrasi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.1.1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Kabupaten/Kota | Ibukota | Luas Wilayah($km^2$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun | 9.475,85 |
| 2 | Kotawaringin Timur | Sampit | 15.541,88 |
| 3 | Kapuas | Kuala Kapuas | 17.033,54 |
| 4 | Barito Selatan | Buntok | 6.267,08 |
| 5 | Barito Utara | Muara Teweh | 9.984,80 |
| 6 | Katingan | Kasongan | 20.380,50 |
| 7 | Seruyan | Kuala Pembuang | 15.211,71 |
| 8 | Sukamara | Sukamara | 3.310,13 |
| 9 | Lamandau | Nanga Bulik | 7.632,39 |
| 10 | Gunung Mas | Kuala Kurun | 9.305,76 |
| 11 | Pulang Pisau | Pulang Pisau | 9.650,16 |
| 12 | Murung Raya | Puruk Cahu | 23.575,33 |
| 13 | Barito Timur | Tamiang Layang | 3.212,52 |
| 14 | Kota Palangkaraya | Palangkaraya | 2.848,67 |
| | | **Total** | 153.430,36 $km^2$ |

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau




**Gambar 2.1.1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPMPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah terletak diantara 0°45’ Lintang Utara hingga 3°30’ Lintang Selatan dan 110°45’ Bujur Timur hingga 115°51’ Bujur Timur. Adapun batas provinsi dengan wilayah lainnya terlihat sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
2. Batas Timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
3. Batas Selatan : Laut Jawa
4. Batas Barat : Kalimantan Barat

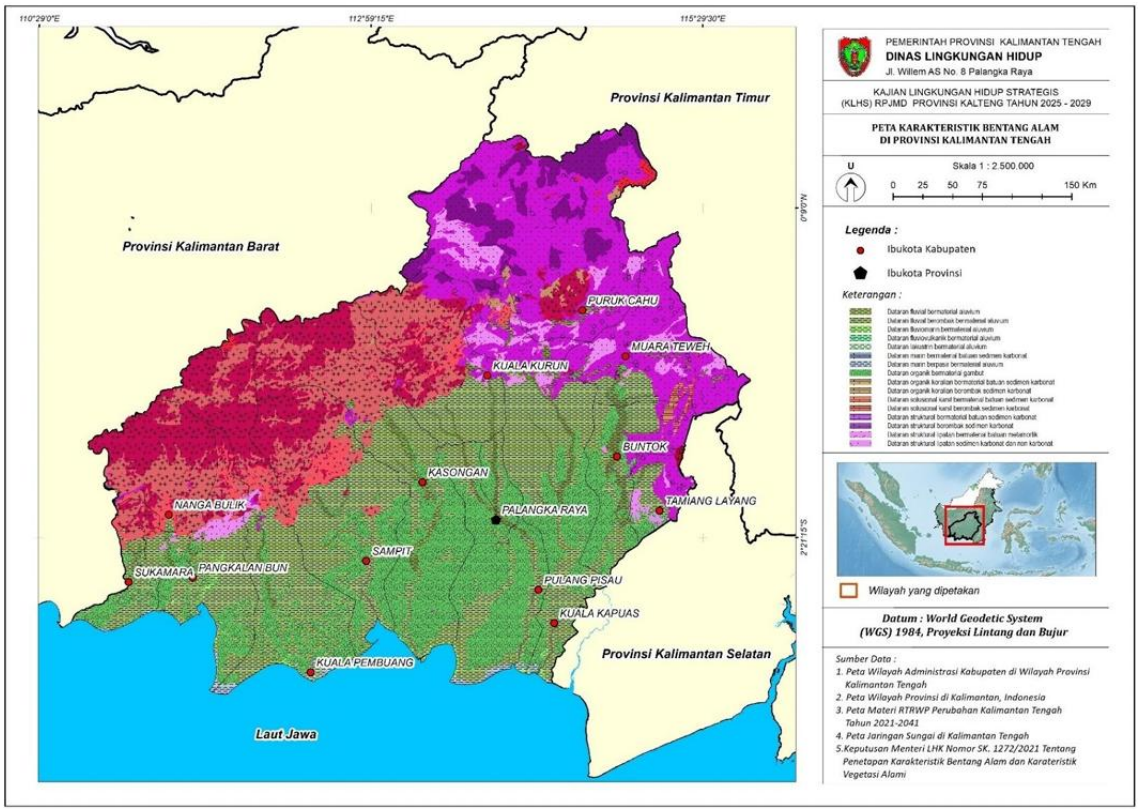
Secara fisik, terdapat tiga karakter kawasan di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Bagian utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan yang termasuk dalam wilayah *heart of Borneo*. Bagian tengah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian 50-150 mdpl. Bagian Selatan merupakan dataran rendah berupa pantai dan rawa-rawa

dengan ketinggian 0-50 mdpl. Ada tujuh kabupaten yang termasuk dalam kriteria wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.

#### 2.1.1.3 Kondisi Bentang Alam

Bentang alam daratan wilayah Kalimantan Tengah memiliki bentuk geomorfologi yang sangat bervariasi dengan di bagian utara terdapat pegunungan dan perbukitan yang termasyur sejak zaman kolonial, seperti Pegunungan Schwaner dan Pegunungan Muller. Pegunungan-pegunungan ini pula yang menjadi hulu dari hampir semua sungai-sungai besar di Kalimantan Tengah sehingga disebut sebagai jantung Kalimantan dan dikenal sebagai *Heart of Borneo*. Di bagian bawah pegunungan-pegunungan tersebut, terbentang dataran rendah yang sangat luas dengan berbagai macam karakteristik, yang paling terkenal adalah dataran gambut, yang kerap mengalami kebakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap.

Terdapat 24 bentang lahan alami yang ada di Kalimantan Tengah. Bentang lahan alami terluas di Kalimantan Tengah adalah Dataran organik bermaterial gambut dengan luas ±3.038.597 ha atau 19,7% dari luas bentang lahan alami di Kalimantan Tengah. Sebaliknya vegetasi alami terkecil adalah Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik yang mempunyai luas hanya ±3.009 ha atau hanya 0,02% dari luas seluruh bentang lahan alami di Kalimantan Tengah. Luasan dan Tipe bentang lahan alami seluruh Kalimantan Tengah ditampilkan pada tabel berikut.




**Gambar 2.1.2 Peta Bentang Alam Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

**Tabel 2.1.2 Bentang Alam dan Luasannya Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Bentang Alam | Luas (Ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Dataran organik bermaterial gambut | 3.038.597 | 19,7 |
| 2 | Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | 1.996.422 | 13,0 |
| 3 | Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium | 1.916.100 | 13,4 |
| 4 | Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam | 1.841.597 | 12,0 |
| 5 | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 1.811.831 | 11,8 |
| 6 | Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam | 1.705.042 | 11,1 |
| 7 | Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat | 757.579 | 4,9 |
| 8 | Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat | 597.384 | 3,9 |
| 9 | Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat | 552.837 | 3,6 |
| 10 | Lembah sungai bermaterial aluvium | 492.370 | 3,2 |

| No | Bentang Alam | Luas (Ha) | % |
|---|---|---|---|
| 11 | Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 299.513 | 1,9 |
| 12 | Dataran fluviomarin bermaterial aluvium | 83.963 | 0,5 |
| 13 | Dataran marin berpasir bermaterial aluvium | 71.753 | 0,5 |
| 14 | Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 46.940 | 0,3 |
| 15 | Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik | 41.106 | 0,3 |
| 16 | Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat | 37.410 | 0,2 |
| 17 | Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar | 32.335 | 0,2 |
| 18 | Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar | 19.113 | 0,1 |
| 19 | Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam | 13.514 | 0,1 |
| 20 | Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar | 9.016 | 0,1 |
| 21 | Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | 8.885 | 0,1 |
| 22 | Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat | 7.990 | 0,1 |
| 23 | Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar | 6.494 | 0,1 |
| 24 | Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik | 3.009 | 0,1 |
| | **Total** | **15.390.801** | **100** |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

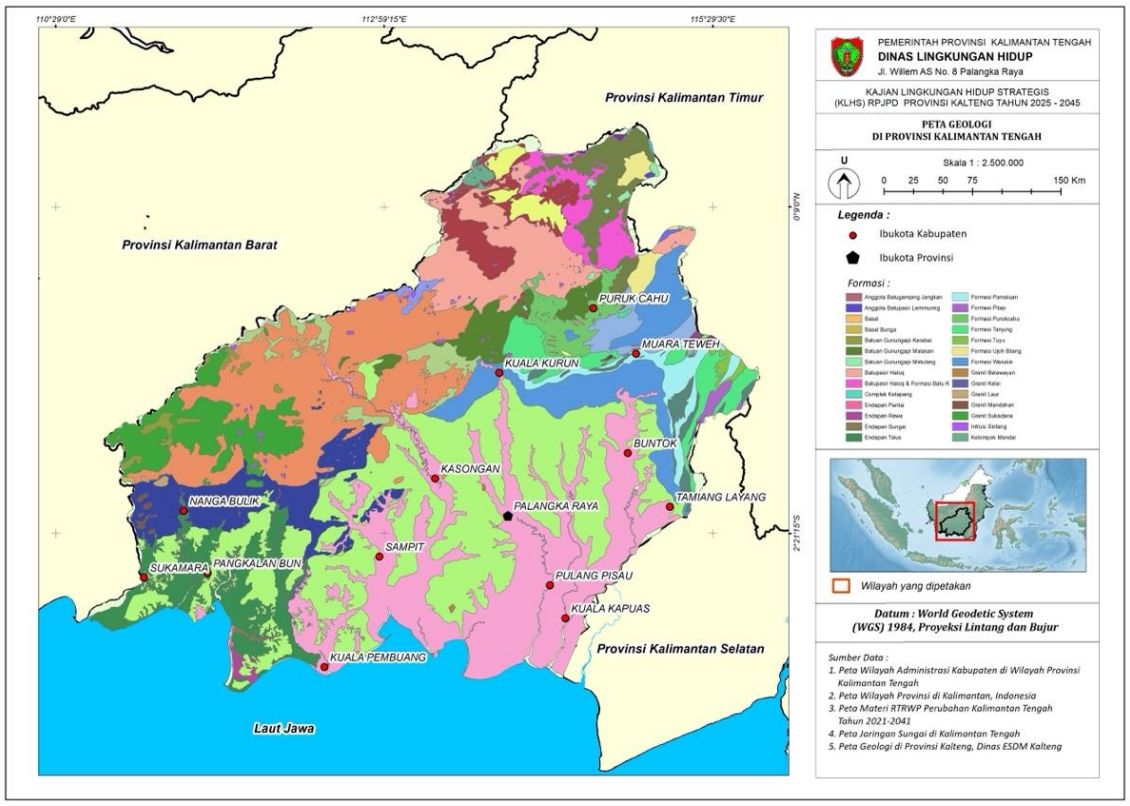
#### 2.1.1.4 Kondisi Geologi

Kalimantan tengah memiliki jenis tanah dengan tingkat kesuburan rendah yang termasuk dalam kelas III, IV, dan V dengan jenis tanah yang terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit. Berkaitan dengan sumber daya mineral, terdapat beberapa sumber daya mineral yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun sumber daya mineral tersebut diantaranya:

1. Mineral Logam, berupa emas primer, emas sekunder, dan bijih besi.
2. Mineral Non Logam, berupa pasir kuarsa, bentonit, kaolin, mika, dan batu gamping.

3. Batu permata, berupa intan dan kecubung
4. Mineral energi, berupa batubara.

Berikut adalah peta mengenai sebaran spasial formasi geologi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.




**Gambar 2.1.3 Peta Persebaran Formasi Geologi di Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2045

Kalimantan Tengah terdiri dari 45 formasi geologi dengan formasi terbesar adalah Formasi Dahor dengan luas sekitar 21,9% dari total luas Kalimantan Tengah. Formasi terkecilnya adalah Formasi Basal dengan luas 0,003% dari total Kalimantan Tengah. Berikut merupakan rincian Formasi Geologi di Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.1.3 Formasi Geologi dan Luasannya di Provinsi Kalimantan Tengah**

| No. | Formasi Geologi | Luas (Ha) | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Formasi Dahor | 3.364.540,2 | 21,9 |
| 2 | Endapan Aluvium | 2.761.136,0 | 17,9 |
| 3 | Tonalit Sepauk | 1.924.200,3 | 12,5 |
| 4 | Formasi Warukin | 843.117,1 | 5,5 |

| No. | Formasi Geologi | Luas (Ha) | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|
| 5 | Batupasir Haloq | 818.819,7 | 5,3 |
| 6 | Komplek Matan | 773.222,3 | 5,0 |
| 7 | Endapan Talus | 737.495,0 | 4,8 |
| 8 | Granit Sukadana | 644.137,8 | 4,2 |
| 9 | Formasi Batu Ayau | 396.156,6 | 2,6 |
| 10 | Formasi Tanjung | 388.671,2 | 2,5 |
| 11 | Kelompok Selangkai | 369.144,6 | 2,4 |
| 12 | Batuan Gunungapi Malasan | 306.050,5 | 2,0 |
| 13 | Batupasir Haloq & Formasi Batu | 298.921,4 | 1,9 |
| 14 | Formasi Pamaluan | 268.993,8 | 1,7 |
| 15 | Malihan Pinoh | 252.955,2 | 1,6 |
| 16 | Formasi Purukcahu | 250.174,1 | 1,6 |
| 17 | Formasi Karamuan | 171.605,0 | 1,1 |
| 18 | Komplek Busang | 163.419,1 | 1,1 |
| 19 | Formasi Berai | 120.371,5 | 0,8 |
| 20 | Formasi Ujoh Bilang | 107.574,9 | 0,7 |
| 21 | Batuan Gunungapi Kerabai | 86.838,1 | 0,6 |
| 22 | Intrusi Sintang | 48.864,1 | 0,3 |
| 23 | Formasi Mentemoi | 39.756,2 | 0,3 |
| 24 | Kelompok Mandai | 36.468,5 | 0,2 |
| 25 | Formasi Pitap | 35.100,9 | 0,2 |
| 26 | Formasi Tuyu | 31.430,0 | 0,2 |
| 27 | Batuan Gunungapi Metulang | 27.480,3 | 0,2 |
| 28 | Endapan Rawa | 26.359,3 | 0,2 |
| 29 | Granit Mandahan | 16.124,6 | 0,1 |
| 30 | Granit Laur | 10.020,8 | 0,1 |
| 31 | Formasi Palaubalang | 9.758,2 | 0,1 |
| 32 | Endapan Sungai | 9.409,6 | 0,1 |
| 33 | Formasi Mentarang | 8.785,2 | 0,1 |
| 34 | Formasi Haruyam | 7.401,3 | 0,048 |
| 35 | Endapan Pantai | 7.396,9 | 0,048 |
| 36 | Basal Bunga | 4.760,2 | 0,031 |
| 37 | Muaratewe | 4.499,8 | 0,029 |
| 38 | Granit Belawayan | 4.309,7 | 0,028 |
| 39 | Granit Kelai | 4.141,3 | 0,027 |
| 40 | Formasi Kuaro | 3.147,2 | 0,020 |
| 41 | Anggota Batupasir Lemmuring | 2.936,5 | 0,019 |
| 42 | Kuarsit | 2.703,7 | 0,018 |
| 43 | Anggota Batugamping Jangkan | 1.161,9 | 0,008 |
| 44 | Komplek Ketapang | 798,3 | 0,005 |
| 45 | Basal | 441,9 | 0,003 |

| No. | Formasi Geologi | Luas (Ha) | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|
| | **Total** | **15.261.582,2** | **100** |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2045

### 2.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Terdapat 11 sungai besar dan 33 sungai kecil atau anak sungai yang membentang di sepanjang Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hulu sungai berada di bagian utara. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang dengan panjang sungai mencapai 900 km. Pada bagian hulu sungai terdapat anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi. Sungai-sungai besar memiliki kemiringan rendah hingga ke bagian tengah. Rawa gambut dapat ditemukan di bagian tengah, sedangkan rawa pasang surut terletak di bagian selatan/hilir. Rincian nama sungai besar di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagaimana gambar berikut:

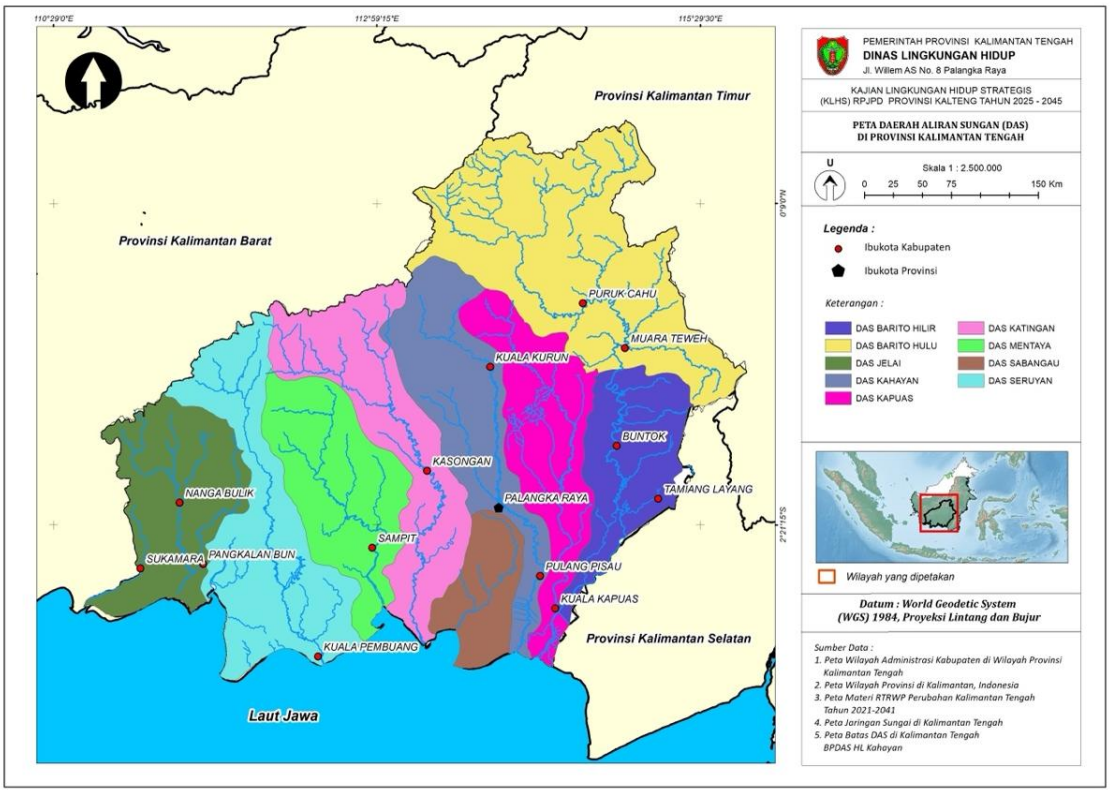
**Tabel 2.1.4 Nama Sungai Besar menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Jelai | 200 | 150 | 8 |
| 2 | Sungai Arut | 250 | 100 | 4 |
| 3 | Sungai Lamandau | 300 | 150 | 6 |
| 4 | Sungai Kumai | 175 | 250 | 6 - 9 |
| 5 | Sungai Seruyan | 350 | 250 | 5 |
| 6 | Sungai Mentaya | 400 | 350 | 6 |
| 7 | Sungai Katingan | 650 | 250 | 3 – 6 |
| 8 | Sungai Sebangau | 200 | 100 | 5 |
| 9 | Sungai Kahayan | 600 | 450 | 7 |
| 10 | Sungai Kapuas | 600 | 450 | 6 |
| 11 | Sungai Barito | 900 | 350 – 500 | 6 - 14 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2045

Kalimantan Tengah memiliki dua Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL), yaitu BPDASHL Barito dan BPDASHL Kahayan. BPDASHL Barito melakukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan, serta beberapa DAS lintas provinsi dengan Provinsi Kalimantan Selatan. BPDASHL Kahayan melakukan pengelolaan DAS yang berada

di wilayah administratif Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara, dan Kota Palangkaraya, serta beberapa DAS lintas provinsi dengan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun sebaran DAS dapat dilihat pada gambar berikut:




**Gambar 2.1.4 Peta Pembagian Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2045

### 2.1.1.6 Kondisi Klimatologi

Secara geografis wilayah pesisir Kalimantan Tengah dekat dengan garis khatulistiwa. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi iklim wilayah ini yang menyebabkan fluktuasi iklim yang terjadi sepanjang tahun relatif kecil, sehingga tidak terdapat perbedaan yang cukup ekstrem antara musim hujan dan musim kemarau. Sebagian Kalimantan Tengah termasuk kategori iklim tipe munson. Wilayah yang bertipe demikian sangat dipengaruhi oleh angin muson yang selalu berubah menurut musim. pada bulan Oktober - Maret angin muson bergerak dari barat laut ke Tenggara titik sedangkan Pada sepanjang April - September angin bergerak dari tenggara ke barat laut.

Menurut Klasifikasi Koppen dalam Panekoek (1918) tentang pembagian zona iklim, wilayah studi termasuk dalam daerah beriklim tropika basah (tipe iklim Af/Am) dengan musim kemarau (musim kering) yang singkat atau tipe iklim A (sangat basah) dengan nilai Q sebesar 0,064 menurut Schmidt dan Ferguson dengan jumlah bulan kering (< 60 mm) sebanyak 1 sampai 2 bulan dalam satu tahun. Menurut Koppen (1918) dalam Kartasapoetra (1988), daerah dengan tipe iklim demikian memiliki karakteristik suhu udara selalu tinggi dengan suhu bulanan terendah > 20 C, curah hujan selalu tinggi sepanjang tahun dan hujan total tahunan lebih dari 2.000 mm. Pada bulan-bulan kemarau daerah ini terasa panas dan kering, sebaliknya di waktu musim hujan (waktu hujan deras) terjadi banjir. Bulan dengan curah hujan terendah (200 mm) terjadi pada bulan Oktober – April.

Kecepatan angin maksimum bulanan diperoleh dari data SM Bandar Udara Iskandar selama 10 tahun terakhir yakni tahun 2006 – 2016 pada ketinggian 25 m di atas permukaan laut untuk daerah cakupan perairan Laut Jawa diperoleh arah angin bulanan maksimum sebagian besar dari arah tenggara (23,2%), kemudian dari barat laut (18,4%). Kecepatan angin bulanan maksimum dominan berkisar pada interval 5,4 – 7,9 m/s (42,4%), kemudian pada interval 7,9 – 10,7 m/s (39,2%). Kecepatan terbesar yakni ≥ 13,8 m/s hanya 0,8%. Pada musim barat (bulan Desember – Februari) arah angin dominan berasal dari barat laut (43,8%), untuk kecepatannya dominan berkisar pada interval 5,4 – 7,9 m/s (50%). Kecepatan angin terbesar (10,7 – 13,8 m/s) pada musim barat hanya sebesar 21,9%.

Musim peralihan I (bulan Maret – Mei) arah angin sudah lebih bervariasi dengan arah terbanyak berasal dari tenggara dan selatan (masing-masing 18,2%), untuk kecepatannya masih dominan berkisar pada interval 5,4 – 7,9 m/s (48,5%). Musim timur (bulan Juni – Agustus) arah angin sudah dominan berasal dari arah tenggara (50%), untuk kecepatannya dominan meningkat pada interval 7,9 – 10,7 m/s (50%). Musim peralihan II (bulan September – Nopember) arah angin kembali bervariasi meskipun arah terbanyak masih berasal dari tenggara

(23,3%), untuk kecepatannya masih dominan berkisar pada interval 5,4 – 7,9 m/s meskipun menurun frekuensinya (43,3%). Kecepatan angin maksimum menunjukkan perilaku perubahan yang ekstrim. Hal ini pada dasarnya menggambarkan dampak terjadinya kecenderungan perubahan iklim yang sangat mungkin akibat dari perubahan iklim global.

Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu. Berdasarkan pengamatan klimatologi dan geofisika (BMKG), suhu udara maksimum dan rata-rata suhu udara tertinggi tahun 2020 mencapai 35,15 derajat celcius berada Muara Teweh dan Buntok dan mencapai 34.53 derajat celcius berada di Pangkalan Bun. Selain itu, persentase penyinaran matahari tertinggi berada di Pangkalan Bun sebesar 66,5%, namun curah hujan bulanan tertinggi berada di Muara Teweh dengan jumlah curah hujan sebesar 3.035,1 mm.

**Tabel 2.1.5 Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020**

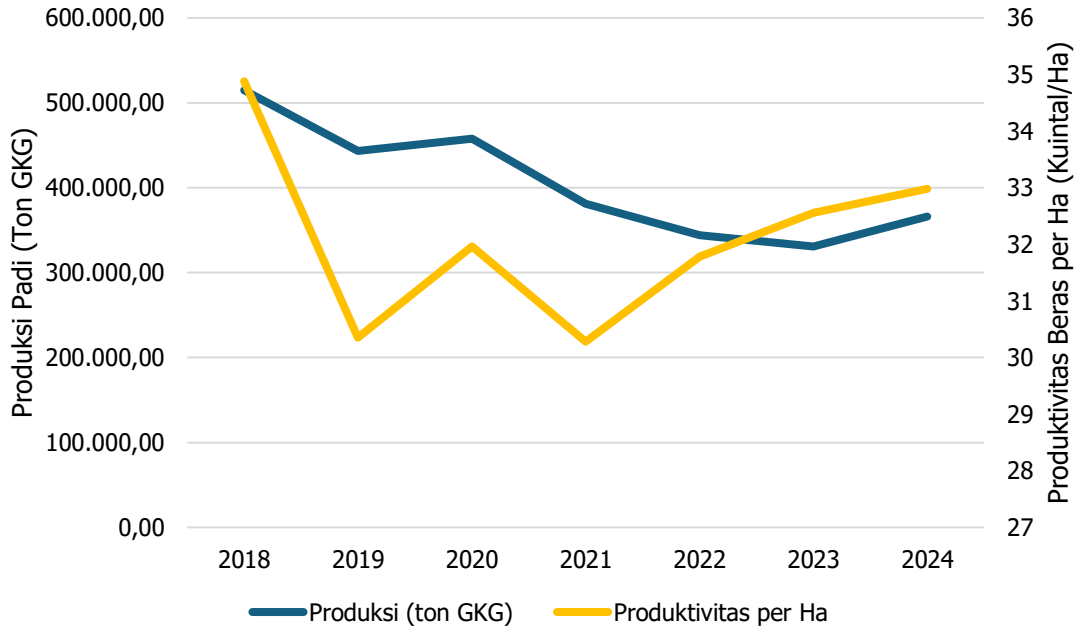
| No | Indikator | Stasiun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pangkalan Bun | Sampit | Buntok | Muara Teweh | Palangka Raya |
| 1 | Suhu Udara (°C) | | | | | |
| | Maksimum | 34,53 | 34,73 | 35,15 | 35,15 | 34,75 |
| | Minimum | 22,39 | 21,81 | 21,2 | 21,36 | 22,4 |
| 2 | Rata-rata Kelembapan Udara (%) | 83 | 84 | 84 | 84 | 81 |
| 3 | Rata-rata Tekanan Udara (MB) | 1.010,7 | 1.011,5 | 1.016,2 | 1.012,3 | 1.013,6 |
| 4 | Rata-rata Kecepatan Angin (knot) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Curah Hujan Bulanan (mm) | 2.670 | 2.449,90 | 1.525,50 | 3.035,10 | 2.326,40 |
| 6 | Penyinaran Matahari (%) | 66,5 | 53,7 | 58 | 65,4 | 60,3 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

### 2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

#### 2.1.2.1 Potensi Pertanian

Salah satu komoditas sektor pertanian Provinsi Kalimantan Tengah ialah beras. Namun, terdapat tren penurunan produksi padi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik terendah produksi terjadi pada tahun 2023 dengan sedikit kenaikan pada data tahun 2024. Di sisi lain, walaupun terjadi penurunan produksi, terdapat tren kenaikan terhadap produktivitas produksi padi di Provinsi Kalimantan Tengah. Per 2024, setiap Ha sawah yang ditanami padi mampu menghasilkan sekitar 32,98 kuintal per Ha. Data mengenai perkembangan produksi dan produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagai berikut:




**Gambar 2.1.5 Produksi dan Produktivitas Produksi Padi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

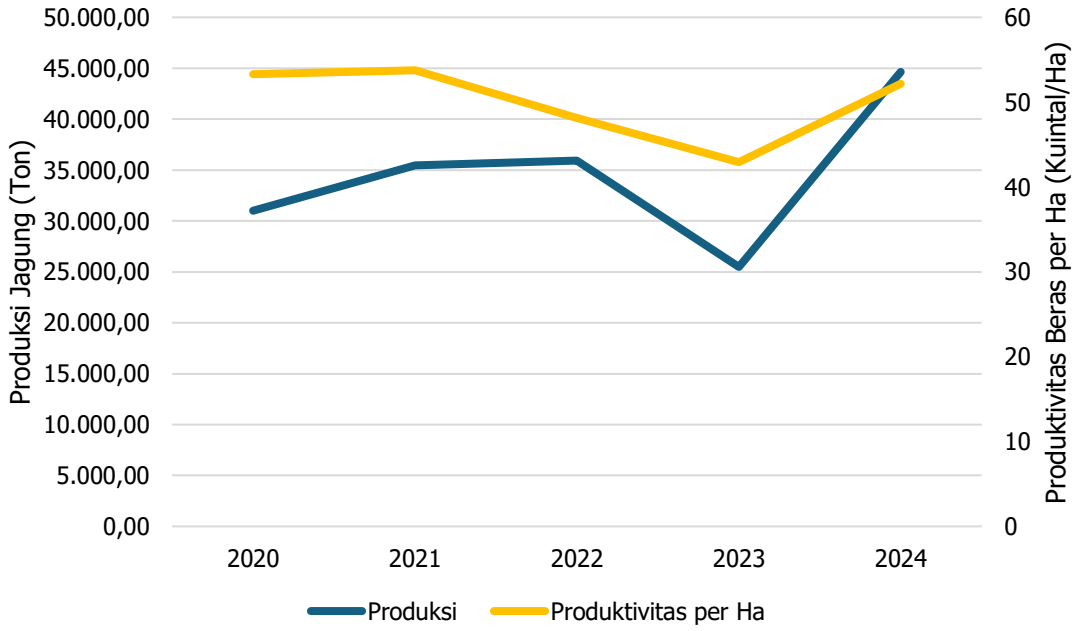
Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau merupakan dua kabupaten dengan tingkat produksi beras tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian tersebut sejalan dengan keberadaan proyek *food estate.* Tabel distribusi produksi padi di setiap kabupaten/kota tahun 2020 – 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1.6 Produksi Padi Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 (dalam ton GKG)**

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kotawaringin Barat | 1.554,28 | 124,75 | 330,44 | 442,56 | 599,15 |
| Kotawaringin Timur | 58.166,38 | 15.551,73 | 29.160,84 | 26.098,98 | 30.435,16 |
| Kapuas | 223.423,3 | 56.447,2 | 153.060 | 137.516,7 | 164.582 |
| Barito Selatan | 15.171,14 | 1.747,99 | 6.170,98 | 6.108,75 | 6.686,41 |
| Barito Utara | 6.621,46 | 2.329,64 | 8.092,07 | 8.021,16 | 7.626,77 |
| Sukamara | 3.033,67 | 530,17 | 2.091,58 | 1.608,48 | 1.854,57 |
| Lamandau | 8.441,46 | 1.669,48 | 894,55 | 730,86 | 1.039,26 |
| Seruyan | 9.870,26 | 3.082,68 | 6.897,39 | 8.767,53 | 8.404,19 |
| Katingan | 48.572,83 | 13.163,74 | 30.994,22 | 36.292,31 | 39.194,43 |
| Pulang Pisau | 60.366,46 | 24.702,14 | 85.923,18 | 83.087,65 | 98.279,43 |
| Gunung Mas | 1963,07 | 369,61 | 568,9 | 639,56 | 265,89 |
| Barito Timur | 137.60,31 | 5.291,88 | 17.525,59 | 20.367,18 | 18.338,31 |
| Murung Raya | 7007,37 | 843,05 | 2184,04 | 1045,85 | 871,68 |
| Palangka Raya | - | 15,99 | 24,93 | 53,49 | 0,78 |
| **Kalimantan Tengah** | 457.952 | 125.870,1 | 343.918,8 | 330.781,1 | 378.178 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain padi, produksi pertanian yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah termasuk komoditas jagung. Data produksi jagung di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagaimana gambar berikut:




**Gambar 2.1.6 Produksi Jagung di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

Data menunjukkan produksi jagung mengalami fluktuasi selama periode 2020 – 2024, tetapi mengalami peningkatan yang besar pada produksi tahun 2024. Pada tahun tersebut, jumlah jagung yang diproduksi sebesar hampir 45 ribu ton. Produktivitas lahan yang ditanami jagung tampak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan dari proses produksi jagung oleh para petani di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain pertanian dalam konteks tanaman, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki produksi ternak dan unggas yang cukup besar. Pada produksi ternak, jenis daging sapi dan babi merupakan daging yang banyak diproduksi sepanjang tahun di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, terdapat produksi daging kerbau, kambing, dan domba dalam jumlah yang lebih sedikit. Data menunjukkan bahwa terdapat pola fluktuatif dalam produksi ternak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua gambar berikut menunjukkan perkembangan produksi ternak dan unggas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 hingga 2023. Perkembangan produksi ternak di provinsi tersebut terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.7 Produksi Komoditas Ternak di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023 (dalam ton)**

| Komoditas Ternak | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sapi | 3.786,73 | 3.998,77 | 3.800,34 | 3.944,62 | 4.026,73 |
| Kerbau | 85,02 | 93,14 | 94,58 | 70,76 | 48,75 |
| Kambing | 215,26 | 230,28 | 234,89 | 237,23 | 218,17 |
| Domba | 2,04 | 0,57 | 0,56 | 0,32 | 0,00 |
| Babi | 1.808,70 | 2.447,89 | 2.495,86 | 1.890,57 | 1.949,35 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (data terakhir tersedia tahun 2023)

Di samping produksi ternak, Provinsi Kalimantan Tengah juga menghasilkan produksi unggas berupa ayam, itik, dan burung puyuh. Secara umum, ayam pedaging menjadi mayoritas produksi unggas yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Tengah, disusul ayam kampung dan itik. Terdapat peningkatan yang cukup besar pada produksi ayam petelur pada tahun 2022. Produksi itik, itik manila, dan burung puyuh mengalami tren kenaikan setiap

tahunnya, tetapi produksi ayam kampung dan ayam pedaging mengalami fluktuasi sepanjang tahun observasi.

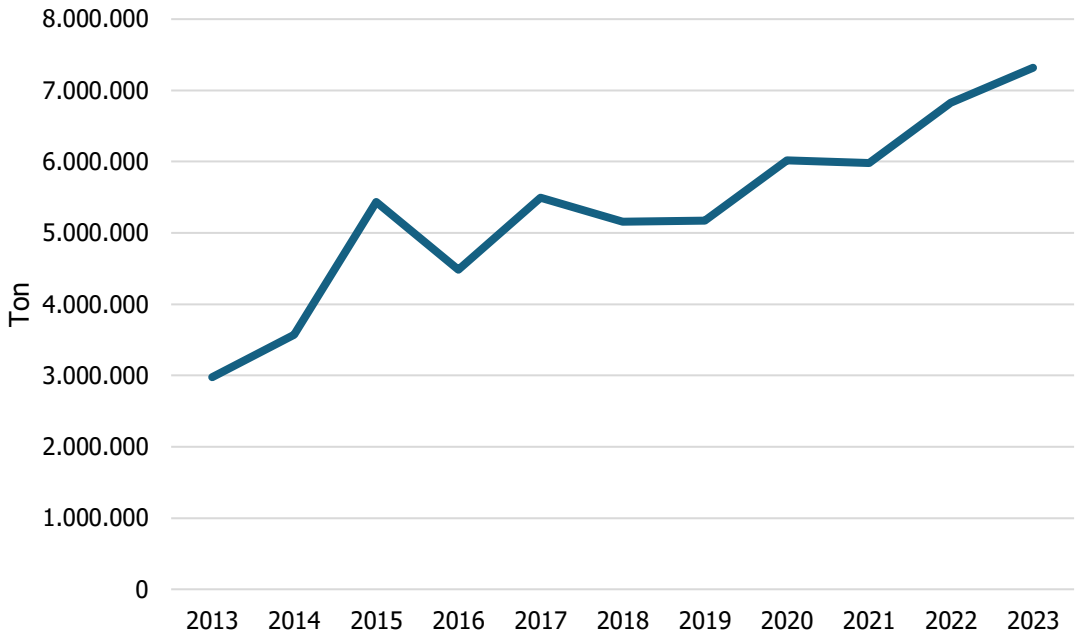
**Tabel 2.1.8 Produksi Komoditas Unggas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023 (dalam ton)**

| Komoditas Unggas | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ayam Kampung | 2.180,88 | 2.058,72 | 2.099,88 | 2.472,11 | 2.543,78 |
| Ayam Petelur | 48,66 | 53,75 | 54,83 | 400,29 | 411,50 |
| Ayam Pedaging | 38.138,71 | 26.556,49 | 26.832,01 | 37.848,08 | 39.440,16 |
| Itik | 155,87 | 178,74 | 182,32 | 238,66 | 242,44 |
| Itik Manila | 10,12 | 13,67 | 13,94 | 43,73 | 44,44 |
| Burung Puyuh | 2,57 | 2,96 | 3,02 | 7,39 | 7,51 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (data terakhir tersedia tahun 2023)

### 2.1.2.2 Potensi Perkebunan

Salah satu komoditas perkebunan terbesar Provinsi Kalimantan Tengah ialah kelapa sawit. Seiring waktu, besaran produksi kelapa sawit mengalami peningkatan yang signifikan. Per 2023, produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah telah berada di angka 7 juta ton. Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Seruyan merupakan tiga kabupaten dengan tingkat produksi tertinggi di Kalimantan Tengah. Berkaca pada hal tersebut, ketiga kabupaten tersebut berpotensi besar dalam pelaksanaan hilirisasi industri kelapa sawit.




**Gambar 2.1.7 Produksi Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 – 2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik

**Tabel 2.1.9 Produksi Komoditas Kelapa Sawit per Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah**
**Tahun 2019-2023 (dalam ton)**

| Kabupaten | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kotawaringin Barat | 774.341 | 936.827 | 936.855 | 937.606 | 937.659 |
| Kotawaringin Timur | 1.843.177 | 2.068.584 | 2.063.208 | 2.070.339 | 2.074.479 |
| Kapuas | 380.286 | 496.371 | 496.522 | 514.541 | 541.005 |
| Barito Selatan | 14.387 | 14.114 | 14.114 | 14.809 | 9.824 |
| Barito Utara | 105.870 | 81.075 | 81.241 | 120.960 | 121.050 |
| Sukamara | 176.472 | 177.413 | 177.734 | 480.851 | 336.845 |
| Lamandau | 554.094 | 580.957 | 580.235 | 568.214 | 730.680 |
| Seruyan | 955.747 | 1.063.168 | 875.723 | 1.420.604 | 1.419.921 |
| Katingan | 159.751 | 233.592 | 233.665 | 227.500 | 227.707 |
| Pulang Pisau | 89.353 | 237.867 | 125.217 | 298.468 | 249.416 |
| Gunung Mas | 100.347 | 102.087 | 102.092 | 107.865 | 107.865 |
| Barito Timur | 19.794 | 19.884 | 290.848 | 59.478 | 546.518 |
| Murung Raya | - | - | - | - | 190 |
| Palangka Raya | 1.018 | 3.415 | 3.415 | 5.546 | 14.597 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (data terakhir tersedia tahun 2023)

Selain kelapa sawit, terdapat potensi perkebunan lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti kelapa kopra, karet, hingga kopi. Ketiga komoditas tersebut tersebar produksinya di hampir seluruh kabupaten/kota. Selain itu, provinsi ini juga menghasilkan produk perkebunan lainnya walaupun tidak menghasilkan jumlah yang banyak, seperti kakao, lada, jambu mete, pinang, kemiri, hingga aren. Data mengenai produksi komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1.10 Produksi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 (dalam ton)**

| No | Komoditas | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Kelapa Kopra | - | 16.390,52 | - | 16.613,88 | 16.548 |
| 2 | Karet | 167.679,2 | 167.956 | 187.027,2 | 187.151,5 | 181.625,1 |
| 3 | Kopi | 404,66 | 404,46 | 369,49 | 231,01 | - |
| 4 | Kakao | 1.496 | 1.557,38 | 1.623,13 | 1.536,85 | 1.576,38 |
| 5 | Lada | 203,42 | 203,42 | 199,15 | 192,09 | 180,43 |
| 6 | Jambu Mete | 6,95 | 8,85 | 5,1 | 6,4 | 5,2 |
| 7 | Pinang | 53,89 | 53,02 | 50,07 | 54,89 | 54,95 |
| 8 | Kemiri | 11,43 | 15,16 | 13,1 | 12,51 | 10,51 |
| 9 | Aren | 8,29 | 11,62 | 10,68 | 12,09 | 11,2 |

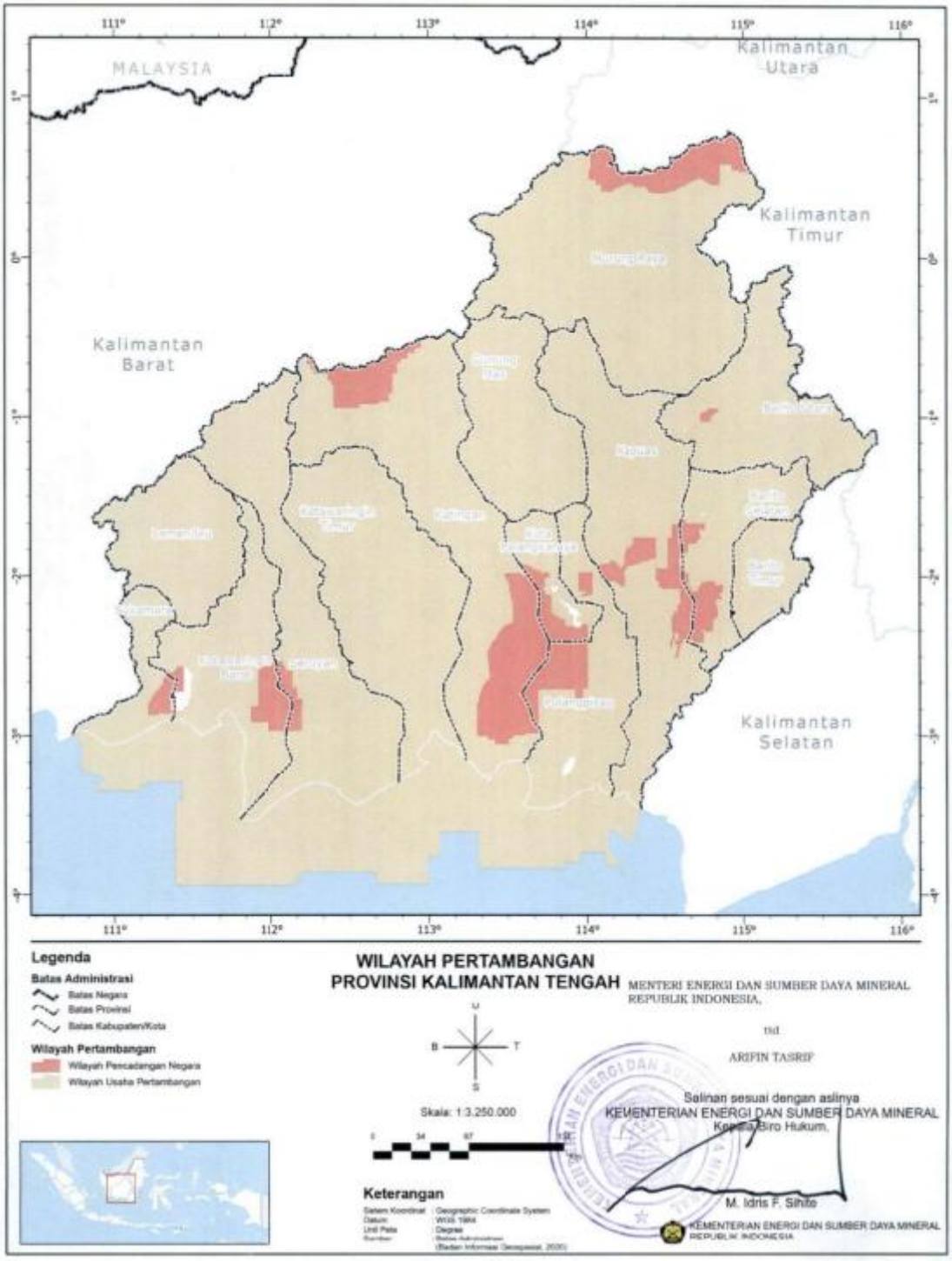
Sumber: Badan Pusat Statistik (data terakhir tersedia tahun 2023)

### 2.1.2.3 Potensi Pertambangan

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas di Indonesia juga memiliki potensi dalam sektor pertambangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 disebutkan bahwa awasan peruntukan pertambangan yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas

kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

Sementara itu, kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi berada di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Detailnya dapat ditinjau pada Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Peta Sebaran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Aktif Kalimantan Tengah tahun 2014 berikut ini.




**Gambar 2.1.8 Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 109.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah

### 2.1.2.4 Potensi Kehutanan

Kawasan Hutan dan perkembangannya pengukuhan kawasan hutan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6627/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020. Luasan kawasan hutan per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

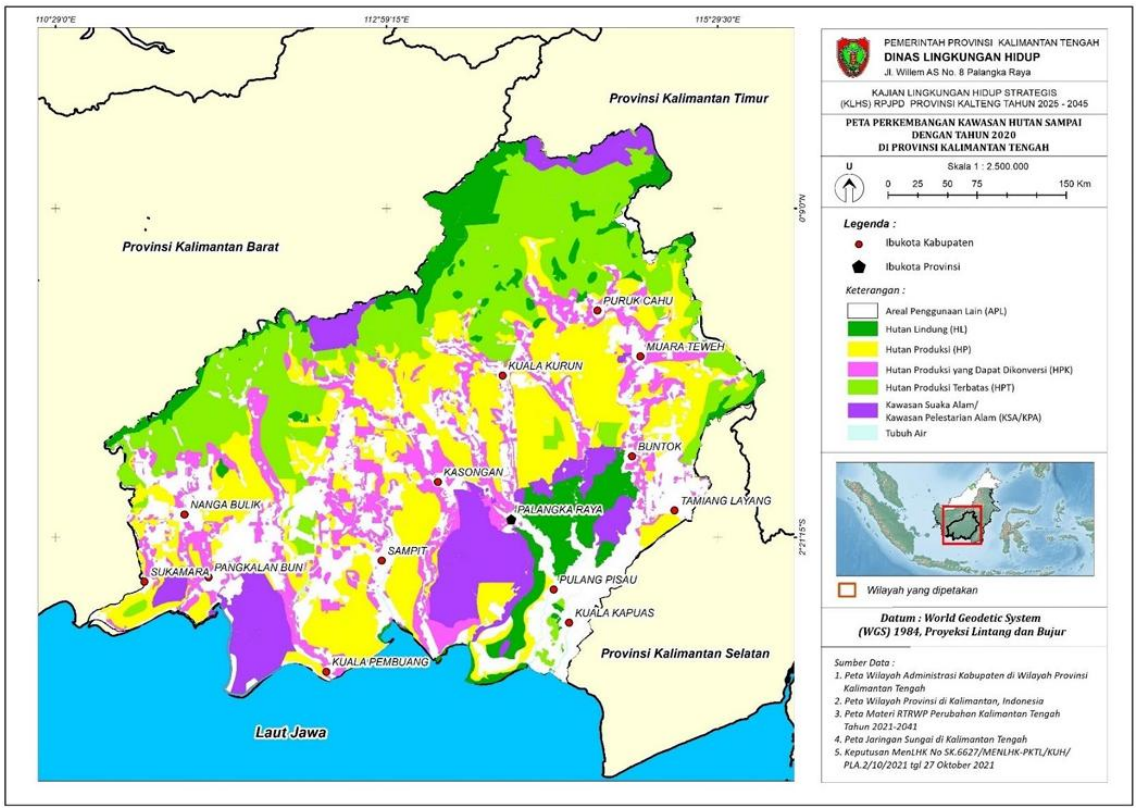
**Tabel 2.1.11 Luasan Kawasan Hutan dan Non Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Kabupaten/Kota | Non Kawasan Hutan | | Kawasan Hutan | | Luas (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hektar | % | Hektar | % | |
| 1 | Barito Selatan | 178.876 | 5,2 | 448354,3 | 3,8 | 627.230 |
| 2 | Barito Timur | 209.445,0 | 6,1 | 112861,5 | 0,9 | 322.307 |
| 3 | Barito Utara | 190.072,2 | 5,5 | 809098,2 | 6,8 | 999.170 |
| 4 | Gunung Mas | 212.335,5 | 6,1 | 722461,0 | 6,1 | 934.797 |
| 5 | Kapuas | 451.737,0 | 13,1 | 1261798,2 | 10,6 | 1.713.535 |
| 6 | Katingan | 259.231,8 | 7,5 | 1786837,9 | 15 | 2.046.070 |
| 7 | Kotawaringin Barat | 262.276,9 | 7,6 | 684891,2 | 5,7 | 947.168 |
| 8 | Kotawaringin Timur | 569.649,5 | 16,5 | 990063,1 | 8,3 | 1.559.713 |
| 9 | Lamandau | 216.561,8 | 6,3 | 542381,8 | 4,5 | 758.944 |
| 10 | Murung Raya | 115.434,6 | 3,3 | 2254028,5 | 18,9 | 2.369.463 |
| 11 | Pulang Pisau | 296.761,2 | 8,6 | 673127,1 | 5,6 | 969.888 |
| 12 | Seruyan | 339.966,0 | 9,8 | 1186048,1 | 9,9 | 1.526.014 |
| 13 | Sukamara | 96.458,8 | 2,8 | 233795,8 | 2 | 330.255 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 54.408,8 | 1,60 | 231838,8 | 1,90 | 286.248 |
| Jumlah Total | | 3.453.215 | 100,0 | 11937585,5 | 100,0 | 15.390.801 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

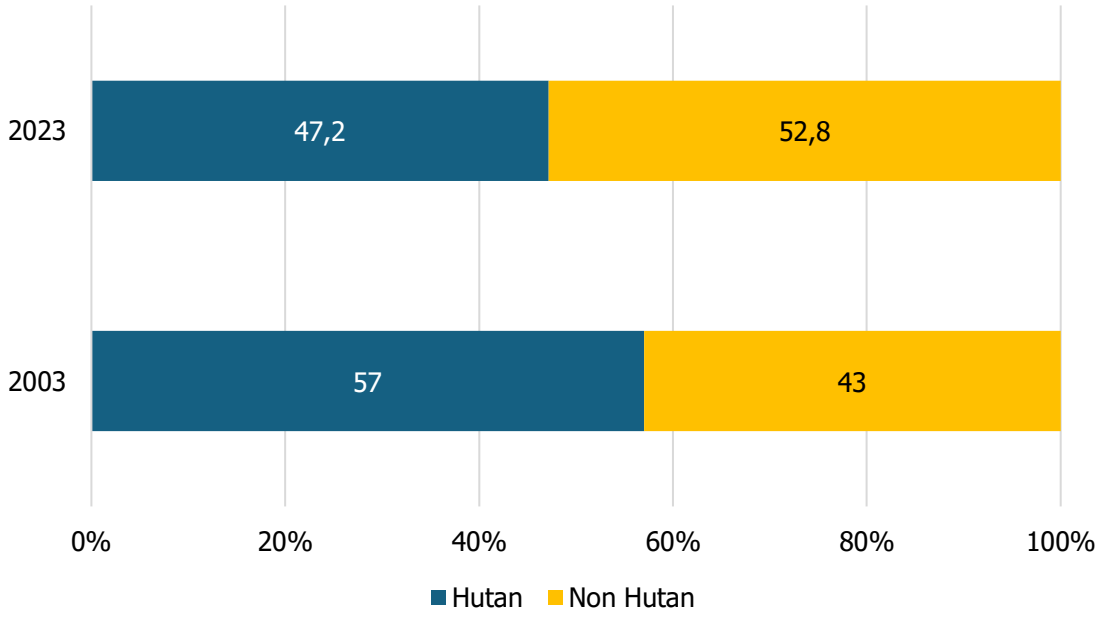
Luas hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat di konversi pada tahun 2023 berturut-turut sebesar 1.343.119,03 hektar, 1.602.935,59 hektar, 3.274.086,43 hektar, 3.779.739,64 hektar, dan 1.900.751,14 hektar. Luas Kawasan hutan dan konservasi perairan secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 12.034.613 hektar. Kabupaten yang memiliki kawasan hutan terluas di Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas

±2.254.028 ha atau 18.9% dari total kawasan hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Sebaliknya Kabupaten yang memiliki wilayah Non kawasan hutan terluas adalah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas ±569.649 ha atau 16,5% dari luasan non kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Berikut adalah sebaran spasial hutan di Kalimantan Tengah.




**Gambar 2.1.9 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

Proporsi hutan di Kalimantan Tengah terus menurun dalam 20 tahun terakhir. Sekarang ini proporsi hutan lebih rendah dibandingkan non hutan di Kalimantan Tengah. Hutan mempunyai persentase tutupan 47,2%, sedangkan non hutan berada di angka 52,8 % dari luasan provinsi Kalimantan Tengah. Gambar berikut menampilkan perbedaan persentase luasan hutan dan non hutan di Kalimantan Tengah.




**Gambar 2.1.10 Persentase Tutupan Hutan dan Tutupan Non Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 dan 2023**

## 2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

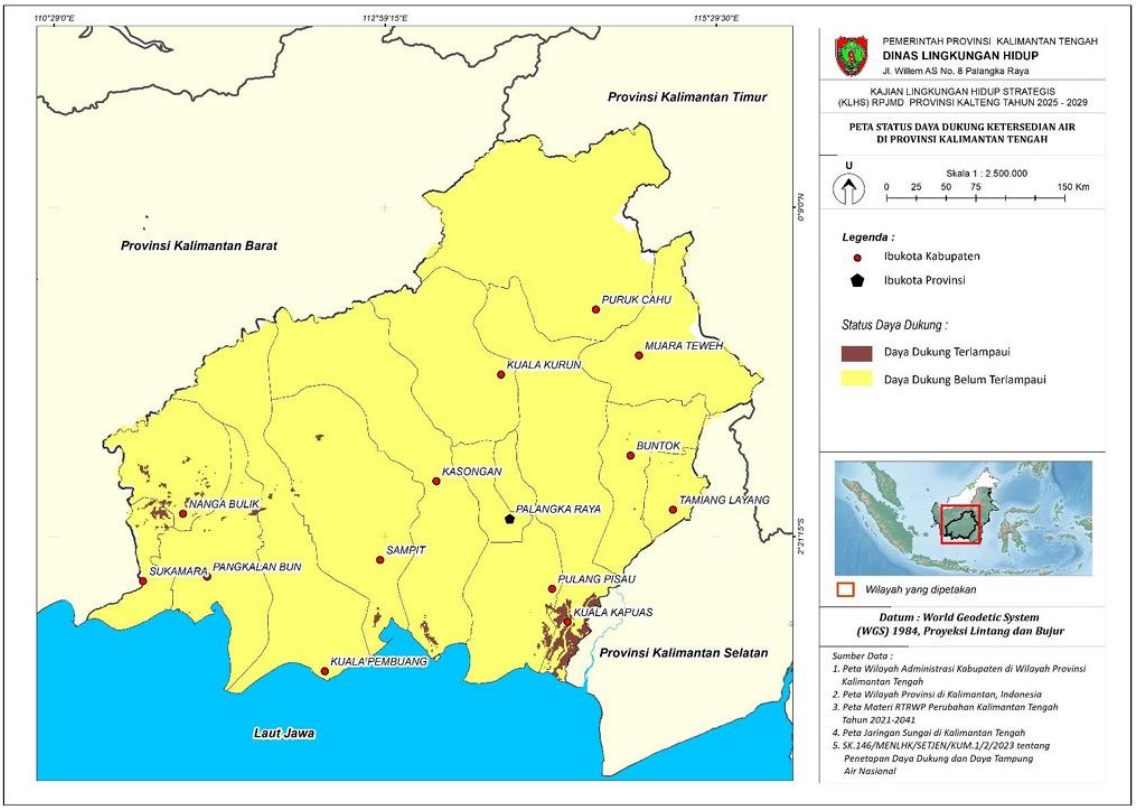
### 2.1.3.1 Status Daya Dukung Penyediaan Air

Perkembangan wilayah pada suatu daerah akan menyebabkan kebutuhan air terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Hampir semua aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan, selalu erat kaitannya dengan kebutuhan akan air. Pemanfaatan air menjadi penting untuk direncanakan agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Namun demikian, kecenderungan yang terjadi adalah terus meningkatnya kebutuhan akan air dibarengi dengan semakin berkurangnya ketersediaan air. Dalam rangka mencapai keseimbangan antara kebutuhan air dan ketersediaan air di masa mendatang, diperlukan upaya pengkajian komponen-komponen kebutuhan air, serta efisiensi penggunaan air. Komponen yang paling berpengaruh untuk menghitung neraca air adalah kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air domestik. Dengan demikian hendaknya dilakukan suatu perencanaan yang tepat agar kebutuhan air dapat terpenuhi.

Khusus kebutuhan air untuk irigasi diperlukan pengkajian dan perencanaan unit kebutuhan airnya secara cermat dan teliti. Hal ini penting dilakukan karena kebutuhan air untuk irigasi merupakan komponen yang paling tinggi kebutuhan airnya.

Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa total kebutuhan air minum dan rumah tangga adalah 120 l/ha per kapita. Sedangkan kebutuhan air non-domestik dihitung dengan pemberian bobot terhadap kegiatan pengelolaan lahan yang terdapat di Kalimantan Tengah, seperti perkebunan sawit, kebun campuran, perladangan, dan sawah. Pembobotan dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan air dari masing-masing pengelolaan lahan. Seperti halnya sawah yang diberikan bobot 5 dari 5 karena dalam pengelolaannya membutuhkan air dalam jumlah besar. Berkebalikan dengan perladangan yang diberi bobot 1 dari 5 karena hanya membutuhkan air dalam jumlah kecil dalam pengelolaannya.

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki kebutuhan air yang belum melampaui ketersediaan air di wilayah tersebut (area berwarna hijau). Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki area dengan ketersediaan air yang telah terlampaui. Adapun beberapa kabupaten dengan luas wilayah yang ketersediaan airnya terlampaui yaitu Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, dengan persentase luas area berturut-turut seluas 0,1%, 0,19%, 0,02%, 8,29%, 0,92%, 0,11%, 0,70%, 0,06%, 5,65% dan 0,03% dari luas masing-masing kabupaten. Berdasarkan tutupan lahan yang digunakan dalam analisis, tutupan lahan di lokasi yang telah melampaui ketersediaan air, sebagian besar merupakan perkebunan sawit. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Taufiq et al (2013), bahwa perkebunan sawit dapat mengurangi kemampuan lahan dalam menyediakan air hingga mencapai 30% - 40%.




**Gambar 2.1.11 Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan air di Provinsi Kalimantan Tengah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan air, dengan potensi kelebihan ketersediaan air mencapai 162.451.139.206 $m^3$/tahun. Seluruh kabupaten yang memiliki ketersediaan air yang melebihi kebutuhan. Selisih yang paling besar berada di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan sebesar 34.750.391.047 $m^3$/tahun dan 23.058.921.956 $m^3$/tahun.

**Tabel 2.1.12 Luas Area Dengan Status Ketersediaan Air di Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Kabupaten/ Kota | Status Ketersediaan Air (Ha) | | | | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belum Terlampaui | % | Terlampaui | % | |
| 1 | Barito Selatan | 649.013,2 | 99,9 | 680,3 | 0,1 | 649.694 |
| 2 | Barito Timur | 357.735,3 | 99,8 | 667,5 | 0,2 | 358.403 |
| 3 | Barito Utara | 1.044.438,9 | 100 | 257,6 | 0,02 | 1.044.697 |
| 4 | Gunung Mas | 955.480,8 | 100 | - | - | 955.481 |
| 5 | Kapuas | 1.542.366,2 | 91,7 | 139.334,7 | 8,3 | 1.681.701 |

| No | Kabupaten/ Kota | Status Ketersediaan Air (Ha) | | | | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belum Terlampaui | % | Terlampaui | % | |
| 6 | Katingan | 2.019.958,2 | 99,1 | 18.820,5 | 0,9 | 2.038.779 |
| 7 | Kotawaringin Barat | 980.159,9 | 99,9 | 1.108,8 | 0,1 | 981.269 |
| 8 | Kotawaringin Timur | 1.528.207,9 | 99,3 | 10.838,5 | 0,7 | 1.539.046 |
| 9 | Lamandau | 763.275,7 | 99,9 | 426,7 | 0,1 | 763.702 |
| 10 | Murung Raya | 2.350.726,2 | 100 | - | - | 2.350.726 |
| 11 | Pulang Pisau | 897.389,4 | 94,3 | 53.770,5 | 5,7 | 951.160 |
| 12 | Seruyan | 1.482.972,4 | 100 | - | - | 1.482.972 |
| 13 | Sukamara | 325.250 | 100 | - | - | 325.250 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 267.836,6 | 99,97 | 85,60 | 0,03 | 267.922 |
| Jumlah Total | | 15.164.810,7 | | 225.990,7 | 16,15 | 15.390.801,4 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

Jumlah populasi yang dapat ditampung dianalisis dengan melihat ketersediaan air. Dengan membagi standar kebutuhan air untuk hidup layak sebesar 800 $m^3$/kapita/tahun maka dapat diketahui populasi yang dapat ditampung. Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Tengah masih dapat menampung populasi sebesar 203.063.924 Jiwa. Ketersediaan air dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tutupan lahan, jenis tanah dan iklim. Dalam kajian ini, faktor dominan dalam perhitungan adalah tutupan lahan, karena tutupan lahan memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Menurut ICRAF (2017), perubahan lahan pada suatu wilayah akan perubahan terhadap kondisi hidrologis wilayah tersebut, seperti perubahan besaran aliran permukaan dan infiltrasi. Lebih jauh, ICRAF menjelaskan bahwa perubahan lahan hutan menjadi perkebunan sawit, maupun pertanian lahn kering dan sawah, dapat memicu kenaikan aliran permukaan di masa mendatang. Hal ini akan mengurangi kemampuan ilfiltrasi lahan sehingga ketersediaan air menjadi berkurang. Pada tahun kajian, tidak keseluruhan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kebutuhan air yang melampaui ketersediaan airnya. Masih terdapat 40% dari seluruh area perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah yang kebutuhan airnya tidak melampuai ketersediaan air di areanya.

Namun jika tidak dilakukan intervensi ke arah perbaikan lingkungan, maka pada masa yang akan datang ketersediaan air akan semakin berkurang.

**Tabel 2.1.13 Hasil Analisis Selisih Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air**

| No | Kabupaten/Kota | Status Ketersediaan Air ($m^3$/Tahun) | | Selisih | Jumlah Populasi Yang Bisa Ditampung (Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ketersediaan | Kebutuhan | | |
| 1 | Barito Selatan | 7.538.353.576 | 638.702.892 | 6.899.650.684 | 8.624.563 |
| 2 | Barito Timur | 4.072.132.226 | 945.611.842 | 3.126.520.384 | 3.908.150 |
| 3 | Barito Utara | 13.786.526.826 | 1.221.972.964 | 12.564.553.862 | 15.705.692 |
| 4 | Gunung Mas | 11.800.542.527 | 1.867.809.821 | 9.932.732.706 | 12.415.916 |
| 5 | Kapuas | 20.139.307.775 | 4.672.120.827 | 15.467.186.948 | 19.333.984 |
| 6 | Katingan | 25.107.443.778 | 2.048.521.822 | 23.058.921.956 | 28.823.652 |
| 7 | Kotawaringin Barat | 10.794.774.010 | 2.312.424.486 | 8.482.349.524 | 10.602.937 |
| 8 | Kotawaringin Timur | 16.901.893.567 | 5.675.409.868 | 11.226.483.699 | 14.033.105 |
| 9 | Lamandau | 9.576.333.336 | 1.676.146.878 | 7.900.186.458 | 9.875.233 |
| 10 | Murung Raya | 35.840.724.246 | 1.090.333.200 | 34.750.391.046 | 43.437.989 |
| 11 | Pulang Pisau | 10.650.560.826 | 2.172.406.584 | 8.478.154.242 | 10.597.693 |
| 12 | Seruyan | 18.124.427.826 | 3.132.701.720 | 14.991.726.106 | 18.739.658 |
| 13 | Sukamara | 3.731.838.253 | 696.028.972 | 3.035.809.281 | 3.794.762 |
| 14 | Kota Palangkaraya | 2.765.619.462 | 229.147.152 | 2.536.472.310 | 3.170.590 |
| **Jumlah Total** | | **190.830.478.234** | **28.379.339.028** | **162.451.139.206** | **203.063.924** |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga ketersediaan air dalam area pengelolaan lahan seperti perkebunan kelapa sawit adalah melalui penerapan teknik konservasi air. Prinsip konservasi air adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau (Arsyad, 2000). Agus dan Ruijter (2004) menambahkan, penerapan teknik konservasi baik dilakukan pada daerah yang memiliki; (1) daya serap atau infiltrasi rendah, (2) bulan kering lebih dari tiga bulan berturut-turut, (3) curah hujan sangat tinggi pada musim dan (4) memiliki kemiringan lahan yang besar. Di samping itu, penelitian berbeda oleh Julianto (2011), menunjukkan bahwa teknik konservasi air pada lahan perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan pengaruh dalam meningkatkan ketersedian air, tetapi

juga mampu meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air lebih lama, sehingga tidak terjadi kekurangan air pada musim kemarau.

#### 2.1.3.2 Status Daya Dukung Penyediaan Pangan

Kebutuhan terhadap pangan merupakan salah satu keutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dan menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan bergizi layak, aman dan merata serta terjangkau oleh setiap rumah tangga. Pembangunan ekonomi dan sektor lain tidak akan dapat tercapai jika tidak didahului dengan penyelesaian permasalahan pangan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan dan ketahanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, tantangan pembangunan di masa depan adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Penduduk merupakan komponen terpenting dalam suatu ruang. Dikatakan ruang karena memiliki tiga unsur utama, yaitu wilayah (tanah, udara, air), manusia, dan tata kehidupan.

Manusia merupakan komponen yang bersifat dinamis, senantiasa bertambah jumlahnya, dan merupakan mahluk hidup paling kompleks, terutama masalah kebutuhan hidupnya. Manusia membutuhkan pangan untuk dapat berkembang dan beraktivitas. Sementara dalam pemenuhan kebutuhan pangan, ketersediaan pangan menjadi hal yang tidak terpisahkan demi mencapai kecukupan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah tahun 2018, diketahui bahwa dari sektor – sektor tersebut terdapat beberapa komoditi utama yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan masyarakat. Di sisi lain, nilai kebutuhan energi dan pangan diperoleh dari Angka Kecukupan Energi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan Nomor 332 tahun 1994, yaitu sebesar 2.150 Kkal/orang/hari.




**Gambar 2.1.12 Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

Secara keseluruhan kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah belum melampaui ketersediaannya (warna coklat muda). Namun demikian, terdapat area yang kebutuhan pangannya telah melampaui ketersediaanya. Kabupaten/kota dengan persentase luas wilayah yang telah melampaui ketersediaan pangan cukup besar adalah Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Adapun persentase luas per-kabupaten/ kota tersebut secara berturut–turut mencapai 10,6%, 1,1% dan 0,3% dari luas masing–masing kabupaten/ kota. Jika diamati penggunaan lahannya, area yang kebutuhan pangannya telah melampaui ketersediaan pangan cenderung terletak di area permukiman yang padat penduduk. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, kebutuhan pangan akan semakin besar, sehingga cenderung memiliki kebutuhan pangan yang melampaui ketersediaan pangannya.

**Tabel 2.1.14 Luas Area Dengan Status Ketersediaan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Kabupaten/ Kota | Status Ketersediaan Pangan (Ha) | | | | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belum Terlampaui | % | Terlampaui | % | |
| 1 | Barito Selatan | 631.582 | 99,9 | 598 | 0,1 | 632.180 |
| 2 | Barito Timur | 298.479 | 99,9 | 344 | 0,1 | 298.823 |
| 3 | Barito Utara | 962.948 | 100 | | | 962.948 |
| 4 | Gunung Mas | 1.034.637 | 100 | | | 1.034.637 |
| 5 | Kapuas | 1.785.672 | 100 | 306 | 0 | 1.785.978 |
| 6 | Katingan | 1.929.959 | 100 | | | 1.929.959 |
| 7 | Kotawaringin Barat | 232.838 | 89,4 | 27.555 | 10,6 | 260.393 |
| 8 | Kotawaringin Timur | 829.049 | 98,9 | 9.586 | 1,1 | 838.635 |
| 9 | Lamandau | 1.588.445 | 99,7 | 4.931 | 0,3 | 1.593.376 |
| 10 | Murung Raya | 720.379 | 100 | | | 720.379 |
| 11 | Pulang Pisau | 2.382.187 | 100 | | | 2.382.187 |
| 12 | Seruyan | 963.386 | 100 | 171 | 0 | 963.557 |
| 13 | Sukamara | 1.667.870 | 100 | | | 1.667.870 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 319.623 | 99,90 | 255 | 0,10 | 319.878 |
| **Jumlah Total** | | **15.347.054** | | **43.746** | **0,9** | **15.390.800** |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

Tingkat pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan memiliki hubungan yang sangat erat. Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah harus diimbangi dengan meningkatnya jumlah ketersediaan pangan bagi para penduduknya. Lebih luas, Thomas Robert Malthus sejak tahun 1798 telah memprediksi bahwa dunia akan menghadapi ancaman karena ketidakmampuan penyediaan pangan yang memadai bagi penduduknya. Malthus dalam teorinya mengungkapkan bahwa peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia pada masa depan akan mengalami ancaman kekurangan pangan.

Hasil analisis status ketersediaan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di beberapa kabupaten/ kota masih mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya masing – masing, dengan total kelebihan ketersediaan kalori total mencapai 1.512.436.983.073 Kkal/tahun.

Namun demikian, ketersediaan pangan di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat telah melampaui ketersediaan pangannya, dengan kekurangan kalori per tahun mencapai -161.500.453.263 Kkal/tahun, -33.366.089.608 Kkal/tahun, -22.715.824.546 Kkal/tahun dan -13.878.966.087 Kkal/tahun. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Palangka Raya mengalami defisit kalori per tahun terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), merupakan yang paling besar di Provinsi Kalimantan Tengah, mencapai 115 per $km^2$.

### 2.1.3.3 Status Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya Dukung Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah secara umum dapat dikatakan baik/tercukupi sampai dengan Tahun 2030, Daya dukung permukiman terendah ada di Kabupaten Seruyan dengan nilai DDT 2,76. Sebaliknya nilai tertinggi ada pada Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai DDDT 10,77. Distribusi Daya Dukung Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Kabupaten/Kota ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.15 Daya Dukung Lahan Permukiman Tahun 2020 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Kabupaten/ Kota | Luas Permukiman (m2) | Jumlah Penduduk (Orang) | Luas Permukiman/ JP | DDDT Permukiman | Keterangan DDDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barito Selatan | 29.258.066 | 136.796 | 213,9 | 8,23 | Tercukupi |
| 2 | Barito Timur | 15.694.798 | 126.874 | 123,7 | 4,76 | Tercukupi |
| 3 | Barito Utara | 18.220.179 | 130.713 | 139,4 | 5,36 | Tercukupi |
| 4 | Gunung Mas | 14.439.257 | 119.910 | 120,4 | 4,63 | Tercukupi |
| 5 | Kapuas | 51.487.363 | 358.820 | 143,5 | 5,52 | Tercukupi |
| 6 | Katingan | 29.388.186 | 169.997 | 172,9 | 6,65 | Tercukupi |
| 7 | Kotawaringin Barat | 69.418.488 | 312.911 | 221,8 | 8,53 | Tercukupi |
| 8 | Kotawaringin Timur | 76.845.616 | 466.366 | 164,8 | 6,34 | Tercukupi |
| 9 | Lamandau | 15.625.327 | 82.680 | 189,0 | 7,27 | Tercukupi |
| 10 | Murung Raya | 10.604.505 | 120.785 | 87,8 | 3,38 | Tercukupi |
| 11 | Pulang Pisau | 35.599.327 | 127.118 | 280,0 | 10,77 | Tercukupi |
| 12 | Seruyan | 14.751.336 | 205.880 | 71,7 | 2,76 | Tercukupi |
| 13 | Sukamara | 9.797.070 | 64.342 | 152,3 | 5,86 | Tercukupi |
| 14 | Kota Palangka Raya | 28.207.953 | 291.667 | 96,7 | 3,72 | Tercukupi |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

**Tabel 2.1.16 Prediksi Daya Dukung Lahan Permukiman Tahun 2030 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Kabupaten/ Kota | Luas Permukiman (m2) | Jumlah Penduduk (Orang) | Luas Permukiman/ JP | DDDT Permukiman | Keterangan DDDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barito Selatan | 29.258.066 | 174.258 | 167,9 | 6,5 | Tercukupi |
| 2 | Barito Timur | 15.694.798 | 161.619 | 97,1 | 3,7 | Tercukupi |
| 3 | Barito Utara | 18.220.179 | 166.509 | 109,4 | 4,2 | Tercukupi |
| 4 | Gunung Mas | 14.439.257 | 152.748 | 94,5 | 3,6 | Tercukupi |
| 5 | Kapuas | 51.487.363 | 457.084 | 112,6 | 4,3 | Tercukupi |
| 6 | Katingan | 29.258.066 | 216.551 | 135,1 | 5,2 | Tercukupi |
| 7 | Kotawaringin Barat | 69.418.488 | 398.603 | 174,2 | 6,7 | Tercukupi |
| 8 | Kotawaringin Timur | 76.845.616 | 594.082 | 129,4 | 5 | Tercukupi |
| 9 | Lamandau | 15.625.327 | 105.322 | 148,4 | 5,7 | Tercukupi |
| 10 | Murung Raya | 10.604.505 | 153.862 | 68,9 | 2,7 | Tercukupi |
| 11 | Pulang Pisau | 35.599.327 | 161.930 | 219,8 | 8,5 | Tercukupi |
| 12 | Seruyan | 14.751.336 | 262.261 | 56,2 | 2,2 | Tercukupi |
| 13 | Sukamara | 9.797.070 | 81.962 | 119,5 | 4,6 | Tercukupi |
| 14 | Kota Palangka Raya | 28.207.953 | 371.541 | 75,9 | 2,9 | Tercukupi |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

### 2.1.3.4 Indeks Jasa Ekosistem

Salah satu pendekatan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang tertuang dalam *Millenium Ecosystem Assessment, United Nation* (2005). Asumsinya, semakin tinggi jasa ekosistem semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jasa ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan oleh 3 (tiga) komponen sebagai penaksir atau *proxy*, yaitu: kondisi ekoregion Bentang lahan (*landscape ecoregion*), komunitas vegetasi (*vegetation community*), dan penutup lahan (*land cover*) atau penggunaan Lahan (*land use*). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari suatu ekosistem (MEA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu: jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*),

dan jasa pendukung (*supporting*) (MEA, 2005), yang selanjutnya dapat diperinci ke dalam 20 (dua puluh) kelas jasa ekosistem (De Groots, 2002).

## 1. Jasa Lingkungan Fungsi Penyedia (*Provisioning*)

Jasa lingkungan Fungsi Penyedia yang dijelaskan dalam bagian ini adalah jasa penyedia air dan jasa penyedia pangan.

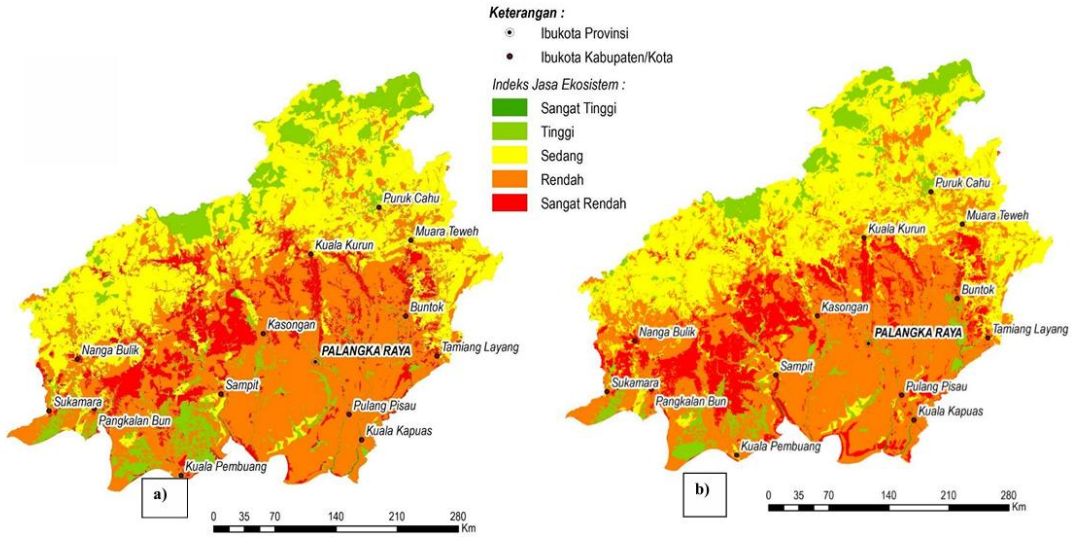
### a) Jasa Penyedia (Provisioning) Air

Indeks Jasa Ekosistem (IJE) Penyedia air memiliki dua perubahan yang sangat tinggi. Perubahan pertama ada penambahan kelas sangat rendah penyediaan air seluas lebih dari 500 ribu ha atau bertambah 34% dari luasan kelas ini di tahun 2003. Sebaliknya pada kelas penyedia air tinggi terjadi pengurangan luasan sebesar kurang lebih 439 ribu ha atau berkurang 25,7% dari luasan kelas ini di tahun 2003. Data perubahan luasan IJE Penyedia Air ditampilkan pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.1.17 Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Penyedia Air Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

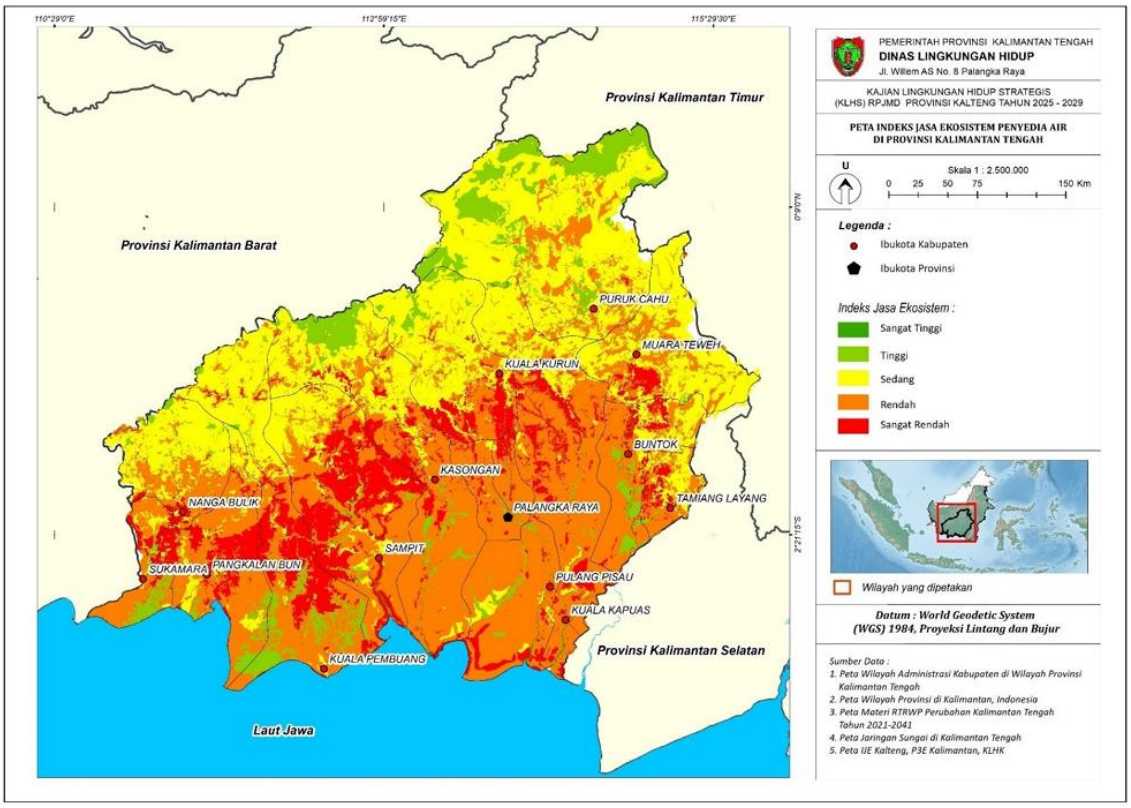
| IJE Penyedia Air | Tahun 2003 (Ha) | Tahun 2022 (Ha) | Perubahan (2003-2022) | % |
|---|---|---|---|---|
| Sangat Rendah | 1.520.914,2 | 2.038.580,1 | 517.665,90 | 34 |
| Rendah | 6.823.319,2 | 6.540.558,4 | -282.760,80 | -4,1 |
| Sedang | 5.223.964,7 | 5.426.618,0 | 202.653,30 | 3,9 |
| Tinggi | 1.711.636,8 | 1.272.507,9 | -439.128,90 | -26 |
| Sangat Tinggi | 69.039,1 | 70.609,6 | 1.570,50 | 2,3 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.13 Peta Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air (P1) Tahun 2003 (peta a) dan Tahun 2022 (peta b) Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.14 Peta Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

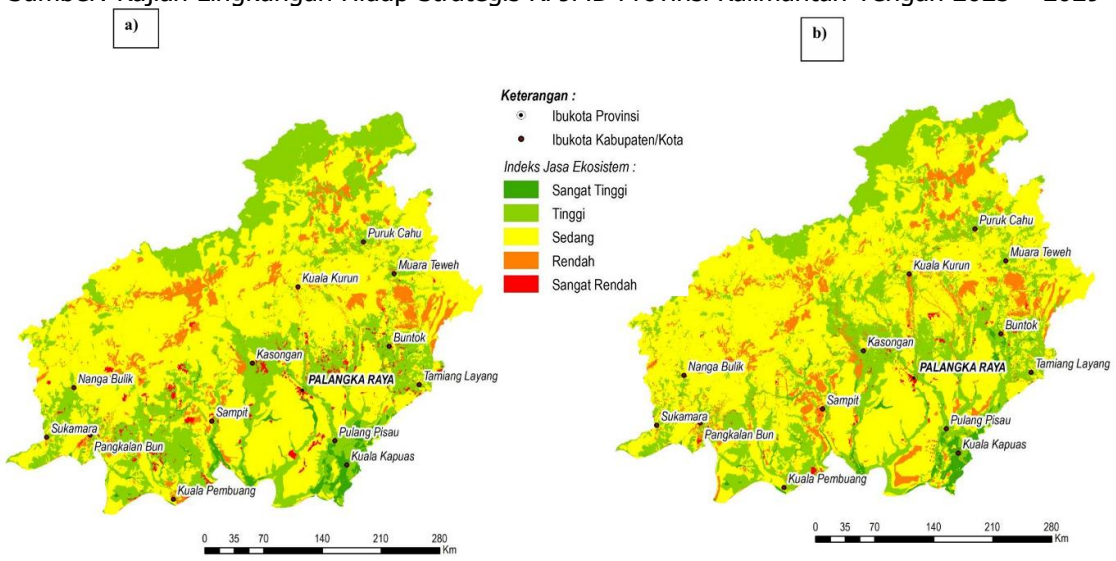
### b) Jasa Penyedia (*Provisioning*) Pangan

Indeks Jasa Ekosistem (IJE) Penyedia pangan memiliki tiga perubahan dalam rentang waktu 20 tahun. Perubahan pertama ada pengurangan luasan kelas sangat rendah penyediaan pangan seluas lebih dari 95 ribu ha atau berkurang 42% dari luasan kelas ini di tahun 2003. Pada kelas penyedia pangan tinggi dan sangat tinggi juga terjadi pengurangan luasan sebesar kurang lebih 370 ribu ha (8%) dan kurang lebih 46 ribu ha (14,2%) dari luasan kelas ini di tahun 2003. Data perubahan luasan IJE Penyedia Pangan ditampilkan pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.1.18 Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Penyedia Pangan Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

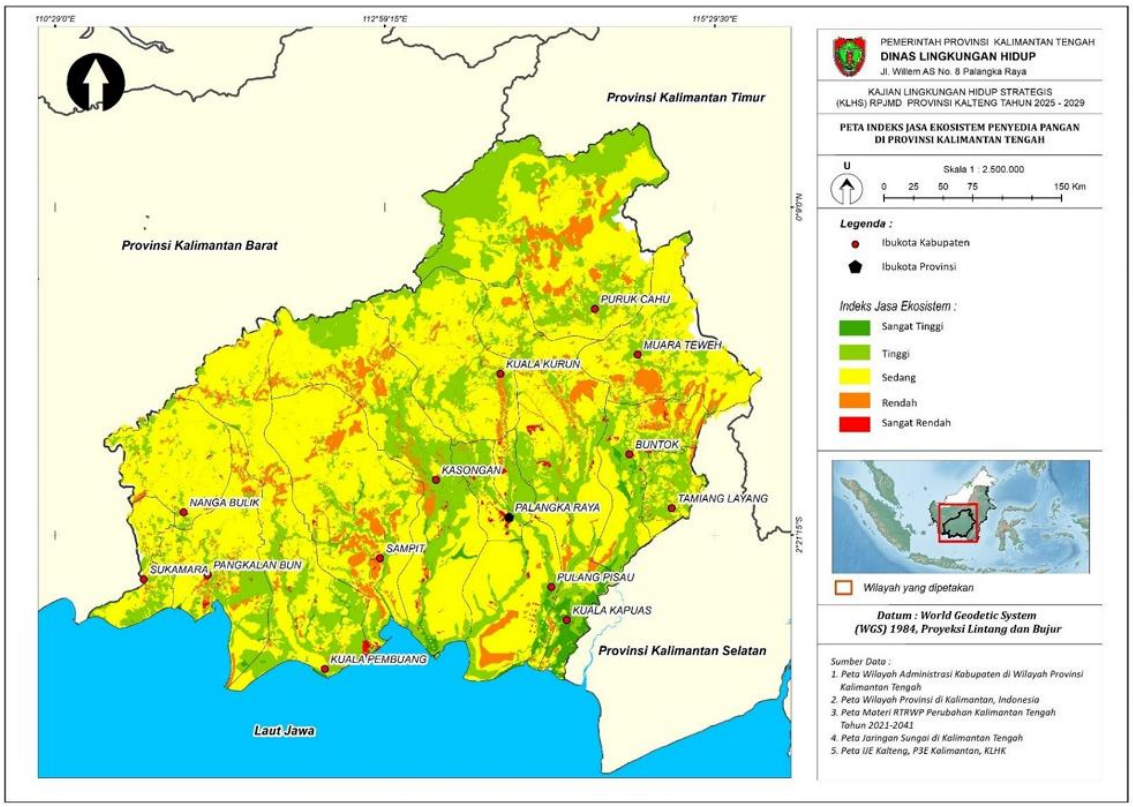
| IJE Penyedia Pangan | Tahun 2003 (Ha) | Tahun 2022 (Ha) | Perubahan (2003-2022) | % |
|---|---|---|---|---|
| Sangat Rendah | 224.940,0 | 129.467,1 | -95.472,90 | -42,4 |
| Rendah | 1.016.975,6 | 1.227.226,2 | 210.250,60 | 20,7 |
| Sedang | 9.125.222,7 | 9.426.983,4 | 301.760,70 | 3,3 |
| Tinggi | 4.655.891,8 | 4.285.560,5 | -370.331,30 | 8 |
| Sangat Tinggi | 325.843,8 | 279.636,9 | -46.206,90 | 14,2 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.15 Peta Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (P1) Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.16. Peta Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

## 2. Jasa Lingkungan Fungsi Pengatur (*Regulating*)

Jasa lingkungan Fungsi Pengatur yang dijelaskan dalam bagian ini adalah Jasa Pengatur (*Regulating*) Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir dan Jasa Pengatur (*Regulating*) Kualitas Udara.

### a. Jasa Pengatur (*Regulating*) Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir

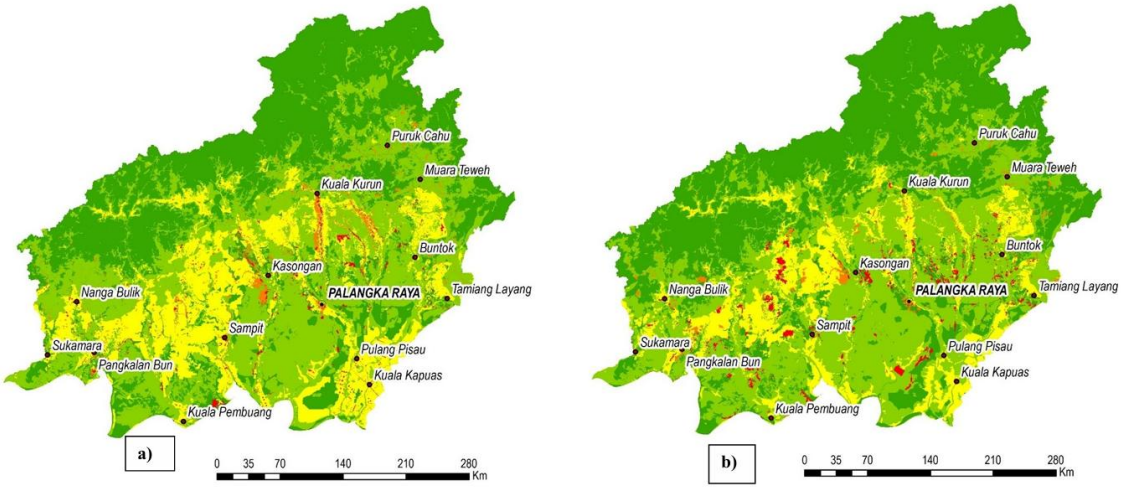
Indeks Jasa Ekosistem (IJE) Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir memiliki tiga perubahan dalam rentang waktu 20 tahun. Perubahan pertama ada pengurangan luasan kelas sangat rendah Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir seluas lebih dari 54 ribu ha atau berkurang 13,9% dari luasan kelas ini di tahun 2003. Pada kelas Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir tinggi dan sangat tinggi juga terjadi pengurangan luasan lebih besar, yaitu kurang lebih 164 ribu ha (5,5%) dan kurang lebih 537 ribu ha (10,6%) dari luasan kelas ini di tahun 2003.

Data perubahan luasan IJE Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir ditampilkan pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.1.19 Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

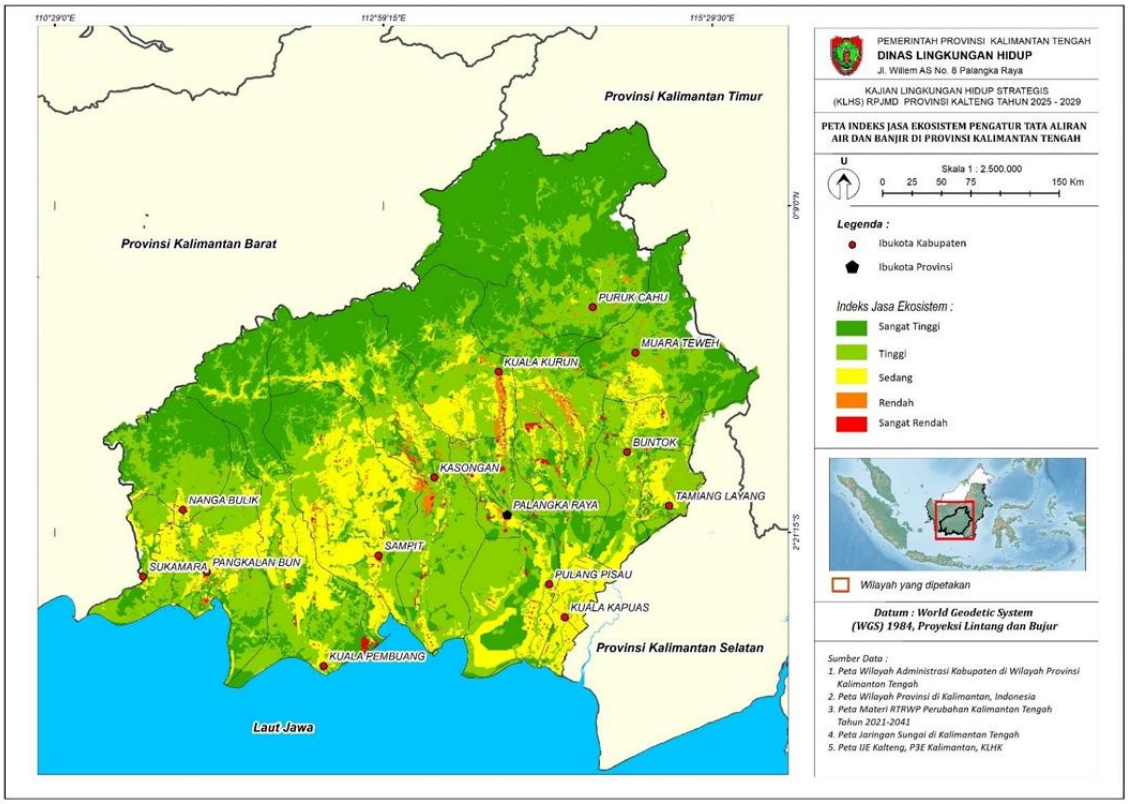
| IJE Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir | Tahun 2003 (Ha) | Tahun 2022 (Ha) | Perubahan (2003-2022) | % |
|---|---|---|---|---|
| Sangat Rendah | 394.204,2 | 339.337,7 | -54.866,50 | -13,9 |
| Rendah | 1.171.276,7 | 1.880.579,7 | 709.303,00 | 60,6 |
| Sedang | 5.727.613,9 | 5.774.738,9 | 47.125,00 | 0,8 |
| Tinggi | 2.963.454,0 | 2.799.506,0 | -163.948,00 | 5,5 |
| Sangat Tinggi | 5.092.325,2 | 4.554.711,8 | -537.613,40 | 10,6 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.17 Peta Indeks Jasa Ekosistem Tata aliran Air dan Banjir (R3A) Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.18 Peta Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

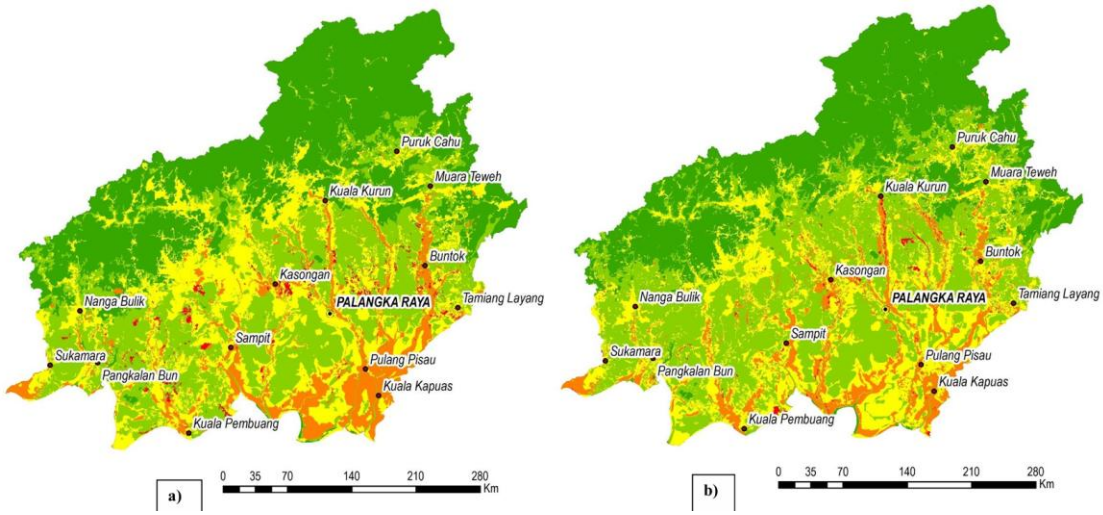
### b. Jasa Pengatur (*Regulating*) Kualitas Udara

Indeks Jasa Ekosistem (IJE) Pengatur Kualitas Udara memiliki empat pengurangan luasan dalam rentang waktu 20 tahun. Perubahan pertama ada pengurangan luasan kelas sangat rendah Pengatur Kualitas Udara seluas lebih dari 63 ribu ha atau berkurang 41,1% dari luasan kelas ini di tahun 2003. Pada kelas Pengatur Kualitas Uadara rendah, sedang dan sangat tinggi juga terjadi pengurangan luasan kurang lebih 86 ribu ha (6,5%), 148 ribu ha (4%) dan kelas sangat tinggi kurang lebih 532 ribu ha (9,9%) dari luasan kelas ini di tahun 2003. Data perubahan luasan IJE Pengatur Kualitas Udara ditampilkan pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.1.20 Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Pencegahan Perlindungan Bencana Banjir Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

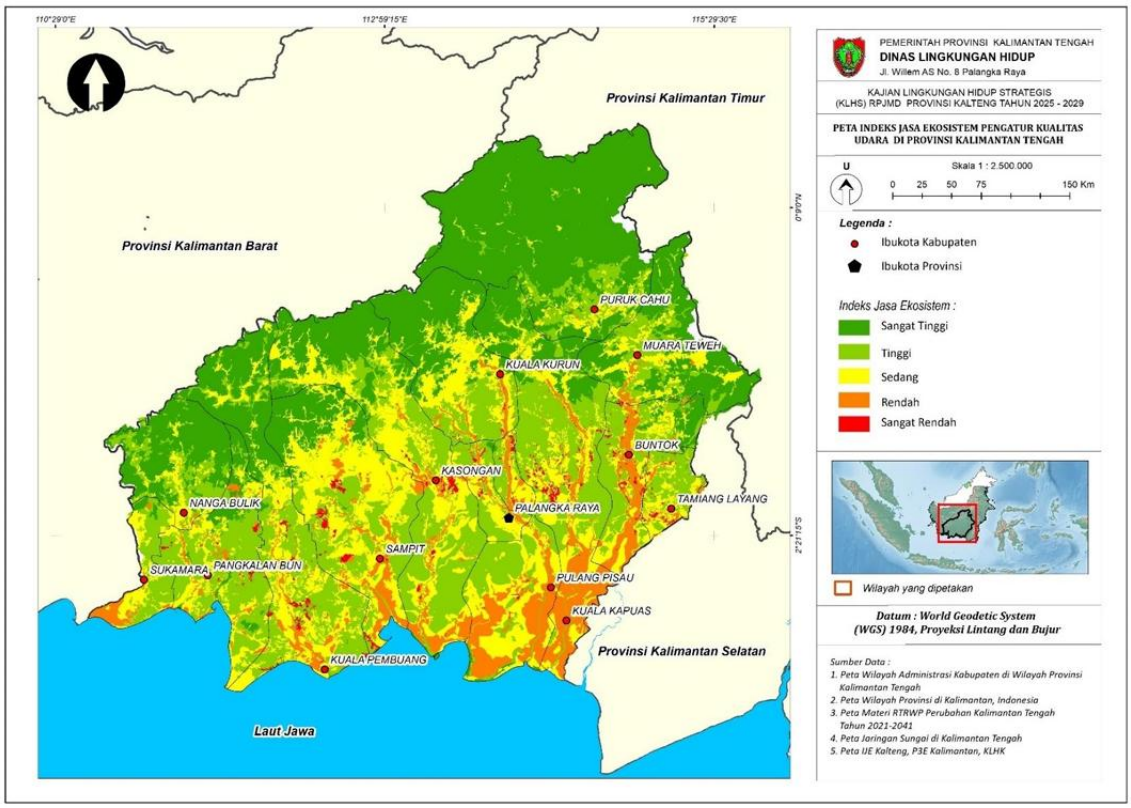
| IJE Pengatur Kualitas Udara | Tahun 2003 (Ha) | Tahun 2022 (Ha) | Perubahan (2003-2022) | % |
|---|---|---|---|---|
| Sangat Rendah | 153.738,9 | 90.621,5 | -63.117,40 | -41,1 |
| Rendah | 1.339.886,1 | 1.253.324,9 | -86.561,20 | -6,5 |
| Sedang | 3.750.208,5 | 3.601.358,3 | -148.850,20 | -4 |
| Tinggi | 4.732.889,1 | 5.563.915,0 | 831.025,90 | 17,6 |
| Sangat Tinggi | 5.327.151,4 | 4.839.654,3 | -487.497,10 | -9,9 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.19 Peta Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Kualitas Udara (R1)Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.20 Peta Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Kualitas Udara Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

## 3. Jasa Lingkungan Fungsi (*Cultural*)

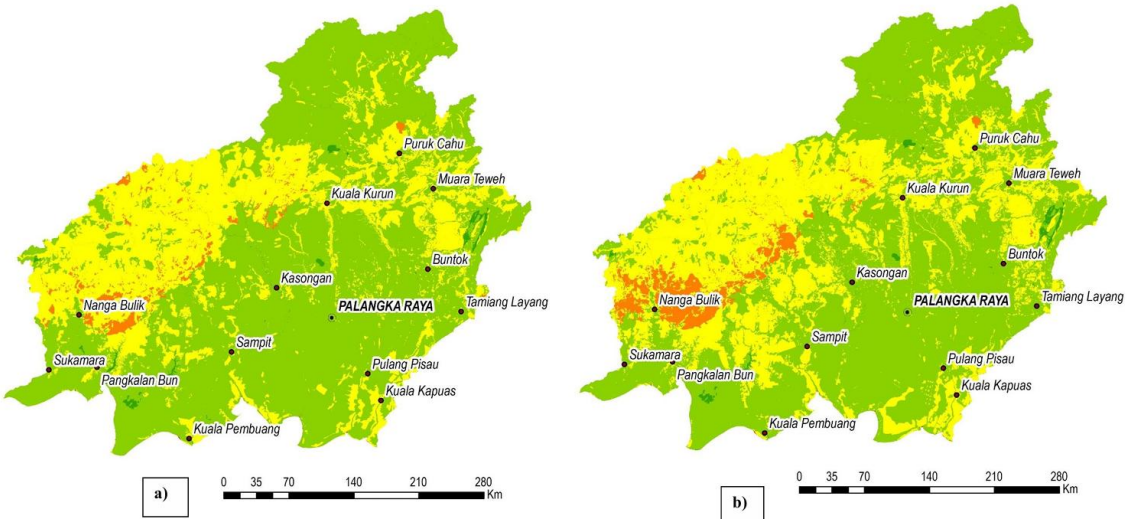
### a. Jasa Budaya (*Cultural*) Warisan Budaya dan Identitas

Indeks Jasa Ekosistem (IJE) Warisan Budaya dan Identitas hanya memiliki dua kelas yang mengalami pengurangan luasan dalam rentang waktu 20 tahun. Perubahan ataupun pengurangan IJE Warisan Budaya dan Identitas terjadi pada kelas tinggi yaitu seluas lebih dari 986 ribu ha atau berkurang 9,8%. Selanjutnya pada kelas sangat tinggi yang berkurang kurang lebih 3.218 ha (3,2%) dari luasan kelas ini di tahun 2003. Data perubahan luasan IJE Warisan Budaya dan Identitas ditampilkan pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.1.21 Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Warisan Budaya dan Identitas Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

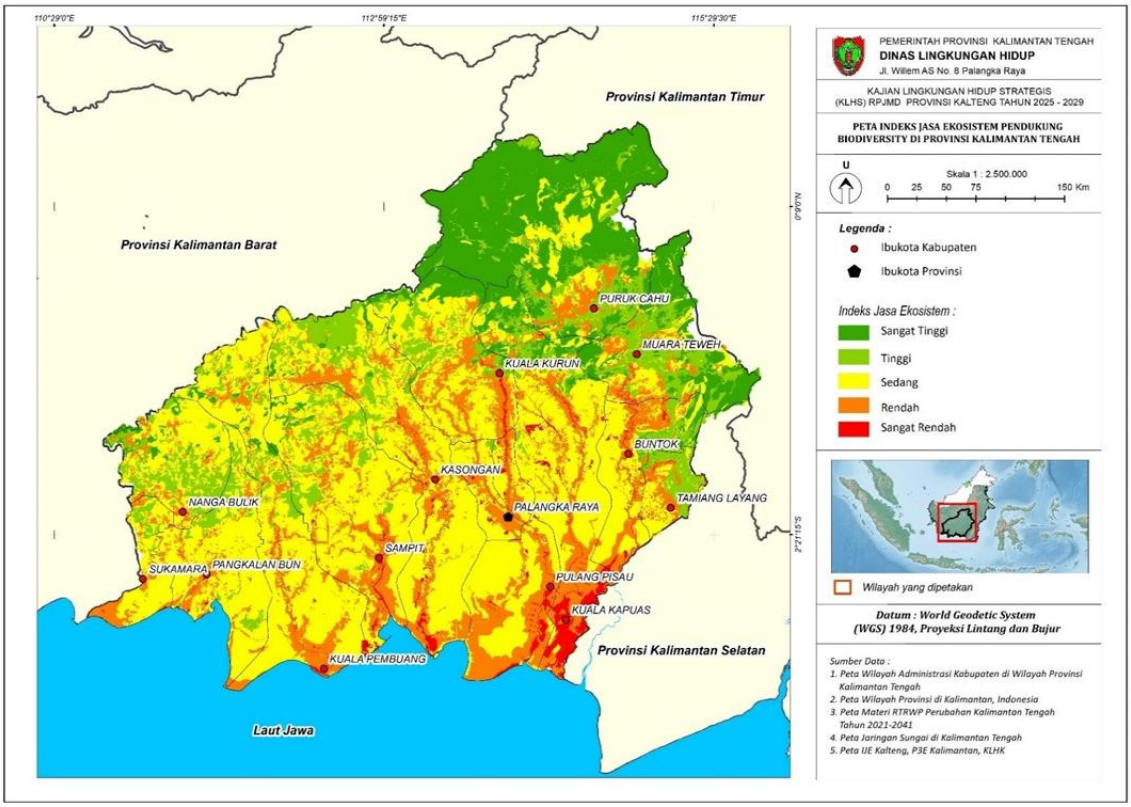
| IJE Warisan Budaya dan Identitas | Tahun 2003 (Ha) | Tahun 2022 (Ha) | Perubahan (2003-2022) | % |
|---|---|---|---|---|
| Sangat Rendah | 1.374,1 | 1.410,6 | 36,50 | 2,7 |
| Rendah | 386.483,4 | 604.048,7 | 217.565,30 | 111 |
| Sedang | 4.937.753,4 | 5.605.712,7 | 667.959,30 | 13,6 |
| Tinggi | 10.023.309,7 | 9.036.966,7 | -986.343,00 | -9,8 |
| Sangat Tinggi | 99.953,3 | 96.735,3 | -3.218,00 | -3,2 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.21 Peta Indeks Jasa Ekosistem Cultural Budaya dan Identitas (C3)Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.22 Peta Indeks Jasa Ekosistem Cultural Budaya dan Identitas Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

## 4. Jasa Lingkungan Fungsi Pendukung (*Supporting*)

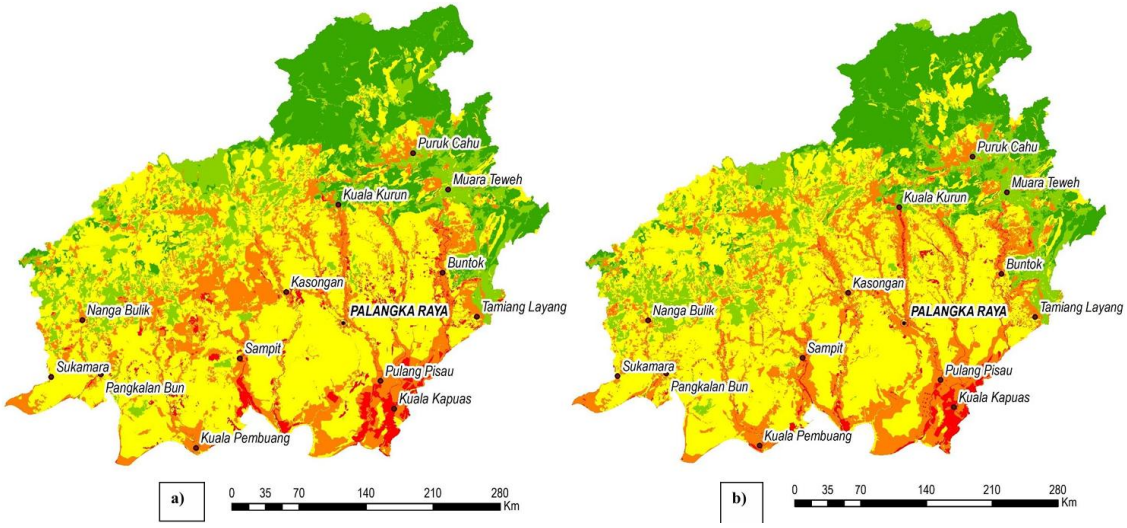
### a. Jasa Pendukung (*Supporting*) Biodiversity

Indeks Jasa Ekosistem (IJE) Pendukung Biodiversity hanya memiliki dua kelas yang mengalami pengurangan luasan dalam rentang waktu 20 tahun. Perubahan ataupun pengurangan IJE Biodiversity terjadi pada kelas sangat rendah yaitu seluas lebih dari 133 ribu ha atau berkurang 25,4%. Selanjutnya pada kelas sangat tinggi yang berkurang kurang lebih 218 ribu ha (8%) dari luasan kelas ini di tahun 2003. Data perubahan luasan IJE Biodiversity ditampilkan pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.1.22 Perubahan dan Persentase Luasan Kelas IJE Pendukung Biodiversity Tahun 2003 – 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah**

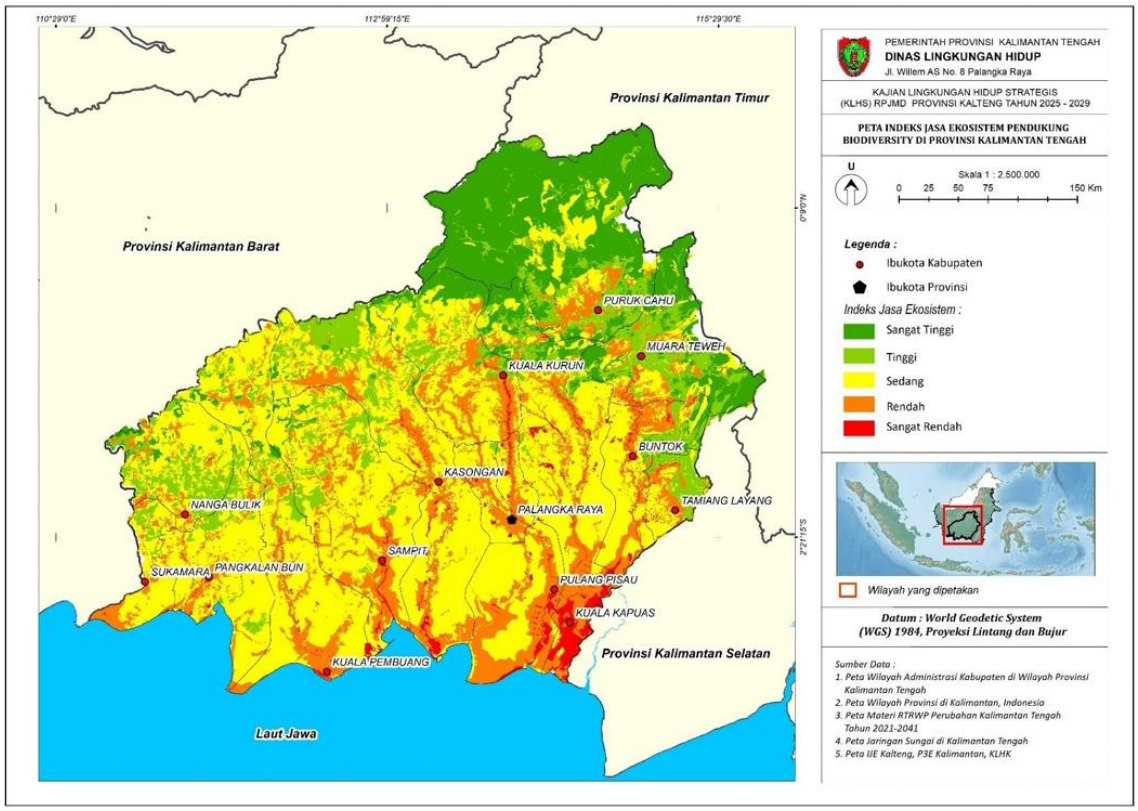
| IJE Pendukung Biodiversity | Tahun 2003 (Ha) | Tahun 2022 (Ha) | Perubahan (2003-2022) | % |
|---|---|---|---|---|
| Sangat Rendah | 522.986,2 | 389.930,5 | -133.055,70 | -25,4 |
| Rendah | 2.768.982,0 | 2.954.110,5 | 185.128,50 | 6,7 |
| Sedang | 7.393.767,1 | 7.466.594,4 | 72.827,30 | 1 |
| Tinggi | 1.940.043,2 | 2.033.199,6 | 93.156,40 | 4,8 |
| Sangat Tinggi | 2.723.095,5 | 2.505.038,9 | -218.056,60 | -8 |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029




**Gambar 2.1.23 Peta Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversity Tahun 2003 (a) dan Tahun 2022 (b) Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029



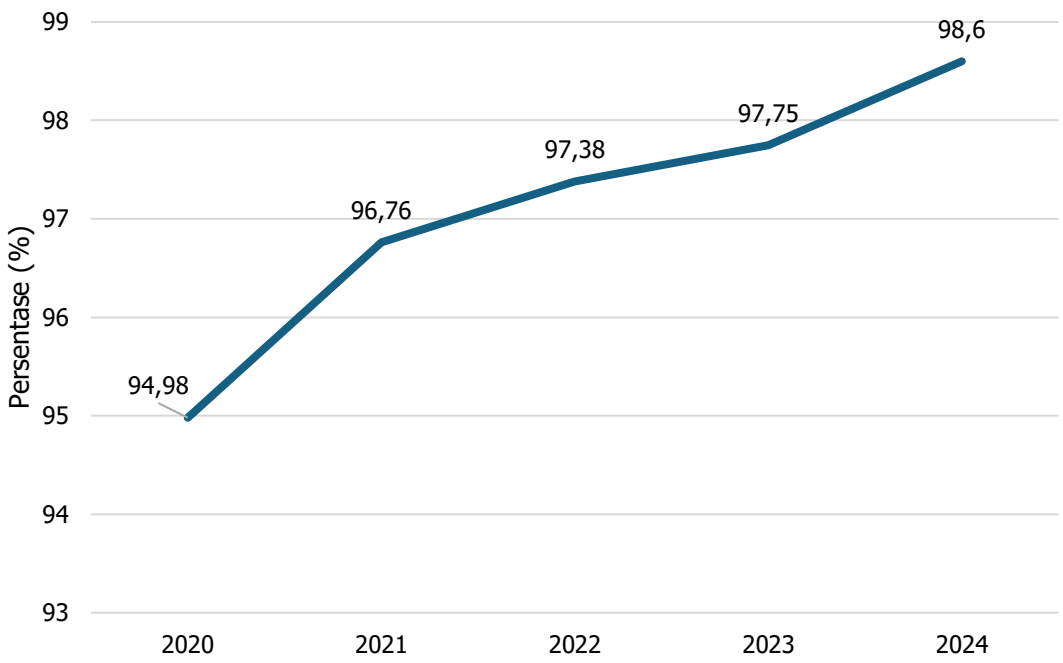

**Gambar 2.1.24 Peta Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversity Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

## 2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

### 2.1.4.1 Ketersediaan Energi

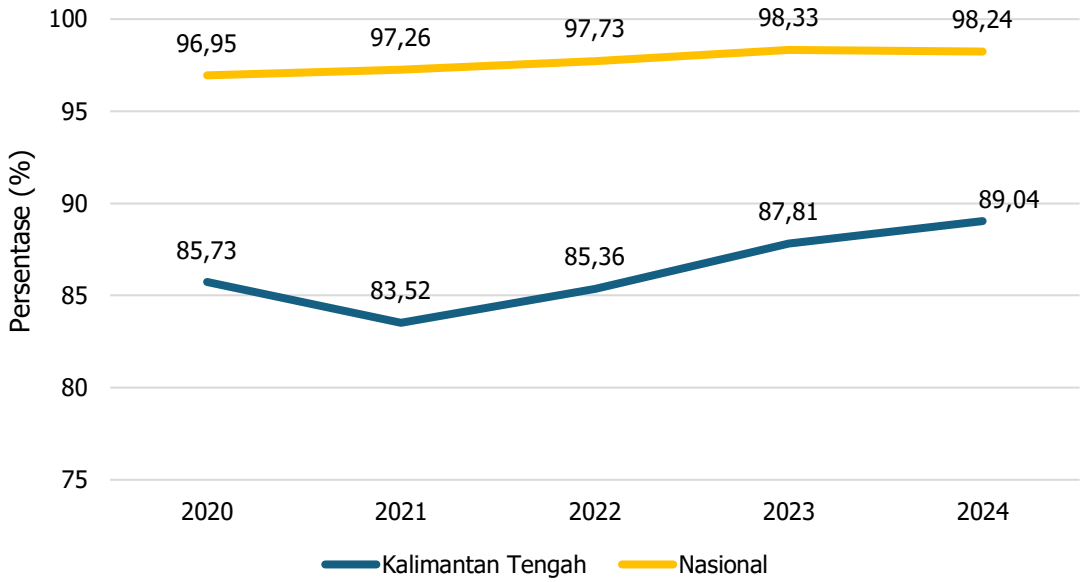
Ketersediaan energi khususnya akses terhadap listrik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Akses listrik yang merata tidak hanya mendukung aktivitas rumah tangga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, capaian elektrifikasi masih menjadi tantangan tersendiri meskipun telah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu indikator untuk mengukur hal tersebut adalah rasio elektrifikasi. Rasio ini merupakan perbandingan jumlah pengguna (rumah tangga) yang memiliki sumber penerangan listrik baik listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan seluruh jumlah rumah tangga yang ada.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 94,98%. Angka ini meningkat menjadi 98,6% pada tahun 2024.




**Gambar 2.1.25 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain rasio elektrifikasi yang menghitung seluruh rumah tangga berlistrik terlepas dari sumbernya, indikator lain juga tampak dari persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN. Di Provinsi Kalimantan Tengah, indikator ini selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah garis nasional. Tercatat pada tahun 2020 persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 85,73% dan terus meningkat menjadi 89,04% pada tahun 2024. Namun, perlu menjadi catatan bahwa meskipun sudah mencapai angka 85,36%, rata-rata nasional sudah mencapai 97,73% sehingga masih jauh di bawah rata-rata nasional.




**Gambar 2.1.26 Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

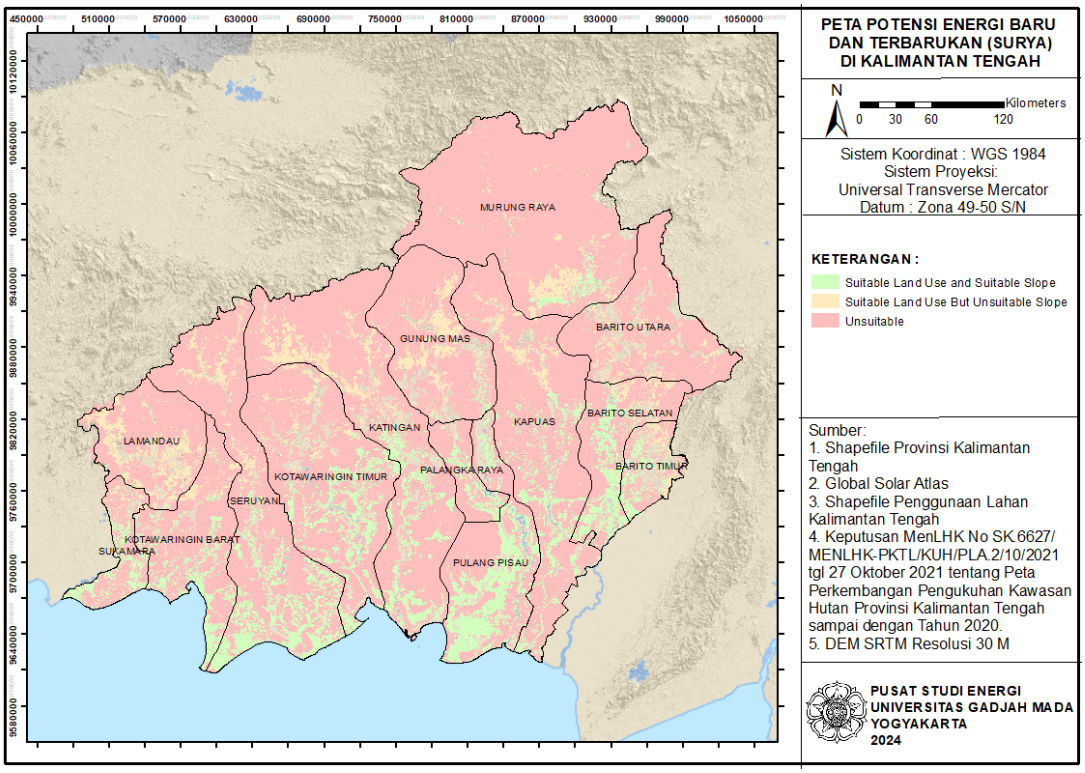
Di samping itu, salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah adalah sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dari sumber energi baru dan terbarukan. Kekayaan sumber daya alam tersebut kemudian dapat mendukung upaya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang mampu menghasilkan dan menyuplai energi untuk kebutuhan sendiri maupun provinsi-provinsi tetangganya. Target jangka panjang pembangunan sektor ini adalah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi nasional dan mendukung ketahanan energi. Potensi Energi Baru dan Terbarukan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagaimana hasil analisis berikut.

**Potensi Energi Surya**

Potensi energi surya dihitung menggunakan metode sistem informasi geografis (SIG) dengan melakukan ekstraksi data *Global Heat Index* (GHI) yang merupakan jumlah radiasi total matahari pada permukaan bumi. Radiasi total matahari pada permukaan bumi terdiri dari 3 jenis radisasi, yakni *Direct Normal Irradiance* (DNI), *Diffuse Horizontal Irradiance* (DHI), dan *Ground-Reflected Radiation* (GRR). Kemudian, hasil pemetaan potensi energi surya di Kalimantan Tengah

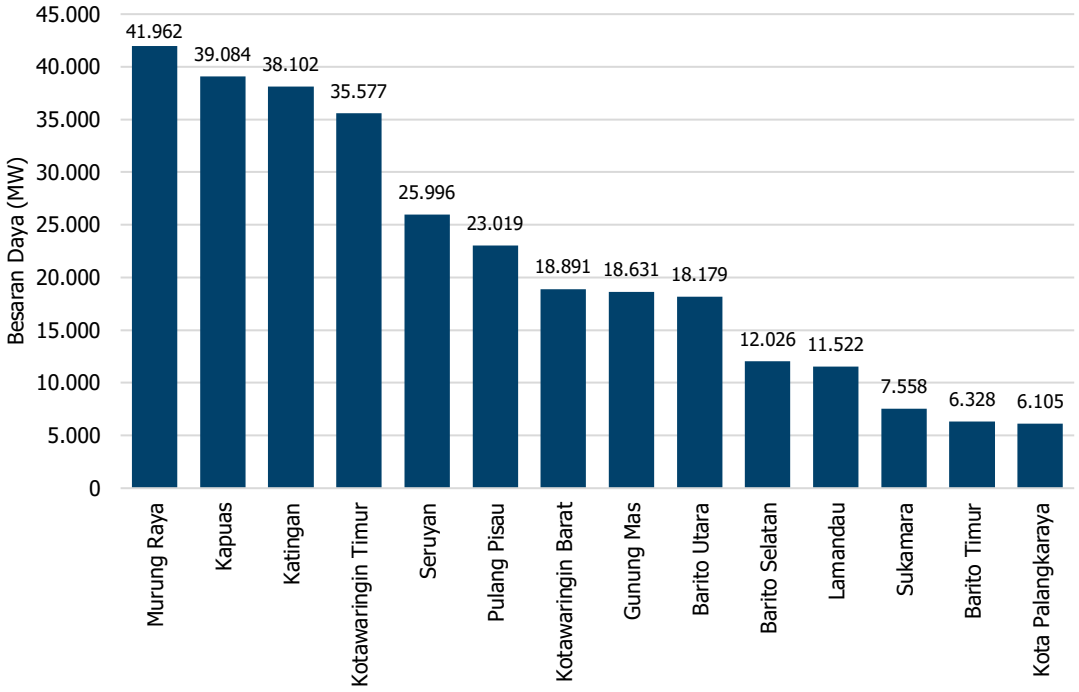
diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan variabel kemiringan lereng dan penggunaan lahan.

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, terdapat 3 kategori yang muncul, yaitu *suitable land* (kesesuaian dengan tutupan lahan dan kemiringan lereng), *suitable land use with unsuitable slope* (kesesuaian dengan tutupan lahan tetapi tidak sesuai secara kemiringan lereng), dan *unsuitable* (tidak sesuai secara tutupan lahan dan kemiringan lereng).




**Gambar 2.1.27 Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan (Surya) di Kalimantan Tengah**
**Sumber: Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada**

Kemudian, jika secara keseluruhan potensi energi surya dengan klasifikasi *suitable* dieksekusi untuk menghasilkan energi listrik, didapatkan total potensi energi surya yang dihasilkan per MW secara akumulatif tiap kabupaten/kota di Kalimantan Tengah sebagai berikut:

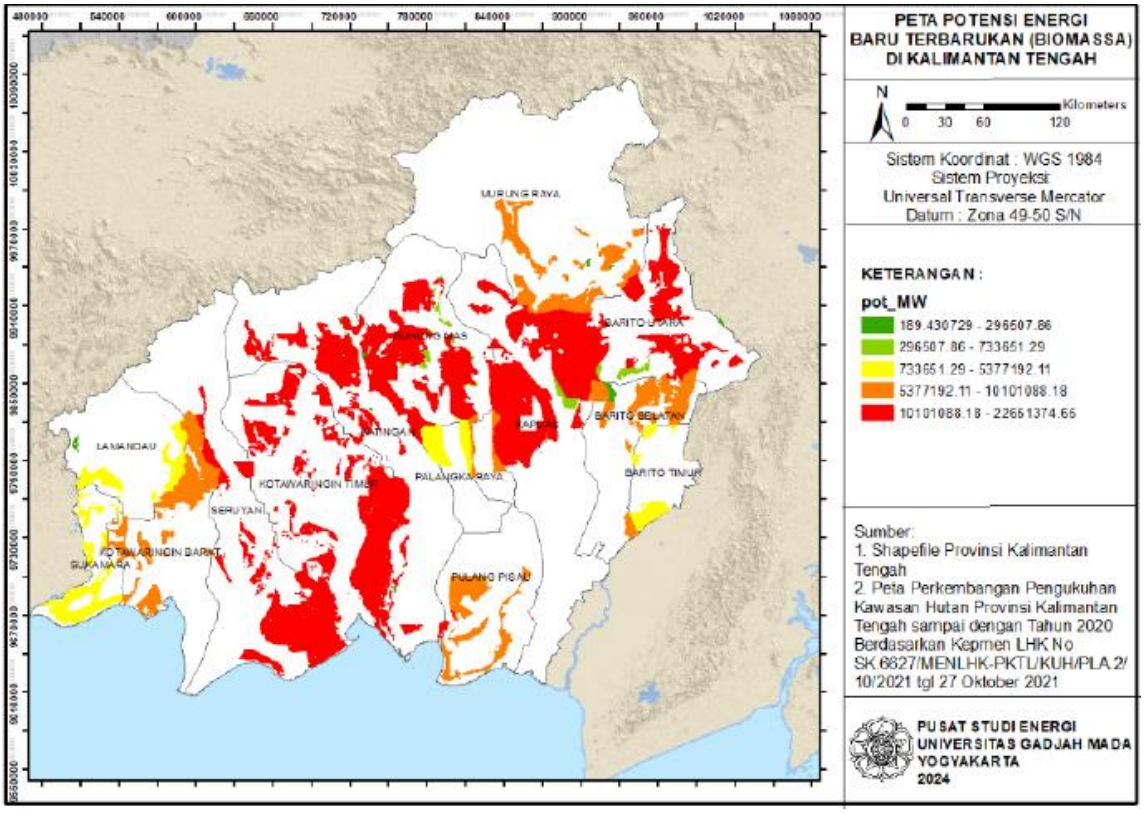



**Gambar 2.1.28 Potensi Energi Surya Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah (Megawatt)**

Sumber: Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada

## Potensi Energi Biomassa

Analisis potensi energi biomassa diawali dengan melakukan *overlay* data *shapefile* kawasan hutan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah dengan *shapefile* wilayah administrasi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, dilakukan pemilihan atribut Kawasan Hutan menjadi Hutan Produksi Tetap dan kalkulasi luas yang dilanjutkan dengan konversi luas hutan produksi (ha) ke dalam besaran energi (MW). Hasil pemetaan tersebut kemudian menghasilkan peta berikut ini.




**Gambar 2.1.29 Peta Potensi Energi Baru Terbarukan (Biomassa) di Kalimantan Tengah**

Sumber: Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa 3 daerah dengan luasan hutan produksi tetap tertinggi terdapat di Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Murung Raya dengan luasan hutan produksi melebihi 3,500,000 hektar. Selanjutnya, hasil perhitungan luasan hutan produksi tetap sejalan dengan potensi energi yang dihasilkan, yang mana tiga daerah dengan potensi energi biomassa tertinggi di Kalimantan Tengah berturut-turut adalah Kabupaten Barito Utara dengan potensi sebesar 15.601,17 MW, Kabupaten Lamandau dengan potensi energi biomassa 15.429,85 MW, serta Kabupaten Murung Raya dengan potensi energi biomassa sebesar 15.414,73 MW. Jika dikaitkan dengan infrastruktur pendukung eksisting, di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri terdapat beberapa PLTU di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kapuas**.** Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sistem *co firing* dengan

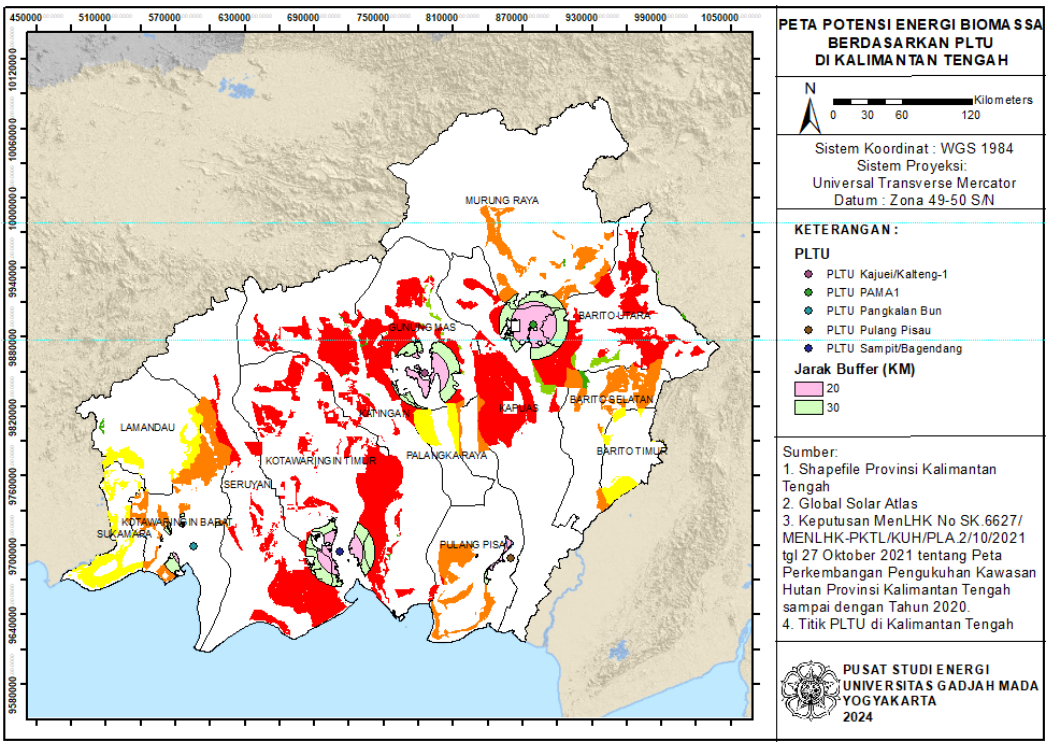
PLTU. Hal ini mengingat adanya Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional terkait sistem *cofiring* dengan PLTU yang sudah ada.

Kemudian, berdasarkan analisis *buffer* terhadap PLTU eksisting, terdapat 5 PLTU eksisting yang berada di Kalimantan Tengah, yaitu PLTU Kajuei Kalteng, PLTU PAMA, PLTU Pangkalan Bun, PLTU Pulang Pisau, dan PLTU Sampit. Berikut merupakan potensi energi biomassa pada radius 30km PLTU di Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.1.23 Potensi Energi Biomassa PLTU**

| Nama PLTU | Potensi Energi Biomassa Buffer 30 KM |
|---|---|
| PLTU KAJUEI KALTENG1 | 5.792,77 MW |
| PAMA1 | 9.741,28 MW |
| PANGKALAN BUN | 959,09 MW |
| PULANGPISAU | 560,94 MW |
| SAMPIT | 6.484,29 MW |

Sumber: Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada

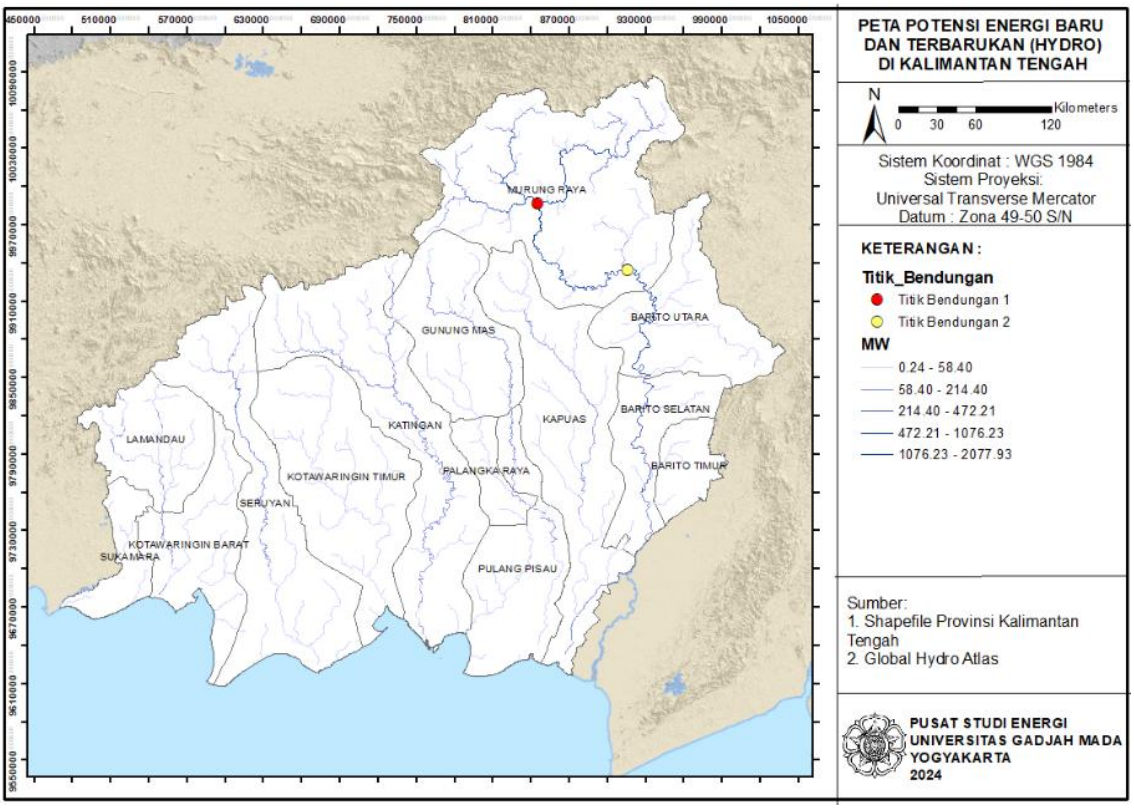



**Gambar 2.1.30 Peta Potensi Energi Biomassa Berdasarkan PLTU di Kalimantan Tengah**

Sumber: Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada

## Potensi Energi Air

Berdasarkan perhitungan potensi energi air yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan lokasi dengan potensi terbesar, lokasi potensial untuk lokasi pembangkit listrik tenaga air dapat dilihat sebagai berikut.




**Gambar 2.1.31 Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan (Hydro) di Kalimantan Tengah**

Sumber: Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada

Berdasarkan peta di atas, terdapat dua titik potensial yang dapat dieksekusi menjadi sebuah bendungan. Pemilihan lokasi bendungan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M2015 tentang Bendungan yang menyebutkan debit air maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik per detik. Potensi listrik yang dapat dihasilkan terlihat sebagaimana tabel berikut.

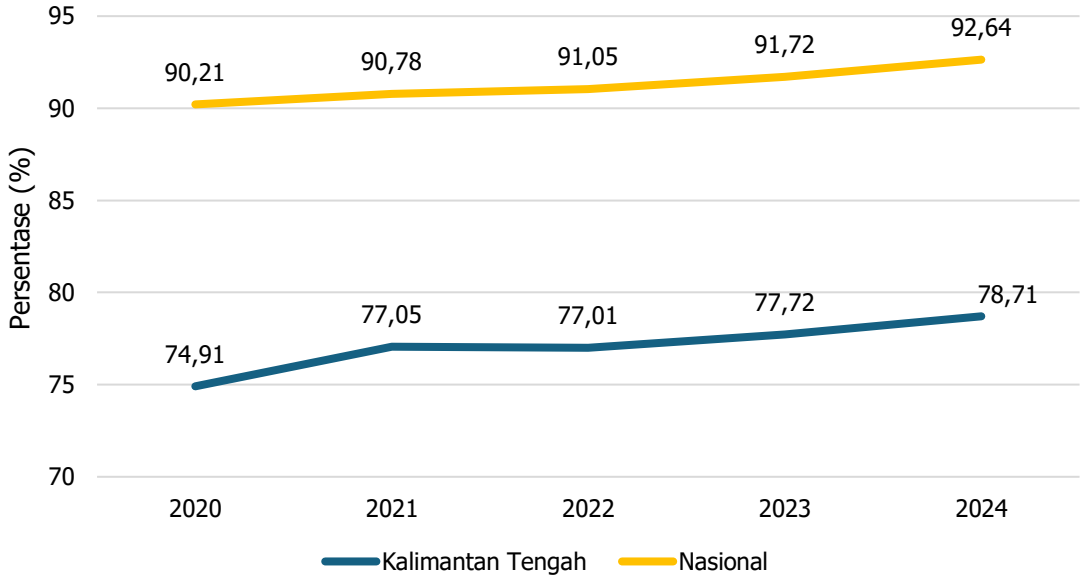
**Tabel 2.1.24 Rencana Titik Bendungan dan Hasil Perhitungan Potensi Energi Air**

| No | Rencana Bendungan | Kab | Turbine Efficiency | Q net (Debit Air) | H nett (Ketinggian) | Hasil Perhitungan (kW) | Potensi Energi Hydro (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titik Bendungan 1 | Murung Raya | 80% | 1046,531 | 253 | 2077933 | 2077,93 MW |
| 2 | Titik Bendungan 2 | Barito Utara | 80% | 1510,838 | 38 | 450568 | 450,56 MW |

Sumber: Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada

### 2.1.4.2 Sumberdaya Air

Sumber daya air merupakan komponen vital dalam penyediaan layanan dasar, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap air minum layak. Ketersediaan dan distribusi air bersih mencerminkan kapasitas tata kelola sumber daya air di suatu wilayah. Akses terhadap air minum layak merupakan sarana dasar yang tidak kalah penting dari aspek pelayanan umum wajib lainnya. Provinsi Kalimantan Tengah selama delapan tahun terakhir (2014-2022) mengalami tren peningkatan yang konsisten terkait rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang mengindikasikan adanya pembangunan yang positif terhadap aspek layanan air minum. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak mengalami peningkatan dari 74,91% pada tahun 2020 meningkat menjadi 78,71% persen pada tahun 2024. Namun, meskipun mengalami tren peningkatan yang konsisten pada tiap tahunnya, capaian indikator ini masih jauh di bawah capaian nasional. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dalam skala nasional sendiri pada tahun 2024 tercatat sebesar 92,64%.

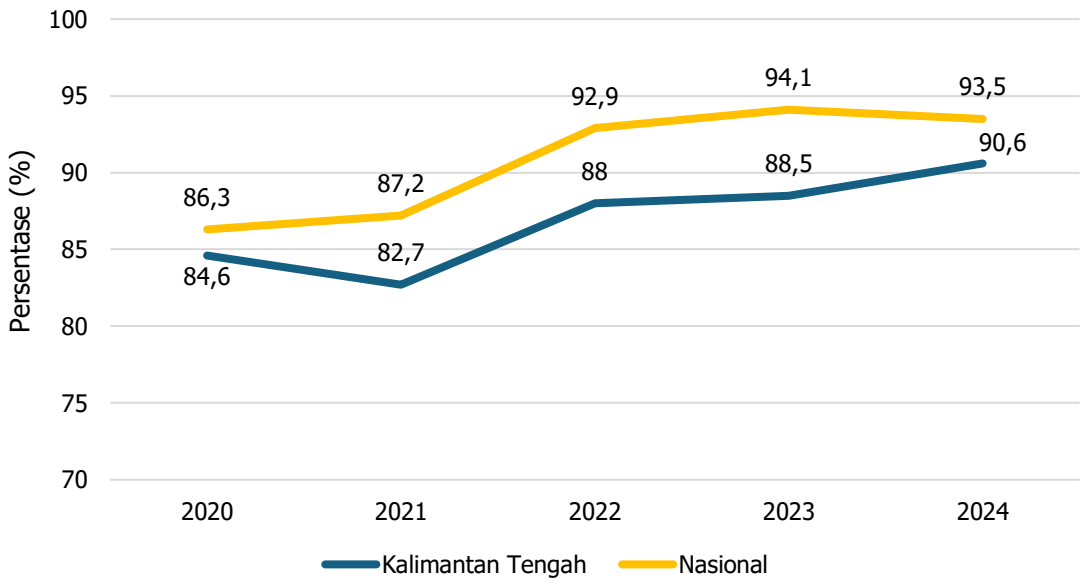



**Gambar 2.1.32 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.1.4.3 Kemandirian Pangan

Kebijakan pangan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyediakan dan mengelola keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat menunjukkan komitmen Kalimantan Tengah dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Skor pola pangan harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, dan peningkatan skor PPH menunjukkan adanya peningkatan dalam keanekaragaman konsumsi pangan yang mencakup berbagai jenis makanan yang diperlukan untuk memastikan gizi yang seimbang. Ketersediaan dan keragaman konsumsi pangan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah defisiensi gizi, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal ini juga merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pangan berkelanjutan dan mengurangi masalah kelaparan dan malnutrisi. Belum stabilnya peningkatan skor PPH mengindikasikan perlunya

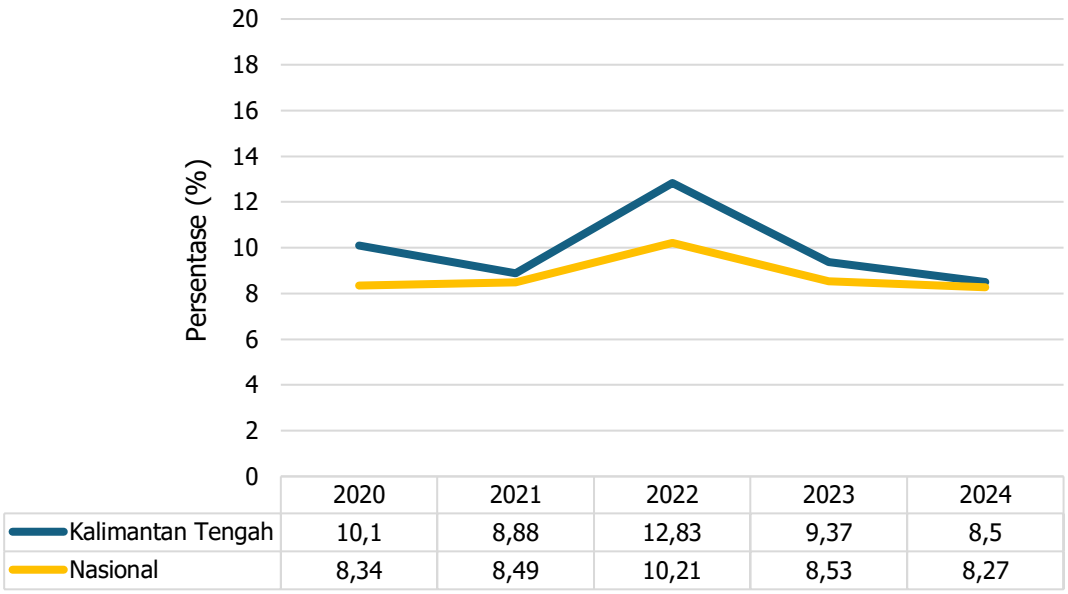
komitmen pemerintah provinsi terhadap pemenuhan pangan disertai diversifikasinya. Data skor pola pangan harapan di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya walaupun peningkatannya tidak sebesar angka nasional. Konsumsi beras terlihat masih tinggi di masyarakat yang mengindikasikan adanya ketergantungan pada satu jenis sumber pangan dasar. Hal ini perlu menjadi pertimbangan diversifikasi pangan pada periode pembangunan selanjutnya.




**Gambar 2.1.33 Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024**
Sumber: Badan Pangan Nasional

Selain aspek skor pola pangan harapan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga menjadi indikator penting yang menggambarkan kondisi pemenuhan kebutuhan pangan minimal masyarakat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *prevalence of undernourishment* adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dengankonsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Definisi lain juga menjelaskan bahwa indikator ini adalah probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kalimantan Tengah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 12,83% pada tahun 2022 menjadi 8,5% pada tahun 2024. Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,27%. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan ketersediaan pangan, tetapi kesenjangan dengan capaian nasional menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan distribusi pangan, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 10,1 | 8,88 | 12,83 | 9,37 | 8,5 |
| Nasional | 8,34 | 8,49 | 10,21 | 8,53 | 8,27 |

**Gambar 2.1.34 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

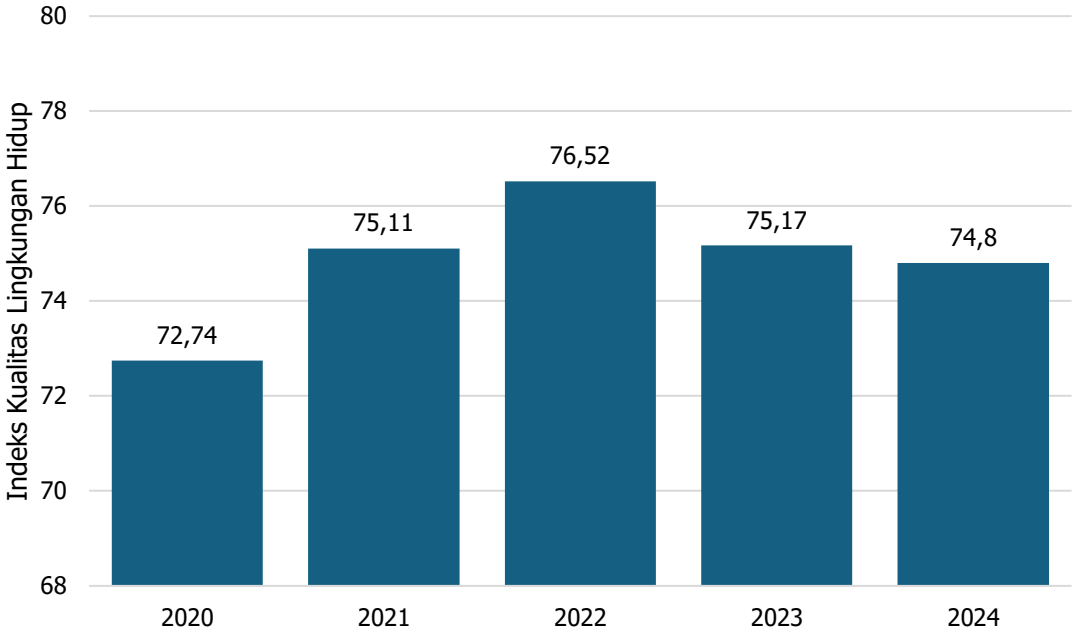
## 2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

### 2.1.5.1 Kondisi Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup penilaian kondisi kualitas air, kondisi kualitas udara, kondisi kualitas tutupan lahan, serta kondisi kualitas air laut. Nilai IKLH mencerminkan upaya-

upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dan mengukur performa perbaikan kualitas lingkungan hidup.

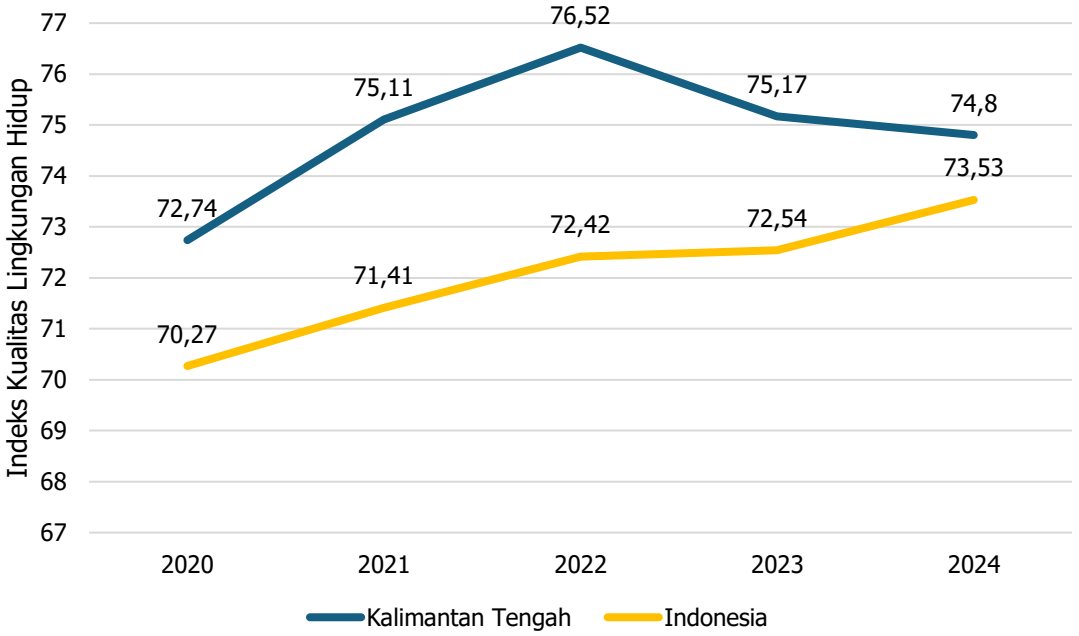
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, ada tiga indikator utama yang digunakan sebagai komponen untuk menghitung nilai IKLH. Pertama, Indikator Kualitas Air yang dihitung melalui beberapa parameter, yaitu Derajat Keasaman (pH), Kadar Oksigen Terlarut (DO), Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimia (COD), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Kadar Nitrat (NO3-N), Total Fosfat (T-Phosphat), dan Kandungan Fecal Coliform (Fecal Coli). Indikator selanjutnya adalah kualitas udara dengan komponen penilaian berdasarkan parameter NO2, SO2, dan PM2,5 yang diukur di beberapa lokasi seperti permukiman, perkantoran, industri, dan transportasi. Ketiga, indikator kualitas tutupan lahan dengan parameter pengukuran melalui perhitungan luas tutupan lahan, tutupan vegetasi non-hutan, termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, serta area rehabilitasi hutan dan lahan dalam wilayah yang diamati. Selain itu, ada tambahan komponen penilaian yaitu Indeks Kualitas Air Laut dengan komponen pengukuran berupa Total Padatan Tersuspensi (TSS), Oksigen Terlarut (DO), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (orto fosfat). Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2011 - 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




**Gambar 2.1.35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalteng 2021-2026

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020-2022, terlihat bahwa terjadi peningkatan IKLH dari 72,74 menjadi 76,52. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya nilai Indeks Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2023, terjadi penurunan kembali nilai IKLH yang disebabkan oleh menurunnya nilai Indeks Kualitas Air dan dipengaruhi oleh tingkat cemaran pada sungai yang cukup tinggi. Pada tahun tersebut, Indeks Kualitas Udara Kalimantan Tengah mencapai 91,47. Kondisi ini pun kemudian secara keseluruhan juga menurun menjadi 74,8 pada tahun 2024. Hal ini menjadi catatan penting bahwa perlunya upaya lebih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong kembali upaya konservasi lingkungan pada tahun-tahun mendatang. Secara konsisten nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah selama 2020-2024 berada di atas rata-rata nasional seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.




**Gambar 2.1.36 Perbandingan Nilai IKLH Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### 2.1.5.2 Kawasan *Heart of Borneo* (HoB)

Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) adalah sebagian dari kawasan paru-paru dunia yang terletak di bagian wilayah Pulau Kalimantan yang telah disepakati bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Paru-paru dunia itu sendiri sering didefinisikan sebagai paru-paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global.

Inisiatif *Heart of Borneo* (HoB) yang di Indonesia dikenal sebagai Jantung Kalimantan merupakan program konservasi dan pengelolaan sumber daya secara lestari, yang telah disepakati oleh tiga negara bertetangga (Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia), dengan tujuan untuk memperoleh pengelolaan lestari terhadap wilayah di Borneo seluas sekitar 265,000 km2 (26.5 juta ha). Inisiatif ini telah disepakati dan diumumkan oleh menteri tiga negara tersebut pada pertemuan para menteri (*ministerial meeting*) yang diselenggarakan di Denpasar

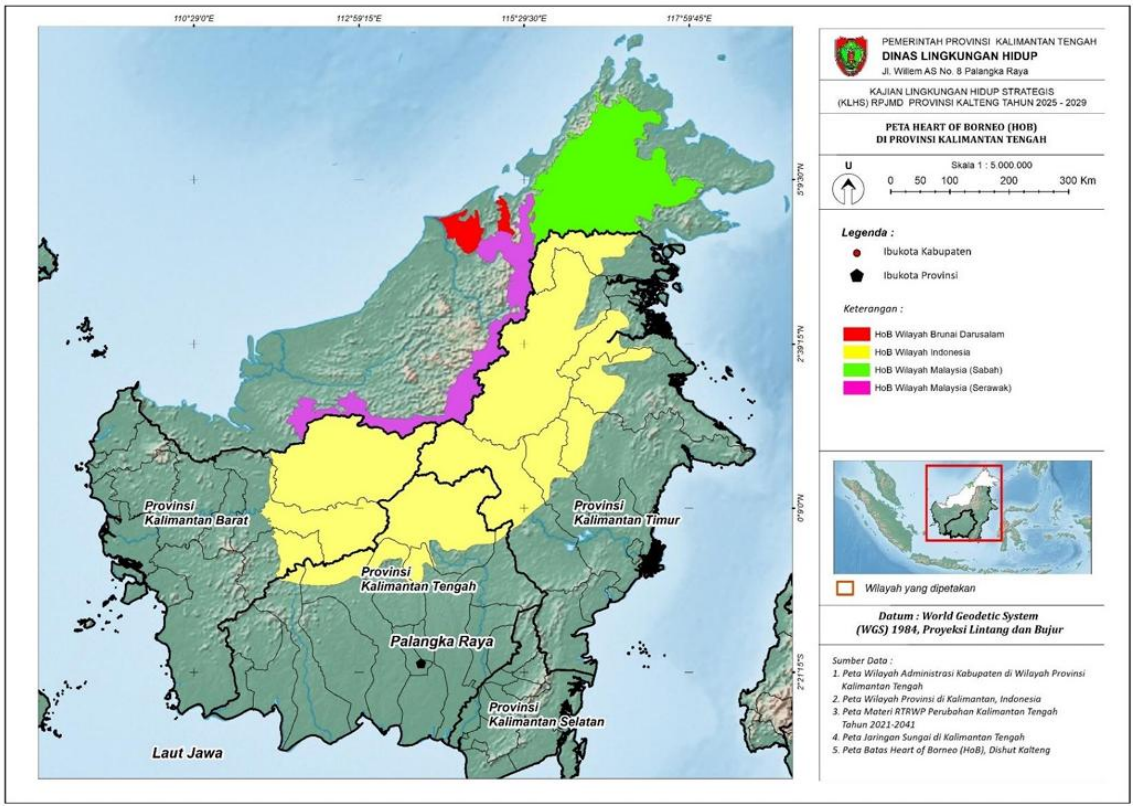
pada tanggal 12 Februari 2007. Selanjutnya, pada Trilateral Meeting yang diadakan di Pontianak, pada tanggal 4-5 April 2008, ketiga negara telah menyepakati dokumen *Strategic Plan of Action* (SPA) *of Heart of Borneo* sebagai arahan bagi ketiga negara anggota untuk mengembangkan Rencana Strategis dan Aksi Nasional (*National Strategic Plan of Action*/NSPA) oleh masing-masing negara.

Kawasan HoB di Indonesia kebanyakan terletak di sepanjang jajaran perbukitan Kalimantan sebelah utara. Di kawasan ini terdapat 13 wilayah perbukitan dengan ketinggian bervariasi antara 1.681 m dpl di Gunung Cemaru di Kalimantan Barat hingga 2.987 m dpl di Gunung Makita di Taman Nasional Kayan Mentarang. Kondisi topografi di wilayah HoB Indonesia kebanyakan berupa tebing terjal. Kawasan ini juga memiliki tiga danau besar: Danau Jempang (15.000 ha), Danau Semayang (13.000 ha) dan Danau Melintang (11.000 ha).

Kawasan HoB di Indonesia terbentang sepanjang perbatasan Kalimantan dan negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, yang kemudian diperluas hingga ke wilayah tangkapan air Pulau Kalimantan. Kawasan HoB seluas 16,8 juta ha ini kebanyakan ditutupi oleh hutan pegunungan tropis. Kawasan ini sesungguhnya merupakan koridor keanekaragaman hayati yang amat kaya, menghubungkan empat kawasan konservasi dengan luas total mencapai 4,465 juta ha yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dan Taman Nasional Betung Kerihun. Kawasan konservasi yang luasnya sekitar 40,89% dari HoB merupakan habitat yang sangat penting bagi ribuan spesies tumbuhan dan bagi sekitar 900 spesies satwa liar, menjadikan Kalimantan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan spesies tertinggi di Indonesia.

Spesies satwa liar yang ditemukan di kawasan tersebut antara lain adalah 221 spesies mamalia, 358 spesies burung penetap dan 254 spesies reptilia. Sekitar 34% dari spesies ini merupakan spesies endemik Kalimantan, termasuk Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) and Gajah Kerdil (*Elephas maximus borneensis*). Kawasan konservasi tersebut juga memiliki fungsi sangat penting

sebagai daerah tangkapan air bagi 14 sungai utama di Kalimantan (sembilan Daerah Aliran Sungai/DAS dan delapan sub-DAS), di antaranya adalah Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, semuanya menyediakan air dan mengatur tata air ke bagian hilir di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

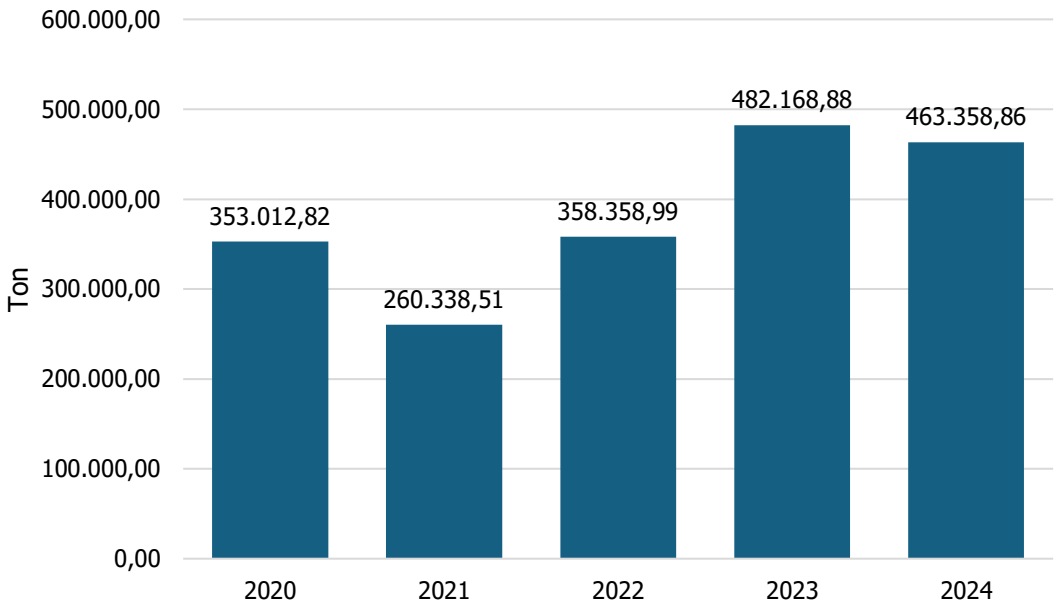



**Gambar 2.1.37 Peta Wilayah Kawasan Heart of Borneo di Indonesia**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

### 2.1.5.3 Pengelolaan Sampah

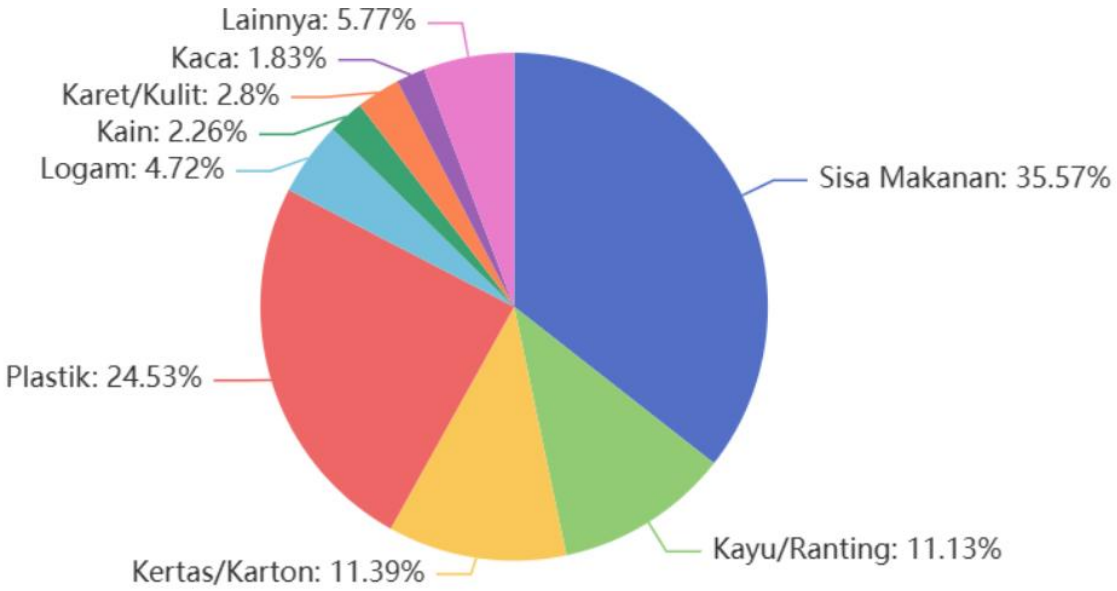
Timbulan sampah di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2020–2024, volume sampah yang dihasilkan menunjukkan tren yang cenderung meningkat secara drastis. Pada tahun 2020, total timbulan sampah tercatat sebesar 353.012,82 ton, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 260.338,51 ton, tetapi kembali meningkat menjadi 358.358,99 ton di tahun 2022. Kenaikan

berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah 482.168,88 ton, dan kembali menurun di tahun 2024 menjadi 463.358,86 ton.




**Gambar 2.1.38 Timbulan Sampah Tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**
**Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional**

Dari sisi komposisi, sampah rumah tangga dan sejenisnya didominasi oleh sisa makanan (35,57%), yang merupakan sampah organik mudah terurai. Selain itu, plastik menyumbang komposisi terbesar kedua sebesar 24,53%, diikuti oleh kertas/karton (11,39%), kayu/ranting (11,13%), dan logam (4,72%). Sampah lainnya berasal dari kain (2,26%), karet/kulit (2,80%), kaca (1,83%), serta kategori lainnya sebesar 5,77%. Tingginya proporsi sampah organik menunjukkan potensi pengelolaan melalui pendekatan berbasis pemilahan dan pengomposan, sementara dominasi sampah plastik menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pengurangan sampah non-organik dan peningkatan daur ulang. Dengan tren timbulan sampah yang cenderung meningkat, upaya pengelolaan terpadu yang melibatkan pengurangan sumber sampah, pengolahan, dan pemanfaatan kembali menjadi krusial dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

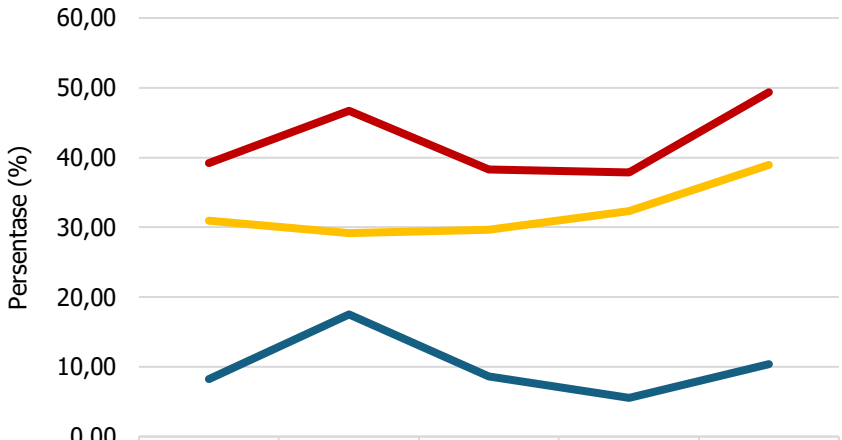



**Gambar 2.1.39 Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah**
**Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional**

Pengelolaan sampah di Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang perlu diperhatikan dengan seksama, terutama terkait dengan capaian pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam capaian pengelolaan sampah antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase sampah yang terkelola di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 30,94%, dengan pengurangan sampah sebesar 39,21% dan penanganan sampah mencapai 17,51%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengurangan sampah, tingkat pengelolaan sampah yang dilakukan masih terbatas, mengingat total sampah yang dihasilkan cukup besar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Seiring berjalannya waktu, tercatat adanya peningkatan capaian dalam pengelolaan sampah, meskipun laju kenaikannya tidak signifikan. Pada tahun 2023, persentase sampah terkelola meningkat menjadi 37,86%, namun pengurangan sampah mengalami penurunan menjadi 29,66%, sementara

penanganan sampah meningkat menjadi 32,51%. Tren ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam penanganan sampah, dengan lebih banyak perhatian pada pengelolaan daripada pengurangan sumber sampah. Capaian pengelolaan sampah terbaik terjadi pada tahun 2024, dengan persentase sampah terkelola mencapai 49,35%, yang menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Di sisi lain, pengurangan sampah pada tahun 2024 tercatat 38,94%, meskipun masih di bawah target nasional yang lebih tinggi. Penanganan sampah juga mengalami kenaikan menjadi 10,42%, yang mengindikasikan adanya peningkatan upaya untuk menangani sampah secara lebih efektif dan efisien.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengurangan Sampah (%) | 8,26 | 17,51 | 8,65 | 5,55 | 10,42 |
| Penanganan Sampah (%) | 30,94 | 29,17 | 29,66 | 32,31 | 38,94 |
| Sampah terkelola (%) | 39,21 | 46,68 | 38,32 | 37,86 | 49,35 |

**Gambar 2.1.40 Pengelolaan Sampah Kalimantan Tengah**
**Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2024)**

Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, khususnya TPA dan TPST merupakan elemen krusial dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan data terbaru, tercatat bahwa dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, hanya 9 kabupaten/kota yang memiliki fasilitas TPA atau TPST, sementara 3 kabupaten lainnya belum memiliki fasilitas dasar ini.

**Tabel 2.1.25 Keberadaan TPA/TPST pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah**

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah TPA/TPST |
|---|---|---|
| 1 | Kotawaringin Barat | 1 |
| 2 | Kotawaringin Timur | 1 |
| 3 | Seruyan | 2 |
| 4 | Lamandau | 0 |
| 5 | Sukamara | 0 |
| 6 | Katingan | 0 |
| 7 | Palangkaraya | 1 |
| 8 | Gunungmas | 1 |
| 9 | Pulang Pisau | 1 |
| 10 | Kapuas | 1 |
| 11 | Barito Utara | 1 |
| 12 | Barito Selatan | 1 |
| 13 | Barito Timur | 2 |
| 14 | Murung Raya | 1 |

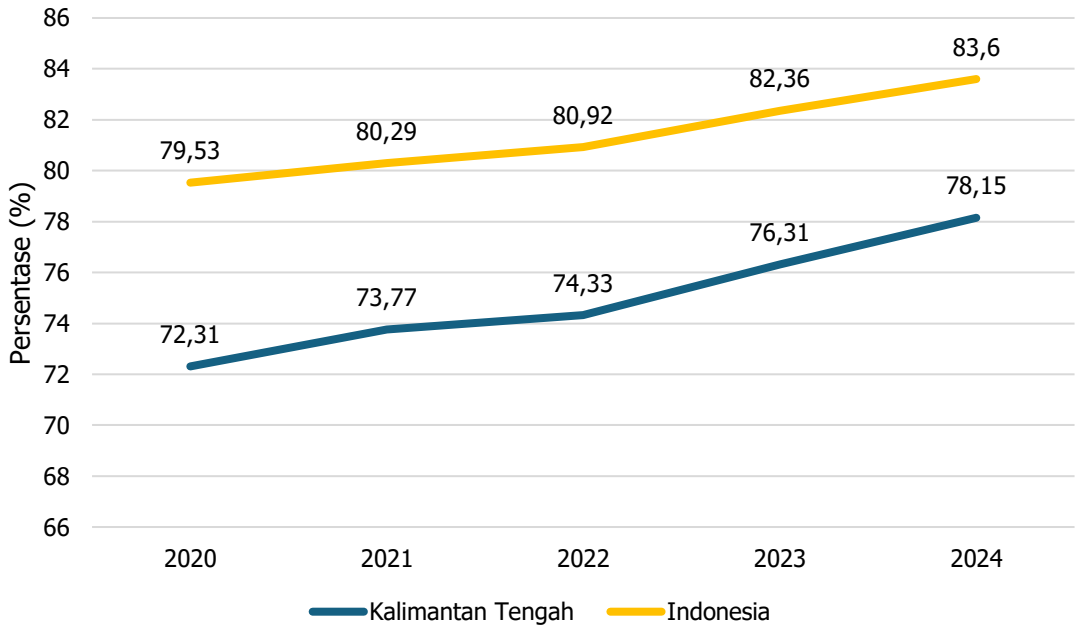
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Kabupaten/kota yang memiliki jumlah TPA/TPST terbanyak adalah Kota Palangka Raya dengan 4 unit fasilitas, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Barat dan Barito Selatan yang masing-masing memiliki 2 unit. Sementara itu, kabupaten-kabupaten seperti Lamandau, Gunung Mas, Katingan, Murung Raya, dan Seruyan belum memiliki TPA/TPST sama sekali yang tentunya berdampak pada keterbatasan layanan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Ketiadaan fasilitas TPA/TPST di sejumlah daerah menjadi faktor penghambat utama dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah secara komprehensif. Selain menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat, hal ini juga menyulitkan pencapaian target nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

### 2.1.5.4 Akses Sanitasi Masyarakat

Ketersediaan sanitasi yang layak dan aman merupakan indikator penting dalam pembangunan permukiman sehat dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir (2020-2025) mengalami peningkatan tren terkait rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Konsep sanitasi layak

sendiri sejak tahun 2018 mengalami perubahan yang mengedepankan aspek dasar kelayakan prasarana dasar kesehatan, yaitu memiliki fasilitas BAB sendiri atau bersama, kloset leher angka dan TPAT tangki septik/IPAL. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan dari 72,31% pada tahun 2020 meningkat menjadi 78,15% persen tahun 2024. Namun, capaian angka akses sanitasi layak Kalimantan Tengah ternyata masih jauh di bawah rata-rata nasional. Per tahun 2024, rata-rata nasional terhadap persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak telah mencapai 83,6% disaat Provinsi Kalimantan Tengah baru mencapai 78,15%.

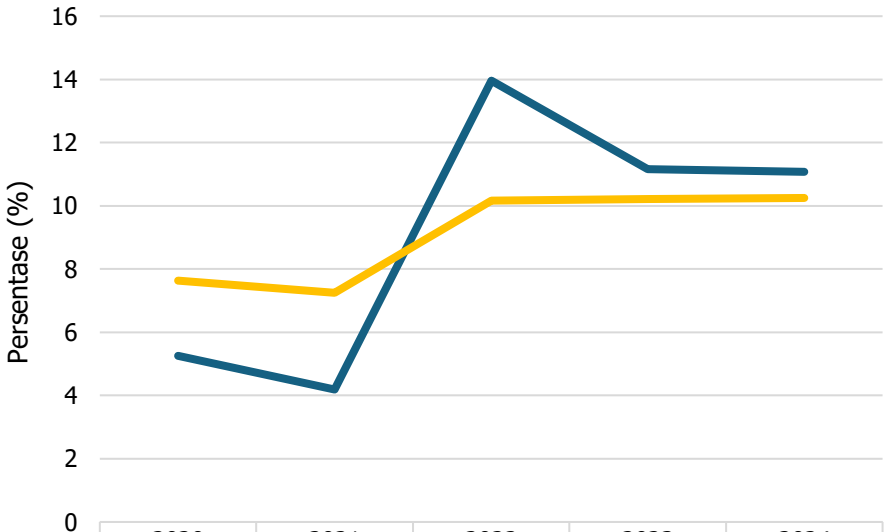



**Gambar 2.1.41 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**
**Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

Namun, jika ditinjau dari indikator akses terhadap sanitasi aman, yaitu sanitasi yang tidak hanya layak tetapi juga memastikan bahwa limbah domestik diolah atau dibuang secara aman dan tidak mencemari lingkungan, maka capaian Kalimantan Tengah masih sangat rendah dan fluktuatif. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman hanya mencapai 5,26% pada tahun 2020, bahkan sempat menurun menjadi 4,18% di tahun 2021. Kendati

sempat melonjak signifikan menjadi 13,96% pada tahun 2022, capaian tersebut kembali menurun menjadi 11,16% pada tahun 2023 dan 11,07% pada tahun 2024. Walaupun demikian, capaian Kalimantan Tengah pada 3 tahun terakhir (2022-2024) berada diatas capaian Nasional.

Data ini menunjukkan bahwa peningkatan sanitasi di Kalimantan Tengah masih lebih berfokus pada perluasan cakupan sanitasi layak, namun belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas sistem pengolahan limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan. Rendahnya capaian sanitasi aman juga menunjukkan bahwa sebagian besar limbah rumah tangga masih belum dikelola secara aman, sehingga berpotensi mencemari sumber daya air dan lingkungan sekitar, serta berdampak pada kesehatan masyarakat.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 5,26 | 4,19 | 13,96 | 11,16 | 11,07 |
| Indonesia | 7,64 | 7,25 | 10,16 | 10,21 | 10,25 |

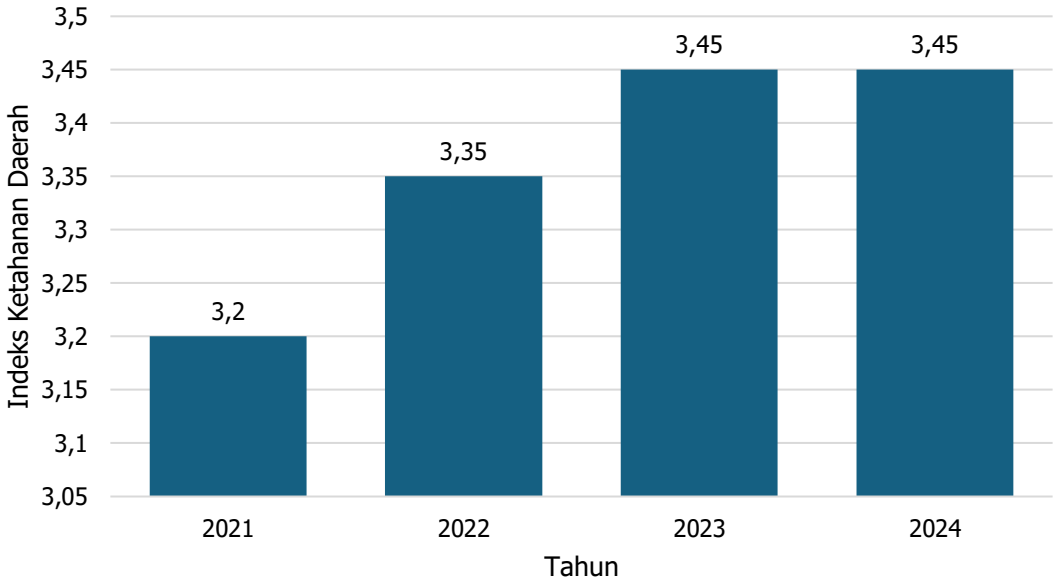
**Gambar 2.1.42 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Terakses Sanitasi Aman Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024**
**Sumber: Badan Pusat Statistik**

## 2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

### 2.1.6.1 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan menanggulangi risiko

bencana serta dampak perubahan iklim. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur.



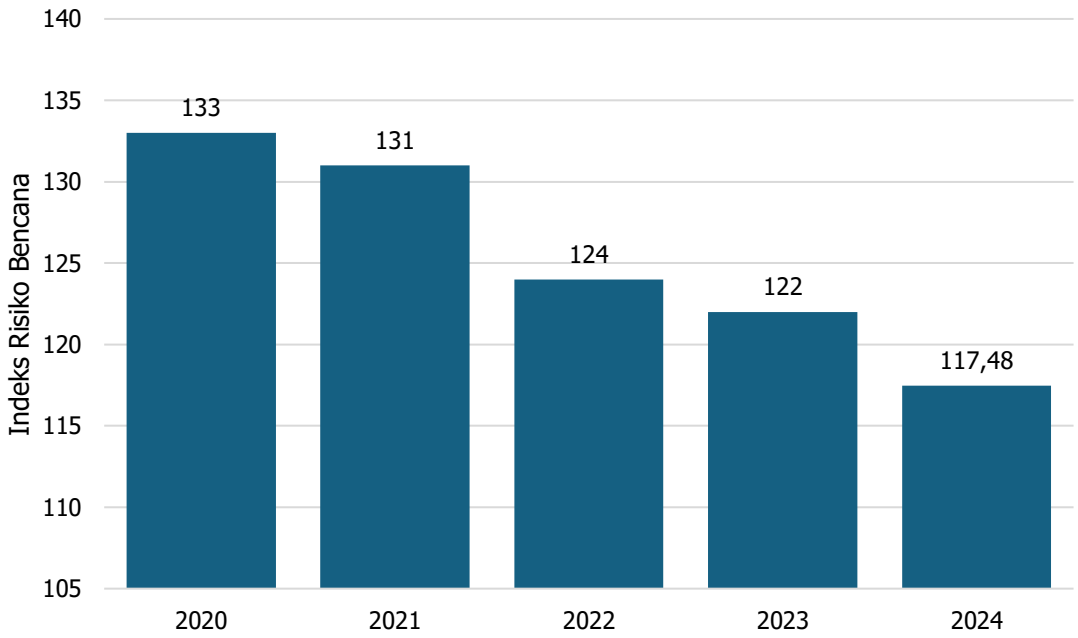

**Gambar 2.1.43 Indeks Ketahanan Daerah**
**Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026**

Berdasarkan data Laporan Hasil Evaluasi RPJMD 2021-2026, Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan nilai IKD selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, nilai IKD tercatat sebesar 3,20, yang kemudian meningkat menjadi 3,35 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya penguatan kapasitas daerah, baik dari sisi kebijakan, perencanaan kebencanaan, maupun pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Pada tahun 2023, IKD kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 3,45, dan nilai tersebut bertahan pada angka yang sama di tahun 2024. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah telah mencapai level ketahanan yang relatif stabil terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim. Namun demikian, nilai IKD tahun 2024 belum berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,50. Hal ini menandakan bahwa masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem

ketahanan daerah secara menyeluruh, termasuk melalui peningkatan efektivitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi kebencanaan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

### 2.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah hasil penghitungan yang digunakan untuk menilai kerentanan suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana. Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai IRB sebesar 117,48, yang termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2022), ancaman bencana di Kalimantan Tengah meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrem atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem. Semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai IRB dalam kategori sedang, kecuali Kabupaten Katingan yang memiliki nilai IRB dalam kategori tinggi. Ancaman bencana yang menonjol di Kabupaten Katingan meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Perkembangan nilai IRB Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagai berikut:

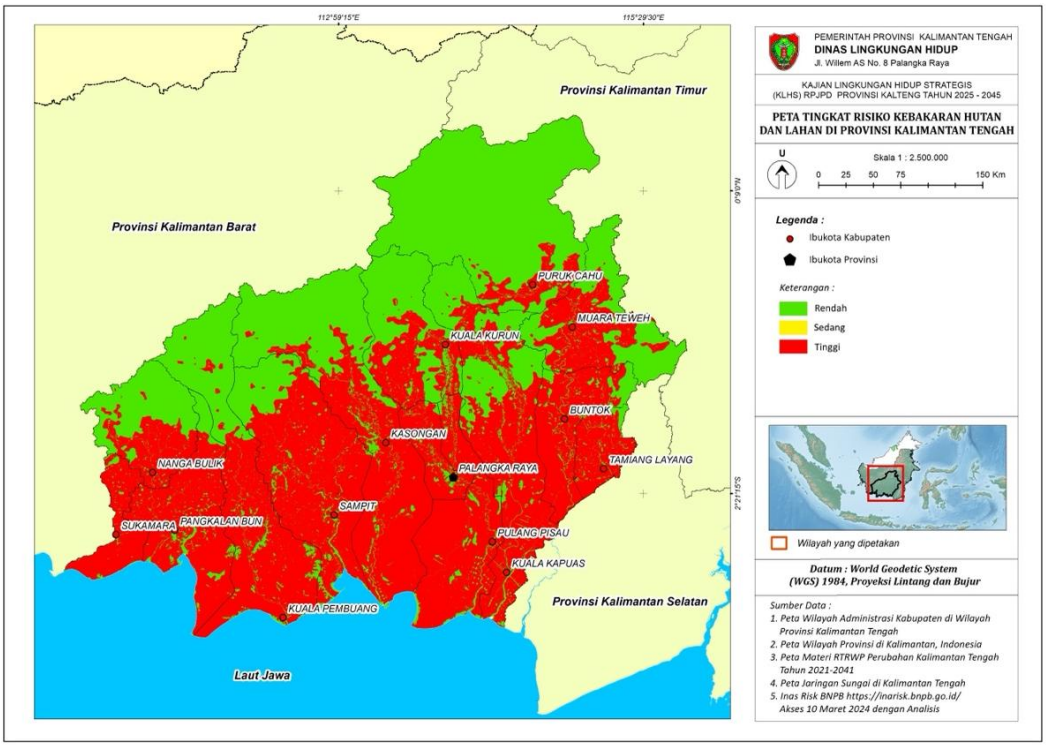



**Gambar 2.1.44 Nilai Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024**
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Karakteristik umum bencana di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagai berikut:

**1. Kebakaran Hutan dan Lahan**

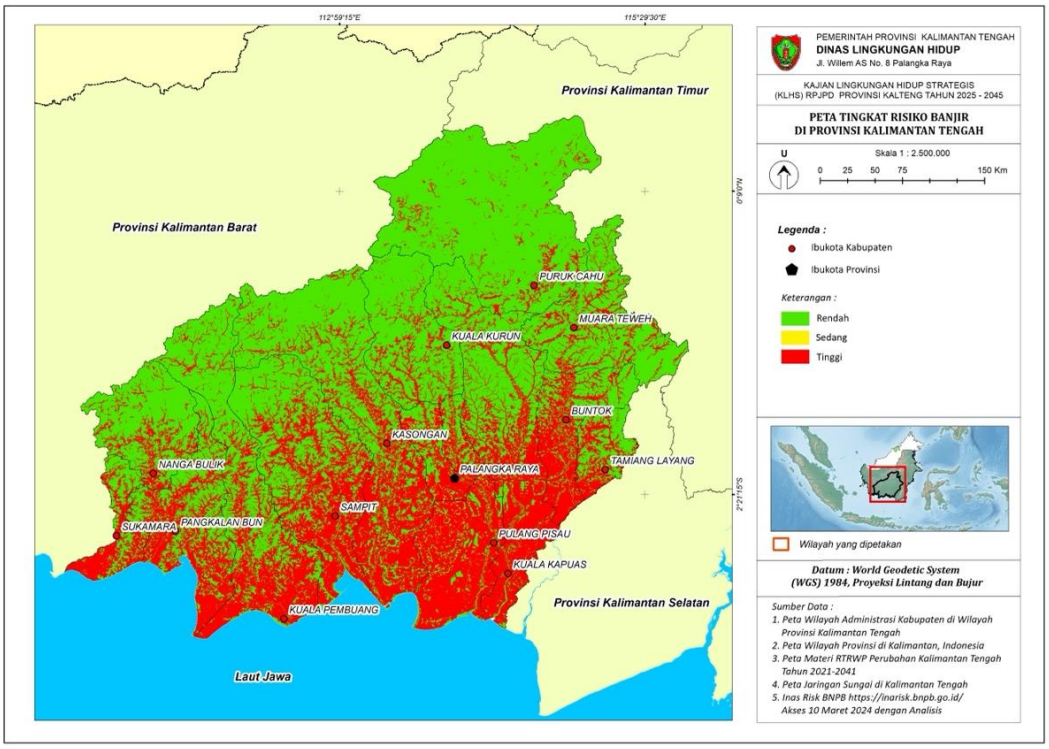
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor iklim, kondisi lahan yang sebagian besar gambut, dan pembersihan lahan. Tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh Risiko Tingkat Tinggi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan seluas sekitar 8.687.861 hektar (56,45%) dan kemudian pada tingkat risiko rendah seluas 6.702.801 hektar (43,55%). Sementara pada tingkat risiko sedang hanya seluas 139 hektar (0,00%). Tingkat Risiko Tinggi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah berada di bagian selatan atau di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Sementara di bagian utara atau hulu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang relatif lebih rendah. Minimal ada 2 faktor yang melatarbelakangi tingginya Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di bagian selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama, di bagian selatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan kedua di bagian hulu tutupan hutannya relatif lebih baik. Kebakaran ini berdampak pada terancamnya kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas transportasi karena kabut asap yang menghalangi jarak pandang, dan semakin langkanya biodiversitas hayati. Detail daerah yang memiliki risiko kebakaran hutan tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau pada peta berikut.




**Gambar 2.1.45 Peta Tingkat Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPMPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

## 2. Banjir

Ancaman banjir di Kalimantan Tengah terdiri dari ancaman banjir bandang atau banjir kirimkan dan banjir rob. Fenomena banjir bandang diakibatkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang tinggi serta dipengaruhi oleh pola sungai di Kalimantan Tengah yang berjenis dendrentik. Pola tersebut memiliki karakteristik risiko banjir yang tinggi apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai. Kemudian, fenomena banjir rob diakibatkan oleh naiknya permukaan air sungai atau air di pesisir akibat pasang laut. Seluruh kabupaten/ kota di Kalimantan Tengah memiliki potensi bahaya banjir tinggi kecuali Kabupaten Barito Timur. Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh tingkat rendah seluas sekitar 9.827.613 hektar (63,85%) dan kemudian pada Tingkat Risiko Tinggi Bencana Banjir seluas 5.535.960 hektar (35,97%). Sementara pada tingkat risiko sedang hanya seluas 27.228 hektar (0,18%). Lebih lengkap mengenai wilayah yang memiliki risiko banjir tinggi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



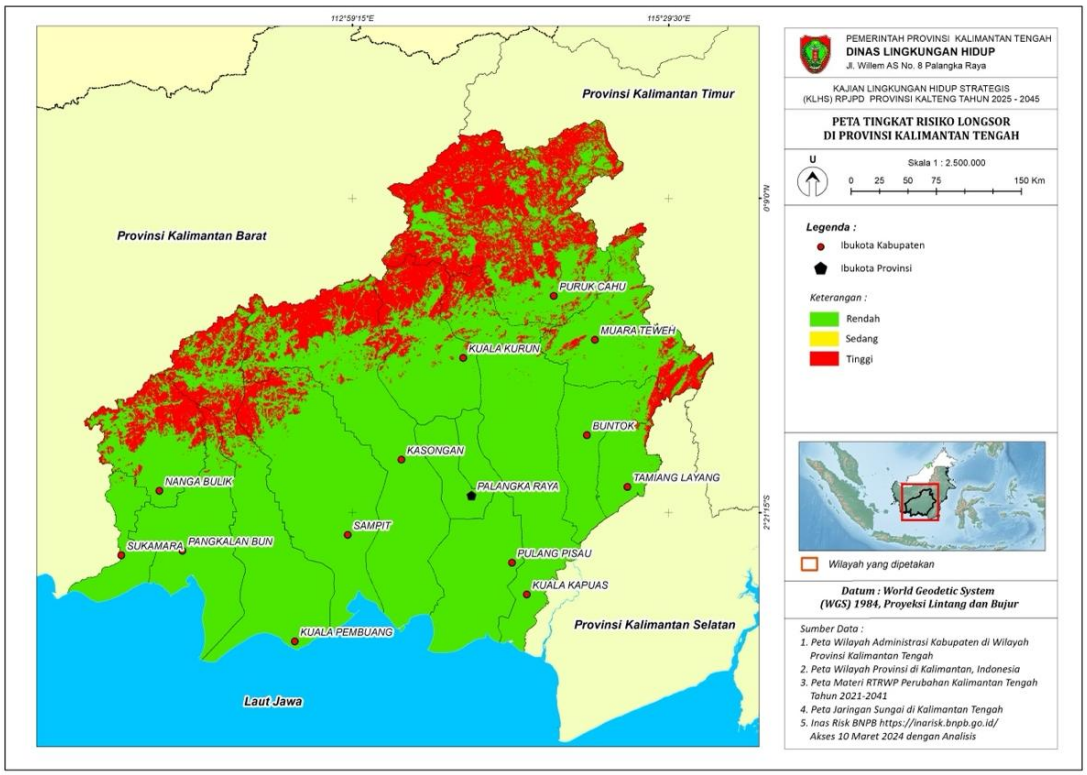

**Gambar 2.1.46 Peta Tingkat Risiko Banjir Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPMPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

Terlihat bahwa Tingkat Risiko Rendah Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah mendominasi bagian hulu, sementara di bagian hilir khususnya pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan pinggir sungai di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh Tingkat Risiko Tinggi Bencana Banjir.

### 3. Tanah Longsor

Sebagian besar kabupaten di Kalimantan Tengah memiliki tingkat potensi bahaya rendah dan sedang, kecuali Kabupaten Murung Raya yang tergolong klasifikasi potensi bahaya longsor tinggi. Tingkat risiko bencana longsor di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh tingkat rendah seluas sekitar 12.250.523 hektar (79,60%) dan kemudian pada tingkat risiko tinggi seluas 3.139.415 hektar (20,40%). Sementara pada tingkat risiko sedang hanya seluas 863 hektar (0,01%). Tingkat Risiko Rendah Bencana Longsor mendominasi bagian selatan atau hilir yang merupakan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat kemiringan yang relatif rendah/rata. Sementara di bagian hulu Provinsi Kalimantan Tengah,

sebagian di antaranya memiliki Tingkat Risiko Tinggi Bencana Longsor. Ancaman tersebut terdapat di wilayah dengan lereng-lereng terjal, topografi berbukit, punggungan, dan wilayah hulu DAS. Peta berikut menunjukkan wilayah yang memiliki risiko tanah longsor tdi Provinsi Kalimantan Tengah.




**Gambar 2.1.47 Peta Tingkat Risiko Longsor Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPMPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

## 4. Kekeringan

Wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan memiliki potensi bencana kekeringan yang rendah karena wilayah yang relatif basah sehingga kebutuhan air tetap bisa tercukupi. Kabupaten yang memiliki potensi bencana kekeringan tinggi adalah Kabupaten Sukamara.

## 5. Cuaca Ekstrem

Beberapa cuaca ekstrem yang mengancam Kalimantan Tengah yaitu angin puting beliung yang terjadi saat musim peralihan penghujan dan kemarau. Adapun, wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki risiko tinggi terhadap

keberadaan cuaca ekstrem adalah bagian selatan dan tengah Kalimantan Tengah.

**6. Gelombang Ekstrem/Abrasi**

Gelombang ekstrem disebabkan oleh adanya siklon tropis yang mengakibatkan peningkatan gelombang laut, yang kemudian menyebabkan abrasi pantai. Apabila abrasi pantai terjadi secara intens, ini akan berdampak pada perubahan garis pantai sehingga menimbulkan masalah terkait kepemilikan hak tanah, kerusakan bangunan, luas lahan tambak yang berkurang, dan sebagainya. Adapun, kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Kalimantan Tengah berisiko terkena gelombang ekstrem.

**7. Gempa Bumi**

Potensi ancaman bencana gempa bumi di Kalimantan Tengah tergolong dalam klasifikasi kelas rendah. Ini dilatarbelakangi oleh letak Kalimantan Tengah yang tidak berada di zona pertemuan lempeng sehingga risiko getaran akibat tumbukan lempeng relatif rendah.

### 2.1.6.3 Kerentanan Perubahan Iklim

Desa-desa di Kalimantan Tengah secara garis besar atau 80,9% (1.430 desa dari 1.574 desa) dikategorikan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, maka Kabupaten Kapuas adalah kabupaten yang paling banyak memiliki desa rentan terhadap perubahan iklim dengan jumlah 233 desa atau 14,8% dari jumlah desa di Kalteng. Kabupaten/Kota yang paling sedikit memiliki desa rawan perubahan iklim adalah Kota Palangka Raya dengan jumlah desa sebanyak 30 (1,9%). Distribusi Desa Rentan Perubahan Iklim berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, ditampilkan pada tabel dan gambar berikut.

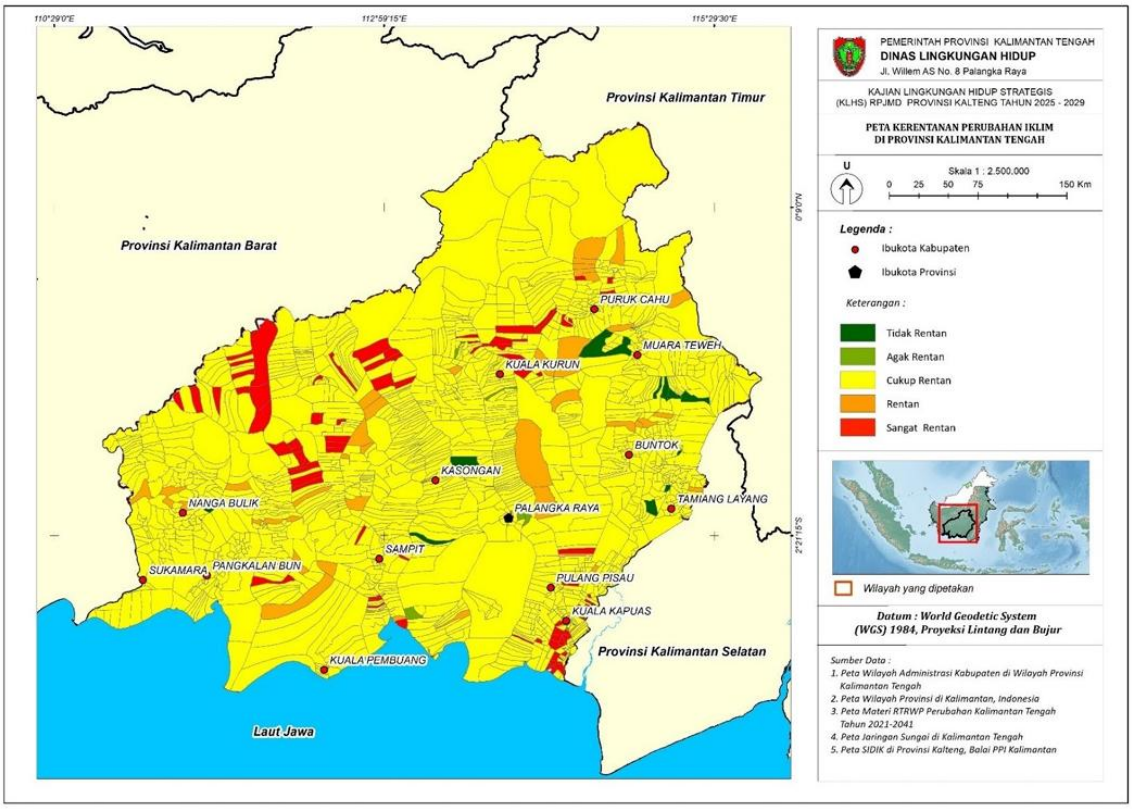
**Tabel 2.1.26 Kelas Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Desa Tahun 2013-2025**

| No | Kabupaten/ Kota | Kelas Kerentanan Perubahan Iklim (Desa) | | | | | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tidak Rentan | Agak Rentan | Cukup Rentan | Rentan | Sangat Rentan | |
| 1 | Barito Selatan | 1 | | 89 | 5 | | 95 |
| 2 | Barito Timur | 3 | | 99 | 1 | | 103 |
| 3 | Barito Utara | 5 | | 96 | 2 | | 103 |

| No | Kabupaten/ Kota | Kelas Kerentanan Perubahan Iklim (Desa) | | | | | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tidak Rentan | Agak Rentan | Cukup Rentan | Rentan | Sangat Rentan | |
| 4 | Gunung Mas | | 2 | 121 | 1 | 3 | 127 |
| 5 | Kapuas | | 3 | 192 | 8 | 30 | 233 |
| 6 | Katingan | 1 | 1 | 148 | 3 | 8 | 161 |
| 7 | Kotawaringin Barat | | | 93 | 1 | | 94 |
| 8 | Kotawaringin Timur | | | 158 | 7 | 20 | 185 |
| 9 | Lamandau | 2 | | 82 | 4 | | 88 |
| 10 | Murung Raya | | | 111 | 6 | 7 | 124 |
| 11 | Pulang Pisau | | | 97 | | 2 | 99 |
| 12 | Seruyan | | | 86 | 3 | 11 | 100 |
| 13 | Sukamara | | | 32 | | | 32 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 1 | 2 | 26 | | 1 | 30 |
| **Jumlah Total** | | **13** | **8** | **1.430** | **41** | **82** | **1.574** |
| **Persentase (%)** | | **0,8** | **0,5** | **90,9** | **2,6** | **5,2** | **100** |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

Sementara itu, sebaran spasial kelas kerentanan terhadap perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau pada peta berikut ini.




**Gambar 2.1.48 Peta Kerentanan Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah**
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

## 2.1.7 Demografi

### 2.1.7.1 Kondisi Kependudukan Saat Ini

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 mencapai 2.844.990 jiwa yang terdiri atas 1.467.140 jiwa penduduk laki-laki dan 1.377.850 jiwa penduduk perempuan. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar -1,65% dari tahun sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2025 mencapai 1,3%. Meskipun demikian, pada rentang tahun 2020 hingga 2025 terjadi beberapa fluktuasi laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai mencapai 1,44%. Sementara itu, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 dan 2025 dengan nilai sebesar 1,3%. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.

Secara detail, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.27 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2025**

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Laju Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.670.000 | 1.385.900 | 1.284.100 | -1,65 |
| 2021 | 2.702.400 | 1.401.600 | 1.300.800 | 1,21 |
| 2022 | 2.741.000 | 1.420.800 | 1.320.200 | 1,44 |
| 2023 | 2.773.780 | 1.434.140 | 1.339.640 | 1,19 |
| 2024 | 2.809.700 | 1.450.830 | 1.358.870 | 1,3 |
| 2025 | 2.844.990 | 1.467.140 | 1.377.850 | 1,3 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain ditinjau berdasarkan jenis kelamin, kondisi demografi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau berdasarkan komposisi umur penduduk. Jumlah penduduk pada kelompok umur 0 – 4 mencapai 253.540 jiwa pada tahun 2025. Nilai tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data tahun 2024 yang mencapai 246.730 jiwa dan tahun 2023 yang mencapai 240.210 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2025 mencapai 1.994.960 jiwa dan relatif mengalami peningkatan yang pada tahun 2024 sejumlah 1.973.090 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (65+ tahun) pada tahun 2025 mencapai 158.120 jiwa. Jumlah penduduk lanjut usia tersebut mengalami kenaikan sekitar lebih dari dua kali lipat apabila dibandingkan jumlah penduduk lanjut usia pada tahun 2013 sebesar 69.900 jiwa. Secara rinci, komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

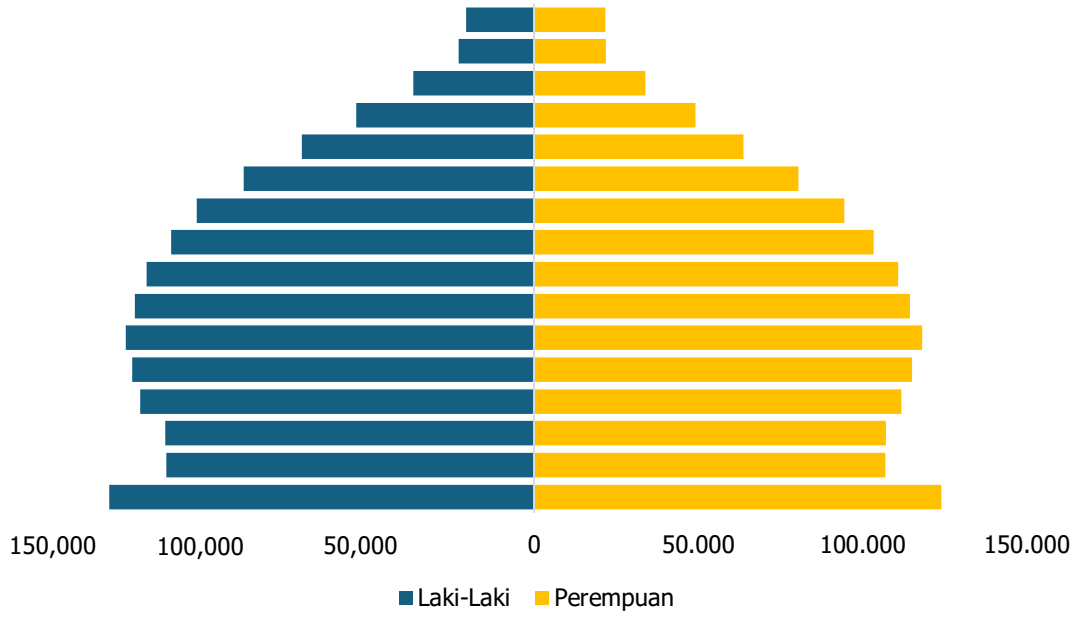
**Tabel 2.1.28 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 – 2025 (dalam jiwa)**

| Kelompok Umur | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 - 4 | 219.760 | 226.830 | 233.640 | 240.210 | 246.730 | 253.540 |
| 5 - 9 | 220.880 | 219.300 | 218.610 | 218.640 | 218.970 | 218.970 |
| 10 - 14 | 234.020 | 231.410 | 228.260 | 224.910 | 221.830 | 219.400 |
| 15 - 19 | 237.280 | 236.430 | 235.750 | 234.980 | 233.770 | 231.900 |
| 20 - 24 | 239.820 | 240.230 | 240.040 | 239.410 | 238.530 | 237.570 |
| 25 - 29 | 235.730 | 237.120 | 238.670 | 240.230 | 241.580 | 242.560 |
| 30 - 34 | 231.560 | 232.740 | 233.550 | 234.180 | 234.940 | 236.010 |

| Kelompok Umur | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 35 - 39 | 217.320 | 219.790 | 222.410 | 225.000 | 227.260 | 228.980 |
| 40 - 44 | 201.820 | 204.930 | 207.480 | 209.670 | 211.790 | 214.010 |
| 45 - 49 | 175.010 | 180.120 | 184.970 | 189.470 | 193.550 | 197.170 |
| 50 - 54 | 141.260 | 146.740 | 152.420 | 158.160 | 163.740 | 169.010 |
| 55 - 59 | 110.770 | 115.610 | 120.220 | 124.760 | 129.440 | 134.410 |
| 60 - 64 | 78.400 | 83.180 | 88.240 | 93.410 | 98.490 | 103.340 |
| 65+ | 118.850 | 125.660 | 132.930 | 140.720 | 149.09 | 158.120 |
| Jumlah | 2.670.000 | 2.702.400 | 2.741.000 | 2.773.780 | 2.809.700 | 2.844.990 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data komposisi penduduk juga dapat direpresentasikan dalam bentuk piramida penduduk. Sebagai contoh, data komposisi penduduk tahun 2025 yang disajikan pada gambar berikut menggambarkan jenis piramida penduduk stasioner awal. Jenis piramida tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang masif, angka kelahiran yang mulai stabil, dan angka harapan hidup yang mulai membaik.




**Gambar 2.1.49 Piramida Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2025 (dalam ribu jiwa)**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Komposisi penduduk dapat pula direpresentasikan melalui rasio jenis kelamin. Berdasarkan rasio jenis kelamin, komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020 – 2025 masih didominasi oleh penduduk

laki-laki. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 107,93. Angka tersebut menandakan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 mencapai 106,48. Angka tersebut menandakan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren penurunan setiap tahunnya dan menandakan adanya arah ke keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.29 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2025**

| Tahun | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.385.900 | 1.284.100 | 107,93 |
| 2021 | 1.401.600 | 1.300.800 | 107,75 |
| 2022 | 1.420.800 | 1.320.200 | 107,62 |
| 2023 | 1.434.140 | 1.339.640 | 107,05 |
| 2024 | 1.450.830 | 1.358.870 | 106,77 |
| 2025 | 1.467.140 | 1.377.850 | 106,48 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan distribusi penduduk, dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Tengah secara umum terkonsentrasi pada empat daerah dengan persentase penduduk di atas 10%. Adapun keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kabupaten dengan persentase penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 dengan nilai 15,92%. Sementara itu, Kabupaten Sukamara menjadi kabupaten dengan persentase penduduk terendah dengan nilai 2,42% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci, distribusi penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.30 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah**
**Tahun 2025**

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Proporsi Penduduk (%) |
|---|---|---|
| Kotawaringin Barat | 285.740 | 10,04 |
| Kotawaringin Timur | 452.870 | 15,92 |
| Kapuas | 435.070 | 15,29 |
| Barito Selatan | 137.060 | 4,82 |
| Barito Utara | 164.620 | 5,79 |
| Sukamara | 68.980 | 2,42 |
| Lamandau | 105.210 | 3,70 |
| Seruyan | 177.320 | 6,23 |
| Katingan | 174.340 | 6,13 |
| Pulang Pisau | 140.780 | 4,95 |
| Gunung Mas | 148.230 | 5,21 |
| Barito Timur | 120.200 | 4,23 |
| Murung Raya | 120.220 | 4,23 |
| Palangkaraya | 313.370 | 11,05 |
| **Kalimantan Tengah** | **2.844.990** | **100,00** |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan kepadatan penduduk, dapat dilihat bahwa Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kepadatan penduduk Kota Palangkaraya pada tahun 2020 mencapai 103,01 jiwa/km². Nilai tersebut semakin meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2025 mencapai 110 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya terjadi karena luas wilayah kota tersebut hanya sebesar 2.848,7 km², sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Murung Raya yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah sebesar 23.575,3 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Murung Raya hanya sebesar 4,73 jiwa/km² pada tahun 2020 dan 5,10 jiwa/km² pada tahun 2025. Hal ini terjadi karena kondisi Kabupaten Murung Raya yang didominasi oleh tutupan lahan berupa hutan. Secara detail, kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.31 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2025 (dalam ribu jiwa)

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah ($km^2$) | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kotawaringin Barat | 9.480,30 | 28,52 | 28,74 | 29,00 | 29,51 | 29.83 | 30.14 |
| Kotawaringin Timur | 15.543,80 | 27,59 | 27,81 | 28,06 | 28,52 | 28.83 | 29.14 |
| Kapuas | 17.033,60 | 24,10 | 24,43 | 24,85 | 24,96 | 25.25 | 25.54 |
| Barito Selatan | 6.267,10 | 20,93 | 21,00 | 21,06 | 21,49 | 21.69 | 21.87 |
| Barito Utara | 9.984,80 | 15,50 | 15,74 | 16,04 | 16,09 | 16.29 | 16.49 |
| Sukamara | 3.311,20 | 19,17 | 19,60 | 20,17 | 20,13 | 20.48 | 20.83 |
| Lamandau | 7.632,40 | 12,79 | 13,17 | 13,68 | 13,38 | 13.58 | 13.78 |
| Seruyan | 15.215,20 | 10,71 | 10,80 | 10,92 | 11,26 | 11.46 | 11.65 |
| Katingan | 20.382,30 | 7,96 | 8,00 | 8,05 | 8,31 | 8.43 | 8.55 |
| Pulang Pisau | 9.650,90 | 13,94 | 14,02 | 14,11 | 14,32 | 14.46 | 14.59 |
| Gunung Mas | 9.305,80 | 14,55 | 14,87 | 15,29 | 15,35 | 15.64 | 15.93 |
| Barito Timur | 3.212,50 | 35,25 | 35,55 | 35,92 | 36,52 | 36.97 | 37.42 |
| Murung Raya | 23.575,30 | 4,73 | 4,77 | 4,81 | 4,95 | 5.02 | 5.10 |
| Palangkaraya | 2.848,70 | 103,01 | 104,96 | 107,38 | 107,35 | 108.86 | 110.00 |
| Kalimantan Tengah | **153.443,9** | **17,34** | **17,69** | **17,40** | **17,61** | **25,48** | **25,79** |

Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.1.7.2 Proyeksi Kependudukan

Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi terkini yang bersifat kompleks dan dinamis. Salah satu data dasar dan krusial yang digunakan sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan adalah data demografi. Hal ini erat kaitannya dengan fakta bahwa manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Oleh karena itu, data dan informasi demografi, seperti jumlah penduduk dan data turunannya, harus dijadikan sebagai acuan penting dalam perencanaan pembangunan karena mampu memberikan gambaran terkait kondisi pembangunan yang telah dijalankan. Selain itu, data dan informasi demografi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan yang telah terjadi dan merumuskan kebijakan pembangunan di masa depan. Selain data jumlah penduduk, penting juga untuk memperhitungkan faktor-faktor demografis lainnya seperti distribusi usia penduduk, angka ketergantungan, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk. Data-data ini sangat berperan dalam merancang perencanaan pembangunan yang presisi dan sesuai dengan potensi perkembangan wilayah. Data-data

tersebut selanjutnya dapat dikembangkan melalui perhitungan proyeksi penduduk hingga 5 tahun mendatang sebagai dasar pertimbangan perencanaan jangka menengah maupun tahunan.

**Tabel 2.1.32 Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur**
**Periode 2026-2030 (dalam ribu jiwa)**

| Usia (Tahun) | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 0—4 | 253,04 | 252,41 | 251,6 | 250,62 | 249,48 |
| 5—9 | 226,05 | 232,83 | 239,39 | 245,89 | 252,69 |
| 10—14 | 217,84 | 217,16 | 217,2 | 217,53 | 217,53 |
| 15—19 | 229,33 | 226,21 | 222,89 | 219,84 | 217,44 |
| 20—24 | 236,72 | 236,04 | 235,28 | 234,08 | 232,23 |
| 25—29 | 242,99 | 242,81 | 242,17 | 241,29 | 240,32 |
| 30—34 | 237,41 | 238,98 | 240,55 | 241,91 | 242,88 |
| 35—39 | 230,16 | 230,97 | 231,61 | 232,36 | 233,44 |
| 40—44 | 216,45 | 219,06 | 221,62 | 223,85 | 225,56 |
| 45—49 | 200,22 | 202,73 | 204,9 | 206,99 | 209,18 |
| 50—54 | 173,98 | 178,69 | 183,07 | 187,04 | 190,55 |
| 55—59 | 139,68 | 145,13 | 150,63 | 155,98 | 161,04 |
| 60—64 | 107,9 | 112,25 | 116,54 | 120,97 | 125,66 |
| 65—69 | 75,06 | 79,68 | 84,41 | 89,05 | 93,48 |
| 70—74 | 47,54 | 50,34 | 53,33 | 56,57 | 60,08 |
| 75+ | 45,18 | 47,99 | 50,99 | 54,19 | 57,59 |
| **Total** | 2.879,55 | 2.913,28 | 2.946,18 | 2.978,16 | 3.009,15 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

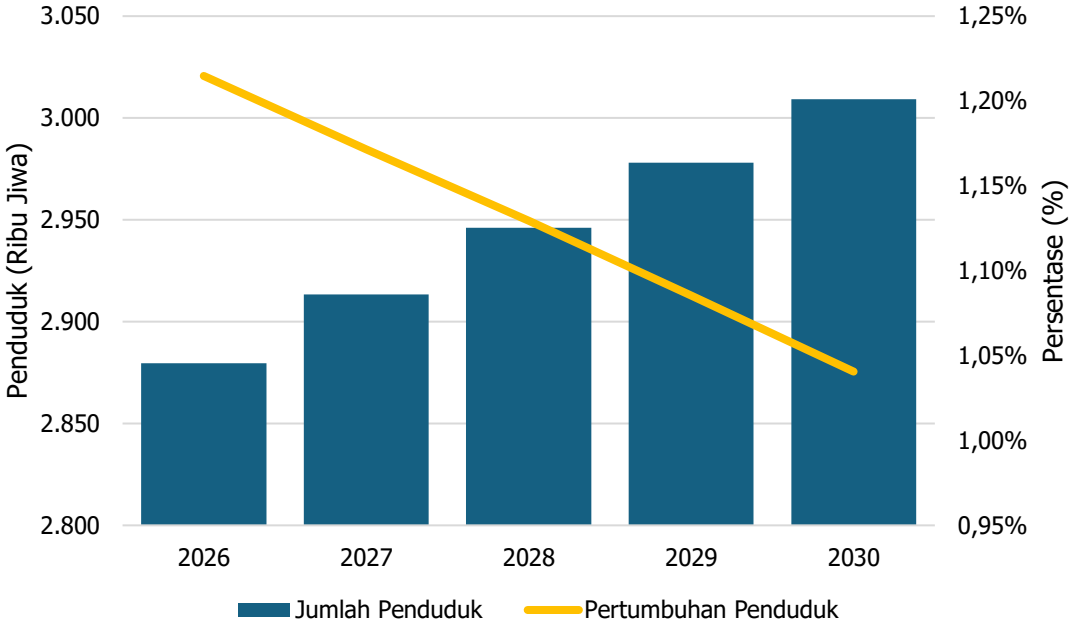
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2,879 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga 5 tahun ke depan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk berbasis skenario tren pada tabel di atas diperkirakan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2030 mencapai angka 3,009 juta jiwa. Ini berarti bahwa selama 5 tahun ke depan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengalami pertambahan penduduk sebesar 0,13 juta jiwa.

**Tabel 2.1.33 Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Penduduk** | | | | | |
| Laki-Laki (ribu jiwa) | 1.483,00 | 1.498,38 | 1.513,28 | 1.527,65 | 1.541,43 |
| Perempuan (ribu jiwa) | 1.396,55 | 1.414,90 | 1.432,9 | 1.450,51 | 1.467,72 |
| Total (ribu jiwa) | 2.879,55 | 2.913,28 | 2.946,18 | 2.978,16 | 3.009,15 |
| Rasio Jenis Kelamin (%) | 106,2 | 105,9 | 105,6 | 105,3 | 105,0 |
| Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | 18,71 | 18,93 | 19,14 | 19,35 | 19,55 |
| **Komposisi Penduduk (%)** | | | | | |
| 0 — 14 Tahun | 696,93 | 702,40 | 708,19 | 714,04 | 719,70 |
| 15 — 64 Tahun | 2014,84 | 2032,87 | 2049,26 | 2064,31 | 2078,30 |
| 65+ Tahun | 167,78 | 178,01 | 188,73 | 199,81 | 211,15 |
| Angka Ketergantungan (%) | 42,92 | 43,31 | 43,77 | 44,27 | 44,79 |

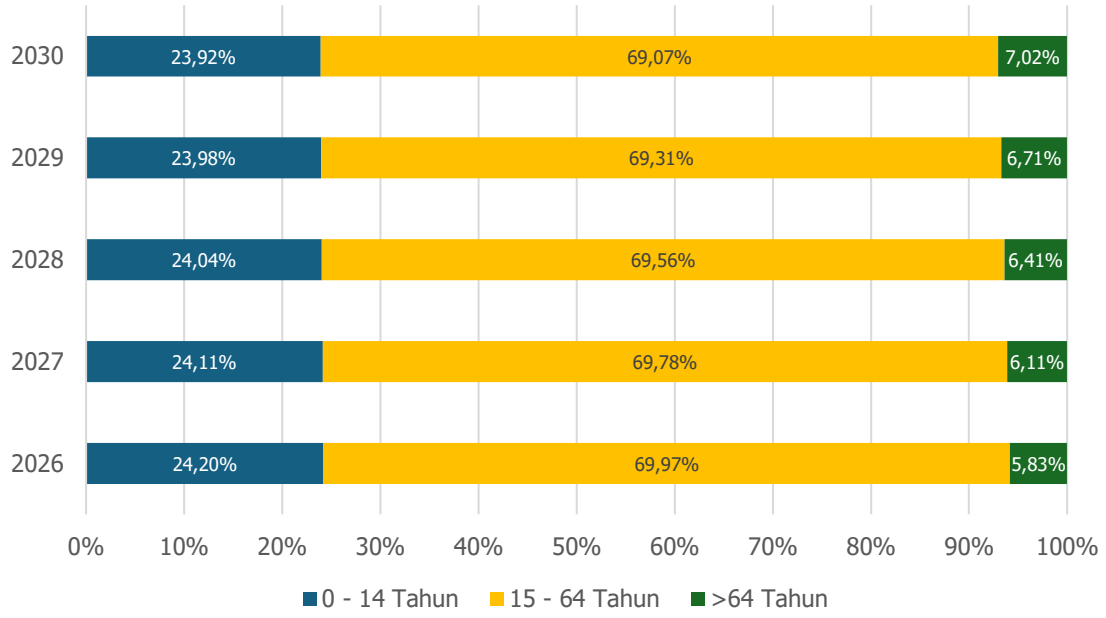
Berdasarkan tabel ringkasan kondisi demografi hasil proyeksi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 3,009 juta jiwa terdiri atas 1,54 juta jiwa penduduk laki-laki dan 1,47 juta jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkat akibat dari terus bertambahnya angka kelahiran dan migrasi masuk serta terbatasnya ruang wilayah. Pada tahun 2029, diproyeksikan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 19,55 jiwa per $km^2$.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2,879 juta jiwa. Jumlah penduduk diperkirakan bertambah sebanyak 0,13 juta jiwa, sehingga menjadi sebanyak 3,009 juta jiwa pada tahun 2029. Meskipun jumlah penduduknya terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah terus melemah. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2025-2029 sebesar 0,9% per tahunnya.



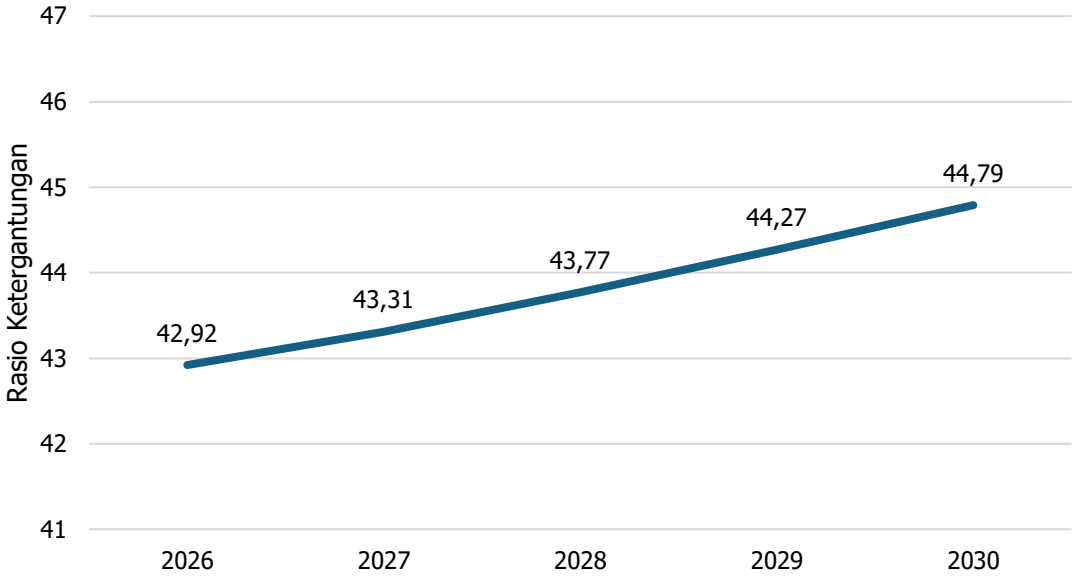

**Gambar 2.1.50 Proyeksi Proporsi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah diproyeksikan menurun dari 24,2% pada tahun 2025, menjadi 23,92% pada tahun 2030. Tren penurunan juga terdapat pada proporsi penduduk usia 15-64 tahun dari 69,97% menjadi 69,07% pada periode waktu yang sama. Di sisi lain, terdapat peningkatan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas, yang sebelumnya sebesar 5,83% menjadi 7,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase penduduk usia produktif diprediksi menurun sebanyak 0,9 poin persentase dan potensi peningkatan usia lansia di masa yang akan datang.



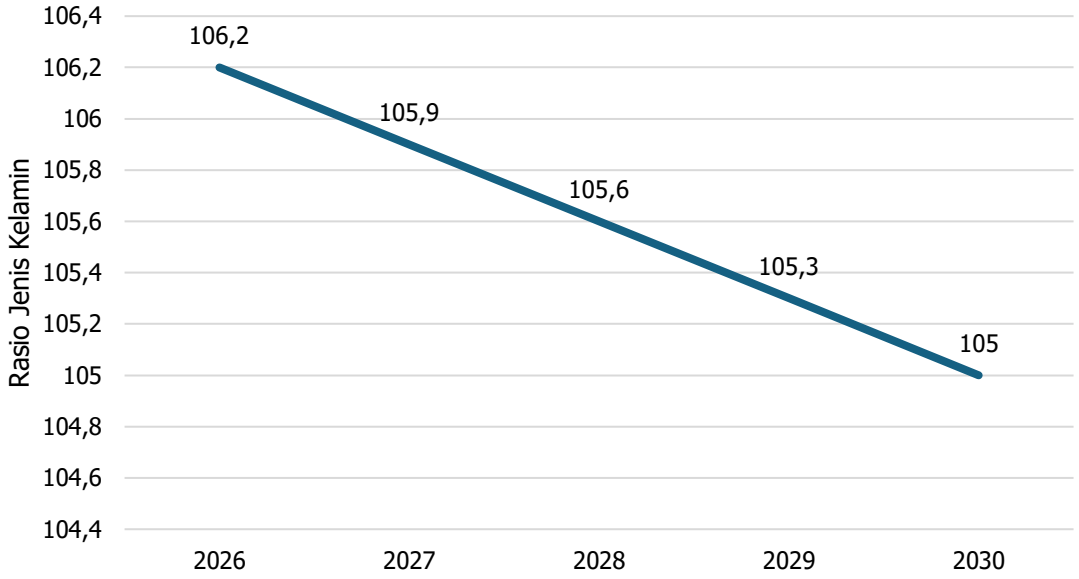

**Gambar 2.1.51 Proyeksi Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Kalimantan Tengahdiestimasi pada tahun 2026 adalah 42,92% dan diproyeksikan meningkat menjadi 44,79% pada tahun 2029. Hal ini berarti pada tahun 2029 diprediksi setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 44 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Secara sederhan,a kurang lebih 2 penduduk produktif memiliki tanggungan 1 penduduk non produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengimplikasikan beban yang semakin berat terhadap penduduk usia produktif karena semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut menjadi catatan khusus terhadap arah pembangunan agar penduduk usia produktif mampu memanfaatkan momentum untuk meningkatkan produktivitas dan dapat dilibatkan secara aktif melalui program-program pembangunan di daerah.




**Gambar 2.1.52 Proyeksi Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

Pada tahun 2030, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Kalimantan Tengah diproyeksikan sebesar 105. Artinya, terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin semakin menurun pada periode 2026 – 2030 yang menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan melebihi pertambahan jumlah penduduk laki-laki.




**Gambar 2.1.53 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, menandakan semakin masifnya aktivitas perekonomian yang terjadi di suatu wilayah. Indikator yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum, PDRB Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan pada periode observasi tahun 2020 – 2024 walaupun perekonomian pernah mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Tabel berikut memperlihatkan besaran PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah pada rentang tahun 2020 – 2024.

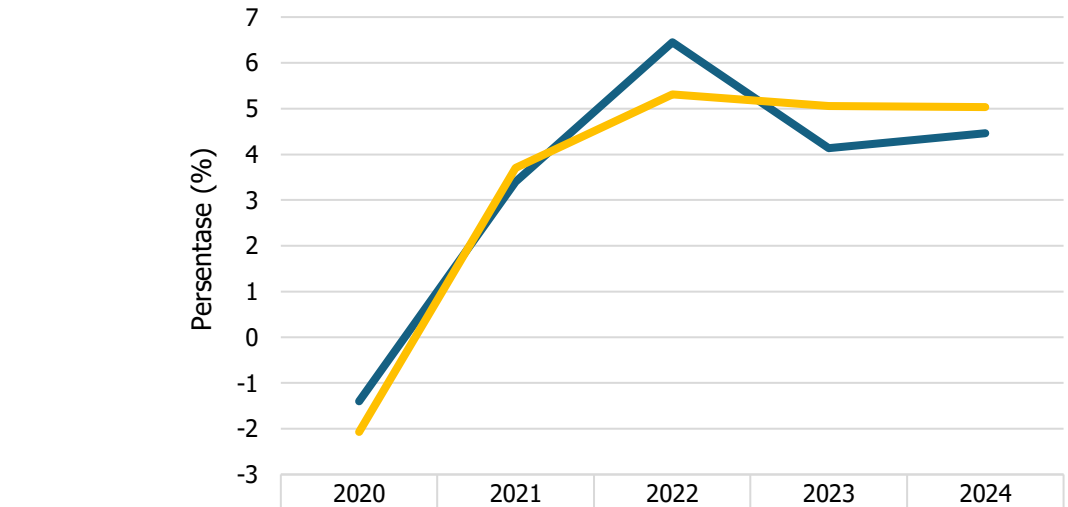
**Tabel 2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 (dalam miliar rupiah)**

| No | Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 98.933,6 | 152.187,4 |
| 2 | 2021 | 102.481,5 | 169.655,9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2022 | 109.094,7 | 199.741,3 |
| 4 | 2023 | 113.611,5 | 208.783,3 |
| 5 | 2024 | 118.682,3 | 222.864,5 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dihitung atas dasar besaran pertumbuhan PDRB setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fase pemulihan pasca dihantam oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada saat pandemi sendiri, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di angka -1,4% pada tahun 2020 akibat pelemahan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu pada angka 6,45%. Secara umum, posisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah posisinya relatif mirip dengan pertumbuhan ekonomi nasional walaupun sempat di atas maupun di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | -1,4 | 3,4 | 6,45 | 4,14 | 4,46 |
| Indonesia | -2,07 | 3,7 | 5,31 | 5,05 | 5,03 |

**Gambar 2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara lebih rinci, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah ditopang oleh beberapa lapangan usaha utama. Tiga besar lapangan usaha yang berkontribusi terhadap PDRB adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan,

industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor tersier atau sektor jasa mendominasi keseluruhan proporsi PDRB provinsi, disusul sektor primer dan sektor sekunder. Jika ditilik dari sektor lapangan usaha, terdapat tiga sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor-sektor tersebut diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Tabel berikut menunjukkan perkembangan proporsi PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 (dalam miliar rupiah)**

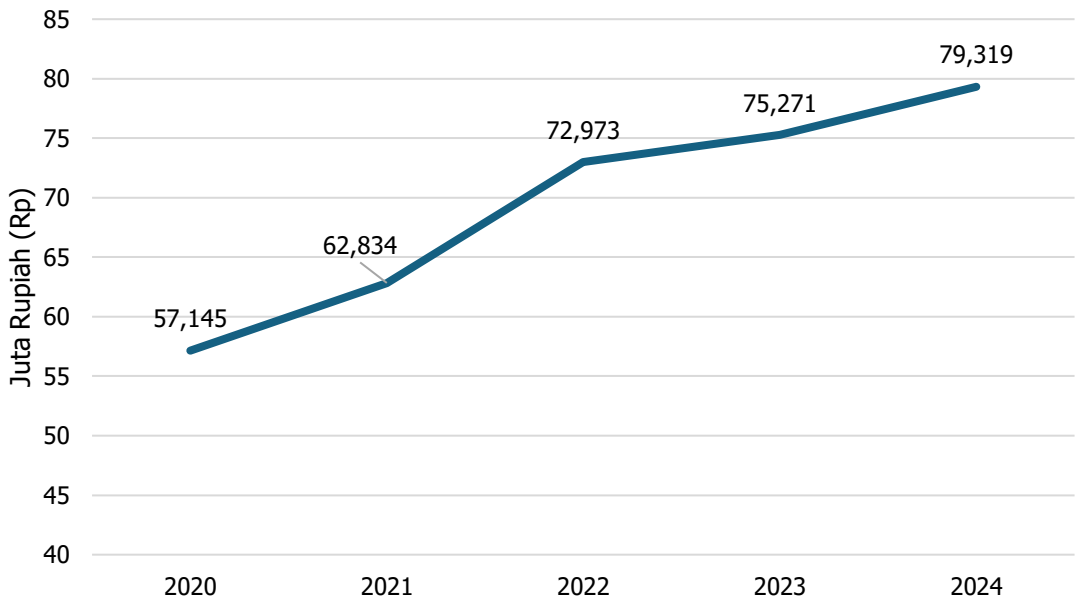
| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 21.72 | 22.17 | 20.44 | 21.45 | 22.36 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8.97 | 10.21 | 16.26 | 12.66 | 10.68 |
| 3 | Industri Pengolahan | 16.01 | 16.77 | 15.48 | 15.58 | 15.75 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
| 6 | Konstruksi | 8.93 | 8.97 | 8.45 | 8.86 | 8.78 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 13.19 | 12.44 | 11.86 | 12.51 | 12.48 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 7.1 | 6.62 | 6.55 | 7.04 | 7.29 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.86 | 1.75 | 1.69 | 1.78 | 1.87 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1.1 | 1.15 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3.46 | 3.43 | 3.18 | 3.28 | 3.29 |
| 12 | Real Estate | 2.24 | 2.1 | 1.91 | 1.98 | 2 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6.78 | 6 | 5.43 | 5.62 | 5.85 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 5.15 | 4.83 | 4.44 | 4.68 | 4.95 |

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2.26 | 2.4 | 2.22 | 2.38 | 2.49 |
| 17 | Jasa lainnya | 1.01 | 0.93 | 0.86 | 0.91 | 0.93 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat sekaligus indikasi awal mengenai produktivitas ekonomi. Nilai PDRB per Kapita didapatkan melalui nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Data menunjukkan bahwa terjadi tren kenaikan pada PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah. Kenaikan yang tinggi terjadi pada periode tahun 2020 hingga 2022. Adanya perkembangan PDRB per kapita ini menunjukkan adanya indikasi awal berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Dengan adanya potensi-potensi pembangunan ke depannya, PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah dapat semakin meningkat dan secara riil mampu merepresentasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

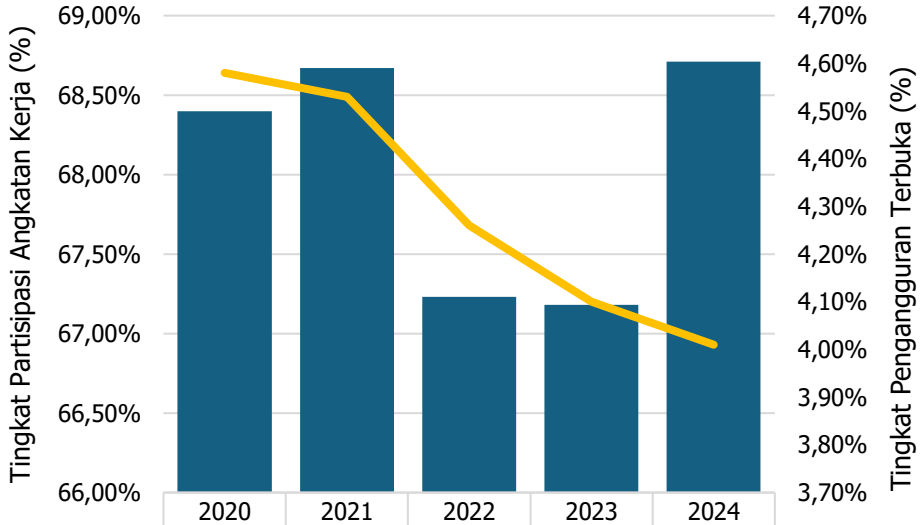



**Gambar 2.2.2 Perkembangan PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu aspek penting dalam melihat produktivitas ekonomi adalah kondisi tenaga tenaga kerja. Aspek ini merupakan salah satu *input* yang penting di dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam produksi. Setidaknya, terdapat dua indikator yang merepresentasikan kondisi ketenagakerjaan secara umum, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tenaga kerja ini merupakan penduduk usia produktif, yaitu kelompok yang berusia minimal 15 tahun. Semakin tingginya penduduk usia produktif yang bekerja, maka potensi produktivitas suatu wilayah menjadi tinggi akan meningkat. Data menunjukkan bahwa nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2020 – 2024. Terjadi peningkatan TPAK pada tahun 2024 menjadi 68,71%. Di saat yang bersamaan, TPT mengalami tren penurunan selama periode tersebut. Pada tahun 2024 sendiri, TPT di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 4,01% atau turun sekitar 0,57 poin persentase relatif pada tahun 2020.

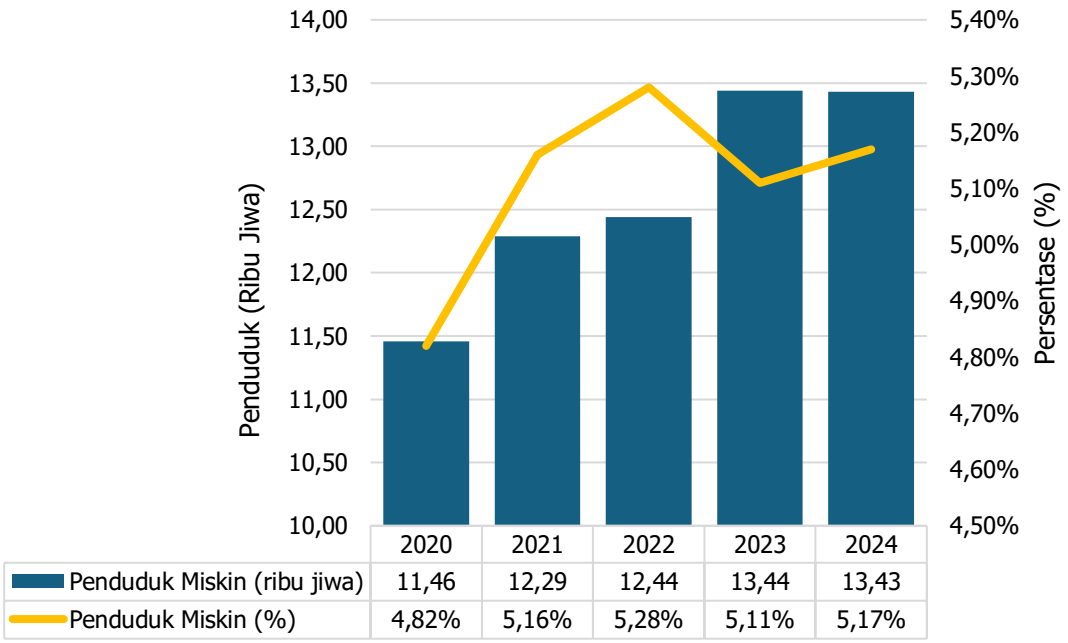



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPAK (%) | 68,40% | 68,67% | 67,23% | 67,18% | 68,71% |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,58% | 4,53% | 4,26% | 4,10% | 4,01% |

**Gambar 2.2.3 Kondisi TPAK dan TPT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Indikator ini menunjukkan kesejahteraan dari rumah tangga yang tinggal di suatu wilayah. Semakin kecil angka kemiskinan, maka semakin baik kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tren peningkatan pada periode 2020 – 2024. Angka kemiskinan terendah pada periode tersebut adalah 4,82% pada tahun 2020, sedangkan angka kemiskinan tertinggi terdapat pada tahun 2022, yaitu 5,28%. Ini menunjukkan perlu adanya intervensi yang tidak dilakukan secara *business-as-usual* dan menyasar pada kantung-kantung kemiskinan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.



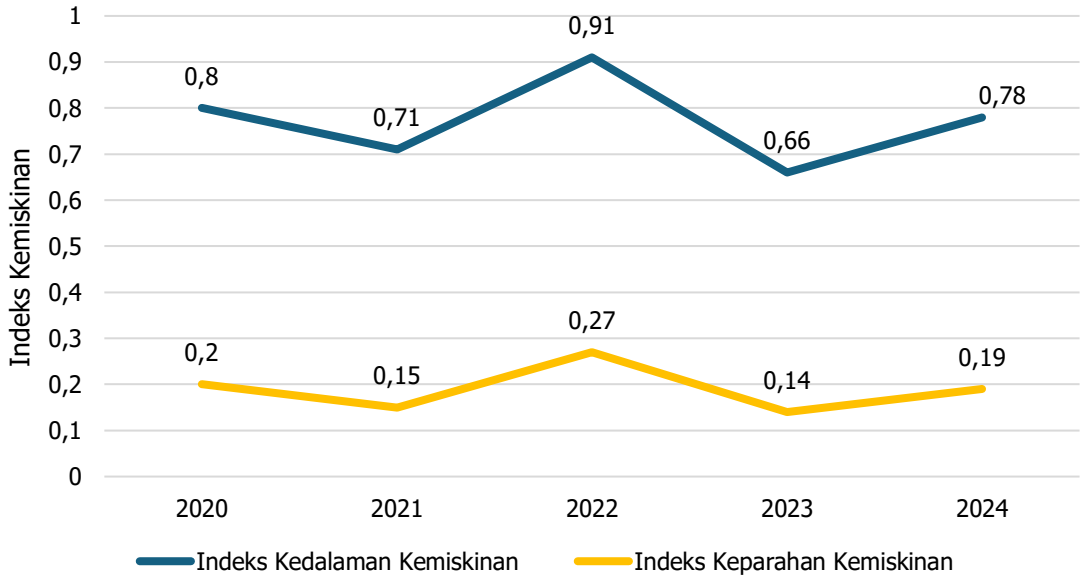

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 11,46 | 12,29 | 12,44 | 13,44 | 13,43 |
| Penduduk Miskin (%) | 4,82% | 5,16% | 5,28% | 5,11% | 5,17% |

**Gambar 2.2.4 Persentase dan jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, indikator kemiskinan lainnya adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari

garis kemiskinan dan sebaliknya. Tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi pada periode 2020 - 2024 dengan tren yang meningkat. Tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 0,91. Di sisi lain, tingkat keparahan kemiskinan (P2) adalah sebaran pengeluaran antarpenduduk miskin. Semakin tinggi nilai berarti semakin timpang pengeluaran antarpenduduk miskin. Tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi dengan tren yang sama-sama meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran antarpenduduk miskin semakin timpang dari tahun ke tahun. Tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,27.

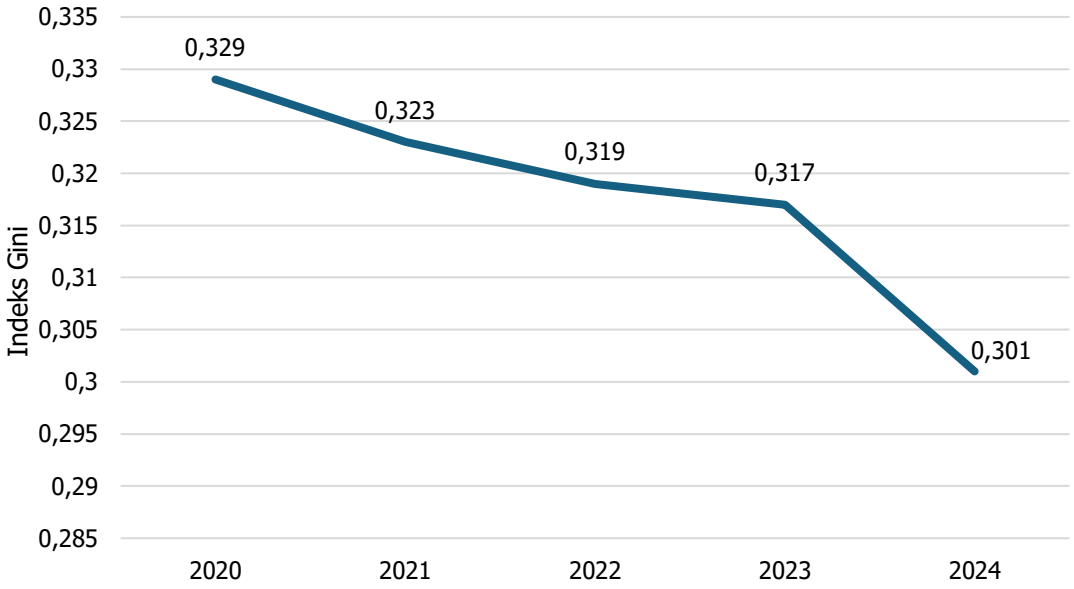



**Gambar 2.2.5 Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah**
**Tahun 2020 – 2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antarpenduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang terjadi antarpenduduk. Pada tahun 2020 – 2024, ketimpangan di Provinsi Kalimantan Tengah terus menurun yang dibuktikan dengan terus menurunnya indeks gini pada periode tersebut. Indeks

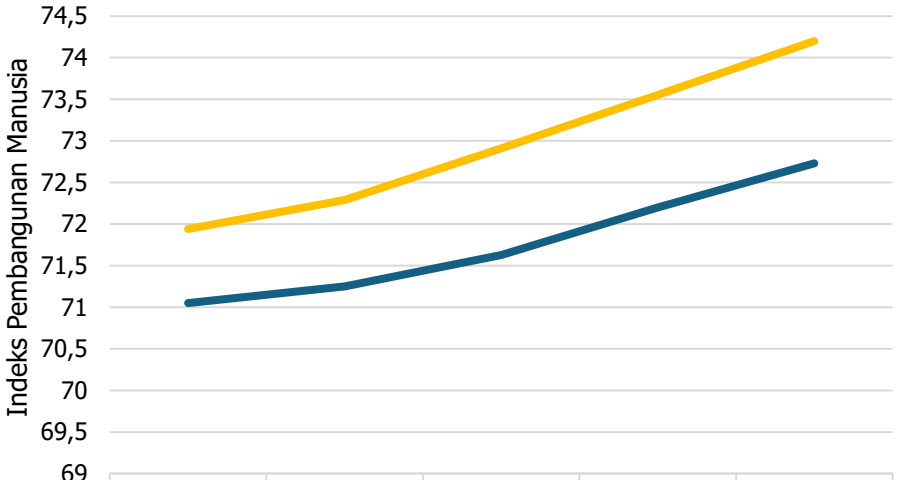
gini Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 menurun 0,018 poin persentase relatif dari tahun 2019. Kondisi demikian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antarpenduduk di Provinsi Kalimantan Tengah semakin menurun.




**Gambar 2.2.6 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pencapaian daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pula dari capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun indeks ini kemudian sudah tidak digunakan dalam pengukuran pencapaian pembangunan di level provinsi, tetapi setidaknya data historis mengenai IPM dapat menunjukkan bagaimana kondisi dari daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Data menunjukkan bahwa secara rata-rata. Nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional. Walaupun demikian, selisihnya tampak tidak terlalu jauh antarwaktu. Tren juga menunjukkan adanya kenaikan nilai IPM di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk meningkatkan nilai IPM, pemerintah daerah dalam hal ini perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sekaligus mampu menjaga stabilitas ekonomi untuk menjaga pengeluaran masyarakat. Ketiga hal tersebut menjadi komponen penting penyusun nilai IPM.



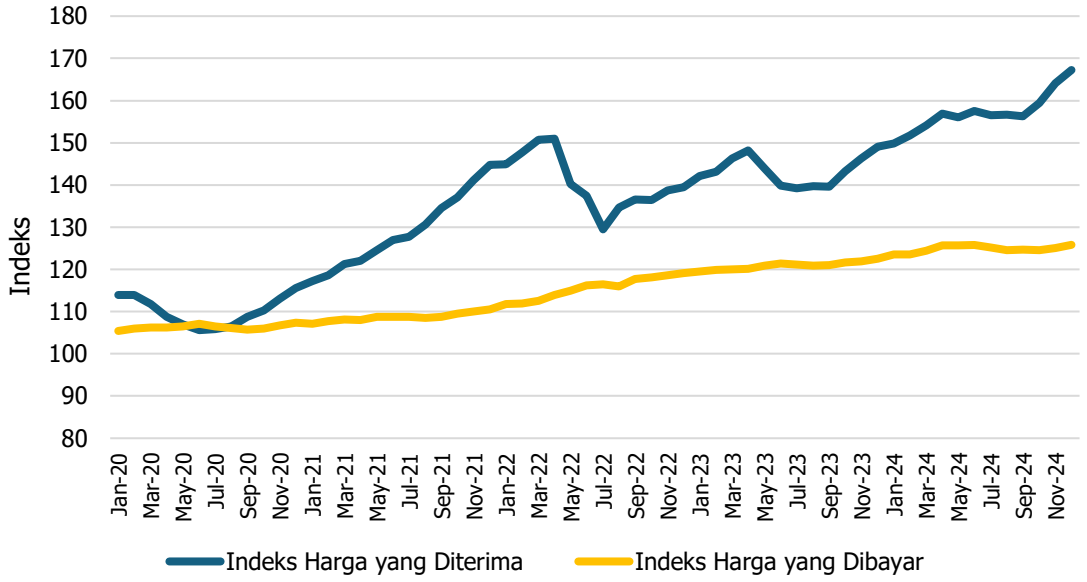

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 71,05 | 71,25 | 71,63 | 72,2 | 72,73 |
| Indonesia | 71,94 | 72,29 | 72,91 | 73,55 | 74,2 |

**Gambar 2.2.7 Nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik

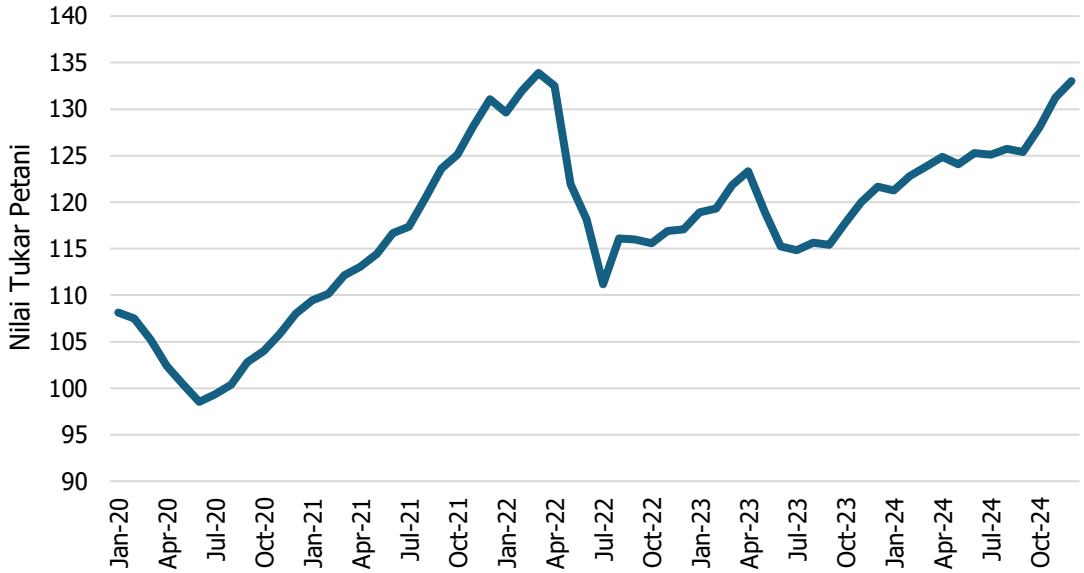
### 2.2.1.7 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan petani yang dilihat dari rasio indeks harga yang dibayar oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Nilai NTP diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu NTP > 100, NTP = 100, atau NTP < 100. Nilai NTP > 100 menandakan petani mengalami surplus dan meningkatkan pendapatan petani. Nilai NTP = 100 menandakan titik impas atau petani tidak rugi dan tidak pula untung. Nilai NTP < 100 sendiri menandakan petani mengalami defisit dan menurunkan pendapatan petani. Data menunjukkan bahwa kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani relatif lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Walaupun demikian, sempat terlihat adanya indeks harga yang diterima petani lebih rendah pada pertengahan tahun 2020 sebagai efek dari pandemi COVID-19.




**Gambar 2.2.8 Indeks Harga yang Diterima dan Indeks Harga yang Dibayar Petani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani tersebut, kemudian dapat dihitung nilai tukar petani di Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat tren peningkatan nilai tukar petani di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan ada peningkatan kesejahteraan dari petani karena peningkatan pendapatan yang dimilikinya (petani mengalami surplus). Nilai tukar petani tersebut terlihat sebagaimana gambar berikut:




**Gambar 2.2.9 Nilai Tukar Petani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan dengan layak. Meskipun pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan merupakan tanggung jawab setiap warganegara, pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin setiap warganegara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Hasil analisis terhadap pelayanan wajib di bidang kesehatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2.3 Capaian Indikator Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Usia Harapan Hidup | Tahun | 69,64 | 69,69 | 73,10 | 73,14 | 73,34 | 73,54 |
| 2. | Angka Kematian Bayi (AKB) | Per 1.000 lahir hidup | 7,6 | 6,2 | 6,6 | 9,2 | 8,6 | 12,69 |
| 3. | Angka Kematian Balita | Per 1.000 lahir hidup | 8,3 | 6,6 | 7 | 9,8 | 9 | TAD |
| 4. | Angka Kematian Ibu (AKI) | Per 100.000 | 165 | 166 | 140 | 212 | 148 | 179,3 |

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | lahir hidup | | | | | | |
| 5. | Stunting | % | 34,04 | 32,30 | 16,70 | 27,4 | 26,9 | 23,5 |
| 6. | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 84,73 | 84,49 | 80,36 | 88,14 | 88,45 | TAD |
| 7. | Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah | % | 80,12 | 82,59 | 79,27 | 79,28 | 49,52 | TAD |
| 8. | Cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan | % | 44,11 | 50,48 | 52,98 | 55,98 | 55,26 | TAD |
| 9. | Angka Pengobatan Lengkap TBC | % | TAD | 84 | 55,4 | 79 | 81 | TAD |
| 10. | Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk | % | TAD | 60 | 0,7 | 7 | 31,5 | TAD |
| 11. | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | % | TAD | 64,79 | 65,52 | 66,58 | 67,72 | TAD |
| 12. | Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk | Rasio | 1 : 102.316 | 1 : 104.418 | 1 : 102.692 | 1 : 100.081 | 1 : 97.896 | TAD |
| 13. | Rasio dokter per 100.000 penduduk | Rasio | 29,9 | 31,5 | 35,1 | 45,4 | 38,2 | TAD |
| 14. | Rasio dokter gigi per 75.000 penduduk | Rasio | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | TAD |
| 15. | Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk | Rasio | 238,3 | 193,0 | 197,6 | 202,4 | 149,2 | TAD |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (data tahun 2024 belum tersedia)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang menunjukkan rata-rata usia yang mungkin dicapai oleh penduduk baru lahir di

suatu wilayah. Data UHH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan sepanjang periode 2018 hingga 2023. UHH Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 69,64 tahun, dan meningkat menjadi 73,54 tahun pada 2023. Peningkatan UHH ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam akses layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, nilai UHH Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. Rata-rata UHH nasional pada tahun 2011 telah mencapai 70,01 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Untuk itu, diperlukan upaya tambahan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat melampaui rata-rata UHH nasional.

Indikator layanan bidang kesehatan selanjutnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Sesuai dengan target yang ditetapkan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 3 Target 2, yang ingin mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kondisi AKB di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2023 mengalami fluktuasi. Nilai AKB pada tahun 2018 sebesar 7,6 bayi meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,2 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak derajat kesehatan masyarakat, nilai AKB mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023, nilai AKB di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat mencapai 12,69 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Fenomena serupa dengan AKB juga terjadi pada indikator Angka Kematian Balita. Nilai tersebut menggambarkan jumlah balita yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini berkaitan langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Nilai ini kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Kondisi indikator ini di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2020 mengalami fluktuasi. Angka

kematian balita pada tahun 2018 sebesar 8,3 balita meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak derajat kesehatan masyarakat, nilainya mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 7 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita pada tahun 2022 tercatat sebesar 9 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Indikator berikutnya yang menggambarkan kondisi kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan sebuah indikator yang merepresentasikan derajat kesehatan perempuan. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan setiap 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa nilai AKI selama periode 2018-2020 cenderung mengalami penurunan. Nilai AKI pada tahun 2018 sebesar 165 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut sedikit meningkat pada tahun 2019 menjadi 166 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 140 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Nilai AKI kembali mengalami lonjakan pada tahun 2021 hingga menjadi 212 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 148 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada TPB Tujuan 3 Target 1, nilai AKI Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas target tersebut, yakni di bawah 70 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan makro yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara global. Penurunan AKI menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan perempuan di kalangan masyarakat.

*Stunting* merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifaktorial dan bersifat antargenerasi. Secara umum, permasalahan *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung menurun selama periode 2018-2020. Data tahun 2018 menunjukkan prevalensi *stunting* sebesar 34,04%. Nilai tersebut menurun menjadi 32,30% pada tahun 2019 dan 16,70% pada tahun 2020. Sebagai catatan, untuk data tahun 2020 diambil dari aplikasi EPPBGM dengan tingkat keterisian sebesar 59,9%. Nilai prevalensi stunting yang masih cukup tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah, karena permasalahan gizi dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak.

Dua indikator berikutnya berkaitan dengan ibu hamil, yakni cakupan kunjungan Ibu hamil K4 dan persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menggambarkan persentase ibu hamil yang melakukan paling sedikit empat kali kunjungan selama masa kehamilan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Melalui analisis cakupan kunjungan ibu hamil K4 diharapkan dapat mengetahui gambaran tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah dan kemampuan manajemen program kesehatan ibu dan anak (KIA). Berdasarkan data yang tersedia, diketahui cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi tiap tahun. Sebanyak 84,73% ibu hamil melakukan kunjungan K4 pada tahun 2018. Nilai tersebut kemudian anjlok pada tahun 2020 menjadi 80,36% akibat pandemi Covid-19. Periode tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya peningkatan kembali cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Kalimantan Tengah, hingga mencapai 88,45% pada tahun 2022.

Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah menggambarkan upaya layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah. Anemia pada ibu hamil akan berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ibu hamil memerlukan setidaknya 90 tablet tambah darah untuk dikonsumsi selama masa kehamilan. Berdasarkan data yang

tersedia, diketahui bahwa persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2022 cenderung menurun. Sebanyak 80,12% ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 82,59%. Namun, pasca pandemi Covid-19, persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah mengalami penurunan drastis, hingga puncaknya pada tahun 2022 hanya sebanyak 49,52% ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Penurunan signifikan ini perlu menjadi perhatian serius, karena anemia pada ibu hamil memiliki dampak yang signifikan bagi ibu dan anak yang dikandung.

Indikator berikutnya yang dapat menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada anak usia <6 bulan. Pemberian ASI eksklusif menjadi penting dalam proses tumbuh kembang anak, karena ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Sebanyak 44,11% ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak sampai usia 6 bulan pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 55,98%. Namun, persentase tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 55,26%. Persentase pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan ini cenderung masih rendah, sehingga diperlukan upaya preemtif dan penyuluhan bagi ibu hamil dan melahirkan terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi anak usia <6 bulan.

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Salah satu kegiatan Pengendalian Penyakit TB Paru yang sasarannya pada penderita adalah pemberian pengobatan lengkap TB bagi pasien. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pemberian pengobatan lengkap TB bagi pasien mengalami fluktuasi selama

periode 2019-2022. Sebanyak 84,00% pasien menerima pemberian pengobatan lengkap TB pada tahun 2019. Akibat pandemi, pemberian pengobatan lengkap TB mengalami penurunan hingga menjadi 55,40%. Pemberian pengobatan lengkap TB pasca pandemi kembali mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2022 persentasenya menjadi 81,00%.

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk berjenis *Aedes aegypti*. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kejadian DBD adalah angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena penyakit DBD. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa angka kesakitan DBD mengalami fluktuasi yang berkorelasi dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 100.000 penduduk terdapat 60 orang yang mengeluhkan mengalami DBD. Hal ini berkorelasi dengan fakta bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami KLB DBD pada tahun tersebut. Angka kesakitan DBD menurun drastis pada dua tahun berikutnya, dengan nilai sebesar 0,7 dari 100.000 penduduk pada tahun 2020 dan 7 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Adapun angka kesakitan DBD pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 31,5 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD yang mengalami fluktuasi menandakan bahwa potensi terjadinya KLB DBD masih sangat besar, sehingga memerlukan upaya preventif dan kesiapsiagaan untuk menangani kejadian tersebut.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Campak merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus yang termasuk dalam genus *Morbillivirus* dari keluarga *Paramyxoviridae* dan sering menyerang anak-anak. Apabila tidak ditangani serius, campak akan menyebabkan munculnya komplikasi penyakit seperti pneumonia, kerusakan pada mata, dan gangguan sistem pencernaan. Salah satu bentuk pencegahan penyakit campak adalah dengan pemberian imunisasi

campak. Imunisasi campak diberikan pertama kali pada saat anak berusia 9 bulan. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren peningkatan. Data tahun 2019 menunjukkan sebanyak 64,79% anak usia 1 tahun telah menerima imunisasi campak. Nilai tersebut mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2022 mencapai 67,72%. Mengingat persentase tersebut masih jauh dari 100%, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengikuti imunisasi campak agar mampu menjamin kesehatan anak.

Selain memperhatikan kondisi pelayanan kesehatan, kondisi sarana dan prasarana kesehatan juga perlu untuk dianalisis. Terdapat setidaknya empat indikator yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi per 75.000 penduduk, dan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk menggambarkan jumlah beban layanan yang ditanggung oleh rumah sakit. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami fluktuasi. Jumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 sebesar 26 unit. Masing-masing unit rumah sakit tersebut rata-rata melayani sebanyak 102.316 penduduk. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tanpa diiringi penambahan jumlah rumah sakit, dengan rasio sebanyak 1:104.418. Adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 menyebabkan rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami penurunan menjadi 1:102.692. Rasio rumah sakit per satuan penduduk kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan adanya penambahan jumlah rumah sakit yang tersedia, dengan nilai 1:100.081 pada tahun 2021 dan 1:97.896 pada tahun 2022. Penurunan beban layanan rumah sakit diharapkan mampu mendorong optimalisasi pelayanan rumah sakit.

Rasio dokter per 100.000 penduduk menggambarkan beban yang dimiliki oleh seorang dokter untuk melayani penduduk. Secara umum, terjadi penurunan beban layanan dokter yang ditandai dengan peningkatan rasio dokter per

100.000 penduduk. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 29 hingga 30 dokter, dengan rasio sebesar 29,88. Beban dokter mengalami penurunan, sehingga rasio dokter per 100.000 penduduk menjadi 45,44 pada tahun 2021, yang diartikan tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 45 dokter. Namun, beban dokter kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan rasio 38,23 atau tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 38 dokter. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di bawah rasio ideal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yakni 100 dokter untuk tiap 100.000 penduduk.

Rasio dokter gigi per 75.000 penduduk menggambarkan beban kerja seorang dokter gigi untuk melayani penduduk. Secara umum, terjadi penurunan beban layanan dokter gigi yang ditandai dengan peningkatan rasio dokter gigi per 75.000 penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa rasio dokter gigi per 75.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 3,02. Angka tersebut menandakan bahwa tiap 75.000 penduduk dilayani oleh sekitar 3 dokter gigi. Nilai tersebut mengalami peningkatan setiap tahun, hingga pada tahun 2022 rasio dokter gigi per 75.000 penduduk sebesar 4,08 atau tiap 75.000 penduduk dilayani oleh 4 dokter gigi. Rasio dokter gigi terhadap penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di bawah rasio ideal WHO, yakni 1 dokter hanya melayani 2.000 penduduk. Beban layanan dokter gigi yang terlampau tinggi dikhawatirkan akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menggambarkan beban kerja seorang tenaga kesehatan untuk melayani penduduk. Secara umum, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2018 sebesar 238,31, atau tiap tenaga kesehatan melayani 238 penduduk. Rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga menjadi 193,01 sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2021 sebesar 202,43 atau tiap tenaga kesehatan melayani sekitar 202 penduduk. Sementara itu, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi

sebesar 149,22. Apabila dibandingkan dengan rasio ideal tenaga kesehatan per satuan penduduk yang ditetapkan WHO, yakni 2,5 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk atau 1 tenaga kesehatan per 400 penduduk, maka rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah sudah berada pada kondisi ideal.

### 2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Gambaran umum mengenai pendidikan dapat merepresentasikan kondisi modal manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga menunjukkan seberapa baik kualitas pendidikan untuk mendidik generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan. Pendidikan juga dapat menjadi penentu dalam meningkatkan daya saing daerah dan produktivitas masyarakat. Tabel berikut menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.2.4 Capaian Indikator Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023**

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,37 | 8,51 | 8,59 | 8,68 | 8,73 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,57 | 12,66 | 12,74 | 12,75 | 12,76 |
| 3 | Angka Melek Huruf | Persentase (%) | 99,22 | 99,2 | 99,1 | 99,74 | 99,03 |
| 4 | Angka Kesiapan Sekolah | Persentase (%) | 77,2 | 79,17 | 78,67 | 77,14 | NA |
| 5 | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | |
| | SD | Persentase (%) | 110,05 | 108,49 | 108,21 | 107,39 | 106,98 |
| | SMP | Persentase (%) | 88,74 | 90,61 | 91,07 | 89,7 | 88,06 |
| | SMA | Persentase (%) | 82,27 | 82,29 | 83,07 | 83,97 | 85,63 |
| 6 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | |
| | SD | Persentase (%) | 99,14 | 99,11 | 99,01 | 99,11 | 99,05 |

| No | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | SMP | Persentase (%) | 77,71 | 78,45 | 78,8 | 78,75 | 79,07 |
| | SMA | Persentase (%) | 53,82 | 54,08 | 54,25 | 55,69 | 55,63 |
| 7 | Angka Putus Sekolah | | | | | | |
| | SD | Persentase (%) | 0,12 | 0,28 | 0,15 | 0,2 | NA |
| | SMP | Persentase (%) | 0,34 | 0,39 | 0,2 | 0,21 | NA |
| | SMA | Persentase (%) | 0,57 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | NA |
| 8 | Ruang Kelas dalam Kondisi Bangunan Baik dan Rusak Ringan | | | | | | |
| | SD | Persentase (%) | 92,27 | 92,85 | 100 | 70,57 | NA |
| | SMP | Persentase (%) | 92,81 | 94,26 | 100 | 78,14 | NA |
| | SMA | Persentase (%) | 97,74 | 98,04 | 100 | 88,64 | NA |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (data tahun 2024 belum tersedia)

Dua indikator pertama yang menunjukkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Secara umum, terjadi tren peningkatan pada indikator RLS di Provinsi Kalimantan Tengah. Per 2023, angka RLS mencapai 8,73 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,73 tahun atau hampir menamatkan kelas 9. Di sisi lain, terdapat pula HLS yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sama seperti RLS, angka HLS di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Per 2023, angka HLS mencapai 12,76 tahun. Artinya, anak-anak usia 7 tahun di Provinsi

Kalimantan Tengah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau hampir menyelesaikan pendidikan setara Diploma 1.

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi indikator kondisi pendidikan berikutnya. Indikator ini menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi AMH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa AMH di Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 99,22%. Namun, data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya sedikit penurunan AMH menjadi sebesar 99,20% pada tahun 2020 dan sebesar 99,10% pada tahun 2021. Terjadi kenaikan AMH pada tahun 2022 menjadi 99,74%, tetapi kemudian turun kembali menjadi 99,03% pada tahun 2023. Dalam konteks ini, perlu penguatan sektor pendidikan, khususnya literasi, dalam mendorong masyarakat semakin melek huruf atau dapat membaca.

Indikator selanjutnya adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator ini digunakan untuk melihat kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Kesiapan sekolah merupakan tahapan perkembangan ketika anak sudah memiliki kesiapan mengikuti perubahan/transisi kegiatan dari rumah ke sekolah dan didukung oleh layanan pendidikan prasekolah (KB/TK/PAUD). Nilai AKS di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi selama periode 2018-2022. Sebanyak 77,16% penduduk yang bersekolah di kelas 1 SD tercatat memiliki kesiapan sekolah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 dan 2020, hingga mencapai 79,17% pada tahun 2020. Namun, nilai AKS mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya sehingga nilainya menjadi 77,14% pada tahun 2022. Fenomena naik turunnya nilai AKS mencerminkan bahwa layanan pendidikan prasekolah masih perlu dioptimalkan untuk mendukung tingkat kesiapan sekolah bagi anak-anak yang akan memasuki jenjang SD/sederajat.

Selanjutnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya tanpa mempertimbangkan faktor usia. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk

jenjang SD/sederajat pada tahun 2019 mencapai 110,05% dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 menjadi 106,98%. Sementara itu, nilai APK untuk jenjang SMP/sederajat cenderung mengalami fluktuasi. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SMP/sederajat pada tahun 2019 mencapai 88,74%. Nilai tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya hingga pada tahun 2023 nilainya menjadi 88,06%. Nilai APK untuk jenjang SMA/sederajat sendiri mengalami tren peningkatan. Per tahun 2019, nilai APK jenjang SMA/Sederajat sebesar 82,27%. Angka ini kemudian meningkat menjadi 85,63% pada tahun 2023.

Di sisi lain, terdapat pula indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang sesuai terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Secara umum, APM di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Nilai APM jenjang SD/sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 mencapai 99,14%. Data tahun 2023 menunjukkan APM jenjang SD/sederajat mengalami sedikit penurunan menjadi 99,05%. Nilai APM jenjang SMP/sederajat pada tahun 2019 sebesar 77,71% dan mengalami peningkatan menjadi 79,07% pada tahun 2023. Fenomena yang sama juga terjadi pada nilai APM jenjang SMA/sederajat yang mengalami peningkatan dari 53,82% pada tahun 2018 menjadi 55,63% pada tahun 2022. Nilai APM yang semakin berkurang setiap jenjangnya menandakan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut.

Indikator selanjutnya berkaitan dengan angka putus sekolah. Indikator ini merepresentasikan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan yang ditempuh karena berbagai faktor. Angka putus sekolah jenjang SD/sederajat pada tahun 2019 sebesar 0,12%. Nilai tersebut kemudian mengalami sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, tetapi kemudian menjadi 0,20% pada tahun 2022. Fenomena serupa juga terjadi pada jenjang SMP/sederajat, dengan angka putus sekolah tahun 2019 sebesar 0,34% dan tahun 2022 sebesar 0,21%. Di sisi lain, angka putus sekolah jenjang

SMA/sederajat memiliki tren penurunan selama periode 2019-2022. Sebanyak 0,57% penduduk usia SMA/sederajat mengalami putus sekolah pada tahun 2019. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 nilainya menjadi 0,22%. Nilai angka putus pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan memaksa pelajar untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Implementasi kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan sarana pembelajaran akan menyulitkan sebagian kalangan sehingga kemudian memilih untuk putus sekolah.

Indikator terakhir yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kondisi bangunan ruang kelas pendidikan. Sebagai salah satu prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar, kondisi bangunan ruang kelas yang baik akan mendorong kondusivitas para siswa dalam melakukan pembelajaran. Secara umum, kondisi bangunan ruang kelas untuk jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat mengalami peningkatan selama periode 2018-2021. Namun, berdasarkan audit terbaru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022, persentase bangunan ruang kelas dengan kondisi baik atau rusak ringan untuk semua jenjang mengalami penurunan cukup signifikan. Tercatat persentase bangunan ruang kelas dengan kondisi baik atau rusak ringan untuk jenjang SD/sederajat sebesar 70,57%, untuk SMP/sederajat sebesar 78,14%, dan untuk SMA/sederajat sebesar 88,64%. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan, agar para siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas dengan layak, nyaman, dan kondusif.

### 2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif berhubungan dengan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Amanat ini sesuai disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Ada 20 jenis PPKS yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu korban bencana alam, korban bencana sosial, gembel dan pengemis (gepeng), penderita HIV/AIDS, pecandu narkoba, fakir miskin, anak terlantar, anak korban kekerasan di lingkungan rumah tangga, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat, anak korban kekerasan seksual, lansia terlantar, komunitas adat terpencil, penyandang tuna netra, penyandang tuna wicara-rungu, penyandang tuna daksa, penyandang tuna grahita, penyandang cacat fisik, tuna susila, bekas narapidana, dan korban penyalahgunaan NAPZA.

**Tabel 2.2.5 Indikator Kinerja terkait Perlindungan Sosial yang Adaptif**

| Indikator Kinerja | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 144.777 | 167.607 | 226.903 | 226.518 | 420.553 |
| Persentase PPKS yang tertangani | 52,25 | 96,05 | 106,15 | 47,64 | 61,71 |
| Rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 52,25 | 96,05 | 106,15 | 47,64 | 61,71 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (data tahun 2024 belum tersedia)

Jumlah PPKS di Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 420.553 PPKS, sementara pada tahun 2021 berjumlah 226.518 PPKS. Akan tetapi, dari keseluruhan PPKS tersebut, belum sepenuhnya tertangani oleh pemerintah. Persentase PPKS yang tertangani juga cenderung meningkat kecuali pada tahun 2021 yang menurun menjadi 47,64%. Kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 61,71%. Provinsi Kalimantan Tengah juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjabarkan target pada masing-masing jenis pelayanan SPM bidang sosial. Terdapat lima jenis pelayanan SPM bidang sosial, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di dalam panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi

### 2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

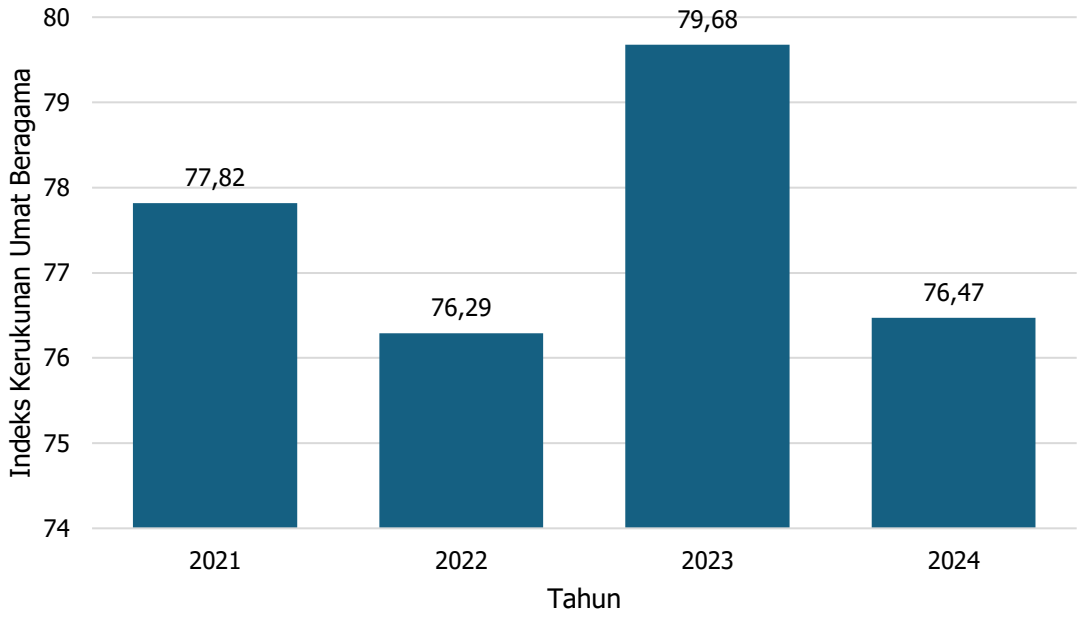
#### 2.2.5.1 Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat toleransi, kerja sama, dan kesetaraan antarumat beragama dalam suatu wilayah. Nilai indeks ini dihitung berdasarkan persepsi masyarakat terhadap tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Selama periode 2021–2024, capaian IKUB Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 77,82, yang menunjukkan kondisi kerukunan yang cukup baik. Namun, pada 2022, terjadi penurunan menjadi 76,29, yang mengindikasikan adanya dinamika sosial yang memengaruhi tingkat kerukunan antarumat beragama di wilayah ini. Tren ini kembali membaik pada tahun 2023, dengan capaian IKUB meningkat signifikan menjadi 79,68, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode empat tahun terakhir. Capaian tersebut mencerminkan upaya intensif dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, tokoh agama, maupun masyarakat sipil, dalam memperkuat harmoni sosial dan membangun dialog lintas agama.

Namun demikian, pada tahun 2024, nilai IKUB kembali mengalami penurunan menjadi 76,47. Penurunan ini menandakan pentingnya upaya berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama, khususnya dalam menghadapi tantangan keragaman serta potensi gesekan sosial yang mungkin muncul di tengah dinamika politik dan ekonomi. Secara umum,

meskipun sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tren IKUB di Kalimantan Tengah menunjukkan ketidakstabilan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan, termasuk penguatan forum kerukunan umat beragama, pendidikan multikultural, serta program lintas iman di masyarakat.

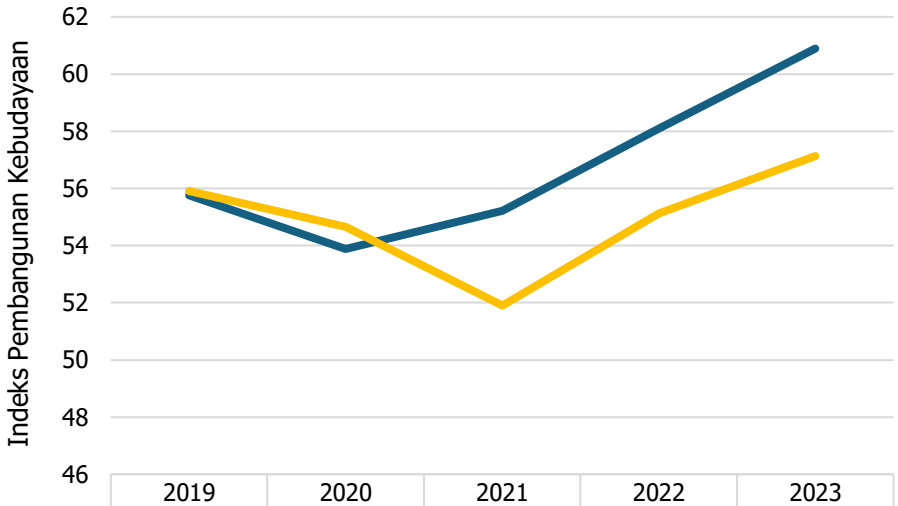



**Gambar 2.2.10 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026

### 2.2.5.2 Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan selain sebagai identitas wilayah, juga menjadi modal pembangunan secara ekonomi, pembangunan komunitas, pendidikan maupun lainnya. Pembangunan kebudayaan di Indonesia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK memiliki tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Data menunjukkan bahwa secara rata-rata, nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah berada di atas rata-rata nasional sejak tahun 2021. Nilai IPK di provinsi tersebut juga mengalami tren meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, terdapat dua aspek yang menunjukkan skor yang relatif rendah, yaitu ekspresi budaya dan ekonomi budaya. Aspek ekspresi budaya

merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat. Di sisi lain, ekonomi budaya berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Dua aspek ini perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pemajuan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Tengah.




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 55,76 | 53,88 | 55,21 | 58,09 | 60,89 |
| Indonesia | 55,91 | 54,65 | 51,9 | 55,13 | 57,13 |

**Gambar 2.2.11 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Sumber: Kementerian Kebudayaan (data tahun 2024 belum tersedia)

Selain dalam konteks indeks, terdapat indikator lain yang berkaitan dengan capaian kinerja urusan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Festival seni budaya merupakan salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan pembangunan kebudaayaan. Jumlah penyelenggaraan festival sempat menurun pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh *refocusing* anggaran sebagai akibat dari pandemi COVID-19, tetapi setelahnya terdapat peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Kegiatan lainnya yaitu pemeliharaan cagar budaya yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan masyarakat lokal, tokoh masyarakat dan instansi terkait seperti Balai Pelestariaan Cagar Budaya. Selain indikator tersebut, berikut disajikan indikator lain yang digunakan untuk menilai pembangunan kebudayaan.

**Tabel 2.2.6 Capaian Indikator Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023**

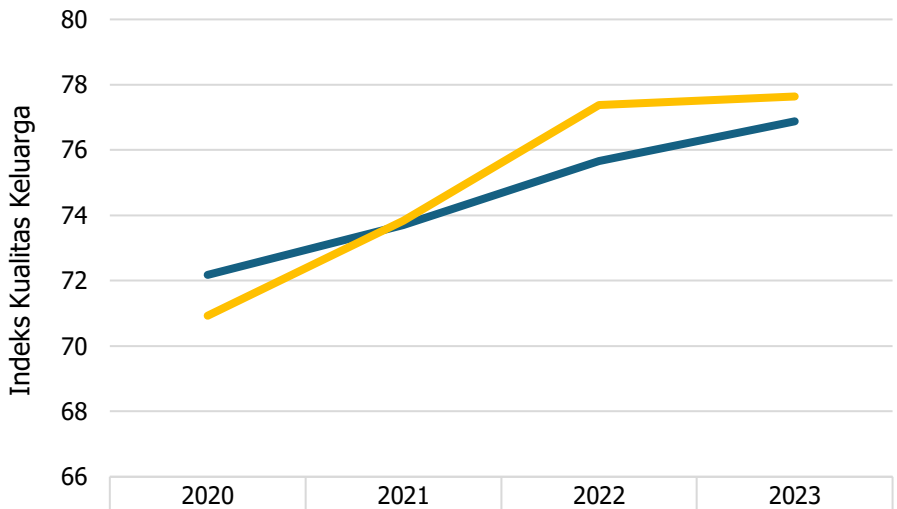
| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah grup kesenian | 315 | 315 | 315 | 492 | 492 |
| Jumlah penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya | 15 | 0 | 0 | 20 | 35 |
| Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 758 | 758 | 327 | 327 | 451 |
| Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara | 115 | 328 | 400 | 650 | 600 |
| Jumlah cagar budaya yang terpelihara | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (data tahun 2024 belum tersedia)

## 2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

### 2.2.6.1 Pembangunan Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat dan menjadi unit yang penting bagi pembangunan. Pembangunan keluarga di Indonesia diukur dengan beberapa indikator, salah satunya adalah Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan perlindungan anak dan kesetaraan gender. IKK diukur menggunakan dimensi kualitas legalitas-struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial-psikologi, dan kualitas ketahanan sosial-budaya. Data menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan IKK di Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun demikian, nilai IKK di Provinsi Kalimantan Tengah relatif lebih rendah dibandingkan IKK nasional sejak tahun 2021. Data terakhir per 2023 sendiri, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai IKK sebesar 76,88.

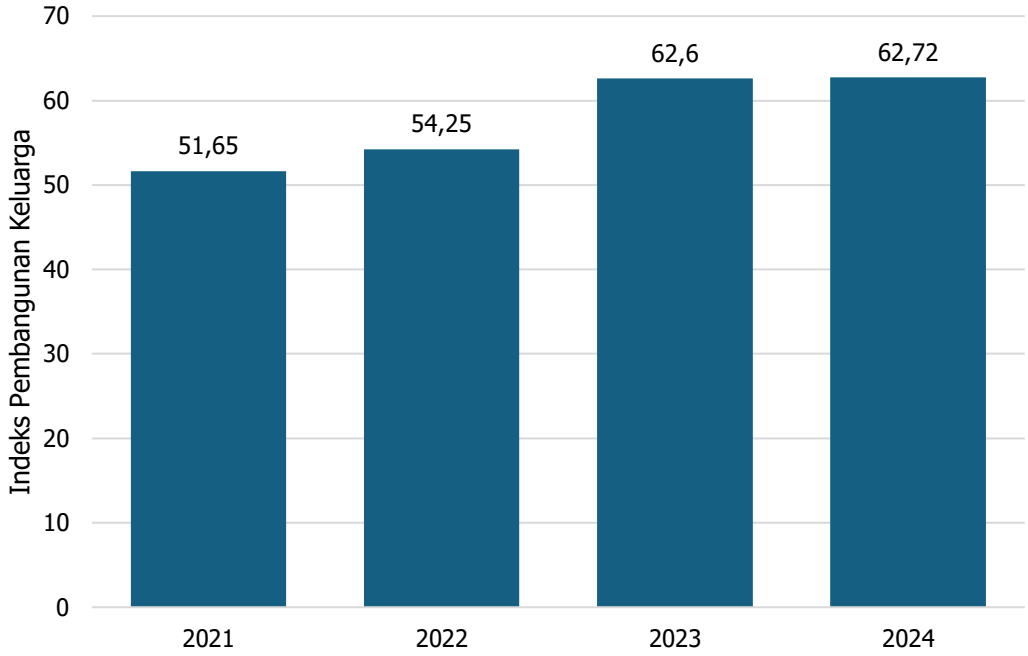



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 72,18 | 73,7 | 75,67 | 76,88 |
| Indonesia | 70,93 | 73,84 | 77,38 | 77,64 |

**Gambar 2.2.12 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2023**

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (data tahun 2024 belum tersedia)

Selain IKK, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) juga menjadi indikator penting yang digunakan oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasionaluntuk mengukur kondisi dan dinamika pembangunan keluarga. iBangga merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan keluarga melalui tiga dimensi utama: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Data iBangga Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, nilai IBANGGA tercatat sebesar 51,65, kemudian meningkat menjadi 54,25 pada 2022, dan melonjak ke 62,60 pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian 62,72. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah semakin mengalami perbaikan dalam aspek ketahanan keluarga, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Namun demikian, nilai IBANGGA yang belum mencapai angka ideal menunjukkan bahwa upaya penguatan keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat masih perlu diperkuat.

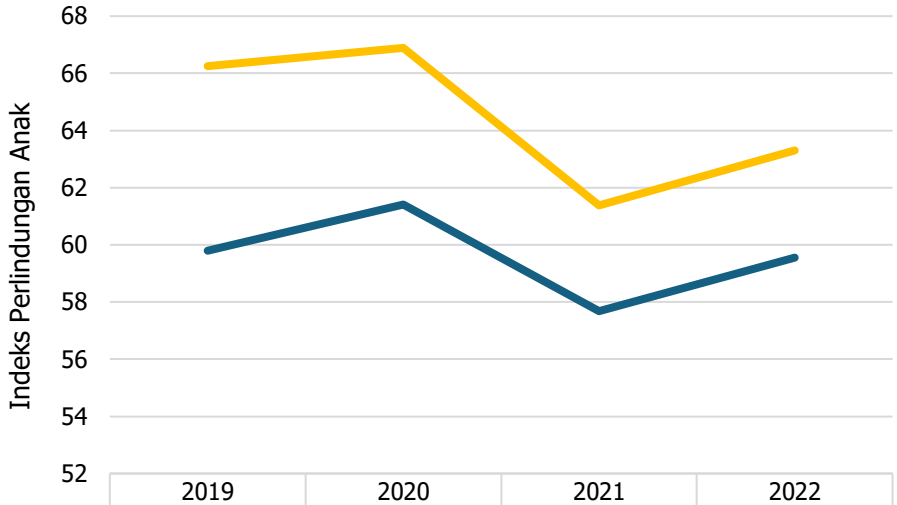



**Gambar 2.2.13 Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) Provinsi Kalimantan Tengah**
**Tahun 2021 – 2024**

Sumber: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (data tahun 2024 belum tersedia)

### 2.2.6.2 Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik kondisi daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. IPA menggunakan indikator hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus dalam penilaiannya. IPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Hal tersebut sejalan dengan tren IPA nasional pada periode yang sama. Pada tahun 2020, IPA meningkat 1,62 dari tahun 2019. Pada tahun 2022, IPA Provinsi Kalimantan Tengah meningkat kembali setelah turun pada tahun sebelumnya walaupun belum melampaui capaian IPA tahun 2019.




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 59,79 | 61,41 | 57,68 | 59,56 |
| Indonesia | 66,26 | 66,89 | 61,38 | 63,3 |

**Gambar 2.2.14 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022**

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (data tahun 2024 belum tersedia)

### 2.2.6.3 Kesetaraan Gender

Pengukuran pemberdayaan perempuan di suatu wilayah menggunakan indeks pembangunan gender, indeks ketimpangan gender, dan indeks pemberdayaan gender. Indeks pembangunan gender merupakan indikator yang membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2019 – 2023, indeks pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, indeks tersebut menurun dari tahun 2019. Sementara, pada tahun 2022-2023, IPG meningkat melebihi kondisi awal pada tahun 2019. Indeks pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 89,49.

Selain indeks pembangunan gender, terdapat Indeks ketimpangan gender yang menunjukkan kesenjangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan antargender pada ketiga dimensi tersebut. Selama tahun 2019 – 2023, indeks tersebut mengalami tren penurunan walaupun terjadi peningkatan pada tahun 2023. Di samping itu, terdapat pula indeks

pemberdayaan gender yang menunjukkan partisipasi atau peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks tersebut di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara terus-menerus pada tahun 2020-2022. IDG Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 81,98, turun 1,22 poin dari tahun 2019.

**Tabel 2.2.7 Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indeks Pembangunan Gender | 89,09 | 89,03 | 88,79 | 89,2 | 89,49 |
| Indeks Ketimpangan Gender | 0,541 | 0,547 | 0,537 | 0,526 | 0,541 |
| Indeks Pemberdayaan Gender | 83,2 | 82,41 | 82,08 | 82 | 81,98 |

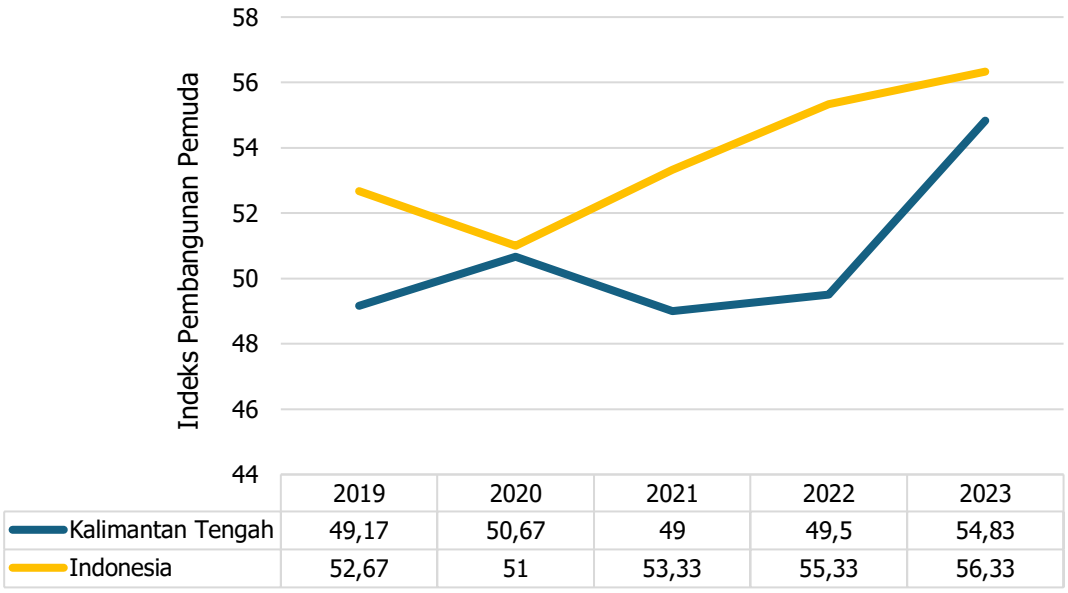
Sumber: Badan Pusat Statistik (data tahun 2024 belum tersedia)

### 2.2.6.4 Kepemudaan

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa sehingga pembangunan kepemudaan menjadi salah satu yang vital dalam mempersiapkan masa depan suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Lapisan tersebut terdiri atas pembangunan individu, pembangunan kesejahteraan, dan partisipasi di berbagai bidang kehidupan. Aspek-aspek pembangunan pemuda dalam IPP dikelompokkan menjadi lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 – 2023 mengalami tren meningkat. Selama periode tersebut, IPP Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah IPP nasional. IPP tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pada tahun 2023, yaitu 54,83.

Pada tahun 2023, IPP Provinsi Kalimantan Tengah adalah 54,83, meningkat 5,53 poin persentase dari IPP tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan nilai, IPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tersebut berada di peringkat dua terendah nasional. Pada domain pendidikan, masalah yang terjadi adalah kepesertaan pada pendidikan tinggi yang masih rendah. Pada

domain lapangan dan kesempatan kerja, persentase wirausaha pemuda juga relatif masih rendah. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda memiliki isu pada rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan. Sementara, pada domain gender dan diskriminasi, partisipasi pendidikan menengah dan atas pemuda perempuan dan rendahnya partisipasi pemuda perempuan dalam sektor formal. Selain itu, perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Tengah juga masih tinggi ditemukan sehingga memengaruhi nilai indeks tersebut di provinsi ini.




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 49,17 | 50,67 | 49 | 49,5 | 54,83 |
| Indonesia | 52,67 | 51 | 53,33 | 55,33 | 56,33 |

**Gambar 2.2.15 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga (data tahun 2024 belum tersedia)

## 2.3 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

#### 2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Aspek untuk melihat daya saing sumber daya manusia terlihat dari angka ketergantungan tenaga kerja. Angka ketergantungan menunjukkan rasio perbandingan antara penduduk usia nonproduktif (<15 tahun dan >64 tahun) dengan akumulasi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka ketergantungan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia nonproduktif semakin tinggi di dalam perekonomian. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2022, proyeksi angka ketergantungan di Provinsi Kalimantan Tengah

mengalami peningkatan. Walaupun demikian, tampak beberapa kabupaten menunjukkan adanya penurunan angka ketergantungan. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia melalui penduduk usia produktif masih perlu dioptimalisasi kembali. Bukan hanya dari segi kuantitas, kualitas sumber daya manusia pada penduduk produktif harus ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas. Data berikut menunjukkan angka ketergantungan di Provinsi Kalimantan Tengah per kabupaten/kota untuk tahun 2020-2024.

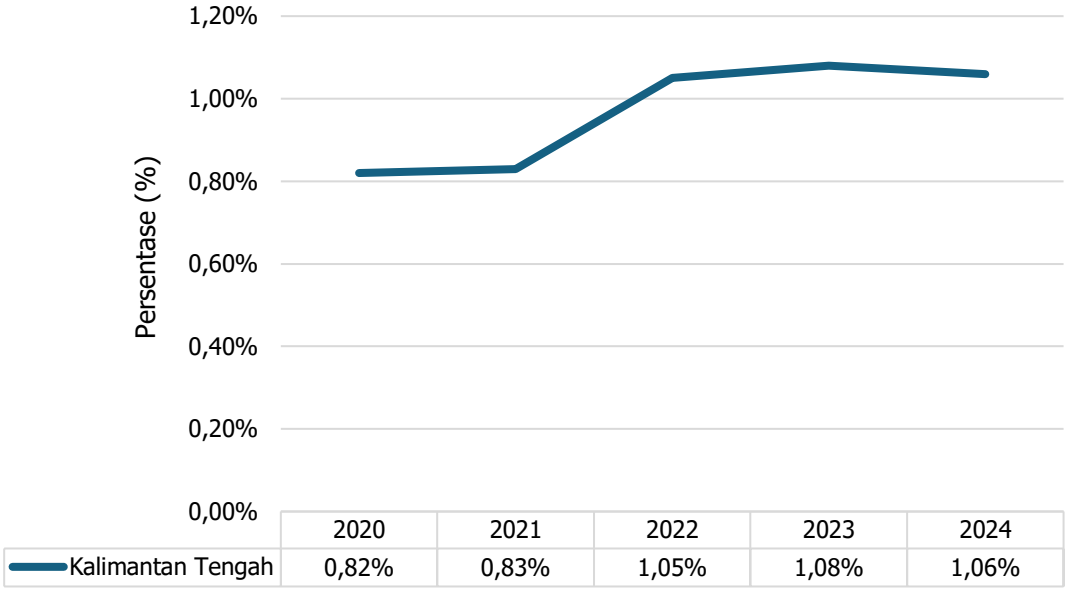
**Tabel 2.3.1 Angka Ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

| No | Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kotawaringin Barat | 43.64 | 43.76 | 43.82 | 43.86 | 43.95 |
| 2 | Kotawaringin Timur | 41.12 | 40.89 | 40.72 | 40.62 | 40.62 |
| 3 | Kapuas | 39.92 | 40.07 | 40.32 | 40.67 | 41.12 |
| 4 | Barito Selatan | 41.62 | 41.56 | 41.62 | 41.8 | 42.13 |
| 5 | Barito Utara | 40.73 | 40.52 | 40.48 | 40.63 | 40.91 |
| 6 | Sukamara | 40.85 | 40.58 | 40.41 | 40.31 | 40.32 |
| 7 | Lamandau | 40.84 | 41.03 | 41.22 | 41.4 | 41.57 |
| 8 | Seruyan | 42.37 | 41.88 | 41.43 | 41.05 | 40.76 |
| 9 | Katingan | 47.33 | 46.83 | 46.34 | 45.92 | 45.61 |
| 10 | Pulang Pisau | 47.39 | 47.23 | 47.04 | 46.87 | 46.76 |
| 11 | Gunung Mas | 44.94 | 44.5 | 44.24 | 44.15 | 44.13 |
| 12 | Barito Timur | 40.96 | 40.74 | 40.61 | 40.6 | 40.72 |
| 13 | Murung Raya | 46.19 | 45.56 | 45.07 | 44.71 | 44.5 |
| 14 | Kota Palangkaraya | 42.49 | 42.72 | 42.93 | 43.14 | 43.42 |
| 15 | **Kalimantan Tengah** | 42.46 | 42.34 | 42.28 | 42.3 | 42.4 |

## 2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

### 2.3.2.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan proporsi dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Data pencapaian Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Data sebagaimana dimaksud tersebut terlihat sebagaimana berikut:




**Gambar 2.3.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

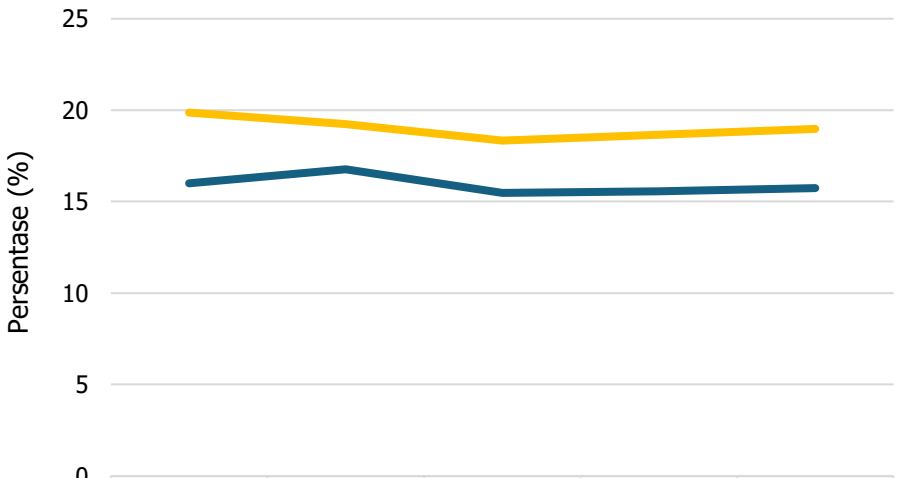
Sumber: Badan Pusat Statistik

Data menunjukkan bahwa terjadi stagnasi rasio pajak daerah pada periode 2022-2024 walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Per 2024 sendiri, rasio pajak daerah di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 1,06%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya upaya ekstra oleh pemerintah daerah dalam menggenjot pendapatan yang berasal dari pajak, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi. Di samping itu, adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan agar pencapaian indikator ini dapat sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana mandat penyesuaian dengan RPJMN Tahun 2025 – 2029.

### 2.3.2.2 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator ini berkaitan dengan pencapaian daerah dalam mendorong industri berkembang di daerahnya. Ini ditunjukkan melalui rasio PDRB sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun. Sektor industri pengolahan dinilai menjadi kontributor terbesar dalam menghasilkan produktivitas bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan adanya proses produksi yang memberikan nilai tambah bagi

suatu produk dan berkonsekuensi pada kemampuan tenaga kerja yang tidak bersifat *low-skilled*. Dengan kata lain, kontribusi sektor industri pengolahan yang tinggi dapat memberikan indikasi awal mengenai tingginya produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut. Data menunjukkan bahwa secara rasio, sektor industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah rata-rata nasional. Per 2024, rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 15,75% atau naik tipis dibandingkan tahun 2023. Walaupun demikian, rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB relatif turun sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian. Perlunya pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan industri lokal yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan industri kembali, khususnya dalam menjawab tantangan hilirisasi pemanfaatan sumber daya lokal daerah.



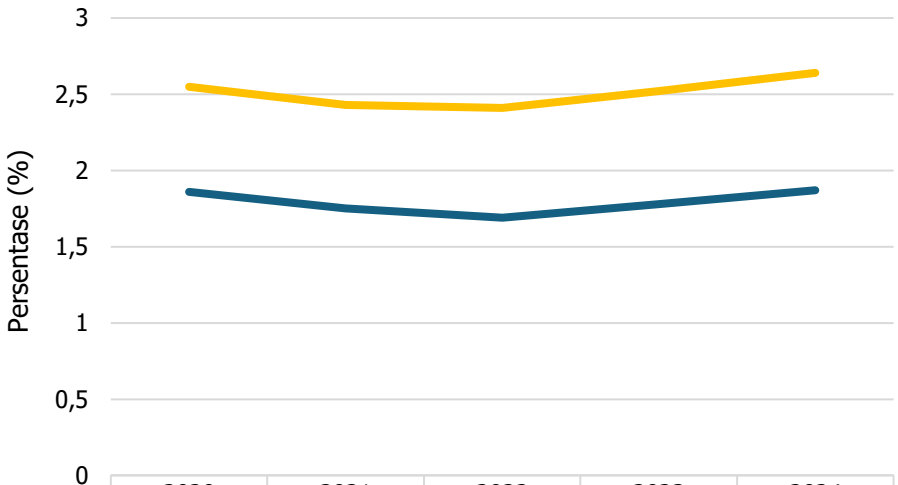

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 16,01 | 16,77 | 15,48 | 15,58 | 15,75 |
| Indonesia | 19,87 | 19,24 | 18,34 | 18,67 | 18,98 |

**Gambar 2.3.2 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Tengah**
**Tahun 2020-2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.3.2.3 Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Salah satu hal untuk melihat produktivitas adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor ini dapat menjadi representasi perkembangan

produktivitas sektor jasa, khususnya dalam bidang pariwisata di suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi sektor ini dalam perekonomian, hal ini dapat mengindikasikan geliat perekonomian lokal yang dipicu dari perkembangan sektor pariwisata. Data menunjukkan bahwa pola pertumbuhan rasio sektor penyediaan akomodasi dan makan minum antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indonesia relatif sama. Pada awalnya, rasio ini mengalami penurunan antara tahun 2020-2022. Namun demikian, rasio tersebut meningkat sejak tahun 2022. Di Provinsi Kalimantan Tengah, rasio tersebut berada di kisaran 2,64% per tahun 2024. Angka ini pada dasarnya juga berada di bawah rata-rata nasional.



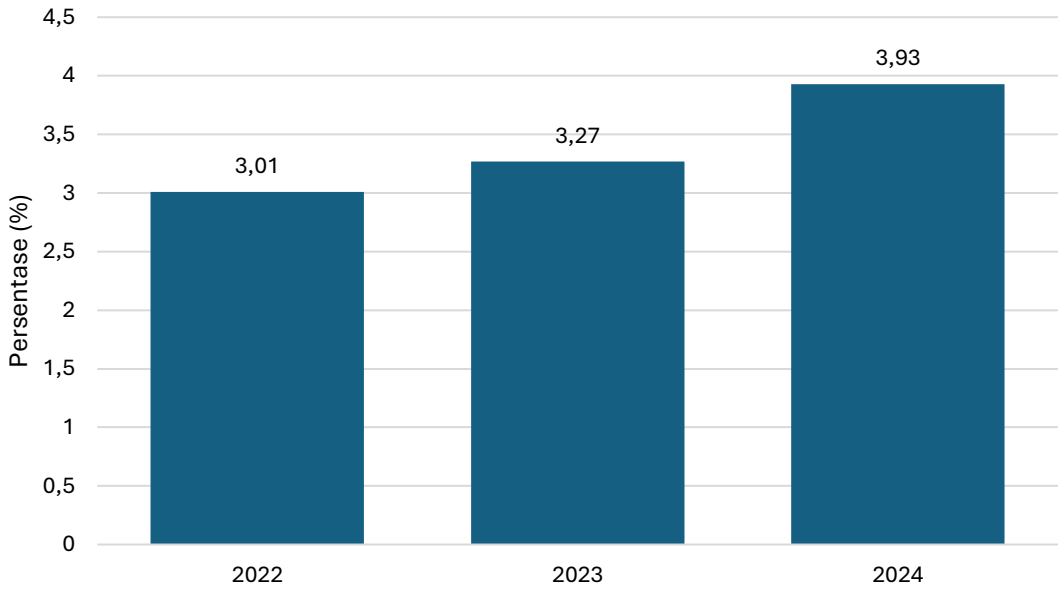

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 1,86 | 1,75 | 1,69 | 1,78 | 1,87 |
| Indonesia | 2,55 | 2,43 | 2,41 | 2,52 | 2,64 |

**Gambar 2.3.3 Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

### 2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan di Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan yang positif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 3,01, yang berarti terdapat sekitar 3 pelaku usaha untuk setiap 100 orang angkatan kerja. Angka ini kemudian meningkat menjadi 3,27 pada tahun 2023, dan kembali naik secara signifikan menjadi 3,93 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ekosistem kewirausahaan di

Kalimantan Tengah, baik dari sisi kemudahan berusaha, akses terhadap pembiayaan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha. Dengan rasio kewirausahaan mencapai hampir 4% pada tahun 2024, Kalimantan Tengah memperlihatkan potensi yang semakin kuat dalam mengembangkan ekonomi berbasis UMKM dan wirausaha lokal.



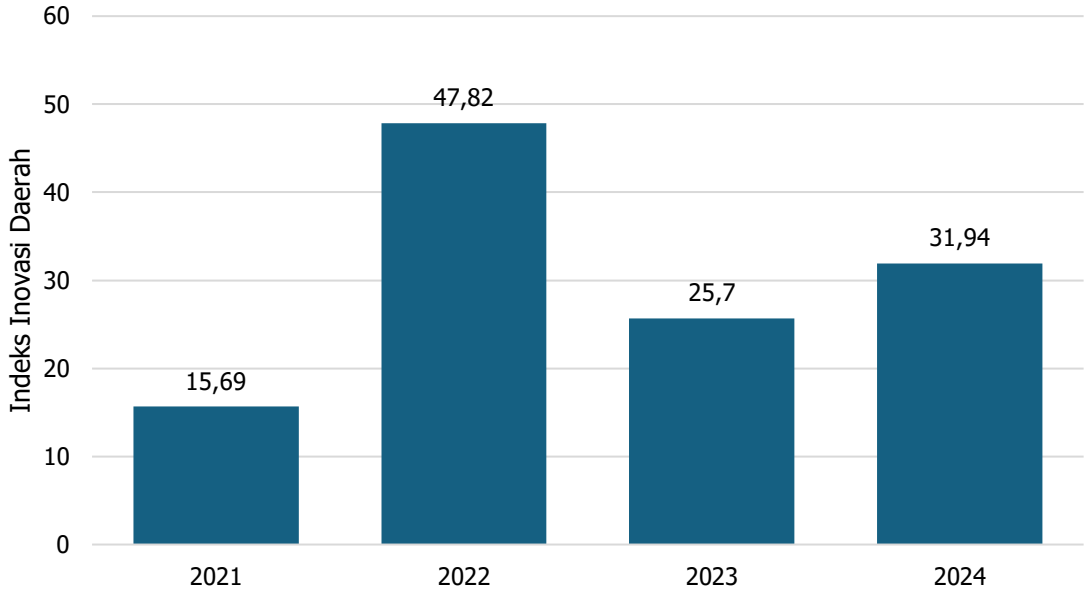

**Gambar 2.3.4 Rasio Kewirausahaan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

Namun, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, angka ini masih di bawah target ideal rasio kewirausahaan nasional yang dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi, yaitu minimal 4%–5% dari total angkatan kerja. Oleh karena itu, peningkatan rasio kewirausahaan ke depan perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur bisnis, akses terhadap pasar, inovasi produk, serta pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan, terutama bagi kelompok muda dan pelaku usaha di daerah tertinggal. Rasio kewirausahaan yang membaik juga menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong ketangguhan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta mendukung transformasi ekonomi Kalimantan Tengah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif dan adaptif terhadap tantangan global.

#### 2.3.2.5 Inovasi Daerah

Perkembangan Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021, indeks inovasi tercatat sebesar 15,69, yang merepresentasikan tingkat inovasi yang relatif rendah (kurang inovatif) berdasarkan klasifikasi Kementerian Dalam Negeri. Capaian ini mengindikasikan bahwa ekosistem inovasi di Kalimantan Tengah pada periode tersebut belum berkembang secara optimal. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, di mana nilai indeks melonjak menjadi 47,82, yang menempatkan Kalimantan Tengah dalam kategori inovatif. Lonjakan ini mengindikasikan adanya penguatan inisiatif dan program-program inovasi di tingkat daerah, yang kemungkinan didorong oleh kebijakan strategis, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta kolaborasi yang lebih intensif antar pemangku kepentingan.

Sayangnya, capaian positif tersebut belum dapat dipertahankan secara konsisten. Tahun 2023 menunjukkan penurunan indeks yang cukup tajam menjadi 25,70, dan meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2024 dengan capaian 31,94, nilai tersebut masih belum kembali menyamai pencapaian tahun 2022. Penurunan ini dapat mencerminkan sejumlah tantangan, seperti rendahnya keberlanjutan inovasi, terbatasnya alokasi anggaran, lemahnya kelembagaan litbang, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. Fluktuasi capaian indeks ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang mendukung iklim inovasi. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas kinerja inovasi daerah.




**Gambar 2.3.5 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024**
Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Selain konteks inovasi daerah, kondisi ini dapat dilihat lebih luas pada Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat daya saing daerah di Indonesia. Disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), IDSD bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan daya saing daerah. Indeks ini mencakup berbagai komponen yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan daerah dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. IDSD terdiri dari empat komponen utama: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi, yang kesemuanya saling berhubungan dalam meningkatkan daya saing suatu daerah.

Komponen pertama, lingkungan pendukung, mencakup aspek-aspek seperti kualitas institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, dan kemampuan daerah dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Komponen kedua, sumber daya manusia (SDM), menilai kualitas dan keterampilan tenaga

kerja yang tersedia di daerah, yang sangat penting dalam mendukung produktivitas dan inovasi. Komponen ketiga, pasar, melihat ukuran dan aksesibilitas pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat lokal maupun global. Sementara itu, ekosistem inovasi menjadi komponen keempat yang menilai sejauh mana daerah mendukung dan mendorong inovasi melalui kerjasama antara lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki skor IDSD 3,46 di atas skor rata rata nasional yang mencapai 3,43. Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan skor IDSD dari tahun 2023 yaitu 3,27 menjadi 3,46 di tahun 2024. Pilar yang memiliki skor lebih tinggi daripada nasional: Pilar 1 Institusi, Pilar 3 Adopsi TIK, Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro, Pilar 5 Kesehatan, Pilar 6 Keterampilan, Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9 Sistem Keuangan, Sedangkan Pilar yang skornya dibawah rata-rata nasional adalah Pilar 2 Infrastruktur, Pilar 7 Pasar Produk, Pilar 11 Dinamisme Bisnis, dan Pilar 12 Kapabilitas Inovasi. Pilar yang nilainya kuat, tetapi di bawah skor nasional adalah Pilar 10 Ukuran Pasar.

**Tabel 2.3.2 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

| PROVINSI | LINGKUNGAN PENDUKUNG | | | | SDM | | PASAR | | | | EKOSISTEM INOVASI | | SKOR IDSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pilar 1 | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11 | Pilar 12 | |
| RATA-RATA NASIONAL | 4.18 | 2.97 | 3.47 | 3.99 | 3.76 | 3.91 | 2.57 | 3.03 | 2.76 | 4.35 | 3.06 | 3.13 | 3.43 |
| PROV. KALIMANTAN TENGAH | 4.36 | 2.82 | 3.58 | 4.41 | 3.78 | 4.14 | 2.05 | 3.31 | 3.47 | 4.35 | 2.92 | 2.31 | 3.46 |

**Keterangan :**

| | | |
|---|---|---|
| Pilar 1 : Institusi | Pilar 5 : Kesehatan | Pilar 9 : Sistem keuangan |
| Pilar 2 : Infrastruktur | Pilar 6 : Keterampilan | Pilar 10 : Ukuran pasar |
| Pilar 3 : Adopsi TIK | Pilar 7 : Pasar produk | Pilar 11 : Dinamisme bisnis |
| Pilar 4 : Stabilitas ekonomi makro | Pilar 8 : Pasar tenaga kerja | Pilar 12 : Kapabilitas inovasi |

Secara historis, pencapaian IDSD di Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.3 Perkembangan Skor IDSD di Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024**

| Tahun | Skor IDSD | |
|---|---|---|
| | Nasional | Kalimantan Tengah |
| 2022 | 3.26 | 3.13 |
| 2023 | 3.44 | 3.27 |
| 2024 | 3.43 | 3.46 |

### 2.3.2.6 Kondisi Siber Daerah

Salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian kondisi siber daerah adalah pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Daerah. Adapun kondisi eksisting pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3.4 Kondisi Eksisting Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Daerah (TTIS)**

| No | Kabupaten/ Kota | Tahapan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sudah Terbentuk | Sudah Ada SK | Dalam Proses |
| 1 | Kotawaringin Barat | V | | |
| 2 | Kotawaringin Timur | | | V |
| 3 | Kapuas | | V | |
| 4 | Barito Selatan | V | | |
| 5 | Barito Utara | | | V |
| 6 | Sukamara | | V | |
| 7 | Lamandau | V | | |
| 8 | Seruyan | | | V |
| 9 | Katingan | | | V |
| 10 | Pulang Pisau | | | V |
| 11 | Gunung Mas | | V | |
| 12 | Barito Timur | | V | |
| 13 | Murung Raya | | V | |
| 14 | Kota Palangkaraya | | V | |

### 2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Saat ini, belum disusun indeks ekonomi hijau yang menyasar pada kondisi perekonomian hijau pada level provinsi di Indonesia. Salah satu proksi yang dapat dilihat adalah dari aspek keberlanjutan ekonomi yang ditilik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil analisis ini didapatkan dari hasil kajian yang dilakukan tim Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam klasifikasi aspek keberlanjutan tersebut terlihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3.5 Aspek-Aspek dan Komponen Keberlanjutan Perekonomian**

| 3 Aspek | 16 Komponen |
|---|---|
| Ekonomi | 1. Intensitas Emisi.<br>2. Intensitas Energi Final<br>3. PDRB per Kapita.<br>4. Produktivitas Pertanian.<br>5. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri.<br>6. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa. |
| Sosial | 1. Tingkat Pengangguran Terbuka.<br>2. Tingkat Kemiskinan.<br>3. Angka Harapan Hidup.<br>4. Rata-rata Lama Sekolah. |
| Lingkungan | 1. Persentase Luas Tutupan Hutan dari Luas Daratan.<br>2. Bauran Energi Baru Terbarukan dari Sumber Energi Primer.<br>3. Kualitas Air Permukaan (Konsentrasi BOD).<br>4. Kualitas Udara (Konsentrasi $NO_{2)}$.<br>5. Persentase Penurunan Emisi Kumulatif dari Baseline.<br>6. Penurunan Tutupan Lahan Gambut. |

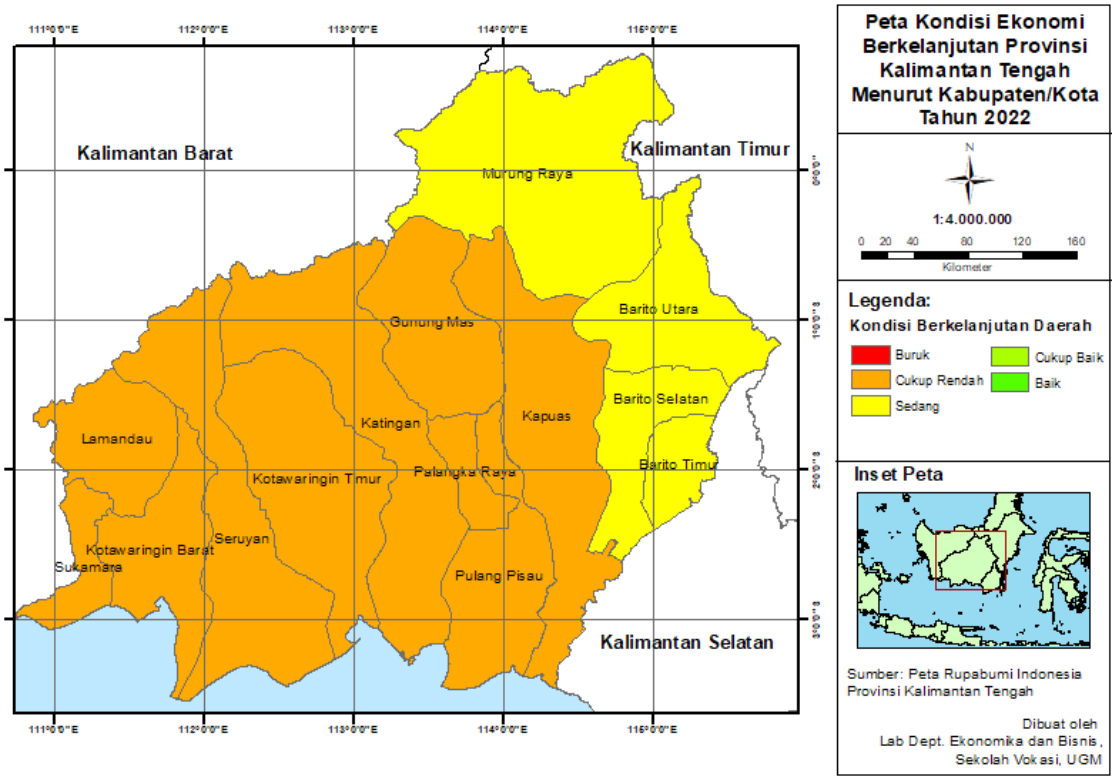
Komponen-komponen tersebut lalu disusun dengan pendekatan statistika untuk menghasilkan seberapa besar setiap komponen memengaruhi kondisi keseluruhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan tingkat keberlanjutannya. Hasil dari gambaran umum kondisi keberlanjutan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3.6 Kondisi Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

| Kabupaten/Kota | PDRB (Miliar Rp) | PDRB Berkelanjutan (Miliar Rp) | Persentase Ekonomi Berkelanjutan per Aspek Terhadap PDRB (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ekonomi Berkelanjutan | Aspek Ekonomi | Aspek Lingkungan | Aspek Sosial |
| Barito Selatan | 4.602,95 | 1.886,02 | 41% | 46% | 29% | 47% |
| Barito Timur | 5.659,98 | 2.417,15 | 43% | 51% | 21% | 56% |
| Barito Utara | 7.597,87 | 3.277,00 | 43% | 52% | 21% | 57% |
| Gunung Mas | 4.050,9 | 1.598,42 | 39% | 44% | 27% | 47% |
| Kapuas | 12.102,2 | 4.846,30 | 40% | 46% | 25% | 48% |
| Katingan | 5.374,98 | 2.077,97 | 39% | 43% | 29% | 44% |
| Kotawaringin Barat | 14.559,33 | 5.672,14 | 39% | 45% | 27% | 45% |
| Kotawaringin Timur | 19.688 | 7.754,34 | 39% | 46% | 26% | 46% |
| Lamandau | 4.224,7 | 1.694,67 | 40% | 46% | 24% | 50% |
| Murung Raya | 6.395 | 2.791,70 | 44% | 53% | 19% | 59% |
| Palangka Raya | 11.720,4 | 4.207,82 | 36% | 37% | 42% | 30% |
| Pulang Pisau | 3.765,49 | 1.442,93 | 38% | 42% | 29% | 44% |
| Seruyan | 6.275,4 | 2.517,44 | 40% | 48% | 22% | 51% |
| Sukamara | 3.214,2 | 1.263,35 | 39% | 45% | 26% | 47% |
| **Kalimantan Tengah** | **109.231,40** | **43.447,23** | **40%** | **46%** | **27%** | **47%** |

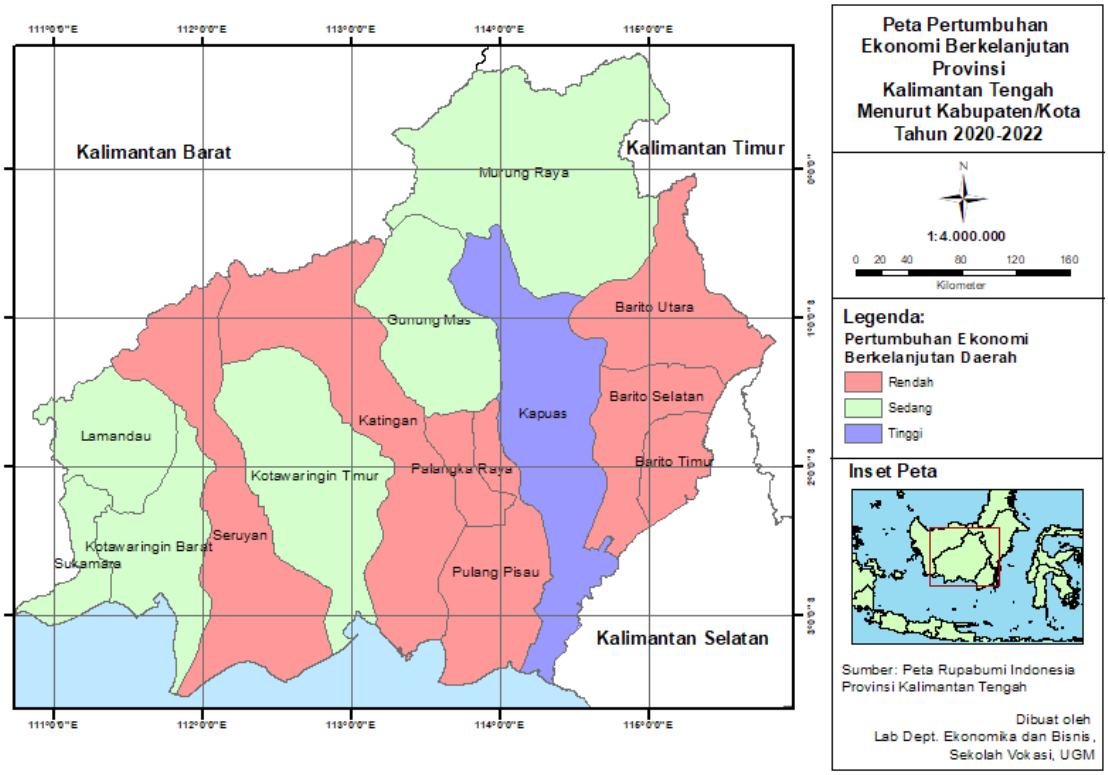
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara visual, kondisi keberlanjutan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada peta berikut.




**Gambar 2.3.6 Peta Kondisi Berkelanjutan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Sumber: Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada




**Gambar 2.3.7 Peta Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2022**

Sumber: Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

Dari kedua gambar dan tabel yang ada, menunjukkan bahwa kondisi keberlanjutan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya menunjukkan keberlanjutan yang tinggi, baik dari segi nominal maupun pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif kondisi keberlanjutan, terlihat bahwa klaster di sebelah timur Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kondisi keberlanjutan yang sedang. Kabupaten/kota lainnya masih menunjukkan kondisi yang cukup rendah. Di sisi lain, terjadi variasi klasifikasi keberlanjutan apabila ditilik dari konteks pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Kapuas merupakan satu-satunya kabupaten yang terklasifikasi memiliki keberlanjutan dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terdapat 6 (enam) kabupaten yang memiliki klasifikasi sedang, sedangkan sisanya masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan akibat adanya *trade-off* yang terjadi di masing-masing aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di dalam kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh,

Kota Palangkaraya tergolong rendah karena aspek sosial dan ekonomi yang terhitung rendah, tetapi memiliki nilai sedang secara aspek lingkungan. Di sisi lain, kabupaten lain menunjukkan aspek sosial dan ekonomi yang tinggi, tetapi aspek lingkungan yang rendah dan menghasilkan *outcome* yang relatif berbeda secara keberlanjutan.

Selain itu, terdapat pula perkembangan rasio energi baru dan energi terbarukan yang ada pada bauran energi primer yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian data tersebut terlihat sebagaimana data berikut ini (bersumber dari Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026). Tampak bahwa terjadi peningkatan bauran energi baru dan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Dengan melihat mandat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi nasional, upaya yang sifatnya ekstra dan kolaboratif haruslah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target pada tahun-tahun setelahnya. Di samping itu, adanya mandat Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pelimpahan sebagian wewenang pengembangan energi baru dan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan dengan kolaborasi yang intensif bersama pemerintah pusat.

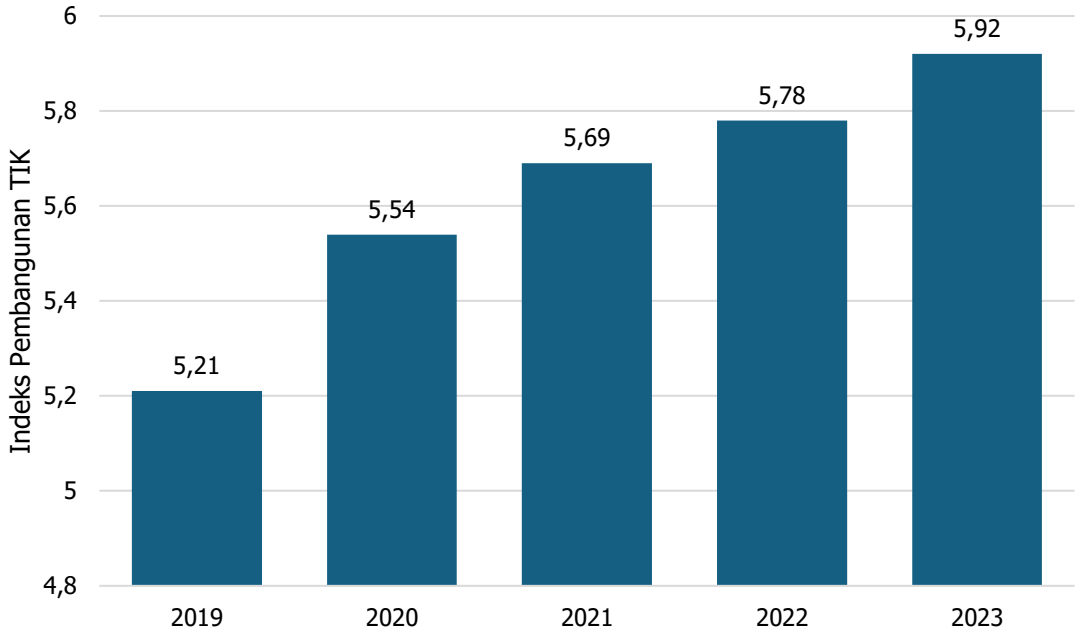
**Tabel 2.3.7 Capaian Bauran Energi Baru dan Energi Terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah**

| Tahun | Capaian |
|---|---|
| 2021 | 7% |
| 2022 | 9% |
| 2023 | Data tidak tersedia |
| 2024 | 15,71% |

### 2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan pilar penting dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik, serta penguatan daya saing di era ekonomi digital. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan sejauh mana transformasi digital berlangsung di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks Pembangunan TIK).

Berdasarkan grafik perkembangan Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan TIK Kalimantan Tengah berada pada angka 5,54. Angka ini kemudian meningkat menjadi 5,68 pada tahun 2021, 5,78 pada tahun 2022, dan mencapai 5,92 pada tahun 2023. Peningkatan nilai indeks ini menunjukkan adanya perbaikan yang berkesinambungan dalam aspek infrastruktur digital, keterjangkauan teknologi informasi, serta tingkat penggunaan dan literasi digital oleh masyarakat.

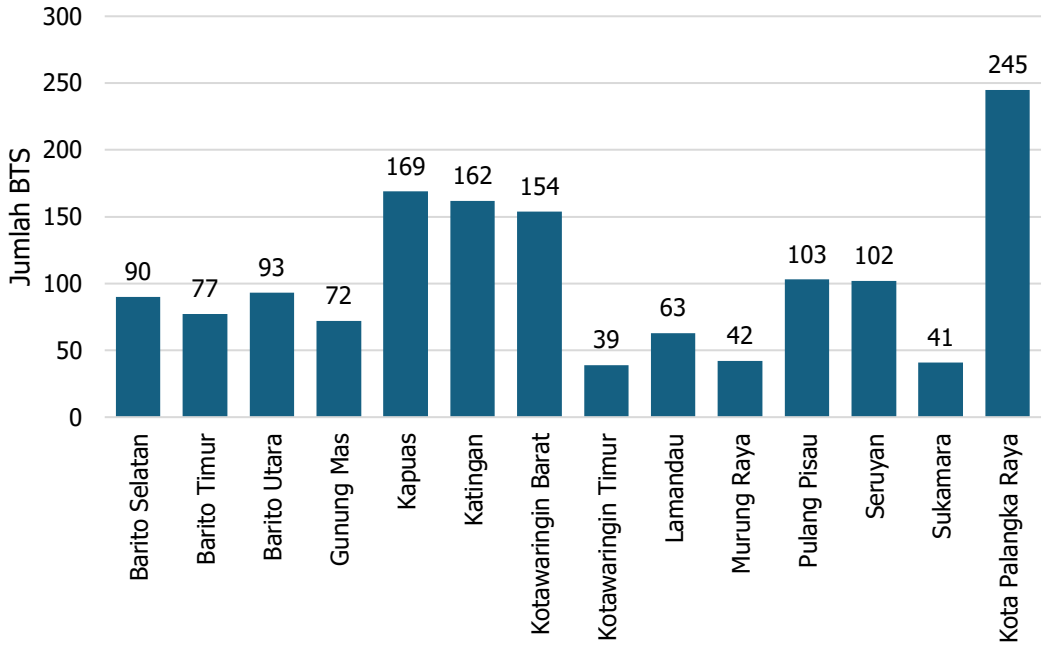



**Gambar 2.3.8 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023**

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (data tahun 2024 belum tersedia)

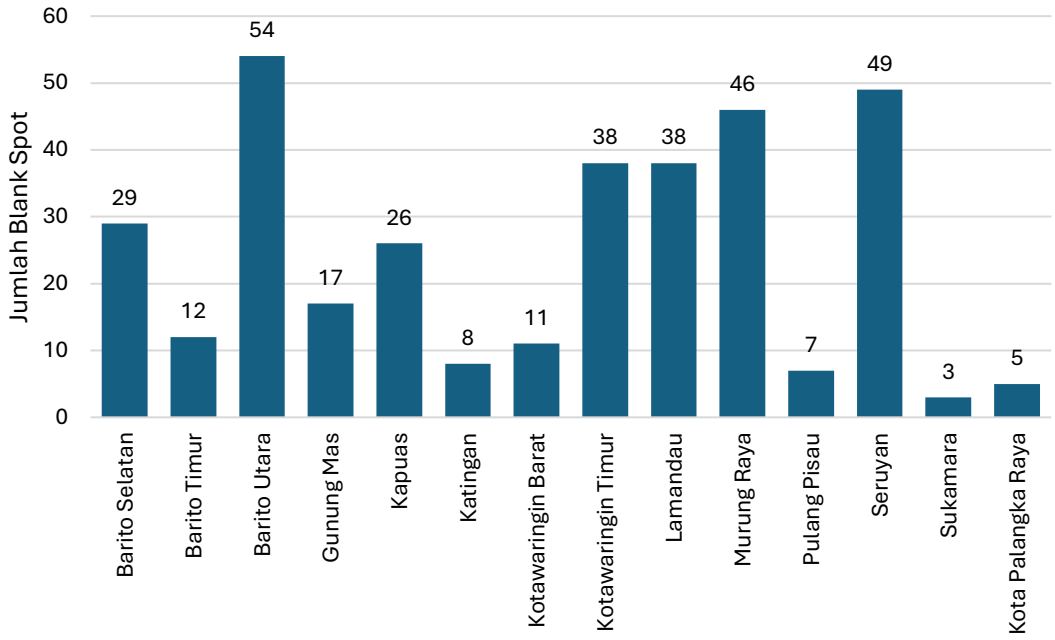
Meskipun capaian Indeks Pembangunan TIK Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif, tantangan ke depan masih cukup berat seperti kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan, keterbatasan literasi digital di tingkat akar rumput, serta kebutuhan penguatan keamanan siber seiring meningkatnya aktivitas daring. Data dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya disparitas besar dalam pembangunan infrastruktur TIK. Kota Palangka Raya

mencatat jumlah Base Transceiver Station (BTS) tertinggi dengan 245 unit, diikuti oleh Kapuas (169 unit), Katingan (162 unit), dan Kotawaringin Barat (154 unit). Sementara itu, kabupaten seperti Lamandau (63 unit), Murung Raya (42 unit), dan Sukamara (41 unit) masih memiliki jumlah BTS yang relatif rendah.



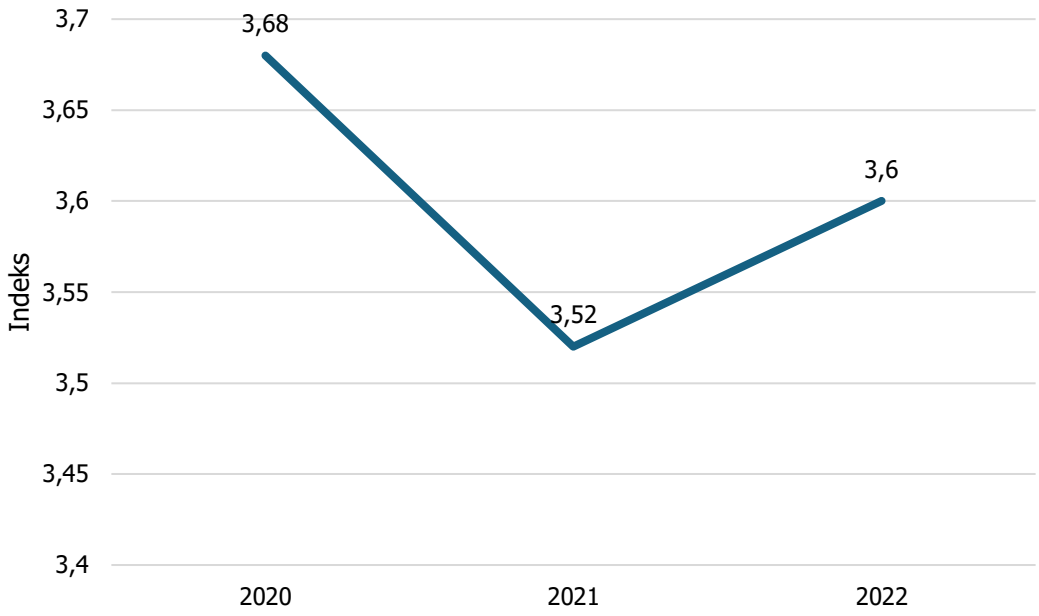

**Gambar 2.3.9 Jumlah BTS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Lebih lanjut, permasalahan wilayah blankspot masih menjadi isu krusial. Kabupaten Barito Utara memiliki jumlah blankspot tertinggi sebanyak 54 titik, diikuti oleh Seruyan (49 titik), Murung Raya (46 titik), dan Lamandau serta Kotawaringin Timur masing-masing (38 titik). Di sisi lain, Kota Palangka Raya dan Sukamara relatif lebih baik dengan masing-masing hanya 5 dan 3 titik blankspot. Kesenjangan infrastruktur digital ini menunjukkan perlunya percepatan pemerataan pembangunan TIK, terutama di daerah pedalaman, tertinggal, terpencil, dan perbatasan, agar transformasi digital dapat berjalan inklusif dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.



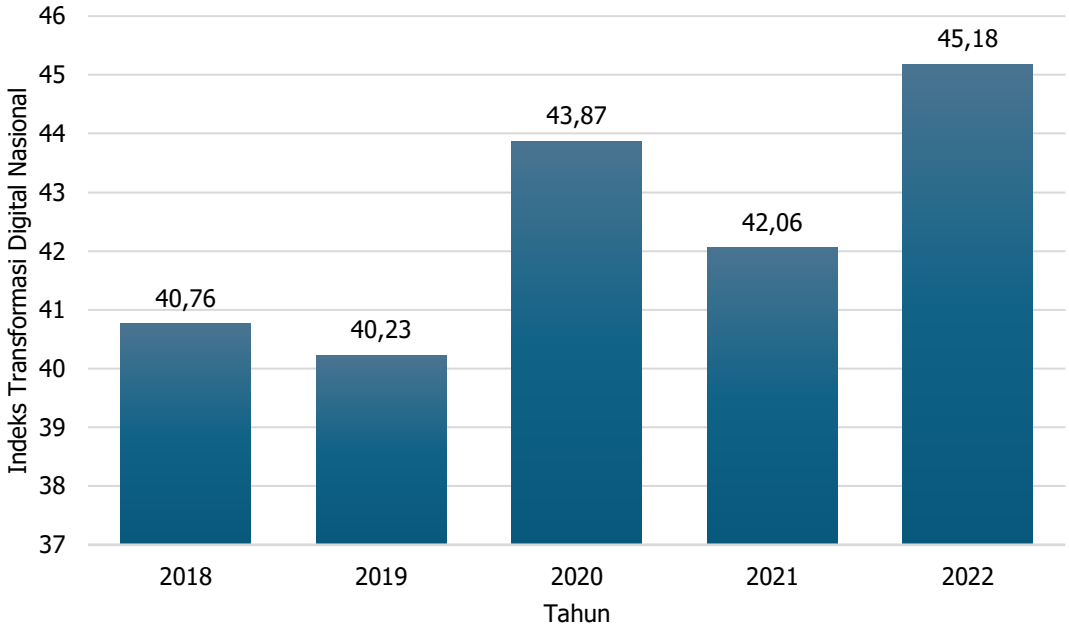

**Gambar 2.3.10 Jumlah *Blank Spot* Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Selain ketersediaan infrastruktur, kualitas pemanfaatan teknologi oleh masyarakat juga menjadi aspek penting dalam transformasi digital. Hal ini tercermin dalam Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 3,68, sempat menurun menjadi 3,52 pada 2021, dan meningkat kembali menjadi 3,60 pada tahun 2022. Tren fluktuatif ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur mulai membaik, peningkatan literasi digital masyarakat belum berjalan secara konsisten. Rendahnya literasi digital dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan TIK, terutama di sektor pendidikan, pelayanan publik, dan ekonomi digital. Dengan demikian, tantangan transformasi digital di Kalimantan Tengah tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan literasi digital masyarakat, serta pemerataan akses hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan.




**Gambar 2.3.11 Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022**
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (data tahun 2023 dan 2024 belum tersedia)

Disamping itu, jika ditinjau dari Indeks Transformasi Digital Nasional. Kondisi pembangunan digital di Provinsi Kalimantan Tengah masih memperlihatkan hasil yang kurang baik. Pada tahun 2022, Kalimantan Tengah memperoleh skor Indeks TDN sebesar 45,18 dan masuk ke dalam provinsi dengan Klasifikasi C (Cukup). Namun demikian, dalam lima tahun, skor Indeks TDN Provinsi Kalimantan Tengah telah meningkat 4,42 poin dari sebelumnya sebesar 40,76 pada tahun 2018.




**Gambar 2.3.12 Indeks Transformasi Digital Nasional**
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Meskipun skor Indeks TDN mencatat Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori C, tetapi jika dilihat lebih dalam, pilar masyarakat menunjukkan kinerja yang cukup baik selama periode tahun 2022 dengan skor 57,08 dan masuk dalam klasifikasi B (Baik). Hal ini tidak terlepas dari dukungan terhadap literasi digital dan keterampilan digital yang menunjukkan hasil yang cukup tinggi dan selalu meningkat, artinya upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan dorongan dalam pengadopsiannya semakin baik setiap tahunnya. Selain itu, upaya peningkatan keterampilan digital untuk perempuan juga cukup baik di Provinsi Kalimantan Tengah, ini mengindikasikan bahwa pemerintah juga mendukung peningkatan keterampilan perempuan selain dengan laki-laki.

Pilar lain yang menunjukkan performa yang paling baik yaitu pilar jaringan dan infrastruktur, dengan skor 55,70 dan masuk dalam kategori B. Kecepatan unduh di provinsi ini menunjukkan hasil yang sudah cukup baik, dimana dalam laporan Ookla tercatat 25,2 Mbps untuk mobile broadband dan 21,25 untuk fixed

broadband. Selain itu, penetrasi smartphone juga sudah cukup banyak diatas rata-rata nasional. Meskipun demikian, masih perlu dukungan untuk pengembangan cakupan 4G di provinsi ini. Berdasarkan data dari Kementerian Komdigi Tahun 2025, cakupan sinyal 4G di tahun 2024 mencapai 78,11% dengan rincian kekuatan sinyal kuat tersebar di 163 desa, dan sebaran sinyal lemah di 1.411 desa. sedangkan rata-rata kecepatan download 52,16 Mbps dan rata-rata kecepatan upload 19,58 Mbps. Pada sektor pendidikan, berdasarkan data Kemendikbudasmen tahun 2024, tercatat 2.489 sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) sudah terfasilitasi akses internet, dan sebanyak 36,20% sekolah (1.412 sekolah) belum terfasilitasi akses internet. Pada sektor kesehatan, data Kementerian Kesehatan tahun 2024 mencatat 90,69% (185 puskesmas) di wilayah Kalimantan Tengah sudah terfasilitasi akses internet, dan terdata 19 puskesmas yang belum terfasilitas akses internet.

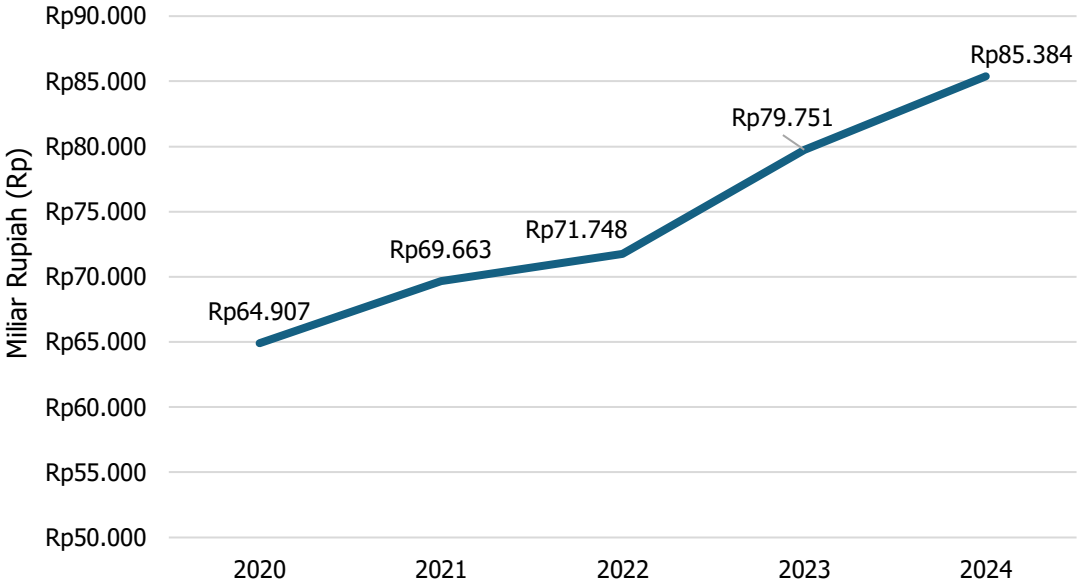
Kinerja Indeks TDN pilar bisnis menunjukkan hasil yang masih kurang memuaskan, dimana pada tahun 2022 diperoleh skor sebesar 24,02 yang artinya masuk dalam kategori D (kurang baik). Dukungan terhadap iklim bisnis secara keseluruhan masih terbatas di provinsi ini, tercermin dari skor lingkungan bisnis yang masih rendah. Lingkungan bisnis ini berkaitan dengan kebijakan dan regulasi setempat, infrastruktur, serta keadaan sosial ekonomi. Melihat kondisi tersebut, pemanfaatan teknologi digital juga belum mendapatkan perhatian maksimal, hal ini tercermin dari indikator adopsi pembayaran digital dan adopsi teknologi baru yang masih sangat rendah.

Selanjutnya pada pilar pemerintah, skor Indeks TDN yang diperoleh Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar 41,39 dan masuk dalam kategori C. Aspek indikator-indikator pada tahapan fondasi masih perlu ditingkatkan kembali, hal ini tercermin dari masih rendahnya skor efektivitas pemerintahan yang melihat kualitas aparatur sipil negara (ASN) dan kredibilitas atau komitmen pemerintah terhadap kebijakan. Selain itu, capaian e-government index dan online service index juga masih rendah. Adapun skor SPBE juga menunjukkan nilai 1,9, yang artinya masih sangat kurang.

### 2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

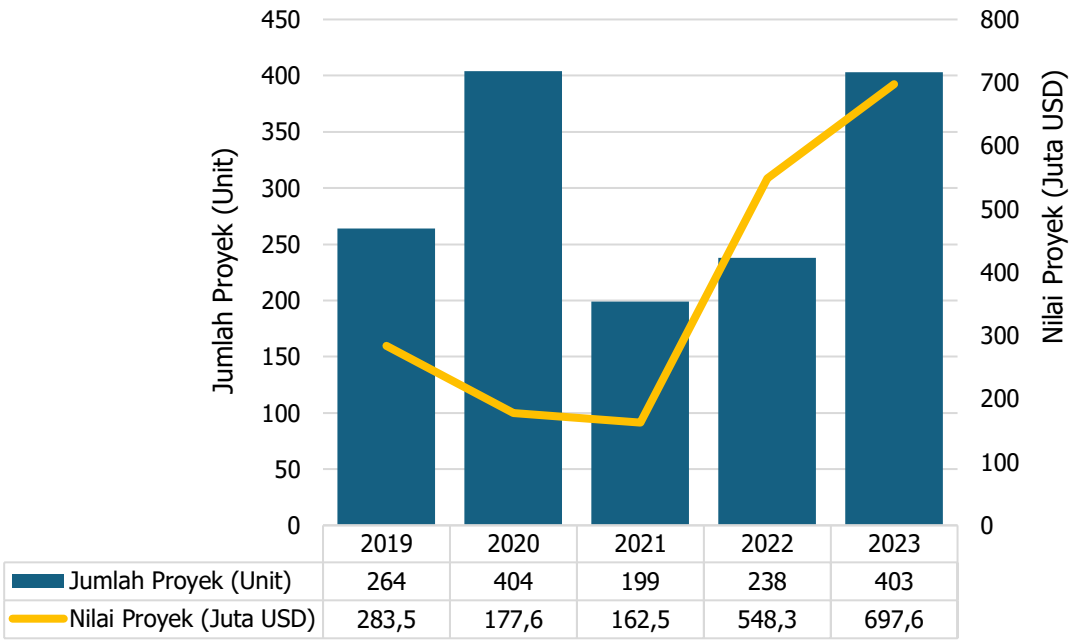
#### 2.3.5.1 Investasi

Data investasi dan ekspor daerah dapat menjadi representasi untuk melihat daya saing perekonomian lokal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Nilai investasi sendiri dapat dilihat pada komponen pembentukan modal bruto tetap pada PDRB Provinsi Kalimantan Tengah menurut pengeluaran dan besaran realisasi penanaman modal asing. Data pada pembentukan modal bruto PDRB menunjukkan terdapat tren kenaikan pada nilai tersebut setiap tahunnya. Per tahun 2024, nilai pembentukan modal tetap bruto di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp 85,38 triliun. Angka ini meningkat 31,55% relatif pada tahun 2020 yang berada di kisaran Rp64,91 triliun. Menariknya, tren kenaikan nilai pembentukan modal tetap bruto di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat lebih tajam setelah tahun 2022. Pada jenis penanaman modal asing, terdapat tren peningkatan yang besar terhadap nilai proyek investasi asing di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama setelah tahun 2021. Kondisi ini beriringan dengan meningkatnya jumlah proyek yang didanai investasi asing. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki potensi besar dalam hal investasi yang dapat diarahkan pada pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.




**Gambar 2.3.13 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik



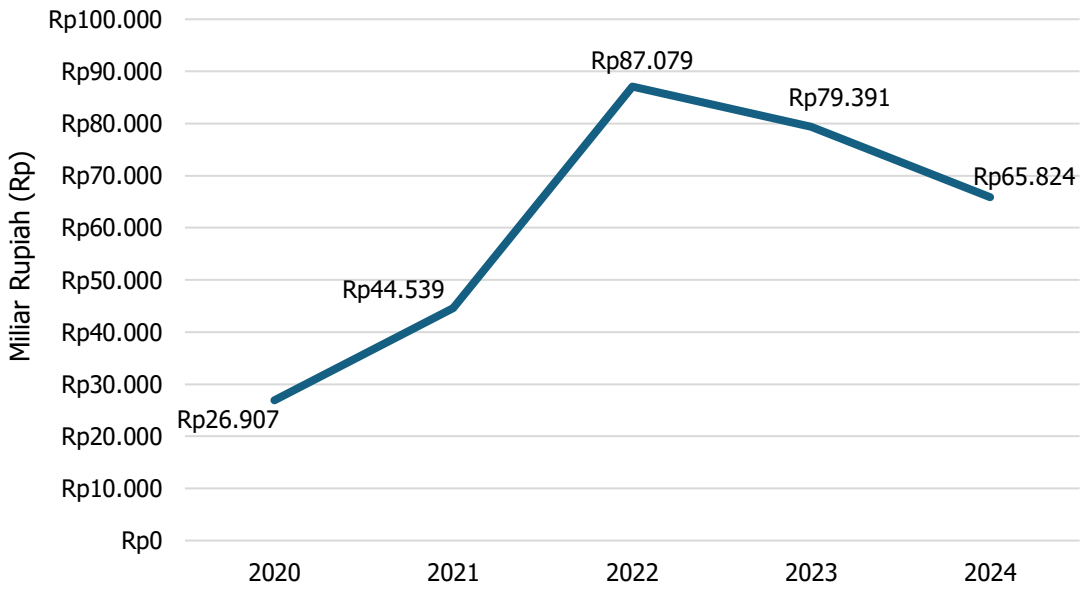

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Proyek (Unit) | 264 | 404 | 199 | 238 | 403 |
| Nilai Proyek (Juta USD) | 283,5 | 177,6 | 162,5 | 548,3 | 697,6 |

**Gambar 2.3.14 Jumlah dan Nilai Proyek Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data tahun 2024 belum tersedia)

### 2.3.5.2 Ekspor

Selain nilai investasi, daya saing ekonomi juga dapat dilihat dari nilai ekspor Provinsi Kalimantan Tengah yang didapatkan dari data PDRB menurut sektor pengeluaran. Nilai ekspor yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya dapat mengindikasikan peningkatan produksi dan kualitas produk yang berdaya saing ekspor. Kondisi ini juga dapat merepresentasikan produktivitas yang dimiliki oleh pelaku ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Data menunjukkan secara umum bahwa terjadi tren kenaikan nilai ekspor di Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp87,08 triliun. Walaupun demikian, terdapat penurunan nilai ekspor pasca tahun 2022 menjadi sekitar Rp65,82 triliun pada tahun 2024. Kondisi ini perlu dipandang dari dua hal: penurunan disebabkan oleh faktor eksternal pasar tujuan ekspor atau kapasitas produksi lokal yang stagnan dan relatif belum bisa merespon permintaan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri lokal yang berorientasi pada ekspor. Selain berpotensi meningkatkan ekspor, kebijakan ini dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.



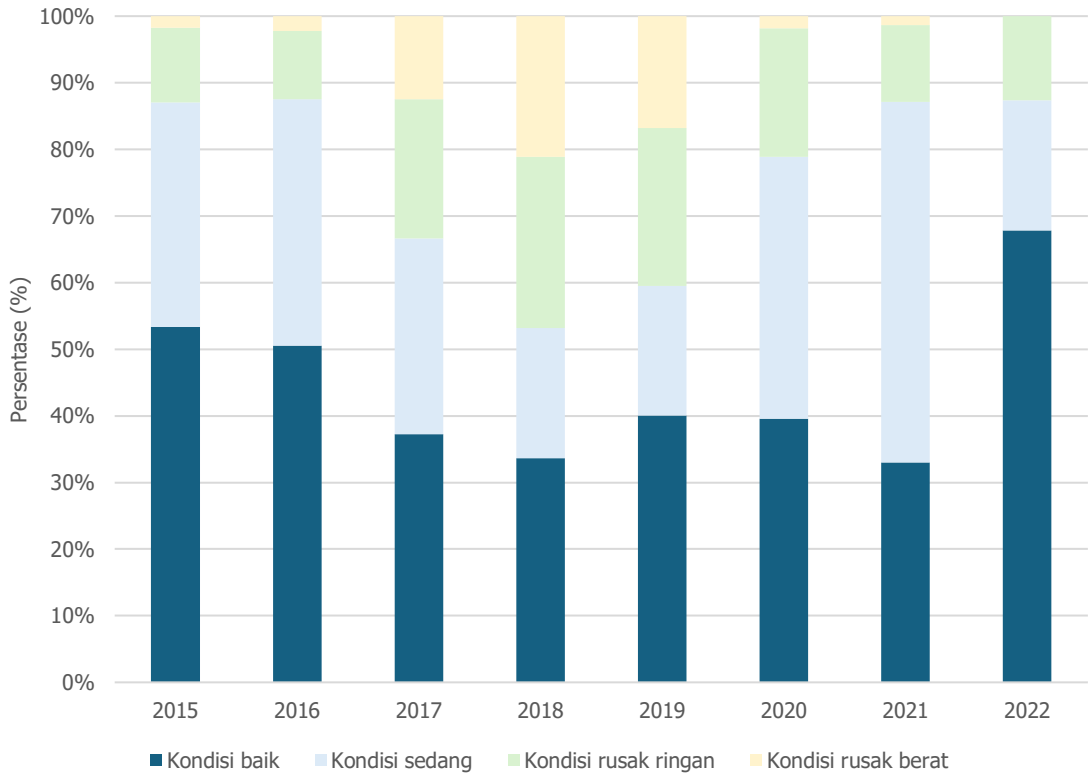

**Gambar 2.3.15 Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024**
Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

#### 2.3.6.1 Infrastruktur

Perencanaan pembangunan wilayah tidak lepas kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang layak, memadai, dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek mendasar dalam proses pembangunan. Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan memudahkan mobilitas penduduk dan logistik (pergerakan barang) yang mampu membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin baik kuantitas dan kualitas kondisi infrastruktur di wilayah tersebut maka potensi perkembangan wilayahnya semakin tinggi. Oleh karenanya, fokus fasilitas infrastruktur wilayah erat kaitannya dengan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, serta pertanahan dan aspek infrastruktur lainnya.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai fokus pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah pada urusan pekerjaan umum adalah aspek konektivitas, layanan air minum, dan pemenuhan layanan irigasi. Infrastruktur jalan merupakan syarat utama dalam peningkatan konektivitas, tetapi berdasarkan data yang tersedia, persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terhadap keseluruhan jalan (jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat) selama menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan jalan dengan kondisi baik meningkat pada tahun 2022.



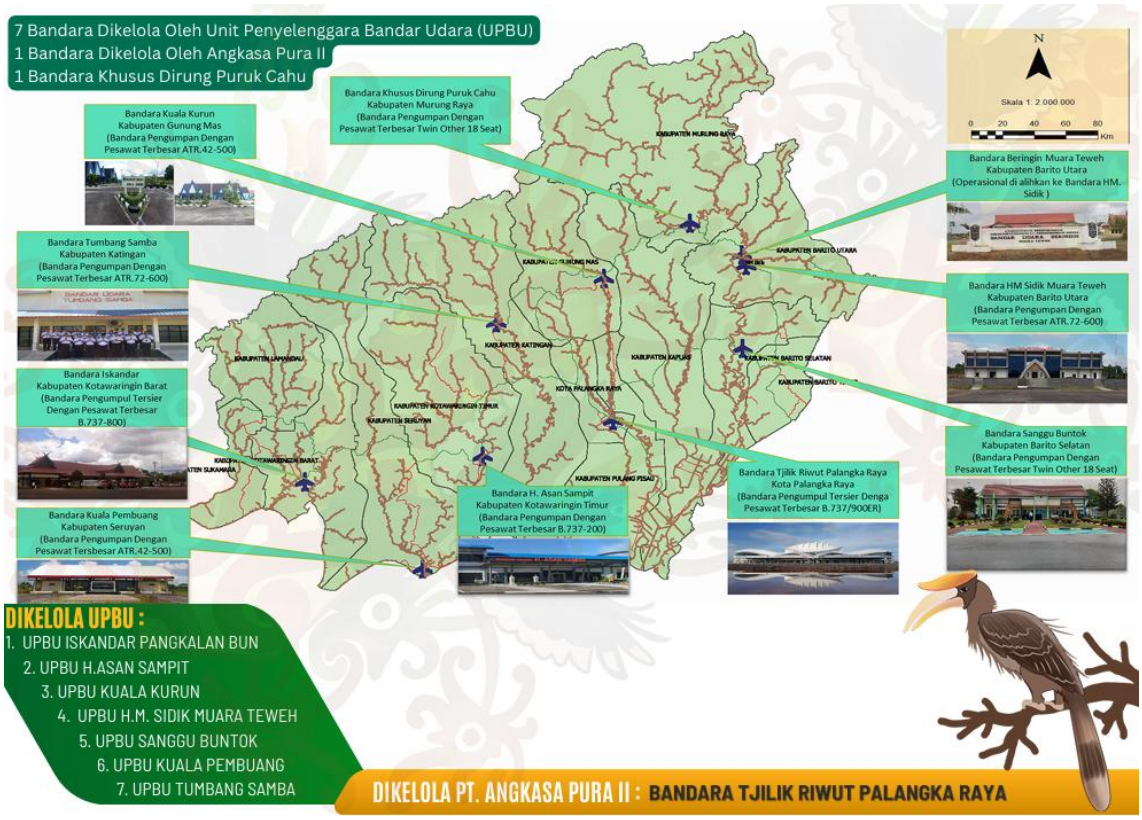

**Gambar 2.3.16 Kualitas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022**
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

Selain jalan, infrastruktur perhubungan udara juga memainkan peran strategis dalam memperkuat konektivitas Kalimantan Tengah, khususnya mengingat kondisi geografis dan sebaran penduduk yang luas dan terpencar. Provinsi ini memiliki 9 bandara aktif, terdiri atas:

1. Tujuh bandara dikelola oleh UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara), diantaranya Bandara Iskandar (Pangkalan Bun), Bandara H. Asan (Sampit), Bandara Kuala Kurun, Bandara H.M. Sidik (Muara Teweh), Bandara Sangguh (Buntok), Bandara Kuala Pembuang, dan Bandara Tumbang Samba.
2. Satu bandara dikelola oleh PT. Angkasa Pura II, yakni Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, sebagai bandara pengumpul tersier yang mampu melayani pesawat berbadan sedang (B737/900ER), serta menjadi pintu gerbang utama keluar masuknya mobilitas udara ke Kalimantan Tengah.

3. Satu bandara khusus, yakni Bandara Dirung di Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya) yang melayani pesawat jenis Twin Otter, mendukung mobilitas ke wilayah terpencil dan industri berbasis sumber daya alam.

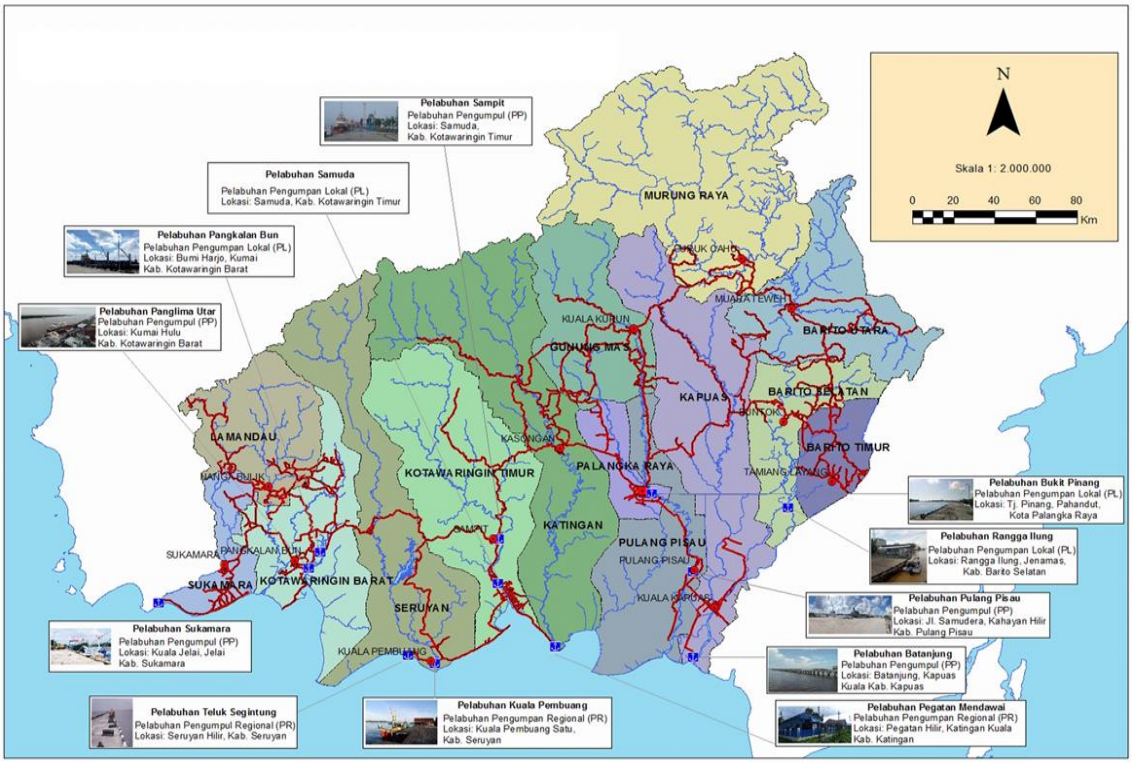
Kehadiran bandara ini memperkuat konektivitas antarwilayah kabupaten/kota, memudahkan distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau lewat jalur darat, sehingga mendukung pengembangan ekonomi, termasuk pariwisata, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.




**Gambar 2.3.17 Peta Sebaran Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah

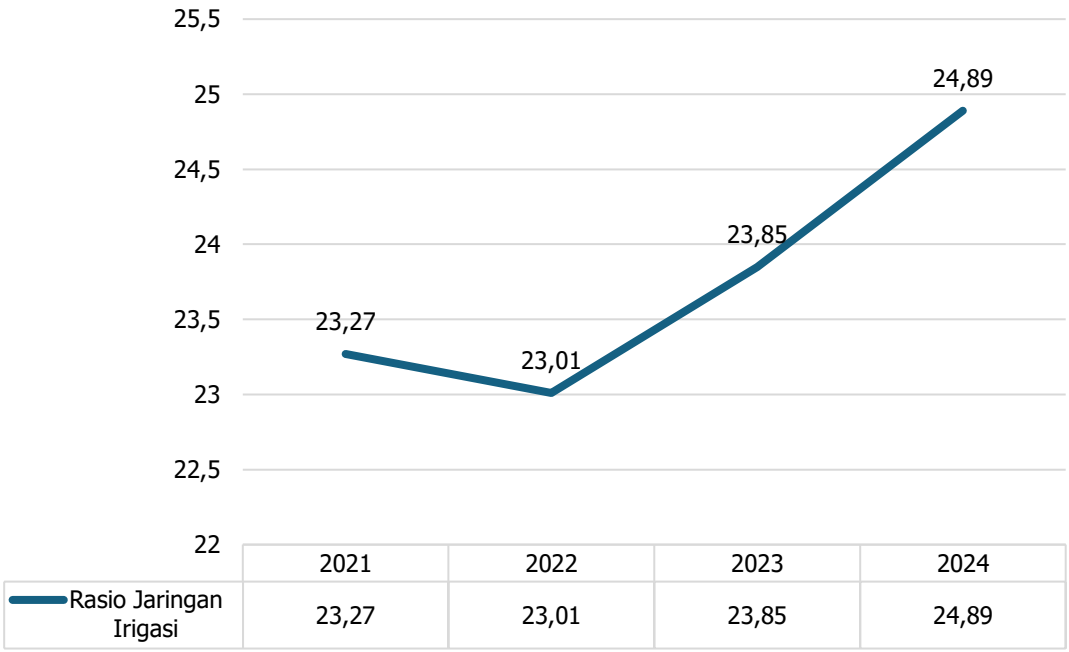
Disamping itu, infrastruktur pelabuhan juga menjadi tulang punggung sistem logistik di Kalimantan Tengah, terutama di wilayah dengan akses sungai dan laut. Berdasarkan tipologinya, terdapat beberapa pelabuhan yang berperan penting, antara lain:

1. Pelabuhan Pengumpan (PP) yang berfungsi sebagai simpul pengumpulan dan distribusi barang antardaerah. Terdapat 8 pelabuhan pengumpan di Kalimantan Tengah diantaranya adalah Pelabuhan PT Bina Cahaya Timur, Pelabuhan PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa, Pelabuhan Batanjung, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Pulang Pisau, Pelabuhan Teluk Segintung, dan Pelabuhan Sukamara.
2. Pelabuhan Regional (PR) yang berperan memperlancar distribusi barang skala provinsi dan antarprovinsi. Terdapat 2 pelabuhan regional di Kalimantan Tengah, yakni Pelabuhan Pegatan Mendawai dan Pelabuhan Kuala Pembuang.
3. Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) yang mendukung pergerakan logistik dalam skala lokal dan antar kecamatan, sangat vital di wilayah pedalaman yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai. Terdapat 5 pelabuhan pengumpan lokal, yaitu Pelabuhan Rangga Ilung, Pelabuhan PAngkalan Bun, Pelabuhan Samuda, Pelabuhan Kereng Bangkirai, dan Pelabuhan Kuala Jelay.
4. Pelabuhan *multipurpose* atau pelabuhan multifungsi dengan kapasitas bongkar muat barang dan potensi pengembangan sebagai simpul perdagangan regional yang berada di Pulang Pisau, yakni Pelabuhan Bahaur. Lokasinya yang strategis di pesisir selatan menjadikan pelabuhan ini sangat potensial dalam mendukung konektivitas laut, ekspor komoditas, serta integrasi logistik dari dan ke Kalimantan Tengah.




**Gambar 2.3.18 Peta Sebaran Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Disamping itu, juga terdapat indikator Rasion Jaringan Irigasi. Rasio jaringan irigasi merupakan indikator penting dalam mengukur proporsi luas lahan pertanian yang terlayani oleh sistem irigasi terhadap total luas lahan pertanian yang tersedia. Capaian ini mencerminkan tingkat ketersediaan dan pemerataan infrastruktur irigasi dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan produktivitas lahan. Selama periode 2021–2024, rasio jaringan irigasi di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2021, rasio tercatat sebesar 23,27%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 23,01% di tahun 2022. Penurunan ini bisa disebabkan oleh keterbatasan pembangunan infrastruktur baru, kerusakan jaringan eksisting, atau pergeseran penggunaan lahan pertanian.




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Rasio Jaringan Irigasi | 23,27 | 23,01 | 23,85 | 24,89 |

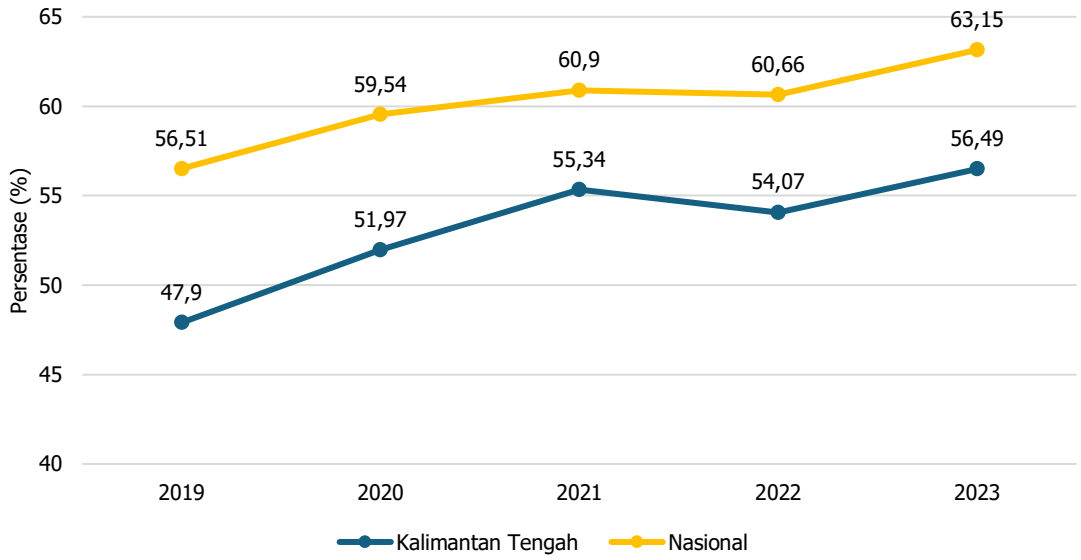
**Gambar 2.3.19 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021-2024**
Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Namun, mulai tahun 2023, rasio jaringan irigasi kembali meningkat signifikan menjadi 23,85%, dan mencapai 24,89% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya investasi dan program pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi yang mulai menunjukkan dampak positif terhadap pelayanan irigasi bagi lahan pertanian. Kenaikan rasio jaringan irigasi dalam dua tahun terakhir ini menjadi sinyal positif bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan daerah. Meskipun begitu, masih terdapat ruang untuk memperluas cakupan layanan irigasi, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi lahan pertanian namun belum terlayani jaringan irigasi secara optimal.

### 2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

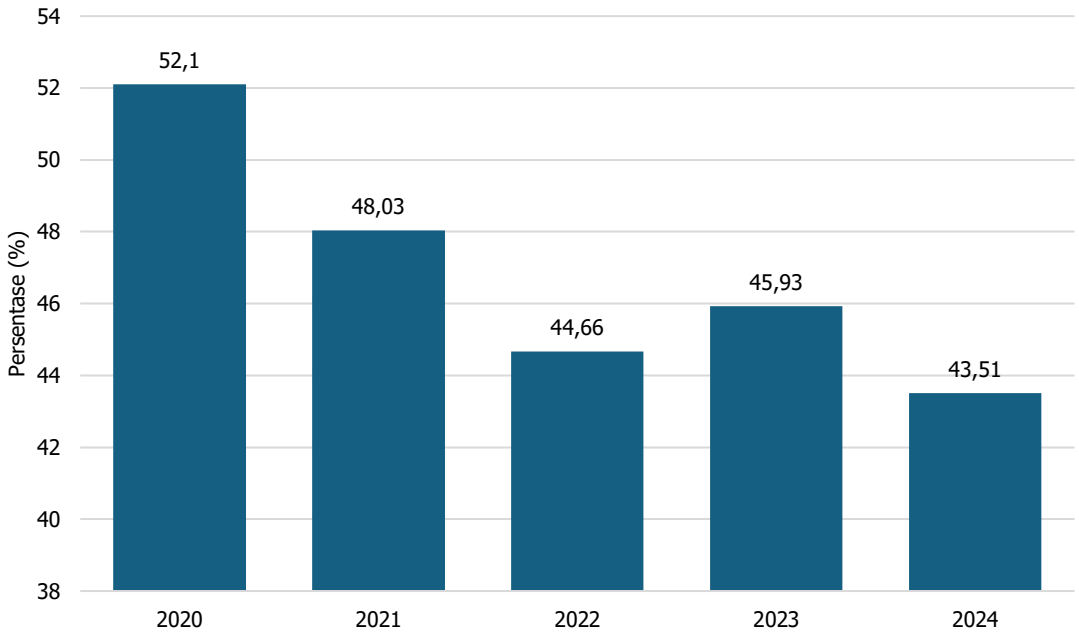
Berdasarkan data yang di olah dari BPS, Susenas tahun 2020, jumlah RLH di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 366.112 Unit (51,97%) yang mengindikasikan masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH). Data tersebut dihitung berdasarkan 4 indikator yakni ketahanan bangunan, luasan bangunan, akses air minum dan akses sanitasi. Persentase RLH ini didapat

berdasarkan rumus jumlah RLH dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Indonesia tahun 2023 sebesar 63,15%. Oleh karenanya capaian RLH di Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun terakhir (2019-2023) masih berada di bawah capaian nasional.




**Gambar 2.3.20 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**
Sumber: Badan Pusat Statistik (data tahun 2024 belum tersedia)

Berdasarkan data pada gambar di bawah ini, diketahui bahwa persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah cukup fluktuatif. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mencapai 325.892 unit (45,93%) pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 312.409 unit (44,66%). Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 43,51%. Secara keseluruhan jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019.

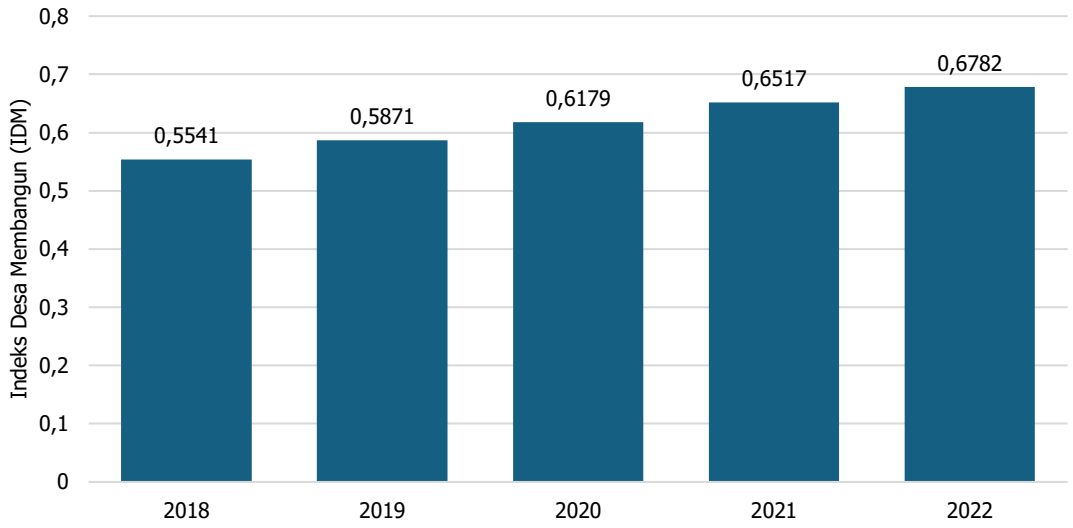



**Gambar 2.3.21 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Provinsi Kalimantan Tengah

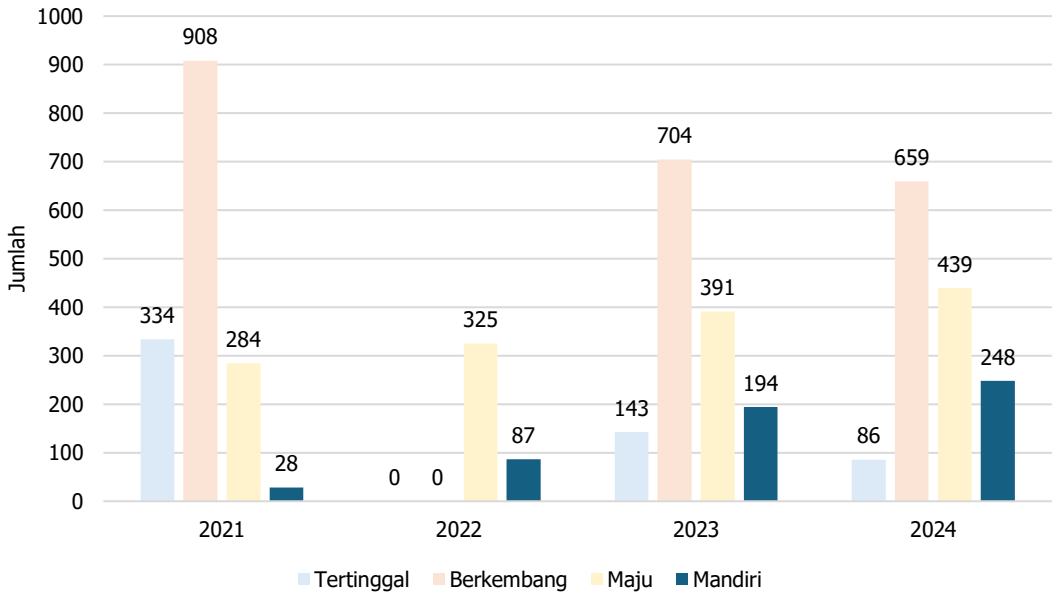
### 2.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

Dalam konteks pembangunan pedesaan, peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi salah satu indikator untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa. IDM sendiri merupakan indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi, yang mencerminkan keberlanjutan pembangunan desa dari berbagai aspek. Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik pertama, terlihat bahwa nilai IDM Kalimantan Tengah mengalami tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, nilai IDM tercatat sebesar 0,554 dan meningkat menjadi 0,678 pada tahun 2022. Ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam aspek-aspek pembangunan desa yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di Kalimantan Tengah.




**Gambar 2.3.22 Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022**
Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (data tahun 2024 belum tersedia)

Peningkatan nilai IDM tersebut juga sejalan dengan perubahan klasifikasi status desa yang ditunjukkan dalam grafik kedua. Pada tahun 2021, masih terdapat 334 desa yang tergolong tertinggal, sementara jumlah desa berkembang mendominasi sebanyak 908 desa. Kemudian, pada tahun 2022 masih terdapat 3 desa yang diklasifikasikan sebagai desa sangat tertinggal, dan mulai muncul kategori desa mandiri meskipun dalam jumlah yang masih terbatas (87 desa). Perkembangan ini berlanjut secara positif, di mana pada tahun 2023 tidak ada desa sangat tertinggal di Kalimantan Tengah, disamping itu pada tahun tersebut jumlah desa mandiri meningkat menjadi 194 desa, dan pada tahun 2024 desa mandiri terus meningkat mencapai 248 desa. Pada tahun yang sama, jumlah desa maju meningkat menjadi 439 desa, dan jumlah desa tertinggal semakin menurun menjadi hanya 86 desa.




**Gambar 2.3.23 Jumlah Desa berdasarkan Klasifikasi Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024**

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Beberapa faktor penghambat utama dalam mendorong kemandirian desa antara lain adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI). Di era transformasi digital, penguasaan teknologi menjadi elemen penting dalam tata kelola desa yang efisien dan transparan. Rendahnya literasi digital di tingkat desa menyebabkan banyak potensi pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk dalam pengelolaan data, perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi, serta pelayanan publik digital. Selain itu, keterbatasan ketersediaan tenaga kesehatan, termasuk dokter dan tenaga medis lainnya, juga menjadi persoalan yang cukup krusial. Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai merupakan salah satu indikator dalam Indeks Ketahanan Sosial, yang menjadi komponen penting dalam perhitungan IDM. Minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat desa, yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan manusia dan pencapaian indikator kesehatan dasar.

### 2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

#### 2.3.7.1 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pergerakan harga barang dan jasa secara umum yang menunjukkan penurunan atau kenaikan pada periode tertentu. Indikator inflasi menandakan ketercapaian pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Saat ini, terdapat empat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur laju inflasinya dengan basis indeks harga konsumen. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, dan Kota Palangkaraya. Pada periode 2020 hingga Februari 2025, laju inflasi mengalami fluktuasi dengan angka tertingginya mencapai kisaran 8% di pertengahan tahun 2022. Kenaikan drastis ini salah satunya disebabkan oleh masa pemulihan ekonomi ketika masyarakat mulai membelanjakan uangnya untuk membeli barang dan jasa. Pasca 2022, laju inflasi mengalami tren penurunan Secara umum, laju inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Tengah (*year-on-year*) periode 2020 hingga Februari 2025 terlihat sebagai berikut:




**Gambar 2.3.24 Laju Inflasi Bulanan Provinsi Kalimantan Tengah Januari 2020 hingga Februari 2025**
Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.3.7.2 Ekonomi Regional Daerah

Salah satu cara untuk melihat daya saing ekonomi daerah adalah mengidentifikasi sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor unggulan tersebut didasarkan atas nilai nominal lapangan usaha dalam PDRB yang dianalisis dengan empat pendekatan, yaitu Static Location Quotient (SLQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Analisis Input-Output, dan Analisis Interregional Input-Output. Hasil analisis dengan pendekatan SLQ dan DLQ terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2.3.8 Tabel Perhitungan Koefisien Static Location Quotient Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2023**

| Sektor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.59 | 1.67 | 1.65 | 1.72 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 1.39 | 1.14 | 1.33 | 1.20 |
| C. Industri Pengolahan | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.83 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1.37 | 1.41 | 1.42 | 1.45 |
| F. Konstruksi | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.02 | 0.96 | 0.92 | 0.97 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1.59 | 1.56 | 1.30 | 1.20 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| L. Real Estate | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.82 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.79 | 1.73 | 1.76 | 1.91 |
| P. Jasa Pendidikan | 1.44 | 1.47 | 1.53 | 1.68 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 1.96 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |

Salah satu pelengkap dari analisis struktur perekonomian adalah analisis Input-Output (IO) dan Interregional Input-Output (IRIO). Hasil analisis IO dan IRIO ini menunjukkan nilai pengganda perekonomian dan menunjukkan sektor lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah yang patut menjadi prioritas pengembangannya. Analisis IO dan IRIO Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan basis dari tabel IO dan IRIO yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016. Tabel IO dan IRIO tersebut lalu dilakukan *updating* dengan menggunakan data PDRB sektor lapangan usaha pada tahun 2022. Hasil analisis IO dan IRIO tersebut terlihat sebagaimana berikut.

**Tabel 2.3.9 Tabel Angka Pengganda Hasil Updating Tabel Input-Output Tahun 2022 dengan Metode RAS**

| No | Lapangan Usaha | Angka Pengganda Output | | Pergeseran Efek Pengganda |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2022 | |
| 1 | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,217 | 1,214 | -0,003 |
| 2 | B. Pertambangan dan Penggalian | 1,137 | 1,363 | 0,225 |
| 3 | C. Industri Pengolahan | 2,123 | 1,713 | -0,410 |
| 4 | D. Pengadaan Listrik dan Gas | 1,044 | 2,109 | 1,064 |
| 5 | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,004 | 1,355 | 0,351 |
| 6 | F. Konstruksi | 1,253 | 1,464 | 0,210 |
| 7 | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,097 | 1,241 | 0,144 |
| 8 | H. Transportasi dan Pergudangan | 1,212 | 1,405 | 0,193 |
| 9 | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,129 | 1,734 | 0,604 |
| 10 | J. Informasi dan Komunikasi | 1,017 | 1,288 | 0,271 |
| 11 | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,011 | 1,131 | 0,120 |
| 12 | L. Real Estate | 1,026 | 1,234 | 0,207 |
| 13 | M,N. Jasa Perusahaan | 1,009 | 1,286 | 0,277 |
| 14 | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,083 | 1,420 | 0,33 |
| 15 | P. Jasa Pendidikan | 1,028 | 1,240 | 0,212 |
| 16 | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,019 | 1,463 | 0,444 |
| 17 | R,S,T,U. Jasa lainnya | 1,020 | 1,336 | 0,316 |

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Kajian *Sustainable Economic Development* Provinsi Kalimantan Tengah - Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi,

Tabel Input-Output tersebut menunjukkan seberapa besar efek pengganda dari suatu lapangan usaha terhadap struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 dan 2022. Pada awalnya pada tahun 2016, sektor yang paling besar memberikan efek pengganda tertinggi adalah sektor A (pertanian, kehutanan, dan perikanan), sektor C (industri pengolahan), dan sektor F (konstruksi). Namun demikian, terjadi pergeseran sektor dengan efek pengganda tertinggi, kecuali sektor industri pengolahan. Pada tahun 2022, sektor yang paling besar memberikan efek pengganda tertinggi adalah sektor C (industri pengolahan), sektor D (pengadaan listrik dan gas), dan sektor I (penyediaan akomodasi dan makan minum). Walaupun sektor industri pengolahan masih memberikan efek pengganda tertinggi, terjadi penurunan efek pengganda sektor industri pengolahan relatif pada tahun 2016. Di sisi lain, sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan kenaikan efek pengganda tertinggi diantara sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 relatif pada tahun 2016. Ini menjadi indikasi ke depan bahwa sektor-sektor baru yang bergeser, yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.3.10 Tabel Angka Pengganda Output Provinsi di Indonesia berdasarkan Hasil Updating Tabel IRIO 2016 dengan Metode IPFP**

| No | Provinsi | Angka Pengganda Output | | Pergeseran Efek Pengganda |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2022 | |
| 1 | ACEH | 1,493 | 1,864 | 0,370 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 2,224 | 2,136 | -0,089 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 1,514 | 1,980 | 0,466 |
| 4 | RIAU | 1,800 | 2,133 | 0,333 |
| 5 | JAMBI | 1,524 | 2,309 | 0,785 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 1,879 | 2,654 | 0,776 |
| 7 | BENGKULU | 1,373 | 1,856 | 0,482 |
| 8 | LAMPUNG | 1,615 | 2,015 | 0,400 |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 1,452 | 1,910 | 0,458 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 1,337 | 1,425 | 0,088 |

| No | Provinsi | Angka Pengganda Output | | Pergeseran Efek Pengganda |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2022 | |
| **11** | DKI JAKARTA | 2,541 | 1,982 | -0,559 |
| **12** | JAWA BARAT | 2,597 | 2,124 | -0,473 |
| **13** | JAWA TENGAH | 2,036 | 2,061 | 0,025 |
| **14** | YOGYAKARTA | 1,454 | 1,911 | 0,456 |
| **15** | JAWA TIMUR | 2,710 | 2,102 | -0,609 |
| **16** | BANTEN | 1,746 | 2,049 | 0,303 |
| **17** | BALI | 1,528 | 1,620 | 0,091 |
| **18** | NUSA TENGGARA BARAT | 1,449 | 1,612 | 0,163 |
| **19** | NUSA TENGGARA TIMUR | 1,377 | 1,629 | 0,252 |
| **20** | KALIMANTAN BARAT | 1,555 | 2,006 | 0,451 |
| **21** | KALIMANTAN TENGAH | 1,594 | 2,449 | 0,855 |
| **22** | KALIMANTAN SELATAN | 1,536 | 1,729 | 0,193 |
| **23** | KALIMANTAN TIMUR | 1,845 | 2,181 | 0,336 |
| **24** | KALIMANTAN UTARA | 1,355 | 2,135 | 0,780 |
| **25** | SULAWESI UTARA | 1,521 | 2,068 | 0,547 |
| **26** | SULAWESI TENGAH | 1,469 | 3,256 | 1,787 |
| **27** | SULAWESI SELATAN | 1,735 | 2,100 | 0,365 |
| **28** | SULAWESI TENGGARA | 1,345 | 1,891 | 0,547 |
| **29** | GORONTALO | 1,408 | 1,722 | 0,314 |
| **30** | SULAWESI BARAT | 1,381 | 1,739 | 0,357 |
| **31** | MALUKU | 1,289 | 1,725 | 0,436 |
| **32** | MALUKU UTARA | 1,318 | 2,988 | 1,670 |
| **33** | PAPUA BARAT | 1,526 | 2,041 | 0,516 |
| **34** | PAPUA | 1,430 | 1,761 | 0,331 |

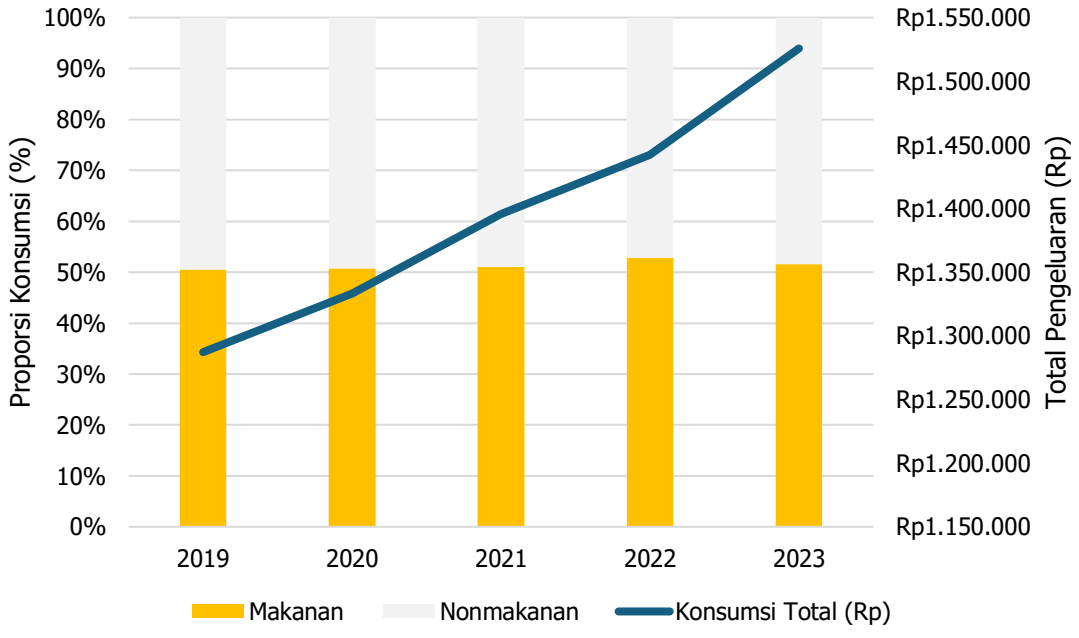
Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Kajian *Sustainable Economic Development* Provinsi Kalimantan Tengah - Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

Satu hal yang menarik dari hasil updating tabel IRIO menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki angka pengganda terbesar ketiga di Indonesia di bawah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara. Provinsi Kalimantan Tengah tersebut relatif tidak memiliki big push besar seperti hilirisasi nikel yang terjadi di kedua provinsi tersebut. Hasil analisis yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa tingginya angka pengganda ini diakibatkan adanya disintegrasi antarsektoral di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan kata lain, pelaku usaha di dalam perekonomian lebih banyak mengambil bahan baku dari luar daerah, mengolahnya di Provinsi Kalimantan Tengah, dan menjualnya ke pasar di luar Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun

demikian, tingginya angka pengganda ini dapat menjadi potensi besar bagi Provinsi Kalimantan Tengah untuk berkembang secara perekonomian.

### 2.3.7.3 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran konsumsi per kapita dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah tangga secara rata-rata di Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan konsumsi barang dan jasa. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, hal ini dapat merepresentasikan kesejahteraan rumah tangga yang semakin meningkat. Secara umum, pengeluaran konsumsi per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai total pengeluaran pada tahun 2023 mencapai Rp1.525.785 per bulan per kapita. Angka ini relatif meningkat dibandingkan tahun 2019. Secara proporsi, pengeluaran makanan dan nonmakanan relatif mirip walaupun pengeluaran makanan masih relatif lebih banyak. Terjadi peningkatan tipis proporsi pengeluaran makanan pada tahun 2022 sebagai efek dari adanya inflasi harga pangan pada saat itu.



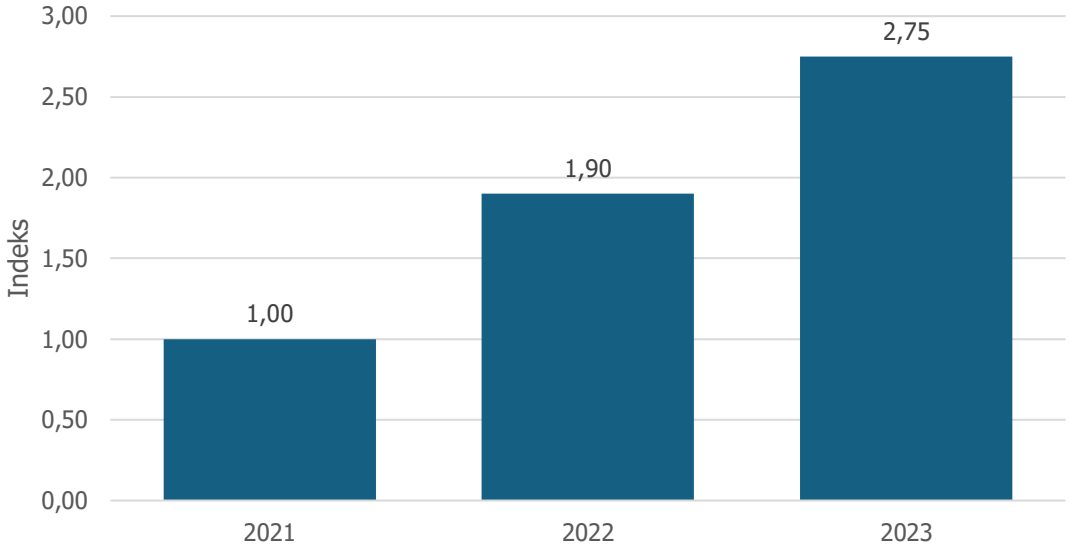

**Gambar 2.3.25 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Untuk Makanan dan Nonmakanan di**
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023**
Sumber: Badan Pusat Statistik (data tahun 2024 belum tersedia)

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah. Tata kelola yang adaptif dan berintegritas menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global, kompleksitas kebijakan nasional, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas tata kelola digital dan pelayanan birokrasi adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan grafik yang ditampilkan, Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dalam capaian Indeks SPBE selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, indeks SPBE masih berada pada angka 1,00 (Kurang). Kemudian meningkat menjadi 1,90 (Cukup) pada tahun 2022, dan melonjak hingga mencapai 2,75 (Baik) pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam integrasi layanan publik digital, efektivitas pengambilan keputusan berbasis data, serta transparansi administrasi publik.

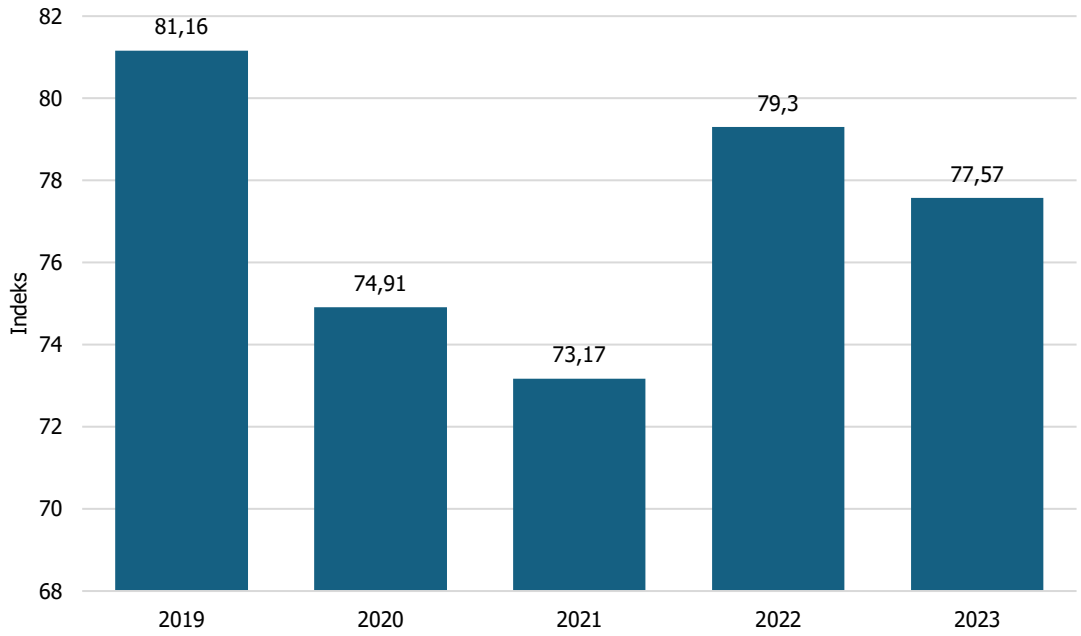



**Gambar 2.4.1 Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2023**
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (data tahun 2024 belum tersedia)

### 2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial

#### 2.4.2.1 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Pada tahun 2021 juga terjadi perubahan komponen penyusunan pada Indeks Demokrasi Indonesia. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, tetapi pada tahun berikutnya terjadi penurunan nilai indeks. Hal ini menunjukkan belum stabilnya nilai demokrasi di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 6 tahun terakhir, tetapi secara garis besar sudah menunjukkan nilai yang baik dengan nilai capaian konsisten di atas nilai 70.

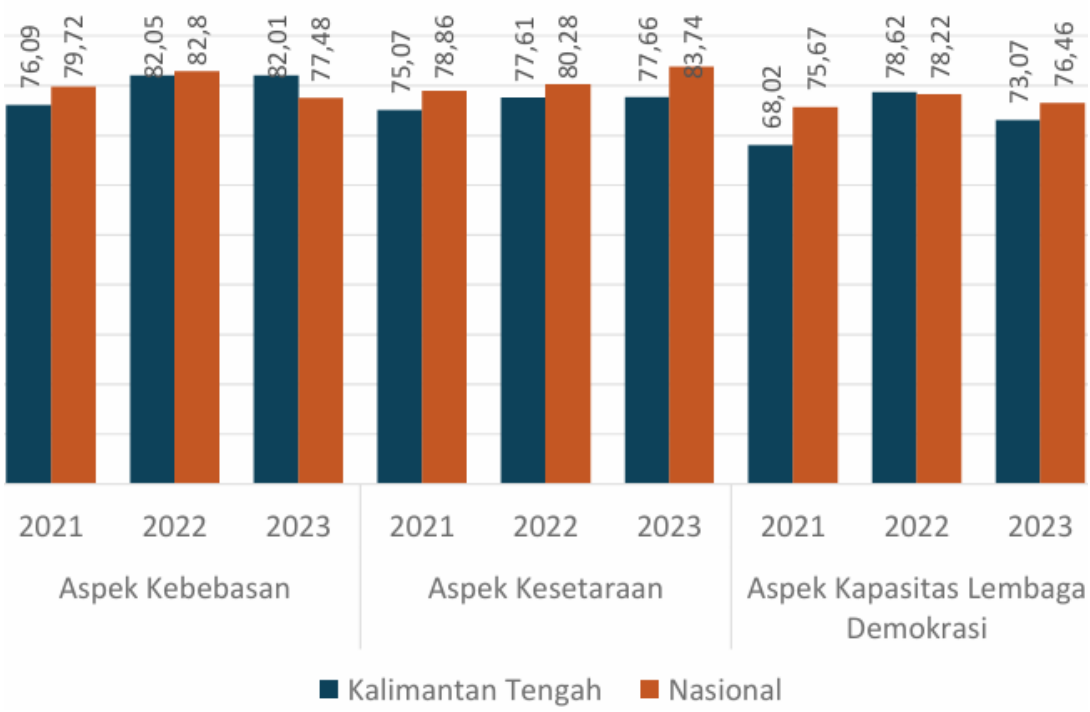



**Gambar 2.4.2 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data tahun 2024 belum tersedia)

Nilai aspek kebebasan Kalimantan Tengah meningkat dari 76,09 pada 2021 menjadi 82,05 pada 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 82,01 pada 2023. Meskipun mengalami sedikit penurunan, nilai ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan mendekati rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan penguatan hak-hak sipil seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat masih relatif terjaga. Sementara itu, pada aspek kesetaraan Kalimantan Tengah memperlihatkan konsistensi yang cukup baik, dengan nilai 75,07 (2021), meningkat menjadi 77,61 (2022), dan sedikit naik lagi menjadi 77,66 (2023). Meskipun sedikit di bawah rata-rata nasional, capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menjamin kesetaraan akses politik bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi menjadi perhatian khusus karena nilainya sempat rendah pada 2021 (68,02), tetapi mengalami peningkatan tajam ke 78,62 (2022) dan sedikit menurun menjadi 73,07 (2023). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penguatan lembaga-lembaga demokrasi lokal seperti

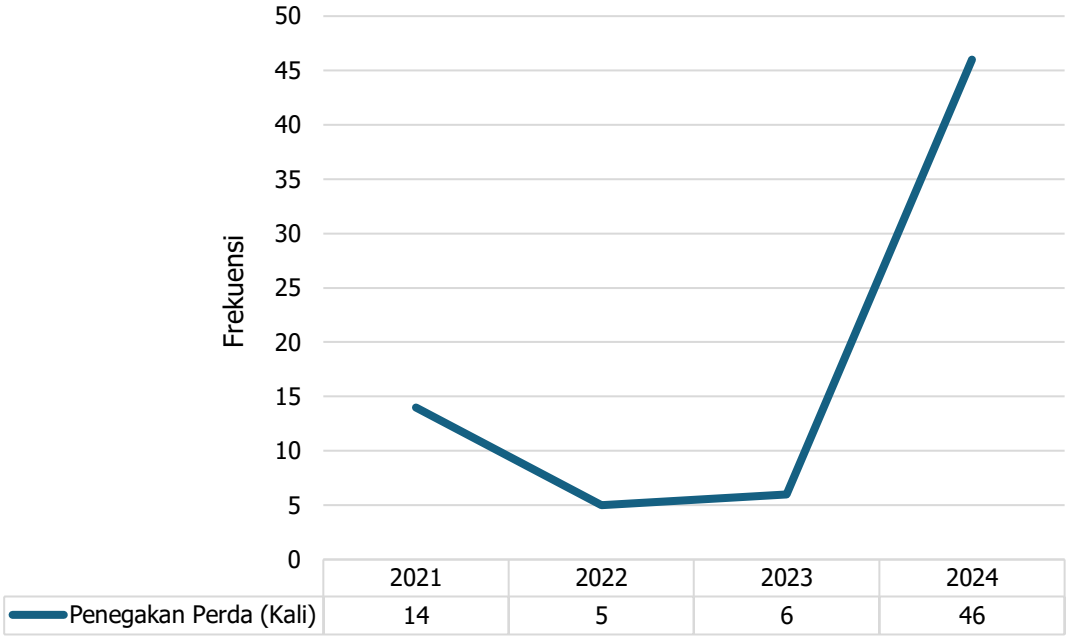
DPRD, KPU, dan Bawaslu, namun tantangan dalam hal efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga masih ada.




**Gambar 2.4.3 Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2021-2023**
Sumber: Badan Pusat Statistik (data tahun 2024 belum tersedia)

### 2.4.2.2 Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan regulasi di tingkat daerah, serta mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Capaian penegakan Perda di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 14 kali kegiatan penegakan Perda dilakukan. Namun, capaian ini menurun drastis di tahun 2022 menjadi hanya 5 kali, dan hanya sedikit meningkat di tahun 2023 menjadi 6 kali. Rendahnya angka penegakan Perda dalam dua tahun berturut-turut tersebut dapat mencerminkan adanya hambatan kelembagaan, terbatasnya sumber daya aparatur, atau kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.




**Gambar 2.4.4 Frekuensi Penegakan Perda**
**Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026**

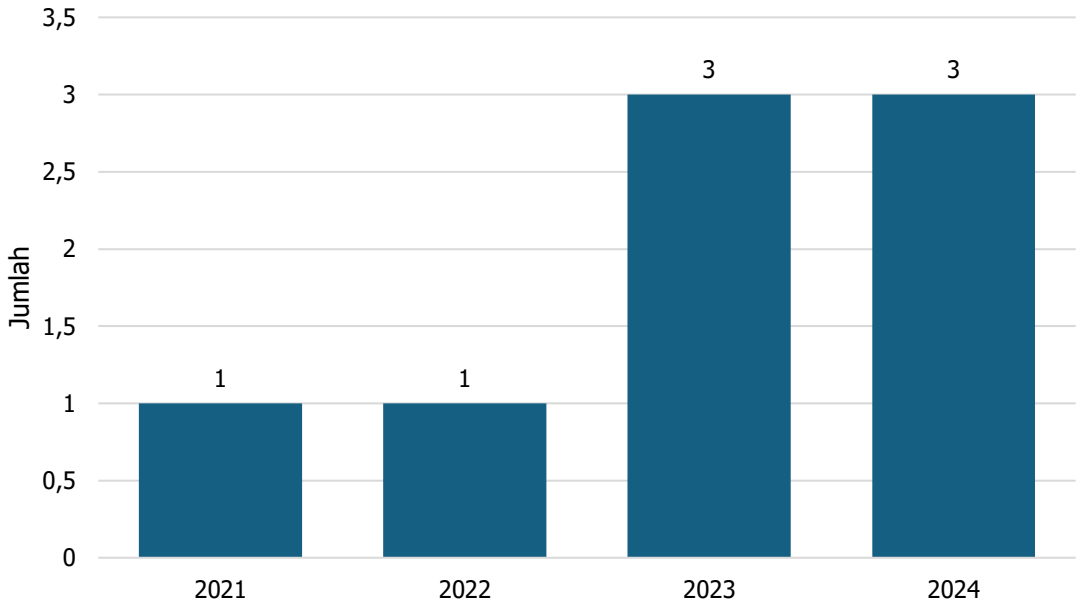
Secara mencolok, pada tahun 2024 terjadi lonjakan tajam dengan jumlah penegakan Perda mencapai 46 kali. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan peran aparat penegak Perda, baik melalui peningkatan kapasitas, intensifikasi pengawasan, maupun adanya komitmen yang lebih tinggi dari pemerintah daerah untuk menegakkan aturan yang berlaku. Hal ini juga dapat mencerminkan respons terhadap meningkatnya pelanggaran Perda atau evaluasi terhadap lemahnya penegakan di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tajam di tahun 2024 ini diharapkan menjadi momentum untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam penegakan hukum daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib dan berkeadilan.

### 2.4.2.3 Capaian Aksi HAM

Pelaporan pelaksanaan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Salah satu indikator yang

digunakan untuk mengukur komitmen tersebut adalah jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan setiap tahun.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalteng 2021-2026, pada tahun 2021 dan 2022, jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan aksi HAM di Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing tercatat hanya 1 dokumen. Capaian yang masih rendah ini menunjukkan bahwa pelaporan aksi HAM belum menjadi perhatian prioritas di tingkat daerah atau terkendala oleh aspek koordinasi, ketersediaan data, maupun kapasitas pelaksana.




**Gambar 2.4.5 Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Kalimantan Tengah**
**Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Kalteng 2021-2026**

Namun, terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, di mana jumlah dokumen pelaporan meningkat menjadi 3 dokumen per tahun. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam sistem pelaporan dan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah dalam menjalankan rencana aksi HAM secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Konsistensi capaian tahun 2023 dan 2024 juga menunjukkan adanya kesadaran yang lebih kuat untuk melaporkan implementasi aksi HAM secara akuntabel. Meski capaian ini telah menunjukkan

tren positif, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas isi pelaporan, agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menggambarkan hasil nyata di lapangan terkait pemajuan HAM, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

#### 2.4.2.4 Proporsi Penduduk Merasa Berjalan Aman di Lingkungan Tempat Tinggalnya

Nilai Proporsi Penduduk Merasa Berjalan Aman di Lingkungan Tempat Tinggalnya cenderung menurun dari tahun 2014 ke tahun 2020. Di sisi lain, kekondusifan dan keamanan Provinsi Kalimantan Tengah berada di peringkat enam sebagai provinsi teraman menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022. Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di Provinsi Kalimantan Tengah relatif rendah yakni sekitar 0,38%.

**Tabel 2.4.1 Proporsi Penduduk Merasa Berjalan Aman di Lingkungan Tempat Tinggalnya Tahun 2014-2020**

| Tahun | 2014 | 2017 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nilai | 75,07 | 46,04 | 69,59 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (data tahun 2024 belum tersedia)

Berbeda dengan itu, berdasarkan data yang tersedia, jumlah demo di Kalimantan Tengah meningkat di tahun 2022. Perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan daerah sehingga aktivitas perekonomian dapat berdampak pada pertumbuhan investasi. Pertumbuhan investasi ini akan mendorong kestabilan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

### 2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Pembangunan ketahanan wilayah tidak hanya bertumpu pada aspek pertahanan fisik, tetapi juga ditopang oleh kemampuan diplomasi daerah dan daya saing ekonomi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat posisi Kalimantan Tengah di tingkat nasional maupun kawasan. Salah satu indikator yang

mencerminkan hal tersebut adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang mengukur berbagai pilar fundamental yang menunjang kemajuan dan daya saing suatu wilayah. IDSD berperan penting dalam menilai kapasitas Kalimantan Tengah dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membangun ketangguhan wilayah melalui pendekatan *soft power* berbasis daya saing regional. Indeks Daya Saing Daerah di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari 3,13 di tahun 2022 menjadi 3,27 di tahun 2023. Meskipun begitu, ada 3 pilar yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Adapun ketiga pilar tersebut adalah pilar 2 (Infrastruktur), pilar 7 (Pasar Produk), dan Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi). Peningkatan infrastruktur menjadi dasar yang penting untuk meningkatkan daya saing guna menarik investasi masuk ke Kalimantan Tengah. Adapun nilai lengkap dari masing-masing pilar IDSD dalam dua tahun terakhir dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.2 Capaian IDSD Provinsi Kalimantan Tengah 2022 dan 2023**

| Penilaian | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Pilar 1 | 4,23 | 4,4 |
| Pilar 2 | 2,89 | 2,51 |
| Pilar 3 | 3,47 | 3,43 |
| Pilar 4 | 2,88 | 3,87 |
| Pilar 5 | 3,75 | 3,75 |
| Pilar 6 | 3,68 | 3,78 |
| Pilar 7 | 2,23 | 1,82 |
| Pilar 8 | 3,89 | 4,05 |
| Pilar 9 | 3,8 | 2,64 |
| Pilar 10 | 0,33 | 4,24 |
| Pilar 11 | 5 | 2,88 |
| Pilar 12 | 1,44 | 1,89 |
| **IDSD Kalimantan Tengah** | 3,13 | 3,27 |
| **IDSD Nasional** | 3,26 | 3,44 |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (data tahun 2024 belum tersedia)

### 2.4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode lalu menunjukkan pencapaian-pencapaian yang telah dilalui oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembangunan. Capaian ini mencakup berbagai bidang, dari aspek sosial budaya, ekonomi, hingga pemerintahan dan lingkungan hidup. Capaian-

capaian ini merupakan akumulasi dari IKK yang diampu oleh pemerintah daerah beserta dengan perangkat daerah. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang didapatkan dari dokumen evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

## Tabel 2.4.3 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | | *9* | *10* | *11* | | *12* | *13* |
| **A.** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **Pendapatan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah | % | 100 | 100 | 105,35 | 105,35 | melampaui | 100 | 103,55 | 103,55 | melampaui | 100 | 102,02 | 102,02 | melampaui |
| 1.2 | Rasio kemandirian keuangan daerah | % | 36 | 40 | 81,91 | 204,78 | melampaui | 42,3 | 60,84 | 143,83 | melampaui | 44,2 | 51,63 | 116,81 | melampaui |
| 1.3 | Indeks kepuasan pelayanan | % | 85 | 90 | 1,196 | 1,33 | belum tercapai | 91,2 | 86,04 | 94,34 | belum tercapai | 93,1 | 86,89 | 93,33 | belum tercapai |
| **II.** | **Kesejahteraan Sosial** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,5 | 14,5 | 12,75 | 87,93 | belum tercapai | 14,6 | 12,76 | 87,40 | belum tercapai | 14,7 | 12,77 | 86,87 | belum tercapai |
| 2.2 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9 | 9,5 | 8,65 | 91,05 | belum tercapai | 10 | 8,73 | 87,30 | belum tercapai | 10,5 | 8,81 | 83,90 | belum tercapai |
| 2.3 | Angka Melek Huruf | % | 99,8 | 99,8 | 99,12 | 99,32 | belum tercapai | 99,82 | 99,03 | 99,21 | belum tercapai | 99,84 | 98,83 | 98,99 | belum tercapai |
| **3** | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Umur Harapan Hidup | Tahun | 69,84 | 69,84 | 70,04 | 100,29 | melampaui | 70,19 | 73,54 | 104,77 | melampaui | 70,44 | 73,54 | 104,40 | melampaui |
| 3.2 | Persentase Balita Wasting | % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 7,5 | 5,5 | 26,67 | belum tercapai | 7,3 | 5,1 | 30,14 | belum tercapai |
| 3.3 | Persentase Balita Stunting | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 18,4 | 12,1 | 34,24 | belum tercapai | 16 | 10,7 | 33,13 | belum tercapai |
| 3.4 | Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup | Indeks | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 6,9 | 6 | 13,04 | belum tercapai | 6,7 | 7 | -4,48 | tidak tercapai |
| 3.5 | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | Indeks | 137 | 137 | 137 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 131 | 211 | -61,07 | tidak tercapai | 128 | 96 | 25,00 | belum tercapai |
| **4** | **Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 4.1 | Rasio Penduduk yang Bekerja (%) | % | 95,75 | 95,75 | 95,74 | 99,99 | | 96 | 95,9 | 99,90 | belum tercapai | 96,1 | 95,99 | 99,89 | belum tercapai |
| **5** | **Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Jumlah Tempat Ibadah yang Dikelola | Unit | 190 | 200 | 200 | 100,00 | tercapai | 210 | 210 | 100,00 | tercapai | 220 | 205 | 93,18 | belum tercapai |
| 5.2 | Jumlah Kelembagaan Spiritual yang Dibina | Unit | 75 | 80 | 80 | 100,00 | tercapai | 85 | 85 | 100,00 | tercapai | 90 | 33 | 36,67 | belum tercapai |
| 5.3 | Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat | Dokumen | 11 | 11 | 11 | 100,00 | tercapai | 12 | 12 | 100,00 | tercapai | 13 | 3 | 23,08 | belum tercapai |
| **III** | **Seni Budaya dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (grup) | Grup | 360 | 360 | 492 | 136,67 | melampaui | 380 | 492 | 129,47 | melampaui | 400 | 492 | 123,00 | melampaui |
| 1.2 | Jumlah pemanfaatan gedung (kali) | Kali | 15 | 30 | 75 | 250,00 | melampaui | 35 | 75 | 214,29 | melampaui | 40 | 69 | 172,50 | melampaui |
| **2** | **Pemuda Dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Klub olahraga (buah) | Buah | 136 | 140 | 140 | 100,00 | tercapai | 145 | 136 | 93,79 | belum tercapai | 150 | 136 | 90,67 | belum tercapai |
| 2.2 | Jumlah gedung olahraga (unit) | Unit | 3 | 3 | 3 | 100,00 | tercapai | 4 | 4 | 100,00 | tercapai | 5 | 4 | 80,00 | belum tercapai |
| **I.** | **Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Pendidikan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Prosentase Guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berkualifikasi minimal S1/D4 | % | 96,33 | 97 | 99,43 | 102,51 | melampaui | 99 | 99,71 | 100,72 | melampaui | 100 | 96,82 | 96,82 | belum tercapai |
| 1.1.2 | Prosentase Guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang bersertifikasi | % | 42,46 | 55,33 | 71,15 | 128,59 | melampaui | 66,5 | 71,23 | 107,11 | melampaui | 77,67 | 62,37 | 80,30 | belum tercapai |
| 1.1.3 | Persentase SMA | % | 52,55 | 62,04 | 43,21 | 69,65 | belum tercapai | 72,13 | 69,39 | 96,20 | belum | 81,3 | 69,60 | 85,61 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | berakreditasi minimal B (%) | | | | | | | | | | tercapai | | | | |
| 1.1.4 | Persentase SMK Berakreditasi minimal B (%) | % | 52,55 | 62,04 | 43,57 | 70,23 | belum tercapai | 73,7 | 61,15 | 82,97 | belum tercapai | 81,4 | 61,43 | 75,47 | belum tercapai |
| 1.1.5 | Angka Partisipasi Murni SMA/SMK | % | 67,17 | 67,67 | 70,82 | 104,65 | melampaui | 68,17 | 70,36 | 103,21 | melampaui | 68,67 | 70,61 | 102,83 | melampaui |
| 1.1.6 | Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK | % | 84,4 | 84,4 | 87,1 | 103,20 | melampaui | 85,5 | 88,28 | 103,25 | melampaui | 86,2 | 83,51 | 96,88 | belum tercapai |
| 1.1.7 | Angka Putus Sekolah SMA/SMK | % | 0,6 | 0,6 | 5,04 | 840,00 | melampaui | 0,58 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 0,55 | 0,212 | 38,55 | belum tercapai |
| 1.1.8 | Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK | % | 87,84 | 89,25 | 87,84 | 98,42 | belum tercapai | 90,42 | 66,32 | 73,35 | belum tercapai | 92,75 | 68,33 | 73,67 | belum tercapai |
| 1.1.9 | Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkatagori Mahir (%) | % | 48 | 49 | 47,78 % | 0,98 | belum tercapai | 49,5 | 24,54 | 49,58 | belum tercapai | 50 | 48,56 | 97,12 | belum tercapai |
| 1.1.10 | Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkatagori Minimal Dasar (%) | % | 0,75 | 80 | 83,36 % | 1,04 | belum tercapai | 85 | 47,52 | 55,91 | belum tercapai | 90 | 84,59 | 93,99 | belum tercapai |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi | | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 81,46 | 81,46 | belum tercapai | 100 | 65,78 | 65,78 | belum tercapai |
| 2.2 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 65,57 | 65,57 | belum tercapai | 100 | 70,05 | 70,05 | belum tercapai |
| 2.3 | Insidensi HIV (per 1000 pddk yg tdk terinfeksi | per 1000 | 0,156 | 0,152 | 0,11 | 27,63 | belum tercapai | 0,148 | 0,24 | -62,16 | tidak tercapai | 0,144 | 0,14 | 2,78 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | HIV) | pddk yg tdk terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Insidensi TB (per 100.000 penduduk) | per 100.000 penduduk | 58,17 | 54,62 | 23,8 | 56,43 | belum tercapai | 51,1 | 51 | 0,20 | belum tercapai | 47,5 | 53,5 | -12,63 | tidak tercapai |
| 2.5 | Eliminasi malaria (kab/kota) | | 11 | 11 | 12 | -9,09 | tidak tercapai | 12 | 12 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 13 | 12 | 7,69 | belum tercapai |
| 2.6 | Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk Per 1000 pddk | Rasio | 0,99 | 1,04 | 1,19 | 114,42 | melampaui | 1,09 | 1,4 | 128,44 | melampaui | 1,14 | 1,25 | 109,65 | melampaui |
| 2.7 | Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) (%) (45/100.000) | Rasio | 26,52 | 28,02 | 27,82 | 99,29 | belum tercapai | 29,5 | 29,3 | 99,32 | belum tercapai | 31 | 29,98 | 96,71 | belum tercapai |
| 2.8 | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (9 nakes) | % | 21,21 | 21,71 | 30,39 | 139,98 | melampaui | 22,2 | 32,35 | 145,72 | melampaui | 22,7 | 38,24 | 168,46 | melampaui |
| 2.9 | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi | % | 97,1 | 99,1 | 95,1 | 95,96 | belum tercapai | 100 | 60 | 60,00 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 2.10 | Persentase rumah sakit terakreditasi | % | 100 | 100 | 70,96 | 70,96 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 84,85 | 84,85 | belum tercapai |
| 2.11 | Cakupan kepesertaan JKN (persen) | % | 89,44 | 91,44 | 94,47 | 103,31 | melampaui | 93,4 | 98,38 | 105,33 | melampaui | 95,4 | 101,81 | 106,72 | melampaui |
| 2.12 | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (persen) | % | 85 | 90 | 71,44 | 79,38 | belum tercapai | 92 | 88,55 | 96,25 | belum tercapai | 94 | 84,20 | 89,57 | belum tercapai |
| 2.13 | Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) | % | 33 | 40 | 33 | 82,50 | belum tercapai | 45 | 45 | 100,00 | tercapai | 50 | 54,01 | 108,02 | melampaui |
| 2.14 | Jumlah Kab/kota yang melakukan Pandu | | 5 | 8 | 8 | 100,00 | tercapai | 11 | 88,55 | 805,00 | melampaui | 14 | 14 | 100,00 | tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | (Pelayanan Terpadu) PTM (penyakit Tidak menular) di > 80% Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15 | Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | 16 | 18 | 4 | 22,22 | belum tercapai | 20 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 22 | 20 | 90,91 | belum tercapai |
| **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik | % | 0,41 | 0,42 | 42 | 10000,00 | melampaui | 0,43 | 0,4296 | 99,91 | | 0,45 | 0,448 | 99,56 | belum tercapai |
| 3.2 | Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) | % | 82,09 | 85,32 | 85,32 | 100,00 | tercapai | 85,61 | 85,599 | 99,99 | | 86,01 | 85,82 | 99,79 | belum tercapai |
| 3.3 | Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) | % | 40,72 | 41,53 | 41,53 | 100,00 | tercapai | 43,2 | 43,141 | 99,86 | belum tercapai | 45,35 | 45,134 | 99,52 | belum tercapai |
| 3.4 | Persentase Jalan Provinsi yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air | % | 63,14 | 63,14 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 63,46 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 63,85 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 3.5 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 69 | 72 | 86,91 | 120,71 | melampaui | 76 | 86,91 | 114,36 | melampaui | 80 | 78,150 | 97,69 | belum tercapai |
| 3.6 | Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik | % | 77,15 | 77,45 | 74,72 | 96,48 | belum tercapai | 77,56 | 77,45 | 99,86 | belum tercapai | 77,63 | 77,630 | 100,00 | tercapai |
| 3.7 | Rasio Jaringan Irigasi | % | 23,27 | 23,85 | 23,01 | 96,48 | belum tercapai | 24,49 | 23,85 | 97,39 | belum tercapai | 24,89 | 24,890 | 100,00 | tercapai |
| 3.8 | Persentase penduduk berakses air minum | % | 85,85 | 90,56 | 7701 | 8503,75 | melampaui | 95,28 | 77,72 | 81,57 | belum tercapai | 100 | 78,710 | 78,71 | belum tercapai |
| 3.9 | Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit) | Unit | 5 | 7 | 4 | 57,14 | belum tercapai | 8 | 6 | 75,00 | belum tercapai | 9 | 8 | 88,89 | belum tercapai |
| 3.10 | Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter) | Meter | 1.000 | 2.000 | 1.194 | 59,70 | belum tercapai | 3.000 | 2.287 | 76,23 | belum tercapai | 4.000 | 50920 | 1273,00 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 3.11 | Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang) | Orang | 530 | 830 | 427 | 51,45 | belum tercapai | 1.080 | 1.248 | 115,56 | melampaui | 1.330 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| **4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Rumah Layak Huni (%) | % | 54,41 | 60 | 55,34 | 92,23 | belum tercapai | 65,46 | 54,07 | 82,60 | belum tercapai | 70,98 | 56,49 | 79,59 | belum tercapai |
| 4.2 | Rasio rumah layak huni | Rasio | 1 : 7,01 | 01:06,4 | 01:07, 0 | 100,93 | melampaui | 01:05,8 | 01:07,2 | 102,08 | melampaui | 1 : 5,37 | 1 : 6,44 | 101,64 | melampaui |
| 4.3 | Persentase areal kawasan kumuh (%) | % | 0,051 | 0 | 0,051 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 0,0511 | 0,051 | 0,20 | belum tercapai | 0,0511 | 0,0510 | 0,20 | belum tercapai |
| 4.4 | Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani (%) | % | 1,190 | 2 | 1,19 | 59,50 | belum tercapai | 3,571 | 2,381 | 66,68 | belum tercapai | 4,762 | 10,133 | 212,79 | melampaui |
| 4.5 | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%) | % | 3,030 | 6 | 3,03 | 50,50 | belum tercapai | 9,091 | 6,061 | 66,67 | belum tercapai | 12,121 | 25,794 | 212,80 | melampaui |
| 4.6 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 4.7 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| **5** | **Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM aktif (Persentase) | % | 180 | 75 | 84,44 | 112,59 | melampaui | 75 | 117,87 | 157,16 | melampaui | 75 | 117,65 | 156,87 | melampaui |
| 5.2 | Indeks Demokrasi | Nilai | 75,00 | 75,25 | 73,17 | 97,24 | belum tercapai | 75,5 | 79,3 | 105,03 | melampaui | 76,00 | 77,57 | 102,07 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (nilai) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang) | Orang | 200 | 200 | 300 | 150,00 | melampaui | 200 | 1300 | 650,00 | melampaui | 200 | 1439 | 719,50 | melampaui |
| 5.4 | Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (persentase kasus) | % | 70 | 70 | 65,63 | 93,76 | belum tercapai | 80 | 72,00% | 0,90 | belum tercapai | 85 | 37,04 | 43,58 | belum tercapai |
| 5.5 | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (Orang) | Orang | 7 : 10000 | 9:10000 | 9:10000 | 100,00 | tercapai | 9:10000 | 8:10000 | 80,00 | belum tercapai | 10 : 10000 | 8 : 10000 | 80,00 | belum tercapai |
| 5.6 | Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih (Orang) | Orang | 60 | 65 | 1956 | 3009,23 | melampaui | 70 | 1956 | 2794,29 | melampaui | 75 | 1956 | 2608,00 | melampaui |
| 5.7 | Penegakan Perda (kali) | Kali | 14 | 17 | 5 | 29,41 | belum tercapai | 19 | 6 | 31,58 | belum tercapai | 21 | 46 | 219,05 | melampaui |
| 5.8 | Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali) | Kali | 528 | 792 | 244 | 30,81 | belum tercapai | 836 | 237 | 28,35 | belum tercapai | 897 | 46 | 5,13 | belum tercapai |
| 5.9 | Pengamanan Objek Vital dan Aset Pemerintah Provinsi (kali) | Kali | 1,825 | 2.000 | 9720 | 486,00 | melampaui | 2.159 | 12287 | 569,11 | melampaui | 2.592 | 12.341 | 476,12 | melampaui |
| 5.10 | Pengawalan Pejabat atau Tamu VVIP (kali) | Kali | 75 | 100 | 144 | 144,00 | melampaui | 125 | 26 | 20,80 | belum tercapai | 150 | 38 | 25,33 | belum tercapai |
| 5.11 | Koordinasi Kewaspadaan Dini dengan Stakeholder terkait (kegiatan) | Kegiatan | 3 | 10 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 16 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 21 | TAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 5.12 | Persentase Penanganan Pra Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 5.13 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 5.14 | Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 5.15 | Persentase pendampingan penanganan pasca bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 5.16 | Terselenggaranya fungsi kelembagaan | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | tercapai | 12 | 12 | 100,00 | tercapai | 12 | 12 | 100,00 | tercapai |
| 5.17 | Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompoten | | 10 | 10 | 10 | 100,00 | tercapai | 10 | 10 | 100,00 | tercapai | 10 | 10 | 100,00 | tercapai |
| 5.18 | Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 5.19 | Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| **6** | **Sosial** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit) | Unit | 65 | 65 | 65 | 100,00 | tercapai | 67 | 67 | 100,00 | tercapai | 68 | 75 | 110,29 | melampaui |
| 6.2 | PPKS yang memperoleh bantuan sosial (Orang) | Orang | 2,000 | 1.000 | 4,025 | 0,40 | belum tercapai | 1.000 | 1000 | 100,00 | tercapai | 1.100 | 78.600 | 7145,45 | melampaui |
| 6.3 | Jumlah penanganan kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus) | Kasus | 100 | 100 | 79 | 79,00 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 96 | 96,00 | belum tercapai |
| 6.4 | Potensi dan Sumber Kesos (PSKS ) yang mendapat Pembinaan | | 3,000 | 3.000 | 2239 | 74,63 | belum tercapai | 3.100 | 3100 | 100,00 | tercapai | 3.100 | 2473 | 79,77 | belum tercapai |
| 6.5 | Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK) | KK | 20 | 150 | 200 | 133,33 | melampaui | 150 | 150 | 100,00 | tercapai | 175 | 350 | 200,00 | melampaui |
| 6.6 | Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam | Orang | 150 | 260 | 134 | 51,54 | belum tercapai | 300 | 300 | 100,00 | tercapai | 340 | 200 | 58,82 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | pemenuhan hak dasar secara inclusivitas di dalam panti (orang) | | | | | | | | | | | | | | |
| **II.** | **Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | % | - | 80 | 79,21 | 99,01 | belum tercapai | 96 | 18,75 | 19,53 | belum tercapai | 96,50 | 50 | 51,81 | belum tercapai |
| 1.2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | % | 72,5 | 72,5 | 67,23 | 92,73 | belum tercapai | 72,5 | 67,18 | 92,66 | belum tercapai | 72,60 | 68,71 | 94,64 | belum tercapai |
| 1.3 | Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) | Orang | 2.500 | 2.500 | 160 | 6,40 | belum tercapai | 2.750 | 1.831 | 66,58 | belum tercapai | 3.000 | 1775 | 59,17 | belum tercapai |
| 1.4 | Tingkat pengangguran terbuka (%) | % | 4,25 | 4,1 | 4,26 | -3,90 | tidak tercapai | 4,00 | 4,1 | -2,50 | tidak tercapai | 3,90 | 4,01 | -2,82 | tidak tercapai |
| 1.5 | Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan | Indeks | 76,00 | 78 | 65,84 | 84,41 | belum tercapai | 80 | 72,94 | 91,18 | belum tercapai | 81,00 | 65,92 | 81,38 | belum tercapai |
| **2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 81,88 | 81,9 | 81,92 | 100,02 | melampaui | 81,92 | 81,98 | 100,07 | melampaui | 81,94 | 79,99 | 97,62 | belum tercapai |
| 2.2 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | 3,43 | 3,43 | 3,38 | 98,54 | belum tercapai | 3,5 | 1,64 | 46,86 | belum tercapai | 3,60 | 3,16 | 87,78 | belum tercapai |
| 2.3 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 85 | 85 | 108,36 | 127,48 | melampaui | 87,5 | 114,28 | 130,61 | melampaui | 90 | 102 | 113,46 | melampaui |
| 2.4 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 61,83 | 61,83 | 61,83 | 100,00 | tercapai | 63,68 | 59,56 | 93,53 | belum tercapai | 65,59 | 63,68 | 97,09 | belum tercapai |
| 2.5 | Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 50 | 50 | 100 | 200,00 | melampaui | 55 | 100 | 181,82 | melampaui | 60 | 100 | 166,67 | melampaui |
| **3** | **Pangan** | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 3.1 | Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi (%) | % | 85,5 | 88,3 | 87,2 | 98,75 | belum tercapai | 90,4 | 91,2 | 100,88 | melampaui | 91 | 88,5 | 97,25 | belum tercapai |
| 3.2 | Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) | Ton | 337,665 | 32.000 | 40.000 | 125,00 | melampaui | 34.167 | 51 | 0,15 | belum tercapai | 36.334 | 355.320 | 977,93 | melampaui |
| 3.3 | Penguatan Cadangan Pangan (%) | % | 47,5 | 50,5 | 55,5 | 109,90 | melampaui | 60,5 | 100 | 165,29 | melampaui | 71 | 119,83 | 169,97 | melampaui |
| 3.4 | Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) | % | 28,57 | 2 | 2 | 100,00 | tercapai | 2 | 2 | 100,00 | tercapai | 2 | 0 | 100,00 | tercapai |
| 3.5 | Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%) | % | 88,5 | 90 | 95 | 105,56 | melampaui | 90,5 | 90 | 99,45 | belum tercapai | 91 | 97,65 | 107,31 | melampaui |
| **4** | **Pertanahan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase luas lahan bersertifikat (%) | % | 1,08 | 1,1 | 1,08 | 98,18 | belum tercapai | 1,12 | 1,77 | 158,04 | melampaui | 1,13 | 1,783 | 157,79 | melampaui |
| 4.2 | Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%) | % | 20,1 | 20,2 | 44,7 | 221,29 | melampaui | 20,3 | 66,6 | 328,08 | melampaui | 20,4 | 60,71 | 297,60 | melampaui |
| **5** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 74,07 | 74,3 | 76,62 | 103,12 | melampaui | 74,53 | 75,17 | 100,86 | melampaui | 74,75 | 74,8 | 100,07 | melampaui |
| 5.2 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%) | % | 75 | 76 | 11,83 | 16,41 | belum tercapai | 77 | 39,2 | 16,41 | belum tercapai | 78 | 12,68 (data sementa ra) | 16,41 | belum tercapai |
| **6** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Penerbitan Kartu Keluarga (dokumen) | Dokumen | 820.000 | 822.460 | 856.924 | 104,19 | melampaui | 824.105 | 894.442 | 108,53 | melampaui | 825.753 | 898.875 | 108,86 | melampaui |
| 6.2 | Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%) | % | 97 | 98 | 98 | 100,00 | tercapai | 98,7 | 97,8 | 99,09 | belum tercapai | 99,22 | 97,34 | 98,11 | belum tercapai |
| 6.3 | Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta | % | 37 | 42 | 49 | 116,67 | melampaui | 45 | 50 | 111,11 | melampaui | 50 | 84 | 168,00 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun (%) | % | 95 | 97 | 112 | 115,46 | melampaui | 98,5 | 98,93 | 100,44 | melampaui | 99,40 | 99,76 | 100,36 | melampaui |
| 6.5 | Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (%) | % | 68 | 72,25 | 99,31 | 137,45 | melampaui | 75,5 | 98,3 | 130,20 | melampaui | 80 | 101,17 | 126,46 | melampaui |
| 6.6 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%) | % | 33 | 38 | 54 | 142,11 | melampaui | 42 | 46 | 109,52 | melampaui | 47 | 58 | 123,02 | melampaui |
| 6.7 | Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (lembaga pengguna) | Jumlah | 1 | 2 | 1 | 50,00 | belum tercapai | 5 | 4 | 80,00 | belum tercapai | 7 | 2 | 28,57 | belum tercapai |
| 6.8 | Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk (%) | | 100 | 100 | 98 | 98,00 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 98 | 98,00 | belum tercapai |
| **7** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah Aparatur Desa Terlatih | | 310 | 650 | 650 | 100,00 | tercapai | 1.010 | 1184 | 117,23 | melampaui | 1.380 | 1943 | 140,80 | melampaui |
| 7.2 | Jumlah Desa Mandiri | | 55 | 60 | 87 | 145,00 | melampaui | 65 | 194 | 298,46 | melampaui | 70 | 248 | 354,29 | melampaui |
| 7.3 | Jumlah Desa Berkembang | | 737 | 767 | 766 | 99,87 | belum tercapai | 797 | 704 | 88,33 | belum tercapai | 817 | 659 | 80,66 | belum tercapai |
| 7.4 | Jumlah Desa Tertinggal | | 361 | 330 | 229 | 30,61 | belum tercapai | 300 | 143 | 52,33 | belum tercapai | 270 | 86 | 68,15 | belum tercapai |
| 7.5 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) | | 710 | 720 | 647 | 89,86 | belum tercapai | 730 | 642 | 87,95 | belum tercapai | 750 | 1141 | 152,13 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | Berkembang | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif | | 1722 | 1.730 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 1.740 | 3686 | 211,84 | melampaui | 1.750 | 3714 | 212,23 | melampaui |
| **8** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | Indeks | 60,32 | 60,32 | 54,01 | 89,54 | belum tercapai | 62,44 | 54,25 | 86,88 | belum tercapai | 64,55 | 62,7 | 97,13 | belum tercapai |
| 8.2 | Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR) | Angka | 2,10 | 2,1 | 2,24 | -6,67 | tidak tercapai | 2,06 | 2,29 | -11,17 | tidak tercapai | 2,00 | 2,28 | -14,00 | tidak tercapai |
| 8.3 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mPCR) | Angka | 73,23 | 73,23 | 67,17 | 91,72 | belum tercapai | 73,68 | 74,38 | 100,95 | melampaui | 74,26 | 73,02 | 98,33 | belum tercapai |
| 8.4 | Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) | % | 5,36 | 5,36 | 19,4 | 361,94 | melampaui | 5,18 | 8,58 | 165,64 | melampaui | 5,00 | 6,82 | 136,40 | melampaui |
| 8.5 | Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR) | Angka | 21,00 | 21 | 20 | 4,76 | belum tercapai | 20 | 19,51 | 2,45 | belum tercapai | 18 | 36 | -100,00 | tidak tercapai |
| **9** | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP) | | 1,377, 544 | 1.500.00 0 | 1,346, 111 | 27,38 | belum tercapai | 1.638.00 0 | 686.186 | 25,07 | belum tercapai | 1.765. 000 | 384.877 (Angkutan Jalan) 25. 849 (Angkutan Laut, hanya dari Sampit) | 23,27 | belum tercapai |
| 9.2 | Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit) | Unit | 360 | 380 | 33,251 | 8,75 | belum tercapai | 400 | 360 | 90,00 | belum tercapai | 430 | 159 | 36,98 | belum tercapai |
| 9.3 | Rasio Izin Trayek | Rasio | 0,0000 63 | 0,00007 4 | 0,000065 | 87,84 | belum tercapai | 0,00007 8 | 0,00000 04 | 0,51 | belum tercapai | 0,0000 8 | 0,00002 | 25,00 | belum tercapai |
| 9.4 | Jumlah Pelabuhan Laut | | 3 | 3 | 0 | 1100,0 | melampaui | 3 | 1 | 1100,0 | melampaui | 3 | 15 Pelabuhan | 1100,0 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | /Udara/Terminal Bus | | | | | | | | | | | | / 9 Bandara / 9 Terminal | | |
| 9.5 | Persentase Layanan Angkutan Darat (%) | % | 59 | 60 | 57,7 | 96,17 | belum tercapai | 63 | 63 | 100,00 | tercapai | 68 | 0,05 | 0,07 | |
| 9.6 | Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum | % | 85 | 85 | 80 | 94,12 | belum tercapai | 88 | 80 | 90,91 | belum tercapai | 93 | 58 | 62,37 | belum tercapai |
| 9.7 | Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat (%) | % | 100 | 100 | 22,8 | 22,80 | belum tercapai | 100 | 100,00% | 1,00 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 9.8 | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | Rasio | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 83,33 | belum tercapai | 0,014 | 0,014 | 100,00 | tercapai | 0,015 | 0,014 | 93,33 | belum tercapai |
| 9.9 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum darat (Orang/Barang) | Orang /Barang | 198,802 / 208,742 | 200.000 / 220.000 | 234.146 | 4268 | melampaui | 220.000 / 240.000 | 111,704 | 4268 | melampaui | 250.000 / 248.000 | 101.407 orang/ 2.357 ton | 4268 | melampaui |
| 9.10 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | | 1,910,257 orang/ 29,908,494 ton | 2.150.000 orang/32.320.000 ton | 1.346.111 orang / 1.965.926 ton | 21,50 | belum tercapai | 2.200.000 orang/32.350.000 ton | 797.890 orang / 8.598.765 ton | 21,50 | belum tercapai | 283.470 orang / 4.051 ton (Bandara) 101.407 orang/ 2.357 ton (Terminal) 25.849 orang / 3.333.099 ton (Pelabuhan) | 283.470 orang / 4.051 ton (Bandara) 101.407 orang/ 2.357 ton (Terminal) 25.849 orang / 3.333.099 ton (Pelabuhan) | 21,50 | belum tercapai |
| **10** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 10.1 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kabupaten (%) | % | 51 | 60 | 70 | 116,67 | melampaui | 68 | 85 | 125,00 | melampaui | 79 | 85 | 107,59 | melampaui |
| 10.2 | Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik | | 500 | 600 | 770 | 128,33 | melampaui | 650 | 1735 | 266,92 | melampaui | 698 | 1144 | 163,90 | melampaui |
| 10.3 | Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan | | 33 | 43 | 43 | 100,00 | tercapai | 48 | 46 | 95,83 | belum tercapai | 50 | 62 | 124,00 | melampaui |
| 10.4 | Jumlah lokasi yang terhubung dengan *Fiber Optic* (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | | 33 | 43 | 43 | 100,00 | tercapai | 56 | 46 | 82,14 | belum tercapai | 56 | 46 | 82,14 | belum tercapai |
| 10.5 | Jumlah informasi yang di *upload* pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah | | 300 | 500 | 1445 | 289,00 | melampaui | 540 | 1906 | 352,96 | melampaui | 587 | 1065 | 181,43 | melampaui |
| 10.6 | Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (*co-location/hosting*) | | 28 | 30 | 30 | 100,00 | tercapai | 33 | 45 | 136,36 | melampaui | 35 | 45 | 128,57 | melampaui |
| **11** | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase Kontribusi UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%) | % | 46,33 | 12 | - | 0,00 | tidak bisa dinilai | 12,35 | 39,47 | 319,60 | melampaui | 13,15 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 11.2 | Jumlah Wirausaha (Unit) | Unit | 70.342 | 71.495 | 121.458 | 169,88 | melampaui | 78.644 | 121.458 | 154,44 | melampaui | 86.508 | 164.621 | 190,30 | melampaui |
| 11.3 | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit) | Unit | 66.670 | 48.000 | 121.149 | 252,39 | melampaui | 57.800 | 121.149 | 209,60 | melampaui | 69.360 | 164.621 | 237,34 | melampaui |
| 11.4 | Persentase Pertumbuhan Wirausaha | % | 9,76 | 9,99 | 61,34 | 614,01 | melampaui | 9,99 | 69,88 | 699,50 | melampaui | 9,99 | 12,34 | 123,52 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 11.5 | Persentase Rasio Kewirausahaan | % | 5,09 | 5,09 | - | 0,00 | tidak bisa dinilai | 5,52 | 8,61 | 155,98 | melampaui | 8,98 | 23,43 | 260,91 | melampaui |
| 11.6 | Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit) | Unit | 3.672 | 4.200 | 372 | 8,86 | belum tercapai | 4.242 | 3.672 | 86,56 | belum tercapai | 4.285 | 784 | 18,30 | belum tercapai |
| 11.7 | Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit) | Unit | 370 | 480 | 481 | 100,21 | melampaui | 480 | 449 | 93,54 | belum tercapai | 480 | 644 | 134,17 | melampaui |
| 11.8 | Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS) (Unit) | Unit | 2.543 | 2.000 | 2.571 | 128,55 | melampaui | 2.584 | 2.594 | 100,39 | melampaui | 2.609 | 2599 | 99,62 | belum tercapai |
| 11.9 | Persentase koperasi aktif (%) | % | 76,19 | 83,21 | 80,85 | 97,16 | belum tercapai | 83,71 | 80,96 | 96,71 | belum tercapai | 84,21 | 80,98 | 96,16 | belum tercapai |
| 11.10 | Pertumbuhan Koperasi (unit) | Unit | 82 | 50 | 121 | 242,00 | melampaui | 50 | 140 | 280,00 | melampaui | 50 | 40 | 80,00 | belum tercapai |
| 11.11 | Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%) | % | 16,51 | 17,5 | 19,75 | 112,86 | melampaui | 19 | 18,03 | 94,89 | belum tercapai | 21,50 | 25,50 | 118,60 | melampaui |
| 11.12 | Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit) | Unit | 12 | 12 | - | 0,00 | tidak bisa dinilai | 12 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 12 | 100 | 833,33 | melampaui |
| 11.13 | Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang) | Orang | 390 | 240 | 820 | 1.656,25 | melampaui | 240 | 240 | 1.656,25 | melampaui | 240 | DBH 3435 Orang / DAK 540 Orang | 1.656,25 | melampaui |
| 11.14 | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset (%) | % | 1,50 | 1,75 | 3,29 | 188,00 | melampaui | 2 | 11,52 | 576,00 | melampaui | 2,25 | 1,78 | 79,11 | belum tercapai |
| 11.15 | Koperasi Modern (Unit) | Unit | - | 2 | - | 0,00 | tidak bisa dinilai | 2 | 6 | 300,00 | melampaui | 3 | 21 | 700,00 | melampaui |
| 11.16 | Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%) | % | 3,15 | 1,5 | 6,28 | 418,67 | melampaui | 1,65 | 3,29 | 199,39 | melampaui | 1,85 | 2,87 | 155,14 | melampaui |
| **12** | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) | Unit | 618 | 700 | 823 | 117,57 | melampaui | 700 | 2.267 | 323,86 | melampaui | 752 | 1.003,00 | 133,38 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 12.2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah) | Dalam Juta Rupiah | 7.420.000 | 7.980.000 | 4.348.289,24 | 54,49 | belum tercapai | 8.300.000 | 19.104.525,23 | 230,18 | melampaui | 8.650.000 | 21.516.163,10 | 248,74 | melampaui |
| 12.3 | PMDN (dalam Juta Rupiah) | Dalam Juta Rupiah | 5.194.000 | 5.586.000 | 2.060.953,30 | 36,89 | belum tercapai | 5.810.000 | 8.779.502,70 | 151,11 | melampaui | 6.055.000 | 15.229.270,18 | 251,52 | melampaui |
| 12.4 | PMA (dalam US $ Ribu) | Dalam US$ Ribu | 152.465,75 | 163.973 | 159.396,23 | 97,21 | belum tercapai | 170.548 | 697.636,70 | 409,06 | melampaui | 177.739,73 | 419.126,19 | 235,81 | melampaui |
| 12.5 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi(%) | % | 40 | 7,55 | 19,88 | 263,31 | melampaui | 4,01 | 32,44 | 808,98 | melampaui | 4,22 | 12,62 | 299,05 | melampaui |
| 12.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%) | % | 80 | 80 | 90,71 | 113,39 | melampaui | 81 | 84,64 | 104,49 | melampaui | 81 | 85,38 | 105,41 | melampaui |
| 12.7 | Jumlah Perizinan yang Terbit Tetap Waktu | | 618 | 595 | 55 | 9,24 | belum tercapai | 595 | 690 | 115,97 | melampaui | 595 | 493 | 82,86 | belum tercapai |
| 12.8 | Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan | | 4 | 4 | 1 | 25,00 | belum tercapai | 4 | 6 | 150,00 | melampaui | 4 | 8 | 200,00 | melampaui |
| 12.9 | Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang terkelola dengan baik | | 5 | 5 | 5 | 100,00 | tercapai | 5 | 10 | 200,00 | melampaui | 5 | 11 | 220,00 | melampaui |
| 12.10 | Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi | | 2 | 2 | 1 | 50,00 | belum tercapai | 2 | 5 | 250,00 | melampaui | 2 | 2 | 100,00 | tercapai |
| **13** | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | % | 77,19 | 80,7 | 80,7 | 100,00 | tercapai | 84,21 | 80 | 95,00 | belum tercapai | 87,71 | 80,00 | 91,21 | belum tercapai |
| 13.2 | Persentase Wirausaha Muda | % | 26,10 | 33,8 | 33,8 | 100,00 | tercapai | 49,5 | 32 | 64,65 | belum tercapai | 49,20 | 32,00 | 65,04 | belum tercapai |
| 13.3 | Cakupan Pembinaan Olahraga | % | 51,42 | 71,4 | 71,42 | 100,03 | melampaui | 85,71 | 66,67 | 77,79 | belum tercapai | 100 | 70,00 | 70,00 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 13.4 | Cakupan Pelatih yang Bersertifikat | % | 40,38 | 43,75 | 43,75 | 100,00 | tercapai | 45,45 | 45,45 | 100,00 | tercapai | 50 | 46,00 | 92,00 | belum tercapai |
| 13.5 | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | % | 40,34 | 42,68 | 42,68 | 100,00 | tercapai | 47,62 | 47,62 | 100,00 | tercapai | 58,14 | 48,00 | 82,56 | belum tercapai |
| 13.6 | Jumlah Atlet Berprestasi | | 6 | 10 | 12 | 120,00 | melampaui | 12 | 14 | 116,67 | melampaui | 15 | 178,00 | 1186,67 | melampaui |
| 13.7 | Jumlah Prestasi Olahraga | | 8 | 10 | 9 | 90,00 | belum tercapai | 13 | 31 | 238,46 | melampaui | 18 | 24,00 | 133,33 | melampaui |
| **14** | **Statistik** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka" | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | 100 | tercapai | Ada | Ada | 100 | tercapai | Ada | Ada | 100 | tercapai |
| 14.2 | Buku "PDRB Kalimantan Tengah" | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | 100 | tercapai | Ada | Ada | 100 | tercapai | Ada | Ada | 100 | tercapai |
| 14.3 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | 100 | tercapai | Ada | Ada | 100 | tercapai | Ada | Ada | 100 | tercapai |
| **15** | **Persandian** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | Indeks | 560 | 410 | 431 | 105,12 | melampaui | 418 | 447 | 106,94 | melampaui | 560 | 447 | 79,82 | belum tercapai |
| **16** | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) | Kali | 3 | 3 | 12 | 400,00 | melampaui | 4 | 4 | 100,00 | tercapai | 4 | 4 | 100,00 | tercapai |
| 16.3 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) | Buah | 500 | 631 | 327 | 51,82 | belum tercapai | 651 | 743 | 114,13 | melampaui | 680 | 501 | 73,68 | belum tercapai |
| **17** | **Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks) | Eksemplar | 120,000 | 146.000 | 37.400 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 147.000 | 37.560 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 150.000 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 17.2 | Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan | | 25.675 | 26.675 | 11.687 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 27.675 | 9.015 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 28.675 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 17.3 | Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Perpustakaan | | 5 | 14 | 4 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 24 | 8 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 34 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | Berbasis Inklkusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4 | Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan | | 70,00 % | 80 | | 0,00 | tidak bisa dinilai | 95 | 83,00 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 100 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 17.5 | Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul) | Judul | 30.000 | 32.000 | 13.870 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 35.000 | 11.300 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 50.000 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 17.6 | Jumlah Naskah Kuno yang terlestarikan (Naskah) | Naskah | 0 | 1 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 2 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 3 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| **18** | **Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Presentase SOPD Menerapkan Arsip Secara Baku Sesuai Standar Kearsipan | % | 95% | 100 | 95% | 0,95 | belum tercapai | 100 | 97,00 | 97,00 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| **III.** | **Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) | Ton/ Tahun | 119.876,05 | 128.008,24 | 128.008,34 | 100,00 | melampaui | 136.140,63 | 136.164,09 | 100,02 | melampaui | 144.272,92 | 36.111,52 | 25,03 | belum tercapai |
| 1.2 | Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) | Ton/ Tahun | 130.526,10 | 133.136,62 | 133.137,62 | 100,00 | melampaui | 137.130,72 | 160.127,81 | 116,77 | melampaui | 141.244,64 | 35.371,19 | 25,04 | belum tercapai |
| 1.3 | Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) | Kg/Kap/Tahun | 49,63 | 55.81 | | 0,00 | tidak bisa dinilai | 58 | 58,67 | 101,16 | melampaui | 59,43 | 14,86 | 25,00 | belum tercapai |
| 1.4 | Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor) | ekor | 67.630 | 69.820 | 69.820 | 100,00 | tercapai | 72.010 | 72.824 | 101,13 | melampaui | 74.200 | 22.400 | 30,19 | belum tercapai |
| 1.5 | Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) | NTN/ NTBi | 107 | 108,25 | 108,25 | 100,00 | tercapai | 109,5 | 109,9 | 100,37 | melampaui | 110,75 | 99,11 | 89,49 | belum tercapai |
| 1.6 | Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%) | % | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 100,00 | tercapai | 3,3 | 2,8 | 84,85 | belum tercapai | 3,40 | 2,22 | 65,29 | belum tercapai |
| 1.7 | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan | % | 85 | 85 | 85 | 100,00 | tercapai | 85 | 89 | 104,71 | melampaui | 85 | 85 | 100,00 | tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok) | Kelompok | 40 | 45 | 45 | 100,00 | tercapai | 48 | 204 | 425,00 | melampaui | 52 | 13 | 25,00 | belum tercapai |
| 1.9 | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi) | Lokasi | 0 | 2 | - | 0,00 | tidak bisa dinilai | 4 | 4 | 100,00 | tercapai | 5 | 2 | 40,00 | belum tercapai |
| 1.10 | Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) | Ton/ Tahun | 34.450 | 34.761,84 | 34.761,84 | 100,00 | tercapai | 35.073,68 | 35.528,94 | 101,30 | melampaui | 35.385,52 | 8.810,17 | 24,90 | belum tercapai |
| **2** | **Pertanian dan Peternakan** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Luas panen tanaman pangan*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Padi (Ha) : | Ha | 161.018 | 165.849 | 109.756 | 66,18 | belum tercapai | 170.824 | 101.093 | 59,18 | belum tercapai | 175.949 | 110.939,44 | 63,05 | belum tercapai |
| 2.1.2 | Jagung (Ha) | Ha | 26.610 | 27.408 | 13.440 | 49,04 | belum tercapai | 28.231 | 7.500 | 26,57 | belum tercapai | 29.077 | 8.411,04 | 28,93 | belum tercapai |
| 2.1.3 | Kedelai(Ha) | Ha | 93,5 | 96,3 | 6 | 6,23 | belum tercapai | 99,2 | 108,8 | 109,68 | melampaui | 102,2 | 29,30 | 28,67 | belum tercapai |
| 2.1.4 | Ubi Kayu (Ha) | Ha | 3.314 | 3.413 | 1.943 | 56,93 | belum tercapai | 3.516 | 1.252 | 35,61 | belum tercapai | 3.621 | 1.091,20 | 30,14 | belum tercapai |
| ***2.2.*** | ***Produktivitas tanaman pangan*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Padi (ku/Ha) | ku/Ha | 3,86 | 3,98 | 32,24 | 810,05 | melampaui | 4,1 | 3,13 | 76,34 | belum tercapai | 4,22 | 3,41 | 80,81 | belum tercapai |
| 2.2.2 | Jagung (Kwintal/Ha) | Kwintal/Ha | 5,55 | 5,72 | 50,83 | 888,64 | melampaui | 5,89 | 3,75 | 63,67 | belum tercapai | 6,07 | 3,10 | 51,07 | belum tercapai |
| 2.2.3 | Kedelai (Kwintal/Ha) | Kwintal/Ha | 1,56 | 1,58 | 16,23 | 1027,22 | melampaui | 1,59 | 1,96 | 123,27 | melampaui | 1,60 | 1,87 | 116,88 | melampaui |
| 2.2.4 | Ubi Kayu (Kwintal/Ha) | Kwintal/Ha | 26,06 | 26,84 | 293,5 | 1093,52 | melampaui | 27,65 | 27,21 | 98,41 | belum tercapai | 28,48 | 28,65 | 100,60 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| ***2.3.*** | ***Produksi tanaman pangan*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Padi (Ton) | Ton | 625.522 | 644.288 | 353.865 | 54,92 | belum tercapai | 663.617 | 334.733 | 50,44 | belum tercapai | 683.526 | 378.633 | 55,39 | belum tercapai |
| 2.3.2 | Jagung (Ton) | Ton | 139.370,14 | 143.551,14 | 68.317 | 47,59 | belum tercapai | 47.858,14 | 26.856,24 | 56,12 | belum tercapai | 152.294,14 | 26.065,80 | 17,12 | belum tercapai |
| 2.3.3. | Kedelai (Ton) | Ton | 146,30 | 150,69 | 10 | 6,64 | belum tercapai | 155,21 | 165,39 | 106,56 | melampaui | 159,87 | 54,90 | 34,34 | belum tercapai |
| 2.3.4. | Ubi Kayu (Ton) | Ton | 103.559,60 | 106.666,39 | 57.039 | 53,47 | belum tercapai | 109.866,38 | 33.494,55 | 30,49 | belum tercapai | 113.162,37 | 31.257,08 | 27,62 | belum tercapai |
| ***2.4.*** | ***Luas Panen Tanaman Hortikultura*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Buah-Buahan (Ku) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Jeruk (Ha) | Ha | 526 | 548 | 347 | 63,32 | belum tercapai | 586 | 297 | 50,68 | belum tercapai | 595 | 248,74 | 41,81 | belum tercapai |
| | b. Durian (Ha) | Ha | 1,033 | 1.036 | 47.953 | 4628,67 | melampaui | 1.059 | 1.334 | 125,97 | melampaui | 1.070 | 710,30 | 66,38 | belum tercapai |
| | c. Rambutan (Ha) | Ha | 2,727 | 2.734 | 5.034 | 184,13 | melampaui | 2.765 | 2.696 | 97,50 | belum tercapai | 2.775 | 1.811,26 | 65,27 | belum tercapai |
| | d. Nanas (Ha) | Ha | 465 | 484 | 105 | 21,69 | belum tercapai | 493 | 110 | 22,31 | belum tercapai | 502 | 110,21 | 21,95 | belum tercapai |
| | e. Pisang (Ha) | Ha | 2,002 | 2.011 | 503 | 25,01 | belum tercapai | 2.019 | 623 | 30,86 | belum tercapai | 2.025 | 420,66 | 20,77 | belum tercapai |
| 2.4.2 | Sayuran (Ku) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Bawang Merah (Ha) | Ha | 988 | 1.024 | 24 | 2,34 | belum tercapai | 1.046 | 17 | 1,63 | belum tercapai | 1.049 | 19,55 | 1,86 | belum tercapai |
| | b. Cabai Besar (Ha) | Ha | 1,037 | 1.046 | 222 | 21,22 | belum tercapai | 1.043 | 209 | 20,04 | belum tercapai | 1.060 | 204,71 | 19,31 | belum tercapai |
| | c. Cabai Rawit (Ha) | Ha | 2,317 | 2.326 | 778 | 33,45 | belum tercapai | 2.343 | 915 | 39,05 | belum tercapai | 2.352 | 717,54 | 30,51 | belum tercapai |
| | d. Kacang Panjang (Ha) | Ha | 2,034 | 2.040 | 768 | 37,65 | belum tercapai | 2.060 | 748 | 36,31 | belum tercapai | 2.066 | 531,03 | 25,70 | belum tercapai |
| 2.4.3. | Tanaman Hias (Tangkai) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Anggrek | Tang-kai | 1,420 | 1.531 | 290 | 18,94 | belum tercapai | 1.831 | 1.088 | 59,42 | belum tercapai | 2.163 | 487,00 | 22,52 | belum tercapai |
| | b. Mawar | Tang- | 823 | 865 | 310 | 35,84 | belum | 885 | 408 | 46,10 | belum | 1.137 | 386,00 | 33,95 | belum |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | | kai | | | | | tercapai | | | | tercapai | | | | tercapai |
| 2.4.4 | Tanaman Obat (Kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Jahe | Kg | 360,306 | 380.986 | 312.078 | 81,91 | belum tercapai | 381.286 | 1.088 | 0,29 | belum tercapai | 383,170 | 141,087 | 36,82 | belum tercapai |
| | b. Kunyit | Kg | 189,230 | 194.509 | 102.066 | 52,47 | belum tercapai | 194.609 | 408 | 0,21 | belum tercapai | 195,484 | 75,260 | 38,50 | belum tercapai |
| ***2.5.*** | ***Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Buah-Buahan (Ku) | Ku | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Jeruk (Ton) | Ton | 13,636 | 13.734 | 4.660 | 33,93 | belum tercapai | 13.893 | 4.394 | 31,63 | belum tercapai | 14.146 | 4.049,94 | 28,63 | belum tercapai |
| | b. Durian (Ton) | Ton | 5,390 | 5.639 | 2.810 | 49,83 | belum tercapai | 7.695 | 11.365 | 147,69 | melampaui | 7.812 | 6.714,65 | 85,95 | belum tercapai |
| | c. Rambutan (Ton) | Ton | 7,936 | 8.046 | 6.011 | 74,71 | belum tercapai | 9.760 | 20.147 | 206,42 | melampaui | 10.288 | 15.203,39 | 147,78 | melampaui |
| | d. Nanas (Ton) | Ton | 13,809 | 15.110 | 7.897 | 52,26 | belum tercapai | 14.064 | 10.994 | 78,17 | belum tercapai | 14.359 | 6.329,66 | 44,08 | belum tercapai |
| | e. Pisang (Ton) | Ton | 32,551 | 33.063 | 24.925 | 75,39 | belum tercapai | 33.815 | 40.546 | 119,91 | melampaui | 33.919 | 33.124,06 | 97,66 | belum tercapai |
| 2.5.2 | Sayuran (Ku) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Bawang Merah (Ton) | Ton | 7,804 | 7.885 | 85 | 1,08 | belum tercapai | 7.988 | 72 | 0,90 | belum tercapai | 8.047 | 951,87 | 11,83 | belum tercapai |
| | b. Cabai Besar (Ton) | Ton | 6,152 | 6.219 | 1.173 | 18,86 | belum tercapai | 6.416 | 999 | 15,57 | belum tercapai | 6.557 | 885,90 | 13,51 | belum tercapai |
| | c. Cabai Rawit (Ton) | Ton | 7,844 | 8.001 | 4.854 | 60,67 | belum tercapai | 8.161 | 6.969 | 85,39 | belum tercapai | 8.324 | 3.178,71 | 38,19 | belum tercapai |
| | d. Kacang Panjang (Ton) | Ton | 7,066 | 7.463 | 3.970 | 53,20 | belum tercapai | 7.615 | 4.004 | 52,58 | belum tercapai | 7.901 | 2.410,86 | 30,51 | belum tercapai |
| 2.5.3 | Tanaman Hias (Tangkai) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Anggrek | Tangkai | 9,777 | 9.848 | 323 | 3,28 | belum tercapai | 12.990 | 1.795 | 13,82 | belum tercapai | 17.439 | 2.208,00 | 12,66 | belum tercapai |
| | b. Mawar | Tangkai | 5,927 | 6.121 | 364 | 5,95 | belum tercapai | 6.884 | 4.459 | 64,77 | belum tercapai | 7.343 | 6.824,00 | 92,93 | belum tercapai |
| 2.5.4 | Tanaman Obat (Kg) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | a. Jahe | Kg | 642,744 | 707.018 | 498.864 | 70,56 | belum tercapai | 766.798 | 438.843 | 57,23 | belum tercapai | 793.811 | 209.920,00 | 26,44 | belum tercapai |
| | b. Kunyit | Kg | 316,230 | 317.159 | 155.047 | 48,89 | belum tercapai | 333.277 | 249.778 | 74,95 | belum tercapai | 344.837 | 148.091,00 | 42,95 | belum tercapai |
| ***2.6*** | **Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Buah-Buahan (Ku/Pohon) | Ku/Pohon | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Jeruk (Ton/Ha) | Ton/Ha | 18,13 | 18,49 | 13,44 | 72,69 | belum tercapai | 18,86 | 14,81 | 78,53 | belum tercapai | 19,24 | 16,28 | 84,62 | belum tercapai |
| | b. Durian (Ton/Ha) | Ton/Ha | 6,25 | 6,38 | 0,06 | 0,94 | belum tercapai | 6,51 | 8,52 | 130,88 | melampaui | 6,64 | 9,45 | 142,32 | melampaui |
| | c. Rambutan (Ton/Ha) | Ton/Ha | 4,55 | 4,64 | 1,19 | 25,65 | belum tercapai | 4,73 | 7,47 | 157,93 | melampaui | 4,82 | 8,39 | 174,07 | melampaui |
| | d. Nanas (Ton/Ha) | Ton/Ha | 90,99 | 92,81 | 75,39 | 81,23 | belum tercapai | 94,64 | 100,32 | 106,00 | melampaui | 96,56 | 57,43 | 59,48 | belum tercapai |
| | e. Pisang (Ton/Ha) | Ton/Ha | 19,85 | 19,98 | 49,51 | 247,80 | melampaui | 20,11 | 65,08 | 323,62 | melampaui | 20,24 | 78,74 | 389,03 | melampaui |
| 2.6.2 | Sayuran (Ku/Ha) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Bawang Merah (Ton/Ha) | Ton/Ha | 6,79 | 6,93 | 3,63 | 52,38 | belum tercapai | 45.845 | 58,91 | 0,13 | belum tercapai | 7,21 | 48,69 | 675,31 | melampaui |
| | b. Cabai Besar (Ton/Ha) | Ton/Ha | 5,91 | 45.722 | 5,29 | 0,01 | | 6,15 | 4,78 | 77,72 | belum tercapai | 6,27 | 4,33 | 69,06 | belum tercapai |
| | c. Cabai Rawit (Ton/Ha) | Ton/Ha | 6,02 | 6,14 | 6,24 | 101,63 | melampaui | 6,26 | 7,61 | 121,57 | melampaui | 6,39 | 4,43 | 69,33 | belum tercapai |
| | d. Kacang Panjang (Ton/Ha) | Ton/Ha | 2,43 | 2,48 | 5,17 | 208,47 | melampaui | 2,53 | 5,35 | 211,46 | melampaui | 2,58 | 4,54 | 175,97 | melampaui |
| 2.6.3 | Tanaman Hias (Tangkai/m2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Anggrek | Tangkai /m2 | 5,43 | 5,54 | 1,11 | 20,04 | belum tercapai | 5,76 | 1,65 | 28,65 | belum tercapai | 5,76 | 4,53 | 78,65 | belum tercapai |
| | b. Mawar | Tangkai /m2 | 3,33 | 3,4 | 1,17 | 34,41 | belum tercapai | 3,47 | 10,93 | 314,99 | melampaui | 3,54 | 17,68 | 499,44 | melampaui |
| 2.6.4 | Tanaman Obat (Kg/m2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Jahe | Kg/m2 | 2,12 | 2,16 | 1,6 | 74,07 | belum tercapai | 2,2 | 2,35 | 106,82 | melampaui | 2,24 | 1,49 | 66,52 | belum tercapai |
| | b. Kunyit | Kg/m2 | 1,86 | 1,9 | 1,52 | 80,00 | belum tercapai | 1,94 | 1,95 | 100,52 | melampaui | 1,98 | 1,97 | 99,49 | belum tercapai |
| ***2.7*** | ***Populasi Ternak*** | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 2.7.1 | Sapi Potong (Ekor) | Ekor | 95,541 | 102.388 | 87.883 | 85,83 | belum tercapai | 105.459 | 73.936 | 70,11 | belum tercapai | 108.623 | 61.704 | 56,81 | belum tercapai |
| 2.7.2 | Kerbau (Ekor) | Ekor | 13,450 | 14.173 | 11.436 | 80,69 | belum tercapai | 14.490 | 11.588 | 79,97 | belum tercapai | 14.852 | 7.327 | 49,33 | belum tercapai |
| 2.7.3 | Kambing (Ekor) | Ekor | 52,446 | 55.120 | 52.405 | 95,07 | belum tercapai | 56.498 | 45.957 | 81,34 | belum tercapai | 57.911 | 31.209 | 53,89 | belum tercapai |
| 2.7.4 | Babi (Ekor) | Ekor | 256,883 | 269.990 | 198.560 | 73,54 | belum tercapai | 275.390 | 101.857 | 36,99 | belum tercapai | 280.897 | 35.271 | 12,56 | belum tercapai |
| 2.7.5 | Ayam Buras (Ekor) | Ekor | 3,122,947 | 3.282.280 | 2.952.269 | 89,95 | belum tercapai | 3.347.926 | 2.843.942 | 84,95 | belum tercapai | 3.414.885 | 2.248.478 | 65,84 | belum tercapai |
| 2.7.6 | Ayam Ras Petelur (Ekor) | Ekor | 505,625 | 510.372 | 531.461 | 104,13 | melampaui | 520.580,00 | 617.863 | 118,69 | melampaui | 530.991 | 29.709.992 | 5595,20 | melampaui |
| 2.7.7 | Ayam Ras Pedaging (Ekor) | Ekor | 25,674,626 | 26.984.555 | 23.647.963 | 87,64 | belum tercapai | 27.524.246 | 26.653.685 | 96,84 | belum tercapai | 28.074.731 | 765.676 | 2,73 | belum tercapai |
| 2.7.8 | Itik (Ekor) | Ekor | 320,013 | 342.868 | 296.588 | 86,50 | belum tercapai | 349.725 | 256.689 | 73,40 | belum tercapai | 356.720 | 149.553 | 41,92 | belum tercapai |
| ***2.8*** | ***Jumlah Produksi Daging Ternak*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Sapi Potong (Ton) | Ton | 4,880 | 5.229 | 3.966 | 75,85 | belum tercapai | 5.386 | 4.026,73 | 74,76 | belum tercapai | 5.547 | 1.513.523 | 27285,43 | melampaui |
| 2.8.2 | Kerbau (Ton) | Ton | 91 | 96 | 69 | 71,88 | belum tercapai | 98 | 48,75 | 49,74 | belum tercapai | 100 | 52.254 | 52254,00 | melampaui |
| 2.8.3 | Kambing (Ton) | Ton | 262 | 248 | 232 | 93,55 | belum tercapai | 254 | 33,65 | 13,25 | belum tercapai | 260 | 19.663 | 7562,69 | melampaui |
| 2.8.4 | Babi (Ton) | Ton | 1,995 | 20.001 | 1.851 | 9,25 | belum tercapai | 2.041 | 1.949,35 | 95,51 | belum tercapai | 2.082 | 1.412.523 | 67844,52 | melampaui |
| 2.8.5 | Ayam Buras (Ton) | Ton | 2,617 | 2.750 | 2.576 | 93,67 | belum tercapai | 2.805 | 2.543,78 | 90,69 | belum tercapai | 2.861 | 937.817 | 32779,34 | melampaui |
| 2.8.6 | Ayam Ras Petelur (Ton) | Ton | 41 | 43 | 344 | 800,00 | melampaui | 44 | 411,5 | 935,23 | melampaui | 45 | 244.250 | 542777,78 | melampaui |
| 2.8.7 | Ayam Ras Pedaging (Ton) | Ton | 40,996 | 41.815 | 33.568 | 80,28 | belum tercapai | 42.652 | 39.440,16 | 92,47 | belum tercapai | 43.505 | 47.183.159 | 108454,57 | melampaui |
| 2.8.8 | Itik (Ton) | Ton | 221 | 225 | 277 | 123,11 | melampaui | 215 | 242,43 | 112,76 | melampaui | 219 | 64.224 | 29326,03 | melampaui |
| ***2.9*** | ***Telur*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Ayam Buras (Kg) | Kg | 2,693,374 | 2.545.192 | 2.448.247 | 96,19 | belum tercapai | 2596096 | 2.417.351 | 93,11 | belum tercapai | 2.648.018 | 891.206 | 33,66 | belum tercapai |
| 2.9.2 | Ayam Ras Petelur (Kg) | Kg | 6,859,141 | 6.996.324 | 4.654.354 | 66,53 | belum tercapai | 7136250 | 5.573.705 | 78,10 | belum tercapai | 7.278.975 | 3.308.358 | 45,45 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 2.9.3 | Itik (Kg) | % | 1,756,815 | 1.791.951 | 1.726.409 | 96,34 | belum tercapai | 1827790 | 1.509.203 | 82,57 | belum tercapai | 1.864.346 | 399.506 | 21,43 | belum tercapai |
| 2.10 | Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%) | % | 6,75 | 6,88 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 7,16 | 4,62 | 64,53 | belum tercapai | 7,38 | 4,64 | 62,87 | belum tercapai |
| 2.11 | Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) | % | 1,41 | 1,45 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 1,5 | 1,23 | 82,00 | belum tercapai | 1,54 | 1,20 | 77,92 | belum tercapai |
| 2.12 | Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) | % | 2,43 | 2,43 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 2,57 | 0,48 | 18,68 | belum tercapai | 2,65 | 1,48 | 55,85 | belum tercapai |
| 2.13 | Kontribusi sub sektor Hortikultura terhadap PDRB (%) | % | 2,91 | 3 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 3,09 | 1,46 | 47,25 | belum tercapai | 3,19 | 0,37 | 11,60 | belum tercapai |
| **3** | **Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah wisatawan (orang) | Orang | 796.560 | 820.457 | 1.554.651 | 189,49 | melampaui | 845.070 | 1.803.744 | 213,44 | melampaui | 870.422 | 3.248.141 | 373,17 | melampaui |
| **4** | **Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) | % | 7,30 | 7,3 | 7,28 | 99,73 | belum tercapai | 7,35 | 6,72 | 91,43 | belum tercapai | 7,40 | 5,92 | 80,00 | belum tercapai |
| 4.2 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) | % | 11,90 | 15 | 11,91 | 79,40 | belum tercapai | 13,6 | 11,86 | 87,21 | belum tercapai | 13,70 | 12,64 | 92,26 | belum tercapai |
| 4.3 | Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng (Juta US $) | Juta US $ | 1.050 | 1.700 | 5.775,72 | 339,75 | melampaui | 1.785 | 4.916,97 | 275,46 | melampaui | 1.875 | 3.551 | 189,39 | melampaui |
| 4.4 | Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%) | % | 1,15 | 5 | 5 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 5,25 | -14,37 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 5,50 | -18,79 | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 4.5 | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%) | % | 5,90 | 5,9 | 6,7 | 113,56 | melampaui | 5 | 6,7 | 134,00 | melampaui | 5,00 | 6,64 | 132,80 | melampaui |
| 4.6 | Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%) | % | 100,00 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 4.7 | Peningkatan Sampel Produk yang Memenuhi Standar Uji Mutu (%) | % | 10,50 | 10,5 | -26 | -247,62 | tidak tercapai | 11,55 | 11,68 | 101,13 | melampaui | 12,12 | 1,65 | 13,61 | belum tercapai |
| **5** | **Kehutanan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen) | % | 100 | 90 | 90,59 | 100,66 | melampaui | 90 | 93,4 | 103,78 | melampaui | 90 | 228,87 | 254,30 | melampaui |
| 5.2 | Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar) | Hektar | 30,000 | 30.000 | 397.717 | 1325,72 | melampaui | 40.000 | 39.835 | 99,59 | belum tercapai | 50.000 | 142.145 | 284,29 | melampaui |
| 5.3 | Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar) | Hektar | 448 | 1.000 | 111,35 | 11,14 | belum tercapai | 1.100 | 806 | 73,27 | belum tercapai | 1.200 | 838 | 69,83 | belum tercapai |
| 5.4 | Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar) | Hektar | 305,000 | 299.000 | 1.554 | 0,52 | belum tercapai | 285.000 | 90.812,96 | 31,86 | belum tercapai | 268.000 | 172.949 | 64,53 | belum tercapai |
| 5.5 | Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar) | Hektar | 305,000 | 345.000 | 282.812,40 | 81,97 | belum tercapai | 385.000 | 498.932,07 | 129,59 | melampaui | 425.000 | 476.835,34 | 112,20 | melampaui |
| 5.6 | Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen) | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 70 | 70,00 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 5.7 | Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (hektar) | Hektar | 58,341 | 58,341 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 58,501 | 58,11 | 99,33 | belum tercapai | 58.700 | 58.113 | 99,00 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 5.8 | Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas gold/silver (unit) | Unit | 110 | 150 | 378 | 252,00 | melampaui | 200 | 509 | 254,50 | melampaui | 260 | 608 | 233,85 | melampaui |
| 5.9 | Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%) | % | 1,01 | 0,97 | 1,04 | 107,22 | melampaui | 0,94 | 4,49 | 477,66 | melampaui | 0,91 | 0,93 | 102,20 | melampaui |
| 5.10 | Jumlah Dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (dokumen) | Dokumen | - | 1 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 1 | 1 | 100,00 | tercapai | 1 | 1 | 100,00 | tercapai |
| **6** | **Perkebunan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Penanganan Organisme Penyakit Tanaman (OPT) | % | 70 | 70 | 33 | 47,14 | belum tercapai | 75 | 75 | 100,00 | tercapai | 80 | 80 | 100,00 | tercapai |
| 6.2 | Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) | Unit | 51 | 51 | 51 | 100,00 | tercapai | 53 | 53 | 100,00 | tercapai | 55 | 53 | 96,36 | belum tercapai |
| 6.3 | Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) | % | 50,00 | 50 | 36,54 | 73,08 | belum tercapai | 55 | 38,80 | 70,55 | belum tercapai | 55 | 53 | 96,36 | belum tercapai |
| 6.4 | Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) | % | 80,00 | 80 | 33 | 41,25 | belum tercapai | 80 | 80% | 1,00 | belum tercapai | 80 | 80 | 100,00 | tercapai |
| 6.5 | Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) | STDB | 500 | 500 | 694 | 138,80 | melampaui | 500 | 500 | 100,00 | tercapai | 500 | 500 | 100,00 | tercapai |
| 6.6 | Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%) | % | 13,96 | 13,96 | 14,01 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 14 | 14.88 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 14,05 | 15,45 | 109,96 | melampaui |
| 6.7 | Persentase Peningkatan NTP sub | % | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 137,50 | melampaui | 0,08 | 0,2 | 250,00 | melampaui | 0,08 | 1,09 | 1362,50 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | sektor Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan | % | 0,10 | 0,12 | 1,2 | 1000,00 | melampaui | 0,14 | 2 | 1428,57 | melampaui | 0,16 | 1,06 | 662,50 | melampaui |
| **7** | **Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) | % | 17,5 | 16 | 15,55 | 97,19 | belum tercapai | 16,2 | 15,49 | 95,62 | belum tercapai | 16,20 | 15,29 | 94,38 | belum tercapai |
| 7.2 | Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) | % | 8,75 | 6 | 4,46 | 74,33 | belum tercapai | 6,05 | 5,87 | 97,02 | belum tercapai | 6,10 | 1,21 | 19,84 | belum tercapai |
| **8** | **Transmigrasi** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan | | 5 | 7 | 6 | 85,71 | belum tercapai | 8 | 6 | 75,00 | belum tercapai | 9 | 6 | 66,67 | belum tercapai |
| **9** | **Energi Dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Rasio Elektrifikasi (%) | % | 89,01 | 91,2 | 89,92 | 98,60 | belum tercapai | 93,39 | 93,38 | 99,99 | | 95,58 | 98,1 | 102,64 | melampaui |
| 9.2 | Rasio desa berlistrik (%) | % | 93,79 | 95,03 | 93,57 | 98,46 | belum tercapai | 96,27 | 86,51 | 89,86 | belum tercapai | 97,51 | 98,6 | 101,12 | melampaui |
| 9.3 | Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%) | % | 7 | 9 | 9 | 100,00 | tercapai | 12 | 13 | 108,33 | melampaui | 15 | 15,71 | 104,73 | melampaui |
| **IV.** | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100,00 | tercapai | 1 | 1 | 100,00 | tercapai | 1 | 1 | 100,00 | tercapai |
| 1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100,00 | tercapai | 1 | 1 | 100,00 | tercapai | 1 | 1 | 100,00 | tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | dengan PERKADA (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Penelitian Dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah (%) | % | 95 | 95 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 97 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 97 | 100 | 103,09 | melampaui |
| **3** | **Setda (Administrasi Pemerintahan)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Indeks | 85 | 87 | 85,62 | 98,41 | belum tercapai | 88 | 81,85 | 93,01 | belum tercapai | 90 | 84,77 | 94,19 | belum tercapai |
| 3.2 | Nilai SAKIP | Nilai | B | B | B (62,81) | 89,00 | belum tercapai | BB | B (63,05) | 89,00 | belum tercapai | BB | B (62,30) TA 2024 | 89,00 | belum tercapai |
| 3.3 | Predikat Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | CC | B | B (62,29) | 91,11 | belum tercapai | B | B (63,78) | 91,11 | belum tercapai | BB | B (63,78) TA 2023 | 91,11 | belum tercapai |
| 3.4 | Perda Kelembagaan Organisasi Daerah | Organisasi Daerah | 1 Perda, 5 Pergub | 1 Perda, 5 Pergub | 2 Pergub | 50,00 | belum tercapai | 1 Perda, 5 Pergub | 4 | 50,00 | belum tercapai | 1 Perda, 5 Pergub | 3 | 50,00 | belum tercapai |
| 3.5 | Pengadaan Tepat Waktu (%) | % | - | 20 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 50 | 100 | 200,00 | melampaui | 75 | 100 | 133,33 | melampaui |
| 3.6 | Ketersediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (%) | % | - | 100 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 99 | 99,45 | belum tercapai |
| 3.7 | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | tercapai | 100 | 100% | 1,00 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |
| 3.8 | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi | % | 100 | 100 | 80,25 | 80,25 | belum tercapai | 100 | 100% | 1,00 | belum tercapai | 100 | 100 | 100,00 | tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | kalimantan Tengah | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | % | 90 | 90 | 99,38 | 110,42 | melampaui | 95 | 89,14% | 0,94 | belum tercapai | 98 | 92,13 | 94,01 | belum tercapai |
| 3.10 | Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (rancangan) | Rancangan | 10 | 10 | 3 | 30,00 | belum tercapai | 10 | 9 | 90,00 | belum tercapai | 10 | 13 | 130,00 | melampaui |
| 3.11 | Jumlah Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan) | Rancangan | 50 | 50 | 34 | 68,00 | belum tercapai | 50 | 63 | 126,00 | melampaui | 50 | 51 | 102,00 | melampaui |
| 3.12 | Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan) | Rancangan | 750 | 750 | 110 | 14,67 | belum tercapai | 750 | 619 | 82,53 | belum tercapai | 750 | 502 | 66,93 | belum tercapai |
| 3.13 | Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi (rancangan prohumda) (Di Ubah menjadi Jumlah Ranperda Kabupaten/Kota di Fasilitasi Tahun 2024) | Rancangan | 179 | 185 | 17 | 9,19 | belum tercapai | 191 | 51 | 26,70 | belum tercapai | 194 | 39 | 20,10 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 3.14 | Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara refresif (produk hukum) (Di Ubah menjadi Jumlah Ranperda dan Ranperkada Kabupaten/Kota di Evaluasi Tahun 2024) | Produk Hukum | 81 | 100 | 130 | 130,00 | melampaui | 107 | 530 | 495,33 | melampaui | 110 | 40 | 36,36 | belum tercapai |
| 3.15 | Jumlah Rancangan produk hukum daerah kabupaten.kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan (rancangan prohumda) (Di Ubah menjadi Jumlah Rancangan Peraturan Bupati/Walikota di Fasilitasi Tahun 2024) | Rancangan | 287 | 292 | 113 | 38,70 | belum tercapai | 295 | 530 | 179,66 | melampaui | 300 | 545 | 181,67 | melampaui |
| 3.16 | Jumlah dokumen gugatan perkara hukum ligitasi yang ditandatangani (perkara) | Perkara | 10 | 10 | 4 | 40,00 | belum tercapai | 12 | 30 | 250,00 | melampaui | 14 | 36 | 257,14 | melampaui |
| 3.17 | Jumlah dokumen perkara non litigasi yang ditangani (kasus non litigasi) | Kasus non litigasi | 5 | 10 | 10 | 100,00 | tercapai | 12 | 12 | 100,00 | tercapai | 14 | 14 | 100,00 | tercapai |
| 3.18 | Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan aksi HAM (dokumen) | Dokumen | 1 | 3 | 1 | 33,33 | belum tercapai | 3 | 3 | 100,00 | tercapai | 4 | 3 | 75,00 | belum tercapai |
| 3.19 | Jumlah buku-buku himpunan produk hukum daerah (buku) | Buku | 400 | 500 | 500 | 100,00 | tercapai | 550 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 600 | 0 | 0,00 | tidak bisa dinilai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 3.20 | Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik | % | 80% | 80 | 100 | 125,00 | melampaui | 83 | 100 | 120,48 | melampaui | 86 | 100 | 116,28 | melampaui |
| 3.21 | Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana | % | 2% | 2 | 100 | 5000,00 | melampaui | 2,1 | 100 | 4761,90 | melampaui | 2,20 | 100 | 4545,45 | melampaui |
| 3.22 | Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH | Kali | 146 | 150 | 105 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 150 | 311 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 155 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 3.23 | Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda | Kali | 100 | 100 | 200 | 200,00 | melampaui | 125 | 170 | 136,00 | melampaui | 135 | 189 | 140,00 | melampaui |
| 3.24 | Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan | Surat | 198 | 215 | 2168 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 230 | 586 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 230 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 3.25 | Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kali | 80 | 80 | 159 | 198,75 | melampaui | 85 | 175 | 205,88 | melampaui | 85 | 168 | 197,65 | melampaui |
| 3.26 | Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula | Kali | 150 | 150 | 321 | 214,00 | melampaui | 165 | 257 | 155,76 | melampaui | 165 | 275 | 166,67 | melampaui |
| 3.27 | Jumlah dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen) | Dokumen | 3 | 2 | 2 | 100,00 | tercapai | 2 | 2 | 100,00 | tercapai | 2 | 2 | 100,00 | tercapai |
| 3.28 | Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen) | Dokumen | 1 | 250 | 250 | 100,00 | tercapai | 300 | 300 | 100,00 | tercapai | 350 | 350 | 100,00 | tercapai |
| 3.29 | Jumlah pelayanan kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas) | Kegiatan | - | 250 | 1420 | 568,00 | melampaui | 700 | 1616 | 230,86 | melampaui | 700 | 1480 | 211,43 | melampaui |
| **4** | **Kepegawaian, Pendidikan Serta Pelatihan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Pegawai Perangkat Daerah | % | 85 | 85 | 87% | 1,02 | belum tercapai | 0,9 | 95% | 105,56 | melampaui | 95 | 90 | 94,74 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi | % | 65 | 70 | 61% | 0,87 | belum tercapai | 0,75 | 61% | 81,33 | belum tercapai | 80 | 54 | 67,50 | belum tercapai |
| 4.3 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 60 | 65 | 67% | 1,03 | belum tercapai | 0,7 | 67% | 95,71 | belum tercapai | 75 | 73 | 97,33 | belum tercapai |
| 4.4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | 0 | 54 | 54 | 41 | 75,93 | belum tercapai | 54 | 48 | 88,89 | belum tercapai | 54 | 38 | 70,37 | belum tercapai |
| 4.5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | 0 | 1006 | 1.006,00 | 1010 | 100,40 | melampaui | 1.010,00 | 3141 | 310,99 | melampaui | 1.013 | 2517 | 248,47 | melampaui |
| 4.6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | 0 | 5800 | 6.000,00 | 5995 | 99,92 | belum tercapai | 6.200,00 | 5888 | 94,97 | belum tercapai | 6.400 | 6151 | 96,11 | belum tercapai |
| 4.7 | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 75 | 75,5 | 71,86 | 95,18 | belum tercapai | 76 | 71,89 | 94,59 | belum tercapai | 77,70 | 78,54 | 101,08 | melampaui |
| 4.8 | Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN | % | 0 | 0,1 | 0,07 | 70,00 | belum tercapai | 0,10 | 0,1 | 100,00 | tercapai | 0,10 | 0,06 | 60,00 | belum tercapai |
| 4.9 | Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu | % | 80 | 80 | 83% | 1,04 | belum tercapai | 0,85 | 85% | 100,00 | tercapai | 85 | 85 | 100,00 | tercapai |
| 4.10 | Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN | % | 70 | 70 | 93% | 1,33 | belum tercapai | 0,72 | 98% | 136,11 | melampaui | 72 | 100 | 138,89 | melampaui |
| **5** | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Peserta Pelatihan Dasar | % | 80 | 80 | 84,09 % | 1,05 | belum tercapai | 0,85 | 99,20% | 116,71 | melampaui | 85 | 90,00 | 105,88 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test | % | 80 | 80 | 92,36 % | 1,15 | belum tercapai | 0,85 | 99,48% | 117,04 | melampaui | 85 | 90,00 | 105,88 | melampaui |
| 5.3 | Persentase Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Sosial Kultural yang lulus post test | % | 75 | 75 | 59,53 % | 0,79 | belum tercapai | 0,85 | 24,38% | 28,68 | belum tercapai | 80 | 85,00 | 106,25 | melampaui |
| 5.4 | Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat | % | 80 | 80 | 83,94 % | 1,05 | belum tercapai | 0,8 | 82,1 | 10262,50 | melampaui | 85 | 85,00 | 100,00 | tercapai |
| **6** | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Opini/ Nilai | WTP | WTP | WTP | 100,00 | Tercapai | WTP | WTP | 100,00 | Tercapai | WTP | WTP | 100,00 | Tercapai |
| 6.2 | Persentase SILPA terhadap APBD (%) | % | 6,33 | 6,33 | 16 | 252,76 | Melampaui | 6,58 | 15,23 | 231,46 | Melampaui | 6,83 | 3,70 | 184,59 | Melampaui |
| 6.3 | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 30,96 | 30,96 | 31 | 100,130 | Melampaui | 31,36 | 14,05 | 44,80 | Belum tercapai | 31,90 | 21,00 | 151.90 | Melampaui |
| 6.4 | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 10,03 | 11,03 | 10 | 90,66 | Belum tercapai | 11,43 | 10,09 | 88,27 | Belum tercapai | 11,83 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 6.5 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%) | % | 6,55 | 6,85 | 17,64 | 257,52 | Melampaui | 6,95 | 20 | 34,75 | Belum tercapai | 7,00 | 11,00 | 63,64 | Belum tercapai |
| 6.6 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100,00 | Tercapai | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100,00 | Tercapai | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100,00 | Tercapai |
| **7** | **Penghubung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung | Orang | 1000 | 2.000 | 1800 | 90,00 | belum tercapai | 2.100 | 2092 | 99,62 | belum tercapai | 2.200 | 1639 | 74,50 | belum tercapai |
| 7.2 | Jumlah layanan informasi dan | Orang | 30 | 50 | 50 | 100,00 | tercapai | 100 | 4478 | 4478,00 | melampaui | 150 | 2172 | 1448,00 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| | promosi | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Pengawasan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah | Level | Level 3 | Level 3 | Level 3 | 100,00 | tercapai | Level 3 | Level 3 | 100,00 | tercapai | Level 3 | Level 3 | 100,00 | tercapai |
| 8.2 | Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal | Opini/Nilai | WTP | WTP | WTP | 100,00 | tercapai | WTP | WTP | 100,00 | tercapai | WTP | WTP | 100,00 | tercapai |
| 8.3 | Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah | Tingkat | Tingkat 3 | Tingkat 3 | Tingkat 3 | 100,00 | tercapai | Tingkat 3 | Tingkat 3 | 100,00 | tercapai | Tingkat 3 | Tingkat 3 | 100,00 | tercapai |
| 8.4 | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai : | | | | | | | | | | | | | | |
| | - BPK RI (%) | % | 60 | 60 | 65 | 108,33 | melampaui | 65 | 70 | 107,69 | melampaui | 70 | 76,99 | 109,99 | melampaui |
| | - ITJEN Kemendagri/Tekni s Lainnya (%) | % | 60 | 60 | 65 | 108,33 | melampaui | 65 | 70 | 107,69 | melampaui | 70 | 77,46 | 110,66 | melampaui |
| | - Inspektorat (%) | % | 70 | 70 | 70 | 100,00 | tercapai | 75 | 80 | 106,67 | melampaui | 80 | 84,25 | 105,31 | melampaui |
| 8.5 | Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan (%) | % | 45 | 45 | 40 | 88,89 | belum tercapai | 40 | 35 | 87,50 | belum tercapai | 35 | 88,25 | 252,14 | melampaui |
| 8.6 | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Mininal "B" | % | 60 | 60 | 70 | 116,67 | melampaui | 70 | 80 | 114,29 | melampaui | 80 | 89,74 | 112,18 | melampaui |
| **I.** | **Kemampuan Ekonomi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nilai Tukar Petani/ NTP (%) | % | 107,5 | 107,5 | 121,61 | 113,13 | melampaui | 108,6 | 118,85 | 109,44 | melampaui | 109,7 | 132,99 | 121,23 | melampaui |
| 1.2 | Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Tanaman Pangan | % | 100,1 | 101,1 | 94,62 | 93,59 | belum tercapai | 102,1 | 98,85 | 96,82 | belum tercapai | 103,1 | 96,00 | 93,11 | belum tercapai |
| 1.3 | Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Hortikultura | % | 99,9 | 100,9 | 111,82 | 110,82 | melampaui | 101,9 | 110,14 | 108,09 | melampaui | 102,9 | 104,61 | 101,66 | melampaui |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 1.4 | Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Peternakan | % | 104,3 | 105,4 | 107,74 | 102,22 | melampaui | 106,4 | 103,4 | 97,18 | belum tercapai | 107,5 | 100,69 | 93,67 | belum tercapai |
| **2** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintahan, Fasilitasi Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama | % | 50 | 60 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 70 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 80,0 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| **II.** | **Fasilitas Wilayah/Infrastuktur** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah RTR Provinsi Kalimantan Tengah (Perda/Perkada) | Perda/ Perkada | 13 | 6 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 12 | 9 | 75,00 | belum tercapai | 12 | 15 | 125,00 | melampaui |
| 1.2 | Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kab/Kota) | Kab/Kota | 14 | 14 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 14 | 14 | 100,00 | tercapai | 14 | 14 | 100,00 | tercapai |
| 1.3 | Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang (%) | % | 55,00 | 60 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 80 | 70 | 0,00 | tidak bisa dinilai | 80,00 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai |
| 1.4 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (%) | % | 45,00 | 50 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 60 | 55 | 91,67 | belum tercapai | 60,00 | 15 | 25,00 | belum tercapai |
| 1.5 | Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi) | Informasi | 60,00 | 60 | **BAD** | 0,00 | tidak bisa dinilai | 60 | 60 | 100,00 | tercapai | 60,00 | 15 | 25,00 | belum tercapai |
| **2** | **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit) | Unit | 300 | 300 | 220 | 73,33 | belum tercapai | 315 | 220 | 69,84 | belum tercapai | 318 | 222 | 69,81 | belum tercapai |
| 2.2 | Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit) | Unit | 55 | 55 | 40 | 72,73 | belum tercapai | 56 | 40 | 71,43 | belum tercapai | 57 | 41 | 71,93 | belum tercapai |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja/Realisasi Kinerja/Tingkat Realisasi/Interpretasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi | 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | Interpretasi |
| | | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | | Target | Realisasi | | |
| 2.3 | Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata (buah) | Buah | 140 | 250 | BAD | 0,00 | tidak bisa dinilai | 275 | 2330 | 847,27 | melampaui | 300 | 2330 | 776,67 | melampaui |
| 2.4 | Jumlah Obyek Wisata Unggulan (buah) | Buah | 14 | 14 | 14 | 100,00 | tercapai | 15 | 88 | 586,67 | melampaui | 17 | 88 | 517,65 | melampaui |
| **III.** | **Iklim Berinvestasi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Angka kriminalitas | | 10,5 | 10,1 | 10,47 | -3,66 | tidak tercapai | 9,78 | 11,75 | -20,14 | tidak tercapai | 9,53 | 16,40 | -72,09 | tidak tercapai |
| **IV.** | **Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah peserta pelatihan yang memiliki Sertifikat Kompetensi | Orang | BAD | 96 | 759 | 790,63 | melampaui | 100 | 119 | 119,00 | melampaui | 150 | 170 | 113,33 | melampaui |

## 2.4.5 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Bagian ini mendeskripsikan capaian standar pelayanan minimum di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun jenis layanan, indikator pencapaian, dan total pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.4 Capaian SPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

| No | Jenis Layanan SPM | Total Pencapaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **A** | **Bidang Pendidikan** | | | | | |
| 1 | Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | TAD | 66,71 | 66,31 | 66,32 | 68,33 |

| No | Jenis Layanan SPM | Total Pencapaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | TAD | 22,04 | 19,41 | 62,60 | 62,60 |
| 3 | Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | TAD | 63,07 | 61,93 | 67,01 | 70,52 |
| 4 | Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | TAD | 50,57 | 51,95 | 56,34 | 59,27 |
| 5 | Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | TAD | 62,36 | 62,02 | 67,01 | 70,27 |
| 6 | Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | TAD | 50,13 | 51,18 | 55,83 | 58,56 |
| 7 | Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. | TAD | 54,26 | 61,79 | 66,29 | 67,10 |
| 8 | Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. | TAD | 56,05 | 62,01 | 53,33 | 65,32 |
| 9 | Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | TAD | 60,61 | 65,49 | 60,14 | 75,94 |
| 10 | Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | TAD | 56,54 | 60,60 | 60,41 | 68,98 |
| 11 | Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. | TAD | 58,97 | 62,96 | 56,86 | 67,55 |
| 12 | Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. | TAD | 48,29 | 55,55 | 55,56 | 68,01 |
| 13 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | TAD | 28,05 | 94,83 | 88,72 | 87,14 |
| 14 | Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | TAD | 74,30 | 74,30 | 68,37 | 75,89 |
| 15 | Indeks Iklim Keamanan SMA | TAD | 76,20 | 69,52 | 72,26 | 71,66 |
| 16 | Indeks Iklim Kebinekaan SMA | TAD | 62,01 | 68,40 | 74,65 | 72,78 |
| 17 | Indeks Inklusivitas SMA | TAD | 53,67 | 56,19 | 57,96 | 59,52 |
| 18 | Indeks Iklim Keamanan SMK | TAD | 74,70 | 67,83 | 70,97 | 70,72 |

| No | Jenis Layanan SPM | Total Pencapaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Indeks Iklim Kebinekaan SMK | TAD | 61,12 | 66,62 | 72,86 | 70,74 |
| 20 | Indeks Inklusivitas SMK | TAD | 53,03 | 54,90 | 57,05 | 57,47 |
| 21 | Indeks Iklim Keamanan SDLB | TAD | 81,83 | 72,40 | 74,55 | 78,10 |
| 22 | Indeks Iklim Kebinekaan SDLB | TAD | 53,68 | 68,31 | 68,76 | 72,50 |
| 23 | Indeks Inklusivitas SDLB | TAD | 58,64 | 56,76 | 54,14 | 66,20 |
| 24 | Indeks Iklim Keamanan SMPLB | TAD | 78,84 | 74,74 | 70,89 | 72,00 |
| 25 | Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB | TAD | 58,82 | 64,58 | 66,39 | 65,11 |
| 26 | Indeks Inklusivitas SMPLB | TAD | 59,02 | 59,87 | 69,67 | 67,33 |
| 27 | Indeks Iklim Keamanan SMALB | TAD | 79,28 | 70,18 | 72,06 | 71,00 |
| 28 | Indeks Iklim Kebinekaan SMALB | TAD | 61,11 | 64,25 | 68,10 | 70,60 |
| 29 | Indeks Inklusivitas SMALB | TAD | 59,15 | 60,03 | 66,70 | 64,80 |
| **B** | **Bidang Kesehatan** | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi | 59,16% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **C** | **Bidang Pekerjaan Umum** | | | | | |
| 1 | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak | 55.834 Unit | 77,05% | 77,01% | 77,72% | 78,71% |
| 2 | Rumah Tangga dengan Tangki Septik (Sanitasi Layak) | 68,83% | 66,79% | 86,91% | 86,91% | 78,15% |
| **D.** | **Bidang Perumahan Rakyat** | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi | N/A | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| No | Jenis Layanan SPM | Total Pencapaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi | N/A | 100,00% | 100,00% | 100,00% | N/A |
| **E** | **Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyrakat** | | | | | |
| 1 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | TAD | 59,09% | 100,00% | 100,00% | 96,67% |
| **F** | **Bidang Sosial** | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial | 100,00% | 84,38% | 100,00% | 98,33% | 69,27% |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial | 100,00% | 87,50% | 81,25% | 100,00% | 84,52% |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 90,00% | 68,67% |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial | 100,00% | 80,00% | 280,00% | 92,73% | 98,18% |
| 5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024

## 2.5 Gambaran Umum Keuangan Daerah

### 2.5.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan di daerah dapat dilihat dari gambaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Untuk melakukan analisis mengenai kinerja dan rencana anggaran ke depannya, maka diperlukan analisis untuk melihat kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir. Untuk melihat kondisi tersebut, maka analisis diperlukan untuk melihat setiap komponen keuangan di dalam APBD, diantaranya pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### 2.5.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen yang termuat dalam APBD yang secara umum memuat sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah hingga dana transfer yang didapatkan dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah sendiri terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antardaerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian dari komponen pendapatan daerah tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5.1 Rincian Komponen Pendapatan dalam APBD**

| No | Komponen Pendapatan | Rincian |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 1. Pajak Daerah<br>2. Retribusi Daerah<br>3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan<br>4. Lain-Lain PAD yang Sah |
| 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1. Dana Bagi Hasil<br>2. Dana Alokasi Umum<br>3. Dana Alokasi Khusus |
| 3 | Pendapatan Transfer Antardaerah | |

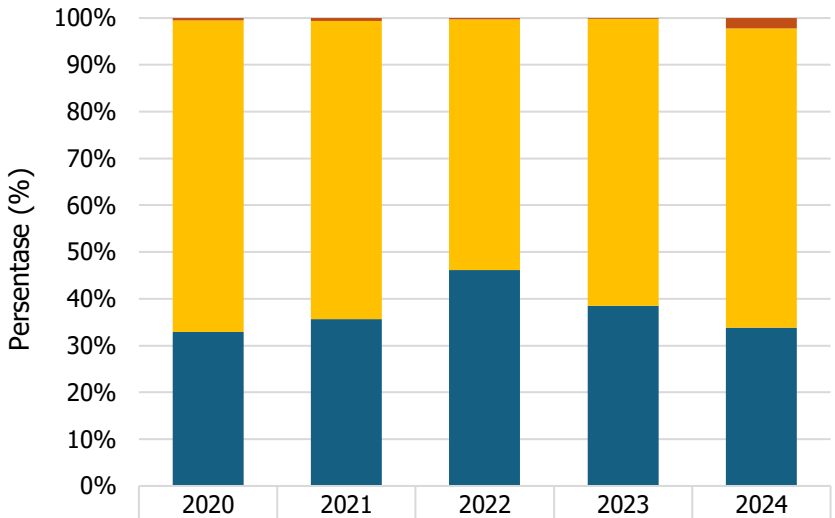
| No | Komponen Pendapatan | Rincian |
|---|---|---|
| 4 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 1. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian<br>2. Hibah<br>3. Dana Darurat<br>4. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2020-2024 beserta dengan rata-rata pertumbuhannya pada periode tersebut. Angka disajikan dalam Rupiah.

**Tabel 2.5.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rp)**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Pertumbuhan Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN DAERAH** | 4,767,014,514,749.24 | 5,199,634,633,666.73 | 5,466,828,340,418.07 | 6,730,216,813,007.10 | 8,339,221,910,260.99 | 15.31% |
| **Pendapatan Asli Daerah** | 1,570,137,570,176.27 | 1,851,575,071,028.73 | 2,523,597,744,203.57 | 2,589,901,319,397.60 | 2,823,914,924,498.71 | 16.47% |
| Pajak Daerah | 1,243,223,219,389.33 | 1,415,408,749,380.52 | 2,095,648,784,108.98 | 2,248,569,870,237.08 | 2,370,006,827,406.00 | 18.65% |
| Retribusi Daerah | 14,374,692,453.00 | 24,014,080,797.00 | 23,718,105,754.00 | 26,054,701,474.00 | 11,804,668,687.00 | 5.25% |
| Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | 79,366,317,748.75 | 95,727,355,949.00 | 90,409,709,729.00 | 1,338,932,578.29 | 38,850,939,359.67 | 679.54% |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 233,173,340,585.94 | 316,426,884,902.21 | 313,821,144,611.59 | 313,937,815,108.23 | 403,252,489,046.04 | 15.84% |
| **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | 3,170,347,450,809.00 | 3,312,603,775,771.00 | 2,930,695,230,475.00 | 4,127,977,388,415.00 | 5,330,645,950,460.00 | 15.74% |
| Dana Bagi Hasil | 585,718,591,623.00 | 806,872,060,679.00 | 895,708,473,507.00 | 1,930,409,980,378.00 | 3,272,325,229,000.00 | 58.45% |
| Dana Alokasi Umum | 1,439,305,729,000.00 | 1,431,363,200,000.00 | 1,422,689,360,003.00 | 1,493,874,183,027.00 | 1,590,326,050,894.00 | 2.58% |
| Dana Alokasi Khusus | 1,078,425,745,186.00 | 1,052,212,748,092.00 | 565,046,458,965.00 | 660,675,565,010.00 | 453,282,517,566.00 | -15.80% |
| Dana Insentif Daerah | 63,222,385,000.00 | 18,725,767,000.00 | 41,180,938,000.00 | 38,617,660,000.00 | 0.00 | -14.17% |
| Insentif Fiskal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,042,153,000.00 | |
| **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | 3,675,000,000.00 | 3,430,000,000.00 | 6,070,000,000.00 | 4,400,000,000.00 | 3,670,000,000.00 | 6.55% |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | 26,529,493,763.97 | 35,455,786,867.00 | 12,535,365,739.50 | 12,338,105,194.50 | 184,661,035,302.28 | 341.03% |
| Hibah | 5,608,344,996.00 | 7,682,938,354.00 | 12,375,322,513.00 | 10,236,951,429.50 | 9,357,191,000.00 | 18.05% |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 20,921,148,767.97 | 27,772,848,513.00 | 160,043,226.50 | 2,101,153,765.00 | 175,303,844,302.28 | 2347.35% |

Secara proporsi struktur pendapatan, gambaran keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020-2024 terlihat sebagai berikut:




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 0,56% | 0,68% | 0,23% | 0,18% | 2,21% |
| Pendapatan Transfer | 66,51% | 63,71% | 53,61% | 61,33% | 63,92% |
| Pendapatan Asli Daerah | 32,94% | 35,61% | 46,16% | 38,48% | 33,86% |

**Gambar 2.5.1 Proporsi Jenis Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah**
**Tahun 2020-2024**

Data menunjukkan bahwa secara umum proporsi pendapatan transfer dari pusat, baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil masih menjadi mayoritas sumber pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020-2024. Walaupun demikian, sempat terjadi kenaikan proporsi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2022, tetapi kembali menurun pada periode 2022-2024. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh sumber pajak daerah, disusul oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi. Pajak daerah sendiri menyusun sekitar 70%-80% dari Pendapatan Asli Daerah pada periode 2020-2024.

Dari sisi pendapatan transfer, data menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sebelum tahun 2023 mendominasi pendapatan transfer di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, Dana Alokasi Umum bukan lagi menjadi sumber dominan pendapatan transfer daerah sejak 2023 akibat adanya kenaikan

signifikan pada alokasi Dana Bagi Hasil dalam bentuk pajak dan nonpajak (sumber daya alam) yang diakibatkan perubahan pengaturan pada formulasi pembagian dana tersebut kepada daerah. Secara rata-rata, kenaikan Dana Bagi Hasil pada periode 2020-2024 secara rata-rata mencapai 58,45%. Di samping itu, tampak bahwa Dana Alokasi Khusus bagi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren penurunan setiap tahunnya.

Dari perkembangan historis pendapatan daerah tersebut, terdapat beberapa catatan penting. Pertama, Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatannya, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada pajak. Data menunjukkan mayoritas pajak daerah ini disumbang oleh pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Maka, tidak menjadi baik dalam jangka panjang bagi pembangunan apabila sumber pajak ini menjadi penopang utama. Dengan kata lain, kenaikan pajak tersebut kemudian akan bergantung seberapa besar kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Tengah. Di sisi lain, kendaraan bermotor mengeluarkan polusi yang tidak baik bagi lingkungan. Maka, upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi pendapatan daerah perlu dilakukan dalam jangka waktu ke depan. Kedua, terdapat pola kenaikan terhadap Dana Bagi Hasil yang ditransfer ke Provinsi Kalimantan Tengah yang disumbangkan paling banyak melalui Dana Bagi Hasil Royalti Mineral dan Batubara. Dalam jangka panjang, sumber pendapatan ini bisa jadi akan mengalami penurunan apabila terdapat penurunan produktivitas penambangan mineral dan batubara. Kondisi ini termasuk fluktuasinya pada harga pada pasar internasional yang sangat sensitif. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap alokasi Dana Bagi Hasil ini dalam jangka panjang. Diversifikasi pendapatan perlu disiapkan untuk menghadapi risiko-risiko tersebut di masa yang akan datang.

#### 2.5.1.2 Perkembangan Belanja Daerah

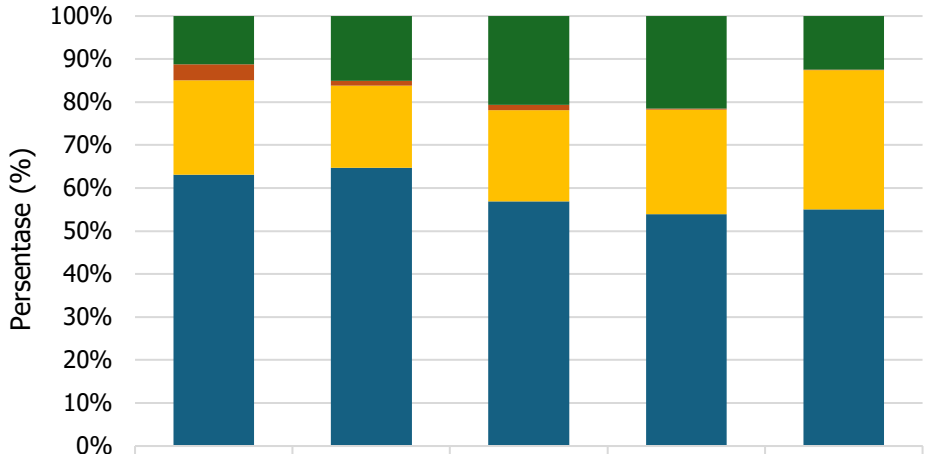
Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) anggaran,

untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kemudian, Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Perkembangan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024 terlihat sebagaimana berikut ini:

**Tabel 2.5.3 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rp)**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Pertumbuhan Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BELANJA** | 4,466,805,961,013.31 | 4,584,753,691,272.38 | 5,147,570,980,714.33 | 6,326,371,485,915.40 | 9,135,601,196,941.86 | 20.56% |
| **Belanja Operasi** | 3,172,105,602,013.78 | 2,967,377,836,187.83 | 2,925,693,849,067.49 | 3,412,541,268,044.00 | 5,022,137,124,608.01 | 13.99% |
| Belanja Pegawai | 1,519,642,134,846.00 | 1,191,987,943,839.00 | 1,168,898,164,101.00 | 1,249,271,775,759.00 | 1,488,211,963,286.00 | 0.63% |
| Belanja Barang dan Jasa | 604,276,917,767.53 | 1,009,510,479,362.75 | 1,226,327,884,168.70 | 1,523,833,347,472.40 | 2,242,214,344,554.45 | 39.99% |
| Belanja Subsidi | 0.00 | 0.00 | 32,800,000.00 | 146,097,500.00 | 174,875,000.00 | |
| Belanja Hibah | 1,028,723,379,193.25 | 746,871,615,222.08 | 488,977,897,901.79 | 599,677,891,463.00 | 881,125,105,767.56 | 1.91% |
| Belanja Bantuan Sosial | 19,463,170,207.00 | 19,007,797,764.00 | 41,457,102,896.00 | 39,612,155,850.00 | 410,410,836,000.00 | 261.85% |
| **Belanja Modal** | 1,108,301,881,143.53 | 872,467,667,935.12 | 1,091,793,384,959.01 | 1,537,607,579,233.00 | 2,957,791,111,824.85 | 34.26% |
| Belanja Modal Tanah | 50,638,019.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235,409,636.00 | 0.00 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 226,420,242,082.00 | 145,810,298,263.10 | 232,055,176,661.56 | 312,460,672,598.00 | 811,450,292,030.03 | 54.47% |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 131,198,367,274.03 | 166,853,139,147.26 | 278,339,668,817.35 | 729,057,225,725.00 | 1,034,917,180,090.33 | 74.47% |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 711,922,419,210.51 | 546,205,609,697.76 | 579,294,527,770.10 | 477,850,366,407.00 | 1,091,905,743,304.49 | 23.44% |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 38,522,674,557.99 | 13,598,620,827.00 | 2,104,011,710.00 | 14,003,904,867.00 | 15,856,535,900.00 | 107.40% |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 187,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,661,360,500.00 | |
| **Belanja Tak Terduga** | 186,398,477,856.00 | 55,629,257,070.00 | 64,502,996,563.00 | 11,165,581,446.00 | 18,325,909,159.00 | -18.19% |
| **Belanja Transfer** | 564,218,836,044.25 | 689,278,930,079.43 | 1,065,580,750,124.83 | 1,365,057,057,192.00 | 1,137,347,051,350.00 | 22.05% |
| Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan | 555,738,836,044.25 | 676,788,118,479.43 | 1,036,192,618,224.83 | 1,343,717,357,192.00 | 1,131,963,051,350.00 | 22.20% |
| Belanja Transfer Bantuan Keuangan | 8,480,000,000.00 | 12,490,811,600.00 | 29,388,131,900.00 | 21,339,700,000.00 | 5,384,000,000.00 | 20.10% |

Secara proporsi struktur pendapatan, gambaran keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020-2024 terlihat sebagai berikut:




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Transfer | 11,21% | 15,03% | 20,70% | 21,58% | 12,45% |
| Belanja Tidak Terduga | 3,70% | 1,21% | 1,25% | 0,18% | 0,20% |
| Belanja Modal | 22,03% | 19,03% | 21,21% | 24,30% | 32,38% |
| Belanja Operasi | 63,05% | 64,72% | 56,84% | 53,94% | 54,97% |

**Gambar 2.5.2 Proporsi Jenis Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah**
**Tahun 2020-2024**

Data belanja tersebut menunjukkan bahwa mayoritas belanja di Provinsi Kalimantan Tengah dialokasikan untuk belanja operasi, termasuk di dalamnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hingga belanja hibah. Namun demikian, tren ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut kemudian dialokasikan pada belanja modal, yaitu belanja untuk pengadaan aset daerah, seperti tanah, bangunan dan gedung, hingga peralatan dan mesin. Belanja transfer tampak mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan. Di sisi lain, belanja tidak terduga mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dalam konteks belanja, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam konteks belanja. Peraturan perundang-undangan menegaskan adanya alokasi 30% maksimal bagi pemerintah daerah untuk melakukan belanja pegawai dari total belanja. Dalam hal ini, alokasi belanja pegawai di Provinsi Kalimantan Tengah tampak mengalami penurunan secara proporsi setiap tahunnya, yaitu sebesar 34,02% pada tahun 2020 menjadi

16,29% pada tahun 2024. Di samping itu, terdapat kewajiban bagi pemerintah daerah melakukan belanja infrastruktur minimal 40% dari total belanja paling lambat tahun 2027. Dalam konteks ini, representasi belanja yang mendekati konteks infrastruktur adalah belanja modal. Data menunjukkan bahwa secara historis belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat mendekati 40%. Per 2024, proporsi belanja modal terhadap total belanja mencapai 32,36%. Harapannya, beberapa waktu ke depan dengan batas wkatu 2027, alokasi belanja modal telah mencapai minimal 40% di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 2.5.1.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran umum mengenai pembiayaan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 terlihat sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.5.4 Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024**

| Tahun | Penerimaan Pembiayaan | Pengeluaran Pembiayaan |
|---|---|---|
| 2020 | 610,945,412,699.44 | 0.00 |
| 2021 | 346,955,413,698.32 | 130,600,000,000.00 |
| 2022 | 831,236,356,092.68 | 210,600,000,000.00 |
| 2023 | 939,893,715,796.73 | 230,600,000,000.00 |
| 2024 | 1,306,068,069,036.43 | 131,200,000,000.00 |

# Realisasi APBD Tahun 2020-2024 Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

| NO | URAIAN | REALISASI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| **1** | **PENDAPATAN** | **4.767.014.514.749,24** | **5.199.634.633.666,73** | **5.466.828.340.418,07** | **6.730.216.813.007,10** | **8.339.221.910.260,99** |
| | A. Pendapatan Asli Daerah | 1.570.137.570.176,27 | 1.851.575.071.028,73 | 2.523.597.744.203,57 | 2.589.901.319.397,60 | 2.823.914.924.498,71 |
| | B. Pendapatan Transfer | 3.170.347.450.809 | 3.312.603.775.771 | 2.930.695.230.475 | 4.127.977.388.415 | 5.330.645.950.460 |
| | C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 26.529.493.763,97 | 35.455.786.867 | 12.535.365.739,50 | 12.338.105.194,50 | 184.661.035.302,28 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | 4.767.014.514.749,24 | 5.199.634.633.666,73 | 5.466.828.340.418,07 | 6.730.216.813.007,10 | 8.339.221.910.260,99 |
| **2** | **BELANJA** | **5.031.024.797.057,56** | **4.584.753.691.272,38** | **5.147.570.980.714,33** | **6.326.371.485.915** | **9.135.601.196.941,86** |
| | A. Belanja Operasi | 3.172.105.602.013,78 | 2.967.377.836.187,83 | 2.925.693.849.067,49 | 3.412.541.268.044 | 5.022.137.124.608,01 |
| | B. Belanja Modal | 1.108.301.881.143,53 | 872.467.667.935,12 | 1.091.793.384.959,01 | 1.537.607.579.233 | 2.957.791.111.824,85 |
| | C. Belanja Tak Terduga | 186.398.477.856 | 55.629.257.070 | 64.502.996.563 | 11.165.581.446 | 18.325.909.159 |
| | D. Belanja Transfer | 564.218.836.044,25 | 689.278.930.079,43 | 1.065.580.750.124,83 | 1.365.057.057.192 | 1.137.347.051.350 |
| | **JUMLAH BELANJA** | 5.031.024.797.057,56 | 4.584.753.691.272,38 | 5.147.570.980.714,33 | 6.326.371.485.915 | 9.135.601.196.941,86 |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | -.264.010.282.308,32 | 614.880.942.394,35 | 319.257.359.703,74 | 403.845.327.092,10 | -.796.379.286.680,87 |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **610.945.412.699,44** | **477.555.413.698,32** | **1.041.836.356.092,68** | **1.170.493.715.796,73** | **1.437.268.069.036,43** |
| | A. Penerimaan Pembiayaan | 610.945.412.699,44 | 346.955.413.698,32 | 831.236.356.092,68 | 939.893.715.796,73 | 1.306.068.069.036,43 |
| | B. Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 130.600.000.000 | 210.600.000.000 | 230.600.000.000 | 131.200.000.000 |
| | **JUMLAH PEMBIAYAAN** | 610.945.412.699,44 | 477.555.413.698,32 | 1.041.836.356.092,68 | 1.170.493.715.796,73 | 1.437.268.069.036,43 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | 610.945.412.699,44 | 216.355.413.698,32 | 620.636.356.092,68 | 709.293.715.796,73 | 1.174.868.069.036,43 |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)** | **346.935.130.391,12** | **831.236.356.092,67** | **939.893.715.796,42** | **1.113.139.042.888,83** | **378.488.782.355,56** |

### 2.5.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas daerah setiap tahunnya yang didapatkan dari laporan keuangan daerah *audited* pada tahun yang berkenaan. Gambaran mengenai neraca daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 20220-2024 terlihat sebagai berikut :

## Tabel 2.5.5 Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | | |
| Kas di Kas Daerah | 276,735,299,340.20 | 684,307,570,444.95 | 812,676,920,084.69 | 95,516,542,158.51 | 366,369,741,734.41 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 928.12 | 0.01 |
| Kas di BLUD | 60,362,374,642.53 | 143,301,983,392.53 | 126,739,904,625.53 | 17,060,462,235.60 | 11,812,101,648.94 |
| Kas Dana BOS | 3,844,736,884.53 | 3,620,042,255.20 | 468,155,804.20 | 490,092,087.20 | 0.00 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Kas Lainnya | 804,681,906.00 | 6,760,000.00 | 8,735,182.00 | 2,275,182.00 | 0.00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000,000.00 | 0.00 |
| Kas Dana BOSP | | | | 0.00 | 306,938,972.20 |
| Investasi Jangka Pendek | | 0.00 | 0.00 | | |
| Piutang Pajak Daerah | 50,255,029,479.49 | 61,213,546,552.00 | 92,762,572,053.00 | 90,806,546,523.00 | 96,504,344,302.00 |
| Piutang Retribusi Daerah | | 606,782,399.00 | 670,493,977.00 | 842,833,573.00 | 855,781,335.40 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 10,666.00 | 10,666.00 | 10,666.00 | 0.00 |
| Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | | 60,020,038,578.00 | 30,648,934,535.00 | 39,980,414,653.00 | 27,070,101,348.00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625,019,009,000.00 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | | 490,000,000.00 | 1,210,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0.00 |
| Piutang Lainnya | 466,166,718.00 | 317,887,578.00 | 251,636,860.00 | 247,589,231.00 | 235,208,731.00 |
| Penyisihan Piutang | (10,573,621,951.49) | (31,067,988,090.20) | (14,499,489,191.54) | (5,572,161,945.96) | (26,811,109,237.94) |
| Beban Dibayar Dimuka | 401,209,837.16 | 454,825,849.63 | 19,225,434,816.90 | 3,038,575,812.44 | 1,332,498,863.36 |
| Persediaan | 524,130,339,990.38 | 617,268,392,515.29 | 472,883,355,459.47 | 764,961,782,595.63 | 1,021,130,994,437.57 |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | 911,615,100,626.66 | 1,540,539,852,140.41 | 1,543,046,664,972.26 | 1,037,614,963,699.54 | 2,123,825,611,134.95 |
| | | | | | |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | | | | |
| **Investasi Jangka Panjang Non Permanen** | | 0.00 | 0.00 | | |
| Investasi kepada BUMN | | 0.00 | 0.00 | | |
| Investasi kepada BUMD | | 0.00 | 0.00 | | |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Investasi dalam Obligasi | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Dana Bergulir | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Deposito Jangka Panjang | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Investasi Non Permanen Lainnya | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Investasi Permanen Lainnya | | 0.00 | 0.00 | | |
| **JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen** | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **Investasi Jangka Panjang Permanen** | 740,853,312,655.11 | 874,042,280,673.60 | 1,112,459,652,977.56 | 1,372,662,597,197.25 | 1,611,157,097,957.96 |
| Penyertaan Modal | | 874,042,280,673.60 | 1,112,459,652,977.56 | 1,372,662,597,197.25 | 1,611,157,097,957.96 |
| Investasi Pemberian Pinjaman Daerah | | 0.00 | 0.00 | | |
| **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | 740,853,312,655.11 | 874,042,280,673.60 | 1,112,459,652,977.56 | 1,372,662,597,197.25 | 1,611,157,097,957.96 |
| | | | | | |
| **ASET TETAP** | | | | | |
| Tanah | 1,942,707,809,590.03 | 1,973,093,479,640.03 | 2,155,521,534,006.03 | 2,172,109,593,734.03 | 2,191,352,084,917.03 |
| Peralatan dan Mesin | 1,421,474,858,048.81 | 1,561,423,069,103.10 | 1,849,295,918,994.95 | 2,135,350,468,849.13 | 2,925,103,879,707.06 |
| Gedung dan Bangunan | 2,299,087,026,371.56 | 2,483,591,874,643.53 | 2,715,886,871,363.96 | 3,000,081,343,524.57 | 4,017,942,014,831.12 |
| Jalan, irigasi, dan Jaringan | 7,278,901,471,182.79 | 7,978,360,668,105.55 | 8,256,359,399,981.65 | 8,859,691,111,731.65 | 10,463,762,623,473.80 |
| Aset Tetap Lainnya | 167,691,287,045.72 | 181,119,003,316.47 | 190,253,526,289.47 | 200,863,690,634.69 | 229,866,385,274.69 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 353,261,624,986.76 | 259,333,640,176.16 | 579,105,364,265.34 | 954,219,685,623.34 | 748,429,044,906.52 |
| Akumulasi Penyusutan | (4,623,320,573,409.49) | (4,542,849,317,889.71) | (7,062,189,026,385.23) | (7,717,813,510,925.86) | (8,647,201,372,400.25) |
| **JUMLAH ASET TETAP** | 8,839,803,503,816.18 | 9,894,072,417,095.13 | 8,684,233,588,516.17 | 9,604,502,383,171.56 | 11,929,254,660,709.90 |
| **DANA CADANGAN** | | | | | |
| Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 | 80,000,000,000.00 | 180,000,000,000.00 | 0.00 |
| Jumlah Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 | 80,000,000,000.00 | 180,000,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| **ASET LAINNYA** | | | | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 10,135,189.00 | 548,447,153.00 | 546,107,524.00 | 546,107,524.00 | 546,107,524.00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Aset Tidak Berwujud | 116,884,630,811.99 | 118,484,839,311.99 | 120,261,396,771.99 | 125,656,772,843.99 | 131,379,745,343.99 |
| Aset Lain-Lain | 484,374,550,329.66 | 564,597,091,119.84 | 505,328,491,523.53 | 703,122,676,785.51 | 706,295,039,877.51 |
| Tagihan TGR | 546,107,524.00 | | | | |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (60,271,024,175.71) | (100,407,745,505.42) | (81,491,378,530.80) | (92,184,235,310.99) | (101,445,441,002.99) |
| Akumulasi Penyusunan Aset Lainnya | | (78,289,861,673.60) | 0.00 | (213,309,311,797.98) | (215,335,915,001.98) |
| Kas yang Dibatasi Penggunaannya | | | | 969,995,565,297.00 | 0.00 |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | | 0.00 | 387,729,185,378.00 | 1,311,837,156,000.00 | 129,012,318,000.00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 541,544,399,678.94 | 504,932,770,405.81 | 932,373,802,666.72 | 2,805,664,731,341.53 | 650,451,854,740.53 |
| **JUMLAH ASET** | 11,033,816,316,776.90 | 12,813,587,320,314.90 | 12,352,113,709,132.70 | 15,000,444,675,409.80 | 16,314,689,224,543.30 |
| | | | | | |
| **KEWAJIBAN** | | | | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) | 846,162.00 | 0.00 | 0.00 | 66,702,314.86 | 66,702,314.86 |
| Utang Bunga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000,000.00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 67,516,800.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | | |
| Utang Belanja | 317,760,447,726.19 | 97,248,360,799.00 | 79,034,529,150.80 | 313,145,955,003.25 | 141,038,144,086.00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 66,702,314.86 | 321,514,387,752.96 | 525,950,776,178.84 | | |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | 317,895,513,003.05 | 418,775,248,551.96 | 604,985,305,329.64 | 313,212,657,318.11 | 154,104,846,400.86 |
| **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utang kepada Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | 317,895,513,003.05 | 418,775,248,551.96 | 604,985,305,329.64 | 313,212,657,318.11 | 154,104,846,400.86 |
| | | | | | |
| **EKUITAS** | | | | | |
| **EKUITAS** | 10,715,920,803,773.80 | 12,394,812,071,763.00 | 11,747,128,403,803.10 | 14,687,232,018,091.70 | 16,160,584,378,142.50 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | 11,033,816,316,776.90 | 12,813,587,320,315.00 | 12,352,113,709,132.70 | 15,000,444,675,409.80 | 16,314,689,224,543.30 |

Tabel di atas menunjukkan mengenai gambaran neraca keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 berdasarkan hasil laporan keuangan *audited*. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aset secara keseluruhan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tersebut. Hal ini diiringi dengan peningkatan pada komponen aset lancar dan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, kewajiban dari pemerintah daerah mengalami tren penurunan yang seluruhnya dikontribusikan oleh kewajiban jangka pendek. Kewajiban ini paling banyak berasal dari utang belanja dan utang jangka pendek lainnya.

### 2.5.3 Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah dilakukan untuk melihat gambaran mengenai potensi pendapatan dan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode 2025-2029 dan menjadi gambaran umum mengenai anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan. Gambaran mengenai proyeksi keuangan daerah dalam konteks pendapatan dan belanja terlihat sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.5.6 Proyeksi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026-2030 (dalam Rp)**

| NO | URAIAN | BASELINE TAHUN 2024 | REALISASI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **1** | **PENDAPATAN** | **9.227.019.051.847** | **7.070.245.279.250** | **7.775.142.435.575** | **8.550.429.307.533** | **9.583.144.866.686** | **10.234.535.873.275** |
| | A. Pendapatan Asli Daerah | 2.699.466.041.860 | 2.770.739.369.250 | 3.045.813.306.175 | 3.348.294.636.793 | 3.860.924.100.472 | 4.049.016.510.519 |
| | B. Pendapatan Transfer | 6.519.487.759.987 | 4.298.232.194.000 | 4.728.055.413.400 | 5.200.860.954.740 | 5.720.947.050.214 | 6.184.245.646.756 |
| | C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 8.065.250.000 | 1.273.716.000 | 1.273.716.000 | 1.273.716.000 | 1.273.716.000 | 1.273.716.000 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **9.227.019.051.847** | **7.070.245.279.250** | **7.775.142.435.575** | **8.550.429.307.533** | **9.583.144.866.686** | **10.234.535.873.275** |
| **2** | **BELANJA** | **9.135.601.196.941,86** | **7.377.076.192.922** | **8.112.564.557.901** | **8.921.496.979.625** | **9.803.280.139.216** | **10.783.608.153.136** |
| | A. Belanja Operasi | 5.022.137.124.608,01 | 3.666.445.883.675 | 4.031.987.272.290 | 4.434.030.942.359 | 4.872.281.812.477 | 5.359.509.993.724 |
| | B. Belanja Modal | 2.957.791.111.824,85 | 2.463.434.077.619 | 2.709.036.260.785 | 2.979.163.819.997 | 3.273.618.494.155 | 3.600.980.343.570 |
| | C. Belanja Tak Terduga | 18.325.909.159 | 110.213.827.275 | 121.202.047.678 | 133.287.531.282 | 146.461.407.901 | 161.107.548.691 |
| | D. Belanja Transfer | 1.137.347.051.350 | 1.136.982.404.353 | 1.250.338.977.148 | 1.375.014.685.987 | 1.510.918.424.683 | 1.662.010.267.151 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **9.135.601.196.941,86** | **7.377.076.192.922** | **8.112.564.557.901** | **8.921.496.979.625** | **9.803.280.139.216** | **10.783.608.153.136** |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | 91.417.854.905,14 | (306.830.913.672) | (337.422.122.326) | (371.067.672.092) | (220.135.272.530) | (549.072.279.861) |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **91.417.854.905,14** | **306.830.913.672** | **337.422.122.326** | **371.067.672.092** | **220.135.272.530** | **549.072.279.861** |
| | A. Penerimaan | 91.417.854.905,14 | 306.830.913.672 | 337.422.122.326 | 371.067.672.092 | 220.135.272.530 | 549.072.279.861 |
| | B. Pengeluaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **JUMLAH PEMBIAYAAN** | **91.417.854.905,14** | **306.830.913.672** | **337.422.122.326** | **371.067.672.092** | **220.135.272.530** | **549.072.279.861** |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | | | | | | |

## Tabel 2.5.7 Proyeksi Belanja per Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026-2030 (dalam Rp)

| KODE | URUSAN | PAGU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.476.911.000.000,000 | 1.476.911.000.000,00 | 1.496.766.514.789,770 | 1.496.766.514.789,77 | 1.557.766.976.642,890 | 1.557.766.976.642,89 | 1.626.299.049.495,120 | 1.626.299.049.495,12 | 1.705.834.600.037,130 | 1.705.834.600.037,13 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 697.640.023.336,240 | 697.640.023.336,24 | 707.019.059.582,350 | 707.019.059.582,35 | 735.833.499.742,080 | 735.833.499.742,08 | 768.205.604.021,830 | 768.205.604.021,83 | 805.775.358.283,390 | 805.775.358.283,39 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.283.326.300.589,140 | 1.283.326.300.589,14 | 1.300.579.272.732,650 | 1.300.579.272.732,65 | 1.353.584.157.281,690 | 1.353.584.157.281,69 | 1.413.133.454.108,070 | 1.413.133.454.108,07 | 1.482.243.958.290,380 | 1.482.243.958.290,38 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 279.167.998.543,000 | 279.167.998.543,00 | 282.790.612.343,250 | 282.790.612.343,25 | 294.230.902.831,590 | 294.230.902.831,59 | 307.102.224.441,220 | 307.102.224.441,22 | 322.064.243.382,180 | 322.064.243.382,18 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | 77.679.820.564,910 | 77.679.820.564,91 | 78.724.144.038,770 | 78.724.144.038,77 | 81.932.532.987,810 | 81.932.532.987,81 | 85.537.055.617,880 | 85.537.055.617,88 | 89.720.318.722,180 | 89.720.318.722,18 |

| KODE | URUSAN | PAGU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| | MASYARAKAT | | | | | | | | | | |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 57.272.097.269,000 | 57.272.097.269,00 | 59.042.060.370,610 | 59.042.060.370,61 | 61.407.554.557,270 | 61.407.554.557,27 | 64.065.111.811,860 | 64.065.111.811,86 | 67.149.365.221,160 | 67.149.365.221,16 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 32.289.090.495,390 | 32.289.090.495,39 | 32.723.180.845,620 | 32.723.180.845,62 | 34.056.806.415,420 | 34.056.806.415,42 | 35.555.092.316,250 | 35.555.092.316,25 | 37.293.942.809,840 | 37.293.942.809,84 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21.329.909.105,100 | 21.329.909.105,10 | 21.016.983.249,480 | 21.016.983.249,48 | 21.873.418.599,740 | 21.873.418.599,74 | 22.835.697.698,380 | 22.835.697.698,38 | 23.952.512.341,860 | 23.952.512.341,86 |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 11.479.784.825,510 | 11.479.784.825,51 | 11.634.118.456,570 | 11.634.118.456,57 | 12.108.264.953,100 | 12.108.264.953,10 | 12.640.953.415,700 | 12.640.953.415,70 | 13.259.170.089,690 | 13.259.170.089,69 |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 1.450.000.000,000 | 1.450.000.000,00 | 1.600.000.000,000 | 1.600.000.000,00 | 1.750.000.000,000 | 1.750.000.000,00 | 1.900.000.000,000 | 1.900.000.000,00 | 2.050.000.000,000 | 2.050.000.000,00 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | 110.945.357.046,000 | 110.945.357.046,00 | 112.436.900.664,000 | 112.436.900.664,00 | 117.019.247.211,000 | 117.019.247.211,00 | 122.167.367.370,000 | 122.167.367.370,00 | 128.142.067.303,000 | 128.142.067.303,00 |

| KODE | URUSAN | PAGU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9.614.411.366,110 | 9.614.411.366,11 | 9.743.413.652,260 | 9.743.413.652,26 | 10.140.504.799,710 | 10.140.504.799,71 | 10.586.624.035,840 | 10.586.624.035,84 | 11.104.371.968,690 | 11.104.371.968,69 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 35.198.012.855,550 | 35.198.012.855,55 | 35.671.213.112,590 | 35.671.213.112,59 | 37.124.987.257,230 | 37.124.987.257,23 | 38.758.256.151,590 | 38.758.256.151,59 | 40.653.761.927,120 | 40.653.761.927,12 |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.771.500.000,000 | 1.771.500.000,00 | 2.395.000.000,000 | 2.395.000.000,00 | 2.492.716.000,000 | 2.492.716.000,00 | 2.602.395.504,000 | 2.602.395.504,00 | 2.729.652.637,000 | 2.729.652.637,00 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 42.902.601.968,280 | 42.902.601.968,28 | 43.479.382.321,260 | 43.479.382.321,26 | 45.251.377.068,920 | 45.251.377.068,92 | 47.242.156.637,660 | 47.242.156.637,66 | 49.552.574.846,500 | 49.552.574.846,50 |

| KODE | URUSAN | PAGU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 53.942.277.867,200 | 53.942.277.867,20 | 54.706.269.870,130 | 54.706.269.870,13 | 56.898.974.060,700 | 56.898.974.060,70 | 59.362.953.081,450 | 59.362.953.081,45 | 62.263.396.476,930 | 62.263.396.476,93 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 47.263.369.407,000 | 47.263.369.407,00 | 47.898.775.690,980 | 47.898.775.690,98 | 49.850.882.055,250 | 49.850.882.055,25 | 52.044.011.279,310 | 52.044.011.279,31 | 54.589.268.309,870 | 54.589.268.309,87 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 15.667.202.335,550 | 15.667.202.335,55 | 15.877.831.390,170 | 15.877.831.390,17 | 16.524.929.677,350 | 16.524.929.677,35 | 17.251.923.959,230 | 17.251.923.959,23 | 18.095.644.104,330 | 18.095.644.104,33 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 32.623.300.008,630 | 32.623.300.008,63 | 33.061.885.959,860 | 33.061.885.959,86 | 34.409.317.435,210 | 34.409.317.435,21 | 35.923.113.711,950 | 35.923.113.711,95 | 37.679.964.413,640 | 37.679.964.413,64 |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 287.915.617,730 | 287.915.617,73 | 303.103.720,000 | 303.103.720,00 | 333.412.502,000 | 333.412.502,00 | 367.197.424,000 | 367.197.424,00 | 386.497.213,000 | 386.497.213,00 |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 364.000.000,000 | 364.000.000,00 | 318.781.397,000 | 318.781.397,00 | 350.657.864,000 | 350.657.864,00 | 386.190.271,000 | 386.190.271,00 | 406.488.318,000 | 406.488.318,00 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | 33.663.760.853,900 | 33.663.760.853,90 | 58.145.360.853,000 | 58.145.360.853,00 | 59.145.360.853,000 | 59.145.360.853,00 | 60.145.360.853,000 | 60.145.360.853,00 | 61.145.360.853,000 | 61.145.360.853,00 |

| KODE | URUSAN | PAGU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| | KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 20.000.455.945,200 | 20.000.455.945,20 | 20.269.341.036,320 | 20.269.341.036,32 | 21.095.414.543,760 | 21.095.414.543,76 | 22.023.481.175,920 | 22.023.481.175,92 | 23.100.559.050,500 | 23.100.559.050,50 |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 402.200.000,000 | 402.200.000,00 | 407.607.155,920 | 407.607.155,92 | 424.219.115,440 | 424.219.115,44 | 442.882.122,010 | 442.882.122,01 | 464.541.652,230 | 464.541.652,23 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 53.390.661.780,600 | 53.390.661.780,60 | 54.108.443.065,060 | 54.108.443.065,06 | 56.313.623.355,050 | 56.313.623.355,05 | 58.791.073.061,080 | 58.791.073.061,08 | 61.666.300.937,720 | 61.666.300.937,72 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 67.050.000.000,000 | 67.050.000.000,00 | 43.922.390.571,870 | 43.922.390.571,87 | 47.132.144.224,640 | 47.132.144.224,64 | 50.755.494.748,850 | 50.755.494.748,85 | 55.179.196.256,030 | 55.179.196.256,03 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 166.826.336.464,980 | 166.826.336.464,98 | 169.069.141.069,320 | 169.069.141.069,32 | 175.959.524.832,210 | 175.959.524.832,21 | 183.700.651.172,440 | 183.700.651.172,44 | 192.684.689.145,480 | 192.684.689.145,48 |
| 3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 289.293.170.950,070 | 289.293.170.950,07 | 293.182.413.317,670 | 293.182.413.317,67 | 305.131.012.142,460 | 305.131.012.142,46 | 318.554.881.737,310 | 318.554.881.737,31 | 334.134.081.580,460 | 334.134.081.580,46 |
| 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN | 75.050.088.232,000 | 75.050.088.232,00 | 76.059.057.720,930 | 76.059.057.720,93 | 79.158.831.535,510 | 79.158.831.535,51 | 82.641.328.527,060 | 82.641.328.527,06 | 86.682.973.613,160 | 86.682.973.613,16 |

| KODE | URUSAN | PAGU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| | SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | | | |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 122.406.979.134,000 | 122.406.979.134,00 | 127.664.866.405,860 | 127.664.866.405,86 | 132.362.441.456,050 | 132.362.441.456,05 | 137.613.898.513,280 | 137.613.898.513,28 | 143.799.650.607,330 | 143.799.650.607,33 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 16.160.000.000,000 | 16.160.000.000,00 | 12.765.000.000,000 | 12.765.000.000,00 | 13.790.620.000,000 | 13.790.620.000,00 | 14.968.990.000,000 | 14.968.990.000,00 | 16.245.435.000,000 | 16.245.435.000,00 |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 571.000.000,000 | 571.000.000,00 | 578.679.000,000 | 578.679.000,00 | 602.265.000,000 | 602.265.000,00 | 628.763.000,000 | 628.763.000,00 | 659.515.000,000 | 659.515.000,00 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 316.603.584.817,540 | 316.603.584.817,54 | 320.859.986.970,980 | 320.859.986.970,98 | 333.936.580.549,220 | 333.936.580.549,22 | 348.627.716.237,220 | 348.627.716.237,22 | 365.677.653.885,420 | 365.677.653.885,42 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | 114.594.503.322,180 | 114.594.503.322,18 | 116.135.105.874,090 | 116.135.105.874,09 | 120.868.172.137,720 | 120.868.172.137,72 | 126.185.621.090,390 | 126.185.621.090,39 | 132.356.837.169,640 | 132.356.837.169,64 |
| 5.01 | PERENCANAAN | 50.776.309.370,370 | 50.776.309.370,37 | 50.414.953.143,130 | 50.414.953.143,13 | 51.647.150.084,770 | 51.647.150.084,77 | 53.114.621.040,470 | 53.114.621.040,47 | 55.726.150.162,250 | 55.726.150.162,25 |
| 5.02 | KEUANGAN | 1.610.701.619.461,010 | 1.610.701.619.461,01 | 1.631.355.808.391,260 | 1.631.355.808.391,26 | 1.697.882.188.582,510 | 1.697.882.188.582,51 | 1.772.622.454.399,530 | 1.772.622.454.399,53 | 1.859.362.982.456,550 | 1.859.362.982.456,55 |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | 18.736.639.736,000 | 18.736.639.736,00 | 18.988.534.147,640 | 18.988.534.147,64 | 19.762.408.590,630 | 19.762.408.590,63 | 20.631.831.839,150 | 20.631.831.839,15 | 21.640.849.279,410 | 21.640.849.279,41 |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 25.613.489.905,120 | 25.613.489.905,12 | 25.957.836.333,330 | 25.957.836.333,33 | 27.015.743.488,110 | 27.015.743.488,11 | 28.204.268.427,110 | 28.204.268.427,11 | 29.583.622.376,610 | 29.583.622.376,61 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 12.103.386.035,000 | 12.103.386.035,00 | 13.310.093.622,000 | 13.310.093.622,00 | 14.675.000.000,000 | 14.675.000.000,00 | 16.125.291.771,000 | 16.125.291.771,00 | 16.900.000.000,000 | 16.900.000.000,00 |
| 5.06 | PENGELOLAAN | | | | | | | | | | |

| KODE | URUSAN | PAGU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA | RPJMD | RENSTRA |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | PERBATASAN | | | | | | | | | | |
| 5.07 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | 11.807.670.193,820 | 11.807.670.193,82 | 11.966.411.898,750 | 11.966.411.898,75 | 12.454.100.957,350 | 12.454.100.957,35 | 13.002.004.056,410 | 13.002.004.056,41 | 13.637.878.221,800 | 13.637.878.221,80 |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 44.262.459.557,530 | 44.262.459.557,53 | 44.857.521.765,320 | 44.857.521.765,32 | 46.685.682.348,980 | 46.685.682.348,98 | 48.739.562.442,640 | 48.739.562.442,64 | 51.123.212.567,300 | 51.123.212.567,30 |
| 7.01 | KECAMATAN ADMINISTRASI | | | | | | | | | | |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 32.566.509.985,000 | 32.566.509.985,00 | 33.004.332.454,100 | 33.004.332.454,10 | 34.349.418.346,230 | 34.349.418.346,23 | 35.860.579.435,040 | 35.860.579.435,04 | 37.614.371.844,250 | 37.614.371.844,25 |

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

### 2.6.1 Permasalahan Daerah

Dari hasil identifikasi dan analisis yang didapatkan pada bab gambaran umum kondisi daerah, didapatkan himpunan permasalahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan yang terjadi kemudian dikklasifikasikan berdasarkan agenda pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 sehingga dapat diketahui indikasi arah kebijakan hingga program pembangunan yang perlu dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 – 2029. Permasalahan-permasalahan tersebut terlihat sebagaimana daftar berikut ini.

#### 2.6.1.1 Permasalahan Transformasi Sosial

**1. Usia Harapan Hidup Perlu Ditingkatkan**

Pada tahun 2023, usia harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 73,54 tahun. Angka tersebut relatif lebih rendah dari usia harapan hidup nasional yang mencapai 73,93 tahun. Capaian usia harapan hidup yang berada di bawah rata-rata nasional disebabkan oleh aspek-aspek kesehatan, baik kondisi kesehatan maupun pelayanan kesehatan masih belum optimal. Pada usia balita dan anak, imunisasi dasar dan *stunting* menjadi masalah kesehatan utama. Pada usia dewasa, masalah kesehatan utama adalah kematian ibu dan penyakit tidak menular. Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan yang belum merata juga menyebabkan pelayanan kesehatan belum optimal.

**Tabel 2.6.1 Masalah dan Akar Masalah Usia Harapan Hidup**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Usia harapan hidup di bawah rata-rata nasional | Angka kematian ibu masih tinggi | Kesehatan |
| | Masih tingginya gizi buruk | |
| | Imunisasi dasar lengkap pada bayi belum tercapai | |
| | Belum meratanya cakupan pelayanan lansia | |

### 2. Angka Kematian Ibu Masih Tinggi

Salah satu penyebab usia harapan hidup yang di bawah nasional adalah tingginya angka kematian ibu. Kematian ibu disebabkan oleh fasilitas dan tenaga kesehatan yang kurang memadai untuk memfasilitasi kelahiran sesuai standar. Selain itu, masih tingginya angka pernikahan anak di Kalimantan Tengah turut berkontribusi pada peningkatan angka kematian ibu. Tingginya pernikahan anak menyebabkan meningkatnya perempuan melahirkan di bawah 20 tahun yang merupakan usia berisiko tinggi untuk mengalami kehamilan dan melahirkan.

**Tabel 2.6.2 Masalah dan Akar Masalah Angka Kematian Ibu**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Ada kecenderungan peningkatan angka kematian ibu | Masih adanya perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan | Kesehatan |
| | Perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun masih tinggi | |
| | Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang | |

### 3. Eliminasi Penyakit Tuberkulosis dan Malaria yang Belum Optimal

Pengendalian penyakit menular perlu menjadi perhatian karena penyebaran penyakit menular akan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kasus tuberkulosis pasca pandemi terjadi secara global, termasuk di Indonesia dan Kalimantan Tengah. Peningkatan tersebut disebabkan akibat rendahnya deteksi tuberkulosis saat pandemi dikarenakan bergesernya fokus pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19. Peningkatan kasus tuberkulosis di Kalimantan Tengah juga terjadi pada kasus tuberkulosis anak. Selain tuberkulosis, terdapat penyakit malaria yang perlu menjadi perhatian pula. Pada kasus malaria, masih terdapat dua daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum sepenuhnya tereliminasi malaria, yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.

**Tabel 2.6.3 Masalah dan Akar Masalah Eliminasi Penyakit Tuberkulosis dan Malaria**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Perlunya peningkatan penanganan tuberkulosis | Rendahnya cakupan pengobatan tuberkulosis | Kesehatan |
| | Peningkatan kasus tuberkulosis | |
| | Peningkatan kasus tuberkulosis pada anak | |
| Perlunya eliminasi malaria | Terdapat dua kabupaten yang belum mengalami eliminasi malaria | |

### 4. Masih Tingginya Prevalensi Stunting

Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 23,5%, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 21,5%. *Stunting* sendiri merupakan fenomena yang penghambat tumbuh kembang anak. Tingginya prevalensi *stunting* menunjukkan besarnya balita yang tidak mendapatkan kecukupan gizi sehingga berpengaruh buruk terhadap perkembangannya. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di kemudian hari jika tidak dilakukan intervensi secara komprehensif.

**Tabel 2.6.4 Masalah dan Akar Masalah Stunting**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Prevalensi stunting masih di atas prevalensi stunting nasional | Masih tingginya gizi buruk | Kesehatan |
| | Masih tingginya prevalensi ketidakcukupan pangan | |

### 5. Kualitas Pendidikan dan Literasi Masih Rendah

Salah satu aspek penting dalam melihat kualitas SDM adalah pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik menunjukkan SDM yang unggul. Aspek pendidikan masih terhambat pada penguasaan literasi dan numerasi yang belum baik dan dipengaruhi dari ketersediaan sarana prasarana dan kapasitas SDM pendukung, seperti tenaga pengajar. Perbaikan fundamental seperti ini menjadi penting sebagai penguatan fondasi untuk pembangunan di masa yang akan datang di Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah sepatutnya menjadi prioritas

pembangunan. Ini berkaitan pula dengan akumulasi modal manusia dalam jangka panjang yang akan bermanfaat bagi pembangunan.

**Tabel 2.6.5 Masalah dan Akar Masalah Pendidikan dan Literasi**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Belum optimalnya upaya pengembangan literasi masyarakat | Pencapaian pemerataan layanan perpustakaan masih kurang | Perpustakaan |
| | Ketercukupan koleksi perpustakaan masih kurang | |
| | Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat masih jauh dari standar | |
| Belum optimalnya perbaikan kualitas literasi dan numerasi dalam pendidikan | Kurang optimalnya kualitas manajemen Satuan Pendidikan | Pendidikan |
| | Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal | |
| | Dukungan sarana prasarana khususnya sarpras digital yang minim | |
| | Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas dan sertifikasi guru | |
| | Belum optimalnya jumlah tenaga pendidik dan pemerataannya | |

### 6. Lama Partisipasi dan Tingkat Penyelesaian Jenjang Pendidikan yang Masih Rendah

Rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah setara dengan lulusan SMP. Sementara itu, harapan lama sekolah sendiri telah mencapai perguruan tinggi setara Diploma 1. Gap antara keduanya disebabkan partisipasi sekolah penduduk usia 16 – 18 tahun yang rendah. Partisipasi penduduk pada pendidikan sekolah menengah atas baru mencapai 70% pada tahun 2023. Selain itu, partisipasi pada pendidikan tinggi juga masih rendah dikarenakan terbatasnya kemampuan pembiayaan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan tinggi.

**Tabel 2.6.6 Masalah dan Akar Masalah Kepesertaan dan Tingkat Penyelesaian Jenjang Pendidikan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Masih tingginya gap harapan dan angka riil lama sekolah | Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikan | Pendidikan |
| | Fasilitas pendidikan yang tidak merata | |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah | Kemampuan masyarakat mengakses pembiayaan pendidikan tinggi yang terbatas | |
| | Masih terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor pendidikan tinggi | |

### 7. Kualitas Pendidikan Angkatan Kerja Masih Rendah

Masalah ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum adalah angka TPAK yang masih fluktuatif dengan tren penurunan pada angka TPT. Namun demikian, data menunjukkan adanya persentase tinggi pada pengangguran usia muda yang merupakan lulusan SMA.

**Tabel 2.6.7 Masalah dan Akar Masalah Pendidikan Angkatan Kerja**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Belum optimalnya serapan lulusan perguruan tinggi | Masih terbatasnya lapangan pekerjaan untuk lulusan perguruan tinggi | Tenaga kerja |
| Belum optimalnya serapan lulusan pendidikan vokasi | Belum ada skema *talent pool* dan *link and match* | |

### 8. Pengentasan Kemiskinan Belum Efektif

Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah berada jauh di bawah angka kemiskinan nasional. Akan tetapi, terdapat kecenderungan peningkatan angka kemiskinan pada beberapa tahun terakhir. Hal ini juga terlihat dari fluktuasi data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Adanya peningkatan angka kemiskinan menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan belum optimal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya berkaitan dengan isu penyasaran bantuan kepada yang berhak sesuai basis data pemerintah.

**Tabel 2.6.8 Masalah dan Akar Masalah Pengentasan Kemiskinan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| | Penyasaran bantuan belum tepat sasaran | Sosial |

| | | |
|---|---|---|
| Ada kecenderungan kenaikan angka kemiskinan | Program pengentasan kemiskinan masih berorientasi untuk jangka pendek | |

### 9. Perlindungan Ketenagakerjaan Masih Kurang

Jaminan ketenagakerjaan berfungsi sebagai jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan melindungi tenaga kerja melalui berbagai jaminan ketenagakerjaan. Penyediaan jaminan ketenagakerjaan menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha kepada pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepesertaan tenaga kerja pada jaminan ketenagakerjaan setidaknya akan menyediakan perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hari tua, pensiun, hingga kematian.

**Tabel 2.6.9 Masalah dan Akar Masalah Perlindungan Ketenagakerjaan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Jaminan ketenagakerjaan belum mencakup seluruh tenaga kerja | Kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi | Tenaga kerja |
| | Pemahaman masyarakat mengenai inklusi dan literasi keuangan yang masih rendah | |

### 10. Kesempatan Kerja Yang Belum Merata Bagi Kelompok Rentan

Penduduk usia produktif yang termasuk dalam angkatan kerja mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan untuk memenuhi penghidupan, tak terkecuali penduduk dengan disabilitas. Angkatan kerja dengan disabilitas memiliki tantangan untuk memperoleh pekerjaan dengan sedikitnya opsi pekerjaan yang ramah disabilitas. Selain itu, rendahnya kapabilitas angkatan kerja disabilitas juga menyebabkan rendahnya partisipasi disabilitas dalam lapangan kerja.

**Tabel 2.6.10 Masalah dan Akar Masalah Kesempatan Bagi Kelompok Rentan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| | Masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang ramah disabilitas | Tenaga kerja |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Partisipasi disabilitas dalam lapangan kerja formal masih terbatas | Masih rendahnya kapasitas disabilitas yang layak untuk bekerja | |

### 2.6.1.2 Permasalahan Transformasi Ekonomi

**1. Pergeseran Struktur Ekonomi Wilayah dan Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi**

Sektor ekstraktif yang mulanya menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan skala ekonomi sehingga berdampak pada tren pertumbuhan ekonomi jangka pandang. Berkaca pada kondisi tersebut, dibutuhkan adanya sektor ekonomi lain yang berperan sebagai pengganti peran sektor ekstraktif sebagai penggerak roda perekonomian. Selain akibat nilai tambahnya yang rendah, sektor ekstraktif relatif menghasilkan produktivitas yang rendah di dalam perekonomian Kondisi eksisting saat ini menunjukkan bahwa performa sektor non-ekstraktif masih kurang optimal sebagai katalisator perekonomian dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

**Tabel 2.6.11 Masalah dan Akar Masalah Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Rendahnya performa sektor ekonomi selain Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Sektor Pertambangan dan Penggalian | Skala aktivitas ekonomi yang relatif rendah sehingga menghambat masuknya investasi | Perencanaan |
| | Keterbatasan infrastruktur penunjang, seperti jalan yang dapat mendukung aktivitas lintas sektor | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Pasar domestik relatif kecil, sementara daya saing produk barang dan jasa yang dihasilkan di pasar nasional dan internasional relatif rendah | Perdagangan |
| Sejumlah sektor mengalami penurunan efek pengganda dalam perekonomian | Adanya perubahan aktivitas ekonomi masyarakat dan efek pandemi COVID-19 | Perencanaan |
| | Aktivitas produksi di Provinsi Kalimantan Tengah bergantung pada | Perindustrian |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| | bahan baku yang diproduksi di daerah lain | |
| Perlambatan pertumbuhan ekonomi | Cadangan sumber daya alam yang digunakan oleh sektor ekstraktif menurun dan terjadi penurunan efisiensi dalam berproduksi | Perindustrian |
| | Sektor non-ekstraktif belum berkontribusi secara signifikan | Perencanaan |
| | Minimnya aliran investasi akibat iklim investasi yang tidak mendukung | Penanaman Modal |
| | Rendahnya kualitas SDM | Pendidikan |
| | Keterbatasan kesediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Belum diutamakannya serapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa | *Political will* pemerintah daerah untuk mengembangkan produksi lokal | Perencanaan |
| | Kualitas produk lokal lebih rendah daripada produk sejenis yang dihasilkan oleh kabupaten/provinsi lain | Perindustrian |

**2. Aktivitas Perekonomian yang Belum Berkelanjutan**

Sektor ekstraktif seperti Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan dua sektor yang menyumbang PDRB secara signifikan. Namun, di sisi lain, praktik ekonomi di sektor-sektor tersebut masih belum memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi tersebut memunculkan adanya *trade-off* dari aktivitas ekonomi dengan aspek lingkungan di dalam konteks pembangunan.

**Tabel 2.6.12 Masalah dan Akar Masalah Ekonomi Berkelanjutan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Ketergantungan pada sektor primer yang tidak berkelanjutan | Belum berkembangnya sektor ekonomi lain yang memiliki potensi sebesar industri ekstraktif dalam menopang PDRB | Perencanaan |
| | Tingginya biaya peralihan menuju produksi berkelanjutan | Perindustrian |

| | | |
|---|---|---|
| | Keterbatasan kapasitas SDM dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan | Pendidikan |
| | Keterbatasan insentif yang mendorong aktivitas perekonomian yang berkelanjutan | Perencanaan |
| Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan | Minimnya *political will* pemerintah daerah untuk mengubah paradigma pembangunan yang berkelanjutan | Sekretariat Daerah |
| | Minimnya inisiasi, arahan, peta jalan, dan regulasi pada tingkat yang lebih tinggi (nasional) | Sekretariat Daerah |
| | Keterbatasan sumber daya pemerintah dalam upaya penegakan hukum | Sekretariat Daerah |

### 3. Hambatan dalam Pelaksanaan Hilirisasi

Sebagai salah satu arah kebijakan nasional, pelaksanaan hilirisasi produk masih memiliki hambatan di Provinsi Kalimantan Tengah akibat masih minimnya investasi yang masuk. Hal lain yang patut menjadi perhatian berkaitan pula dengan ketersediaan infrastruktur, perizinan, serta kapasitas SDM dan ini menjadi hambatan daya tarik investasi pada industri hilirisasi tersebut.

**Tabel 2.6.13 Masalah dan Akar Masalah Hilirisasi**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Profit margin aktivitas hilirisasi kecil dan biaya logistik besar | Keterbatasan sarana prasarana pendukung hilirisasi | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Belum berkembangnya kawasan ekonomi terintegrasi | Perencanaan |
| | Terbatasnya investasi yang masuk | Penanaman Modal |
| | Minimnya peta jalan atau kajian pelaksanaan hilirisasi yang bersifat operasional | Perencanaan |
| Keterbatasan SDM penunjang hilirisasi | Ketiadaan sekolah dan lembaga pendidikan/ pelatihan yang dapat menunjang aktivitas hilirisasi | Pendidikan |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Perizinan yang masih panjang secara birokrasi | *Political will* dalam mendukung hilirisasi | Sekretariat Daerah |
| Minimnya ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan kawasan hilirisasi | Ketidaksinkronan data acuan penetapan izin penggunaan lahan | Pertanahan |

**4. Perencanaan dan Penggunaan Anggaran dalam APBD yang Belum Optimal**

Realisasi penerimaan pada komponen pendapatan daerah masih didominasi pada penerimaan pajak yang secara spesifik berasal dari pajak kepemilikan kendaraan bermotor. Masih ada potensi-potensi sumber pendapatan lain yang belum tergarap secara maksimal. Di samping itu, realisasi belanja daerah masih relatif lebih rendah dari rencana anggaran yang telah ditentukan dan mengindikasikan adanya proses perencanaan belanja yang belum matang oleh pemerintah daerah.

**Tabel 2.6.14 Masalah dan Akar Masalah Perencanaan dan Penggunaan Anggaran APBD**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Peningkatan SiLPA APBD Provinsi | Ketidakmampuan daerah dalam mencerna secara cepat peningkatan dana bagi hasil dari pusat untuk belanja daerah | Keuangan |
| BUMD belum menghasilkan laba yang optimal sebagai bagian dividen pemerintah daerah di saat penyertaan modal selalu meningkat setiap tahun | Manajemen bisnis yang belum optimal dan belum profesional dalam pengelolaan | Keuangan |
| Kurang tergalinya potensi pendapatan dari dana perimbangan | Ketentuan dalam UU HKPD yang membatasi konteks perpajakan pada kendaraan bermotor, air permukaan dan rokok | Keuangan |
| Realisasi belanja daerah yang pada beberapa pos masih berada di bawah angka 90% | Ketidakmampuan daerah dalam mencerna secara cepat peningkatan dana bagi hasil dari pusat | Keuangan |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam menghasilkan pendapatan | Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi yang akan didorong | Keuangan |

### 5. Optimalisasi Peran Taman Nasional Sebagai Pariwisata Jasa Lingkungan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sejumlah taman nasional yang tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan non-hayati, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan taman nasional ke arah pariwisata jasa lingkungan dapat menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh Kalimantan Tengah untuk mengembangkan sektor pariwisata, di tengah penurunan kontribusi sektor ekstraktif pada perekonomian. Namun, masih terdapat banyak hambatan dalam konteks pemanfaatan taman nasional ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.6.15 Masalah dan Akar Masalah Pariwisata Jasa Lingkungan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Keterbatasan dari segi aksesibilitas, atraksi, dan amenitas | Rendahnya transformasi digital yang mendukung kegiatan pariwisata | Pariwisata |
| | Keterbatasan aksesibilitas lokasi taman nasional melalui transportasi udara dan darat | |
| | Belum optimalnya pengembangan area pendukung di sekitar taman nasional | |

### 6. Rendahnya Produktivitas dan Peran Sentra Pangan Terpadu dalam Mendukung Kemandirian Pangan

Pelaksanaan program *food estate* masih memiliki sejumlah evaluasi, terutama terkait produktivitas pelaksanaan *food estate* yang diakibatkan oleh persoalan isu dan kapasitas sumber daya manusia. Sebagai program pendukung ketahanan pangan, *food estate* belum maksimal dalam mendukung kemandirian pangan

Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus menciptakan pasar lokal maupun regional untuk produk pertanian hasil dari produksi *food estate*

**Tabel 2.6.16 Masalah dan Akar Masalah Sentra Pangan Terpadu**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Kurang optimalnya hasil produksi *food estate* | Ketidaksesuaian pelaksanaan *food estate* dengan kondisi lapangan Kalimantan Tengah | Pertanian |
| | Keterbatasan ketersediaan irigasi yang dapat menunjang aktivitas | |
| | Keterbatasan teknologi dalam menjalankan aktivitas pertanian di lahan gambut | |
| | Ketiadaan strategi yang menghubungkan aktivitas *on-farm* dan *off-farm* dalam pengembangan *supply chain* hasil produksi *food estate* | |
| Rendahnya ketertarikan dan keterlibatan generasi muda dalam aktivitas pertanian | Rendahnya kesejahteraan petani | |
| | Keterbatasan akses pada solar, bibit, dan pupuk terjangkau. | |
| | Pelaksanaan program *food estate* eksisting yang kurang partisipatif | |
| Penyaluran hasil produksi *food estate* ke provinsi lain | Belum terbentuknya pasar dan *supply chain* komoditas pertanian lokal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah | |
| Keterbatan penganggaran dana proyek *food estate* | Adanya ketentuan penganggaran yang termuat dalam *masterplan* Bappenas | |

**7. Perlunya Komitmen Dalam Penyediaan Energi Listrik yang Merata dan Memperhatikan Aspek Keberlanjutan**

Penyediaan energi listrik di Kalimantan Tengah masih mengalami kendala. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya desa tidak teraliri listrik dan belum terpenuhinya 100% rasio elektrifikasi. Selain itu, capaian penyediaan energi baru terbarukan pada tahun 2023 baru mencapai 13,21%.

**Tabel 2.6.17 Masalah dan Akar Masalah Ketenagalistrikan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Porsi EBT dalam bauran energi primer masih jauh dari target indikatif 2029 | Capaian target penggunaan EBT dalam bauran primer tahun 2023 baru mencapai 13,21% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Belum meratanya penyediaan listrik | Masih adanya desa belum teraliri listrik | |

## 8. Perlunya Peningkatan Kapasitas Layanan dan Kinerja di Bidang Komunikasi dan Informasi

Salah satu aspek penting dalam upaya efisiensi dan reformasi birokrasi adalah digitalisasi. Namun demikian, capaian dari pembangunan aspek TIK di Provinsi Kalimantan Tengah relatif masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor infrastruktur pendukung dan SDM yang belum secara kompeten melakukan pengelolaan layanan dan kinerja di bidang komunikasi dan informasi.

**Tabel 2.6.18 Masalah dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informasi**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Selisih peningkatan indeks pembangunan teknologi informasi dan komukikasi setiap tahunnya menurun | Akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK masih sedang | Komunikasi dan Informasi |
| | Akses dan infrastruktur TIK Kalimantan Tengah termasuk peringkat terbawh di Indonesia | |
| Peningkatan indeks literasi digital per tahunnya rendah | Kurangnya jumlah ASN yang memiliki keahlian bidang digital | |
| | Kurangnya jumlah masyarakat yang memiliki keahlian bisang digital | |

## 9. Pembangunan Desa yang Belum Merata

Pembangunan desa di Kalimantan Tengah masih menemui kendala utama, khususnya dalam pengentasan desa tertinggal. Masih adanya desa yang tertinggal disebabkan karena akses yang sulit dijangkau. Hal tersebut kemudian menyebabkan adanya hambatan dalam proses pembangunan dan mendorong rendahnya jumlah desa yang berstatus desa mandiri di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.6.19 Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Desa**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Capaian desa mandiri masih rendah | Kapasitas aparatur desa masih terbatas | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Rendahnya kemampuan aparatur desa dalam penggunaan IT | |
| | Rendahnya pengembangan usaha mikro di desa | |
| | Masih adanya desa tertinggal | |
| | Akses desa yang sulit dijangkau | |
| | Kualitas jaringan internet belum optimal | |

## 10. Kurang Meratanya Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan pengembangan kawasan permukiman di Kalimantan Tengah masih menemui kendala, khususnya dalam capaian rumah layak huni. Di samping itu, masyarakat berpenghasilan rendah juga memiliki hambatan untuk memiliki atau mengakses hunian di tengah kenaikan harga lahan atau rumah. Di samping itu, sarana pendukung seperti akses sanitasi dan air minum yang aman juga menjadi isu utama terkait dengan permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.6.20 Masalah dan Akar Masalah Penyediaan Perumahan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Masih rendahnya capaian rumah layak huni | Pengentasan rumah tidak layak huni yang belum optimal | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum pada kawasan permukiman yang belum optimal | |
| | Belum terintegrasinya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi, dan peremajaan kawasan kumuh | |
| | Skor akses sanitasi dan air minum aman yang belum terpenuhi cukup tinggi | |
| Perlunya opsi bauran pendanaan untuk penyediaan perumahan bagi MBR | Masih tingginya backlog perumahan | |
| | Keterbatasan akses MBR dalam sektor informal untuk pembiayaan perumahan | |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| | Kenaikan harga lahan dan rumah | |
| | Belum sesuainya bantuan dalam kemudahan memperoleh rumah dengan profil dan karakteristik MBR | |

### 2.6.1.3 Permasalahan Transformasi Tata Kelola

**1. Rendahnya Serapan Produk Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah**

Kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan di Kalimantan Tengah masih dilakukan dengan mendatangkan barang dari luar Pulau Kalimantan. Salah satu penyebab adanya transaksi lintas pulau tersebut ialah ketidakmampuan industri domestik dalam memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Hal ini kemudian secara tidak langsung ikut berdampak pada rendahnya daya saing produk domestik tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga di pasar domestik.

**Tabel 2.6.21 Masalah dan Akar Masalah Belanja Pemerintah**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Masih banyaknya proses pengadaan barang daerah yang berasal dari luar Kalimantan daripada lokal provinsi | Ketidakmampuan industri lokal dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan | Perindustrian |

**2. Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara yang belum Optimal**

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya manusia yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah. Manajemen kepegawaian yang baik melalui penempatan ASN sesuai kompetensi dan kemampuannya menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan tupoksi di dalam perangkat daerah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kondisi ini belum optimal dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.6.22 Masalah dan Akar Masalah Kepegawaian**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Penempatan ASN yang masih belum sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya | Belum teroptimalkannya *talent pool* untuk aparatur sipil negara yang terpetakan secara kompetensi dan kemampuan | Kepegawaian |

### 2.6.1.4 Permasalahan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Daerah

**1. Kondisi Hiper Regulasi dan Under Regulasi Secara Bersamaan**

Regulasi terhadap urusan-urusan pemerintah diperlukan untuk memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan kebijakan maupun program dalampembangunan. Secara ideal, regulasi yang ada harus efektif dan sinkron dengan regulasi pada urusan-urusan terkait, baik secara nasional maupun lokal. Hiper regulasi rawan menyebabkan tumpang tindih substansi, sedangkan *under* regulasi akan menyebabkan terbatasnya pengambilan keputusan. Masalah dalam penyelenggaraan hukum utamanya disebabkan oleh SDM dan partisipasi dalam pembentukan regulasi.

**Tabel 2.6.23 Masalah dan Akar Masalah Kondisi Regulasi**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Upaya reformasi hukum masih belum optimal | Belum memadainya SDM di bidang regulasi | Sekretariat Daerah |
| | Partisipasi pembentukan regulasi belum optimal | |

**2. Belum Meratanya Akses Pelayanan Publik Bagi Masyarakat**

Pelayanan publik diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang, jasa, maupun layanan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelayanan publik yang optimal memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada era digitalisasi pelayanan publik, masalah yang muncul umumnya terkait dengan kemampuan dalam penggunaan aplikasi dan

belum sempurnanya sistem yang terbentuk. Ini pada akhirnya menghambat pelayanan publik yang seharusnya berjalan secara efektif dan efisien.

**Tabel 2.6.24 Masalah dan Akar Masalah Akses Pelayanan Publik Bagi Masyarakat**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal | Belum memadainya kompetensi digital penyelenggara pelayanan publik | Komunikasi dan Informasi |
| | Belum memadainya kompetensi digital pengguna pelayanan publik | |
| | Belum optimalnya pengembangan aplikasi | |
| | Integrasi sistem informasi basisdata OPD masih belum optimal | |
| | Belum ada regulasi yang mengatur urusan komunikasi dan informasi | |
| Penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditingkatkan | Ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur dan budaya kerja yang telah ditetapkan | Sekretariat Daerah |

### 3. Risiko Korupsi yang Akan Semakin Meningkat di Tengah Upaya Pembangunan

Korupsi merupakan salah satu penghambat pembangunan karena terdapat alokasi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Risiko korupsi salah satunya berasal dari pemangku kebijakan dan aparatur pelaksana pembangunan itu sendiri. Risiko tersebut terjadi disebabkan oleh belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian risiko pembangunan yang akhirnya menimbulkan celah dalam tindakan korupsi.

**Tabel 2.6.25 Masalah dan Akar Masalah Risiko Korupsi dalam Pembangunan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Upaya pencegahan korupsi yang belum mantap | Belum optimalnya peran APIP untuk dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat |
| | Belum optimalnya upaya penerapan manajemen risiko pembangunan | |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Kemampuan Penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan belum optimal | Kompetensi SDM penyelenggara pengawasan | |
| | Lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah | |

**4. Ancaman Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dari Konflik Horizontal dan Situasi Keamanan Global**

Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum diperlukan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum akan menyebabkan terganggunya produktivitas masyarakat yang kemudian berdampak pada pembangunan. Selain konflik internal, ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban umum dapat berasal dari insurgensi, terorisme, dan ekstremisme yang dapat berdampak terhadap kondisi keamanan global dan regional.

**Tabel 2.6.26 Masalah dan Akar Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Ancaman terhadap kondisi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum dari konflik internal | Konflik internal termasuk konflik sosial | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
| Ancaman terhadap kondisi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum dari kondisi keamanan global dan regional | Insurgensi, terorisme, ekstremisme | |

**5. Demokrasi Masih Prosedural**

Demokrasi menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi, penerapan demokrasi saat ini masih prosedural. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya pembatasan terhadap kebebasan masyarakat, belum meratanya kesejahteraan, dan permasalahan-permasalahan politik. Demokrasi yang belum

dijalankan sepenuhnya disebabkan akibat kapasitas masyarakat dan pemerintah yang masih belum optimal.

**Tabel 2.6.27 Masalah dan Akar Masalah Demokrasi**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Kualitas demokrasi daerah masih perlu ditingkatkan | Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat | Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat |
| | Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik informasi dan komunikasi publik belum merata | |
| | Permasalahan politik elektoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA | |
| | Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal | |
| | Nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang belum terinternalisasi | |

### 6. Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum secara maksimal memberikan pelayanan yang prima sehingga diperlukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup organisasi, penatalaksanaan, dan SDM aparatur. Permasalahan terkait reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari masih adanya daerah dengan capaian reformasi birokrasi dengan klasifikasi kurang. Selain itu, kualitas SDM dalam birokrasi juga menjadi kendala bagi pencapaian reformasi birokrasi.

**Tabel 2.6.28 Masalah dan Akar Masalah Reformasi Birokrasi**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Capaian reformasi birokrasi masih perlu peningkatan | Kualitas SDM birokrasi | Sekretariat Daerah |
| | Masih terdapat daerah dengan nilai kurang (C) dalam indeks reformasi birokrasi | |

## 2.6.1.5 Permasalahan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

### 1. Pembangunan Kebudayaan yang Kurang Optimal

Pada tahun 2019-2022, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren peningkatan dan berada di atas indeks nasional pada tahun 2021-2022. Akan tetapi, dimensi ekonomi budaya dan ekspresi budaya merupakan dua dimensi penyusun IPK yang masih memiliki capaian rendah. Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan kekayaan budaya yang khas belum mampu untuk memanfaatkan kebudayaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal, potensi kebudayaan sebagai salah satu sumber pertumbuhan bari Provinsi Kalimantan Tengah sangatlah besar.

**Tabel 2.6.29 Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Kebudayaan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Menurunnya dimensi ekonomi budaya dan eskpresi budaya | Kecenderungan penurunan pertunjukan seni sebagai sumber penghasilan penduduk | Kebudayaan |
| | Menurunnya kegiatan seni budaya pasca pandemi Covid-19 | |
| | Kurangnya kegiatan komodifikasi budaya | |

## 2. Perlunya Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan aspek yang penting untuk mencapai ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2019 – 2023, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki capaian yang termasuk pada kategori tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerukunan antarumat beragama agar ketertiban umum dapat dipertahankan.

**Tabel 2.6.30 Masalah dan Akar Masalah Kerukunan Umat Beragama**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Penguatan aspek kerukunan umat beragama | Masih ditemukannya politik berbasis identitas yang sifatnya destruktif | Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat |
| | Masih ditemukannya diskriminasi yang terjadi secara suku, agama, maupun ras | |

## 3. Perlunya Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil pembangunan dapat menjadi cerminan keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 2022, Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah nilai rata-rata nasional. Rendahnya nilai IKK disebabkan oleh dimensi kualitas ketahanan fisik dan kualitas ketahanan ekonomi yang relatif masih rendah.

**Tabel 2.6.31 Masalah dan Akar Masalah Kualitas Keluarga**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Nilai indeks kualitas keluarga masih di bawah nilai nasional | Prevalensi ketidakcukupan pangan semua umur masih tinggi | Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak |
| | Penurunan anggota rumah tangga yang memiliki asuransi | |
| | Peningkatan rumah tangga dengan anak menerima hukuman fisik/agresi psikologis | |

## 4. Belum Optimalnya Pembangunan Kepemudaan

Pemuda sebagai penerus pembangunan bangsa perlu dipersiapkan kapasitasnya sebagai pemimpin di masa yang akan dayang. Penyiapan kapasitas pemuda dilaksanakan melalui partisipasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan. Data menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi pemuda di dalam pendidikan menengah atas, pemuda yang berwirausaha, partisipasi pada kegiatan masyarakat, partisipasi perempuan pada sektor pekerjaan formal, hingga perkawinan usia muda yang masih tinggi.

**Tabel 2.6.32 Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Kepemudaan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Kurangnya partisipasi pemuda dalam upaya pembangunan | Masih rendahnya kepesertaan pada pendidikan menengah atas | Pendidikan |
| | Rendahnya persentase pemuda wirausaha | Koperasi, usaha kecil, dan menengah |
| | Rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan | Kepemudaan dan olah raga |
| | Perkawinan usia anak tinggi | Sosial |
| | Rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor formal | Tenaga kerja |

### 5. Ketimpangan Gender Masih Tinggi

Ketimpangan gender dinilai dari kesenjangan gender pada dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Kondisi-kondisi pada setiap dimensi tersebut menggambarkan ketimpangan yang terjadi antargender. Ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan dan budaya yang masih menganggap posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Permasalahan tenaga kerja yang timpang ditandai kemudian dengan rendahnya keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja hingga akses perempuan yang masih rendah untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

**Tabel 2.6.33 Masalah dan Akar Masalah Ketimpangan Gender**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Ketimpangan gender masih di atas ketimpangan gender nasional | Proporsi perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan masih tinggi | Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak |
| | Perempuan melahirkan di usia bawah 20 tahun masih tinggi | |
| | Kecenderungan penurunan TPAK perempuan | |

### 6. Belum Meratanya Pengelolaan Sampah yang Baik

Belum adanya TPA atau TPST di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kalimantan Tengah. Ketiadaan TPAT atau PST memiliki dampak besar pada keberlanjutan lingkungan hidup Kalimantan Tengah. Pengelolaan yang sifatnya hanya ditumpuk pada suatu area bukanlah solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan dan penanganan sampah seharusnya menjadi prioritas utama untuk memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga dalam mendukung pembangunan daerah.

**Tabel 2.6.34 Masalah dan Akar Masalah Pengelolaan Sampah**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Sampah Rumah Tangga belum terkelola dengan baik | Belum meratanya ketersediaan TPA/TPST di seluruh kabupaten/kota | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| | Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota | Lingkungan Hidup |

**7. Masih Rendahnya Kapasitas Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air**

Kendala dalam layanan infrastruktur sumber daya air terlihat pada penyediaan akses sanitasi aman yang masih rendah. Selain itu, pengambilan air tanah untuk kegiatan masyarakat juga berdampak bagi penyediaan air bersih masyarakat, baik dari segi kuantitas juga kualitasnya. Pemanfaatan air sungai yang melimpah baik untuk kegiatan masyarakat juga belum optimal. Ini juga disebabkan akibat adanya pencemaran air di sungai sehingga kondisi air tersebut tidak layak untuk digunakan.

**Tabel 2.6.35 Masalah dan Akar Masalah Infrastruktur Sumber Daya Air**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Akses sanitasi aman yang masih rendah | Masih rendahnya capaian akses sanitasi layak | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Masih adanya perilaku BABS | |
| | Anggaran terbatas dalam penyediaan infrastruktur sanitasi layak dan aman | |
| | Kapasitas SDM terbatas | |
| Perlunya pengetatan regulasi pengolahan air baku | Lemahnya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum dalam upaya pelayanan SPM | |
| | Pengambilan air tanah berlebihan oleh kegiatan industri dan permukiman | |
| | Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah | |
| | Potensi adanya intrusi air laut dari ekstraksi air tanah yang berlebihan | |
| | Masih banyaknya pencemaran air | |
| Belum meratanya keberadaan pos hidrologi | Pengambilan data hidrologi belum optimal karena terbatasnya pos-pos hidrologi | |
| Perlunya peningkatan penyediaan jaringan air siap minum perpipaan di perkotaan | Perlunya jaminan penyediaan air bersih di wilayah air payau/daerah yang terkena intrusi air laut | |
| | Pengelolaan SPAM belum optimal | |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi | Belum optimalnya penggunaan jaringan irigasi untuk pertanian | |
| | Ada daerah pertanian irigasi yang belum dilayani oleh jaringan | |

## 8. Fluktuasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif. Berdasarkan capaian komponen penyusun, nilai Indeks Kualitas Air merupakan komponen dengan nilai terendah. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran air yang dilakukan oleh industri serta sektor ekstraktif. Selain itu, aktivitas masyarakat yang mencemari aliran sungai turut berkontribusi pada capaian Indeks Kualitas Air. Sementara itu, komponen lainnya, seperti Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukan capaian yang lebih baik. Walaupun demikian, persoalan terkait pencemaran lingkungan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.6.36 Masalah dan Akar Masalah Kualitas Lingkungan Hidup**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Tingginya tingkat pencemaran sungai | Minimnya *law enforcement* terhadap aktivitas ekonomi, terutama pertambangan yang merusak sungai | Lingkungan Hidup |
| | Ketidaksinkronan dokumen penentuan area pembuangan limbah dengan pemanfaatan sungai oleh masyarakat | |
| | Keterbatasan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga yang terintegrasi secara optimal | |
| Keberadaan kasus kebakaran hutan | Aktivitas pembakaran hutan secara sengaja untuk pembukaan lahan atau ladang akibat minimnya pengawasan | |
| Minimnya pengawasan dan penegakan upaya restorasi lingkungan melalui upaya reklamasi dan aktivitas pasca tambang | Adanya celah penyelewengan kewajiban pasca tambang yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan | |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| | Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | |
| | Kurang optimalnya peran Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang tingkat provinsi dan kabupaten/kota | |

### 9. Kepatuhan Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang

Tingginya aktivitas di sektor pertambangan dan penggalian masih tidak diikuti dengan pelaksanaan reklamasi pasca tambang guna mengembalikan fungsi lahan. Adanya celah regulasi dan rendahnya pengawasan menyebabkan adanya peluang bagi perusahaan untuk tidak mematuhi regulasi yang ada. Oleh karenanya, ini berakibat pada rusaknya bentang alam akibat aktivitas pertambangan dan penggalian serta penurunan daya dukung lingkungan untuk pembangunan.

**Tabel 2.6.37 Masalah dan Akar Masalah Pertambangan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi yang mengatur aktivitas kegiatan penambangan dan pasca tambang | Adanya celah penyelewengan kewajiban pasca tambang yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Minimnya pengawasan pasca tambang | Sejumlah laporan aktivitas pasca tambang bersifat *self-reported* oleh perusahaan | |
| | Kurang optimalnya peran Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang tingkat provinsi dan kabupaten/kota | |

### 10. Rendahnya Pemanfaatan Nilai Ekonomi dari Hutan

Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari beberapa jenis. Selain pada hutan produksi, kawasan hutan lain termasuk hutan lindung dan hutan konservasi. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada adalah pemanfaatan hutan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian. Konteks ini berkaitan dengan upaya pemanfaatan hutan sebagai penyimpan karbon, penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah sekitar hutan, dan neraca sumber daya alam sebagai alat penghitungan valuasi hutan.

**Tabel 2.6.38 Masalah dan Akar Masalah Pemanfaatan Hutan**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Minimnya pemanfaatan hutan untuk kredit karbon | Ketidakadaan pemetaan dan identifikasi potensi pemanfaatan hutan untuk kredit karbon | Kehutanan |
| | Tumpang tindih perizinan kawasan hutan; antara RTRW, RTRWP, dan RTRWK | |
| | Penggunaan eksisting kawasan hutan sebagai perkebunan sawit | |
| Kurang optimalnya pemanfaatan hutan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam | Minimnya regulasi yang mengatur dan mengakui hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas lahan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup |
| | Ketiadaan skema dan regulasi yang mendorong keberlanjutan peran MHA dalam pemanfaatan hutan | |
| Ketiadaaan penghitungan neraca SDA dan pemetaan SDA | Tingginya biaya eksplorasi yang dibutuhkan | Lingkungan Hidup |
| | Keterbatasan kemampuan teknis dalam melakukan penghitungan dan pemetaan potensi SDA | |

### 11. Aktivitas Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit yang Tidak Sesuai dengan Tata Kelola Lahan

Beberapa persoalan tata kelola lahan terkait perkebunan kelapa sawit mencakup aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal yang sulit diidentifikasi dan merusak lingkungan dan penetapan ijin perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan lahan milik masyarakat. Kemudian, aktivitas pembuangan limbah kelapa

sawit secara sembarang juga masih ditemukan akibat rendahnya pengawasan dan penegakan hukum.

**Tabel 2.6.39 Masalah dan Akar Masalah Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Tumpang tindih perizinan lahan | Ketidaksinkronan data acuan penentuan izin penggunaan lahan | Pertanian |
| Aktivitas perkebunan sawit ilegal | Minimnya pengawasan dan *political will* dalam mengentaskan aktivitas perkebunan sawit illegal | |
| Aktivitas pembuangan limbah industri kelapa sawit secara sembarang | Minimnya regulasi dan *enforcement* terkait pengelolaan limbah kelapa sawit | |

## 12. Optimalisasi Konservasi Lahan Gambut

Sebagian besar lahan di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh lahan gambut dengan risiko terbakar yang tinggi. Risiko tersebut kemudian tercermin pada titik-titik *hotspot* yang tersebar di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Adanya risiko tersebut perlu dipertimbangkan pada aktivitas-aktivitas pengelolaan lahan, seperti aktivitas pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, lahan gambut menjadi potensi yang besar bagi penyimpanan karbon, tetapi memiliki risiko yang besar apabila tidak dikelola dengan baik. Manajemen lahan gambut diperlukan agar proses pembangunan yang ada saat ini tidak memicu kejadian-kejadian seperti kebakaran hutan berkepanjangan. Di samping itu, proses restorasi lahan gambut pasca kebakaran dan upaya pencegahan kebakaran juga harus menjadi perhatian serius karena lahan jenis ini menjadi salah satu yang terbesar luasannya di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.6.40 Masalah dan Akar Masalah Lahan Gambut**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Tingginya risiko kebakaran lahan gambut akibat aktivitas pertanian dan perkebunan | Keterbatasan teknologi yang memungkinkan aktivitas pertanian dan perkebunan yang sesuai dengan lahan gambut | Lingkungan Hidup |
| | Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum pada aktivitas pertanian dan perkebunan di lahan gambut, terutama | |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| | pada lahan dengan kerentanan kelas tinggi | |
| Perlunya percepatan upaya restorasi lahan gambut | Kurang optimalnya program restorasi lahan gambut | |

### 2.6.1.6 Permasalahan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

**1. Belum Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Mempertimbangkan Kemerataan dan Keadilan**

Masalah tumpang tindih penguasaan lahan dan ketiadaan RDTR di beberapa kabupaten/kota menjadi salah satu contoh kendala dalam penyediaan dokumen tata ruang di Kalimantan Tengah. Hal ini kemudian menjadi bentuk kendala yang menyebabkan beberapa dokumen perencanaan tata ruang yang seharusnya ada, tetapi tidak tersedia sebagai acuan dalam pembangunan.

**Tabel 2.6.41 Masalah dan Akar Masalah Dokumen Perencanaan Tata Ruang**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Ketimpangan zona barat dan timur | Perbedaan prioritas pengadaan program antara zona barat dengan zona timur | Pekerjaan umum dan penataan ruang |
| Ketimpangan penguasaan tanah | Perbedaan status sosial dan kepentingan | sosial |
| | Terjadinya konflik kepemilikan lahan | Pertanahan |
| Dokumen perancanaan tata ruang dan kawasan strategis belum tersedia di seluruh kabupaten /kota | Keterbatasan kapasitas penyelenggara perencanaan di daerah | Pekerjaan umum dan penataan ruang |
| Belum terjalinnya kerjasama dengan daerah lain dalam konteks pengelolaan wilayah berbasis ekologi/ekosistem | Belum tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan | Pekerjaan umum dan penataan ruang |

### 2.6.1.7 Permasalahan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

**1. Belum meratanya konektivitas dan aksesibilitas di Kalimantan Tengah**

Luasan Kalimantan Tengah yang besar menjadi kendala geografis dalam pemenuhan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. Beberapa Pusat Kegiatan Wilayah bahkan belum terhubung secara langsung. Selain itu, belum ada integrasi transportasi antarmoda di wilayah perkotaan besar, seperti Palangkaraya, yang juga menjadi tantangan utama dalam aksesibilitas transportasi di Kalimantan Tengah. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses transportasi Antar Kota Dalam Provinsi juga menjadi masalah dalam penyediaan akses transportasi. Permasalahan terkait penyeberangan laut dan sungai juga menemui kendala dengan belum adanya pelabuhan utama juga keterbatasan rambu-rambu di sungai.

**Tabel 2.6.42 Masalah dan Akar Masalah Bidang Konektivitas dan Aksesibilitas**

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Perlunya peningkatan kualitas jalan | Kualitas jalan dalam kondisi mantap fluktuatif tiap tahunnya | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Lebar jalan masih kurang dari standar nasional (terutama jalan nasional dan jalan provinsi) | |
| | Sistem drainase belum berfungsi optimal ketika musim hujan | |
| | Banyaknya angkutan jalan dalam kondisi Over Dimension dan Over Load yang menambah beban jalan | |
| | Kurang tersedianya fasilitas keselamatan jalan dan rambu-rambu jalan (Rusak, hilang, atau lupa dipasang kembali) | |
| | Perlunya peningkatan status jalan di beberapa ruas jalan untuk mendukung sentra pangan terpadu | |
| | Belum adanya konektivitas antar PKW (Buntok-Kuala Kapuas) | |
| | Belum adanya sistem angkutan umum terpadu di perkotaan | Perhubungan |

| Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|
| Layanan dan kualitas transportasi umum yang masih rendah | Tingkat disiplin operator angkutan yang rendah | |
| | Masih banyak travel tidak berizin | |
| | Trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) terbatas | |
| | Pilihan waktu moda transportasi antar kota terbatas | |
| | *Demand* penumpang angkutan umum rendah | |
| Perlunya peningkatan kualitas layanan sungai, danau, dan penyeberangan | Sedimentasi sungai | |
| | Belum lengkapnya rambu-rambu sungai dan fasilitas dermaga | |
| | Perlunya pengembangan pelabuhan utama | |
| | Perlunya pembangunan pelabuhan baru | |
| | Kedalaman perairan pelabuhan masih di bawah standar. | |
| | Kapasitas SDM teknis dalam penyelenggaraan bidang perhubungan kurang memadai | |
| Perlunya pengembangan bandara eksisting dan pembangunan bandara baru. | Bandara eksisting belum bisa menerima rute penerbangan dengan pesawat besar. | |
| | Belum adanya transportasi pengumpan dari moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau ke arah pusat kota | |
| | Masih ada daerah yang belum memiliki bandara perintis. | |
| | Perlu peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum. | |
| | Layanan penerbangan perintis belum ada setiap hari. | |

### 2.6.2 Isu-Isu Pembangunan

Isu-Isu pembangunan di Kalimantan Tengah dapat dilihat dari beberapa dokumen atau publikasi yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan baik dalam konteks regional, nasional, bahkan global. Isu-isu lingkungan dibahas secara khusus melalui dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selain itu, isu-isu pembangunan di Kalimantan Tengah juga didapat dari inventarisasi

potensi dan masalah terkait pembangunan dii Kalimantan Tengah. Isu-isu pembangunan ini penting untuk menentukan arah pembangunan Kalimantan Tengah kedepannya. Dengan merespons isu-isu terkait pembangunan ini, diharapkan pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan tepat sasaran dan optima. Adapun, isu-isu pembangunan di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6.43 Matriks Identifikasi Isu Strategis Daerah**

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| | Usia Harapan Hidup Perlu Ditingkatkan | | | Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia | SDM yang Berdaya Saing | Komitmen pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau. |
| | Angka Kematian Ibu Masih Tinggi | | | | | |
| | Eliminasi Penyakit Menular Belum Optimal | | | | | |
| | Masih Tingginya Prevalensi Stunting | | | | | |
| | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Belum Optimal | | | | | |
| | Kualitas Pendidikan dan Literasi Masih Rendah | | | | | Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| | Lama Kepesertaan dan Tingkat Penyelesaian Jenjang Pendidikan Masih Rendah | | | | | |
| Jumlah penduduk usia produktif cukup masif | Kualitas Pendidikan Angkatan Kerja Masih Rendah | | | Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif | | |
| | Pengentasan Kemiskinan Belum Efektif | | | | | |
| | Perlindungan Ketenagakerjaan Masih Kurang | | | | | |
| | Pergeseran Struktur Ekonomi Wilayah dan Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi | | | Pergeseran struktur kelas masyarakat | Ketergantungan pada sektor primer | Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan |
| | Rendahnya Pemanfaatan Nilai Ekonomi dari Hutan | | | | | |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| Penetapan Kalimantan Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional dalam sentra produksi pangan | Rendahnya Produktivitas dan Peran Sentra Pangan Terpadu dalam Mendukung Kemandirian Pangan | | | Rendahnya Produktivitas | Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan Hilirisasi SDA | Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan SDA |
| Potensi Industri Biofarmaka yang Cukup Besar | Aktivitas Perekonomian yang Belum Berkelanjutan | | | | Optimalisasi Praktik Ekonomi Berkelanjutan | Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan |
| | Hambatan dalam Pelaksanaan Hilirisasi | | | | | |
| Potensi energi terbarukan di Kalimantan Tengah cukup tinggi | Perlunya Komitmen dalam Penyediaan Energi Ketenagalistrikan yang memperhatikan keberlanjutan | | | | Pemanfaatan sumber daya terbarukan dalam penyediaan energi | |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| Indeks Pembangunan TIK mengalami tren yang positif | Perlunya Peningkatan Kapasitas Layanan dan Kinerja di Bidang Komunikasi dan Informasi | | Cyber Insecurity | Tata kelola akuntabilitas pemerintah | Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal | Tata kelola pemerintah daerah belum optimal |
| | Perencanaan dan Penggunaan Anggaran dalam APBD yang Belum Optimal | | | | | |
| | Rendahnya Serapan Produk Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah | | | | | |
| | Kondisi Hiper Regulasi dan Under Regulasi Secara Bersamaan | | | | | |
| | Belum meratanya Akses Pelayanan Publik bagi Masyarakat | | | | | |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| | Risiko Korupsi yang Akan Semakin Meningkat di Tengah Upaya Pembangunan | | | | | |
| | Ancaman Kententeraman dan Ketertiban Umum dari Konflik Horizontal dan Situasi Keamanan Global | | Involuntary Migration | Geopolitik dan geoekonomi | | |
| | Demokrasi Masih Prosedural | | Polarisasi Sosial Misinformasi dan Disinformasi Dampak Buruk Teknologi AI | | Perlunya pembangunan pada bidang sosial kebudayaan | Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan kebudayaan lokal |
| | Reformasi Belum Optimal | | | | | |
| | Pembangunan Kebudayaan yang Kurang Optimal | | | | | |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| | Perlunya Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama | | | | | |
| | Perlunya Peningkatan Kualitas Keluarga | | | | | |
| | Belum Optimalnya Pembangunan Kepemudaan | | | | | |
| | Ketimpangan Gender Masih Tinggi | | | | | |
| Potensi ketersediaan air baku yang melimpah | Masih Rendahnya Kapasitas Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air | | | | Infrastruktur Belum Memadai | Ketahanan Air, Energi, dan Pangan yang Rentan |
| | Belum Meratanya Pengelolaan Sampah | | | | Pengelolaan Lingkungan dan Deforestasi | Degradasi Lingkungan |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| Nilai IKLH Kalimantan Tengah ada di atas rata-rata nasional | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Masih Belum Optimal | Deforestasi dan Degradasi Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan | Cuaca Ekstrem | Krisis Lingkungan | | |
| | Kepatuhan Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca Tambang | Kerusakan Habitat (Tempat Hidup Tumbuhan dan Satwa Liar) akibat fragmentasi habitat dan penurunan tutupan lahan | Perubahan kritikal terhadap ekosistem | | | |
| | Aktivitas Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit yang Tidak Sesuai dengan Tata Kelola Lahan | Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut | Biodiversity loss dan gangguan ekosistem | | | |
| | Optimalisasi Konservasi Lahan Gambut | Banjir, kekeringan, dan longsor akibat | | | | |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| | | degradasi lahan | | | | |
| | | Penurunan kualitas air akibat rusaknya fungsi daerah tangkapan air. | Polusi | | | |
| | | Hilangnya Cadangan sumber daya alam akibat hilangnya hutan | Krisis Sumber Daya Alam | | | |
| Letak strategis Kalimantan Tengah yang menghadap langsung ke Pelabuhan Besar di Pulau Jawa | Belum Meratanya Konektivitas dan Aksesibilitas di Kalimantan Tengah | | | | Luas Wilayah dan Aksesibilitas | Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur |

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global (Global Risk Report) | Nasional (RPJMN 2025-2029) | Regional | |
| Persentase Desa Mandiri dalam Indeks Desa Membangun menunjukkan tren yang positif | Pembangunan Desa yang Belum Merata | | | | | Belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antar zona pembangunan |
| Daya dukung lahan permukiman sampai dengan tahun 2030 masih baik/tercukupi | Kurang Meratanya Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | Urbanisasi dan permukiman kumuh | Pembangunan Berkelanjutan dan Resilien |
| | Belum Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Mempertimbangkan Kemerataan dan Keadilan | | | | Ketimpangan Wilayah dan kesejahteraan | |
| | | | | | Kesiapan Kalimantan Tengah Menyongsong IKN | |

### 2.6.2.1 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Isu pembangunan berkelanjutan prioritas dapat dilihat dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045. Dalam hasil kajian tersebut diketahui ada enam isu utama Pembangunan berkelanjutan prioritas. Adapun isu tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6.44 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas**

| No | Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas |
|---|---|
| 1 | Deforestasi dan Degradasi Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan |
| 2 | Kerusakan Habitat (Tempat Hidup Tumbuhan dan Satwa Liar) akibat fragmentasi habitat dan penurunan tutupan lahan |
| 3 | Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut |
| 4 | Banjir, kekeringan, dan longsor akibat degradasi lahan |
| 5 | Penurunan kualitas air akibat rusaknya fungsi daerah tangkapan air. |
| 6 | Hilangnya Cadangan sumber daya alam akibat hilangnya hutan |

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kalimantan Tengah 2025-2045

1. **Deforestasi dan Degradasi Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan**

   Deforestasi dan degradasi hutan menjadi salah satu isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Kalimantan Tengah. Pembukaan hutan dalam skala besar untuk areal perkebunan menjadi tantangan utama dalam mengeleminasi deforestasi hutan. Selain itu, perkebunan kelapa sawit yang menggunakan sistem tanam monokultur juga mengancam keanekaragaman hayati ekosistem alami hutan Kalimantan. Lebih lagi, pencanangan Kalimantan Tengah sebagai kawasan konservasi internasional harus dibarengi dengan pengurangan kejadian deforestasi hutan dan rehabilitasi hutan untuk menjalankan fungsi konservasi dengan baik.

2. **Kerusakan Habitat (Tempat Hidup Tumbuhan dan Satwa Liar) akibat fragmentasi habitat dan penurunan tutupan lahan**

Berkurangnya luasan hutan dan peningkatan degradasi hutan juga berdampak terhadap kerusakan ekosistem alami di dalamnya. Kerusakan ekosistem alami tentunya juga berpengaruh terhadap keberadaan tumbuhan dan satwa liar dalam ekosistem tersebut. Dalam ekosistem hutan, fragmentasi habitat mengakibatkan wilayah jelajah satwa menyempit dan terputus sehingga membuat satwa liar kehilangan wilayah jelajahnya dan memasuki wilayah-wilayah lain yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam ekosistem laut kenaikan suhu muka air laut juga berpotensi merusak terumbu karang (*bleaching)* di perairan Kalimantan Tengah. Adanya penambangan pasir kuarsa di pesisir Pantai dan *destructive fishing* juga turut andil dalam kerusakan ekosistem perairan laut di Kalimantan Tengah. Sedimentasi sungai dan cemaran limbah juga menjadi perhatian lebih mengenai keberlanjutan ekosistem sungai.

**3. Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut**

Perlu adanya penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan daerah untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan gambut. Masih adanya aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan dengan membuka hutan juga perlu menjadi perhatian lebih bagi para pemangku kepentingan.

**4. Banjir, Kekeringan, dan Longsor akibat degradasi lahan**

Hilangnya hutan alami dan degradasi lahan di Kalimantan Tengah dapat menjadi malapetaka dalam ketersediaan air di Kalimantan Tengah. Menurunnya jumlah resapan air dan tangkapan air mengakibatkan bencana hidrologis musiman yang diperparah dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Ketidakmampuan tanah dalam menyerap air secara baik membuat bencana banjir datang pada musim hujan, sebaliknya ketika musim kemarau dilanda kekeringan. Penggundulan hutan di wilayah yang memiliki kelerengan tinggi juga berpotensi meningkatkan resiko bencana longsor.

5. **Penurunan kualitas air akibat rusaknya fungsi daerah tangkapan air**

   Perlu adanya perhatian lebih dalam rangka konservasi air untuk menjaga kualitas air di Kalimantan Tengah, khususnya pada daerah tangkapan air dengan melakukan program-program yang berkaitan dengan perlindungan areal tangkapan air di daerah hulu sungai. Selain itu, perlu dilakukan juga rehabilitasi lahan kritis di daerah hulu sungai serta menerapkan *zero mining* di daerah sempadan dan badan sungai. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas air dengan mengontrol daerah tangkapan air sebagai filter alami. Lebih lanjut, kontrol limbah yang akan dibuang ke sungai juga perlu ditegakkan agar limbah yang dibuang tidak mengandung cemaran berat yang berbahaya. Eliminasi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) juga bisa menjadi cara untuk mengontrol limbah yang berpotensi mencemari badan air.

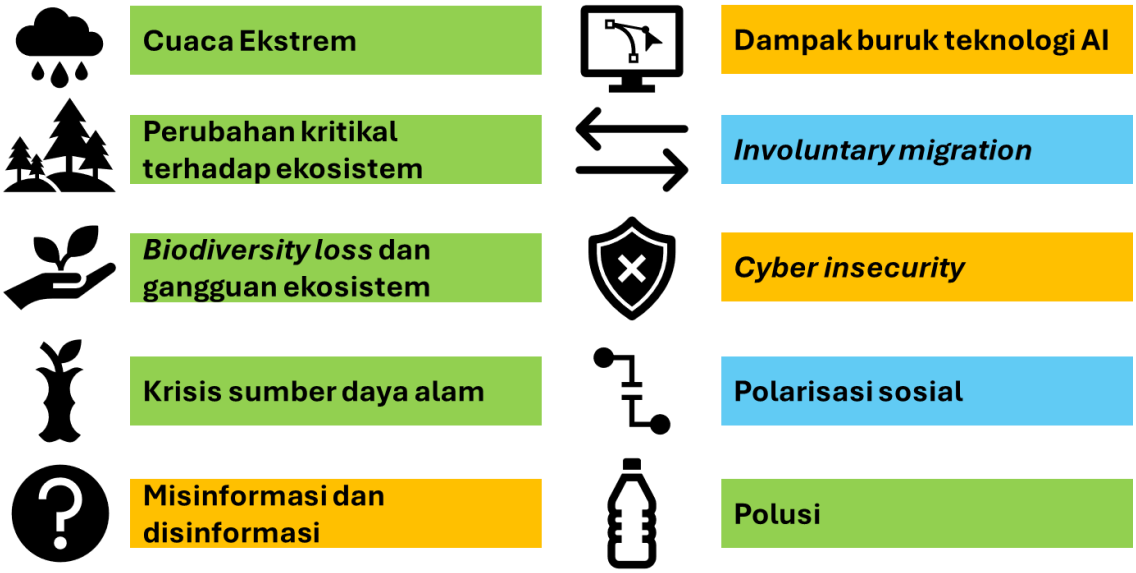
6. **Hilangnya Cadangan Sumber Daya Alam akibat hilangnya hutan**

   Deforestasi hutan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa adanya upaya rehabilitasi berpotensi menghilangkan cadangan sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Perkebunan monokultur juga menjadi ancaman keanekaragaman flora di kawasan hutan. Sistem perkebunan monokultur ini harus diubah menggunakan sistem lain, seperti sistem tumpang sari. Selain itu, praktik-praktik pembukaan hutan untuk perkebunan dan pertanian harus dieliminasi guna menjaga keanekaragaman hayati yang ada di hutan dan menjaga cadangan sumber daya alam yang makin terhimpit.

#### 2.6.2.2 Isu Global

Untuk melihat isu global yang berkembang untuk lima tahun ke depan, dilakukan penelaahan terhadap dokumen laporan organisasi internasional yang salah satunya diterbitkan oleh World Economic Forum. Dalam era yang serba *volatile, uncertain, complex, dan ambiguous* (VUCA), banyak hal yang perlu diantisipasi.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian global dalam waktu sekurangnya 10 tahun ke depan tampak sebagaimana gambar berikut ini.




**Gambar 2.6.1 Isu Pembangunan Global**
Sumber: World Economic Forum

Isu strategis global di atas disarikan dari Global Risk Report yang diterbitkan setiap tahunnya oleh World Economic Forum. Laporan ini mengidentifikasi dan menilai risiko global paling signifikan yang kemungkinan akan berdampak besar pada dunia lima tahun ke depan. Laporan ini disusun berdasarkan survei terhadap para pemimpin bisnis, pakar akademik, pejabat pemerintah, dan perwakilan masyarakat sipil dari seluruh dunia. Isu pembangunan global yang menjadi bahan dalam materi laporan tersebut menjadi acuan yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa hal yang patut disoroti adalah setengah dari isu global tersebut diisi oleh isu seputar lingkungan. Hal ini menjadi vital mengingat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki aset lingkungan hidup yang cukup tinggi nilainya. Peran Kalimantan Tengah sebagai pusat konservasi bertingkat internasional menjadi modal penting ke depannya. Status ini dapat menguatkan nilai strategis Kalimantan Tengah di level nasional untuk diangkat hingga level internasional sebagai perwujudan nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan

pembangunan berkelanjutan. Hal ini sekaligus berarti bahwa segala upaya pembangunan di Kalimantan Tengah harus mengutamakan kelestarian lingkungan dan meminimalisasi dampak lingkungan. Secara lebih rinci, 10 isu tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

**1. Cuaca Ekstrem**

Cuaca ekstrem yang terjadi akibat perubahan iklim dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, rusaknya ekosistem, musnahnya harta benda dan/atau kerugian finansial akibat kejadian cuaca ekstrem. Lebih dari itu, kondisi cuaca ekstrem dapat menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas dari bencana misalnya kebakaran hutan, banjir, dan bencana suhu misalnya gelombang panas. Semakin tidak terkendalinya perubahan iklim dapat memperburuk kondisi cuaca ekstrem ke depannya.

**2. Perubahan besar terhadap ekosistem**

Perubahan ekosistem dapat berkonsekuensi serius. Perubahan ini tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula dalam jangka panjang. Alhasil, upaya mitigasi perlu menjadi perhatian serius agar ekosistem yang ada tetap dapat memberikan daya dukung yang baik bagi kehidupan manusia. Selama ini, perubahan besar pada ekosistem disebabkan akibat pelanggaran atas titik kritis dari kenaikan suhu global. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perubahan iklim yang besar dan berdampak terhadap ekosistem. Akibatnya, perubahan iklim akan berdampak terhadap kesehatan planet bumi dalam mendukung kehidupan manusia sekaligus akan menghilangkan biodiversitas penting di bumi.

**3. *Biodiversity loss* dan gangguan ekosistem**

*Biodiversity loss* merupakan kondisi ketika spesies flora maupun fauna yang menjadi kekayaan alam hilang akibat kepunahan. *Biodiversity loss* diakibatkan rusaknya sumber daya alam yang mengakibatkan kepunahan atau pengurangan spesies, baik pada ekosistem darat maupun laut. Hilangnya satu spesies dalam suatu tataran ekosistem dapat merusak kestabilan interaksi ekosistem yang berakibat kepada efek domino. Konsekuensi ketika kondisi ini berlanjut terjadi dapat berakibat parah

terhadap kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Alhasil, capaian pembangunan yang diharapkan terjadi tidak dapat sepenuhnya terwujud.

**4. Krisis sumber daya alam**

Krisis sumber daya alam dewasa ini menjadi perhatian penting akibat semakin maraknya fenomena kekurangan pasokan makanan atau air untuk penggunaan manusia, industri atau ekosistem. Hal ini dibuktikan dari makin seringnya kondisi kerawanan pangan dan air pada tingkat lokal, regional bahkan global. Kondisi ini diakibatkan dari eksploitasi berlebihan yang dilakukan manusia dan kesalahan pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim (termasuk kekeringan, penggurunan), dan/atau kurangnya infrastruktur yang sesuai. Salah satu penyebab dari krisis ini juga diakibatkan rendahnya kesadaran dan upaya konservasi atas sumber daya alam tersebut.

**5. Misinformasi dan disinformasi**

Informasi palsu yang terus-menerus (disengaja atau tidak) tersebar luas melalui jaringan media sehingga mengubah opini publik secara signifikan menuju ketidakpercayaan terhadap fakta dan otoritas yang berwenang. Bentuk dari kondisi ini adalah termasuk, namun tidak terbatas pada: konten palsu, konten manipulasi, dan konten settingan. Kondisi ini dapat menjadi potensi bahaya di era arus informasi yang cepat dan dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat.

**6. Dampak buruk teknologi AI (*Artificial Intelligence*)**

Teknologi AI tidak dapat dipungkiri merupakan arah dari perkebangan teknologi di era kiwari. Teknologi ini menawarkan berbagai manfaat yang dapat menunjang efisiensi dan efektivtias pekerjaan. Namun, konsekuensi negatif yang disengaja atau tidak disengaja dari kemajuan AI dapat berdampak apabila tidak dilakukan mitigasi dan literasi digital masyarakat yang buruk. Kemampuan teknologi terkait (termasuk AI generatif) perlu diarahkan untuk menunjang produktivitas dan manfaat terhadap individu, dunia usaha, ekosistem, tata kelola pemerintahan, dan perekonomian.

Pemanfaatan AI yang tidak beretika atau bertanggung jawab dapat menyebabkan disrupsi pada pendidikan dan literasi masyarakat secara umum.

**7. *Involuntary Migration***

Perpindahan paksa atau perpindahan yang terpaksa akibat suatu kondisi saat ini menjadi fenomena yang tidak dapat dikesampingkan. Situasi geopolitik yang dinamis dan kejadian bencana alam dapat meningkatkan skala dan frekuensi dari migrasi paksa ini. Faktor pendorongnya termasuk, namun tidak terbatas pada: diskriminasi dan penganiayaan; kurangnya peluang kemajuan ekonomi; bencana yang disebabkan oleh manusia; bencana alam dan kejadian cuaca ekstrem, termasuk dampak perubahan iklim; dan konflik internal atau antarnegara. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia dan pemerintah daerah perlu memperhatikan isu ini dengan kemungkinan ke depan sehingga terdapat upaya mitigasi maupun yang sifatnya kuratif dari fenomena *involuntary migration* tersebut

**8. Cyber Insecurity**

Semakin terkoneksinya dunia melalui teknologi digital dan internet tidak luput dari dampak negatif khususnya soal keamanan digital. *Cyber insecurity* didefinisikan sebagai upaya penggunaan senjata dan alat siber untuk melakukan perang siber, spionase siber, dan kejahatan siber untuk mendapatkan kendali atas kehadiran digital dan/atau menyebabkan gangguan operasional. Contoh dari fenomena ini adalah *ransomware*, penipuan atau pencurian data, *phishing, identity theft* dan lain sebagainya. Literasi digital bagi masyarakat dan penguatan infrastruktur serta SDM keamanan siber di era teknologi informasi menjadi penting untuk meminimalisasi dampak *cyber insecurity* terhadap pembangunan.

**9. Polarisasi sosial**

Polarisasi dipahami sebagai perpecahan ideologi dan budaya di dalam dan antarmasyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya stabilitas sosial, hambatan dalam pengambilan keputusan, gangguan ekonomi, dan

meningkatnya polarisasi politik. Prakondisi ini menjadi ancaman dalam demokrasi serta kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di masyarakat. Upaya preventif untuk meningkatkan kohesi masyarakat, komunikasi publik, dan penanganan krisis yang tepat perlu menjadi perhatian seluruh pelaku di dalam pembangunan.

**10. Polusi**

Meningkatnya populasi penduduk memberikan konsekuensi logis, yakni peningkatan jumlah polutan dan limbah yang dihasilkan. Masuknya bahan berbahaya ke udara, air dan tanah yang berasal dari aktivitas manusia, dapat mengakibatkan, kerugian finansial dan kerusakan ekosistem. Selain itu, krisis sampah di berbagai kota di dunia perlu menjadi peringatan dalam proses pembangunan ke depannya. Penguatan ekonomi sirkular perlu diprioritaskan kembali untuk mengurangi limbah dari aktivitas manusia.

### 2.6.2.3 Isu Nasional

Isu nasional dalam konteks pembangunan secara umum dapat dilihat dari naskah RPJMN Tahun 2025 – 2029. Di dalam naskah tersebut, tampak setidaknya ada 7 (tujuh) tantangan pembangunan yang muncul dalam jangka menengah nasional tahun 2025 – 2029. Ketujuh isu yang menjadi tantangan pembangunan tersebut terlihat sebagaimana tabel berikut:

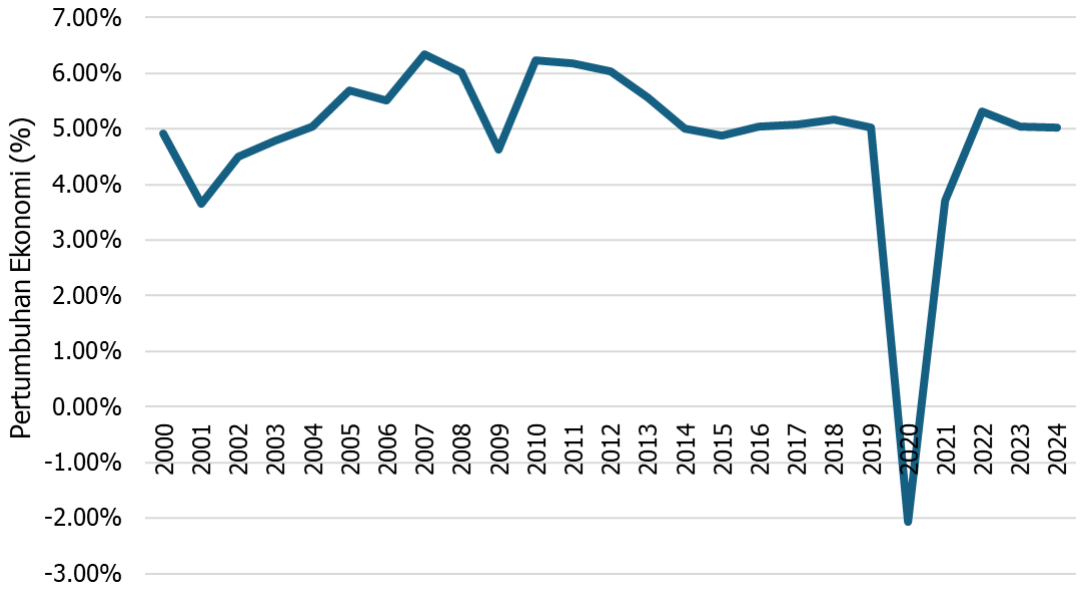
**Tabel 2.6.45 Isu Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029**

| No | Isu Tantangan Pembangunan Jangka Menengah |
|---|---|
| 1 | Rendahnya produktivitas |
| 2 | Rendahnya kualitas sumber daya manusia |
| 3 | Pergeseran struktur kelas masyarakat |
| 4 | Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif |
| 5 | Krisis lingkungan |
| 6 | Geopolitik dan geoekonomi |
| 7 | Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029

**1. Rendahnya produktivitas**

Tingkat produktivitas sumber daya manusia Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, khususnya pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang masih rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Kondisi ini kemudian berkonsekuensi terhadap *outcome* pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif melambat belakangan ini, terutama apabila dibandingkan pada masa-masa pertumbuhan ekonomi di periode 2005 – 2010. Hal ini tampak sebagaimana data pertumbuhan ekonomi berikut ini.




**Gambar 2.6.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000 – 2024**
Sumber: World Bank

**2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat terlihat dari produktivitas tenaga kerja yang didapatkan dari nilai PDB per tenaga kerja. Pada tahun 2022, nilai produktivitas pekerja Indonesia terhitung sebesar

US$28.600 per pekerja. Nilai ini pun relatif masih berada di bawah rata-rata negara di ASEAN dan Amerika Serikat. Di samping itu, rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek pada tahun 2022 relatif menurun dibandingkan tahun 2018. Nilai Indonesia pun relatif jauh tertinggal dengan negara-negara OECD. Dari sisi ketenagakerjaan, terlihat pula bahwa per Agustus 2024, angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh lulusan pendidikan rendah atau lulusan SMP atau sederajat ke bawah sebesar 52,32%. Hanya 12,86% penduduk yang merupakan lulusan dari pendidikan tinggi. Data juga menunjukkan bahwa hanya 41,23% pekerja yang bekerja di sektor dengan keahlian menengah/tinggi. Hal ini secara nyata disebabkan oleh capaian pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah.

**3. Pergeseran struktur kelas masyarakat**

Pergeseran struktur kelas masyarakat terlihat dari perubahan kategori masyarakat berdasarkan rata-rata pengeluarannya per bulan. Selama periode 2019 – 2024, terjadi peningkatan jumlah penduduk kelas menengah menjadi 137,5 juta orang yang mencakup sekitar 49,2% jumlah penduduk Indonesia. Hal ini juga tampak dari peningkatan jumlah penduduk rentan miskin sebesar 12,72 juta orang. Di saat jumlah calon kelas menengah dan rentas miskin meningkat, populasi kelas menengah justru menurun dan masuk ke kelas pengeluaran di bawahnya. Hal ini disebabkan akibat adanya gelombang pemutusan hubungan kerja sebagai respon rasional produsen akibat menurunnya daya beli masyarakat. Pergeseran struktur kelas masyarakat ini patut menjadi perhatian karena akan berkonsekuensi pada respon kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat.

**4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif**

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Indonesia diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Kondisi ini kemudian berkonsekuensi pada banyak hal untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Keterbatasan pada sumber daya, seperti air,

pangan, energi, hingga perumahan menjadi isu yang penting dan akan dihadapi oleh Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu, kepastian terhadap terbukanya lapangan kerja hingga program jaminan sosial yang komprehensif turut menjadi tantangan besar untuk pembangunan di masa depan, khususnya pada penduduk usia produktif.

**5. Krisis lingkungan**

Saat ini, dunia dilanda tiga krisis lingkungan yang sangat masif I*triple planetary crisis*), yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini kemudian berkonsekuensi ke banyak hal, seperti kerentanan jiwa akibat krisis lingkungan, kerugian ekonomi, hingga ancaman kematian akibat bencana alam yang melanda. Di samping itu, krisis lingkungan juga berdampak pada penurunan populasi biodiversitas hingga mencapai pada titik kepunahan. Begitu pula dengan risiko yang besar terhadap umat manusia akibat pencemaran lingkungan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat pencemaran tertinggi di Asia Tenggara. Pencemaran ini juga akan berkaitan dengan timbulan sampah makanan yang semakin besar setiap tahunnya di Indonesia. Seluruh kejadian ini kemudain berdampak pula pada krisis sumber daya alam. Risiko yang muncul dari *triple planetary crisis* kemudian akan menghambat upaya pembangunan ke depannya.

**6. Geopolitik dan geoekonomi**

Dinamika geopolitik dan geoekonomi ke depannya patut menjadi perhatian dalam proses pembangunan karena adanya keterkaitan rantai pasok Indonesia terhadap perekonomian global. Salah satu yang perlu diwaspadai berkaitan dengan eskalasi persaingan antarnegara adidaya di dunia yang memunculkan kekuatankekuatan baru global. Konflik-konflik internasional, seperti Perang Rusia-Ukraina, permasalahan di Selat Taiwan hingga Laut Cina Selatan, dan isu perdamaian di Semenanjung Korea menjadi konflik internasional yang akan berpengaruh ke depannya terhadap pembangunan di Indonesia. Akibat konflik ini, muncul berbagai

permasalahan global baru, seperti krisis pangan dan energi dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Prediksi pertumbuhan ekonomi global juga semakin menurun seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi antarnegara. Di samping itu, perekonomian Indonesia juga masih sangat dipengaruhi oleh pasar global. Pengambilan kebijakan moneter Amerika Serikat akan sangat memberikan efek bagi pasar keuangan di Indonesia di tengah tekanan faktor inflasi hingga pelemahan daya beli masyarakat secara domestik. Volume perdagangan internasional juga mengalami fluktuasi seiring dengan berlanjutnya eskalasi perang dagang yang terjadi antarnegara adidaya.

1. **Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah**

   Isu mengenai pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas yang harus dituntaskan oleh Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar capaian pembangunan nasional tidak terhambat. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Namun, ke depan masih ada tantangan besar dalam menghadapinya di tengah kompleksitas sistem yang ada saat ini. Di samping upaya pemberantasan korupsi, isu berkaitan keamanan data dan pertahanan siber Indonesia patut menjadi prioritas pembangunan ke depan, mengingat adanya berbagai serangan digital yang pernah dialami belakangan ini. Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan muncul isu keamanan siber di Indonesia yang berdampak pada proses pembangunan di Indonesia

#### 2.6.2.4 Isu Regional

Isu regional merupakan isu pembangunan dalam skala regional Kalimantan Tengah. Ada sembilan isu utama dalam pembangunan regional Kalimantan Tengah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6.46 Isu Regional Kalimantan Tengah**

| No | Isu Regional |
|---|---|
| 1 | Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan Hilirisasi SDA |
| 2 | Infrastruktur belum memadai |
| 3 | Luas wilayah dan aksesibilitas |
| 4 | Ketergantungan pada sektor primer |
| 5 | Pengelolaan lingkungan dan deforestasi |
| 6 | Kesiapan Kalimantan Tengah menyongsong IKN |
| 7 | Urbanisasi dan permukiman kumuh |
| 8 | SDM yang berdaya saing |
| 9 | Ketimpangan wilayah dan kesejahteraan |

**1. Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan Hilirisasi SDA**

Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Sentra Terpadu perlu dilakukan guna memanfaatkan investasi yang sudah ditanamkan oleh pemerintah pusat. inovasi dalam pengelolaan bidang pertanian melalui sistem pertanian yang produktif menggunakan teknologi tepat guna perlu dilakukan. Sistem pertanian yang dipakai harus memperhatikan kondisi geografis daerah pertanian tersebut. Penggunaan sistem pertanian yang tepat tentunya dapat meningkatkan produktivitas pada bidang pangan. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi baru juga dapat membantu lahan-lahan pertanian yang dicanangkan sebagai sawah irigasi. Diversifikasi penanaman bahan pangan juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu bahan pangan. Optimalisasi dapat dilakukan dengan menyiapkan industri pengolahan hasil pertanian yang menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi tinggi dan dapat bertahan lama serta dapat dipasarkan baik di dalam Pulau Kalimantan maupun ke luar Pulau Kalimantan. Sebagai pusat konservasi internasional,

Kalimantan Tengah juga perlu menyiapkan regulasi atau Langkah-langkah konkrit dalam melakukan konservasi ekosistem alami.

**2. Infrastruktur Belum Memadai**

Pengembangan infrastruktur pendukung sumber daya air perlu dilakukan dalam rangka penyiapan pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Pembangunan Bendungan dan *check dam* yang berkaitan dengan penyediaan air baku menjadi salah satu contoh pengembangan yang dapat dilakukan oleh Kalimantan Tengah menunjang pembangunan dan penyediaan kebutuhan air masyarakat. Selain itu, pengembangan juga dapat dilakukan untuk mengendalikan banjir, membangkitkan listrik, juga sebagai sumber irigasi bagi pertanian dan perkebunan milik warga.

Belum terpenuhinya rasio elektrifikasi sampai 100% di Kalimantan Tengah mengindikasikan masih ada rumah tangga yang tidak bisa mengakses listrik untuk keperluan sehari-hari. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sistem *on-grid* maupun *off-grid* perlu dilakukan dalam rangka pemerataan elektrifikasi di Kalimantan Tengah.

Dalam pembangunan infrastruktur transportasi, pembangunan pelabuhan utama menjadi tantangan utama pembangunan transportasi di Kalimantan Tengah. Ketiadaan pelabuhan utama menjadi tantangan dalam kemudahan ekspor maupun impor perdagangan di Kalimantan Tengah. Hal ini menandakan produk-produk asli Kalimantan Tengah belum dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan ketiadaan pelabuhan utama. Selain itu, keberadaan pelabuhan utama juga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di Kalimantan Tengah.

**3. Luas Wilayah dan Aksesibilitas**

Dengan luas wilayah yang besar, pembangunan konektivitas antar wilayah di Kalimantan Tengah menjadi tantangan utama pembangunan. Masih adanya beberapa desa terisolasi, belum adanya jalur penghubung antar pusat kegiatan, belum adanya jalur menuju calon pelabuhan utama, serta belum tersambungnya jalan Trans Kalimantan menjadi isu dalam

pembangunan konektivitas di Kalimantan Tengah. Hal ini berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat untuk penyaluran logistik, pemasaran hasil bumi, juga kesiapan industri hilirisasi di masa yang akan datang. Selain itu, belum adanya angkutan umum dalam kota dan antar kota juga menjadi perhatian dalam kesiapan Kalimantan Tengah untuk menyambut pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Angkutan umum juga bisa menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan pribadi yang masih mendominasi mobilitas masyarakat pada saat ini.

**4. Ketergantungan Pada Sektor Primer**

Ketergantungan pada sektor primer yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah, sehingga perlu dilakukan diversifikasi pendapatan pada sektor tersebut. Pengembangan industri-industri baru pada bidang lain perlu didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

**5. Pengelolaan Lingkungan dan Deforestasi**

Isu pengelolaan lingkungan menjadi salah satu isu regional pembangunan di Kalimantan Tengah. Maraknya penggunaan air tanah, pembuangan limbah yang tidak terkontrol, sedimentasi sungai, dan potensi bleaching terumbu karang akibat perubahan iklim menjadi perhatian dalam pembangunan di Kalimantan Tengah. Selain itu, masih adanya deforestasi hutan guna pembukaan lahan dalam skala besar untuk alih fungsi menjadi lahan perkebunan juga menjadi isu dalam pembangunan di Kalimantan Tengah. Hal ini berdampak kepada preservasi ekosistem alami di Kalimantan Tengah khususnya dalam hal konservasi air, wilayah jelajah satwa, dan keberadaan satwa dan fauna endemik khas Kalimantan Tengah.

**6. Kesiapan Kalimantan Tengah Menyongsong IKN**

Dengan adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah harus siap sebagai daerah mitra pembangunan IKN. Penyediaan tenaga kerja terampil, penyediaan bahan pangan, juga penyediaan hal-

hal yang berkaitan dengan keberlangsungan IKN lainnya. Pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan regulasi juga program-program terkait dengan pengembangan tenaga kerja terampil, penyediaan pangan, dan hal yang berkaitan lainnya.

**7. Urbanisasi dan Permukiman Kumuh**

Urbanisasi menjadi tantangan utama dalam setiap pembangunan. Migrasi masyarakat ke kota harus disiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko masalah-masalah klasik perkotaan yang ada sebelumnya. Penanganan urbanisasi perlu dilakukan melalui penguatan regulasi terkait perkotaan serta penyediaan infrastruktur dasar yang baik di perkotaan. Risiko macet, munculnya kawasan kumuh, serta pengelolaan air dan limbah menjadi perhatian khusus dalam menghadapi urbanisasi ini. Khusus untuk permukiman kumuh, penanganan permukiman kumuh yang ada saat ini perlu diselesaikan secepatnya melalui program yang tepat sasaran.

**8. SDM yang Berdaya Saing**

Peningkatan daya saing SDM di Kalimantan Tengah perlu dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, angka Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Tengah tergolong masih rendah, walaupun setiap tahunnya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan yang positif. Maka dari itu, perlu dilakukan penguatan program wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat agar capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah dapat meningkat. Hal ini juga selaras dengan angka Harapan Lama Sekolah yang terus meningkat tiap tahunnya yang menandakan peluang anak untuk bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi mengalami kenaikan secara positif. Peningkatan kondisi infrastruktur pendidikan seperti kelayakan bangunan sekolah dan kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik juga perlu dilakukan agar siswa dapat belajar secara layak, nyaman, dan kondusif.

Dalam bidang kesehatan, Usia Harapan Hidup di Kalimantan Tengah yang masih di bawah rata-rata nasional menunjukkan adanya

pelayanan kesehatan yang belum optimal. Begitu pula Nilai Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang fluktuatif di Kalimantan Tengah. Selain itu, angka penanganan tuberkulosis juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target eliminasi dan bebas TBC di Indonesia pada tahun 2030. Maka dari itu, diperlukan peningkatan pelayanan pada bidang kesehatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat di Kalimantan Tengah.

**9. Ketimpangan Wilayah dan Kesejahteraan**

Ketimpangan pembangunan diakibatkan oleh konektivitas antar wilayah yang belum optimal. Pemerataan pembangunan perlu dilakukan untuk memberikan masyarakat akses yang setara dalam pembangunan wilayah di Kalimantan Tengah. Pemerataan pembangunan dapat dicapai melalui pembangunan desa, peremajaan kota, dan menembus keterisolasian pedalaman dengan tetap memperhatikan ekosistem alami yang ada. Pada bidang kesejahteraan, pengentasan kemiskinan yang tersebar di kantong-kantong kemiskinan perlu dilakukan dengan kebijakan afirmatif. Pemberdayaan masyarakat dengan semangat kearifan lokal dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk lolos dari jurang kemiskinan.

Lebih lanjut, kualitas angkatan kerja juga perlu ditingkatkan sehingga Angka Tingkat Pengangguran Terbuka bisa untuk ditekan. Selaras dengan hal tersebut, jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu ditingkatkan. Dengan begitu, peningkatan kualitas Angkatan kerja dan perlindungan tenaga kerja akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kalimantan Tengah

### 2.6.3 Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis dari permasalahan pembangunan yang ada serta potensi dan mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan serta isu dalam

konteks global, nasional, dan regional maka disusun isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Perhatian terhadap isu strategis ini menjadi penting untuk segenap pelaku pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama Kalteng Tangguh Tahun 2045. Hasil pemetaan isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2025 – 2029 terlihat sebagaimana tabel berikut berikut:

**Tabel 2.6.47 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Isu Strategis |
|---|---|
| 1 | Tata kelola pemerintah daerah belum optimal |
| 2 | Rendahnya kualitas dan daya saing SDM |
| 3 | Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur |
| 4 | Degradasi lingkungan |
| 5 | Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan |
| 6 | Belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antarzona pembangunan |
| 7 | Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam |
| 8 | Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan |
| 9 | Komitmen pembangunan Kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau |
| 10 | Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan |
| 11 | Perlunya peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan kebudayaan lokal |
| 12 | Pembangunan berkelanjutan dan resilien |

### 1. Tata Kelola Pemerintah Daerah Belum Optimal

Tata kelola pemerintah daerah yang belum optimal dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti inefisiensi anggaran, korupsi, dan hingga tata kelola pelayanan publik yang belum efektif dan efisien. Indikasi ini terlihat dari proses digitalisasi pemerintahan yang masih lambat, kompetensi SDM yang belum mumpuni, hingga sistem monitoring dan

evaluasi yang belum berjalan maksimal. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah dan merugikan masyarakat. Padahal, tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi prasyarat utama tujuan dari pembangunan yang diharapkan menjadi tercapai. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik, pemerintah daerah perlu membentuk ekosistem kebijakan yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, reformasi birokrasi, pengembangan kompetensi SDM pemerintahan, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

**2. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM**

Rendahnya kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan produktivitas masyarakat yang rendah pula. Hal ini menyebabkan daya saing SDM menjadi kalah bersaing dengan kualitas SDM di daerah lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat upaya pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi demikian disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah, kualitas pendidikan yang rendah, dan kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan baur bagi SDM. Perbaikan-perbaikan pada faktor determinan rendahnya kualitas dan daya saing SDM tersebut perlu dilakukan. Pemerintah dalam kasus ini harus meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan mutu pendidikan, dan menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Lebih lanjut, pendekatan lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan melalui investasi dalam kualitas dan kesejahteran professional di sektor pendidikan, seperti contoh peningkatan kesejahteraan guru. Dalam konteks pendidikan, guru adalah agen utama perubahan. Namun, mereka seringkali menghadapi tantangan finansial dan fasilitas yang membatasi kinerja. Isu ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM secara nasional, pemerintah

harus memberikan dukungan komprehensif kepada para profesional yang perannya sangat vital. Hal ini tidak hanya terbatas pada guru di sekolah umum, tetapi juga mencakup guru agama yang membentuk karakter dan moral bangsa. Dukungan tersebut bisa berupa penyediaan fasilitas dasar (seperti perumahan), peningkatan pendapatan, pengembangan profesional berkelanjutan, dan pengakuan yang layak atas kontribusi mereka. Dengan memastikan kesejahteraan dan motivasi para profesional ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas SDM secara signifikan di masa depan.

3. **Rendahnya Kapasitas dan Kualitas Konektivitas serta Infrastruktur**

   Mobilitas manusia, barang, maupun jasa akan sangat dipengaruhi oleh konektivitas antarwilayah. Konektivitas ini didukung oleh infrastruktur yang memadai dan andal dalam menyalurkan arus manusia, barang, dan jasa. Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur dapat menghambat mobilitas manusia, barang, dan jasa, meningkatkan biaya logistik, dan menghambat akses ke pasar. Kebutuhan infrastruktur yang dimaksud diantaranya adalah jalan, jembatan, terminal, hingga pelabuhan. Kondisi demikian dalam jangka panjang akan menghambat pembangunan yang merata antarwilayah dan memperlambat upaya pembangunan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrasruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah, kerjasama pembangunan infrastruktur bersama pihak lainnya, pemeliharaan infrastruktur eksisting, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi di dalam masyarakat.

4. **Degradasi Lingkungan**

   Degradasi lingkungan menjadi isu besar dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah disaat mayoritas wilayahnya tertutupi oleh lahan hutan hujan tropis hingga gambut yang menjadi penting mendukung

ekosistem kehidupan. Saat ini, muncul berbagai permasalahan berkaitan dengan pencemaran air, kerusakan lahan hutan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Hal tersebut kemudian akan menurunkan daya dukung lingkungan yang dapat menjadi aspek penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penanganan degradasi lingkungan yang tidak baik pada dasarnya akan berdampak pada penurunan kualitas pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Di samping itu, kualitas hidup akan turut menurun dan justru akan menghasilkan masalah baru yang lebih kompleks. Maka, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan yang baik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan mempromosikan praktik-praktik pembangunan yang berkelanjutan.

5. **Ketahanan Air, Energi, dan Pangan yang Rentan**

   Ketahanan air, energi, dan pangan akan menjadi aspek yang vital dalam memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat dan mendukung upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Adanya kerentanan pada ketiga komponen tersebut akan mengancam ketahanan daerah dan stabilitas sosial. Adanya kerawanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan iklim, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, dan infrastruktur yang tidak memadai. Meningkatkan ketahanan air, energi, dan pangan merupakan hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi, dan meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan pada penggunaan teknologi dan pengembangan inovasi.

6. **Belum Optimalnya Pembangunan Daerah Pedalaman dan Tertinggal serta Ketimpangan Pembangunan Antar Zona Pembangunan**

Luasnya wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah menyebabkan kompleksitas pembangunan daerah dan seringkali menimbulkan ketimpangan yang terjadi antarwilayah kabupaten/kota. Ketimpangan ini terlihat dari masih ditemukannya desa yang belum teraliri listrik dan sinyal komunikasi, waktu tempuh ke pusat kota yang lama, hingga belum optimalnya upaya afirmasi pada kelompok masyarakat adat di pedalaman. Hal tersebut dalam jangka panjang dapat menyebabkan konflik sosial dan muaranya akan menghambat upaya pembangunan. Membangun daerah yang tertinggal dan mempersempit ketimpangan antar daerah merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pengembangan ekonomi di daerah-daerah tertinggal, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

**7. Minimnya Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Turunan Sumber Daya Alam**

Arah kebijakan nasional salah satuny berkaitan dengan upaya hilirisasi produk sumber daya alam agar mendapatkan nilai tambah bagi perekonomian sekaligus menyerap tenaga kerja. Upaya hilirisasi ini kemudian akan bermuara pada diversifikasi produk sumber daya alam yang dapat dijual ke pasar. Kondisi ini dinilai masih belum berjalan dengan baik di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, disinyalir bahwa SDA yang sifatnya bahan mentah masih diperjualbelikan dengan nilai tambah yang rendah. Salah satu akibat yang muncul adalah adanya ketergantungan industri lokal pada ekspor bahan baku. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadapt bahan mentah sumber daya alam ini dapat mengancam ketahanan nasional karena sifat SDA itu sendiri yang tidak terbarukan. Di samping itu, akan muncul pertumbuhan ekonomi ayng tidak berkelanjutan. Untuk mendorong upaya hilirisasi dan diversifikasi ini, pemerintah perlu mendorong investasi di sektor industri

hilir pengolah SDA, meningkatkan riset dan inovasi di bidang SDA, dan meningkatkan akses dan kerjasama perdagangan ke pasar internasional.

8. **Belum Optimalnya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk Menunjang Pembangunan**

   Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi hingga daya saing daerah, riset, inovasi, dan teknologi menjadi kunci untuk mencapai hal tersebut. Rendahnya upaya riset, inovasi, dan teknologi ini dapat berdampak pada pembangunan yang sifatnya akan selalu *business-as-usual*. Padahal, Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan posisinya sebagai Kalteng Tangguh 2045 yang mampu menjadi lumbung pangan dan energi nasional. Perlu adanya upaya pengembangan mutakhir terhadap teknologi baru yang dapat berdampak pada pembangunan, seperti sektor pertanian, perikanan, perindustrian, hingga pariwisata. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan, meningkatkan akses ke internet dan teknologi digital, dan mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan teknologi untuk mendukung pembangunan.

9. **Komitmen Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas, Inklusif, dan Terjangkau**

   Komitmen dalam penyelenggaran dan pembangunan kesehatan berfungsi untuk mendukung kesejahteraan sosial. Kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau akan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Kerjasama swasta dengan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat juga dapat menjadi pendukung dalam penanganan permasalahan *stunting.* Akan tetapi, pemberian Makan Bergizi Gratis juga perlu memperhatikan makanan yang diberikan, harus dipastikan bahwa makanan tersebut bergizi seimbang dan mengurangi pemberian makanan ultra proses kepada anak-anak.

**10. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan sebesar 7-8 persen pada tahun 2029 perlu didukung dengan pengembangan sumber pendapatan pada sektor-sektor produktif dan berkelanjutan. Pengembangan industri baru di bidang agrikultur dan industri pengolahan makanan diharapkan dapat menjadi generator ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Selain itu, pengembangan industri-industri agrikultur juga dapat mendorong pertumbuhan di zodana timur yang ekonominya ditopang oleh sektor pertanian.

**11. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penguatan Budaya Lokal**

Peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan menuntaskan kantong-kantong kemisikinan di daerah perdesaan melalui kebijakan afirmatif. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan perlu memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri finansial secara berkelanjutan. Pemberian insentif selain bantuan langsung tunai perlu dipertimbangkan, seperti contohnya pelatihan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan khusus. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja dari hasil pelatihan tersebut.

Penguatan budaya lokal juga penting untuk dilakukan dalam menghadapi tantangan pembangunan di era digital. Pemerintah harus hadir secara proaktif untuk melindungi dan menghidupkan kembali seluruh khazanah budaya lokal yang menjadi ciri khasnya, baik itu budaya fisik maupun non fisik. Nilai budaya lokal yang dilestarikan dapat menjadi sumberdaya ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memperluas peluang usaha masyarakat.

Pemerintah perlu hadir dalam penguatan budaya lokal melalui pengembangan berbasis komunitas. Masyarakat dapat terlibat dengan aktif dalam kegiatan kebudayaan, baik sebagai pelaku, penikmat, maupun pengembang. Hal ini memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya

"dipajang", tetapi hidup dan berkembang melalui interaksi dan partisipasi aktif.

**12. Pembangunan Berkelanjutan dan Resilien**

Dalam melakukan pembangunan di Kalimantan Tengah, diperlukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan resilien. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penyediaan sanitasi aman dan berkelanjutan, serta fasilitasi perumahan yang terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) merupakan beberapa fokus utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan resilien di Kalimantan Tengah.

Kebijakan-kebijakan integratif yang mendorong praktik-praktik keberlanjutan dan resilien dapat menjadi salah satu contoh dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan resilien. Dengan mencapai pembangunan berkelanjutan dan resilien, diharapkan pembangunan yang terjadi di Kalimantan Tengah akan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak menciptakan kesenjangan sosial.



# BAB III
# VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

## 3.1 Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2025 – 2029 adalah:

**"MENGANGKAT HARKAT MARTABAT MASYARAKAT DAYAK KHUSUSNYA, UMUMNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (MANGGATANG UTUS), DENGAN SPIRIT KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG BERKAH, KALTENG MAJU, KALTENG BERMARTABAT UNTUK MENYAMBUT INDONESIA EMAS 2045"**

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Harkat dan martabat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk masyarakat Dayak menjadi sebuah keharusan yang perlu diangkat oleh pemerintah daerah. Kondisi ini diartikan secara luas dengan tidak hanya mengangkat harkat martabat, adat istiadat, dan seni budaya warisan leluhur saja, tetapi termasuk mengangkat kualitas hidup masyarakat secara multidimensional, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi lainnya. Upaya untuk mencapai hal tersebut perlu dilingkupi dengan spirit kearifan lokal masyarakat dan bingkai sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penting dari mengangkat harkat martabat ini adalah menuju Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan bermartabat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Visi ini dijiwai dengan spirit Isen Mulang dan Huma Betang, Penyangku. Adapun beberapa kata kunci penting yang ada di dalam visi tersebut adalah :

1. **Kalteng Berkah.** Kata Berkah sendiri merupakan akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis yang menjadi visi pembangunan pada periode sebelumnya. Akronim ini menjadi tetap relevan untuk dibawa

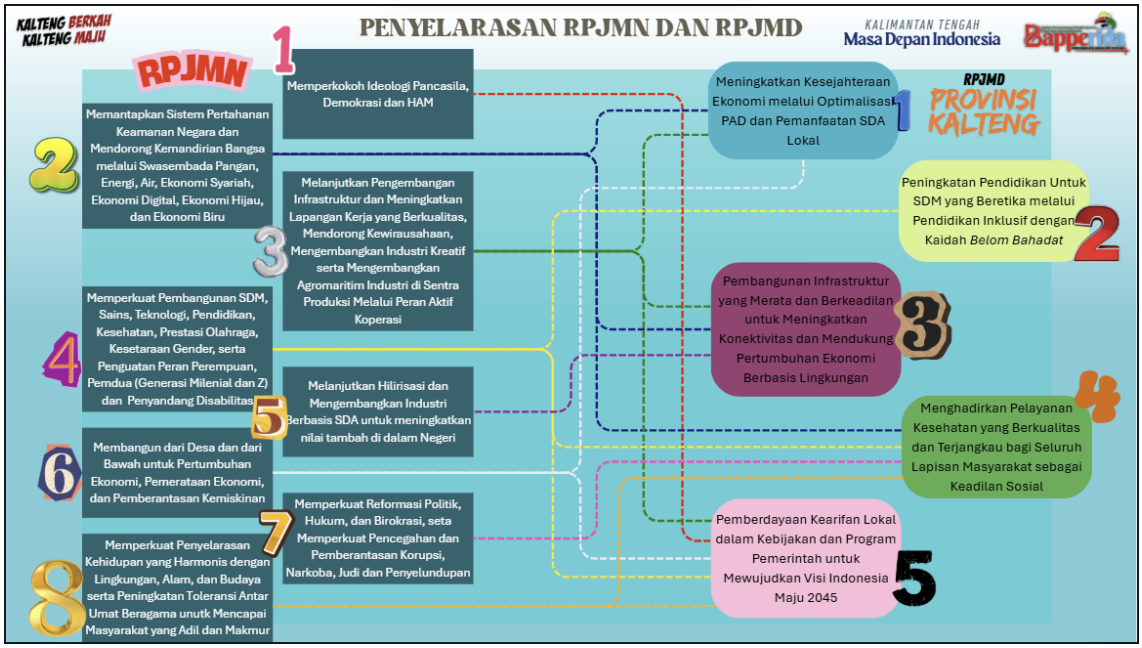
pada periode pembangunan selanjutnya untuk menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan antarperiode di Provinsi Kalimantan Tengah

2. **Kalteng Maju.** Kata Maju mengindikasikan upaya menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang meningkat kualitas sumber daya manusianya, berkembang perekonomiannya, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
3. **Kalteng Bermartabat.** Kata Bermartabat menunjukkan adanya peningkatan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini kemudian mampu meningkatkan martabat masyarakat yang dicirikan dari kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan yang berasal dari leluhur.



## 3.2 Misi

Misi RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penurunan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur serta tetap mengacu pada Misi RPJMN 2025-2029 atau Asta Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Berikut adalah diagram keterhubungan Misi RPJMN 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029.




**Gambar 3.2.1 Keterhubungan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

Dalam rangka melaksanakan visi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka disusunlah misi yang menjadi langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pembangunan. Misi ini juga disusun sebagai arah dan batasan pembangunan yang akan dilakukan. Adapun misi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **MISI PERTAMA: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal**

Misi pertama dalam pembangunan berkaitan dengan aspek ekonomi. Aspek ini menjadi penting di dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap

pelayanan dasar yang sama dan merata serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upaya dalam memastikan kesejahteraan tersebut dicapai diharapkan berasal dari dua transmisi, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai sumber pendapatan yang dibelanjakan untuk menyasar pada masyarakat afirmasi melalui upaya perlindungan sosial oleh pemerintah. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam lokal berarti upaya untuk memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberikan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam konsep kesejahteraan ekonomi, setidaknya ada dua hal penting yang patut menjadi perhatian. Pertama, kualitas SDM masyarakat yang menjadi modal untuk menghasilkan produktivitas. Produktivitas masyarakat yang tinggi akan berkaitan erat dengan imbalan secara pendapatan yang akan diterimanya. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan menunjukkan kapasitas seseorang untuk mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kedua, kualitas belanja masyarakat untuk kebutuhan pokok yang terstandar dan berkualitas. Ini berarti bahwa belanja yang dilakukan oleh masyarakat menyasar pada produk-produk yang bervariasi dengan memperhatikan kualitas barang atau jasa yang dibeli.

**2. MISI KEDUA: Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah *belom bahadat***

Misi kedua berkaitan dengan aspek pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dengan tetap memprioritaskan etika sebagai standar perilaku. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, setiap orang berhak untuk dapat mengakses layanan tersebut sebagai bentuk inklusivitas bahwa setiap masyarakat, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongan, berhak menerima pendidikan yang berstandar dan berkualitas. Ini akan berkaitan erat dengan penyediaan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah secara merata, dukungan tenaga pengajar yang berkualitas, dan pembiayaan pendidikan yang dijamin oleh pemerintah daerah.

Spirit *belom bahadat* atau hidup bertata krama atau sopan santun akan menjiwai setiap proses pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. **MISI KETIGA: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan**

Dengan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerataan pembangunan menjadi konsep yang penting untuk diterapkan. Pemerataan infrastruktur di setiap wilayah ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga mobilitas manusia, barang, maupun jasa dapat terjadi secara lebih efisien dan proses mobilitas yang lancar ini mampu menjadi katalisator pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerataan pembangunan infrastruktur ini kemudian akan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Satu hal penting dalam proses pembangunan ini adalah integrasi wawasan lingkungan dalam pembangunan. Ini diterapkan melalui upaya konservasi lingkungan hingga pengendalian pencemaran atau polusi yang sifatnya komprehensif sehingga tetap menjaga daya dukung lingkungan untuk pembangunan.

4. **MISI KEEMPAT: Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial**

Untuk meningkatkan kualitas SDM, aspek kesehatan menjadi krusial karena menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi untuk pembangunan. Kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang menjangkau masyarakat di seluruh wilayah, kualitas tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, ketersediaan alat dan obat yang diperlukan untuk pelayanan, hingga upaya pembiayaan kesehatan. Seluruh pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk dari keadilan sosial yang diwujudkan pemerintah dalam bidang kesehatan.

**5. MISI KELIMA: Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045**

Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dimaknai sebagai penjiwaan atas budaya lokal yang diintegrasikan dalam proses pengambilan kebijakan maupun implementasi program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini akan berkaitan dengan reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang baik, peningkatan kerukunan umat beragama, hingga pengembangan dan pemajuan kebudayaan lokal. Misi ini menjadi upaya secara internal pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berbudaya, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Visi dan misi yang telah disusun dalam dokumen RPJMD ini telah semaksimal mungkin dilakukan upaya sinkronisasi dengan arah kebijakan dalam tahap I pembangunan sebagaimana tercantum di dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Pada tahap I, pembangunan akan dilakukan melalui penguatan pada fondasi yang akan menjadi penopang upaya transformasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil identifikasi, masih terdapat banyak pekerjaan rumah bagi Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam infrastruktur dan pembangunan manusia yang masih perlu dibenahi dan dipercepat pengentasannya.

| **Tahun 2025-2029 (Periode I)** | **Tahun 2030 - 2034 (Periode II)** | **Tahun 2035 - 2039 (Periode III)** | **Tahun 2040 - 2044 (Periode IV)** |
|---|---|---|---|
| Penguatan Fondasi Transformasi | Pengembangan *Big Push Transformation* | Ekspansi Transformasi Pembangunan | Perwujudan Kalteng Tangguh dan Berdaya Saing dalam Kerangka Indonesia Emas 2045 |

## 3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun di Provinsi Kalimantan Tengah diturunkan dari misi yang telah disusun oleh kepala daerah. Terdapat 10 tujuan dan 25 sasaran yang tersebar di setiap misi yang telah ditetapkan beserta dengan indikasi indikator yang akan digunakan untuk

mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran yang telah disusun. Rincian tujuan dan sasaran pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagaimana matriks berikut ini.

**Tabel 3.3.1 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Indikator di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030**

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| **Visi**<br>Mengangkat harkat dan martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045<br><br>**Misi**<br>1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan sumber daya alam lokal<br><br>2. Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | | **Indeks daya saing daerah** | 3,13 | 3,23 | 3,34 | 3,44 | 3,54 | 3,64 |
| | | Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah | **Kontribusi PDRB Provinsi (%)** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) | 1,08 | 1,24 | 1,39 | 1,55 | 1,70 | 1,86 |
| | | | Rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (%) | 1,94 | 2,05 | 2,16 | 2,26 | 2,37 | 2,48 |
| | | Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi | Tingkat inflasi (%) | 3,70 | 3,65 | 3,60 | 3,55 | 3,5 | 3,45 |
| | | | Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB) | 38,5 | 38,55 | 38,6 | 38,65 | 38,7 | 38,75 |
| | | | Ekspor barang dan jasa (% PDRB) | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46 | 46,1 |
| | Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | | **PDRB per Kapita (Rp Juta)** | 82,40 | 92,6 | 100 | 110 | 124 | 134 |
| | | | **Pertumbuhan Ekonomi (%)** | 5,60 | 6,03 | 6,46 | 6,88 | 7,30 | 7,4 |
| | | Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 19 | 19,30 | 19,75 | 20,15 | 20,60 | 21,10 |
| | | | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 3,91 | 3,85 | 3,79 | 3,72 | 3,61 | 3,52 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| kaidah belom bahadat<br><br>3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan<br><br>4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial<br><br>5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 204 | | | Indeks kapabilitas inovasi | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 2,97 | 3,10 | 3,23 |
| | | | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | 22,78 | 23,89 | 25,01 | 26,12 | 27,23 | 28,34 |
| | | | Indeks ekonomi hijau daerah | 80,88 | 81,66 | 82,44 | 83,22 | 84,00 | 84,78 |
| | | Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%) | 15,19 | 15,43 | 15,67 | 15,90 | 16,14 | 16,38 |
| | | | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%) | 3,84 | 3,95 | 4,06 | 4,18 | 4,29 | 4,41 |
| | | | Rasio kewirausahaan (%) | 3,81 | 3,91 | 4,04 | 4,14 | 4,24 | 4,35 |
| | | | Persentase desa mandiri (%) | 20,46 | 20,88 | 21,16 | 21,86 | 22,35 | 22,82 |
| | Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat | | **Tingkat Kemiskinan (%)** | 4,61 | 4,3 | 4 | 3,6 | 3,43 | 3 |
| | | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat | Total kredit terhadap PDRB (%) | 22,70 | 23,10 | 23,60 | 24 | 24,53 | 24,90 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| | Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau. | | **Indeks Modal Manusia** | 0,54-0,55 | 0,55-0,56 | 0,56-0,565 | 0,565-0,57 | 0,57-0,58 | 0,58-0,59 |
| | | Terwujudnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | | |
| | | | 1) Literasi membaca | 64,29 | 67,86 | 71,43 | 75 | 78,57 | 85,57 |
| | | | 2) Numerasi | 7,14 | 8,86 | 10,57 | 12,29 | 14,00 | 15,72 |
| | | | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | | |
| | | | 1) Literasi membaca | 39,69 | 40,02 | 40,35 | 40,67 | 41 | 41,33 |
| | | | 2) Numerasi | 27,22 | 27,67 | 28,11 | 28,56 | 29 | 29,45 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digitalisasi dan penguatan kurikulum berbasis budaya Dayak | Indeks Literasi Digital | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 3,95 |
| | | Terwujudnya perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, memadai dan terjangkau | Proporsi sekolah dengan akses ke:<br>(a) listrik<br>(b) internet untuk tujuan pengajaran/<br>(c) komputer untuk tujuan pengajaran/<br>(d) air minum layak/<br>(e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin/<br>(f) fasilitas cuci tangan (terdiri air/sanitasi/dan higienis bagi semua (WASH). | 70,6 | 75,88 | 81,16 | 86,44 | 91,72 | 97,00 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| | | Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik dan adaptif terhadap perkembangan IPTEK | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | 64,00 | 71,00 | 78,00 | 85,00 | 92,00 | 99,00 |
| | | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi | Indeks pembangunan literasi masyarakat | 74,27 | 75,95 | 77,62 | 79,30 | 80,97 | 82,65 |
| | | | Indeks ketimpangan gender | 0,430 | 0,421 | 0,412 | 0,403 | 0,394 | 0,385 |
| | Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi | | **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur** | 59,87 | 60,26 | 61,43 | 62,82 | 63,76 | 64,89 |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni/berkelanjutan/dan inklusif. | Rumah tangga dengan akses hunian layak/terjangkau/dan berkelanjutan (%) | 64,53 | 67,15 | 69,77 | 72,38 | 75,00 | 77,62 |
| | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air | Kapasitas air baku (m3/detik) | 1,52 | 1,64 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,12 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| | | Berkembangnya konektivitas wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi serta infrastruktur digital | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi | 82,81 | 83,31 | 83,81 | 84,31 | 84,81 | 85,31 |
| | | | Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 |
| | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | 11,16 | 13,37 | 15,58 | 17,79 | 20,00 | 22,21 |
| | | | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 35,34 | 39,01 | 42,67 | 46,34 | 50,00 | 53,67 |
| | | Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan | Konsumsi listrik per kapita (kWh) | 718,00 | 788,50 | 859,00 | 929,50 | 1000,00 | 1070,50 |
| | | | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) | 183 | 179,75 | 176,50 | 173,25 | 170,00 | 166,75 |
| | | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | 20,00 | 20,75 | 21,50 | 22,25 | 23,00 | 23,75 |
| | | | Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) | 98,73 | 98,98 | 99,23 | 99,48 | 99,73 | 100,00 |
| | Meningkatkan ketahanan | | **Indeks kualitas lingkungan hidup** | 76,34 | 76,51 | 76,68 | 76,84 | 77,01 | 77,18 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| | ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon | Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati | 0,557 | 0,570 | 0,580 | 0,590 | 0,600 | 0,610 |
| | | | Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca | 76,00 | 77 | 78 | 79 | 79,2 | 80 |
| | | Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) (%) | 8,50 | 8,13 | 7,75 | 7,38 | 7,00 | 6,63 |
| | | Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana | Indeks risiko bencana | 94,85 | 93,97 | 93,09 | 92,21 | 91,33 | 90,45 |
| | Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, | | **Usia Harapan Hidup (UHH)** | 74,43 | 74,63 | 74,91 | 75,15 | 75,40 | 75,70 |
| | | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas | Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Medis | 36,80 | 37,85 | 38,90 | 38,95 | 41,00 | 42,05 |

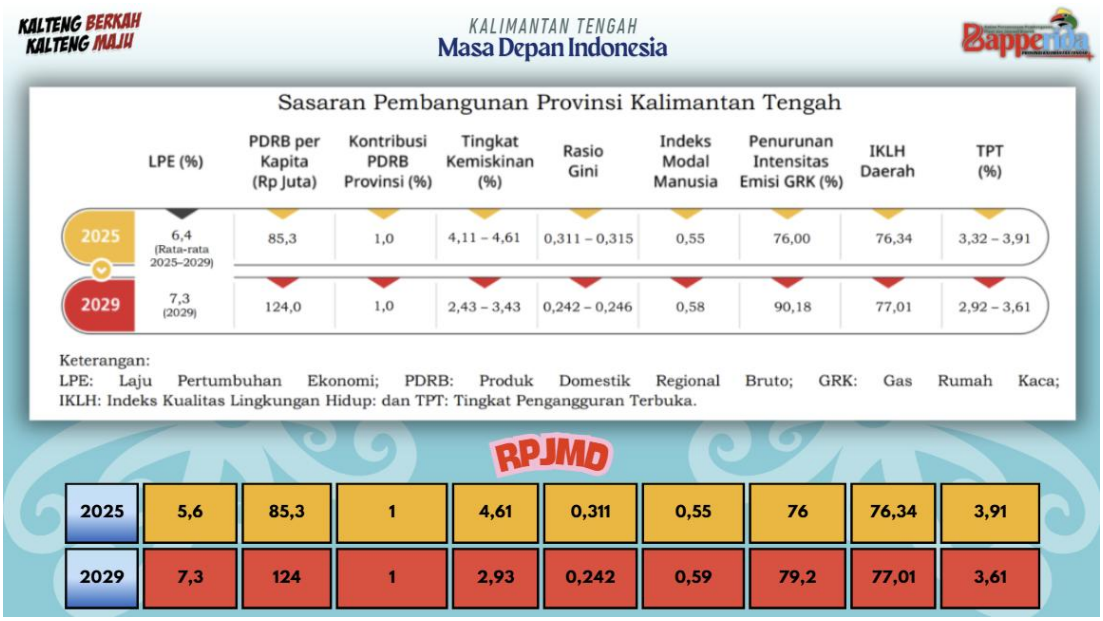
| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| | inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan | dan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | |
| | | | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| | | Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 122,00 | 109,00 | 97,00 | 86,00 | 77,00 | 75,00 |
| | | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 20,60 | 18,80 | 17,20 | 15,50 | 14,20 | 14,00 |
| | Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial | | **Indeks pembangunan kebudayaan** | 60,89 | 61,12 | 61,35 | 61,58 | 61,81 | 62,04 |
| | | Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan | Indeks kerukunan umat beragama | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 | 82 | 82,4 |
| | | | Indeks pembangunan kualitas keluarga | 72,89 | 73,56 | 74,22 | 74,89 | 75,55 | 76,22 |
| | | Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif | Rasio Gini | 0,315 | 0,298 | 0,281 | 0,263 | 0,246 | 0,228 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| | Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan | | **Indeks Demokrasi Indonesia** | 77,57 | 79,25 | 79,35 | 79,5 | 79,8 | 79,9 |
| | | Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat Dayak dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik | 2,90 | 3,03 | 3,15 | 3,28 | 3,40 | 3,53 |
| | | | Indeks integritas nasional | 69,54 | 70,41 | 71,27 | 72,14 | 73,00 | 73,87 |
| | | | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah | 54,05 | 54,95 | 55,85 | 56,75 | 57,65 | 58,55 |
| | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi | | **Rata-rata wilayah Monitoring Centre for Prevention (%)** | 84,00 | 84,75 | 85,50 | 86,25 | 87,00 | 87,75 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik | Indeks reformasi birokrasi | 65,00 | 66,50 | 68,00 | 69,50 | 71,00 | 72,50 |
| | | | Nilai SAKIP | 71,80 | 73,50 | 76,68 | 78,50 | 81,00 | 83,50 |
| | | | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terkelola dan Terukur |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* |
| | | | Indeks reformasi hukum | 70,00 | 71,25 | 72,50 | 73,75 | 75,00 | 76,25 |
| | | | Indeks pelayanan publik | 2,50 | 2,63 | 2,75 | 2,88 | 3,00 | 3,13 |




Dalam perumusan target pencapaian tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah telah memperhatikan juga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, dimana RPJMN memberi imperative terhadap indicator makro kewilayahan Provinsi di seluruh Indonesia, termasuk untuk Provinsi Kalimantan Tengah untuk direncanakan pada RPJMD dan dilaksanakan hingga APBD Tahun 2025-2029. Keselarasan dari Indikator Makro antara lain :

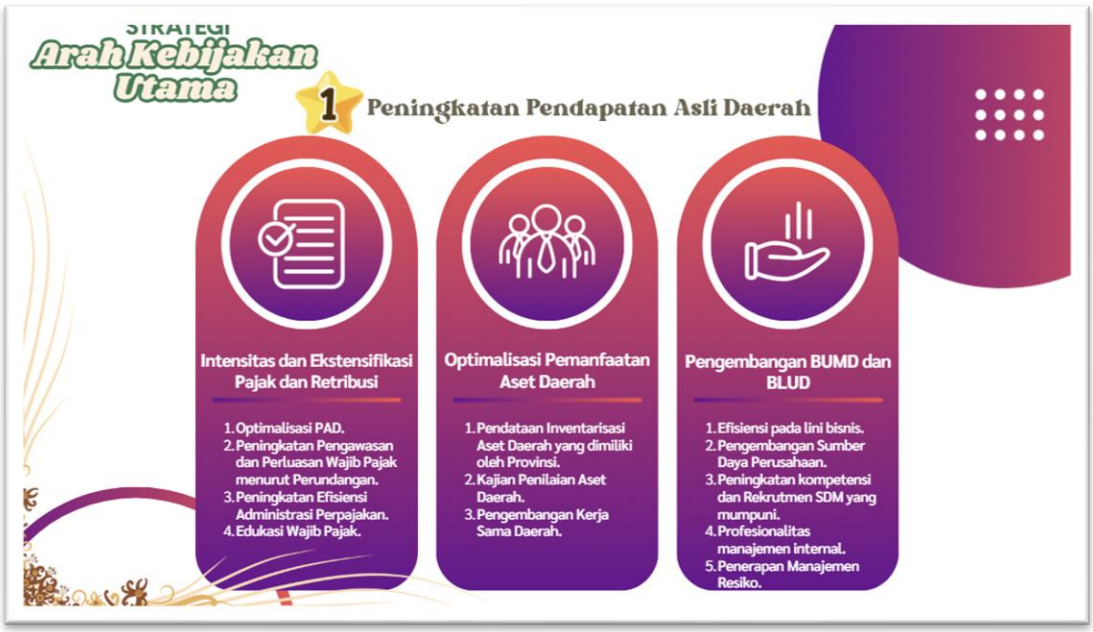


## 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

### 3.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan merupakan penjabaran dari visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan dirumuskan sebagai pendekatan umum dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, sedangkan arah kebijakan memberikan penekanan pada fokus intervensi kebijakan yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan pembangunan disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor serta antar wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyusunannya, strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan dinamika lokal, nasional, dan global, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing daerah, pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat 3 strategi utama Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebagai berikut :

**1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**




Salah satu strategi penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah melakukan optimalisasi PAD sebagai sumber

pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk pembangunan. Kondisi ini menjadi penting dikarenakan dengan adanya berbagai mandat nasional dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, kebutuhan pembiayaan menjadi krusial selain dengan mengandalkan sumber-sumber lain non APBD. Di samping itu, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada periode 2025-2029 sangatlah memprioritaskan peningkatan PAD. Maka, diperlukan strategi-strategi dan arah kebijakan khusus yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan PAD.

- **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi**

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber PAD utama yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah, menyumbang lebih dari 90% PAD dalam struktur APBD. Pemerintah pusat kemudian telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur kembali jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Terdapat perubahan signifikan, khususnya dalam bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Alhasil, proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari segi pendapatan setelah tahun 2025.

Melihat kondisi tersebut, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi PAD, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dalam konteks ini, intensifikasi pajak dilakukan melalui beberapa cara yang sifatnya melakukan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa menciptakan jenis pajak dan retribusi baru yang dipungut kepada masayarakat. Strategi-strategi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.1 Strategi Intensifikasi Pajak**

| No | Strategi Intensifikasi Pajak |
|---|---|
| 1 | **Peningkatan pengawasan dan perluasan wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan**<br>Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi para wajib pajak yang seharusnya menjadi subjek yang dikenakan terhadap pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan |

| No | Strategi Intensifikasi Pajak |
|---|---|
| | perundang-undangan di daerah yang berlaku terkait pajak dan retribusi. Pengawasan juga perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Dalam hal ini, perlunya penerapan insentif dan disinsentif untuk memastikan adanya kepatuhan bagi wajib pajak di daerah. |
| 2 | **Peningkatan Efisiensi Administrasi Perpajakan**<br>Kemudahan dalam proses pembayaran perpajakan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Kemudahan ini dapat diterapkan dari berbagai cara, seperti pembentukan unit pelaksana teknis pemungutan pajak dan retribusi yang menjangkau wajib pajak dengan mudah, alur standar operasional prosedur yang jelas dalam pembayaran, peningkatan integritas pegawai pemungut pajak dan retribusi untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak, metode pelayanan yang dapat dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan perluasan metode-metode pembayaran melalui berbagai platform pembayaran digital (bank hingga dompet digital). |
| 3 | **Edukasi Wajib Pajak**<br>Untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memberikan edukasi bagi para wajib pajak dan calon wajib pajak di daerah untuk meningkatkan kesadarannya membayar pajak dan retribusi. Edukasi ini dapat mencakup terkait peranan perpajakan dalam pembangunan, mekanisme pengenaan dan pembayaran pajak, hingga sistem insentif dan disinsentif dalam pemungutan pajak. Namun demikian, upaya ini perlu dilakukan secara persuasif dan edukatif agar tidak menimbulkan resistensi bagi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak di daerah. |
| 4 | **Optimalisasi Penggunaan Plat KH untuk Kendaraan Bermotor** |

| No | Strategi Intensifikasi Pajak |
|---|---|
| | Salah satu kebocoran pajak yang terjadi adalah warga Provinsi Kalimantan Tengah yang enggan untuk menggunakan tanda nomor kendaraan KH (khusus Kalimantan Tengah) dalam pembelian kendaraan bermotor. Dalam beberapa waktu ke depan, perlu adanya pengawasan dan dorongan dari pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat dengan KTP Provinsi Kalimantan Tengah mendaftarkan kendaraan bermotornya dengan menggunaka kode plat KH, bukan kode dari daerah lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dalam pajak yang berkaitan dengan kendaraan bemotor. |

Selain pada konteks intensifikasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu untuk melakukan upaya ekstensifikasi terhadap jenis pajak dan retribusi yang dinilai secara teknokratik layak untuk dipungut oleh pemerintah daerah, khususnya pada jenis retribusi. Retribusi ini termasuk di dalamnya mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, hingga retribusi perizinan tertentu. Di samping itu, dapat dimungkinkan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memungut pajak lain yang secara kewenangan merupakan otoritas pemerintah provinsi yang didasarkan atas kajian akademik yang layak. Selain pada konteks retribusi, beberapa hal yang dapat ditingkatkan kembali dari segi pendapatannya adalah pajak alat berat dan pajak air permukaan.

- **Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah**

Selain pada jenis pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD nya melalui pemanfaatan aset daerah. Aset daerah dalam hal ini dapat berupa bangunan, gedung, maupun aset tetap lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menghasilkan pendapatan dari penggunaannya oleh pihak lain. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tampak sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4.2 Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah**

| No | Strategi Pemanfaatan Aset Daerah |
|---|---|
| 1 | **Pendataan inventarisasi aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi**<br>Perangkat daerah yang berwenang dalam urusat aset daerah perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kepemilikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan agar mampu menghasilkan pendapatan. Pendataan ini menjadi penting, selain untuk mengetahui aset yang dimiliki oleh pemerintah, juga untuk mengidentifikasi aset-aset yang sifatnya masih belum diutilisasi untuk menghasilkan pendapatan. Aset yang tidak dimanfaatkan, padahal berpotensi, dapat menyebabkan adanya biaya yang timbul dan menjadi beban keuangan bagi pemerintah setiap tahunnya. |
| 2 | **Kajian penilaian aset daerah**<br>Data inventarisasi aset daerah kemudian perlu untuk ditinjau ulang dari segi valuasi aset. Valuasi ini menjadi penting untuk melihat hal-hal seperti *highest and best use* aset hingga penentuan nilai sewa optimal berdasarkan hasil penilaian aset oleh penilai profesional. |
| 3 | **Pengembangan kerjasama daerah**<br>Salah satu potensi penting untuk memanfaatkan aset daerah adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak lain, seperti swasta maupun pihak ketiga. Kerjasama ini menjadi langkah pembuka untuk mempromosikan aset-aset pemerintah daerah untuk dapat dimanfaatkan kepada pihak-pihak lain. Di samping itu, kerjasama ini juga penting untuk membuka potensi-potensi selain pemanfaatan aset yang mendukung proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. |

- **Pengembangan BUMD dan BLUD**

**BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD).**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). BUMD yang sehat dan bertumbuh dengan sendirinya akan terus berkontribusi melalui peningkatan produktifitas dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat tiga indikator utama dalam melihat optimalisasi atau maksimalnya peran dan kontribusi BUMD yang dimiliki daerah, yakni peningkatan produksi dalam bentuk pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nilai tambahnya pada gilirannya berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran dan kontribusi BUMD.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tiga BUMD, yaitu PT Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur. Data terakhir menunjukkan bahwa hanya PT Bank Kalteng yang berkontribusi memberikan sumbangan PAD bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian dan kajian terhadap BUMD secara umum menunjukkan bahwa manajemen bisnis yang tidak profesional, operasi dan proses bisnis yang tidak jelas, investasi yang tidak berdasarkan study kelayakan serta lemahnya pengawasan menyebabkan BUMD justru menjadi salah satu masalah keuangan daerah. Tidak hanya gagal menjadi sumber penerimaan, BUMD bahkan membebani keuangan daerah melalui permintaan penyertaan modal terus menerus.

BUMD sesuai tujuannya sebagai unit bisnis perlu untuk melaksanakan operasionalisasi bisnisnya sesuai dengan standar bisnis yang sehat. Strategi-

strategi penting bagi BUMD agar berkembang diantaranya efisiensi pada lini bisnis melalui proses pengkajian yang matang, perencanaan bisnis yang layak melalui pengembangan sumber daya perusahaan, peningkatan kompetensi dan rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dengan sistem insentif yang layak, serta menjaga integritas manajemen internal perusahaan yang bebas dari konflik kepentingan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, perlu penerapan manajemen risiko yang baik dalam perusahaan untuk mendorong prinsip Governance serta Risk and Compliance yang baik di perusahaan. Pengembangan kerja sama BUMD dengan pihak lainnya juga diperlukan untuk memetakan potensi-potensi bisnis yang dapat menjadi peluang bagi BUMD untuk berkembang di masa yang akan datang.

Pendirian BUMD tidaklah semata-mata sebagai entitas bisnis yang bertujuan hanya untuk mengejar profit, namun beberapa BUMD juga mendapat mandat penugasan pelayanan publik. Oleh sebab itu, BUMD seperti PT Bank Kalteng perlu didorong untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat sekaligus menjadi alternatif pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Perwujudannya dapat berupa program-program kredit bagi segmen-segmen masyarakat tertentu (UMKM, kelompok tani, nelayan dan sebagainya) yang dapat mendorong perluasan inklusi keuangan dan multiplier effect di dalam pembangunan. Selain itu, PT Bank Kalteng dapat menjadi institusi keuangan yang mendorong adanya inkubasi usaha-usaha baru yang dijalankan oleh UMKM.

BUMD lain seperti PT Jamkrida sebagai penjamin kredit dapat menjadi salah satu intermediary lembaga keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya untuk mendukung segmen-segmen masyarakat yang lebih mikro. Disamping itu, fungsi PT Jamkrida secara khusus dapat menjangkau golongan masyarakat yang tidak bankable atau tidak terjangkau oleh institusi keuangan seperti bank. Peranan ini menjadi komplementer untuk menciptakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

PT Banama Tingang Makmur sebagai BUMD aneka usaha dapat menjadi BUMD pendukung berkembangnya perekonomian daerah. Bentuknya yang aneka usaha memberikan fleksibilitas dalam mengembangkan usaha dan beroperasi di

berbagai sektor. Catatan penting bagi PT Banama Tingang Makmur adalah melakukan perencanaan bisnis yang matang; bukan hanya melebarkan lini-lini usahanya saja, tetapi menjalankan bisnis sesuai kelayakan usaha dan kemampuan keuangan. Hal tersebut merupakan bagian dari mitigasi agar BUMD ini berkembang dengan baik dan menghasilkan return investasi yang optimal bagi pemerintah daerah, alih-alih menjadi beban keuangan bagi daerah.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).**

Berbeda halnya dengan BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang menjadi kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan, yang penyelenggaraannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

BLUD memiliki keistimewaan yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu produk dari reformasi keuangan. Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU atau BLUD yang lebih mengedepankan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas pelayanan, alih-alih mencari keuntungan.

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa BLUD diperbolehkan untuk menggunakan seluruh pendapatannya untuk membiayai belanja BLUD. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD, dan seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pelayanan BLUD yang baik dan produktif, serta efektif dan efisien, dengan sendirinya akan mendorong kemandirian BLUD, memungkinkan BLUD untuk mengembangkan rencana bisnis dan anggarannya sehingga tidak

membebani APBD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan dari BLUD yang ada di daerah untuk efisiensi dan optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas.

***CREATIVE FINANCING.***

Perubahan kebijakan Pemerintah terhadap perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dengan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), perlu disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan mencari sumber pendanaan lain melalui creative financing. Ada beberapa potensi creative financing yang dapat diupayakan oleh pemerintah daerah, diantaranya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, hingga potensi pembiayaan berbasis karbon seperti REDD+. Potensi-potensi creative financing ini perlu diidentifikasi dan dipetakan dengan baik sebagai komplementer pemerintah untuk membiayai pembangunan ditengah-tengah keterbatasan APBD.

**DIVERSIFIKASI EKONOMI.**

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih optimal dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan diversifikasi ekonomi. Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa terus-menerus mengandalkan pertumbuhan ekonomi hanya ditopang oleh 1 atau 2 sektor saja, terlebih sektor-sektor yang sifatnya brown economy dan ekstraktif. Tanpa adanya diversifikasi, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah akan stagnan dan cenderung mengalami perlambatan/kontraksi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, basis pajak akan terus menurun yang berdampak pada penurunan PAD dan berujung pada terhambatnya Pembangunan.

**STRATEGI-STRATEGI LAINNYA.**

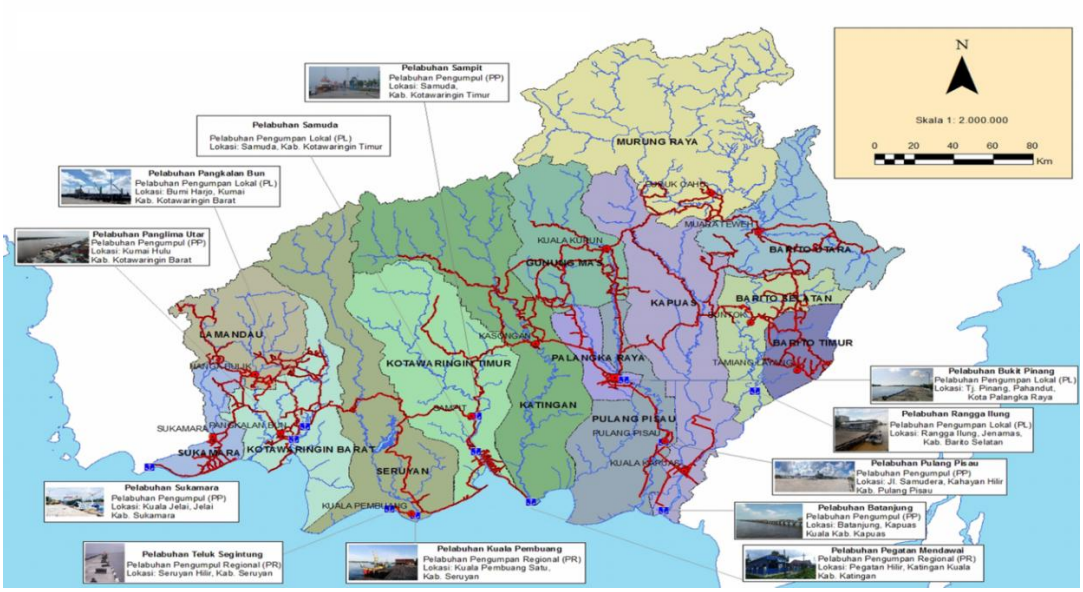
Selain substansi strategi yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa strategi lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah penggunaan BBM industri dengan menggunakan penyalur yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kewajiban perekrutan tenaga

kerja lokal bagi perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, penggunaan Bank Kalteng sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan gaji/honorarium untuk tenaga kerja lokal, hingga pengoptimalisasikan CSR dan program plasma dalam konteks perkebunan sawit.

CSR dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan program-program pembangunan pemerintah daerah. Caranya adalah dengan mengintegrasikan program-program CSR dengan rencana pembangunan daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelarasan dan harmonisasi perencanaan dengan program-program CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan membentuk Forum CSR yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama untuk mengikat komitment kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian kerja sama, pemerintah daerah dapat meminta laporan dan melakukan pengawasan, serta pengarahan dan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sesuai perencanaan, sinergi, tidak tumpang tindih dan dapat menutup kekurangan pembiayaan pembangunan dari anggaran pemerintah daerah.

**2. Pembangunan Koridor Infrastruktur untuk Konektivitas.**

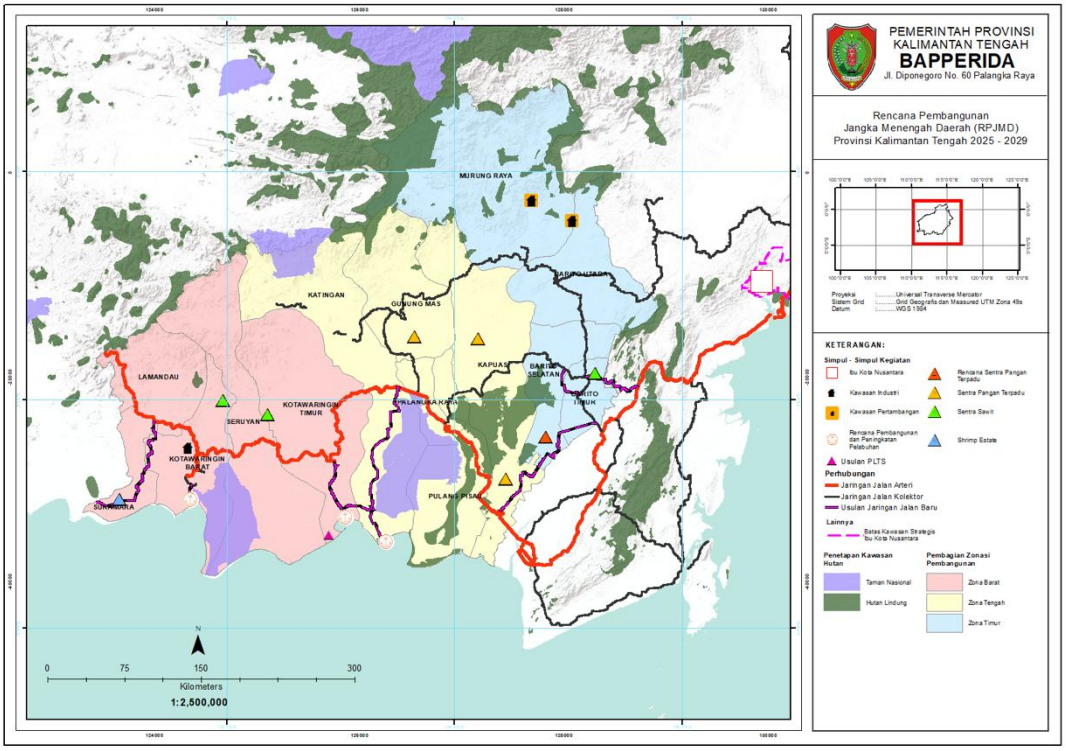
Pembangunan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Tengah diperlukan untuk mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Tengah. Pembangunan bertujuan untuk mempermudah arus logistik manusia dan logistik di Kalimantan Tengah. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan, peningkatan kapasitas daerah outlet, serta pengembangan bandara eksisting menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan konektivitas, baik intra wilayah Kalimantan Tengah juga antar wilayah dengan daerah lain.




Gambar 3.4.1 Daftar Indikatif Proyek Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terlihat bahwa terdapat beberapa prioritas pengembangan pelabuhan di Kalimantan Tengah. Adapun fokus utama dalam pengembangan pelabuhan di Kalimantan Tengah adalah pengembangan pelabuhan regional. Pengembangan Pelabuhan regional meliputi pengembangan Pelabuhan Kuala Pembuang dan Pelabuhan Pegatan Mendawai. Peningkatan kapasitas serta kualitas pelabuhan eksisting seperti Pelabuhan Kumai dan Pelabuhan Sampit juga perlu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas di Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas jalan menuju pelabuhan-pelabuhan di atas juga perlu menjadi perhatian untuk mempermudah arus logistik dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan tersebut.




**Gambar 3.4.2 Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Kalimantan Tengah**

Gambar di atas menunjukkan indikasi peningkatan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah. Adapun indikasi rencana peningkatan infrastruktur jalan adalah sebagai berikut:

i. Peningkatan akses menuju Pelabuhan regional;
ii. Peningkatan akses dari Buntok menuju Kuala Kapuas;
iii. Peningkatan akses menuju IKN melalui Muara Teweh;
iv. Peningkatan akses menuju IKN melalui Buntok;
v. Pembangunan akses pesisir selatan Kalimantan Tengah;
vi. Pembangunan akses Kasongan menuju Kuala Katingan;
vii. Pembangunan akses Kuala Katingan menuju Sampit;
viii. Peningkatan kapasitas jalan poros tengah Kalimantan Tengah;
ix. Peningkatan akses menuju kawasan sentra pangan terpadu;
x. Peningkatan akses menuju kawasan industri;
xi. Penyediaan layanan angkutan umum antar kota;
xii. Penyediaan layanan angkutan umum perkotaan di Palangkaraya; dan
xiii. Peningkatan akses menuju taman nasional.

Untuk meningkatkan konektivitas udara, diperlukan peningkatan kapasitas runway di Bandar Udara H. Asan Sampit untuk mempermudah pesawat jenis Airbus A320 untuk dapat mendarat di bandara tersebut dan mempermudah masyarakat sekitar untuk berpergian dari dan menuju Sampit. Selain itu, penyediaan transportasi umum dari Bandara Tjilik Riwut menuju Kota Palangkaraya juga menjadi perhatian untuk mempermudah akses dari dan menuju bandara.

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagaimana dimaksud tidak semata-mata mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembiayaan pembangunan infrastruktur juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP) sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat dalam Proyek Strategis Nasional.

Selain APBN dan KPBU, pembangunan infrastruktur juga dapat dibiayai melalui sumber pembiayaan alternatif lainnya, seperti pinjaman daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, atau skema *blended finance* yang melibatkan dana hibah dan investasi sosial. Dengan pendekatan multi-pendanaan tersebut, pembangunan koridor infrastruktur di Kalimantan Tengah diharapkan dapat terlaksana secara berkelanjutan, efisien, dan akuntabel, guna memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah dalam kerangka pembangunan nasional.

### 3. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Kalimantan Tengah

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kebijakan strategis Pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional,

mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kawasan dengan fasilitas dan kemudahan yang ultimate dihadirkan bagi investor dalam dan luar negeri. Terdapat beberapa kemudahan dan insentif yang didapatkan jika suatu wilayah ditetapkan sebagai KEK, yakni sebagai berikut.

**Tabel 3.4.3 Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus**

| Fasilitas Fiskal | Fasilitas Non Fiskal |
|---|---|
| **PPN dan PPnBM**<br>Pembebasan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau Jasa kena Pajak (JKP) dari TLDDP, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha, dsb. | **Pelayanan Satu Pintu**<br>Pelayanan perizinan berusaha, perizinan lainnya, dan pelayanan non perizinan dilakukan oleh administrator KEK |
| **Bea Masuk, PDRI, dan Cukai**<br>Pembebasan dan/atau penangguhan Bea Masuk, Tidak dipungut PDRI, dan Pembebasan Cukai | **Perizinan Bangunan oleh BUPP**<br>Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak diperlukan sepanjang Badan Usaha sudah menetapkan pedoman bangunan atau estate regulation |
| **Pajak Daerah**<br>Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 50%-100% | **Pengadaan tanah**<br>Hak Pakai dan HGB sampai dengan 80 tahun. Ditambah percepatan prosedur |
| **Tambahan Fasilitas KEK Pariwisata**<br>Toko bebas PPN bagi pemegang paspor luar negeri, pembebasan PPnBM untuk pembelian rumah tinggal atau hunian | **Imigrasi**<br>VoA dapat diperpanjang 5 kali, izin tinggal terbatas bagi orang asing dan keluarganya serta untuk wisatawan lanjut usia, dan izin tinggal bagi pemilik hunian atau property |
| | **No Negative List**<br>Pemasukan barang impor belum berlaku pembatasan |
| | **SNI Tidak Diwajibkan**<br>Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak diwajibkan di dalam KEK |
| | **Persetujuan Lingkungan oleh BUPP**<br>RKL-RPL Rinci disahkan oleh Badan Usaha |

| Fasilitas Fiskal | Fasilitas Non Fiskal |
|---|---|
| | **Tidak Ada Kewajiban Ekspor**<br>Pelaku usaha di dalam KEK tidak ada Kewajiban Ekspor |
| | **Kepemilikan Asing**<br>Orang asing diperbolehkan memiliki property di dalam KEK Pariwisata |
| | **Lalu Lintas Barang**<br>Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan dan tata niaga di bidang impor |

Pembangunan KEK di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi strategi penting sebagai katalisator dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mencapai indikator-indikator makro pembangunan. Secara umum, terdapat dua sektor yang seringkali menjadi basis dalam pembangunan KEK, yaitu sektor manufaktur dan sektor pariwisata. Menariknya, dua sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan daerah konservasi orangutan di Tanjung Puting maupun di Sebangau menjadi potensi pengembangan untuk katalisator ekonomi di provinsi. Branding sebagai kawasan konservasi internasional juga menjadi menarik untuk menghadirkan wisatawan mancanegara untuk datang dan menikmati pengalaman baru mengenai pariwisata berbasis jasa ekosistem alam.

Di sisi lain, terdapat pula potensi-potensi industri manufaktur yang dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah. Arahan nasional yang ingin menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan dan lumbung energi mengisyaratkan perlunya daerah mempersiapkan industri-industri baru yang mendukung upaya tersebut. Industri potensial yang dapat dikembangkan dalam hal ini adalah hilirisasi sumber daya alam yang ada di wilayah provinsi, seperti kelapa sawit, hilirisasi produk pangan, hingga produk kelautan dan perikanan, baik air tawar maupun air asin.

Dalam mewujudkan pembangunan KEK di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Tentunya, kajian pendahuluan untuk melihat kelayakan harus dilakukan untuk memastikan adanya perencanaan pembangunan yang matang dan sesuai dengan *outcome* yang diharapkan. Kajian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemangku kebijakan, komunitas, hingga masyarakat. Di samping itu, langkah lain yang perlu diperhatikan berkenaan mengenai potensi pembiayaan pembangunan untuk KEK tersebut. Proses ini kemudian akan berusaha memetakan potensi sumber pembiayaan pembangunan, seperti melalui APBN, APBD, dan *creative financing* lainnya, seperti KPBU hingga investasi swasta.

Pembangunan KEK tentunya mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, yakni PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, yang mengatur aspek kriteria lokasi, tata kelola kelembagaan, dan fasilitas insentif fiskal maupun non-fiskal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten terkait telah menyusun rencana pengusulan KEK yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 19 PP tersebut, antara lain: kejelasan batas wilayah, penguasaan lahan minimal 50%, ketersediaan dokumen pendukung seperti studi kelayakan, rencana zonasi, perencanaan lingkungan, dan kesiapan pengelola KEK.

Selain 3 strategi utama tersebut, juga terdapat strategi dan arah kebijakan yang mencakup berbagai sektor prioritas seperti pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Rincian strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tertuang dalam matriks berikut.

**4. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim**

Sesuai dengan Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 sebagai pilar dan landasan transformasi, dalam rangka

mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi pada RPJMD 2025-2029 sebagai Periode Penguatan Transformasi, telah disepakati bahwa transformasi ekonomi yang akan dilakukan adalah melalui ekonomi hijau yang menempatkan pembanguann rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggungnya. Maka, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko perubahan iklim perlu dilakukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Sebagai backbone ekonomi hijau, pembangunan rendah kaborn memiliki sasaran menurunnya emisi GRK(%) di sektor energi, sektor kehutanan dan lahan, sektor lahan gambut dan mangrove (blue carbon), sektor IPPU (Industrial Processes and Product Use), dan sektor limbah domestik, sedangkan pembangunan berketahanan iklim memiliki sasaran menurunnya kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir, sektor air, sektor pertanian dan sektor kesehatan. Keduanya merupakan intervensi utama dalam pengelolaan perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkannya Kalimantan Tengah sebagai Pusat Konservasi Internasional, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Untuk mencegah kerusakan permanen pada iklim yang menopang kehidupan umat manusia, aksi nyata untuk mengurangi gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan menghilangkan kelebihan karbon dari atmosfer penting untuk segera dilakukan, bahkan jika dunia berhenti menggunakan bahan bakar fosil sekalipun, umat manusia tetap tidak akan mampu mencegah skenario iklim yang buruk, kecuali jika umat manusia juga membalikkan kerusakan ekosistem yang menyerap dan menyimpan karbon. Oleh sebab itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki tanggung jawab besar untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya hayatinya.

Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah berperan penting menciptakan keseimbangan ekosistem, memberikan nilai

edukasi, melestarikan budaya, menopang pertumbuhan ekonomi, sumber penghidupan masyarakat lokal, dan menyediakan jasa lingkungan. Namun, pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut menghadapi tantangan berupa ancaman kehilangan keanekaragaman hayati yang disebabkan olah perubahan tata guna lahan dan laut; pemanfaatan secara tidak berkelanjutan; ketergantungan masyarakat di sekitar area bernilai keanekaragaman hayati tinggi; pencemaran lingkungan; jenis asing invasif; dan perubahan iklim.

Keanekaragaman hayati menjadi modal pembangunan berkelanjutan dan sektor penopang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia. Hilangnya keanekaragaman hayati akan mengancam sistem ekologi dan kesejahteraan manusia sehingga berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan manusia, ketahanan pangan, dan bahkan konflik kepentingan. Keanekaragaman hayati harus terus dipelihara untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta menjadi modal pembangunan daerah yang menyejahterakan rakyat Kalimantan Tengah. Dengan demikian, upaya konservasi tidak hanya mencakup perlindungan spesies, habitat, dan ekosistem, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tetapi juga mencakup transformasi ekonomi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi regeneratif melalui inovasi, kolaborasi, dan kemitraan dengan pelaku usaha, masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dalam rangka itu, **pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu menyusun Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) mengacu pada IBSAP 2025–2045** yang telah diitegrasikan ke dalam RPJPN 2025-2045. Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam hayati dan memiliki ekosistem penting bagi keberlanjutan lingkungan hidup, memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam mempertegas komitmen Indonesia, pada tahun 2024, pemerintah Indonesia telah memperbarui komitmen iklimnya melalui Enhanced Nationally Determined Contribution. ENDC terbaru Indonesia berkomitmen pada target pengurangan GRK yang lebih tinggi sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2%

(bersyarat) dibandingkan dengan 29% dan 41% masing-masing dalam versi sebelumnya. Pemerintah juga berkomitmen bahwa ENDC selaras dengan tujuan global untuk menahan laju pemanasan bumi pada tingkat 1,5 derajat.

Langkah-langkah dalam NDC menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan dan terintegrasi, mencakup berbagai kebijakan dan strategi untuk mengurangi emisi, peningkatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan energi terbarukan. Sebagai wujud kontribusi Pemerintah Provinsi dalam pencapaian target ENDC tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi tentang Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi mengacu pada Rencana Aksi Nasional tentang Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang telah dikembangkan dan menjadi bagian integral dari RPJMD.

Area adaptasi dan ketahanan dalam NDC mencakup :

- Pertanian;
- Zona pesisir;
- Ekosistem
- Air;
- Kehutanan, penggunaan lahan, dan perubahan penggunaan lahan;
- Energi;
- Permukiman; dan
- Manajemen risiko bencana.

Selanjutnya untuk pencapaian sasaran menurunnya emisi GRK, implementasi program dan kegiatan penurunan emisi di sub nasional khususnya dari sektor kehutanan dan lahan, memerlukan arahan kebijakan bagi semua pihak dalam pelaksanaannya. Arahan tersebut dapat berupa strategi intervensi yang bersinergi dengan rencana pembangunan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Data menunjukkan bahwa deforestasi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah per tahun (2011-2020) mencapai 116.478,95 hektar per tahun dengan luas rata-rata hutan yang terdeforestasi sebesar 15.329,41 hektar

per tahun, luas rata-rata hutan yang terbakar (2015-2020) adalah 994,25 hektar per tahun, luas rata-rata lahan gambut yang terdegradasi (2011-2020) sebesar 40.098,08 hektar per tahun, dan luas rata-rata konversi mangrove (2011-2020) sebesar 2.683,16 hektar per tahun.

Oleh karena itu, **Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu membangun Arsitektur REDD+ yang terdiri dari Forest Reference Emission Level (FREL/FRL) serta dokumen rencana aksi REDD+ Provinsi dan Safeguard**. Dokumen dimaksud memberi gambaran secara komprehensif bagaimana deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di suatu provinsi disebabkan oleh faktor-faktor pendorong penghasil emisi serta bagaimana langkah mitigasi yang akan dilakukan.

Perhitungan Forest Reference Level (FRL) penting untuk menjadi rujukan bukan hanya bagi kegiatan REDD+ namun juga bagi setiap upaya pengurangan emisi di Kalteng termasuk FOLU Netsink dan upaya lainnya. FREL menjadi benchmark acuan tingkat emisi untuk mengukur kinerja Sub-Nasional dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui implementasi REDD+ yang ditetapkan berdasarkan data dan informasi yang menggambarkan tingkat emisi aktivitas REDD+ pada rentang waktu tertentu.

Besar FRL Provinsi Kalteng 43.801.361,73 Ton CO2e per tahun pada periode referensi 2011-2020, dan Target pengurangan emisi sebesar 33.430.869,51 Ton CO2e per tahun pada tahun 2029.

Dokumen FRL bersama dengan dokumen rencana aksi REDD+ dan safeguard merupakan dokumen sinergis yang akan menjadi pondasi penting bagi upaya mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Tengah dan menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah yang diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target indikator pembangunan pengurangan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan upaya global mengatasi *Triple Planetary Crisis*.

**5. Strategi Industrialisasi dan Hilirisasi**

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah dan mendukung peningkatan target Kontribusi PDRB industri pengolahan, diperlukan strategi dalam membangun industri dan hilirisasi di Kalimantan Tengah. Pada RPJMN 2025-2029 Kalimantan Tengah mendapat indikasi intervensi dalam hilirisasi industri dengan komoditas hilirisasi berupa bauksit dan tembaga. Adapun arahan nasional dalam pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral (bauksit dan tembaga) adalah sebagai berikut:

a. Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri, dengan oitput: rekomendasi keprospekan sumber daya mineral dan rekomendasi kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral.
b. Pengembangan industry hilir/antara olahan sumber daya mineral, dengan output: riset dan inovasi hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan,kebijakan penguatan industri logam, monitoring dan evaluasi, perkembangan industri. smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya.
c. Dekarboniasasi industri dan ekonomi sirkular, dengan output: fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya dan peningkatan manajemen energi dan air serta pemanfaatan EBT (*Renewable Energy*) dalam rangka efisiensi sumberdaya industri).

Lebih lanjut, pada periodei 1 RPJPN 2025-2045 juga dijabarkan bahwa industri berbasis SDA seperti kelapa sawit juga menjadi industri prioritas yang dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional melalui pemngembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui hilirisasi industri berbasis SDA.

Untuk mendukung arahan nasional di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga harus mengutamakan perbaikan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja perlu menjadi perhatian khusus dalam mendukung program industrialisasi dan hilirisasi di Kalimantan Tengah. Peningkatan kualitas tenaga

kerja melalui pendidikan vokasi berbasis industri unggulan melalui upskilling dan reskilling tenaga kerja menjadi salah satu contoh strategi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja di Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, dalam merumuskan strategi industrialisasi di Kalimantan Tengah, penting untuk memperhatikan berbagai kondisi dan tren global yang sedang berkembang. Tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini adalah *triple planetary crisis*, yang mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya polusi dan limbah. Selain itu, muncul pula kebijakan baru seperti *New Green atau Carbon Protection Policy*, di mana negara-negara tujuan ekspor memberlakukan regulasi berkelanjutan seperti CBAM dan EUDR. Kerentanan pasokan bahan baku dan energi akibat dampak perubahan iklim, peningkatan permintaan produk *green lifestyle*, hingga kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional seperti Persetujuan Paris dan Konvensi Stockholm juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, berkembangnya pasar karbon dan pasar modal berkelanjutan membuka peluang baru bagi transformasi ekonomi hijau.

Salah satu strategi penting dalam menjawab kondisi global di atas adalah menerapkan praktik industri hijau yang sejalan dengan tren pembangunan berkelanjutan. Strategi pengembangan industri hijau di Kalimantan Tengah dapat diwujudkan melalui beberapa langkah, antara lain: penerapan teknologi bersih dan efisien energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan rantai pasok berkelanjutan, penerapan prinsip *circular economy* untuk mengurangi limbah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berorientasi pada industri hijau, serta memperkuat insentif dan regulasi yang mendukung investasi ramah lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga arah pengembangan industri dapat ditetapkan secara tepat, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dari perubahan global di atas.

Lebih lanjut, peran industri kecil dan menengah (IKM) menjadi sangat penting dalam ekosistem industrialisasi hijau. IKM dapat didorong untuk bertransformasi melalui penerapan standar produksi ramah lingkungan,

peningkatan akses terhadap pembiayaan hijau, pendampingan teknologi, serta penguatan jejaring dengan industri besar agar tercipta keterkaitan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, pengembangan industri hijau di Kalimantan Tengah tidak hanya bertumpu pada industri skala besar, tetapi juga mampu memberdayakan IKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

**Tabel 3.4.4 Visi, Misi, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal | T1 | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | S1 | Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah | Pengembangan potensi pendapatan asli daerah | Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) | |
| | | | | | | Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata prioritas | Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau. | Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis asset alam di Taman Nasional Tanjung Putting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya dengan pelibatan mitra local. |
| | | | | | | | Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis aset alam di Taman Nasional | Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis asset alam di Taman Nasional Tanjung Putting, Kabupaten |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tanjung Puting, Kabupaten Kotawarigin Barat dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya dengan pelibatan mitra lokal | Kotawaringin Barat dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya dengan pelibatan mitra local. |
| | | | | | | Kerja sama antardaerah dan internasional dalam bidang ekonomi | Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. | |
| | | | | | | Pengembangan manajemen tata kelola di BUMD | Peningkatan produktivitas BUMD. | |
| | | | | | | Pengembangan produk unggulan desa | One Village One Product | |
| | | | | | | Pengembangan sektor usaha dan wisata di desa | Satu Desa Satu Sektor Usaha dan Wisata | |
| | | | | | | Usulan KEK baru di Kalimantan Tengah | Pembangunan KEK baru di Kalimantan Tengah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah | |
| | | | | S2 | Menguatnya stabilitas ekonomi daerah | Pengembangan alternatif pembiayaan | Pemanfaatan pembiayaan alternatif | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dan integrasi ekonomi | kreatif untuk pembangunan | antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem | |
| | | | | | | Prioritisasi belanja pada potensi komoditas unggulan | Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan | |
| | | | | | | Pengembangan kualitas SDM dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi | Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. | |
| | | | | | | Penyusunan upaya mitigatif dan kuratif pengendalian inflasi daerah | Penguatan pengendalian inflasi daerah. | |
| | | | | | | Penerbitan sertifikasi halal pada UMKM dan sertifikat ijin usaha | Percepatan sertifikasi halal untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah | |
| | | | | | | Integrasi pemanfaatan industri jasa keuangan syariah dalam pembangunan | Peningkatan dan pembinaan industri jasa keuangan syariah dalam mendukung kegiatan perekonomian | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | masyarakat di level mikro | |
| | | | | | | Pendidikan literasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat | Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan | |
| | | | | | | Pelatihan keterampilan digital untuk pelaku ekonomi kreatif, fasilitasi inkubator bisnis kreatif, pelatihan perlindungan kekayaan intelektual dan pemasaran digital. | Desentralisasi sektor ekonomi kreatif | Pengelolaan wisata alam secara berkelanjutan dengan output pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata alam, peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) dan fasilitasi usaha ekonomi produktif. |
| | | | | | | Kerja sama antardaerah dan internasional | Pengembangan kerjasama pemerintah daerah | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dalam bidang multidisiplin | | |
| | | T2 | Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | S3 | Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | Pembangunan pusat industri berbasis hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan | Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. | 1. Pengembangan pusat-pusat industri dan hilirisasi industri sumber daya hayati (sawit dan kelapa) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan.<br>2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas. |
| | | | | | | | Pengembangan pusat-pusat industri dan hilirisasi industri sumber daya hayati (sawit dan kelapa) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan | Peningkatan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan kelapa dan investasi industri pengolahan kelapa |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah | Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah |
| | | | | | | | Penyusunan rencana aksi untuk pengembangan kepala sawit berkelanjutan | Pengembangan industri oleokimia dan biofuel berbasis minyak sawit disertai rebranding dan promosi produk sawit berkelanjutan. |
| | | | | | | Pembangunan sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas industri | Peningkatan aksesibilitas antara industri hulu-hilir pada aktivitas produksi | |
| | | | | | | Pengembangan usaha koperasi di bidang hilirisasi komoditas unggulan daerah | Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. | |
| | | | | | | Pembangunan industri hijau berbasis inovasi bernilai tinggi | Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai | Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas bahan baku komoditas sawit dan kelapa |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | pengembangan inovasi. | |
| | | | | | | Perencanaan ekonomi berbasis lingkungan dan aspek keberlanjutan | Pengarahkan aktivitas sektor ekonomi eksisting pada arah praktik ekonomi berkelanjutan | |
| | | | | | | Pengembangan Potensi Kalimantan Tengah melalui penetapan Kawasan Strategis Provinsi | Penetapan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi | Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah khususnya untuk komoditas Gabus, Nila, dan Patin di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Utara |
| | | | | | | | Peningkatan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi | Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap (PUD) |
| | | | | | | | Peningkatan dan dan optimalisasi fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya | |
| | | | | | | | Penetapan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung | |
| | | | | | | | Penegasan dan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang | Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan output |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mengalami penurunan kualitas lingkungan | pemulihan dan restorasi laahn gambut, pengelolaan data infomrasi kesatuan hidrologis gambut (KHG) dan peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut. |
| | | | | | | | Pencegahan dan pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan | |
| | | | | | | Pelibatan masyarakat lokal untuk transisi ke ekonomi berkelanjutan | Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam transisi menuju praktik ekonomi berkelanjutan | Penguatan kapasitas dan perlindungan terhadap masyarakat, kelembagaan dan kewirausahaan perikanan |
| | | | | | | Pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan di PKN Palangka Raya | Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan khususnya di PKN Palangka Raya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengembangan potensi industri biofarmaka | Pemanfaatan potensi industri biofarmaka dari tanaman obat hutan berdasarkan kearifan lokal masyarakat. | |
| | | | | | | Perencanaan ekonomi berbasis potensi daerah | Pengembangan sektor ekonomi lain yang memiliki potensi besar untuk menompang PDRB | Pengembangan kawasan secara *on farm* |
| | | | | | | Pengembangan kompetensi dan produktivitas SDM untuk sektor ekonomi baru | Pengembangan kapasitas SDM dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan | - Penyediaan input produksi perikanan.<br>- Peningkatan kualitas, mutu dan daya saing hasil perikanan |
| | | | | S4 | Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa | Pengembangan produk UMKM berkualitas ekspor | Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. | Peningkatan diversifikasi dan daya saing produk |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Alokasi anggaran di desa untuk mengembangan produk unggulan desa untuk suplai industri | Pembangunan berbasis desa untuk mendukung pengembangan usaha pendukung industri lokal | |
| | | | | | | Penataan organisasi dan SDM kelembagaan di desa dan pelatihan bagi aparatur penyelenggaran pemerintahan di desa | Penataan kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan secara lebih efektif dan efisien | |
| | | | | | | Pengembangan sentra perikanan air tawar | Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah khususnya untuk komoditas Gabus, Nila, dan Patin di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Utara | Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah khususnya untuk komoditas Gabus, Nila, dan Patin di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Utara |
| | | T3 | Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat | S5 | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat | Kemudahan akses dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat, Program PENA untuk masyarakat | Kemudahan akses dalam pemodalan usaha mikro, kecil, dan menengah | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Updating dan pemanfaatan data sosial dan ekonomi terpadu untuk pensasaran penerima bantuan | Pengintegrasian data sosial dan ekonomi terpadu untuk distribusi bantuan ekonomi bagi masyarakat | Penyaluran bantuan social adaptif dan penguatan JKN |
| | | | | | | | Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional | Pengentasan Kemiskinan, integrasi bantuan social, jaminan social, pemberdayaan Masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu system registrasi sosial ekonomi (regsosek) |
| M2 | Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat | T4 | Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau. | S6 | Terwujudnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat | (1) Pemberian bantuan subsidi biaya pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah (2)Implementasi Sekolah Rakyat yang menyasar siswa dari desil 1 dan 2. | Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pemberian bantuan subsidi biaya pendidikan untuk pendidikan tinggi pada bidang prioritas pembangunan daerah | Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global. | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |
| | | | | | | Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatafl akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S7 | Meningkatnya kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digitalisasi dan penguatan kurikulum berbasis budaya Dayak | Pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran | Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |
| | | | | | | Muatan lokal intrakurikuler atau ekstrakurikuler terkait kebudayaan Dayak | Pengintegrasian muatan lokal budaya Dayak dalam pembelajaran | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |
| | | | | S8 | Terwujudnya perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, memadai dan terjangkau | Pembangunan dan perbaikan bangunan sekolah dan tata kelola pendidikan di level sekolahan | Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi. | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | produktivitas tenaga kerja. |
| | | | | | | Bantuan pengadaan alat peraga pendidikan di level SMA/SMK sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas alat peraga pendidikan dalam rangka mendukung pembelajaran kontekstual | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |
| | | | | S9 | Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik dan adaptif terhadap perkembangan IPTEK | Sertifikasi pendidik bagi tenaga pendidik | Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |
| | | | | | | Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik | | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dan tenaga kependidikan | | |
| | | | | S10 | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi | Pembangunan pusat pelatihan vokasional di daerah-daerah pada sektor prioritas pembangunan | Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment. | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |
| | | | | | | Teaching industry pendidikan vokasional bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan | Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mendukung potensi lokal | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pembangunan SMK baru berbasis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pariwisata | Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pariwisata | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |
| | | | | | | Perlindungan dan penanganan terintegrasi untuk kelompok-kelompok afirmatif | Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengembangan kegiatan produktif bagi kelompok-kelompok afirmatif | Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. | Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian Masyarakat. |
| | | | | | | Pengembangan model pengarusutamaan gender di dalam konteks pendidikan | Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. | |
| M3 | Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi | T5 | Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi | S11 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni, berkelanjutan, dan inklusif. | Penyusunan regulasi yang memudahkan proses penyediaan perumahan | Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. | Fasilitasi pembangunan rumah baru |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | berbasis lingkungan | | | | | | | |
| | | | | | | (1) Pembangunan perkotaan yang human-sentris dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar serta transportasi publik terintegrasi<br>(2) Rehabilitasi kawasan permukiman kumuh | Peremajaan kota (urban renewal) dan penanganan kawasan permukiman kumuh secara inklusif berkelanjutan serta terhubung dengan infrastruktur strategis. | Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik |
| | | | | | | Peningkatan aspek-aspek layanan dasar rumah layak huni dan terjangkau | Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. | Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif | 1. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik.<br>2. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z |
| | | | | | | | Peningkatan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat | 1. Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah.<br>2. Peningkatan utilitas dasar perdesaan |
| | | | | | | Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan | Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. | Fasilitasi pembangunan rumah baru |
| | | | | | | Pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi | Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman di kawasan transmigrasi | 1. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi. |
| | | | | | | | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kawasan Transrmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara, serta Kwasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas. |
| | | | | | | Pembangunan hunian vertikal dengan layanan dasar permukiman yang terintegrasi sistem transportasi public | Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. | Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (1) Rehabilitasi permukiman kumuh (2) Peremajaan kota melalui pendekatan human sentris | Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. | Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik |
| | | | | | | Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan bauran pendanaan pembiayaan perumahan | Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. | Fasilitasi pembangunan rumah baru |
| | | | | | | Fasilitasi masyarakat di daerah afirmasi dalam penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau | Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi. | Fasilitasi pembangunan rumah baru |
| | | | | | | Penyediaan rumah yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan Kawasan Strategis. | Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, | Fasilitasi pembangunan rumah baru |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | khususnya untuk pekerja. | |
| | | | | | | Penataan bangunan gedung untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca kumulatif | Implementasi kebijakan penataan bangunan gedung | |
| | | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam prroses pengelolaan tanah dan tata ruang untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S12 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air | (1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan air minum<br>(2) Penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya air<br>(3) Perlindungan mata air eksisting<br>(4) Reaktivasi mata air terbengkalai<br>5) Eksplorasi mata air baru<br>6) Perlindungan badan air dari cemaran berat<br>(7) Daur ulang air | Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana. | |
| | | | | | | | Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal | Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (1) Menyusun masterplan drainase regional berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terintegrasi dengan sistem tata ruang dan mitigasi bencana;<br>(2) Melakukan pemetaan sistem drainase eksisting dan kawasan rawan genangan secara menyeluruh untuk menentukan prioritas intervensi;<br>(3)Pembinaan dan koordinasi lintas sektor melalui forum teknis terpadu;<br>(4) Melakukan sistem drainase berwawasan lingkungan; dan<br>(5) Menyediakan pembiayaan Operasi dan | Penyediaan drainase berwawasan lingkungan dan terintegrasi sistem tata ruang dan mitigasi bencana | Peningkatan kualitas ekosistem mangrove dengan output pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove, penguatan data dan informasi public perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove serta rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem (RPPE) Mangrove. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pemeliharaan (OP). | | |
| | | | | | | Pembangunan bendungan multiguna | Pembangunan bendungan multiguna untuk mendukung penyediaan air baku dan air minum, pengendali banjir, serta sebagai upaya pemenuhan infrastruktur yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, pertanian, dan pariwisata. | 1. Pengembangan kawasan secara geospasial.<br>2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal |
| | | | | | | Penyediaan area retarding basin. | Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. | |
| | | | | | | Pembangunan check dam di 11 sungai besar di Kalimantan Tengah. | Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dan sumber pengairan persawahan. | |
| | | | | | | Pembangunan sistem irigasi di WS Barito Mentaya-Kantingan | Pengembangan irigasi di WS Barito, Mentaya-Katingan untuk mendukung lumbung pangan nasional | Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal |
| | | | | | | Penyediaan sistem irigasi baru pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai. | Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. | Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal |
| | | | | S13 | Berkembangnya konektivitas wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi serta infrastruktur digital | Pengembangan pelabuhan eksisting dan pembangunan pelabuhan utama | Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu dan pembangunan pelabuhan utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. | Pengembangan kawasan secara geospasial |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengembangan Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Bandara Iskandar, dan bandara eksisting lainnya | Pengembangan Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Bandara Iskandar, dan bandara lainnya secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. | |
| | | | | | | Penyusunan regulasi untuk mengakomodasi pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan | Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. | Pengembangan kawasan secara geospasial |
| | | | | | | Penyusunan regulasi untuk mengakomodasi pembangunan infrastruktur perkeretaapian | Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian dan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. | Pengembangan angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. | Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik |
| | | | | | | Penyediaan regulasi dan dokumen pendukung untuk pengadaan transportasi umum di PKN Palangkaraya | Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal utamanya di PKN Palangkaraya. | |
| | | | | | | Peningkatan layanan konektivitas serta keselamatan keamanan transportasi di Kalimantan Tengah | Pengembangan infrastruktur dan layanan konektivitas (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan | Pengembangan kawasan secara geospasial |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penyediaan konektivitas menuju pelabuhan, kawasan industri, serta kawasan food estate | Jalan akses menuju simpul transportasi (Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Batanjung, Pelabuhan Sukamara, dan Bandara H. Asan Sampit), penanganan jalan mendukung Kawasan Industri (KI Surya Borneo), dukungan jalan akses Kawasan Food Estate (Kab. Kapuas & Kab. Pulang Pisau), peningkatan jalan daerah, penanganan daerah rawan kecelakaan, dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan | Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistic untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan |
| | | | | | | Pengembangan pelabuhan serta dermaga penyeberangan | Pengembangan Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Bahaur, serta pengembangan pelabuhan penyeberangan dan sungai perintis | |
| | | | | | | Pembangunan Bandara Baru Murung Raya serta peningkatan | Pengembangan transportasi udara antara lain Bandara Baru Murung Raya dan | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | layanan Bandara Kuala Kurun | layanan dari/menuju Bandara Kuala Kurun | |
| | | | | | | Pengembangan jalan menuju Pelabuhan Sebuai, Teluk Sampit, dan penghubung kabupaten/kota di wilayah pesisir ke Jalan Trans Kalimantan | Pengembangan jaringan jalan di wilayah pesisir selatan Kalimantan Tengah | |
| | | | | | | Pembangunan infrastruktur jaringan telepon dan internet di desa yang belum teraliri jaringan telepon dan internet | Pengentasan Desa Blankspot Jaringan telepon dan internet | |
| | | | | | | Pengembangan konektivitas infrastruktur antarmoda, penyusunan roadmap pengembangan angkutan umum perintis antarwilayah, | Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektvitas udara) dan sarana penunjang logistik | Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan | |
| | | | | S14 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum | Penyediaan akses terhadap air minum secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya air yang baik serta pemenuhan sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif | Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (1) Penyediaan air minum jaringan perpipaan di wilayah perkotaan<br>(2) Pemenuhan akses sanitasi terpusat di wilayah perkotaan<br>(3) Pengurangan pengambilan air tanah secara langsung untuk kebutuhan air minum | Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir. |
| | | | | | | Penguatan kelembagaan PDAM | Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir. |
| | | | | | | Pelaksanaan kontrol bulanan kualitas air minum PDAM | Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai PDAM dalam pengelolaan air minum<br>(2) Penerapan teknologi tepat guna dalam penyediaan air minum sesuai dengan karakteristik daerah | Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir. |
| | | | | | | (1) Penerapan teknologi tepat guna dalam penyediaan air minum<br>(2) Eksplorasi Mata Air Baru | Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir. |
| | | | | | | Edukasi Bahaya BAB Sembarangan | Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman. | |
| | | | | | | Penyediaan sistem jaringan air minum dan sanitasi terpadu berbasis prinsip *Citywide Inclusive Sanitation* (CWIS) | Pemenuhan akses air minum & sanitasi aman | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir. |
| | | | | S15 | Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan | Pemenuhan jaringan infrastrukur tenaga listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik | Pengentasan desa belum teraliri listrik | Pembanguuan jaringan distribusi dan listrik pedesaan |
| | | | | | | Pengembangan energi baru dan terbarukan untuk industri dan rumah tangga | Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia | Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergy. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Peningkatan konektivitas tenaga listrik disertai pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan digitalisasi | Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergy. |
| | | | | | | Pembangunan energi baru dan terbarukan untuk daerah belum teraliri listrik | Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik | Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergy. |
| | | | | | | Pengembangan sistem transmisi dan distribusi listrik | Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik | Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga Listrik serta infrastruktur gardu induk |
| | | | | | | Pemetaan potensi dan pemanfaatan biomassa untuk co-firing | Pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengembangan teknologi terintegrasi dalam bangunan untuk jaringan listrik cerdas | Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik | Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat, dan layanan penyiaran digital disertai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan digitalisasi masyarakat |
| | | | | | | Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk kebutuhan energi daerah belum teraliri listrik | Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil *(isolated mini/micro-grid)* untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas | |
| | | | | | | Riset dan inovasi bidang penyimpanan energi | Pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi | |
| | | | | | | Pengembangan sistem ketenagalistrikan untuk kebutuhan transportasi | Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi | Peningkatan konektivitas tenaga listrik |
| | | | | | | Riset dan inovasi serta standardisasi SDM bidang ketenagalistrikan | Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Integrasi data DTSEN untuk subsidi energi listrik di daerah | Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. | Tata Kelola dan pemanfaatan data regsosek |
| | | T6 | Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | S16 | Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon | Penguatan kerjasama melalui forum wilayah yang tergabung dalam Heart of Borneo | Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. | Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistim di Wilayah Kalimantan Tengah termasuk Heart of Boneo disertai peningkatan Upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana |
| | | | | | | | Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistim di Wilayah Kalimantan Tengah termasuk Heart of Boneo disertai peningkatan Upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana | Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistim di Wilayah Kalimantan Tengah termasuk Heart of Boneo disertai peningkatan Upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (1) Percepatan rehabilitasi hutan gundul dan reklamasi lahan bekas tambang.<br>(2) Penindakan hukum pelaku deforestasi di Kalimantan Tengah | Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. | |
| | | | | | | Penguatan regulasi terkait pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan | Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. | Pelibatan peran masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dengan output pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati dan peningkatan kompetensi masyarakat pemanfaatan kawasan konservasi. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penguatan regulasi terkait perlindungan ekosistem alami hutan daratan dan bakau serta wilayah jelajah satwa. | Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan. | |
| | | | | | | Meningkatkan akses pembiayaan berkelanjutan untuk preservasi kawasan dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi karbon | Peningkatan nilai ekonomi karbon melalui skema pembiayaan berkelanjutan | |
| | | | | | | Meningkatkan akses kerjasama dengan organisasi internasional dalam peningkatan nilai ekonomi karbon | Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengembangan perhutanan sosial | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Perhutanan Sosial dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat | Pelaksanaan penataan asset reforma agraria |
| | | | | | | Pengkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan | Penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahan dan keamanan | |
| | | | | | | | Pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan | |
| | | | | | | | Pengembangan kegiatan budi daya secara selektif didalam dan sekitar kawasan | |
| | | | | | | | Pemeliharaan aset-aset pertahanan dan keamanan | |
| | | | | S17 | Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan | Pengembangan pertanian bahan pokok non-padi. | Pengembangan diversifikasi pangan. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengembangan lahan KSPP untuk produksi padi. | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate sebagai penguatan ekosistem pangan khususnya padi, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani sekaligus sumber ekonomi baru kawasan/wilayah | Penguatan integrasi hulu hilir/rantai produksi pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani |
| | | | | | | | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara, serta Kawasan Transmigrasi Arus Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gerakan bijak penggunaan energi, konsumsi pangan, dan penggunaan air | Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus. | |
| | | | | | | Pengembangan *urban farming* | Pengembangan pertanian di daerah perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan | Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal |
| | | | | S18 | Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana. | Pelatihan teknis ketangguhan bencana serta penyediaan sistem peringatan dini bencana. | Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. | |
| | | | | | | Pelatihan serta edukasi terkait mitigasi bencana. | Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. | |
| | | | | | | Penyelesaian pengendalian bencana melalui solusi berbasis alam (normalisasi sungai dan eliminasi pembukaan | Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. | Pengendalian kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan, dengan output penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta operasi |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ladang dengan pembakaran hutan). | | modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) |
| | | | | | | Pelatihan serta edukasi terkait mitigasi bencana di Kota Palangkaraya. | Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim di Kota Palangkaraya | |
| M4 | Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial | T7 | Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | S19 | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan | Rekrutmen tenaga kesehatan dengan insentif tambahan untuk penempatan daerah terpencil | Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. | Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penguatan kelembagaan Posyandu di desa-desa | Peningkatan cakupan imunisasi, serta penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan) | 1. Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan<br>2. Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan. |
| | | | | | | Penguatan fungsi puskesmas dalam pelayanan kesehatan | Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. | Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan |
| | | | | | | | Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan | Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S20 | Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | Pengembangan kelembagaan dan komunitas masyarakat untuk penanganan stunting dan malaria | Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor | 1. Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan<br>2. Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi.<br>3. Pengendalian penyakit malaria. |
| | | | | | | | Penguatan pencegahan dan percepatan panurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular | Penguatan intervensi spesifik dan sensitif stunting |
| | | | | | | Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat | Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. | Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penguatan program-program kesehatan pencegahan dan penanganan di daerah untuk penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan | Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC, malaria) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta) | 1. Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader Kesehatan.<br>2. Pengendalian penyakit malaria. |
| | | | | | | Perluasan penerima bantuan iuran pada kelompok-kelompok marginal | Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan |
| M5 | Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 | T8 | Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial | S21 | Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan | Pengembangan peranan FKUB | Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. | Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat masyarakat dan perlindungan atas eksistensinya | Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. | |
| | | | | | | Pengembangan destinasi wisata budaya berbasis potensi kebudayaan lokal | Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. | |
| | | | | | | Pengembangan seni dan budaya bagi masyarakat dan komunitas | Pelestarian tradisi dan kebudayaan lokal untuk pemantapan penjenamaan daerah dan penguatan modal sosial masyarakat | |
| | | | | | | | Penjagaan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pelestarian seni dan budaya Dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisonal | |
| | | | | | | Pendidikan budaya yang terintegrasi, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun nonkurikuler | Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. | |
| | | | | | | Pembangunan ruang publik yang terstandar | Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. | |
| | | | | | | Pendidikan kepemimpinan bagi masyarakat | Penguatan karakter dan jati diri bangsa. | |
| | | | | | | | Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penguatan kelembagaan sosial | Penguatan kelembagaan dan wilayah kebudayaan masyarakat hukum adat | |
| | | | | | | | Penguatan tata kelola dan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan | |
| | | | | | | Pembangunan berbasis keluarga di desa-desa | Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. | |
| | | | | S22 | Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif | Prioritas perlindungan sosial untuk kelompok marginal | Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. | Pengentasan Kemiskinan, integrasi bantuan social, jaminan social, pemberdayaan Masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu system registrasi social ekonomi (regsosek) |
| | | | | | | Pemanfaatan dan pemutakhiran data DTSEN untuk program pembangunan | Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data DTSEN untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. | Tata Kelola dan pemanfaatan data regsosek |
| | | | | | | Manajemen APBD dan APBDes dan | Perencanaan, penganggaran melalui | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | komitmen penganggaran untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat | APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. | |
| | | | | | | Perlindungan sosial untuk masyarakat terdampak risiko bencana, perubahan iklim, dan ketenagakerjaan | Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | pemberdayaan ekonomi, program Kesehatan, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pembangunan lingkungan yang inklusif, khususnya bagi penduduk lansia dan penyandnag disabilitas | Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. | |
| | | | | | | Perluasan akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi | Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada kelompok afirmatif | Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. | Pengembangan Layanan Unggulan Berbasis Kompetensi |
| | | | | | | Penguatan fungsi kesatuan bangsa dan politik dalam upaya kuratif penanganan konflik | Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. | |
| | | | | | | Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan | Penguatan integritas partai politik. | |
| | | | | | | Kerja sama perangkat daerah dengan aparat penegakan hukum yang berwenang | Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/psikotropika dan pencurian. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T9 | Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan | S23 | Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat Dayak dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat | Partisipasi publik dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan lainnya | Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. | |
| | | | | | | Musyawarah rencana pembangunan dengan keterlibatan publik | Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. | |
| | | | | | | Forum pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan pelibatan masyarakat secara lebih luas | Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. | |
| | | | | S24 | Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM | Forum pengendalian dan evaluasi pembangunan | Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | aparatur pemerintahan | | | |
| | | | | | | Forum pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tata ruang | Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. | |
| | | | | | | Pendidikan antikorupsi dan implementasi sistem good corporate governance | Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. | |
| | | | | | | Sistem *talent scouting* daerah berbasis digital | Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. | |

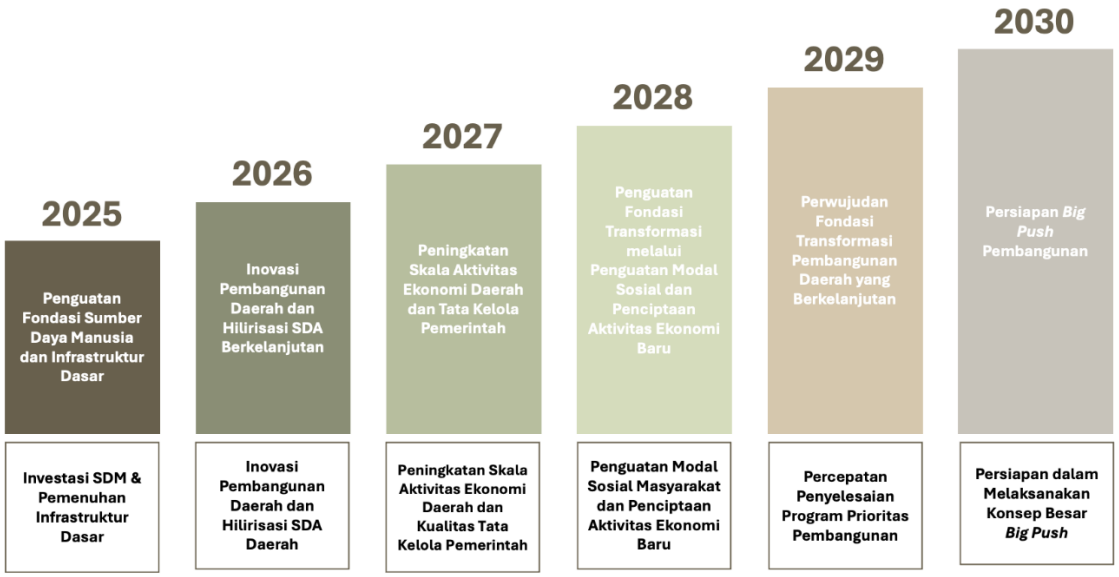
| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pendidikan dan pelatihan ASN di bidang digital | Peningkatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga khususnya dalam pelayanan publik berbasis digital | |
| | | | | | | Pengembangan ekosistem digital pemerintahan dan pengembangan internet dan sarana pemancar sinyal ke pelosok | Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. | |
| | | | | | | Implementasi teknologi tepat guna untuk kelompok ekonomi masyarakat | Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dan kepentingan pelayaran). | |
| | | | | | | Pelatihan talenta digital dan kepemimpinan digital bagi masyarakat | Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T10 | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi | S25 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik | Evaluasi kinerja pegawai periodik | Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. | |
| | | | | | | Implementasi manajemen risiko pembangunan pada dokumen perencanaan pembangunan | Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. | |
| | | | | | | Pengembangan sistem digitalisasi untuk pengelolaan pembangunan | Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. | |
| | | | | | | Pengembangan sistem pelaporan masyarakat | Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. | |

| Kode Misi | Misi | Kode Tujuan | Tujuan | Kode Sasaran | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Implementasi sistem digital dalam tata kelola pemerintahan | Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. | |
| | | | | | | Audit sistem digital periodik dan digitalisasi pelayanan publik | Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. | |
| | | | | | | Kerja sama pembiayaan pembangunan | Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. | |

### 3.4.2 Pentahapan Pembangunan




**Gambar 3.4.3 Pentahapan Pembangunan Kalimantan Tengah 2025-2030**

1. **Penguatan Fondasi Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Dasar (2025)**

   Fokus utama pembangunan diarahkan pada investasi sumber daya manusia, baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan dalam mendukung pembangunan. Selain itu, perlu adanya pembangunan infrastruktur dasar yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempermudah mobilitas manusia maupun barang dalam upaya pembangunan.

2. **Inovasi Pembangunan Daerah dan Hilirisasi SDA Berkelanjutan (2026)**

   Fokus utama pembangunan diarahkan pada akselerasi pembangunan SDM dan infrastruktur yang diarahkan pada upaya inovasi dan hilirisasi di daerah. Dalam tahun ini, pembangunan harus sudah diarahkan pada aktivitas ekonomi bernilai tambah, pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk hilirisasi, dan pengembangan inovasi pembangunan.

3. **Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintah (2027)**

   Fokus utama pembangunan diarahkan pada percepatan atau akselerasi dari program-program berkaitan dengan penguatan fondasi transformasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan eskalasi aktivitas ekonomi yang telah ada melalui berbagai kebijakan yang akomodatif oleh pemerintah daerah.

4. **Penguatan Fondasi Transformasi melalui Penguatan Modal Sosial dan Penciptaan Aktivitas Ekonomi Baru (2028)**

   Fokus utama pembangunan diarahkan pada pemantapan fondasi transformasi yang diejawantahkan melalui mulai tumbuhnya aktivitas ekonomi baru masyarakat, penguatan modal sosial, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

5. **Perwujudan Fondasi Transformasi Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (2029)**

   Fokus utama pembangunan diarahkan pada perwujudan fondasi transformasi, yaitu memperbaiki program atau kebijakan yang belum optimal sebelumnya sekaligus mempercepat program prioritas pembangunan dalam mencapai tujuan fondasi transformasi yang kuat.

6. **Persiapan Lepas Landas Big Push Pembangunan Daerah (2030)**

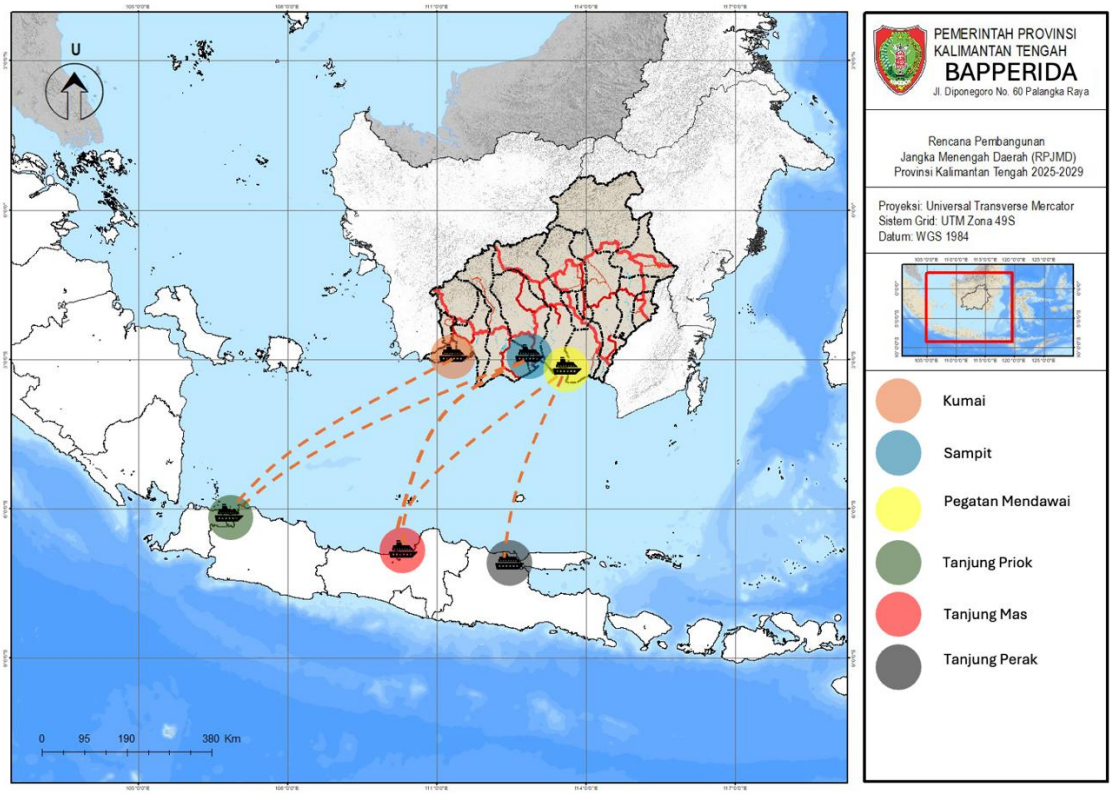
   Fokus utama pembangunan diarahkan pada persiapan konsep besar pembangunan daerah untuk melakukan *big-push* dalam rangka mencapai target pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

### 3.4.3 Arah Pembangunan Kebijakan Kewilayahan

#### 3.4.3.1 Koridor Pembangunan Kalimantan Tengah

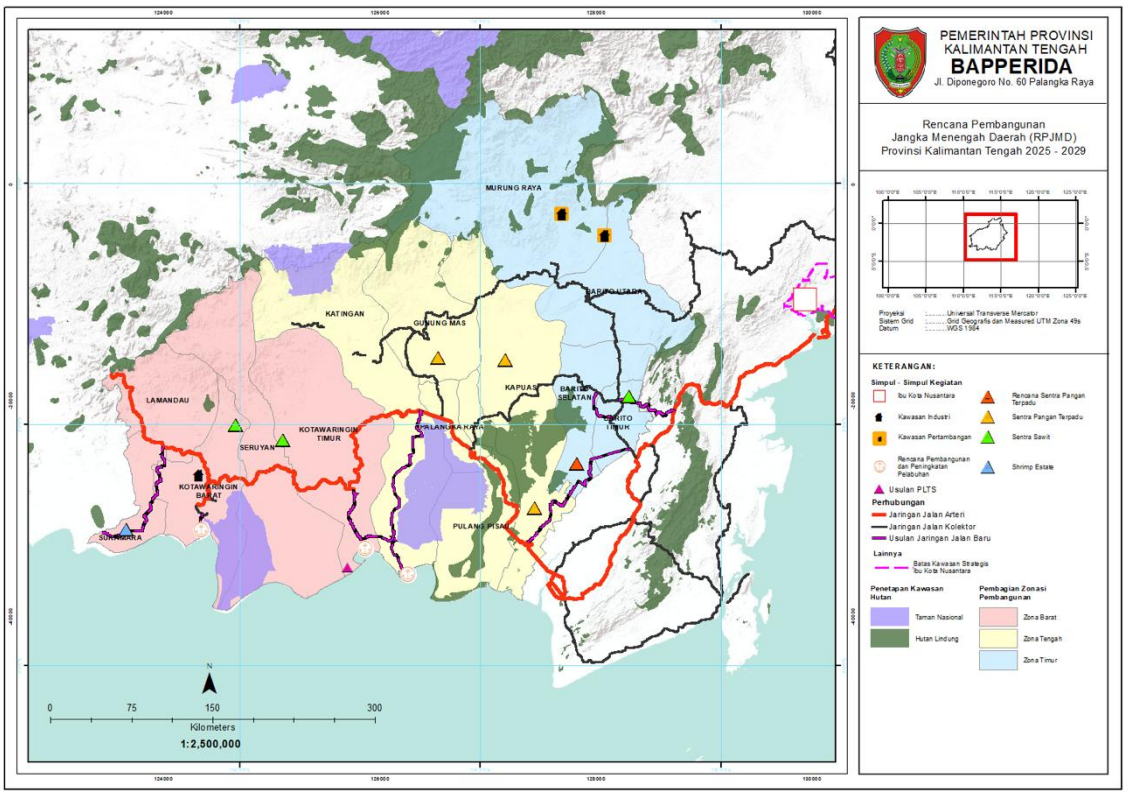
Hilirisasi SDA yang dilakukan harus memiliki konsumen yang jelas dan berorientasi ekspor. Konsumen terbesar saat ini adalah Pulau Jawa. Lokasi Kalimantan Tengah yang menghadap langsung ke Laut Jawa menjadi keunggulan dalam melakukan hilirisasi SDA. Pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa yang menghadap ke Laut Jawa berhadapan langsung dengan pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Tengah. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Tengah

harus dilaksanakan seiring dengan peningkatan hilirisasi SDA di Kalimantan Tengah untuk mempermudah ekspor hasil hilirisasi baik untuk pasar lokal Indonesia ataupun pasar internasional. Gambaran spasial posisi geostrategi dan geoekonomi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.



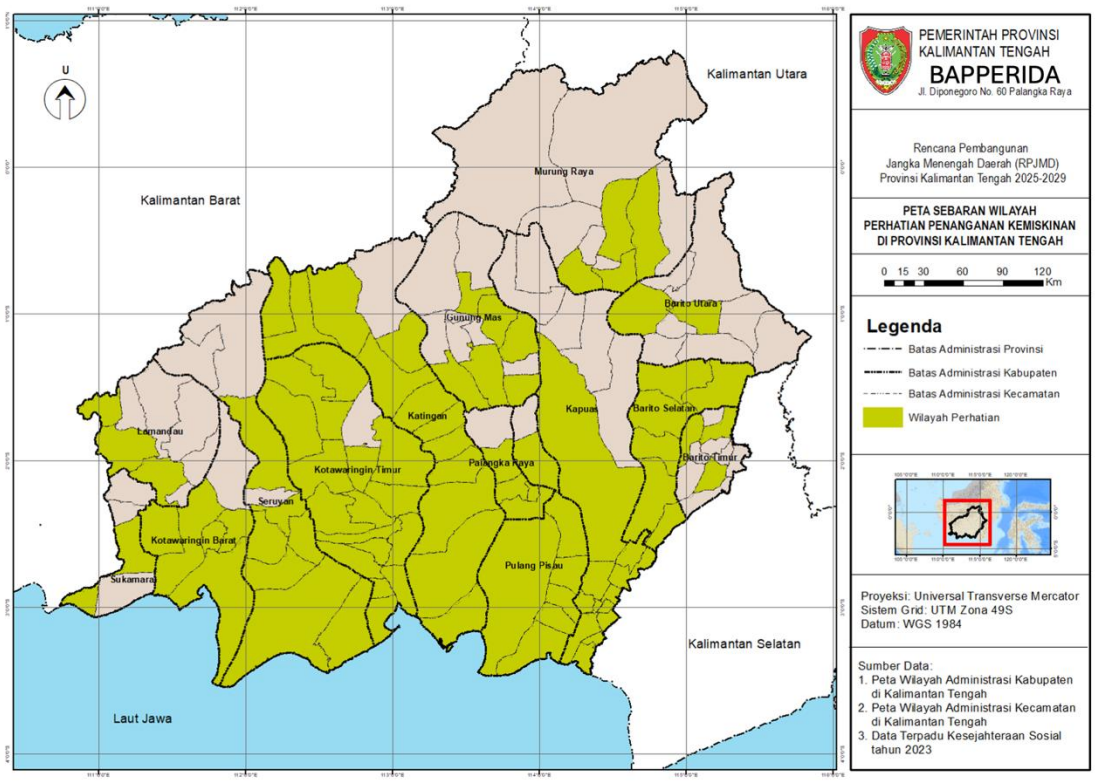

**Gambar 3.4.4 Posisi Geostrategi dan Geoekonomi Kalimantan Tengah**

Pengembangan rencana-rencana pembangunan seperti sentra pangan terpadu, kawasan industri, dan rencana lainnya perlu didukung dengan penyediaan konektivitas yang baik antar PKW dengan PKW dan PKW dengan PKN. Konektivitas antar PKW saat ini sudah tersedia kecuali konektivitas antara PKW Buntok dan Kuala Kapuas. Penambahan konektivitas antara PKW Buntok dan Kuala Kapuas perlu menjadi perhatian khusus untuk mendukung kemudahan mobilitas hasil hilirisasi SDA di Buntok.



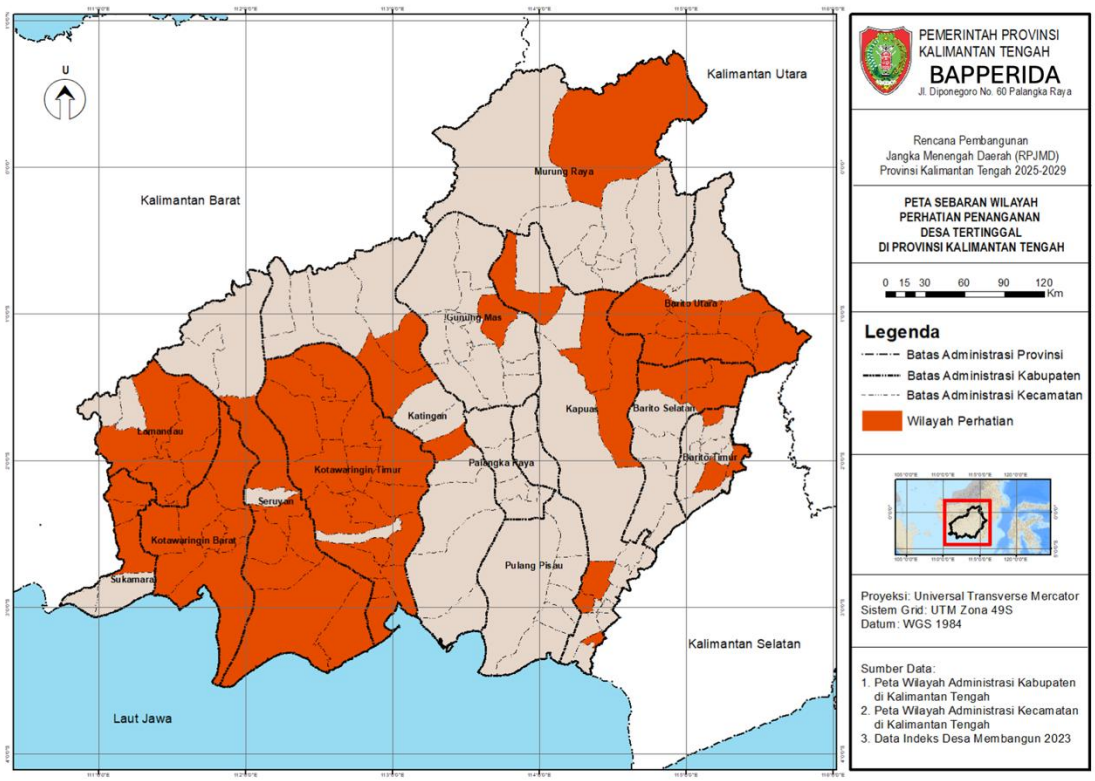

**Gambar 3.4.5 Koridor Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah**

Wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2023 adalah wilayah-wilayah yang diwarnai oranye pada gambar 3.4.2, lokasi dengan tingkat kemiskinan yang menjadi fokus intervensi dalam lima tahun ke depan. Sebagian besar wilayah perhatian terkonsentrasi di zona tengah provinsi, meliputi sebagian besar Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, dan Kapuas. Selain itu, beberapa wilayah di bagian barat seperti Lamandau, Kotawaringin Barat, dan Sukamara serta di bagian timur seperti Barito Timur dan Barito Selatan juga termasuk dalam kategori wilayah perhatian. Sebaran Wilayah Perhatian Penanganan Kemiskinan di Kalimantan Tengah dapat ditinjau pada peta berikut.



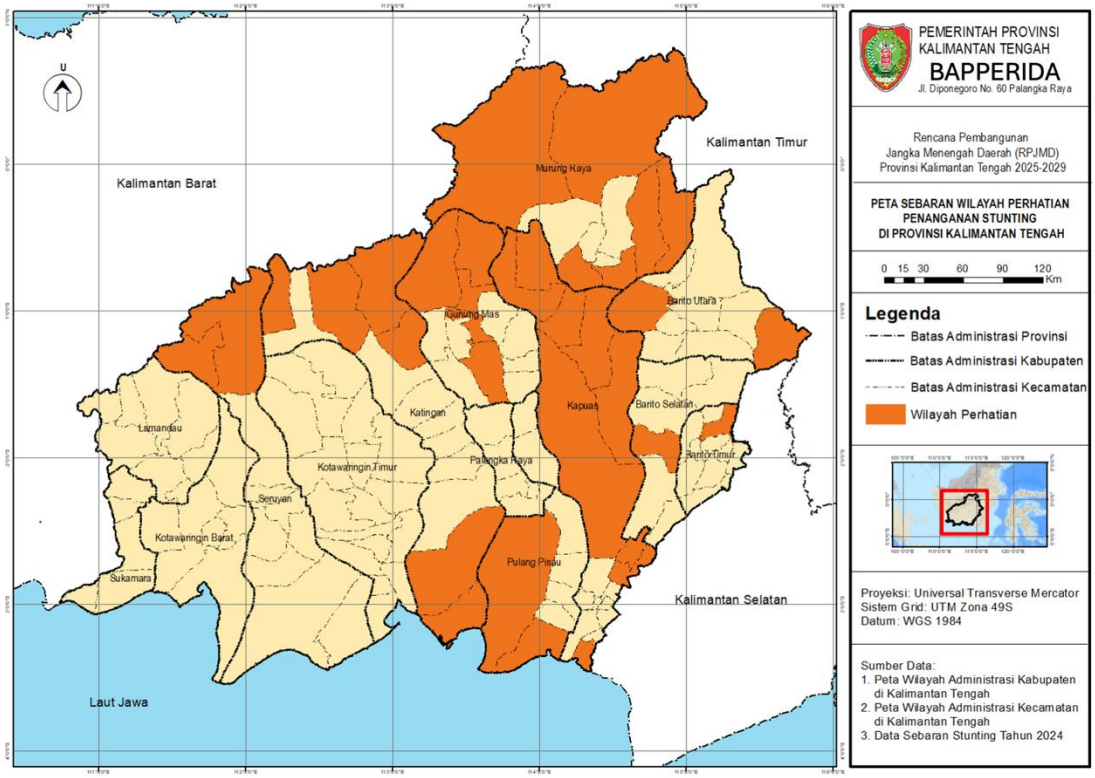

**Gambar 3.4.6 Sebaran Wilayah Perhatian Penanganan Kemiskinan**

Sementara itu, terdapat beberapa wilayah yang menjadi perhatian dalam pengentasan desa tertinggal di Kalimantan Tengah. Wilayah yang diwarnai kuning pada gambar 3.4.4 menandakan desa-desa yang masih tergolong tertinggal dan menjadi fokus intervensi pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan. Dari peta terlihat bahwa dominasi wilayah perhatian penanganan desa tertinggal berada di Zona Barat dan Zona Timur Kalimantan Tengah. Beberapa kabupaten yang memiliki konsentrasi wilayah desa tertinggal antara lain Lamandau, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Sukamara di bagian barat, serta Barito Utara, Barito Timur, dan sebagian Kapuas di bagian timur. Sebaran wilayah perhatian penanganan desa tertinggal di Kalimantan Tengah dapat ditinjau pada peta berikut.




**Gambar 3.4.7 Sebaran Wilayah Perhatian Penanganan Desa Tertinggal**

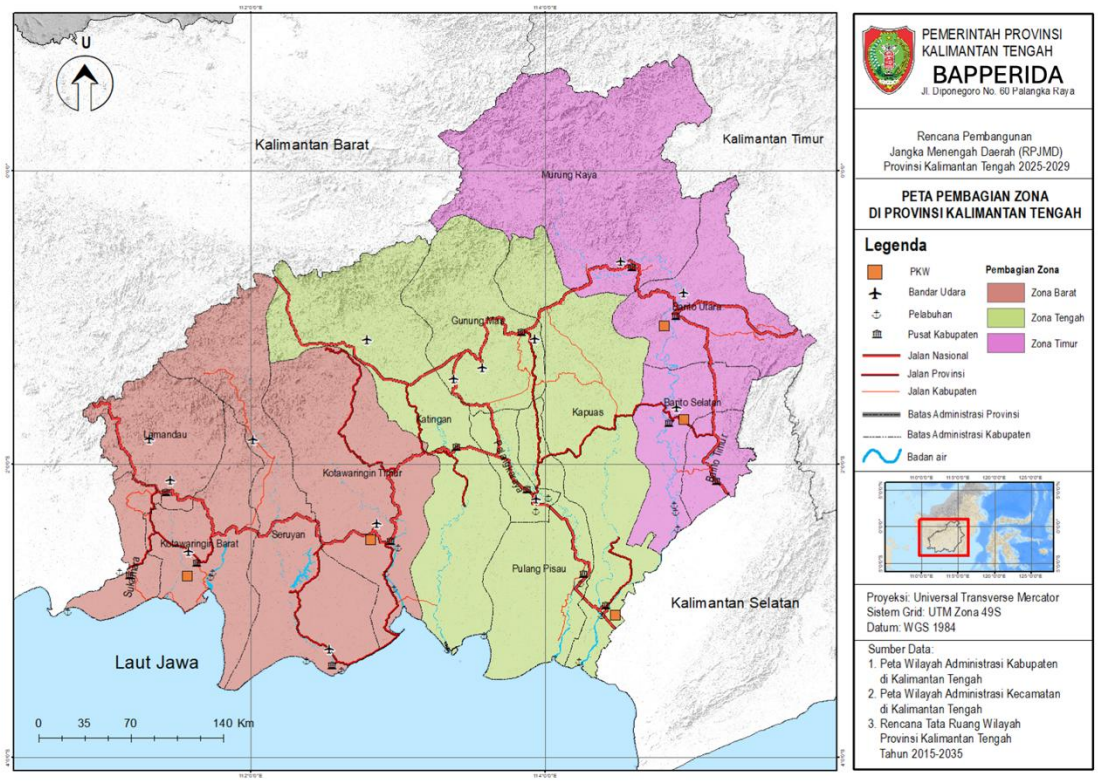
Wilayah perhatian penanganan kasus Stunting di Kalimantan Tengah ditandai dengan warna merah pada peta Sebaran Wilayah Perhatian Penanganan Kasus Stunting. Wilayah-wilayah tersebut merupakan kecamatan yang tergolong memiliki tingkat prevalensi stunting yang tinggi dan membutuhkan penanganan intensif. Dari peta pada gambar 3.4.5 terlihat bahwa Kabupaten Kapuas menjadi daerah dengan konsentrasi wilayah perhatian tertinggi, di mana hampir seluruh kecamatannya masuk dalam kategori wilayah perhatian stunting. Hal ini menunjukkan bahwa Kapuas menjadi salah satu wilayah prioritas dalam upaya percepatan penurunan stunting. Selain Kapuas, wilayah lain dengan cakupan perhatian cukup luas meliputi Barito Timur, Barito Utara, dan sebagian wilayah Murung Raya dan Gunung Mas. Sementara itu, kawasan tengah seperti Palangka Raya, serta beberapa wilayah selatan seperti Pulang Pisau dan Sukamara, tampak memiliki cakupan perhatian yang lebih kecil.




**Gambar 3.4.8 Sebaran Wilayah Perhatian Penanganan Kasus Stunting**

### 3.4.3.2 Arah Tema Pembangunan

Arah tema pembangunan wilayah akan dibagi menjadi tiga zona yaitu zona barat, zona tengah, dan zona timur. Pembagian zona tersebut dapat ditinjau melalui peta berikut ini.




**Gambar 3.4.9 Pembagian Zona Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah**
Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045

Adapun tema masing-masing zona pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.4.3.

**Tabel 3.4.5 Pembagian Tema Pembangunan Zona dan Klaster**

| Zona | Tema | Klaster | Tema |
|---|---|---|---|
| **Barat** | Pusat hilirisasi sumber daya alam, kawasan hub perdagangan besar, serta konservasi taman nasional berkelanjutan | Kluster Pangkalan Bun | 1. Pusat konservasi berskala internasional berkelanjutan<br>2. Hilirisasi industri sumber daya alam<br>3. Sentra perikanan terintegrasi |
| | | Kluster Sampit | Pusat konservasi berskala internasional berkelanjutan<br>Hub perdagangan besar |
| **Tengah** | Hub pusat perdagangan dan jasa, pengembangan sentra pertanian terintegrasi, | Kluster Palangkaraya | 1. Pusat konservasi berskala internasional berkelanjutan<br>2. Pusat perdagangan dan jasa<br>3. Pusat riset dan pendidikan |

| Zona | Tema | Klaster | Tema |
|---|---|---|---|
| | serta pusat riset dan Pendidikan | | 4. Sentra Pangan dan Sentra Kawasan Perikanan terintegrasi |
| | | Kluster Kuala Kapuas | 1. Pusat konservasi berskala internasional berkelanjutan<br>2. Sentra pangan dan Kawasan Sentra Perikanan terintegrasi<br>3. Hub perdagangan besar |
| **Timur** | Lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan, Hilirisasi SDA, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur | Kluster Buntok | 1. Hub transportasi barang<br>2. Pengembangan industri hulu agro<br>3. Sentra pangan terintegrasi |
| | | Kluster Muara Teweh | 1. Lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan<br>2. Kawasan Sentra Perikanan<br>3. Wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur |

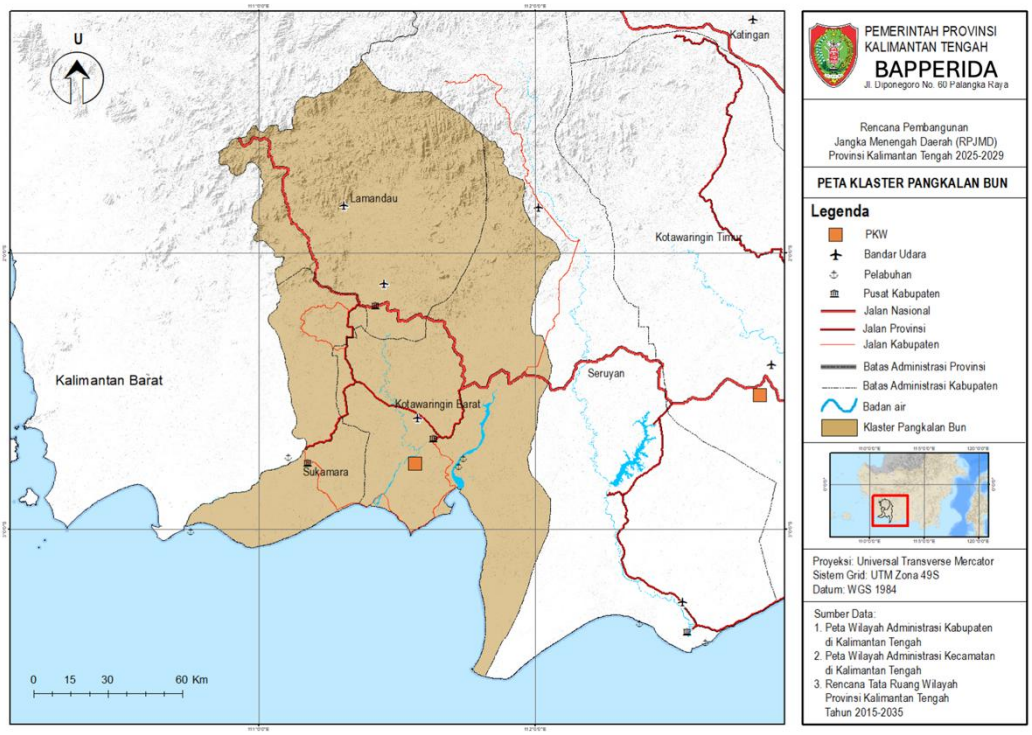
## A. Zona Barat

Dalam arah kebijakan kewilayahan Zona Barat, wilayah ini mencakup Kluster Pangkalan Bun yang terdiri atas Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau; dan Kluster Sampit yang terdiri atas Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan.

**Klaster Pangkalan Bun**

Klaster Pangkalan Bun mencakup **Kabupaten Kotawaringin Barat**, **Kabupaten Sukamara**, dan **Kabupaten Lamandau** yang diarahkan pada tema pembangunan berupa pengembangan pusat konservasi berskala internasional berkelanjutan, hilirisasi sumber daya alam, serta sentra perikanan terintegrasi. Keberadaan *shrimp estate* di Sukamara memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan terintegrasi. Kemudian, besarnya skala perkebunan sawit di Lamandau memiliki potensi

besar untuk dikembangkan menjadi industri hilirisasi kelapa sawit dan industri *Crude Palm Oil* (CPO). Dominasi lahan gambut di area ini juga memunculkan urgensi untuk pengembangan pusat konservasi berskala internasional berkelanjutan. Peta Klaster Pangkalan Bun dapat ditinjau pada gambar berikut.




**Gambar 3.4.10 Peta Klaster Pangkalan Bun**

Sementara itu, target indikator pembangunan makro Klaster Pangkalan Bun adalah sebagai berikut.

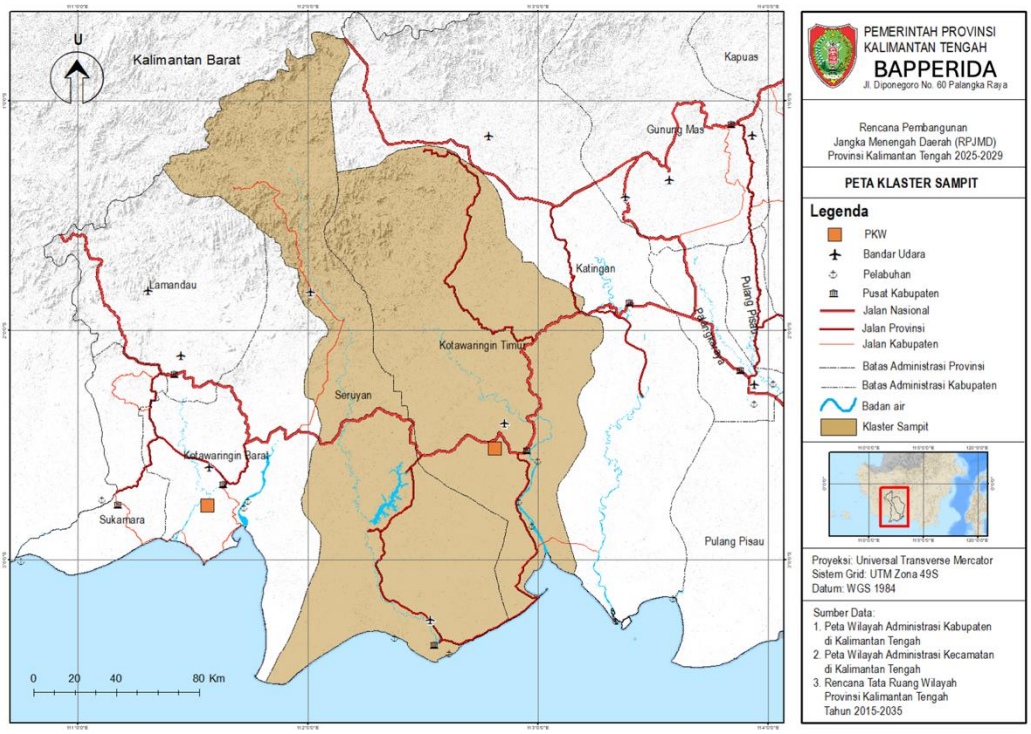
**Tabel 3.4.6 Indikator Pembangunan Makro Klaster Pangkalan Bun**

| No | Indikator Pembangunan Makro | *Baseline* 2025 | Target 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | PDRB per Kapita (Juta Rp) | 86,15 | 137,8 |
| 2 | Kemiskinan (%) | 3,67 | 2,1 |
| 3 | Rasio Gini (Indeks) | 0,32 | 0,25 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 72,9 | 75,17 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 76,34 | 77,25 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,71 | 7,5 |

Secara rinci, pembagian target per kabupaten pada klaster Pangkalan Bun terlihat sebagaimana tabel berikut:

**Klaster Sampit**

Klaster sampit terdiri dari **Kabupaten Kotawaringin Timur** dan **Kabupaten Seruyan**. Pembangunan Klaster Sampit diarahkan pada pusat konservasi berskala internasional berkelanjutan dan hub perdagangan besar. Penetapan arah pembangunan tersebut sejalan dengan keberadaan salah satu pelabuhan terbesar di Kalimantan Tengah, yaitu Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, Taman Nasional Tanjung Puting diketahui melewati wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Keberadaan lahan gambut di wilayah tersebut memunculkan urgensi adanya arah pembangunan pada konservasi berskala internasional berkelanjutan. Peta Kluster Sampit dapat ditinjau pada gambar berikut.




**Gambar 3.4.11 Peta Klaster Sampit**

Sementara itu, target indikator pembangunan makro Klaster Sampit adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4.7 Indikator Pembangunan Makro Klaster Sampit**

| No | Indikator Pembangunan Makro | *Baseline* 2025 | Target 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | PDRB per Kapita (Juta Rp) | 73,87 | 130,1 |
| 2 | Kemiskinan (%) | 6,4 | 3,57 |
| 3 | Rasio Gini (Indeks) | 0,28 | 0,24 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 72,12 | 74,59 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 76,34 | 78,5 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 1,51 | 7,5 |

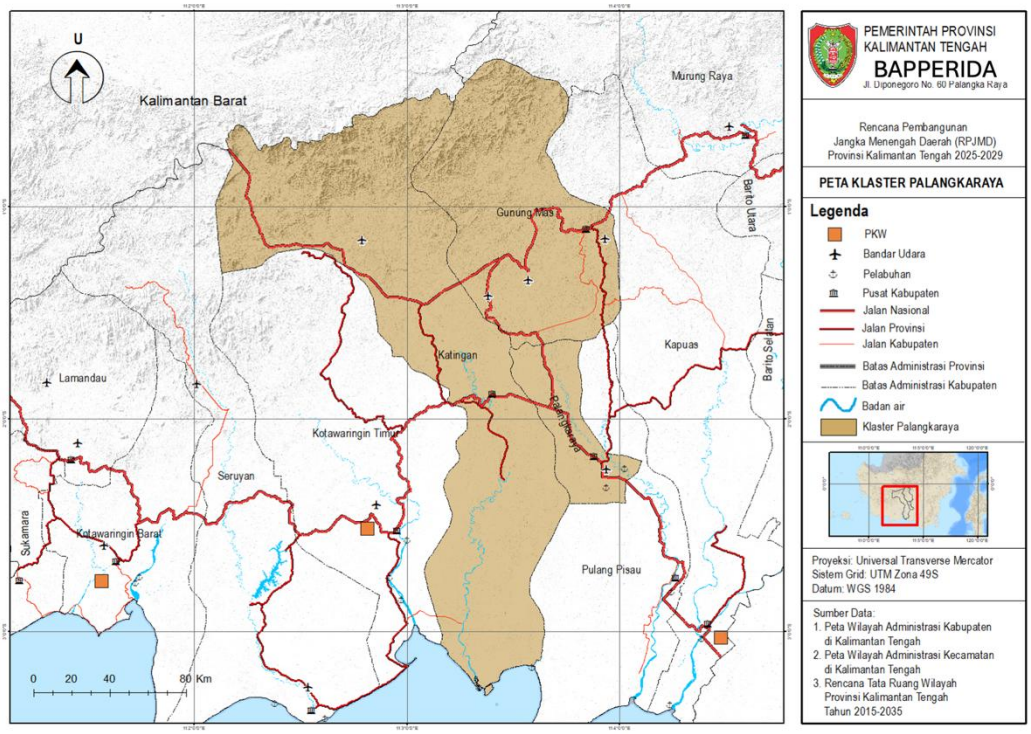
## B. Zona Tengah

Pada arah pembangunan Zona Tengah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 2 kluster, yakni Kluster Palangkaraya dan Kluster Kuala Kapuas. Kluster Palangkaraya terdiri atas **Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan**. Sementara itu, KLuster Kuala Kapuas mencakup **Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau**. Detail arah pembangunan dapat ditinjau pada penjelasan berikut ini.

### Klaster Palangkaraya

Klaster Palangkaraya yang berada di Zona Tengah Kalimantan Tengah diarahkan pada tema pembangunan berupa pengembangan konservasi berskala internasional berkelanjutan, pusat perdagangan dan jasa, pusat riset dan pendidikan, serta sentra pangan terintegrasi. Penetapan arah pembangunan Klaster Palangkaraya dilatarbelakangi oleh potensi tiap-tiap kabupaten pada klaster tersebut, yaitu Kota/Kabupaten Palangkaraya, Gunung Mas, dan Katingan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palangkaraya memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan dan jasa serta menjadi pusat Pengembangan riset dan pendidikan. Sementara itu, Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta memiliki *food estate* dengan potensi besar untuk dikembangkan menjadi sentra pangan dan yang terintegrasi antara hulu-hilir. Potensi pengembangan sentra pangan terintegrasi juga dimiliki oleh

Kabupaten Katingan. Peta Kluster Palangkaraya dapat ditinjau pada gambar berikut.




**Gambar 3.4.12 Peta Klaster Palangkaraya**

Sementara itu, target indikator pembangunan makro Klaster Palangkaraya adalah sebagai berikut.

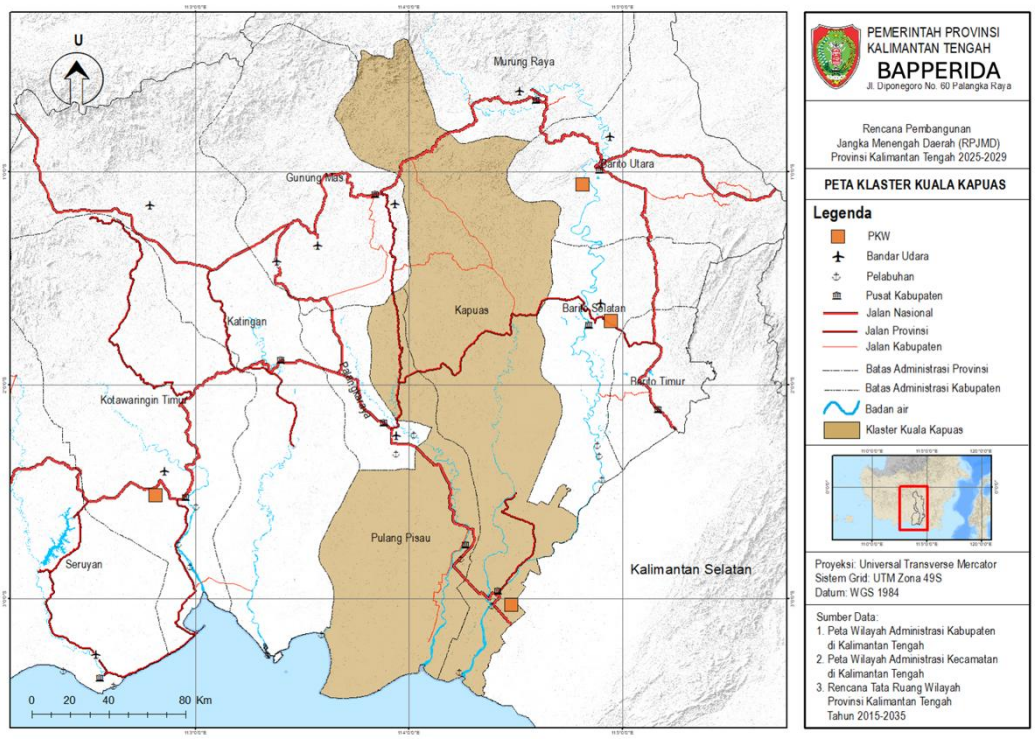
**Tabel 3.4.8 Indikator Pembangunan Makro Klaster Palangkaraya**

| No | Indikator Pembangunan Makro | *Baseline* 2025 | Target 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | PDRB per Kapita (Juta Rp) | 67,15 | 128,5 |
| 2 | Kemiskinan (%) | 4,71 | 2,35 |
| 3 | Rasio Gini (Indeks) | 0,29 | 0,23 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 76,34 | 78,25 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 76,34 | 78,5 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,47 | 7,3 |

## Klaster Kuala Kapuas

Klaster Kuala Kapuas meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Klaster tersebut diarahkan pada pembangunan pusat konservasi berskala

internasional berkelanjutan, sentra pangan dan kawasan sentra perikanan terintegrasi, dan hub perdagangan besar. Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau merupakan Kabupaten yang dicanangkan untuk menjalankan program *food estate*, tetapi pelaksanaan *food estate* tersebut dinilai masih belum optimal. Selain itu, lahan di wilayah selatan Kabupaten Pulang Pisau didominasi oleh lahan gambut sehingga berakibat pada tingginya titik *hotspot* di wilayah tersebut. Hal tersebut memunculkan urgensi arah pembangunan persiapan Kabupaten Pulang Pisau sebagai pusat konservasi berskala internasional berkelanjutan. Selain itu, di klaster ini perlu dilakukan penguatan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan atau *food estate* dengan menargetkan capaian yang terukur dan terintegrasi dengan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong program nasional untuk swasembada pangan. Peta Kluster Kuala Kapuas dapat ditinjau pada gambar berikut.




**Gambar 3.4.13 Peta Klaster Kuala Kapuas**

Sementara itu, target indikator pembangunan makro Klaster Kuala Kapuas adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4.9 Indikator Pembangunan Makro Klaster Kuala Kapuas**

| No | Indikator Pembangunan Makro | *Baseline* 2025 | Target 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | PDRB per Kapita (Juta Rp) | 53,38 | 127,4 |
| 2 | Kemiskinan (%) | 4,89 | 2,4 |
| 3 | Rasio Gini (Indeks) | 0,29 | 0,23 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 72,01 | 74,5 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 76,34 | 77,5 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,19 | 7,5 |

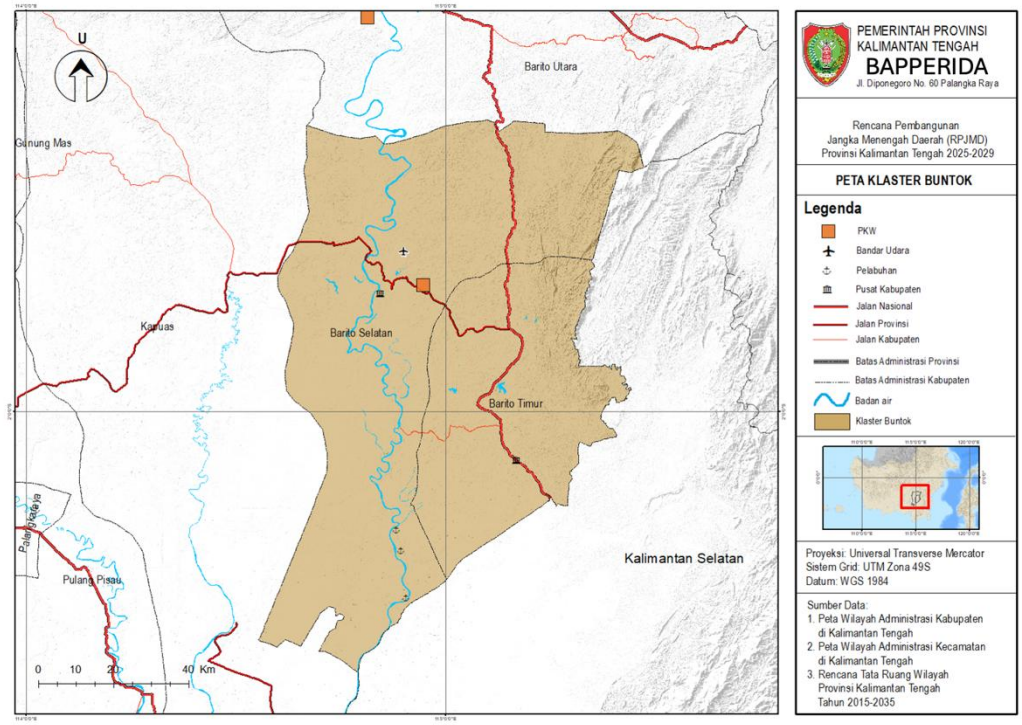
## C. Zona Timur

Dalam arah kebijakan kewilayahan Zona Timur, wilayah ini mencakup Kluster Buntok yang terdiri atas Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur; dan Kluster Muara Teweh yang terdiri atas Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara.

### Klaster Buntok

Klaster Buntok terdiri dari **Kabupaten Barito Selatan** dan **Kabupaten Barito Timur**. Sejumlah Kabupaten di Zona Timur memiliki potensi pertambangan serta energi baru dan terbarukan yang besar. Di sisi lain, letak Zona Timur yang bersebelahan dengan Kalimantan Timur menjadikan Zona Timur sebagai wilayah minta pembangunan IKN. Secara spesifik, Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur yang merupakan bagian dari Klaster Buntok memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Namun, keberadaan sektor tersebut masih menghadapi keterbatasan fasilitas pengolahan sehingga berdampak pada rendahnya nilai tambah produk. Terkait dengan hal tersebut, arah pembangunan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Buntok diarahkan pada pengembangan hub transportasi barang, Pengembangan industri hulu agro,

dan sentra pangan terintegrasi. Peta Kluster Buntok dapat ditinjau pada gambar berikut.




**Gambar 3.4.14 Peta Klaster Buntok**

Sementara itu, target indikator pembangunan makro Klaster Buntok adalah sebagai berikut.

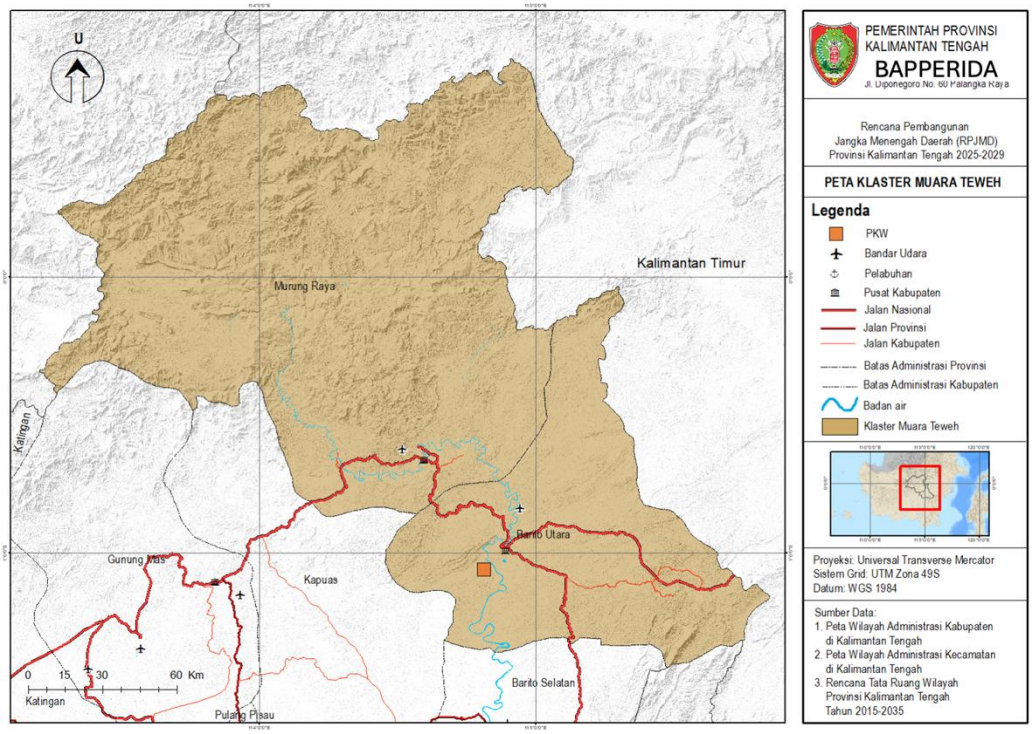
**Tabel 3.4.10 Indikator Pembangunan Makro Klaster Buntok**

| No | Indikator Pembangunan Makro | *Baseline* 2025 | Target 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | PDRB per Kapita (Juta Rp) | 78,83 | 132,4 |
| 2 | Kemiskinan (%) | 5,08 | 2,5 |
| 3 | Rasio Gini (Indeks) | 0,31 | 0,25 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 74,11 | 76,08 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 76,34 | 77,25 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 1,89 | 7,4 |

### Klaster Muara Teweh

Klaster Muara Teweh terdiri dari **Kabupaten Murung Raya** dan **Kabupaten Barito Utara**. Muara Teweh berfokus pada arah pembangunan pada pengembangan lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan dan wilayah

mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Lokasi Kabupaten-kabupaten di Zona Timur yang bersebelahan dengan Kalimantan Timur berakibat pada arah pembangunan sejumlah kabupaten di Zona Timur menjadi wilayah mitra pembangunan IKN. Disamping itu, Kabupaten Barito Utara juga diproyeksikan memiliki Kawasan Sentra Perikanan terpadu hulu-hilir sehingga dapat mendukung penyediaan sumber pangan dari perikanan untuk IKN. Selain itu, Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar, tetapi masih belum tergali secara optimal. Adapun, potensi EBT yang terdapat di kedua Kabupaten tersebut diantaranya energi air dan surya. Peta Kluster Muara Teweh dapat ditinjau pada gambar berikut.




**Gambar 3.4.15 Peta Klaster Muara Teweh**

Sementara itu, target indikator pembangunan makro Klaster Muara Teweh adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4.11 Indikator Pembangunan Makro Klaster Muara Teweh**

| No | Indikator Pembangunan Makro | *Baseline* 2025 | Target 2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | PDRB per Kapita (Juta Rp) | 97,79 | 140,9 |
| 2 | Kemiskinan (%) | 5,89 | 2,2 |
| 3 | Rasio Gini (Indeks) | 0,29 | 0,24 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 71,81 | 74,35 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 76,34 | 78,5 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,63 | 7,2 |

## 3.5 Program Prioritas Daerah

Program unggulan pemerintah daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan disarikan dari janji-janji politik kepala dan wakil kepala daerah saat melakukan kampanye pemilihan umum kepala daerah tahun 2024. Dalam hal ini, program unggulan yang ditawarkan oleh Agustiar Sabran, S.I.Kom. dan Edy Pratowo, S.Sos. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tercantum dalam dokumen visi, misi, dan program yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat sebagai berikut:




**Gambar 3.5.1 Program Prioritas Daerah Huma Betang Sejahtera**

### 3.5.1 Kalteng Bermartabat

Program yang berkenaan dengan Kalteng Bermartabat berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan strategi kebijakan yang berorientasi

pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya dalam rangka meneguhkan Provinsi Kalimantan Tengah yang *Belom Bahadat* melalui program:

1. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan**, termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.
2. **Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat** dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan Kalteng Bermartabat, maka ada beberapa ruas jalan strategis yang dalam pelaksanaannya, guna menghadapi kendala baik berupa keterbatasan anggaran dan hal lainnya yang bersifat segera dan harus tetap dilaksanakan maka skema pembayaran kegiatan fisik maupun pengawasan pekerjaan dapat menggunakan kontrak tahun tunggal (single years contract) dan kontrak tahun jamak (multi years contract) dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Alokasi Dana Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, Skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sumber Dana Lainnya. Adapun beberapa kegiatan strategis yang dibiaya dengan skema Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*), antara lain :

1. Ruas Jalan Bangkal-Telaga Pulang-Kuala Pembuang sepanjang 121 km.
2. Ruas Jalan Kuala Pembuang-Teluk Segintung sepanjang 28 km.
3. Ruas Jalan Ujung Pandaran-Kuala Pembuang sepajang 57 km.
4. Ruas Sp.Pundu-Tumbang Samba sepanjang 67 km.
5. Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Sampit 7,3 km.
6. Ruas Jalan Tapin Bini-Suja-Penopa sepanjang 21,6 km.
7. Ruas Jalan Hayaping-Bentot sepanjang 12 km.
8. Ruas Jalan Kuala Kurun-Linau-Tb.Jutuh sepanjang 45 km.
9. Ruas Jalan Bawan-Kuala Kurun sepanjang 64,2 km.
10. Ruas Jalan Pangkoh-Bahaur sepanjang 38,2 km.
11. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Strategis Lainnya.

.

### 3.5.2 Betang Maju

Percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan inisiatif pembangunan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini akan fokus pada hilirisasi mineral, pembangunan jalur kereta api, serta pembentukan zona distribusi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, peningkatan infrastruktur air bersih, akses listrik, serta sinyal dan internet di daerah pedalaman menjadi prioritas untuk memastikan setiap desa memiliki akses yang layak dan modern. Hal ini diejawantahkan dalam program:

1. **Pembangunan 1.000 km jalan desa**, yaitu membangun jalan sepanjang 1.000 km bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antardesa serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
2. **Revitalisasi infrastruktur lintas kabupaten dan kota**, yaitu memperbaiki dan memperbarui infrastruktur pelayanan public dan infrastruktur jalan di Provinsi dan seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan, konektivitas dan mobilitas Masyarakat.
3. **Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif**, yaitu mengembangkan wilayah khusus ekonomi dengan fokus pada hilirisasi mineral, transportasi, dan distribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi mineral dan sumber daya alam bertujuan untuk mengolah mineral dan sumber daya alam secara lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan Kereta Api Palangkaraya – Gunung Mas – Katingan untuk memperlancar transportasi dan distribusi serta menghubungkan pusat-pusat ekonomi yang penting. Zona Distribusi Lintas Timur Sungai Kapuas bertujuan untuk membentuk zona distribusi di sepanjang Sungai Kapuas untuk memperlancar aliran barang.
4. **Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa**, yaitu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap air bersih yang layak melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

5. **Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar**, yaitu menyediakan akses listrik bagi seluruh desa di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan 100% wilayah mendapatkan penerangan.
6. **Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman**, yaitu memperluas jangkauan sinyal telekomunikasi dan akses internet di daerah pedalaman untuk menghubungkan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi.

Untuk mewujudkan Betang Maju, maka ada beberapa infrastruktur strategis yang dalam pelaksanaannya, guna menghadapi kendala baik berupa keterbatasan anggaran dan hal lainnya yang bersifat segera dan harus tetap dilaksanakan maka skema pembayaran kegiatan fisik maupun pengawasan pekerjaan dapat menggunakan kontrak tahun tunggal (*Single Years Contract*) dan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) dengan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Alokasi Dana Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, Skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Sumber Dana Lainnya. Adapun beberapa kegiatan strategis yang dibiaya dengan skema Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*), antara lain :

1. Pembangunan Huma Betang Palangka Raya beserta Penataan Kawasan.
2. Pembangunan RSUD Provinsi Kalteng di Kota Palangka Raya.
3. Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Stadion Tuah Pahoe dan GOR *Indoor*.
4. Rehabilitasi dan Penataan RTH Kawasan Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya.
5. Penataan Kawasan *Islamic Center* Masjid Raya Darussalam Palangka Raya.
6. Pembangunan/Rehabilitasi *Sport Center* dan Kolam renang Kab. Kotawaringin Barat.
7. Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Kalteng beserta Penataan Kawasannya.
8. Rehabilitasi Istana Isen Mulang beserta Penataan Kawasannya.
9. Pembangunan RINDAM Kalteng di Kabupaten Gunung Mas.
10. Pembangunan Gedung Kantor dan Aula POLDA Kalimantan Tengah.

11. Pembangunan Gedung Kodam XXII Tambun Bungai Beserta Sarana dan Prasarananya.
12. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Strategis Lainnya.

### 3.5.3 Betang Makmur

Peningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah melalui berbagai inisiatif, seperti bantuan pangan, operasi pasar murah, dan program asuransi ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, petani, dan nelayan. Sementara itu, program penciptaan miliarder muda, Milenial Job Center, dan inkubasi UMKM berfokus pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi SDM. Dengan bantuan perahu dan alat tangkap, Betang Makmur juga memastikan nelayan dapat beroperasi lebih efisien, mendukung ekonomi lokal, dan mendorong ketahanan pangan yang lebih baik dengan program:

1. **Rp2 juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan,** yaitu menyediakan bantuan pangan sebesar Rp2 juta per keluarga untuk memastikan kebutuhan dasra masyarakat terpenuhi dan mengurangi angka kemiskinan. Program ini merupakan pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial, difokuskan kepada lanjut usia, janda dan penyandang disabilitas berat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial.
2. **Operasi Pasar Murah**, yaitu dengan menyelenggarakan pasar murah secara berkala untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.
3. **250 Miliarder Muda Baru**, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan 250 pengusaha muda sukses melalui dukungan modal dan bimbingan bisnis yang tepat.
4. **Milenial Job Center**, yaitu fasilitas pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi SDM berbasis wirausaha untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi generasi milenial.
5. **Inkubasi UMKM**, yaitu menyediakan program pendampingan dan dukungan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar, legalitas hukum, dan daya saing.

6. **Asuransi Petani dan Nelayan**, yaitu memberikan perlindungan asuransi bagi petani dan nelayan untuk menjamin kelangsungan usaha mereka dari risiko alam dan ekonomi.
7. **Bantuan Perahu dan Alat Tangkap**, yaitu untuk mendukung nelayan dengan menyediakan perahu dan alat tangkap yang lebih modern untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga pesisir.

### 3.5.4 Betang Cerdas

Betang Cerdas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyediakan pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pengajar. Program ini memastikan akses pendidikan yang merata. Komitmen "Satu Keluarga Harus Ada Sarjana" mendorong pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat agar dapat diakses. Pembangunan rumah guru dan insentif bagi guru agama juga direncanakan akan dilakukan untuk mendukung dedikasi mereka terhadap pencerdasan masyarakat. Inisiatif "Kalteng Mengaji" menekankan pentingnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing, memperkuat spiritualitas, dan nilai-nilai moral masyarakat yang diturunkan menjadi program:

1. **Sekolah/Kuliah Gratis**, yaitu menyediakan akses pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya.
2. **Satu Keluarga Harus Ada Sarjana**, yaitu mendorong setiap keluarga untuk memiliki minimal satu anggota keluarga lulusan perguruan tinggi guna meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan sosial-ekonomi di masyarakat.
3. **1.000 Rumah Guru**, yaitu dengan membangun 1.000 rumah untuk guru sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar mereka dapat tinggal dekat dengan tempat mengajar serta meningkatkan kenyamanan dan kinerja pengajaran.
4. **Insentif Guru Agama**, yaitu memberikan insentif khusus bagi guru mengaji, guru sekolah minggu, Balai Basarah, dan guru agama lainnya untuk menghargai peran mereka dalam membentuk karakter dan moral anak-anak.

5. **Kalteng Mengaji**, yaitu program untuk memperdalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti menghafal kitab suci, memahami ajaran agama, dan memperkuat spiritualitas dan toleransi.

### 3.5.5 Betang Sehat

Program Betang Sehat memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan berobat gratis berbasis KTP, program ini menjamin setiap warga mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Insentif bagi tenaga kesehatan desa dan revitalisasi puskesmas juga direncanakan akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh daerah. Program pendampingan ibu hamil dan pasca hamil memastikan kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga setelah melahirkan sehingga mampu mendukung generasi yang lebih sehat dan kuat. Ini dijabarkan dalam program:

1. **Berobat Gratis Berbasis KTP**, yaitu memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah hanya dengan menunjukkan KTP sehingga semua warga dapat menerima perawatan medis tanpa khawatir biaya.
2. **Insentif Tenaga Kesehatan Desa**, yaitu menyediakan insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja di desa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja sehingga memastika layanan kesehatan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah.
3. **Revitalisasi Puskesmas Desa**, yaitu memperbaiki dan memperbarui fasilitas puskesmas di desa-desa untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas serta mendekatkan akses kesehatan ke seluruh masyarakat.
4. **Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil**, yaitu menyediakan program pendampingan komprehensif bagi ibu hamil dan setelah melahirkan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi, mencegah komplikasi, dan memberikan edukasi terkait perawatan kesehatan, serta memastikan kesehatan ibu dan

bayi terjaga. Ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan generasi masa depan.

5. **1 Desa 1 Ambulans**, yaitu menyediakan satu ambulans untuk setiap desa guna memastikan respon cepat dalam situasi darurat, meningkatkan kemampuan penanganan medis di daerah pedesaan, dan memastikan akses layanan kesehatan darurat.

### 3.5.6 Betang Harmoni

Program Betang harmoni merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemberdayaan desa wisata dan alokasi anggaran yang emrata. Bantuan provinsi dan stimulus desa diharapkan mampu memperkuat pembangunan lokal, sementara insentif bagi kepala desa dan pemimpin masyarakat lainnya mampu meningkatkan motivasi mereka dalam melayani warga. Layanan cepat tanggap kebakaran lahan dan bantuan warga juga menjadi prioritas untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diturunkan menjadi program:

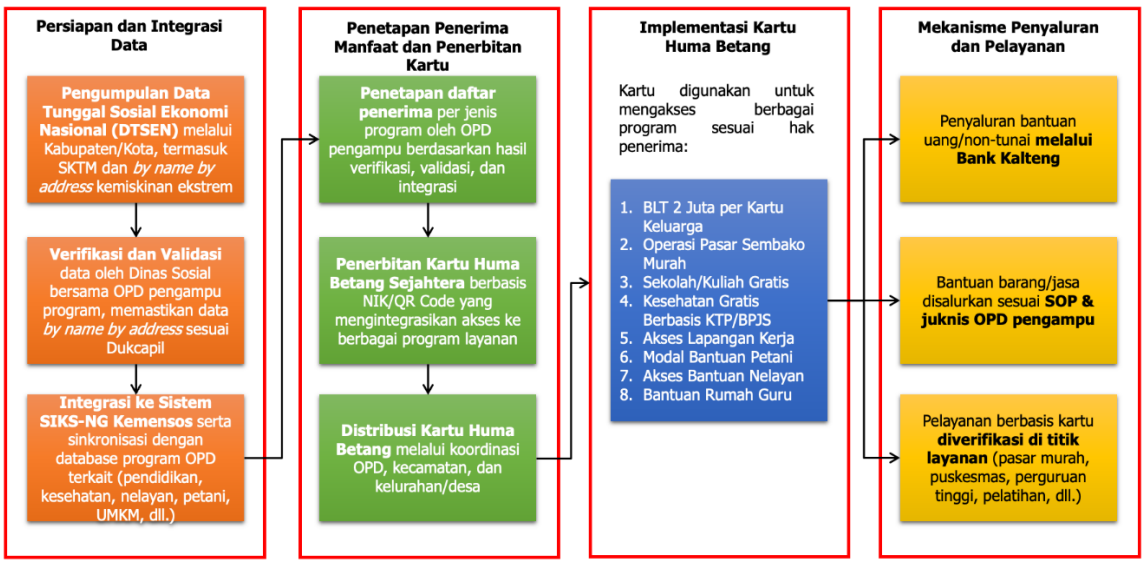
1. **Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata),** yaitu mengembangkan 100 desa wisata dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan potensi pariwisata lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui sektor pariwisata.
2. **Rp150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota**, yaitu mengalokasikan dana Rp150 miliar untuk mendukung pembangunan dan program prioritas di seluruh kabupaten dan kota dalam memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Rp250 Juta Stimulus Desa**, yaitu memberikan stimulus Rp250 juta kepada setiap desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup warga desa dalam rangka mempercepat pertumbuhan desa mandiri.
4. **Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se Provinsi Kalimantan Tengah**, yaitu menyediakan insentif bagi pemimpin desa dan tokoh masyarakat lainnya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memimpin dan menjaga keharmonisa serta ketertiban di masyarakat.

5. **Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga**, yaitu membentuk tim respon cepat untuk menangani kebakaran lahan dan memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak serta melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dari bencana kebakaran.

### 3.5.7 Alur Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).




Dalam melaksanakan Program Prioritas Daerah Huma Betang dilakukan dengan berdasarkan pada Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Implementasi KHBS di Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui empat tahap utama yang saling terintegrasi, dimulai dari pengolahan data sasaran hingga pelayanan langsung kepada penerima manfaat. Diagram alir implementasi KHBS dapat ditinjau pada gambar berikut ini.




**Gambar 3.5.2 Alur Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)**

## 1. Persiapan dan Integrasi Data

Tahap awal implementasi KHBS dimulai dari pengumpulan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Proses ini mencakup data dari berbagai sumber, termasuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan data by name by address untuk kemiskinan ekstrem. Data yang dikumpulkan bersifat nama-alamat spesifik sehingga memungkinkan verifikasi yang akurat terhadap identitas penerima manfaat.

Selanjutnya, verifikasi dan validasi dilakukan oleh Dinas Sosial bersama OPD pengampu masing-masing program (pendidikan, kesehatan, nelayan, petani, UMKM, dan lain-lain). Proses ini memastikan bahwa identitas penerima sesuai dengan data kependudukan resmi di Dukcapil, menghindari data ganda, dan memastikan calon penerima memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Tahap ini diakhiri dengan integrasi data ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Kemensos. Sinkronisasi ini tidak hanya menghubungkan data dengan pusat, tetapi juga mengintegrasikannya dengan database program dari seluruh OPD terkait

di tingkat provinsi. Hasilnya adalah satu basis data terpadu yang menjadi acuan tunggal bagi seluruh program KHBS.

**2. Penetapan Penerima Manfaat dan Penerbitan Kartu**

Berdasarkan data yang telah diverifikasi dan tervalidasi, masing-masing OPD pengampu melakukan penetapan daftar penerima manfaat sesuai dengan kriteria program yang mereka kelola. Misalnya, Dinas Pendidikan menetapkan penerima beasiswa kuliah gratis, sementara Dinas Kesehatan menetapkan penerima layanan kesehatan gratis.

Setelah daftar final penerima manfaat disepakati, pemerintah provinsi melakukan penerbitan Kartu Huma Betang Sejahtera. Kartu ini dilengkapi NIK atau QR Code yang berfungsi sebagai identitas tunggal penerima manfaat sekaligus alat autentikasi saat mengakses layanan. Kartu yang sudah dicetak kemudian didistribusikan secara terkoordinasi melalui OPD, kecamatan, dan kelurahan/desa. Distribusi ini memastikan setiap penerima manfaat menerima kartu secara langsung dan memahami cara penggunaannya.

**3. Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera.**

Setelah diterima oleh masyarakat, Kartu Huma Betang Sejahtera menjadi kunci akses untuk berbagai program prioritas provinsi. Kartu Huma Betang Sejahtera meliputi beberapa program, yaitu :

**1) BLT 2 Juta per Kartu Keluarga.**

a) Masyarakat dengan kategori kemiskian ekstrem berdasarkan desil atau peringkat kesejahteraan.
b) Penerima BLT bukan merupakan penerima program bantuan lainnya dari Kemensos atau Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa (BLT bersumber Dana Desa).
c) BPT dapat bersifat akumulatif dan terintegrasi dengtean program lainnhyha dalam HUMA BETANG.

**2) Operasi Pasar Murah.**

a) Masyarakat berpenghasilan rendah di setiap desa, terutama di wilayah rawan pangan.

**3) Sekolah/Kuliah Gratis.**

a) Anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan.
b) Siswa/mahasiswa berprestasi yang tidak mampu.
c) Khusus Pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi Lokal.
d) Prioritas terhadap program Satu Rumah Satu Sarjana.
e) Dapat menerima bantuan dalam benutk seragam sekolah.

**4) Kesehatan Gratsi Berbasis KTP.**

a) Seluruh warga dengan KTP wilayah Kalimantan Tengah.
b) Peserta mandiri dengan tunggakan.

**5) Akses Lapangan Kerja.**

a) Pencari kerja yang terdaftar dalam system ketenagakerjaan.
b) Prioritas pada lulusan baru, korban PHK, pekerja migran kembali, dan anak putus sekolah.

**6) Modal Bantuan Petani.**

a) Petani kecil yang belum menerima bantuan.
b) Program komoditas pangan strategis.

**7) Akses Bantuan Nelayan.**

a) Bantuan yang diterima dalam bentuk uang muka kepemilikan rumah Nelayan Kecil (Kapal < 5 GT), atau memiliki kartu KUSUKA.
b) Tidak terlibat penangkapan illegal.
c) Prioritas bagi wilayah terdampak cuaca ekstrem.

**8) Bantuan Rumah Guru.**

a) Guru non-PNS di wilayah terpencil atau perbatasan.
b) Masa pengabdian > 5 tahun, belum punya rumah.

Masing-masing program memiliki SOP dan juknis sendiri, tetapi seluruhnya dapat diakses melalui satu kartu ini.

**4. Mekanisme Penyaluran dan Pelayanan**

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan, mekanisme penyaluran KHBS dibagi menjadi dua jalur utama:

a) Penyaluran uang/non-tunai dilakukan melalui Bank Kalteng, sehingga setiap transaksi tercatat secara resmi dan dapat diaudit.

b) Penyaluran barang/jasa (misalnya paket sembako, bibit, peralatan kerja) disalurkan melalui OPD pengampu sesuai dengan SOP dan juknis yang telah ditetapkan.

Setiap layanan berbasis kartu akan diverifikasi di titik layanan seperti pasar murah, puskesmas, perguruan tinggi, dan lokasi pelatihan. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat adalah benar pemilik kartu, mencegah penyalahgunaan, dan memudahkan pencatatan data realisasi program.



**Kunci untuk Program**
**Kartu Huma Betang Sejahtera**

| GRADE | JENIS BANTUAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BLT 2 JUTA PER KK | OPERASI PASAR SEMBAKO MURAH | SEKOLAH/ KULIAH GRATIS | KESEHATAN GRATIS BERBASIS KTP/BPJS | AKSES LAPANGAN KERJA (ESDM, DISBUN, DISHUT, DLH) | MODAL BANTUAN PETANI | AKSES BANTUAN NELAYAN | BANTUAN RUMAH GURU |
| A (Kategori KK yang Desile 1 atau yang miskin ekstrem dan layak BLT) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| B (Kategori KK yang sebagian Desile 1 yang belum terakomodir dan Desile 2, menerima bantuan dalam bentuk akumulasi program) | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| C (Kategori KK Desile yang belum terakomodir dan Desile 3-4, Semua menerima manfaat) | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | X |

**Tabel 3.5.1 Program Prioritas Daerah, termasuk mandat Kegiatan Prioritas Utama, di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| **Visi**<br>Mengangkat harkat dan martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045<br><br>**Misi**<br>1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | | | | |
| | | Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah | | | |
| | | | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | | Pangan |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan | | Pangan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan sumber daya alam lokal<br><br>2. Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat<br><br>3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan | | | ketahanan pangan masyarakat | | |
| | | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | | Penanaman Modal |
| | | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | | Penanaman Modal |
| | | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Pariwisata |
| | | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | | Pariwisata |
| | | | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | | Pariwisata |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM | | Pariwisata |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan<br><br>4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial<br><br>Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 | | | pariwisata dan ekonomi kreatif | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola anggaran | 1. Rp150 miliar bantuan provinsi untuk kabupaten/kota<br>2. Rp250 Juta stimulus desa | Keuangan |
| | | | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | | Keuangan |
| | | | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | | Keuangan |
| | | | Meningkatnya tata kelola aset daerah | | Keuangan |
| | | | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | | Keuangan |
| | | | Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan | | Keuangan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | | Keuangan |
| | | Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi | | | |
| | | | Terlindunginya hak-hak pekerja | | Tenaga Kerja |
| | | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Inkubasi UMKM | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya daya saing UMKM | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya legalitas koperasi | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | | Penanaman Modal |
| | | | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | | Penanaman Modal |
| | | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | | Penanaman Modal |
| | | | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | | Penanaman Modal |
| | | | Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal | | Penanaman Modal |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | 1. Asuransi Petani dan Nelayan<br>2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Asuransi Petani dan Nelayan | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Pariwisata |
| | | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | | Pariwisata |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | | Pariwisata |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya<br>3. Pengembangan Pangan Hewani | Pertanian |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya | Pertanian |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Asuransi Petani dan Nelayan | Pertanian |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM | | Pertanian |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | bidang penyuluh pertanian | | |
| | | | Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Operasi Pasar Murah | Perdagangan |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | | Perdagangan |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas bahan baku komoditas sawit dan kelapa;<br>2. Pengembangan industri oleokimia dan biofuel berbasis minyak sawit disertai rebranding dan promosi produk sawit berkelanjutan; | Perindustrian |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | | 3. Peningkatan diversifikasi dan daya saing produk kelapa; | |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | Perencanaan |
| | | | Meningkatnya tata kelola anggaran | 1. Rp150 miliar bantuan provinsi untuk kabupaten/kota<br>2. Rp250 juta stimulus desa | Keuangan |
| | | | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | | Keuangan |
| | | | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | | Keuangan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | | |
| | | Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | | Sosial |
| | | | Meningkatnya rehabilitasi sosial | | Sosial |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Rp2 Juta per KK | Sosial |
| | | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | | Sosial |
| | | | Terkelolanya informasi tenaga kerja | | Tenaga Kerja |
| | | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | | Tenaga Kerja |
| | | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Milenial Job Center | Tenaga Kerja |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | | Tenaga Kerja |
| | | | Terlindunginya hak-hak pekerja | | Tenaga Kerja |
| | | | Meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut, dan pulau | | Pertanahan |
| | | | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut | Lingkungan Hidup |
| | | | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kualitas | | Lingkungan Hidup |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | keanekaragaman hayati | | |
| | | | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak | | Lingkungan Hidup |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | MHA yang terkait dengan PPLH | | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus | | Lingkungan Hidup |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | tindak pidana lingkungan hidup | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Peningkatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Inkubasi UMKM | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya daya saing UMKM | Peningkatan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan kelapa dan investasi industri pengolahan kelapa | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | kelautan dan perikanan | | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | 1. Asuransi Petani dan Nelayan<br>2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Asuransi Petani dan Nelayan | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Pariwisata |
| | | | Meningkatnya jangkauan | | Pariwisata |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | pemasaran pariwisata | | |
| | | | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | | Pariwisata |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | | Pariwisata |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya<br>Pengembangan Pangan Hewani | Pertanian |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra<br>2. Produksi Pangan (KSPP)/Lumbun Pangan Kalimantan Tengah<br>Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya | Pertanian |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | | Pertanian |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Asuransi Petani dan Nelayan | Pertanian |
| | | | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian | | Pertanian |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | | Pertanian |
| | | | Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Energi dan Sumber Daya Mineral |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | | Perdagangan |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi | | Perdagangan |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | | Perdagangan |
| | | | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | | Perdagangan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | | Perindustrian |
| | | | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | | Perindustrian |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | | Perindustrian |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan | | Sekretariat Daerah |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | Perencanaan |
| | | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan | | Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah | | Penelitian dan Pengembangan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa | | | |
| | | | Meningkatnya pengelolaan tanah kosong | | Pertanahan |
| | | | Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | | Pertanahan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin | | Pertanahan |
| | | | Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan | | Pertanahan |
| | | | Meningkatnya kualitas penataan desa | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakata, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan | Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se-Kalimantan Tengah | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | 250 Miliarder Muda Baru | Pemuda dan Olahraga |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Inkubasi UMKM | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya daya saing UMKM | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya legalitas koperasi | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | | Perdagangan |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan | | Perdagangan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi | | |
| | | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | | Perdagangan |
| | | | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | | Perdagangan |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | | Perindustrian |
| | | | Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi | | Transmigrasi |
| | | | Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi | | Transmigrasi |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi | | Transmigrasi |
| | Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat | | | | |
| | | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat | | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Rp2 Juta per KK | Sosial |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | | Sekretariat Daerah |
| | Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau | | | | |
| | . | Terwujudnya akses pendidikan yang merata bagi | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | seluruh masyarakat | | | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | | Pendidikan |
| | | | Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | | Pendidikan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digitalisasi dan penguatan kurikulum berbasis budaya Dayak | | | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | | Pendidikan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | 1. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman<br>2. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital | Komunikasi dan Informatika |
| | | Terwujudnya perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, memadai dan terjangkau | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Meningkatnya kesejahteraan | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | dan kompetensi tenaga pendidik dan adaptif terhadap perkembangan IPTEK | | | |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | | Pendidikan |
| | | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi | | | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pendidikan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | | Pendidikan |
| | | | Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | | |
| | | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | | Pemuda dan Olahraga |
| | | | Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | | Perpustakaan |
| | | | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | | Perpustakaan |
| | | | Meningkatnya kualitas | | Perpustakaan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | perpustakaan dan pustakawan | | |
| | Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi | | | | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni/ | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | berkelanjutan dan inklusif. | | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | 1. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa<br>2. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya layanan persampahan regional | Peningkatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Meningkatnya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | 1. 1000 Rumah Guru<br>2. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya tata kelola kegeologian | | |
| | | Berkembangnya konektivitas wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi serta infrastruktur digital | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan<br>2. Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten/Kota<br>Pembangunan 1000 km Jalan Desa | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan<br>2. Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten/Kota | Perhubungan |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut | Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten/Kota | Perhubungan |
| | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman | Komunikasi dan Informatika |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | 1. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman<br>2. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital | Komunikasi dan Informatika |
| | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum | | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | 1. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa<br>2. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman | | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan | | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan | | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | kualitas hidup masyarakat | | | | |
| | | Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon | | | |
| | | | Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | | Pertanahan |
| | | | Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah | | Pertanahan |
| | | | Meningkatnya tata kelola sistem | | Pertanahan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | informasi manajemen pertanahan | | |
| | | | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut | Lingkungan Hidup |
| | | | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kualitas keanekaragaman hayati | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) limbah Bahan Berbahaya | | Lingkungan Hidup |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | dan Beracun (Limbah B3) | | |
| | | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya kinerja pemangku | | Lingkungan Hidup |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | |
| | | | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup | | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Peningkatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR | Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya produktivitas hasil hutan | | Kehutanan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya | | Kehutanan |
| | | | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan | | Kehutanan |
| | | | Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) | Konservasi Sumber Daya Air | Kehutanan |
| | | Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan | | | |
| | | | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | | Pangan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | | Pangan |
| | | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | | Pangan |
| | | | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | | Pangan |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya<br>Pengembangan Pangan Hewani | |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | | 2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya | |
| | | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | | |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian | | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | | |
| | | Berkurangnya risiko bencana | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat bencana | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | | | serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| | Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan | | | |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Insentif Tenaga Kesehatan Desa | Kesehatan |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | | Kesehatan |
| | | | Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan | Revitalisasi Puskesmas Desa | Kesehatan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | 1. Berobat Gratis Berbasis KTP<br>2. Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil | Kesehatan |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Insentif Tenaga Kesehatan Desa | Kesehatan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | | Kesehatan |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 1 Desa 1 Ambulans | Kesehatan |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | 1. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa<br>2. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman | 1. 1000 Rumah Guru<br>3. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Meningkatnya pembedayaan sosial | | Sosial |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | | Sosial |
| | | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | | Sosial |
| | | | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakata, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | | Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | Perencanaan |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | | Perencanaan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | dan pembangunan manusia | | |
| | Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial | | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan | | | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | | Pendidikan |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan | 1. Berobat Gratis Berbasis KTP<br>2. Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil | Kesehatan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | perorangan dan masyarakat | | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | | Kesehatan |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan | 1 Desa 1 Ambulans | Kesehatan |
| | | | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | | Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | | Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | | Kebudayaan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | | Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya tata kelola museum | | Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | | Pemerintahan Umum |
| | | | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | | Pemerintahan Umum |
| | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | 1. Insentif Guru Agama<br>2. Kalteng Mengaji | Pemerintahan Umum |
| | | | Meningkatnya penanganan konflik | | Pemerintahan Umum |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | sosial yang diselesaikan | | |
| | | Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif | | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Rp2 Juta per KK | Sosial |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | | Sekretariat Daerah |
| | Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan | | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat Dayak dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas profil kependudukan | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Meningkatnya tata kelola tanah ulayat | | Pertanahan |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | | Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Program Pelestarian Naskah Kuno | Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan | | Sekretariat Daerah |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan | | | |
| | | | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan | | Pertanahan |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | 1. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman | Komunikasi dan Informatika |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | | 2. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital | |
| | | | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | | Statistik |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | | Perencanaan |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | | Perencanaan |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan | | Perencanaan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | | Perencanaan |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | | Kepegawaian |
| | | | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | | Kepegawaian |
| | | | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | | Kepegawaian |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | | Kepegawaian |
| | | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional | Sosialisasi Spirit Belom Bahadat | Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, dan evaluasi | | Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi | | Pendidikan dan Pelatihan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | | Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | | Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan | | Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengkajian, dan penerapan di daerah | | Penelitian dan Pengembangan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | | Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | | Pengawasan |
| | | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | | Pengawasan |
| | Mewujudkan transformasi tata kelola | | | | |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik | | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | | Kearsipan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | | Kearsipan |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | | Kearsipan |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan | | Kearsipan |
| | | | Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah | | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah | | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas produk | | Sekretariat Daerah |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | hukum yang dihasilkan | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa | | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | | Sekretariat DPRD |
| | | | Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | | Sekretariat DPRD |
| | | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun | | Pengawasan |

| Visi/Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Program Prioritas | Urusan |
|---|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(6)* | *(7)* |
| | | | proses dan kewenangan | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | | Pengawasan |

Penyelarasan terhadap Program Nomenklatur telah dilakukan agar dapat memetakan perencanaan Pembangunan dari kondisi yang ingin dicapai pada Tujuan dan Sasara selama 5 tahun kedepan. Adapun **Tabel 3.5.1.1 Penyelarasan Visi dan Misi terhadap Nomenklatur**, yang dimaksud adalah sebagai berikut dibawah ini :

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| 20252029 - Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk Menyambut Indonesia Emas 2045<br>- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan sumber daya alam lokal<br>- Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat<br>- Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan<br>- Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial<br>- Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | | | Indeks Daya Saing Daerah (Angka) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | | |
| | | | | Kontribusi PDRB Provinsi ((%)) | | |
| | | | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%)) | | |
| | | | Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Baik | Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini) | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
| | | | Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat | Rasio PAD (%) | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang (Nilai) | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | |
| | | | Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran | Persentase Capaian Realisasi Keuangan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan/ Subkegiatan (%) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Bulan) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| | | | Terwujudnya pengelolaan BMD yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat optimal bagi daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
| | | Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi | | Tingkat Inflasi ((%)) | | |
| | | | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | | |
| | | | | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | | |
| | | | Meningkatkan ketahanan daerah dalam rangka mengurangi resiko bencana | Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | | Persentase penanganan pra bencana (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang (Nilai) | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | |
| | Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita((Rp Juta)) | | |
| | | | | Laju Pertumbuhan Ekonomi(%) | | |
| | | Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | |
| | | | | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (Indeks) | | |
| | | | | Indeks kapabilitas inovasi (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Angka) | | |
| | | | | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%)) | | |
| | | | Kontribusi penguatan cadangan pangan derah (%) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%) | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | Luas akses kelola hutan oleh masyarakat (Ha) | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | |
| | | | | Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver(unit) (Unit) | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | |
| | | | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (Ton) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit (Ton) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | |
| | | | Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP (%) | 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| | | Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa | | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) | | |
| | | | | Rasio Kewirausahaan (Persentase) | | |
| | | | | Persentase Desa Mandiri (%) | | |
| | | | | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) | | |
| | | | Kontribusi penguatan cadangan pangan derah (%) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%) | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | |
| | | | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | Luas akses kelola hutan oleh masyarakat (Ha) | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver(unit) (Unit) | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP (%) | 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| | | | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat | | | Tingkat Kemiskinan((%)) | | |
| | | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat | | Total Kredit/PDRB ((%)) | | |
| | | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%) | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%) | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau. | | | Indeks Modal Manusia(Indeks) | | |
| | | Terwujudnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat | | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (%) | | |
| | | | | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (%) | | |
| | | | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (%) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (%) | | |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digitalisasi dan penguatan kurikulum berbasis budaya Dayak | | Indeks Literasi Digital (Angka) | | |
| | | Terwujudnya perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, memadai dan terjangkau | | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). (Persentase) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan akuntabel guna mendukung pengembangan peserta didik secara optimal | Iklim kebinekaan SMPLB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim keamanan SMA (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim kebinekaan SMALB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). (Persentase) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim keamanan SMK (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim keamanan SDLB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim Inklusivitas SMA (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim keamanan SMPLB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim Inklusivitas SMK (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Iklim keamanan SMALB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim Inklusivitas SDLB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim kebinekaan SMA (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim inklusivitas SMPLB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim kebinekaan SMK (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim kebinekaan SDLB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Iklim inklusivitas SMALB (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik dan adaptif terhadap perkembangan IPTEK | | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase) | | |
| | | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi | | Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | |
| | Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi | | | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur(Indeks) | | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni, berkelanjutan, dan inklusif. | | Rumah tangga dengan akses hunian layak/terjangkau/dan berkelanjutan (%) | | |
| | | | Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis kawasan provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan) | 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | |
| | | | Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat. | | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman | | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | |
| | | | meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Panjang Drainase yang Dibangun/Ditingkatkan (Meter) | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | |
| | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air | | Kapasitas Air Baku ((%)) | | |
| | | | Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis kawasan provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan) | 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | |
| | | Berkembangnya konektivitas wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi serta infrastruktur digital | | Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks) | | |
| | | | | Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%) | | |
| | | | Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis kawasan provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan) | 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | |
| | | | meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase kondisi mantap jalan provinsi | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | |
| | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum | | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%)) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%)) | | |
| | | | Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis kawasan provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan) | 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | |
| | | Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan | | Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita) | | |
| | | | | Intensitas Energi Primer ((SBM/Rp Milyar)) | | |
| | | | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | | |
| | | | | Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) (%) | | |
| | | | Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis kawasan provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan) | 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | |
| | | | meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Terselenggaranya penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang (Dokumen) | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | |
| | Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(poin) | | |
| | | Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon | | Penurunan intensitas emisi GRK ((%)) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%)) | | |
| | | Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%)) | | |
| | | Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana. | | Indeks Risiko Bencana (Indeks) | | |
| | | | Penanganan Daerah Rawan Pangan | Penanganan daerah rawan pangan (%) (%) | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | |
| | Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | | | Usia Harapan Hidup (UHH)((tahun)) | | |
| | | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan | | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%) | | |
| | | | | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%) | | |
| | | | meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |
| | | | Meningkatnya SDM yang terlatih sesuai standar profesi | Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi (%) | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | | Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Dengan Unggulan Kesehatan Jiwa Yang Berkualitas dan Paripurna | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (%) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |

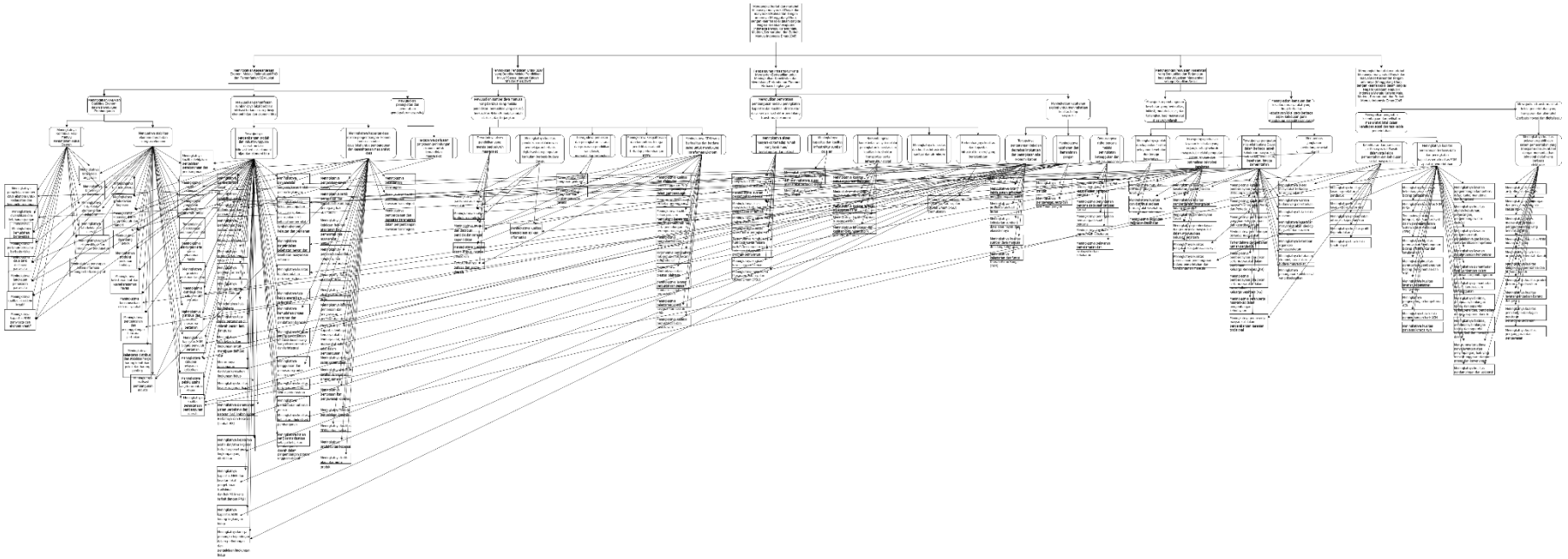
| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pasien | Terpenuhinya layanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei melalui penyediaan sarana prasarana (%) | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | |
| | | | Terselenggaranya layanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%)) | | |
| | | | | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | | |
| | | | meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |
| | | | Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Dengan Unggulan Kesehatan Jiwa Yang Berkualitas dan Paripurna | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (%) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | | | Terselenggaranya layanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. | | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)((%)) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%)) | | |
| | | | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%)) | | |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase) | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| | | | | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase) | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| | | | | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase) | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya produktivitas hasil hutan | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase) | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | |
| | | | | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%) | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | |
| | | Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif | | Rasio Gini (Indeks) | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase) | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| | | | | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase) | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| | | | | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase) | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Orang) | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan | | | Indeks Demokrasi Indonesia(indeks) | | |
| | | Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat Dayak dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat | | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir (%) | | |
| | | | Cakupan pelayanan ketenteramam, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Indeks) | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Integritas Nasional (Persentase) | | |
| | | | | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin) | | |
| | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi | | | Rata-Rata Wilayah Monitoring Centre for Prevention(Angka) | | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik | | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) | | |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | | |
| | | | | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | | |
| | | | | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) | | |
| | | | | Indeks Reformasi Hukum (Indeks) | | |
| | | | Meningkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi, SDA dan kerja sama serta bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* |
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah (%) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | Terwujudnya kelancaran koordinasi, pelayanan, dan representasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pusat melalui penguatan fungsi penghubung, fasilitasi tamu daerah, serta promosi potensi daerah secara efektif dan efisien | Persentase keterlaksanaan (%) | 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | |



**Gambar 3.5.3 Pohon Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

**Tabel 3.5.2 Daftar Kegiatan Prioritas Utama di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029**

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Kegiatan Prioritas Utama | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya<br>3. Pengembangan Pangan Hewani | Pertanian |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya | Pertanian |
| Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut | Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR | Lingkungan Hidup |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Kegiatan Prioritas Utama | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya<br>3. Pengembangan Pangan Hewani | Pertanian |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya | Pertanian |
| | Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni/ berkelanjutan dan inklusif. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Kegiatan Prioritas Utama | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| pendukung transformasi ekonomi | | | | |
| | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Peningkatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Program Kawasan Permukiman | Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut | Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR | Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | Konservasi Sumber Daya Air | Kehutanan |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Kegiatan Prioritas Utama | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya<br>3. Pengembangan Pangan Hewani | Pertanian |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah<br>2. Pengembangan Lumbung Pangan Lainnya | Pertanian |
| Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Kesehatan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Penguatan pelayanan Kesehatan | Kesehatan |
| Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan | Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital | Komunikasi dan Informatika |

**Tabel 3.5.3 Daftar Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025 – 2029**

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Pariwisata |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Rp150 miliar bantuan provinsi untuk kabupaten/kota<br>2. Rp250 juta stimulus desa | Keuangan |
| | Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Inkubasi UMKM | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1. Asuransi Petani dan Nelayan<br>2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap | Kelautan dan Perikanan |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Asuransi Petani dan Nelayan | Kelautan dan Perikanan |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Pariwisata |
| | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Asuransi Petani dan Nelayan | Pertanian |
| | | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Rp150 miliar bantuan provinsi untuk kabupaten/kota<br>2. Rp250 juta stimulus desa | Keuangan |
| | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | Program Penempatan Tenaga Kerja | Milenial Job Center | Tenaga Kerja |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Inkubasi UMKM, Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1. Asuransi Petani dan Nelayan<br>2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap | Kelautan dan Perikanan |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Asuransi Petani dan Nelayan | Kelautan dan Perikanan |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Pariwisata |
| | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Asuransi Petani dan Nelayan | Pertanian |
| | | Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se-Kalimantan Tengah | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 250 Miliarder Muda Baru | Pemuda dan Olahraga |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Inkubasi UMKM | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp2 Juta per KK | Sosial |
| Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp2 Juta per KK | Sosial |
| Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau. | Terwujudnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat | Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pendidikan |
| | Meningkatnya kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digitalisasi dan penguatan kurikulum berbasis budaya Dayak | Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pendidikan |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman<br>2. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital | Komunikasi dan Informatika |
| | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi | Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pendidikan |
| Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni/ berkelanjutan dan inklusif. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air | Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa | |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | 1000 Rumah Guru | Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| pendukung transformasi ekonomi | Berkembangnya konektivitas wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi serta infrastruktur digital | Program Penyelenggaraan Jalan | 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan<br>2. Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten/Kota<br>3. Pembangunan 1000 km Jalan Desa | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Revitalisasi Infrastruktur Lalu Lintas Kabupaten/Kota | Perhubungan |
| | | Program Pengelolaan Pelayaran | Revitalisasi Infrastruktur Lalu Lintas Pelayaran | Perhubungan |
| | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Akses Sinyal dan internet Daerah Pedalaman | Komunikasi dan informatika |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman<br>2. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital | Komunikasi dan Informatika |
| | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana | Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| | | Program Penanggulangan Bencana | Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| Mewujudkan pembangunan kesehatan | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Insentif Tenaga Kesehatan Desa | Kesehatan |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | kesehatan dan tenaga kesehatan | | | |
| | Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Berobat Gratis Berbasis KTP<br>2. Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil | Kesehatan |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Insentif Tenaga Kesehatan Desa | Kesehatan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1 Desa 1 Ambulans | Kesehatan |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Berobat Gratis Berbasis KTP | Kesehatan |
| Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial | Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan | Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pendidikan |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Berobat Gratis Berbasis KTP<br>2. Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil | Kesehatan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1 Desa 1 Ambulans | Kesehatan |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 1. Insentif Guru Agama<br>2. Kalteng Mengaji | Pemerintahan Umum |
| | Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp2 Juta per KK | Sosial |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Urusan |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan | Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman | Komunikasi dan Informatika |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sosialisasi Spirit Belom Bahadat | Pendidikan dan Pelatihan |

**Tabel 3.5.4 Penyelarasan Program Prioritas Gubernur terhadap Program Prioritas RPJMN Tahun 2025–2029**

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Rp150 miliar bantuan provinsi untuk kabupaten/kota<br>2. Rp250 juta stimulus desa | Mendorong Kewirausahaan |
| | Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Inkubasi UMKM | Pengendalian Inflasi di Daerah. |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1. Asuransi Petani dan Nelayan<br>2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap | 1. Pengembangan Lumbung Pangan.<br>2. Kawasan Sentra Perikanan.<br>3. Kawasan Sentra Produksi Pangan. |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Asuransi Petani dan Nelayan | 1. Pengembangan Lumbung Pangan.<br>2. Kawasan Sentra Perikanan.<br>3. Kawasan Sentra Produksi Pangan. |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Mendorong Kewirausahaan |
| | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Asuransi Petani dan Nelayan | Ketahanan Pangan |
| | | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Swasembada Energi |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Kalteng Bermartabat menjiwai spirit Belom Bahadat | Memperkuat Reformasi Birokrasi |
| Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Milenial Job Center | Peningkatan Lapangan Kerja yang berkualitas.<br>Memperkuat Pembangunan SDM |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Inkubasi UMKM | 1. Mendorong Kewirausahaan.<br>2. Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.<br>3. Pembembangan Industri berbasis SDA. |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1. Asuransi Petani dan Nelayan<br>2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap | 1. Kawasan Sentra Perikanan dan Swasembada Pangan.<br>2. Ekonomi Biru |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Asuransi Petani dan Nelayan | Kawasan Sentra Perikanan dan Swasembada Pangan. |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Program 100 Dewi (Desa Wisata) | Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan |
| | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Asuransi Petani dan Nelayan | Ketahanan Pangan |
| | | Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Swasembada Energi |
| | | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar | Swasembada Energi |
| | Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se-Kalimantan Tengah | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dan toleransi antar umat beragama. |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 250 Miliarder Muda Baru | Memperkuat Peran Pemuda (generasi milenial dan generasi z) |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Inkubasi UMKM | 1. Mendorong Kewirausahaan.<br>2. Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan |

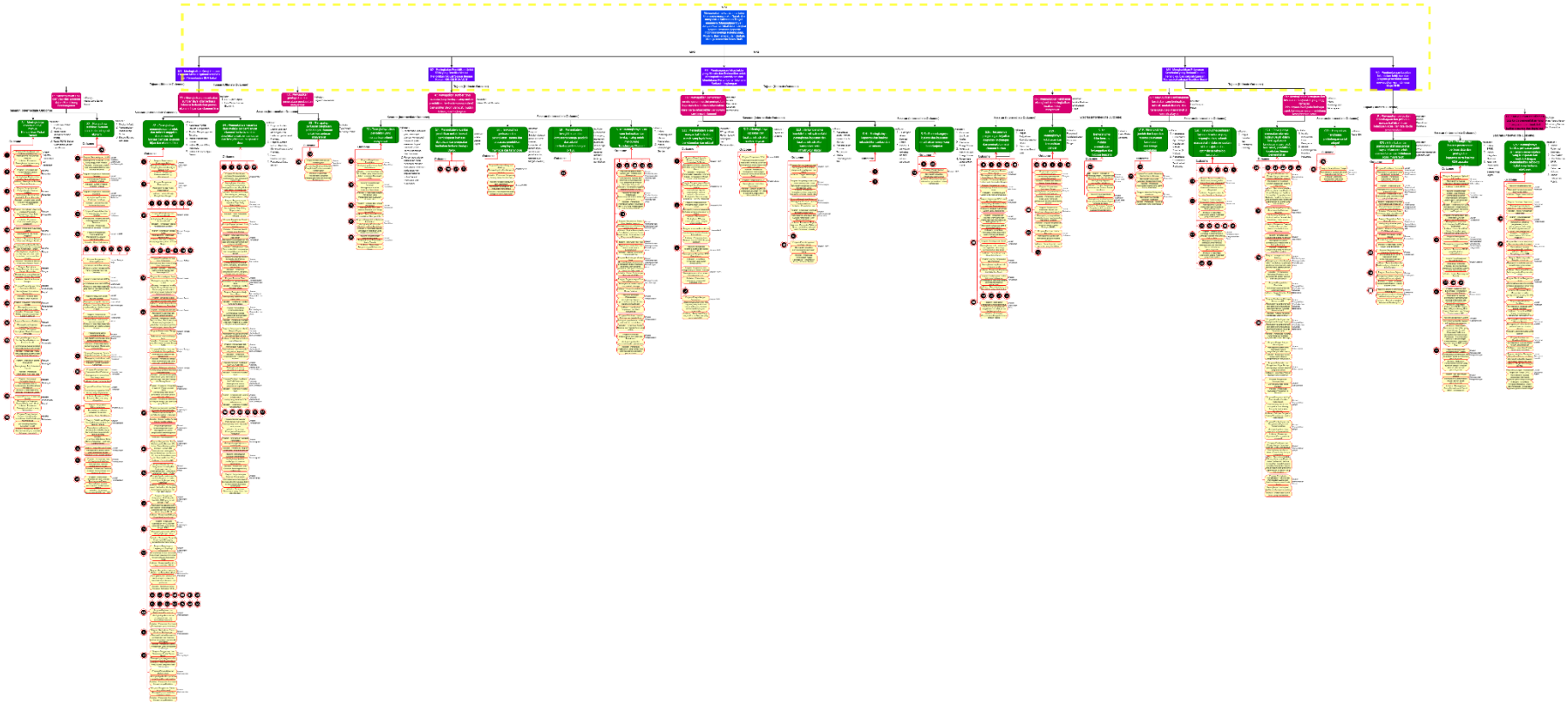
| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | | | | Pemberantasan Kemiskinan. |
| | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp2 Juta per KK | Memperkuat Pembangunan SDM dan Pemberantasa Kemiskinan |
| Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp2 Juta per KK | Memperkuat Pembangunan SDM dan Pemberantasa Kemiskinan |
| Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau. | Terwujudnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat | Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | 1. Memperkuat Pembangunan SDM.<br>2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG).<br>3. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dan Madrasah yang berkualitas.<br>4. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggulan.<br>5. Program Sekolah Rakyat. |
| | Meningkatnya kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digitalisasi dan penguatan kurikulum berbasis budaya Dayak | Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Memperkuat Pembangunan Sains, Teknologi. |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman<br>2. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital | 1. Memperkuat Pembangunan Sains, Teknologi.<br>2. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu. |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | | | | |
| | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi | Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Sekolah/Kuliah Gratis<br>2. Satu Keluarga Satu Sarjana | Pembangunan SDM |
| Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni/ berkelanjutan dan inklusif. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air | Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa | Pengembangan Infrastruktur. |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | 1000 Rumah Guru | Program 3 Juta Rumah |
| | Berkembangnya konektivitas wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi serta infrastruktur digital | Program Penyelenggaraan Jalan | 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan<br>2. Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten/Kota<br>3. Pembangunan 1000 km Jalan Desa | Pengendalian Inflasi di Daerah.<br>Pengembangan Infrastruktur. |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan<br>2. Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten/Kota | Pengembangan Infrastruktur. |
| | | Program Pengelolaan Pelayaran | Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten/Kota | Pengembangan Infrastruktur. |
| | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Akses Sinyal dan internet Daerah Pedalaman | Ekonomi Digital |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1. Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman | Membangun dari Desa dan dari bawah untuk |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | | | 2. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital | pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |
| | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa | Pengembangan Infrastruktur. |
| Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana | Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga | Mendorong kemandirian bangsa |
| | | Program Penanggulangan Bencana | Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga | Mendorong kemandirian bangsa |
| Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah | Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Insentif Tenaga Kesehatan Desa | 1. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota.<br>2. Penuntasan TBC.<br>3. Pencegahan Stunting.<br>4. Pembangunan SDM dan Kesehatan. |
| | | | | |
| | Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Berobat Gratis Berbasis KTP<br>2. Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil | Pembangunan SDM dan Kesehatan. |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Insentif Tenaga Kesehatan Desa | Pembangunan SDM dan Kesehatan. |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| | dan optimalisasi teknologi kesehatan | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1 Desa 1 Ambulans | Pembangunan SDM dan Kesehatan. |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa | 1. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota.<br>2. Pembangunan SDM dan Kesehatan. |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum | 1000 Rumah Guru | Pembangunan 3 Juta Rumah |
| Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial | Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan | Program Pengelolaan Pendidikan | 3. Sekolah/Kuliah Gratis<br>4. Satu Keluarga Satu Sarjana | 1. Pembangunan SDM bidan Pendidikan.<br>2. Penguatan Reformasi Birokrasi. |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 3. Berobat Gratis Berbasis KTP<br>4. Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil | Pembangunan SDM bidang Kesehatan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1 Desa 1 Ambulans | Pembangunan SDM bidang Kesehatan |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 3. Insentif Guru Agama<br>4. Kalteng Mengaji | 1. Pembangunan SDM bidang Pendidikan.<br>2. Penguatan toleransi antarumat beragama yntuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur |
| | Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp2 Juta per KK | Pembangunan SDM |

| Tujuan | Sasaran | Program Nomenklatur | Program Prioritas Gubernur | Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan | Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman | Pembangunan Sains dan Teknologi |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sosialisasi Spirit Belom Bahadat | Pembangunan SDM |



**Gambar 3.5.4 *Cascading* Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

Bila disandingkan kinerja RPJMD terhadap Astacita dan 17 Program Prioritas Nasional maka dapat terlihat seperti dibawah ini :

**Tabel 3.5.5 Persandingan Kinerja RPJMD terhadap Astacita dan 17 Program Prioritas Nasional**

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 20252029 - Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk Menyambut Indonesia Emas 2045 | | | | | | | | |
| Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan sumber daya alam lokal | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah | | | | | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 3.30.05.1.01.0001 - Pameran Dagang Internasional/Nasional | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan | Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi | | | | | | |
| | | | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1.05.03.1.02.0024 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi | 1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1.05.03.1.02.0024 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi | 1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |
| | | | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | 1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). |
| | | | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | 1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |
| | | | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 3.30.05.1.01.0001 - Pameran Dagang Internasional/Nasional | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | | | | |
| | | | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 3.27.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 3.27.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 3.27.02.1.02.0013 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial | 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 3.31.03.1.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru | Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan | | | | | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | kesejahteraan masyarakat desa | | | | | | |
| | | | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |
| | | | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |
| | | | 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial | 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | 3.30.03.1.01.0003 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) | 3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | | | Kewenangan Provinsi | | | |
| | | | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 3.31.03.1.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat | | | | | | |
| | | | 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | 2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | 2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat | | | | | | | | |
| | Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau. | Terwujudnya perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, memadai dan terjangkau | | | | | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| | | | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| | | | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | | | | | | penyandang disabilitas. |
| | | | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus | 1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| | | | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus | 1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus | 1.01.02.1.03.0070 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| | Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau. | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi | | | | | | |
| | | | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan | | | | | | | | |
| | Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni, berkelanjutan, dan inklusif. | | | | | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| | | | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana. | | | | | | |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | 2.09.04.1.02.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 | | | | | | | | |
| | Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial | Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan | | | | | | |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 1.06.02.1.02.0008 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 1.06.02.1.02.0008 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. |
| | | | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |
| | | | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 2.22.02.1.01.0013 - Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 2.22.02.1.01.0013 - Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |
| | | | 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial | Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif | | | | | | |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 1.06.02.1.02.0008 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 1.06.02.1.02.0008 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | 1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | 1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | 1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | 1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. |
| | Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan | Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat Dayak dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat | | | | | | |
| | | | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN / BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | PERANGKAT DAERAH | ASTACITA MISI PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | | | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |
| | | | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). |
| | | | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |

# BAB IV
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan akumulasi dari program-program per urusan yang diampu oleh perangkat daerah yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Program perangkat daerah ini termasuk didalamnya adalah indikator kinerja dan pagu indikatif anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Program perangkat daerah ini kemudian akan menjadi sinkron dan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Strategis perangkat daerah yang kemudian akan diturunkan ke dalam rencana kerja di level pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Rincian program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029 terlihat sebagaimana matriks berikut.

## Tabel 4.1.1 Program Perangkat Daerah

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 1.476.911.000.000,00 | | 1.496.766.514.789,77 | | 1.557.766.976.642,89 | | 1.626.299.049.495,12 | | 1.705.834.600.037,13 | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 1.028.356.960.512,00 | | 1.031.370.937.133,09 | | 1.040.937.313.496,29 | | 1.092.744.606.450,36 | | 1.125.000.000.000,00 | |
| Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Pemerintah | Nilai SAKIP (Angka) | 73,8 | 76 | 79 | 1.028.356.960.512,00 | 82 | 1.031.370.937.133,09 | 84 | 1.040.937.313.496,29 | 87 | 1.092.744.606.450,36 | 90 | 1.125.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | 429.254.039.488,00 | | 431.269.072.425,00 | | 478.969.072.425,00 | | 491.569.072.425,00 | | 534.267.357.847,99 | |
| Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan akuntabel guna mendukung pengembangan peserta didik secara optimal | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase) | 68,33 | 69,06 | 69,78 | 429.254.039.488,00 | 70,51 | 431.269.072.425,00 | 71,15 | 478.969.072.425,00 | 71,79 | 491.569.072.425,00 | 72,43 | 534.267.357.847,99 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase) | 62,60 | 70,08 | 71,17 | | 72,26 | | 73,35 | | 74,44 | | 75,53 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). (Persentase) | 67 | 70,6 | 75,88 | | 81,16 | | 86,44 | | 91,72 | | 97 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 70,52 | 71,12 | 71,72 | | 72,32 | | 72,92 | | 73,52 | | 74,12 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan | 70,27 | 71,57 | 72,87 | | 74,17 | | 75,47 | | 76,77 | | 78,07 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Asesmen Nasional (Nilai) | | | | | | | | | | | | | Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 67,1 | 68,7 | 70,3 | | 71,9 | | 73,5 | | 75,1 | | 76,7 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 75,94 | 76,44 | 76,94 | | 77,44 | | 77,94 | | 78,44 | | 78,94 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 67,55 | 68,05 | 68,55 | | 69,05 | | 69,55 | | 70,05 | | 70,55 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 59,27 | 60,87 | 62,47 | | 64,07 | | 65,67 | | 67,27 | | 68,87 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 58,56 | 60,76 | 62,96 | | 65,16 | | 67,36 | | 69,56 | | 71,76 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi | 65,32 | 65,92 | 66,52 | | 67,12 | | 67,72 | | 68,32 | | 68,92 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 68,98 | 69,23 | 69,48 | | 69,73 | | 69,98 | | 70,23 | | 70,48 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 68,01 | 68,51 | 69,01 | | 69,51 | | 70,01 | | 70,51 | | 71,01 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%) | 87,14 | 88,93 | 90,72 | | 92,51 | | 94,31 | | 96,1 | | 97,89 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%) | 75,89 | 77,44 | 77,98 | | 78,52 | | 79,06 | | 79,6 | | 80,14 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Inklusivitas SMA (Nilai) | 59,52 | 61,02 | 62,52 | | 64,02 | | 65,52 | | 67,02 | | 68,52 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Inklusivitas SMK (Nilai) | 57,47 | 59,77 | 62,07 | | 64,37 | | 66,67 | | 68,97 | | 71,27 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Inklusivitas SDLB (Nilai) | 66,2 | 67,5 | 68,8 | | 70,1 | | 71,4 | | 72,7 | | 74 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim inklusivitas SMPLB (Nilai) | 67,33 | 68,73 | 70,13 | | 71,53 | | 72,93 | | 74,33 | | 75,73 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim inklusivitas SMALB (Nilai) | 64,8 | 66,4 | 68 | | 69,6 | | 71,2 | | 72,8 | | 74,4 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim keamanan SMA (Nilai) | 71,66 | 82,4 | 83,6 | | 84,8 | | 86 | | 87,2 | | 88,4 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim keamanan SMK (Nilai) | 70,72 | 71,92 | 73,12 | | 74,32 | | 75,52 | | 76,72 | | 77,92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim keamanan SDLB (Nilai) | 78,1 | 78,6 | 79,1 | | 79,6 | | 80,1 | | 80,6 | | 81,1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Iklim keamanan SMPLB (Nilai) | 72 | 73,2 | 74,4 | | 75,6 | | 76,8 | | 78 | | 79,2 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim keamanan SMALB (Nilai) | 71 | 72,3 | 73,6 | | 74,9 | | 76,2 | | 77,5 | | 78,8 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim kebinekaan SMA (Nilai) | 72,78 | 73,78 | 74,78 | | 75,78 | | 76,78 | | 77,78 | | 78,78 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim kebinekaan SMK (Nilai) | 70,74 | 72,04 | 73,34 | | 74,64 | | 75,94 | | 77,24 | | 78,54 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim kebinekaan SDLB (Nilai) | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | 75,5 | | 76,5 | | 77,5 | | 78,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim kebinekaan SMPLB (Nilai) | 65,11 | 66,91 | 68,71 | | 70,51 | | 72,31 | | 74,11 | | 75,91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim kebinekaan SMALB (Nilai) | 70,6 | 72,6 | 74,6 | | 76,6 | | 78,6 | | 80,6 | | 82,6 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Bidang Pendidikan |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | 4.000.000.000,00 | | 4.692.453.473,89 | | 5.205.896.684,97 | | 5.773.061.052,68 | | 6.403.076.315,50 | |
| Peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal yang kontekstual dan mendukung pembelajaran bermakna. | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 4.000.000.000,00 | 100 | 4.692.453.473,89 | 100 | 5.205.896.684,97 | 100 | 5.773.061.052,68 | 100 | 6.403.076.315,50 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | 10.000.000.000,00 | | 1.452.725.205,68 | | 1.611.680.834,87 | | 1.787.267.865,70 | | 1.982.312.751,56 | |
| Terpenuhinya rasio ideal murid dan guru di setiap sekolah guna mencapai standar pendidikan yang berkualitas | Indeks Pemerataan Guru (Rasio) | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 10.000.000.000,00 | 0,75 | 1.452.725.205,68 | 0,76 | 1.611.680.834,87 | 0,78 | 1.787.267.865,70 | 0,8 | 1.982.312.751,56 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Persentase Guru SMA/SMK/PK yang bersertifikasi (%) | 62,37 | 65 | 67,5 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | 5.000.000.000,00 | | 27.273.605.050,53 | | 30.257.853.574,84 | | 33.554.341.659,36 | | 37.216.133.417,04 | |
| Terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih teratur, efisien, dan berkualitas melalui penguatan sistem perizinan dan pengawasan terintegrasi | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) | 70 | 73 | 75 | 5.000.000.000,00 | 77,5 | 27.273.605.050,53 | 80 | 30.257.853.574,84 | 82,5 | 33.554.341.659,36 | 85 | 37.216.133.417,04 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | | 300.000.000,00 | | 707.721.501,58 | | 785.159.626,92 | | 870.700.042,02 | | 965.719.705,04 | |
| Terciptanya generasi muda yang mengaktualisasikan bahasa dan sastra daerah dalam rangka memperkuat | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 707.721.501,58 | 100 | 785.159.626,92 | 100 | 870.700.042,02 | 100 | 965.719.705,04 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| karakter serta jati diri Belom Bahadat. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | 697.640.023.336,24 | | 707.019.059.582,35 | | 735.833.499.742,08 | | 768.205.604.021,83 | | 805.775.358.283,39 | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 561.611.927.143,88 | | 570.938.604.930,74 | | 597.046.097.399,95 | | 624.823.148.159,28 | | 654.300.041.288,47 | |
| Keterlaksanaan kinerja pemerintahan | Nilai LKIP Dinas Kesehatan (Angka) | 78,65 | 78,90 | 79,05 | 36.875.273.490,21 | 80,10 | 39.147.418.954,31 | 80,25 | 43.581.853.111,84 | 80,40 | 47.009.914.273,00 | 80,55 | 48.228.355.377,71 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | indeks kepuasan masyarakat (Indeks) | 85 | 86 | 86,5 | | 87 | | 87,5 | | 88 | | 88,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Keterlaksanaan Kinerja Pemerintahan | indeks kepuasan masyarakat (Indeks) | 81,8 | 80 | 82 | 395.140.194.572,00 | 84 | 400.452.438.828,67 | 85 | 416.772.809.091,76 | 87 | 435.108.224.429,07 | 87 | 456.387.565.510,94 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Keterlaksanaan Kinerja Pemerintahan | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan | 90 | 90 | 90 | 78.979.873.361,00 | 90 | 80.041.674.677,13 | 90 | 83.303.759.360,72 | 90 | 86.968.607.435,55 | 90 | 91.221.881.809,90 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Peningkatan tata kelola rumah sakit yang transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya dokumen untuk mendukung perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerah | | | | | 50.616.585.720,67 | | 51.297.072.470,63 | | 53.387.675.835,63 | | 55.736.402.021,66 | | 58.462.238.589,92 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA | | | | | 125.105.158.192,36 | | 125.473.435.082,28 | | 128.995.533.418,86 | | 134.235.379.026,78 | | 141.766.041.291,14 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya akses dan mutu pelayanan dasar dan rujukan | Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengembangan Teknologi Kesehatan (%) | 90 | 95 | 95 | 74.398.262.001,57 | 95 | 75.398.468.372,51 | 95 | 78.471.319.981,82 | 95 | 81.923.570.734,62 | 95 | 85.930.113.259,98 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (%) | 69,08 | 82 | 85 | 13.162.046.284,00 | 88 | 11.507.046.284,00 | 90 | 10.446.250.912,40 | 95 | 10.396.528.525,40 | 93 | 11.834.445.706,81 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 0 | 15 | 30 | | 45 | | 55 | | 65 | | 75 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase) | 8 | 8 | 7,5 | | 7 | | 6,5 | | 5 | | 4,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi (%) | 100 | 100 | 100 | 125.000.000,00 | 100 | 645.000.000,00 | 100 | 609.500.000,00 | 100 | 710.450.000,00 | 100 | 781.495.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase) | 87,5 | 80,76 | 80,76 | | 80,76 | | 80,76 | | 80,76 | | 84,61 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan secara tepat waktu (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Data profil kesehatan yang akurat dan terkumpul tepat waktu (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Pengembangan dan penelitian obat tradisional berbasis ilmiah untuk membuktikan khasiat dan keamanannya. | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%) | 94,24 | 65 | 70 | 0,00 | 76 | 0,00 | 83 | 0,00 | 90 | 0,00 | 93 | 0,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%) | 94 | 96 | 96,10 | | 96,20 | | 96,30 | | 96,40 | | 96,50 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC, malaria),eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta) dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%)) | 76 | 90 | 90 | 0,00 | 90 | 0,00 | 90 | 0,00 | 90 | 0,00 | 90 | 0,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 13 | | 13 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. (Orang) | 0,18 | 0,09 | 0,08 | | 0,07 | | 0,07 | | 0,06 | | 0,06 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. (Kab/Kota) | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Prevalensi Merokok pada Penduduk 10- | 0 | 12,4 | 12,0 | | 11,5 | | 11 | | 10 | | 10 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | 21 Tahun (Persentase) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Kesehatan |
| | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%) | 10 | 23,4 | 23,4 | | 23,4 | | 23,4 | | 23,4 | | 23,4 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 54 | 10 | 20 | | 30 | | 40 | | 50 | | 50 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Peningkatan cakupan imunisasi, serta penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan) | Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase) | 57 | 62 | 67 | 0,00 | 72 | 0,00 | 77 | 0,00 | 82 | 0,00 | 87 | 0,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | prosentase pemenuhan alat dan bahan lab (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan (%) | 14,3 | 21,4 | 28,6 | | 35,7 | | 42,9 | | 50,0 | | 57,1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%) | 1,33 | 1,35 | 1,38 | | 1,4 | | 1,43 | | 1,44 | | 1,45 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup) | 8,9 | 8,8 | 8,7 | | 8,6 | | 8,5 | | 8,4 | | 8 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%)) | 99,02 | 99,25 | 99,30 | 0,00 | 99,35 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) | 12 | 12 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 13 | 0,00 | 13 | 0,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase) | 8 | 8 | 7,5 | | 7 | | 6,5 | | 5 | | 4,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Dengan Unggulan Kesehatan Jiwa Yang Berkualitas dan Paripurna | | | | | 27.895.957.770,89 | | 28.270.989.578,56 | | 29.423.168.895,97 | | 30.717.605.602,20 | | 32.219.876.462,94 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Dengan Unggulan Kesehatan Jiwa | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Yang Berkualitas dan Paripurna | | | | | | | | | | | | | | |
| Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Paripurna | Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 9.523.892.135,90 | 100 | 9.651.930.847,21 | 100 | 10.045.293.628,67 | 100 | 10.487.224.164,56 | 100 | 11.000.110.861,41 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Terselenggaranya layanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. | | | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya layanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 10.922.938.000,00 | | 10.347.019.569,33 | | 9.510.868.923,27 | | 8.842.976.835,77 | | 9.379.765.703,78 | |
| Meningkatnya SDM yang terlatih sesuai standar profesi | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya SDM yang Terlatih | Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi (%) | 52 | 80 | 85 | 4.976.588.000,00 | 90 | 5.043.492.990,64 | 95 | 5.249.039.679,95 | 100 | 5.479.964.828,03 | 100 | 5.747.967.210,30 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Sesuai Standar Profesi | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis (dokter, perawat dan bidan) terhadap populasi (per 1.000 penduduk) (Angka) | 4.38:4.38 | 4.74:4.74 | 4.81:4.81 | 4.746.350.000,00 | 4.82:4.82 | 4.087.393.841,00 | 4.84:4.84 | 2.996.133.225,10 | 4.86:4.86 | 2.041.633.225,00 | 4.88:4.88 | 2.245.796.547,50 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%) | 0 | 45,45 | 50 | | 54,55 | | 59,1 | | 63,65 | | 68,2 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Terpenuhinya SDM yang terstandar dan profesional | | | | | 1.200.000.000,00 | | 1.216.132.737,69 | | 1.265.696.018,22 | | 1.321.378.782,74 | | 1.386.001.945,98 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | 0,00 | | 40.000.000,00 | | 44.000.000,00 | | 48.400.000,00 | | 53.240.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%) | 94 | 96 | 96,10 | 0,00 | 96,20 | 40.000.000,00 | 96,30 | 44.000.000,00 | 96,40 | 48.400.000,00 | 96,50 | 53.240.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pasien | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 0,00 | | 220.000.000,00 | | 237.000.000,00 | | 255.700.000,00 | | 276.270.000,00 | |
| meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. | Cakupan Kabupaten/Kota melakukan implementasi kebijakan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat (%) | 40 | 40 | 50 | 0,00 | 60 | 220.000.000,00 | 70 | 237.000.000,00 | 80 | 255.700.000,00 | 85 | 276.270.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Persentase Cakupan pemeriksaan | 0 | 20 | 30 | | 45 | | 65 | | 80 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | kesehatan gratis (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 1.283.326.300.589,14 | | 1.300.579.272.732,65 | | 1.353.584.157.281,69 | | 1.413.133.454.108,07 | | 1.482.243.958.290,38 | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 81.719.596.274,00 | | 82.818.230.282,71 | | 86.193.473.012,41 | | 89.985.450.542,06 | | 94.386.266.217,30 | |
| Terwujudnya dukungan yang memadai bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan | Persentase Keterlaksanaan (%) | 100 | 100 | 100 | 81.719.596.274,00 | 100 | 82.818.230.282,71 | 100 | 86.193.473.012,41 | 100 | 89.985.450.542,06 | 100 | 94.386.266.217,30 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | 25.931.529.500,00 | | 26.280.151.636,00 | | 27.351.194.695,51 | | 28.554.477.404,40 | | 29.950.958.624,44 | |
| Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani (%) | 24,89 | 25,38 | 27,81 | 25.931.529.500,00 | 30,31 | 26.280.151.636,00 | 32,82 | 27.351.194.695,51 | 35,31 | 28.554.477.404,40 | 37,81 | 29.950.958.624,44 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| akses masyarakat terhadap irigasi | | | | | | | | | | | | | | Umum Dan Penataan Ruang |
| | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (%) | 0:0 | 1.40:1.44 | 2.40:2.46 | | 3.50:3.51 | | 4.50:4.57 | | 6.50:6.58 | | 7.0:7.6 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%) | 0 | 0,023 | 0,073 | | 0,123 | | 0,173 | | 0,223 | | 0,273 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 57.900.000.000,00 | | 134.585.356.303,85 | | 140.070.359.350,14 | | 146.232.585.289,81 | | 153.384.215.355,52 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%) | 2 | 3,2 | 4,4 | 57.900.000.000,00 | 5,6 | 134.585.356.303,85 | 6,8 | 140.070.359.350,14 | 8 | 146.232.585.289,81 | 9,2 | 153.384.215.355,52 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| penyediaan air minum | | | | | | | | | | | | | | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | 8.000.000.000,00 | | 9.120.995.532,64 | | 9.492.720.136,68 | | 9.910.340.870,54 | | 10.395.014.594,88 | |
| Meningkatnya layanan persampahan regional | Jumlah Infrastruktur Persampahan yang Terbangun dan Ditingkatkan (Unit) | 1 | 1 | 1 | 8.000.000.000,00 | 1 | 9.120.995.532,64 | 1 | 9.492.720.136,68 | 1 | 9.910.340.870,54 | 1 | 10.395.014.594,88 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 19.500.000.000,00 | | 19.762.156.987,39 | | 20.567.560.296,14 | | 21.472.405.219,51 | | 22.522.531.622,23 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik | 78,15 | 82,52 | 86,89 | 19.500.000.000,00 | 91,26 | 19.762.156.987,39 | 95,63 | 20.567.560.296,14 | 100 | 21.472.405.219,51 | 100 | 22.522.531.622,23 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Layak dan Aman) (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | 4.400.000.000,00 | | 9.526.373.111,87 | | 9.914.618.809,42 | | 10.350.800.464,79 | | 10.857.015.243,54 | |
| meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Panjang Drainase yang Dibangun/Ditingkatkan (Meter) | 128,13 | 500 | 600 | 4.400.000.000,00 | 700 | 9.526.373.111,87 | 800 | 9.914.618.809,42 | 900 | 10.350.800.464,79 | 1.000 | 10.857.015.243,54 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | | | 45.000.000.000,00 | | 4.256.464.581,89 | | 4.429.927.063,80 | | 4.624.825.738,59 | | 4.851.006.810,93 | |
| Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis kawasan provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan) | 0 | 0 | 1 | 45.000.000.000,00 | 1 | 4.256.464.581,89 | 1 | 4.429.927.063,80 | 1 | 4.624.825.738,59 | 1 | 4.851.006.810,93 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.08 - PROGRAM | | | | | 83.500.000.000,00 | | 86.649.457.560,09 | | 90.180.841.298,47 | | 94.148.238.270,17 | | 98.752.638.651,33 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | | | | |
| meningkatnya kualitas bangunan gedung | Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang Dibangun dan Ditingkatkan (Unit) | 10 | 11 | 12 | 83.500.000.000,00 | 13 | 86.649.457.560,09 | 14 | 90.180.841.298,47 | 15 | 94.148.238.270,17 | 16 | 98.752.638.651,33 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | 273.193.803.362,41 | | 234.200.616.454,39 | | 243.745.422.293,40 | | 254.468.707.154,66 | | 266.913.717.637,54 | |
| meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 40 | 45 | 50 | 273.193.803.362,41 | 55 | 234.200.616.454,39 | 60 | 243.745.422.293,40 | 65 | 254.468.707.154,66 | 70 | 266.913.717.637,54 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | 678.479.772.662,73 | | 687.601.219.493,76 | | 715.624.288.920,71 | | 747.107.313.428,54 | | 783.645.237.684,20 | |
| meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi | 87,33 | 82,81 | 83,31 | 678.479.772.662,73 | 83,81 | 687.601.219.493,76 | 84,31 | 715.624.288.920,71 | 84,81 | 747.107.313.428,54 | 85,31 | 783.645.237.684,20 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | 3.622.850.000,00 | | 3.671.555.407,27 | | 3.821.198.016,35 | | 3.989.297.603,54 | | 4.184.397.625,01 | |
| meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) | 11,10 | 15,86 | 18,10 | 3.622.850.000,00 | 20,12 | 3.671.555.407,27 | 21,19 | 3.821.198.016,35 | 22,02 | 3.989.297.603,54 | 22,69 | 4.184.397.625,01 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | 2.078.748.790,00 | | 2.106.695.380,79 | | 2.192.553.388,66 | | 2.289.012.121,46 | | 2.400.958.223,46 | |
| meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Terselenggaranya penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 2.078.748.790,00 | 1 | 2.106.695.380,79 | 1 | 2.192.553.388,66 | 1 | 2.289.012.121,46 | 1 | 2.400.958.223,46 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 279.167.998.543,00 | | 282.790.612.343,25 | | 294.230.902.831,59 | | 307.102.224.441,22 | | 322.064.243.382,18 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 17.606.198.543,00 | | 20.139.700.000,00 | | 21.160.000.000,00 | | 23.066.500.000,00 | | 25.367.150.000,00 | |
| Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan daerah yang efektif dan efisien | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 17.606.198.543,00 | 100 | 20.139.700.000,00 | 100 | 21.160.000.000,00 | 100 | 23.066.500.000,00 | 100 | 25.367.150.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | 5.475.000.000,00 | | 6.016.850.000,00 | | 7.050.000.000,00 | | 7.730.000.000,00 | | 8.503.000.000,00 | |
| Terpenuhinya pelayanan dasar rumah bagi masyarakat. | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | 100 | 100 | 100 | 5.475.000.000,00 | 100 | 6.016.850.000,00 | 100 | 7.050.000.000,00 | 100 | 7.730.000.000,00 | 100 | 8.503.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) | | | | | | | | | | | | | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 66.536.800.000,00 | | 89.668.450.000,00 | | 97.835.000.000,00 | | 105.417.500.000,00 | | 112.057.750.000,00 | |
| Berkurangnya luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi | Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) | 6,74 | 7,55 | 8,96 | 30.000.000.000,00 | 10,37 | 50.000.000.000,00 | 11,78 | 52.000.000.000,00 | 13,19 | 55.000.000.000,00 | 14,60 | 58.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| Kualitas lingkungan rumah masyarakat yang layak, aman dan sehat. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%)) | 59,92 | 64,53 | 67,15 | 36.536.800.000,00 | 69,75 | 39.668.450.000,00 | 72,30 | 45.835.000.000,00 | 75,00 | 50.417.500.000,00 | 77,50 | 54.057.750.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat. | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | 189.550.000.000,00 | | 166.965.612.343,25 | | 168.185.902.831,59 | | 170.888.224.441,22 | | 176.136.343.382,18 | |
| Kualitas Lingkungan Permukiman yang layak, aman dan sehat. | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) | 100 | 85 | 86 | 189.550.000.000,00 | 87 | 166.965.612.343,25 | 88 | 168.185.902.831,59 | 89 | 170.888.224.441,22 | 90 | 176.136.343.382,18 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 77.679.820.564,91 | | 78.724.144.038,77 | | 81.932.532.987,81 | | 85.537.055.617,88 | | 89.720.318.722,18 | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG | | | | | 52.554.820.564,91 | | 55.895.654.728,08 | | 59.001.217.860,12 | | 61.805.016.818,21 | | 65.398.432.896,67 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Keterlaksanaan | Persentase Keterlaksanaan (%) | 100 | 100 | 100 | 35.873.047.496,17 | 100 | 36.395.654.728,08 | 100 | 37.751.217.860,12 | 100 | 39.305.016.818,21 | 100 | 41.148.432.896,67 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP (Angka) | 65 | 68 | 70 | 16.681.773.068,74 | 73 | 19.500.000.000,00 | 76 | 21.250.000.000,00 | 79 | 22.500.000.000,00 | 82 | 24.250.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 2.400.000.000,00 | | 2.400.000.000,00 | | 2.600.000.000,00 | | 2.800.000.000,00 | | 3.000.000.000,00 | |
| Cakupan pelayanan ketenteramam, | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | 75 | 75 | 75 | 2.400.000.000,00 | 75 | 2.400.000.000,00 | 75 | 2.600.000.000,00 | 75 | 2.800.000.000,00 | 75 | 3.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi | Sub Urusan Trantibum (Indeks) | | | | | | | | | | | | | Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | 22.125.000.000,00 | | 19.828.489.310,69 | | 19.681.315.127,69 | | 20.232.038.799,67 | | 20.571.885.825,51 | |
| Meningkatkan ketahanan daerah dalam rangka mengurangi resiko bencana | Persentase penanganan pra bencana (%) | 100 | 100 | 100 | 22.125.000.000,00 | 100 | 19.828.489.310,69 | 100 | 19.681.315.127,69 | 100 | 20.232.038.799,67 | 100 | 20.571.885.825,51 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 50 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, | | | | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 650.000.000,00 | | 700.000.000,00 | | 750.000.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Indeks) | 75 | 75 | 75 | 600.000.000,00 | 75 | 600.000.000,00 | 75 | 650.000.000,00 | 75 | 700.000.000,00 | 75 | 750.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | 57.272.097.269,00 | | 59.042.060.370,61 | | 61.407.554.557,27 | | 64.065.111.811,86 | | 67.149.365.221,16 | |
| 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 34.302.900.392,00 | | 34.764.066.803,56 | | 36.180.870.366,41 | | 37.772.603.970,34 | | 39.619.905.580,16 | |
| Meningkatnya kinerja program penunjang urusan daerah pada Dinas Sosial | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 85 | 88,5 | 88,75 | 34.302.900.392,00 | 89 | 34.764.066.803,56 | 89,5 | 36.180.870.366,41 | 89,75 | 37.772.603.970,34 | 90 | 39.619.905.580,16 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.02 - PROGRAM | | | | | 1.680.000.000,00 | | 2.202.585.832,76 | | 2.271.974.425,51 | | 2.349.930.295,83 | | 2.440.402.724,38 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 1.680.000.000,00 | 100 | 2.202.585.832,76 | 100 | 2.271.974.425,51 | 100 | 2.349.930.295,83 | 100 | 2.440.402.724,38 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | 200.000.000,00 | | 202.688.789,61 | | 210.949.336,37 | | 220.229.797,12 | | 231.000.324,33 | |
| Meningkatnya layanan penanganan warga migran korban tindak kekerasan | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 202.688.789,61 | 100 | 210.949.336,37 | 100 | 220.229.797,12 | 100 | 231.000.324,33 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | 8.720.850.000,00 | | 9.338.092.654,54 | | 9.698.287.600,44 | | 10.102.955.131,22 | | 10.573.095.892,19 | |
| Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 100 | 100 | 100 | 8.720.850.000,00 | 100 | 9.338.092.654,54 | 100 | 9.698.287.600,44 | 100 | 10.102.955.131,22 | 100 | 10.573.095.892,19 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN | | | | | 9.148.346.877,00 | | 9.271.336.777,35 | | 9.649.188.512,96 | | 10.073.692.883,67 | | 10.566.355.478,38 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Orang) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 9.148.346.877,00 | 50.000 | 9.271.336.777,35 | 50.000 | 9.649.188.512,96 | 50.000 | 10.073.692.883,67 | 50.000 | 10.566.355.478,38 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | 2.580.000.000,00 | | 2.614.685.386,02 | | 2.721.246.439,19 | | 2.840.964.382,89 | | 2.979.404.183,86 | |
| Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 2.580.000.000,00 | 100 | 2.614.685.386,02 | 100 | 2.721.246.439,19 | 100 | 2.840.964.382,89 | 100 | 2.979.404.183,86 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | 640.000.000,00 | | 648.604.126,77 | | 675.037.876,39 | | 704.735.350,79 | | 739.201.037,86 | |
| Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan | Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 640.000.000,00 | 100 | 648.604.126,77 | 100 | 675.037.876,39 | 100 | 704.735.350,79 | 100 | 739.201.037,86 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | 32.289.090.495,39 | | 32.723.180.845,62 | | 34.056.806.415,42 | | 35.555.092.316,25 | | 37.293.942.809,84 | |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 28.012.090.495,39 | | 28.388.671.845,62 | | 29.545.635.415,42 | | 30.845.446.316,25 | | 32.353.954.809,84 | |
| Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Penunjang dan Sarana Prasarana Kantor | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 28.012.090.495,39 | 100 | 28.388.671.845,62 | 100 | 29.545.635.415,42 | 100 | 30.845.446.316,25 | 100 | 32.353.954.809,84 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | 200.000.000,00 | | 202.690.000,00 | | 210.953.000,00 | | 220.236.000,00 | | 231.009.000,00 | |
| Meningkatnya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%) | 85,71 | 92,86 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 202.690.000,00 | 100 | 210.953.000,00 | 100 | 220.236.000,00 | 100 | 231.009.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | 2.460.000.000,00 | | 2.493.073.000,00 | | 2.594.680.000,00 | | 2.708.832.000,00 | | 2.841.311.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%) | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 60.000.000,00 | 1,00 | 60.807.000,00 | 1,20 | 63.286.000,00 | 1,40 | 66.071.000,00 | 1,60 | 69.303.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkompeten | Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat (Orang) | 112 | 112 | 256 | 2.400.000.000,00 | 320 | 2.432.266.000,00 | 384 | 2.531.394.000,00 | 448 | 2.642.761.000,00 | 480 | 2.772.008.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | 885.000.000,00 | | 896.901.000,00 | | 933.456.000,00 | | 974.524.000,00 | | 1.022.187.000,00 | |
| Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) | 17,12 | 17,45 | 17,60 | 885.000.000,00 | 17,75 | 896.901.000,00 | 17,90 | 933.456.000,00 | 18,05 | 974.524.000,00 | 18,20 | 1.022.187.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | 357.000.000,00 | | 361.802.000,00 | | 376.549.000,00 | | 393.118.000,00 | | 412.348.000,00 | |
| Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS | 2,00 | 2,06 | 2,13 | 357.000.000,00 | 2,19 | 361.802.000,00 | 2,33 | 376.549.000,00 | 2,57 | 393.118.000,00 | 2,61 | 412.348.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Ketenagakerjaan) (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | | 375.000.000,00 | | 380.043.000,00 | | 395.533.000,00 | | 412.936.000,00 | | 433.133.000,00 | |
| Meningkatnya Perusahaan yang Melapor Kondisi Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online (Perusahaan) | 13829:13929 | 14027:14127 | 14227:14327 | 375.000.000,00 | 14427:14527 | 380.043.000,00 | 14627:14727 | 395.533.000,00 | 14827:14927 | 412.936.000,00 | 15027:15127 | 433.133.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 21.329.909.105,10 | | 21.016.983.249,48 | | 21.873.418.599,74 | | 22.835.697.698,38 | | 23.952.512.341,86 | |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 16.677.131.562,10 | | 15.094.483.249,48 | | 15.709.280.599,74 | | 16.400.337.626,38 | | 17.202.463.179,86 | |
| MELAKSANAKAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN | Nilai SAKIP (Angka) | 80,25 | 80,30 | 80,35 | 16.677.131.562,10 | 80,40 | 15.094.483.249,48 | 80,45 | 15.709.280.599,74 | 80,50 | 16.400.337.626,38 | 80,50 | 17.202.463.179,86 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| ANAK DAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | n Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | 1.752.700.000,00 | | 1.972.500.000,00 | | 2.052.978.000,00 | | 2.143.309.032,00 | | 2.248.116.839,00 | |
| Terbentuknya Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah (Orang) | 30 | 40 | 40 | 1.752.700.000,00 | 40 | 1.972.500.000,00 | 40 | 2.052.978.000,00 | 40 | 2.143.309.032,00 | 40 | 2.248.116.839,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | 1.563.940.000,00 | | 2.065.000.000,00 | | 2.149.252.000,00 | | 2.243.819.088,00 | | 2.353.541.835,00 | |
| Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan | Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan (%) | 90 | 92,5 | 92,5 | 1.563.940.000,00 | 92,5 | 2.065.000.000,00 | 92,5 | 2.149.252.000,00 | 92,5 | 2.243.819.088,00 | 92,5 | 2.353.541.835,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 257.059.094,00 | | 350.000.000,00 | | 364.280.000,00 | | 380.308.320,00 | | 398.905.396,00 | |
| Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan | Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan (Peserta) | 40 | 50 | 50 | 257.059.094,00 | 50 | 350.000.000,00 | 50 | 364.280.000,00 | 50 | 380.308.320,00 | 50 | 398.905.396,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | 189.278.449,00 | | 270.000.000,00 | | 281.016.000,00 | | 293.380.704,00 | | 307.727.019,00 | |
| Sebagai Bahan Analisi bagi peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Dokumen) | 14 | 14 | 14 | 189.278.449,00 | 14 | 270.000.000,00 | 14 | 281.016.000,00 | 14 | 293.380.704,00 | 14 | 307.727.019,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | 390.000.000,00 | | 560.000.000,00 | | 582.848.000,00 | | 608.493.312,00 | | 638.248.634,00 | |
| Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA | Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA (kabupaten/kota) | 10 | 11 | 12 | 390.000.000,00 | 13 | 560.000.000,00 | 14 | 582.848.000,00 | 14 | 608.493.312,00 | 14 | 638.248.634,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | 499.800.000,00 | | 705.000.000,00 | | 733.764.000,00 | | 766.049.616,00 | | 803.509.439,00 | |
| Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan | Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%) (%) | 85 | 90 | 90 | 499.800.000,00 | 90 | 705.000.000,00 | 90 | 733.764.000,00 | 90 | 766.049.616,00 | 90 | 803.509.439,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | 11.479.784.825,51 | | 11.634.118.456,57 | | 12.108.264.953,10 | | 12.640.953.415,70 | | 13.259.170.089,69 | |
| 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN | | | | | 9.909.784.825,51 | | 10.043.011.458,10 | | 10.452.312.662,59 | | 10.912.149.508,28 | | 11.445.817.543,70 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Kinerja yang terlayani dengan baik | Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani (%) | 100 | 100 | 100 | 9.909.784.825,51 | 100 | 10.043.011.458,10 | 100 | 10.452.312.662,59 | 100 | 10.912.149.508,28 | 100 | 11.445.817.543,70 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | 15.000.000,00 | | 15.201.659,22 | | 15.821.200,23 | | 16.517.234,78 | | 17.325.024,32 | |
| Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) | Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) (Ton) | 36.334 | 38.500 | 200.000 | 15.000.000,00 | 225.000 | 15.201.659,22 | 250.000 | 15.821.200,23 | 275.000 | 16.517.234,78 | 300.000 | 17.325.024,32 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 1.252.000.000,00 | | 1.268.831.822,99 | | 1.320.542.845,68 | | 1.378.638.529,99 | | 1.446.062.030,31 | |
| Kontribusi penguatan cadangan pangan derah (%) dan Skor Pola Pangan | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | 91 | 91 | 91,5 | 1.252.000.000,00 | 92 | 1.268.831.822,99 | 92,5 | 1.320.542.845,68 | 93 | 1.378.638.529,99 | 93,5 | 1.446.062.030,31 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Harapan (PPH) Konsumsi (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | 195.000.000,00 | | 197.621.569,87 | | 205.675.602,96 | | 214.724.052,20 | | 225.225.316,22 | |
| Penanganan Daerah Rawan Pangan | Penanganan daerah rawan pangan (%) (%) | 2 | 8,8 | 8,8 | 195.000.000,00 | 7,7 | 197.621.569,87 | 6,6 | 205.675.602,96 | 5,5 | 214.724.052,20 | 4,4 | 225.225.316,22 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | 108.000.000,00 | | 109.451.946,39 | | 113.912.641,64 | | 118.924.090,45 | | 124.740.175,14 | |
| Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang di ambil | Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang di ambil (%) | 90 | 90 | 90 | 108.000.000,00 | 91 | 109.451.946,39 | 92 | 113.912.641,64 | 93 | 118.924.090,45 | 94 | 124.740.175,14 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | 1.450.000.000,00 | | 1.600.000.000,00 | | 1.750.000.000,00 | | 1.900.000.000,00 | | 2.050.000.000,00 | |
| 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | 300.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 375.000.000,00 | | 400.000.000,00 | |
| Tersedianya Data penyelesaian | Persentase Penyelesaian Kasus | 60,71 | 70 | 70 | 300.000.000,00 | 70 | 325.000.000,00 | 70 | 350.000.000,00 | 70 | 375.000.000,00 | 70 | 400.000.000,00 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| sengketa tanah garapan | Tanah Garapan (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Pertanahan |
| 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | 900.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 1.100.000.000,00 | | 1.200.000.000,00 | | 1.300.000.000,00 | |
| Berkurangnya ketimpangan kepemilikan tanah | Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (Bidang Tanah) | 4.386 | 1.000 | 1.050 | 900.000.000,00 | 1.100 | 1.000.000.000,00 | 1.150 | 1.100.000.000,00 | 1.200 | 1.200.000.000,00 | 1.250 | 1.300.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (Kepala Keluarga) | 4.386 | 1.000 | 1.050 | | 1.100 | | 1.150 | | 1.200 | | 1.250 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | 250.000.000,00 | | 275.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 350.000.000,00 | |
| Peningkatan efisiensi pemanfaatan tanah | Jumlah Laporan Penatagunaan Tanah (Laporan) | 1 | 1 | 1 | 250.000.000,00 | 1 | 275.000.000,00 | 1 | 300.000.000,00 | 1 | 325.000.000,00 | 1 | 350.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%) | 100 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%) | 99,33 | 75 | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota (%) | 0 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 110.945.357.046,00 | | 112.436.900.664,00 | | 117.019.247.211,00 | | 122.167.367.370,00 | | 128.142.067.303,00 | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 42.878.923.184,00 | | 44.057.900.664,00 | | 45.790.323.211,00 | | 47.591.869.370,00 | | 49.700.467.303,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 42.878.923.184,00 | 100 | 44.057.900.664,00 | 100 | 45.790.323.211,00 | 100 | 47.591.869.370,00 | 100 | 49.700.467.303,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 445.000.000,00 | | 708.050.000,00 | | 720.372.000,00 | | 1.133.200.000,00 | | 348.100.000,00 | |
| Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) | 75 | 75 | 76 | 445.000.000,00 | 77 | 708.050.000,00 | 78 | 720.372.000,00 | 79 | 1.133.200.000,00 | 80 | 348.100.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 7.181.350.058,00 | | 7.253.250.000,00 | | 7.543.252.000,00 | | 7.844.759.000,00 | | 8.197.900.000,00 | |
| Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 52,13 | 70,45 | 70,65 | 7.181.350.058,00 | 70,85 | 7.253.250.000,00 | 71,05 | 7.543.252.000,00 | 71,25 | 7.844.759.000,00 | 71,45 | 8.197.900.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 92,71 | 78,44 | 78,64 | | 78,84 | | 79,04 | | 79,24 | | 79,44 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | 434.204.000,00 | | 1.988.500.000,00 | | 2.068.000.000,00 | | 2.150.811.000,00 | | 2.247.350.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase RTH (Persentase) | 0,235 | 0,245 | 0,255 | 434.204.000,00 | 0,265 | 1.988.500.000,00 | 0,275 | 2.068.000.000,00 | 0,285 | 2.150.811.000,00 | 0,295 | 2.247.350.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | 2.389.000.000,00 | | 1.706.000.000,00 | | 1.774.250.000,00 | | 1.845.091.000,00 | | 1.928.250.000,00 | |
| Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | 99,944 | 99,946 | 99,948 | 2.389.000.000,00 | 99,950 | 1.706.000.000,00 | 99,952 | 1.774.250.000,00 | 99,954 | 1.845.091.000,00 | 99,956 | 1.928.250.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | | | | | | | | | | | | | | Lingkungan Hidup |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 1.281.572.804,00 | | 1.294.400.000,00 | | 1.346.200.000,00 | | 1.400.012.000,00 | | 1.462.950.000,00 | |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%) | 12,68 | 15 | 17 | 1.281.572.804,00 | 19 | 1.294.400.000,00 | 21 | 1.346.200.000,00 | 23 | 1.400.012.000,00 | 25 | 1.462.950.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN | | | | | 149.749.000,00 | | 455.500.000,00 | | 491.200.000,00 | | 529.979.000,00 | | 551.700.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 149.749.000,00 | 100 | 455.500.000,00 | 100 | 491.200.000,00 | 100 | 529.979.000,00 | 100 | 551.700.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 5.051.758.000,00 | | 5.102.000.000,00 | | 5.306.100.000,00 | | 5.518.620.000,00 | | 5.766.600.000,00 | |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 45 | 50 | 55 | 5.051.758.000,00 | 60 | 5.102.000.000,00 | 65 | 5.306.100.000,00 | 70 | 5.518.620.000,00 | 75 | 5.766.600.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 482.000.000,00 | | 486.800.000,00 | | 506.300.000,00 | | 526.544.000,00 | | 550.300.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) | 45 | 50 | 60 | 482.000.000,00 | 65 | 486.800.000,00 | 70 | 506.300.000,00 | 75 | 526.544.000,00 | 80 | 550.300.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1.328.000.000,00 | | 1.341.300.000,00 | | 1.394.900.000,00 | | 1.450.729.000,00 | | 1.515.900.000,00 | |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) | 100 | 65 | 70 | 1.328.000.000,00 | 75 | 1.341.300.000,00 | 80 | 1.394.900.000,00 | 85 | 1.450.729.000,00 | 90 | 1.515.900.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 49.323.800.000,00 | | 48.043.200.000,00 | | 50.078.350.000,00 | | 52.175.753.000,00 | | 55.872.550.000,00 | |
| Meningkatnya tata kelola persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) | 31,06 | 43 | 45 | 49.323.800.000,00 | 47 | 48.043.200.000,00 | 49 | 50.078.350.000,00 | 51 | 52.175.753.000,00 | 53 | 55.872.550.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI | | | | | 9.614.411.366,11 | | 9.743.413.652,26 | | 10.140.504.799,71 | | 10.586.624.035,84 | | 11.104.371.968,69 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 8.384.661.366,11 | | 8.497.130.957,13 | | 8.843.430.067,70 | | 9.232.486.070,78 | | 9.684.008.724,46 | |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 76 | 77 | 78 | 8.384.661.366,11 | 79 | 8.497.130.957,13 | 80 | 8.843.430.067,70 | 82 | 9.232.486.070,78 | 84 | 9.684.008.724,46 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan | 55 | 57 | 59 | | 62 | | 65 | | 70 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | 351.000.000,00 | | 355.718.825,77 | | 370.216.085,33 | | 386.503.293,95 | | 405.405.569,20 | |
| Meningkatnya Kualitas dan kuantitas layanan Pendaftaran Penduduk | Perekaman KTP elektronik (%) | 97,20 | 97,5 | 98 | 351.000.000,00 | 99 | 355.718.825,77 | 99,5 | 370.216.085,33 | 99,9 | 386.503.293,95 | 99,95 | 405.405.569,20 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%) | 55 | 57 | 59 | | 62 | | 65 | | 70 | | 75 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | 278.750.000,00 | | 282.497.500,52 | | 294.010.637,57 | | 306.945.279,74 | | 321.956.702,04 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Pencatatan Sipil | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%) | 96 | 97 | 97,25 | 278.750.000,00 | 97,50 | 282.497.500,52 | 97,75 | 294.010.637,57 | 98 | 306.945.279,74 | 99 | 321.956.702,04 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%) | 50 | 51 | 51,5 | | 52 | | 52,5 | | 53 | | 53,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (%) | 50 | 51 | 51,5 | | 52 | | 52,5 | | 53 | | 53,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%) | 64 | 65 | 65,5 | | 66 | | 66,5 | | 67 | | 67,5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependuduka |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | n Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | 450.000.000,00 | | 456.049.776,63 | | 474.636.006,83 | | 495.517.043,53 | | 519.750.729,74 | |
| Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) | 2,5 | 5 | 12,5 | 450.000.000,00 | 17,5 | 456.049.776,63 | 25 | 474.636.006,83 | 32,5 | 495.517.043,53 | 37,5 | 519.750.729,74 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase) | 5 | 7,5 | 12 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | 150.000.000,00 | | 152.016.592,21 | | 158.212.002,28 | | 165.172.347,84 | | 173.250.243,25 | |
| Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 152.016.592,21 | 100 | 158.212.002,28 | 100 | 165.172.347,84 | 100 | 173.250.243,25 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Penyajian data kependudukan dalam skala satu Provinsi tahun (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 35.198.012.855,55 | | 35.671.213.112,59 | | 37.124.987.257,23 | | 38.758.256.151,59 | | 40.653.761.927,12 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 17.050.191.186,55 | | 19.431.213.112,59 | | 19.924.987.257,23 | | 19.723.256.151,59 | | 20.933.761.927,12 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 90 | 91 | 92 | 17.050.191.186,55 | 93 | 19.431.213.112,59 | 94 | 19.924.987.257,23 | 95 | 19.723.256.151,59 | 96 | 20.933.761.927,12 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | 200.000.000,00 | | 270.000.000,00 | | 375.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 500.000.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas penataan desa. | Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) | 0 | 0 | 74 | 200.000.000,00 | 76 | 270.000.000,00 | 78 | 375.000.000,00 | 80 | 350.000.000,00 | 82 | 500.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | | 1.400.000.000,00 | | 1.250.000.000,00 | | 1.270.000.000,00 | | 1.300.000.000,00 | | 1.350.000.000,00 | |
| Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) | 70 | 72 | 74 | 1.400.000.000,00 | 76 | 1.250.000.000,00 | 78 | 1.270.000.000,00 | 80 | 1.300.000.000,00 | 82 | 1.350.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaa |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | n Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | 9.672.821.669,00 | | 8.590.000.000,00 | | 9.355.000.000,00 | | 10.280.000.000,00 | | 10.570.000.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | 10 | 10 | 10 | 9.672.821.669,00 | 10 | 8.590.000.000,00 | 10 | 9.355.000.000,00 | 10 | 10.280.000.000,00 | 10 | 10.570.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | 70 | 72 | 74 | | 76 | | 78 | | 80 | | 82 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | 6.875.000.000,00 | | 6.130.000.000,00 | | 6.200.000.000,00 | | 7.105.000.000,00 | | 7.300.000.000,00 | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan | 70 | 72 | 74 | 6.875.000.000,00 | 76 | 6.130.000.000,00 | 78 | 6.200.000.000,00 | 80 | 7.105.000.000,00 | 82 | 7.300.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan. | Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | 70 | 72 | 74 | | 76 | | 78 | | 80 | | 82 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 1.771.500.000,00 | | 2.395.000.000,00 | | 2.492.716.000,00 | | 2.602.395.504,00 | | 2.729.652.637,00 | |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | 229.000.000,00 | | 370.000.000,00 | | 385.096.000,00 | | 402.040.224,00 | | 421.699.989,00 | |
| Menurunkan Angka Kelahiran | Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR) (Indeks) | 2,28 | 2,24 | 2,23 | 229.000.000,00 | 2,22 | 370.000.000,00 | 2,21 | 385.096.000,00 | 2,2 | 402.040.224,00 | 2,2 | 421.699.989,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN | | | | | 631.500.000,00 | | 820.000.000,00 | | 853.456.000,00 | | 891.008.064,00 | | 934.578.355,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) | 66,4 | 66,4 | 66,5 | 631.500.000,00 | 66,6 | 820.000.000,00 | 66,7 | 853.456.000,00 | 66,8 | 891.008.064,00 | 66,9 | 934.578.355,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | 911.000.000,00 | | 1.205.000.000,00 | | 1.254.164.000,00 | | 1.309.347.216,00 | | 1.373.374.293,00 | |
| Meningkatkan Keluarga sejahtera | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks) | 0 | 63,6 | 63,7 | 911.000.000,00 | 63,8 | 1.205.000.000,00 | 63,8 | 1.254.164.000,00 | 64 | 1.309.347.216,00 | 64 | 1.373.374.293,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 42.902.601.968,28 | | 43.479.382.321,26 | | 45.251.377.068,92 | | 47.242.156.637,66 | | 49.552.574.846,50 | |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN | | | | | 20.040.026.571,00 | | 20.317.104.633,00 | | 21.368.061.587,00 | | 22.469.061.587,00 | | 22.638.061.587,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 71,9 | 72,1 | 73,50 | 20.040.026.571,00 | 76,68 | 20.317.104.633,00 | 78,5 | 21.368.061.587,00 | 81 | 22.469.061.587,00 | 83,5 | 22.638.061.587,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 20.112.575.397,28 | | 20.412.277.688,26 | | 19.583.315.481,92 | | 18.846.088.393,66 | | 20.266.006.657,00 | |
| Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Rasio konektivitas provinsi (Nilai) | 0.64:0.65 | 0.72:0.73 | 0.73:0.74 | 20.112.575.397,28 | 0.74:0.75 | 20.412.277.688,26 | 0.75:0.76 | 19.583.315.481,92 | 0.76:0.77 | 18.846.088.393,66 | 0.77:0.78 | 20.266.006.657,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi (Orang) | 1.450.000 | 1.532.409 | 1.607.409 | | 1.682.409 | | 1.757.409 | | 1.832.409 | | 1.907.409 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik | 77,32 | 79,5 | 80 | | 80,5 | | 81 | | 81,5 | | 82 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Sektor Transportasi (Nilai) | | | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi (Persentase) | 100 | 98,5 | 98,75 | | 99 | | 99,25 | | 99,5 | | 99,75 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | V/C ratio di jalan Provinsi (Nilai) | 0.36:0.37 | 0.32:0.33 | 0.33:0.34 | | 0.34:0.35 | | 0.35:0.36 | | 0.36:0.37 | | 0.37:0.38 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | 2.700.000.000,00 | | 2.700.000.000,00 | | 3.250.000.000,00 | | 5.777.006.657,00 | | 6.498.506.602,50 | |
| Terlaksananya Program Pengelolaan Pelayaran | Rasio konektivitas provinsi (Nilai) | 0.64:0.65 | 0.72:0.73 | 0.73:0.74 | 2.700.000.000,00 | 0.74:0.75 | 2.700.000.000,00 | 0.75:0.76 | 3.250.000.000,00 | 0.76:0.77 | 5.777.006.657,00 | 0.77:0.78 | 6.498.506.602,50 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi (Orang) | 1.450.000 | 1.532.409 | 1.607.409 | | 1.682.409 | | 1.757.409 | | 1.832.409 | | 1.907.409 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi (Persentase) | 100 | 98,5 | 98,75 | | 99 | | 99,25 | | 99,50 | | 99,75 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 1.050.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | |
| Terlaksananya Program Pengelolaan Perkeretaapian | Rasio konektivitas provinsi (Nilai) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 50.000.000,00 | 0:0 | 50.000.000,00 | 0:0 | 1.050.000.000,00 | 0:0 | 150.000.000,00 | 0:0 | 150.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 53.942.277.867,20 | | 54.706.269.870,13 | | 56.898.974.060,70 | | 59.362.953.081,45 | | 62.263.396.476,93 | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 24.339.201.681,20 | | 15.206.475.731,00 | | 16.815.781.737,00 | | 17.555.781.737,00 | | 21.505.087.794,00 | |
| Presentase Keterlaksanaan | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | 0 | 64 | 66,5 | 24.339.201.681,20 | 68 | 15.206.475.731,00 | 69,5 | 16.815.781.737,00 | 71 | 17.555.781.737,00 | 72,5 | 21.505.087.794,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN | | | | | 13.919.625.235,00 | | 19.938.223.580,13 | | 20.117.633.365,70 | | 21.547.612.386,45 | | 20.451.749.725,93 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai) | 0 | 0 | 65 | 13.919.625.235,00 | 66 | 19.938.223.580,13 | 67 | 20.117.633.365,70 | 68 | 21.547.612.386,45 | 69 | 20.451.749.725,93 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 15.683.450.951,00 | | 19.561.570.559,00 | | 19.965.558.958,00 | | 20.259.558.958,00 | | 20.306.558.957,00 | |
| Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang termanfaatkan dengan optimal | Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi (Level) | 2,8 | 2,9 | 3,03 | 15.683.450.951,00 | 3,15 | 19.561.570.559,00 | 3,28 | 19.965.558.958,00 | 3,40 | 20.259.558.958,00 | 3,53 | 20.306.558.957,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | 47.263.369.407,00 | | 47.898.775.690,98 | | 49.850.882.055,25 | | 52.044.011.279,31 | | 54.589.268.309,87 | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 16.648.721.003,00 | | 16.872.545.543,62 | | 17.560.183.235,02 | | 18.332.722.244,26 | | 19.229.299.756,91 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Ketatalaksanaan Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik | | | | | 16.648.721.003,00 | | 16.872.545.543,62 | | 17.560.183.235,02 | | 18.332.722.244,26 | | 19.229.299.756,91 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | | 336.140.000,00 | | 340.659.048,70 | | 354.542.549,64 | | 370.140.220,03 | | 388.242.245,11 | |
| Lembaga Keuangan yang Mikro Berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS) | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase) | 2.609 | 2.634 | 2.659 | 336.140.000,00 | 2.684 | 340.659.048,70 | 2.709 | 354.542.549,64 | 2.734 | 370.140.220,03 | 2.759 | 388.242.245,11 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.03 - PROGRAM | | | | | 439.353.600,00 | | 445.260.246,98 | | 463.406.751,76 | | 483.793.770,97 | | 507.454.120,48 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kualitas Koperasi Aktif | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 84,21 | 84,71 | 85,21 | 439.353.600,00 | 85,71 | 445.260.246,98 | 86,21 | 463.406.751,76 | 86,71 | 483.793.770,97 | 87,21 | 507.454.120,48 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | 1.008.560.000,00 | | 1.022.119.028,27 | | 1.063.775.313,45 | | 1.110.574.820,93 | | 1.164.888.435,53 | |
| Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | Persentase Koperasi yang sehat/berkualitas (%) | 21,50 | 25 | 27,50 | 1.008.560.000,00 | 30 | 1.022.119.028,27 | 32,50 | 1.063.775.313,45 | 35 | 1.110.574.820,93 | 37,50 | 1.164.888.435,53 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | 3.473.136.180,00 | | 3.519.828.842,45 | | 3.663.278.861,48 | | 3.824.440.381,51 | | 4.011.477.920,12 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Koperasi | Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang) | 240 | 300 | 350 | 3.473.136.180,00 | 400 | 3.519.828.842,45 | 450 | 3.663.278.861,48 | 500 | 3.824.440.381,51 | 550 | 4.011.477.920,12 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | 14.565.871.135,00 | | 14.761.693.950,15 | | 15.363.304.247,95 | | 16.039.194.224,92 | | 16.823.604.781,71 | |
| meningkatnya produktivitas koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Volume Usaha/ Omset Koperasi | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 1,50 | 2 | 2,50 | 14.565.871.135,00 | 3 | 14.761.693.950,15 | 3,50 | 15.363.304.247,95 | 4 | 16.039.194.224,92 | 4,50 | 16.823.604.781,71 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | 1:1 | 1:1 | 1:2 | | 2:2 | | 2:2 | | 2:2 | | 2:3 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | 9.177.045.489,00 | | 9.300.421.212,00 | | 9.679.458.278,74 | | 10.105.294.331,16 | | 10.599.502.421,78 | |
| Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Wirausaha | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) | 9,99 | 10 | 10,25 | 9.177.045.489,00 | 10,50 | 9.300.421.212,00 | 10,75 | 9.679.458.278,74 | 10,85 | 10.105.294.331,16 | 10,95 | 10.599.502.421,78 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Rasio Kewirausahaan (Persentase) | 3 | 3,33 | 3,70 | | 4,07 | | 4,43 | | 4,80 | | 5,17 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase) | 13,15 | 14,00 | 15,75 | | 16,50 | | 16,75 | | 17,25 | | 17,75 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | 1.614.542.000,00 | | 1.636.247.818,81 | | 1.702.932.817,21 | | 1.777.851.285,53 | | 1.864.798.628,23 | |
| Peningkatan Kapasitas UMKM | Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (%) | 480 | 490 | 500 | 1.614.542.000,00 | 525 | 1.636.247.818,81 | 550 | 1.702.932.817,21 | 575 | 1.777.851.285,53 | 600 | 1.864.798.628,23 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 15.667.202.335,55 | | 15.877.831.390,17 | | 16.524.929.677,35 | | 17.251.923.959,23 | | 18.095.644.104,33 | |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 13.553.172.135,55 | | 13.735.380.277,95 | | 14.295.163.338,56 | | 14.924.061.748,94 | | 15.653.935.795,10 | |
| Tercapainya Persentase Indikator Program yang Tercapai, Persentase Realisasi Anggaran dan Indeks Profesionalitas ASN | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 78,60 | 78,75 | 78,90 | 13.553.172.135,55 | 80,05 | 13.735.380.277,95 | 80,20 | 14.295.163.338,56 | 80,35 | 14.924.061.748,94 | 80,50 | 15.653.935.795,10 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | 501.045.200,00 | | 507.781.225,65 | | 528.475.762,16 | | 551.725.413,73 | | 578.708.018,52 | |
| Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase) | 95 | 95 | 96 | 501.045.200,00 | 96 | 507.781.225,65 | 97 | 528.475.762,16 | 97 | 551.725.413,73 | 98 | 578.708.018,52 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | 500.158.800,00 | | 506.882.908,93 | | 527.540.834,70 | | 550.749.355,27 | | 577.684.225,08 | |
| Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Promosi Penanaman Modal | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) | 93 | 93 | 94 | 500.158.800,00 | 94 | 506.882.908,93 | 95 | 527.540.834,70 | 95 | 550.749.355,27 | 96 | 577.684.225,08 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | 531.708.200,00 | | 538.856.457,43 | | 560.817.459,66 | | 585.489.945,07 | | 614.123.833,25 | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin | 92 | 92 | 93 | 531.708.200,00 | 93 | 538.856.457,43 | 94 | 560.817.459,66 | 94 | 585.489.945,07 | 95 | 614.123.833,25 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Sesuai Ketentuan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Penanaman Modal |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | 511.118.000,00 | | 517.989.443,85 | | 539.100.014,54 | | 562.817.067,23 | | 590.342.118,86 | |
| Meningkatnya Kontribusi PMDN dan PMA terhadap Realisasi Investasi | Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah) | 8,65 | 10 | 10,50 | 511.118.000,00 | 11,03 | 517.989.443,85 | 11,58 | 539.100.014,54 | 12,16 | 562.817.067,23 | 12,16 | 590.342.118,86 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | 70.000.000,00 | | 70.941.076,36 | | 73.832.267,73 | | 77.080.428,99 | | 80.850.113,52 | |
| Meningkatnya Kualitas Dokumen Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat diakses | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | 92 | 92 | 93 | 70.000.000,00 | 93 | 70.941.076,36 | 94 | 73.832.267,73 | 94 | 77.080.428,99 | 95 | 80.850.113,52 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | | | | | 32.623.300.008,63 | | 33.061.885.959,86 | | 34.409.317.435,21 | | 35.923.113.711,95 | | 37.679.964.413,64 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 15.835.800.008,63 | | 16.048.695.681,62 | | 16.702.757.513,60 | | 17.437.575.115,92 | | 18.290.374.690,14 | |
| Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 98 | 98 | 98 | 15.835.800.008,63 | 98 | 16.048.695.681,62 | 98 | 16.702.757.513,60 | 98 | 17.437.575.115,92 | 98 | 18.290.374.690,14 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | 3.562.500.000,00 | | 3.610.394.065,00 | | 3.757.535.054,10 | | 3.922.843.261,26 | | 4.114.693.277,14 | |
| Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan | Jumlah organisasi pemuda yang aktif (%) | 70,21 | 72,34 | 74,46 | 3.562.500.000,00 | 76,60 | 3.610.394.065,00 | 78,72 | 3.757.535.054,10 | 80,85 | 3.922.843.261,26 | 82,98 | 4.114.693.277,14 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) | 2,01 | 2,15 | 2,30 | | 2,45 | | 2,60 | | 2,80 | | 3,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | 11.725.000.000,00 | | 11.882.630.291,13 | | 12.366.904.844,73 | | 12.910.971.856,35 | | 13.542.394.013,88 | |
| Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga | Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir (Kegiatan) | 5 | 1 | 1 | 11.725.000.000,00 | 1 | 11.882.630.291,13 | 1 | 12.366.904.844,73 | 5 | 12.910.971.856,35 | 1 | 13.542.394.013,88 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) | 10 | 25 | 10 | | 25 | | 10 | | 25 | | 25 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | 1.500.000.000,00 | | 1.520.165.922,11 | | 1.582.120.022,78 | | 1.651.723.478,42 | | 1.732.502.432,48 | |
| Persentase organisasi kepramukaan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menerima manfaat | Persentase organisasi kepramukaan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menerima manfaat | 100 | 100 | 100 | 1.500.000.000,00 | 100 | 1.520.165.922,11 | 100 | 1.582.120.022,78 | 100 | 1.651.723.478,42 | 100 | 1.732.502.432,48 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| pengembangan kapasitas kepramukaan | pengembangan kapasitas kepramukaan (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 287.915.617,73 | | 303.103.720,00 | | 333.412.502,00 | | 367.197.424,00 | | 386.497.213,00 | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | 287.915.617,73 | | 303.103.720,00 | | 333.412.502,00 | | 367.197.424,00 | | 386.497.213,00 | |
| Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral | Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase) | 80 | 85 | 87 | 287.915.617,73 | 88 | 303.103.720,00 | 90 | 333.412.502,00 | 95 | 367.197.424,00 | 100 | 386.497.213,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 364.000.000,00 | | 318.781.397,00 | | 350.657.864,00 | | 386.190.271,00 | | 406.488.318,00 | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | 364.000.000,00 | | 318.781.397,00 | | 350.657.864,00 | | 386.190.271,00 | | 406.488.318,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya layanan dan pengembangan persandian daerah | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%) | 0 | 0 | 30 | 364.000.000,00 | 32 | 318.781.397,00 | 34 | 350.657.864,00 | 36 | 386.190.271,00 | 38 | 406.488.318,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 33.663.760.853,90 | | 58.145.360.853,00 | | 59.145.360.853,00 | | 60.145.360.853,00 | | 61.145.360.853,00 | |
| 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 23.145.360.853,90 | | 23.145.360.853,00 | | 23.145.360.853,00 | | 23.145.360.853,00 | | 23.145.360.853,00 | |
| Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi | Nilai SAKIP (Angka) | 72,7 | 72,7 | 73,4 | 23.145.360.853,90 | 73,9 | 23.145.360.853,00 | 74,3 | 23.145.360.853,00 | 74,8 | 23.145.360.853,00 | 75 | 23.145.360.853,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | 5.002.750.000,00 | | 26.000.000.000,00 | | 27.000.000.000,00 | | 28.000.000.000,00 | | 29.000.000.000,00 | |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan | 50 | 50 | 50 | 5.002.750.000,00 | 50 | 26.000.000.000,00 | 50 | 27.000.000.000,00 | 50 | 28.000.000.000,00 | 50 | 29.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Kebudayaan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | 250.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Presentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang dilestarikan (Persentase) | 20 | 20 | 20 | 250.000.000,00 | 20 | 500.000.000,00 | 20 | 500.000.000,00 | 20 | 500.000.000,00 | 20 | 500.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | 242.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | 5 | 5 | 5 | 242.000.000,00 | 5 | 500.000.000,00 | 5 | 500.000.000,00 | 5 | 500.000.000,00 | 5 | 500.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | 235.000.000,00 | | 5.000.000.000,00 | | 5.000.000.000,00 | | 5.000.000.000,00 | | 5.000.000.000,00 | |
| Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang | 10 | 10 | 10 | 235.000.000,00 | 10 | 5.000.000.000,00 | 10 | 5.000.000.000,00 | 10 | 5.000.000.000,00 | 10 | 5.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Ditetapkan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | 4.788.650.000,00 | | 3.000.000.000,00 | | 3.000.000.000,00 | | 3.000.000.000,00 | | 3.000.000.000,00 | |
| Meningkatnya tata kelola museum | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase) | 20 | 20 | 20 | 4.788.650.000,00 | 20 | 3.000.000.000,00 | 20 | 3.000.000.000,00 | 20 | 3.000.000.000,00 | 20 | 3.000.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | 20.000.455.945,20 | | 20.269.341.036,32 | | 21.095.414.543,76 | | 22.023.481.175,92 | | 23.100.559.050,50 | |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 18.373.019.945,20 | | 18.626.747.845,29 | | 19.406.255.163,75 | | 20.282.006.168,17 | | 20.298.368.642,20 | |
| terlaksananya tata kelola perangkat daerah | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 71 | 71,8 | 73,50 | 18.373.019.945,20 | 76,68 | 18.626.747.845,29 | 78,5 | 19.406.255.163,75 | 81 | 20.282.006.168,17 | 83,5 | 20.298.368.642,20 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | 1.350.000.000,00 | | 1.361.427.355,85 | | 1.396.534.679,58 | | 1.435.976.637,78 | | 2.481.751.378,40 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| meningkatnya pelayanan perpustakaan | Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks) | 74 | 74,27 | 75,95 | 1.350.000.000,00 | 77,62 | 1.361.427.355,85 | 79,30 | 1.396.534.679,58 | 80,97 | 1.435.976.637,78 | 82,65 | 2.481.751.378,40 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | 277.436.000,00 | | 281.165.835,18 | | 292.624.700,43 | | 305.498.369,97 | | 320.439.029,90 | |
| meningkatnya pelestarian koleksi nasional | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 277.436.000,00 | 100 | 281.165.835,18 | 100 | 292.624.700,43 | 100 | 305.498.369,97 | 100 | 320.439.029,90 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | 402.200.000,00 | | 407.607.155,92 | | 424.219.115,44 | | 442.882.122,01 | | 464.541.652,23 | |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | 250.000.000,00 | | 253.360.987,02 | | 263.686.670,46 | | 275.287.246,40 | | 288.750.405,41 | |
| meningkatnya tata kelola arsip | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai) | 55 | 60 | 65 | 250.000.000,00 | 70 | 253.360.987,02 | 75 | 263.686.670,46 | 80 | 275.287.246,40 | 85 | 288.750.405,41 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN | | | | | 152.200.000,00 | | 154.246.168,90 | | 160.532.444,98 | | 167.594.875,61 | | 175.791.246,82 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | | | | | | | | | | |
| meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) | 50 | 55 | 60 | 152.200.000,00 | 65 | 154.246.168,90 | 70 | 160.532.444,98 | 75 | 167.594.875,61 | 80 | 175.791.246,82 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 53.390.661.780,60 | | 54.108.443.065,06 | | 56.313.623.355,05 | | 58.791.073.061,08 | | 61.666.300.937,72 | |
| 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 26.200.000.000,00 | | 28.800.000.000,00 | | 31.660.000.000,00 | | 34.806.000.000,00 | | 36.863.000.000,00 | |
| Meningkatnya Layanan dan pendapatan BLUD | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 200.000.000,00 | 0,8 | 200.000.000,00 | 0,8 | 200.000.000,00 | 0,8 | 200.000.000,00 | 0,8 | 200.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel | Nilai SAKIP (Angka) | 65 | 65 | 65 | 26.000.000.000,00 | 65 | 28.600.000.000,00 | 65 | 31.460.000.000,00 | 65 | 34.606.000.000,00 | 65 | 36.663.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | | | | | | | | | Dan Perikanan |
| 3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | 2.270.209.000,00 | | 2.780.209.000,00 | | 3.593.209.000,00 | | 2.300.209.000,00 | | 2.310.209.000,00 | |
| Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebabagi sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase) | 2 | 2 | 2 | 2.270.209.000,00 | 2 | 2.780.209.000,00 | 2 | 3.593.209.000,00 | 2 | 2.300.209.000,00 | 2 | 2.310.209.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 15.207.902.780,60 | | 13.264.283.000,00 | | 12.291.283.000,00 | | 12.712.283.000,00 | | 13.833.283.000,00 | |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 164.099,54 | 169.022,53 | 174.093,2 | 15.207.902.780,60 | 179.316 | 13.264.283.000,00 | 184.695,48 | 12.291.283.000,00 | 190.236,34 | 12.712.283.000,00 | 195.943,40 | 13.833.283.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 7.808.350.000,00 | | 7.110.751.065,06 | | 6.657.931.355,05 | | 6.940.587.312,08 | | 6.724.608.937,72 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 137.867,02 | 142.003,03 | 146.263,12 | 7.808.350.000,00 | 150.651,02 | 7.110.751.065,06 | 155.170,55 | 6.657.931.355,05 | 159.825,66 | 6.940.587.312,08 | 164.620,40 | 6.724.608.937,72 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 820.000.000,00 | | 881.000.000,00 | | 934.000.000,00 | | 949.793.749,00 | | 848.000.000,00 | |
| Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%) | 93,62 | 85 | 85 | 820.000.000,00 | 85 | 881.000.000,00 | 85 | 934.000.000,00 | 85 | 949.793.749,00 | 85 | 848.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 1.084.200.000,00 | | 1.272.200.000,00 | | 1.177.200.000,00 | | 1.082.200.000,00 | | 1.087.200.000,00 | |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) | 33,73 | 34,24 | 34,75 | 1.084.200.000,00 | 35,27 | 1.272.200.000,00 | 35,80 | 1.177.200.000,00 | 36,34 | 1.082.200.000,00 | 36,88 | 1.087.200.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | 67.050.000.000,00 | | 43.922.390.571,87 | | 47.132.144.224,64 | | 50.755.494.748,85 | | 55.179.196.256,03 | |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | 49.450.000.000,00 | | 27.872.390.571,87 | | 31.082.144.224,64 | | 34.705.494.748,85 | | 39.129.196.256,03 | |
| Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 49.450.000.000,00 | 0,8 | 27.872.390.571,87 | 0,9 | 31.082.144.224,64 | 1 | 34.705.494.748,85 | 1 | 39.129.196.256,03 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | 16.420.000.000,00 | | 14.800.000.000,00 | | 14.800.000.000,00 | | 14.800.000.000,00 | | 14.800.000.000,00 | |
| Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 2 | 2 | 2 | 16.420.000.000,00 | 2 | 14.800.000.000,00 | 2 | 14.800.000.000,00 | 2 | 14.800.000.000,00 | 2 | 14.800.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN | | | | | 0,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | 1.180.000.000,00 | | 750.000.000,00 | | 750.000.000,00 | | 750.000.000,00 | | 750.000.000,00 | |
| Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 5 | 5 | 5 | 1.180.000.000,00 | 5 | 750.000.000,00 | 5 | 750.000.000,00 | 5 | 750.000.000,00 | 5 | 750.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | 166.826.336.464,98 | | 169.069.141.069,32 | | 175.959.524.832,21 | | 183.700.651.172,44 | | 192.684.689.145,48 | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 67.015.503.853,78 | | 67.604.908.854,42 | | 69.622.568.244,90 | | 71.681.502.604,52 | | 74.586.018.505,71 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Kinerja ASN dalam pencapaian target produksi pertanian dan peternakan | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 66,45 | 68,00 | 68,60 | 22.644.121.558,78 | 69,00 | 22.637.000.000,00 | 69,20 | 22.822.000.000,00 | 70,00 | 22.822.000.000,00 | 72,00 | 23.337.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 66,45 | 68,45 | 70,45 | | 71,45 | | 72,45 | | 73,45 | | 74,45 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Nilai SAKIP (Angka) | 71,28 | 72,87 | 72,97 | 44.371.382.295,00 | 73,17 | 44.967.908.854,42 | 73,27 | 46.800.568.244,90 | 73,50 | 48.859.502.604,52 | 73,65 | 51.249.018.505,71 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 74.878.621.426,20 | | 76.160.979.066,18 | | 79.366.244.300,26 | | 83.491.432.739,79 | | 87.728.686.242,45 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | |
| meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton) | 16.597,33 | 16.699,50 | 16.807,35 | 1.808.000.000,00 | 16.800,35 | 2.108.000.000,00 | 16.803,00 | 2.295.248.810,00 | 16.806,72 | 3.029.792.078,00 | 16.807 | 3.332.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (Ton) | 178.144,42 | 178.125,00 | 17.800,23 | | 17.821,50 | | 178.235,35 | | 178.236,82 | | 17.828.700 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton) | 1.604,63 | 1.610,00 | 1.613,00 | | 1.615,00 | | 1.620,00 | | 1.623,00 | | 1.627,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton) | 237,83 | 247,00 | 257,00 | | 267,00 | | 277,00 | | 278,00 | | 288,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit (Ton) | 1.095.978,13 | 1.188.732,00 | 1.197.548,25 | | 1.199.075,62 | | 1.200.012,80 | | 1.195.820,00 | | 1.198.935,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya Produksi Tanaman | Peningkatan Produksi Tanaman | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 73.070.621.426,20 | 0,02 | 74.052.979.066,18 | 0,02 | 77.070.995.490,26 | 0,02 | 80.461.640.661,79 | 0,02 | 84.396.686.242,45 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Pangan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Pertanian |
| | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | 21.360.934.352,22 | | 21.643.661.063,54 | | 23.243.684.243,75 | | 24.638.441.219,14 | | 26.277.229.781,53 | |
| meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase terlaksananya penataan prasarana perkebunan (%) | 100 | 100 | 100 | 5.310.934.352,22 | 100 | 5.377.885.697,00 | 100 | 6.315.000.000,00 | 100 | 6.965.000.000,00 | 100 | 7.739.453.754,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan,Hortikultura dan Peternakan | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 16.050.000.000,00 | 0,02 | 16.265.775.366,54 | 0,02 | 16.928.684.243,75 | 0,02 | 17.673.441.219,14 | 0,02 | 18.537.776.027,53 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | 1.250.000.000,00 | | 1.266.804.935,09 | | 1.318.433.352,32 | | 1.376.436.232,02 | | 1.443.752.021,07 | |
| Meningkatnya populasi ternak yang sehat | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya produksi hewan yang sehat dan aman bagi masyarakat | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | 20 | 20 | 25 | 1.250.000.000,00 | 25 | 1.266.804.935,09 | 33 | 1.318.433.352,32 | 50 | 1.376.436.232,02 | 100 | 1.443.752.021,07 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) | 50 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | 1.170.000.000,00 | | 1.181.427.355,86 | | 1.216.534.679,58 | | 1.255.976.637,77 | | 1.301.751.378,41 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatkan penanganan bencana | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya luas pengendalian OPT dan DPI | | | | | | | | | | | | | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Meningkatnya penanganan bencana pertanian/perkebunan | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (%) | 100 | 100 | 100 | 320.000.000,00 | 100 | 320.000.000,00 | 100 | 320.000.000,00 | 100 | 320.000.000,00 | 100 | 320.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten/Kota | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan (%) | 60 | 65 | 65 | 850.000.000,00 | 65 | 861.427.355,86 | 65 | 896.534.679,58 | 65 | 935.976.637,77 | 65 | 981.751.378,41 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%) | 50 | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 65 | | 70 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN | | | | | 150.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 230.000.000,00 | | 280.000.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| USAHA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Perusahaan Besar Swasta yang mempunyai IUP di Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase terlaksananya pembinaan, pengawaasan perizinan usaha perkebunan (%) | 100 | 100 | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 230.000.000,00 | 100 | 280.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | 1.001.276.832,78 | | 1.011.359.794,23 | | 992.060.011,40 | | 1.026.861.739,20 | | 1.067.251.216,31 | |
| Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi | Persentase pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi perkebunan (%) | 100 | 100 | 100 | 251.276.832,78 | 100 | 251.276.833,17 | 100 | 201.000.000,02 | 100 | 200.999.999,99 | 100 | 201.000.000,08 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| Terlaksananya pengembangan tenaga penyuluh pertanian | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) | 70 | 75 | 80 | 750.000.000,00 | 85 | 760.082.961,06 | 90 | 791.060.011,38 | 95 | 825.861.739,21 | 100 | 866.251.216,23 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | 289.293.170.950,07 | | 293.182.413.317,67 | | 305.131.012.142,46 | | 318.554.881.737,31 | | 334.134.081.580,46 | |
| 3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN | | | | | 93.660.000.000,00 | | 94.919.160.170,00 | | 98.787.574.220,00 | | 103.133.613.990,00 | | 108.177.451.880,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik | Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani (%) | 100 | 100 | 100 | 93.660.000.000,00 | 100 | 94.919.160.170,00 | 100 | 98.787.574.220,00 | 100 | 103.133.613.990,00 | 100 | 108.177.451.880,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan |
| 3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | | 149.773.170.950,07 | | 157.720.926.467,67 | | 152.694.845.222,46 | | 156.540.274.987,31 | | 161.820.633.380,46 | |
| Meningkatnya produktivitas hasil hutan | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase) | 0,93 | 0,88 | 0,86 | 149.773.170.950,07 | 0,83 | 157.720.926.467,67 | 0,80 | 152.694.845.222,46 | 0,77 | 156.540.274.987,31 | 0,75 | 161.820.633.380,46 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan |
| | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%) | 2,00 | 2,07 | 2,36 | | 2,67 | | 2,81 | | 2,95 | | 3,00 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan |
| 3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | | 2.200.000.000,00 | | 8.729.576.680,00 | | 9.620.442.700,00 | | 10.522.527.760,00 | | 11.541.003.560,00 | |
| Luas kawasan konservasi/Kawasan bernilai | Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha) | 58.113 | 58.113 | 58.113 | 2.200.000.000,00 | 58.113 | 8.729.576.680,00 | 58.113 | 9.620.442.700,00 | 58.113 | 10.522.527.760,00 | 58.113 | 11.541.003.560,00 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| konservasi tinggi yang dikelola | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kehutanan |
| 3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | | 40.860.000.000,00 | | 27.600.000.000,00 | | 39.446.000.000,00 | | 43.390.600.000,00 | | 47.193.366.260,00 | |
| Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | Luas akses kelola hutan oleh masyarakat (Ha) | 488.456 | 40.000 | 40.000 | 40.860.000.000,00 | 40.000 | 27.600.000.000,00 | 20.000 | 39.446.000.000,00 | 20.000 | 43.390.600.000,00 | 20.000 | 47.193.366.260,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan |
| | Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver(unit) (Unit) | 304 | 20 | 20 | | 20 | | 50 | | 50 | | 50 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan |
| 3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | | 2.800.000.000,00 | | 4.212.750.000,00 | | 4.582.150.000,00 | | 4.967.865.000,00 | | 5.401.626.500,00 | |
| Perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang tersusun | Pelaporan pengelolaan DAS Lintas Kab/Kota sesuai kewenangan Provinsi (Dokumen) | 1 | 2 | 1 | 2.800.000.000,00 | 1 | 4.212.750.000,00 | 1 | 4.582.150.000,00 | 1 | 4.967.865.000,00 | 1 | 5.401.626.500,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | 75.050.088.232,00 | | 76.059.057.720,93 | | 79.158.831.535,51 | | 82.641.328.527,06 | | 86.682.973.613,16 | |
| 3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 25.283.214.232,00 | | 25.623.120.451,21 | | 26.667.386.317,79 | | 27.840.585.704,68 | | 29.202.153.438,56 | |
| Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel | Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (poin) | 72,35 | 73 | 74 | 25.278.214.232,00 | 75 | 25.618.120.451,21 | 76 | 26.662.386.317,79 | 77 | 27.835.585.704,68 | 78 | 29.197.153.438,56 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | | 520.000.000,00 | | 526.990.853,00 | | 548.468.274,56 | | 572.597.472,52 | | 600.600.843,26 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian | Luas Zona Konservasi Air Tanah pada | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 520.000.000,00 | 2.000 | 526.990.853,00 | 2.000 | 548.468.274,56 | 1.000 | 572.597.472,52 | 1.000 | 600.600.843,26 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Meter) | | | | | | | | | | | | | Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | | 1.528.302.000,00 | | 1.548.848.412,73 | | 1.611.971.463,37 | | 1.682.888.197,02 | | 1.765.191.288,38 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara | Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar (%) | 7 | 8 | 9 | 1.528.302.000,00 | 10 | 1.548.848.412,73 | 11 | 1.611.971.463,37 | 12 | 1.682.888.197,02 | 13 | 1.765.191.288,38 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | | 26.193.572.000,00 | | 26.545.717.021,76 | | 27.627.583.152,89 | | 28.843.025.237,46 | | 30.253.618.136,88 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 15 | 17 | 20,25 | 26.193.572.000,00 | 23,5 | 26.545.717.021,76 | 26,75 | 27.627.583.152,89 | 30,00 | 28.843.025.237,46 | 33,25 | 30.253.618.136,88 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | | 21.525.000.000,00 | | 21.814.380.982,23 | | 22.703.422.326,90 | | 23.702.231.915,38 | | 24.861.409.906,08 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan | Rasio Elektrifikasi (%) | 98,10 | 98,23 | 99 | 21.525.000.000,00 | 99,20 | 21.814.380.982,23 | 100 | 22.703.422.326,90 | 100 | 23.702.231.915,38 | 100 | 24.861.409.906,08 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 122.406.979.134,00 | | 127.664.866.405,86 | | 132.362.441.456,05 | | 137.613.898.513,28 | | 143.799.650.607,33 | |
| 3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 18.646.300.877,00 | | 21.022.922.250,00 | | 21.252.622.560,00 | | 22.695.031.000,00 | | 23.312.112.000,00 | |
| Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP (Angka) | 75,95 | 79,05 | 79,25 | 18.646.300.877,00 | 79,50 | 21.022.922.250,00 | 79,75 | 21.252.622.560,00 | 80,00 | 22.695.031.000,00 | 80,30 | 23.312.112.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | 50.000.000,00 | | 52.500.000,00 | | 90.000.000,00 | | 107.750.000,00 | | 121.250.000,00 | |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) | 0 | 100 | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 52.500.000,00 | 100 | 90.000.000,00 | 100 | 107.750.000,00 | 100 | 121.250.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | 85.000.000,00 | | 89.250.000,00 | | 110.000.000,00 | | 120.000.000,00 | | 175.000.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 0 | 0 | 2 | 85.000.000,00 | 2 | 89.250.000,00 | 2 | 110.000.000,00 | 2 | 120.000.000,00 | 2 | 175.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | 97.808.974.257,00 | | 101.389.316.155,86 | | 105.462.538.896,05 | | 108.823.037.513,28 | | 113.838.038.607,33 | |
| Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 6,64 | 5,5 | 5 | 97.808.974.257,00 | 4,8 | 101.389.316.155,86 | 4,5 | 105.462.538.896,05 | 4 | 108.823.037.513,28 | 4 | 113.838.038.607,33 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | 2.024.960.000,00 | | 2.126.208.000,00 | | 2.269.750.000,00 | | 2.399.480.000,00 | | 2.610.900.000,00 | |
| Meningkatnya pelaku usaha yang | Nilai Ekspor Barang (Nilai) | 4.023,50 | 4.000 | 4.100 | 2.024.960.000,00 | 4.500 | 2.126.208.000,00 | 5.000 | 2.269.750.000,00 | 6.000 | 2.399.480.000,00 | 6.500 | 2.610.900.000,00 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| berorientasi ekspor | | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | 2.818.244.000,00 | | 1.962.500.000,00 | | 2.106.780.000,00 | | 2.241.600.000,00 | | 2.559.000.000,00 | |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 100 | 100 | 100 | 2.818.244.000,00 | 100 | 1.962.500.000,00 | 100 | 2.106.780.000,00 | 100 | 2.241.600.000,00 | 100 | 2.559.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | 973.500.000,00 | | 1.022.170.000,00 | | 1.070.750.000,00 | | 1.227.000.000,00 | | 1.183.350.000,00 | |
| Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) | 0 | 100 | 100 | 973.500.000,00 | 100 | 1.022.170.000,00 | 100 | 1.070.750.000,00 | 100 | 1.227.000.000,00 | 100 | 1.183.350.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 16.160.000.000,00 | | 12.765.000.000,00 | | 13.790.620.000,00 | | 14.968.990.000,00 | | 16.245.435.000,00 | |
| 3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN | | | | | 15.795.000.000,00 | | 12.334.250.000,00 | | 13.153.960.000,00 | | 14.235.000.000,00 | | 15.468.000.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri | persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP (%) | 170,96 | 100 | 100 | 15.795.000.000,00 | 100 | 12.334.250.000,00 | 100 | 13.153.960.000,00 | 100 | 14.235.000.000,00 | 100 | 15.468.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | 115.000.000,00 | | 120.750.000,00 | | 126.660.000,00 | | 135.240.000,00 | | 148.750.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 120.750.000,00 | 100 | 126.660.000,00 | 100 | 135.240.000,00 | 100 | 148.750.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | 250.000.000,00 | | 310.000.000,00 | | 510.000.000,00 | | 598.750.000,00 | | 628.685.000,00 | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Tersedianya informasi industri | 100 | 100 | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 310.000.000,00 | 100 | 510.000.000,00 | 100 | 598.750.000,00 | 100 | 628.685.000,00 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | secara lengkap dan terkini (%) | | | | | | | | | | | | | Bidang Perindustrian |
| 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | 571.000.000,00 | | 578.679.000,00 | | 602.265.000,00 | | 628.763.000,00 | | 659.515.000,00 | |
| 3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | 233.000.000,00 | | 236.133.000,00 | | 245.757.000,00 | | 256.569.000,00 | | 269.117.000,00 | |
| Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi | Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase) | 7 | 10 | 20 | 233.000.000,00 | 40 | 236.133.000,00 | 60 | 245.757.000,00 | 80 | 256.569.000,00 | 100 | 269.117.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi |
| 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | 70.000.000,00 | | 70.942.000,00 | | 73.834.000,00 | | 77.083.000,00 | | 80.853.000,00 | |
| Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase) | 7 | 10 | 20 | 70.000.000,00 | 40 | 70.942.000,00 | 60 | 73.834.000,00 | 80 | 77.083.000,00 | 100 | 80.853.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi |
| 3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | 268.000.000,00 | | 271.604.000,00 | | 282.674.000,00 | | 295.111.000,00 | | 309.545.000,00 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan | Persentase Transmigran yang | 7 | 10 | 20 | 268.000.000,00 | 40 | 271.604.000,00 | 60 | 282.674.000,00 | 80 | 295.111.000,00 | 100 | 309.545.000,00 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| dan Kapasitas Transmigran Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Dibina dan Diberdayakan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Transmigrasi |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 316.603.584.817,54 | | 320.859.986.970,98 | | 333.936.580.549,22 | | 348.627.716.237,22 | | 365.677.653.885,42 | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 196.344.693.925,54 | | 198.984.341.794,72 | | 207.093.914.417,51 | | 216.204.760.547,19 | | 226.778.439.886,97 | |
| Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Pembangunan | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 1.792.874.848,00 | 100 | 1.816.978.164,35 | 100 | 1.891.028.796,91 | 100 | 1.974.222.320,21 | 100 | 2.070.773.356,86 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 3.495.000.000,54 | 100 | 3.541.986.599,06 | 100 | 3.686.339.653,65 | 100 | 3.848.515.705,32 | 100 | 4.036.730.668,30 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Organisasi | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 1.591.000.000,00 | 100 | 1.612.389.321,38 | 100 | 1.678.101.970,83 | 100 | 1.751.928.036,12 | 100 | 1.837.607.580,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 1.861.759.780,00 | 100 | 1.886.789.181,80 | 100 | 1.963.684.950,36 | 100 | 2.050.074.893,21 | 100 | 2.150.335.565,03 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Perekonomian | Persentase Keterlaksanaan (%) | 90 | 90 | 90 | 740.000.000,00 | 92 | 749.948.521,57 | 96 | 780.512.544,57 | 98 | 814.850.249,36 | 100 | 854.701.200,03 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Umum | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 177.099.743.494,00 | 100 | 179.480.663.248,95 | 100 | 186.795.366.807,40 | 100 | 195.013.202.901,27 | 100 | 204.550.490.929,90 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan | 100 | 100 | 100 | 1.970.000.000,00 | 100 | 1.996.484.577,70 | 100 | 2.077.850.963,26 | 100 | 2.169.263.501,66 | 100 | 2.275.353.194,65 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Pimpinan | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 6.631.585.803,00 | 100 | 6.720.740.498,17 | 100 | 6.994.643.121,14 | 100 | 7.302.363.980,00 | 100 | 7.659.492.356,60 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Hukum | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 1.162.730.000,00 | 100 | 1.178.361.681,74 | 100 | 1.226.385.609,39 | 100 | 1.280.338.960,04 | 100 | 1.342.955.035,55 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | 2.191.800.000,00 | | 2.221.266.445,38 | | 2.311.793.777,29 | | 2.413.498.346,67 | | 2.531.532.554,34 | |
| Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik | indeks kepuasan masyarakat (Indeks) | 84,69 | 84,75 | 84,85 | 2.191.800.000,00 | 84,95 | 2.221.266.445,38 | 85,00 | 2.311.793.777,29 | 85,05 | 2.413.498.346,67 | 85,10 | 2.531.532.554,34 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN | | | | | 3.331.000.000,00 | | 3.375.781.791,03 | | 3.513.361.197,25 | | 3.667.927.271,09 | | 3.847.310.401,73 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama | Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase) | 80 | 80 | 80 | 3.331.000.000,00 | 85 | 3.375.781.791,03 | 85 | 3.513.361.197,25 | 90 | 3.667.927.271,09 | 90 | 3.847.310.401,73 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | 105.373.698.192,00 | | 106.790.336.718,56 | | 111.142.558.522,64 | | 116.032.140.874,73 | | 121.706.792.291,33 | |
| Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) | 92 | 92 | 92 | 105.373.698.192,00 | 94 | 106.790.336.718,56 | 94 | 111.142.558.522,64 | 96 | 116.032.140.874,73 | 96 | 121.706.792.291,33 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | 2.904.438.700,00 | | 2.943.485.823,06 | | 3.063.447.081,47 | | 3.198.219.728,29 | | 3.354.631.408,49 | |
| Mewujudkan Produk Hukum Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang Implementatif dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, | Persentase terwujudnya Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang Implementatif dan sesuai dengan Peraturan Perundang- | 100 | 100 | 100 | 2.904.438.700,00 | 100 | 2.943.485.823,06 | 100 | 3.063.447.081,47 | 100 | 3.198.219.728,29 | 100 | 3.354.631.408,49 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tersedianya Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi dan Non Litigasi, Layanan Hukum, dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Bagi Perangkat Daerah dan Aparatur | Undangan, Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigas, layanan hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | 2.465.000.000,00 | | 2.498.139.332,00 | | 2.599.950.570,77 | | 2.714.332.249,54 | | 2.847.078.997,37 | |
| Jumlah Dokumen Perekonomian dan Pembangunan | Tingkat Inflasi (%) | 3,70 | 3,70 | 3,65 | 2.465.000.000,00 | 3,60 | 2.498.139.332,00 | 3,55 | 2.599.950.570,77 | 3,50 | 2.714.332.249,54 | 3,45 | 2.847.078.997,37 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| | Return on Asset (ROA) BUMD (%) | 2,30 | 2,30 | 2,32 | | 2,34 | | 2,41 | | 2,43 | | 2,45 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| | Inklusi Keuangan ((%)) | 87,74 | 87,74 | 88,45 | | 89,17 | | 89,89 | | 90,62 | | 91,02 | | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | 2.628.045.000,00 | | 2.663.376.300,51 | | 2.771.921.743,51 | | 2.893.869.058,90 | | 3.035.396.236,78 | |
| Terwujudnya Peningkatan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2.628.045.000,00 | 0,7 | 2.663.376.300,51 | 0,8 | 2.771.921.743,51 | 0,9 | 2.893.869.058,90 | 1 | 3.035.396.236,78 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%) | 76 | 76 | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%) | 46 | 46 | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 50 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | 1.364.909.000,00 | | 1.383.258.765,72 | | 1.439.633.238,78 | | 1.502.968.160,81 | | 1.576.472.108,41 | |
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase) | 95 | 95 | 95 | 1.364.909.000,00 | 95 | 1.383.258.765,72 | 96 | 1.439.633.238,78 | 97 | 1.502.968.160,81 | 98 | 1.576.472.108,41 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 114.594.503.322,18 | | 116.135.105.874,09 | | 120.868.172.137,72 | | 126.185.621.090,39 | | 132.356.837.169,64 | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 67.733.301.293,18 | | 67.733.301.293,18 | | 67.833.301.293,06 | | 69.940.791.525,66 | | 73.174.344.467,07 | |
| Terlaksananya urusan pemerintah daerah provinsi | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Penunjang Urusan | 24 | 24 | 24 | 67.733.301.293,18 | 24 | 67.733.301.293,18 | 24 | 67.833.301.293,06 | 24 | 69.940.791.525,66 | 24 | 73.174.344.467,07 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Pemerintah Daerah Provinsi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 46.861.202.029,00 | | 48.401.804.580,91 | | 53.034.870.844,66 | | 56.244.829.564,73 | | 59.182.492.702,57 | |
| Terlaksanya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase Keterlaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%) | 100 | 100 | 100 | 46.861.202.029,00 | 100 | 48.401.804.580,91 | 100 | 53.034.870.844,66 | 100 | 56.244.829.564,73 | 100 | 59.182.492.702,57 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | | 50.776.309.370,37 | | 50.414.953.143,13 | | 51.647.150.084,77 | | 53.114.621.040,47 | | 55.726.150.162,25 | |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 40.128.585.982,37 | | 39.037.281.424,13 | | 39.197.150.084,77 | | 39.514.621.040,47 | | 40.951.150.162,25 | |
| Meningkatnya ketercapaian | Persentase tingkat ketercapaian | 71,42 | 73,92 | 76,52 | 155.000.000,00 | 78,92 | 175.000.000,00 | 81,42 | 200.000.001,00 | 83,92 | 285.000.000,00 | 86,42 | 360.000.000,00 | Dinas/Badan yang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| kinerja perangkat daerah | kinerja perangkat daerah (%) | | | | | | | | | | | | | menangani Bidang Perencanaan |
| Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | Persentase pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 39.973.585.982,37 | 100 | 38.862.281.424,13 | 100 | 38.997.150.083,77 | 100 | 39.229.621.040,47 | 100 | 40.591.150.162,25 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 4.650.000.000,00 | | 5.225.000.000,00 | | 5.550.000.000,00 | | 5.975.000.000,00 | | 6.525.000.000,00 | |
| Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 4.650.000.000,00 | 100 | 5.225.000.000,00 | 100 | 5.550.000.000,00 | 100 | 5.975.000.000,00 | 100 | 6.525.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 5.997.723.388,00 | | 6.152.671.719,00 | | 6.900.000.000,00 | | 7.625.000.000,00 | | 8.250.000.000,00 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi, SDA dan kerja sama serta bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 5.997.723.388,00 | 100 | 6.152.671.719,00 | 100 | 6.900.000.000,00 | 100 | 7.625.000.000,00 | 100 | 8.250.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | | 1.610.701.619.461,01 | | 1.631.355.808.391,26 | | 1.697.882.188.582,51 | | 1.772.622.454.399,53 | | 1.859.362.982.456,55 | |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG | | | | | 201.655.080.146,27 | | 202.950.393.513,40 | | 208.931.451.345,33 | | 215.688.269.789,46 | | 223.590.950.047,63 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 77,35 | 77,55 | 77,75 | 142.165.268.762,97 | 77,95 | 144.076.531.253,77 | 78,15 | 149.948.345.502,55 | 78,35 | 156.545.141.488,15 | 78,55 | 164.201.115.963,96 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 59.489.811.383,30 | 1 | 58.873.862.259,63 | 1 | 58.983.105.842,78 | 1 | 59.143.128.301,31 | 1 | 59.389.834.083,67 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 1.379.431.240.850,04 | | 1.398.391.969.878,48 | | 1.457.714.099.449,44 | | 1.524.323.328.746,95 | | 1.601.566.314.656,45 | |
| Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran | Persentase Capaian Realisasi Keuangan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan/ Subkegiatan (%) | 100 | 100 | 100 | 1.373.232.159.780,04 | 100 | 1.392.109.548.684,48 | 100 | 1.451.175.639.260,32 | 100 | 1.517.497.216.914,97 | 100 | 1.594.406.365.987,84 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Perangkat Daerah (Bulan) | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya otonomi daerah yang efektif dan akuntabel melalui pengelolaan APBD yang baik | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%) | 6,55 | 6,56 | 6,55 | 6.199.081.070,00 | 6,56 | 6.282.421.194,00 | 6,56 | 6.538.460.189,12 | 6,56 | 6.826.111.831,98 | 6,56 | 7.159.948.668,61 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | 3.207.955.441,70 | | 3.251.083.028,08 | | 3.383.580.357,66 | | 3.532.436.880,53 | | 3.705.193.737,36 | |
| Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Baik | Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini) | 4 | 4 | 4 | 2.320.246.683,70 | 4 | 2.351.439.959,63 | 4 | 2.447.272.490,71 | 4 | 2.554.937.282,14 | 4 | 2.679.888.682,31 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| Terwujudnya pengelolaan BMD yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat optimal bagi daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 887.708.758,00 | 1,08 | 899.643.068,45 | 1,09 | 936.307.866,95 | 1,10 | 977.499.598,39 | 1,11 | 1.025.305.055,05 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | 26.407.343.023,00 | | 26.762.361.971,30 | | 27.853.057.430,08 | | 29.078.418.982,59 | | 30.500.524.015,11 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat | Rasio PAD (%) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 26.407.343.023,00 | 1:1 | 26.762.361.971,30 | 1:1 | 27.853.057.430,08 | 1:1 | 29.078.418.982,59 | 1:1 | 30.500.524.015,11 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | 18.736.639.736,00 | | 18.988.534.147,64 | | 19.762.408.590,63 | | 20.631.831.839,15 | | 21.640.849.279,41 | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 14.665.000.000,00 | | 14.977.630.426,64 | | 15.177.630.426,64 | | 16.027.630.426,64 | | 16.517.647.866,90 | |
| Tercapainya Pelayan Unit Kerja Internal Dengan Baik | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 14.665.000.000,00 | 100 | 14.977.630.426,64 | 100 | 15.177.630.426,64 | 100 | 16.027.630.426,64 | 100 | 16.517.647.866,90 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | 4.071.639.736,00 | | 4.010.903.721,00 | | 4.584.778.163,99 | | 4.604.201.412,51 | | 5.123.201.412,51 | |
| Terlaksananya Manajemen ASN Dengan Baik | Persentase Kualitas Manajemen ASN Provinsi Kalimantan Tengah (%) | 100 | 100 | 100 | 4.071.639.736,00 | 100 | 4.010.903.721,00 | 100 | 4.584.778.163,99 | 100 | 4.604.201.412,51 | 100 | 5.123.201.412,51 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 25.613.489.905,12 | | 25.957.836.333,33 | | 27.015.743.488,11 | | 28.204.268.427,11 | | 29.583.622.376,61 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 18.305.419.905,12 | | 19.818.321.954,83 | | 20.626.014.257,21 | | 21.533.430.791,82 | | 22.606.541.702,61 | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam mendukung pencapaian urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%) | 94,10 | 90 | 92 | 18.305.419.905,12 | 94 | 19.818.321.954,83 | 96 | 20.626.014.257,21 | 98 | 21.533.430.791,82 | 100 | 22.606.541.702,61 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 7.308.070.000,00 | | 6.139.514.378,50 | | 6.389.729.230,90 | | 6.670.837.635,29 | | 6.977.080.674,00 | |
| Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan | Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Dokumen) | 7 | 7 | 7 | 7.308.070.000,00 | 7 | 6.139.514.378,50 | 7 | 6.389.729.230,90 | 7 | 6.670.837.635,29 | 7 | 6.977.080.674,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 12.103.386.035,00 | | 13.310.093.622,00 | | 14.675.000.000,00 | | 16.125.291.771,00 | | 16.900.000.000,00 | |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | 733.386.035,00 | | 806.504.622,00 | | 900.000.000,00 | | 989.321.771,00 | | 1.025.000.000,00 | |
| Tersedianya hasil kelitbangan yang diimplementasikan | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase) | 0 | 100 | 100 | 733.386.035,00 | 100 | 806.504.622,00 | 100 | 900.000.000,00 | 100 | 989.321.771,00 | 100 | 1.025.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | 11.370.000.000,00 | | 12.503.589.000,00 | | 13.775.000.000,00 | | 15.135.970.000,00 | | 15.875.000.000,00 | |
| Tersedianya hasil riset dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan pengambilan kebijakan | Jumlah Inovasi (Produk) | 37 | 40 | 45 | 11.370.000.000,00 | 50 | 12.503.589.000,00 | 55 | 13.775.000.000,00 | 60 | 15.135.970.000,00 | 65 | 15.875.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase) | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |
| 5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | | 11.807.670.193,82 | | 11.966.411.898,75 | | 12.454.100.957,35 | | 13.002.004.056,41 | | 13.637.878.221,80 | |
| 5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 11.012.670.193,82 | | 11.160.723.960,03 | | 11.615.577.345,28 | | 12.126.590.612,85 | | 12.719.651.932,59 | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam mendukung pencapaian urusan Pemerintahan Daerah | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) | 71 | 71,8 | 73,50 | 11.012.670.193,82 | 76,68 | 11.160.723.960,03 | 78,5 | 11.615.577.345,28 | 81 | 12.126.590.612,85 | 83,5 | 12.719.651.932,59 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung |
| 5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | | 795.000.000,00 | | 805.687.938,72 | | 838.523.612,07 | | 875.413.443,56 | | 918.226.289,21 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terwujudnya kelancaran koordinasi, pelayanan, dan representasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pusat melalui penguatan fungsi penghubung, fasilitasi tamu daerah, serta promosi potensi daerah secara efektif dan efisien | Persentase keterlaksanaan (%) | 100 | 100 | 100 | 795.000.000,00 | 100 | 805.687.938,72 | 100 | 838.523.612,07 | 100 | 875.413.443,56 | 100 | 918.226.289,21 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | 44.262.459.557,53 | | 44.857.521.765,32 | | 46.685.682.348,98 | | 48.739.562.442,64 | | 51.123.212.567,30 | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 33.984.962.043,53 | | 33.274.201.765,32 | | 34.102.882.348,98 | | 34.556.242.442,64 | | 34.310.412.567,30 | |
| Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel dalam mendukung | Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (poin) | 76,65 | 76,85 | 77,50 | 33.984.962.043,53 | 79,00 | 33.274.201.765,32 | 79,50 | 34.102.882.348,98 | 80,00 | 34.556.242.442,64 | 80,25 | 34.310.412.567,30 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| pencapaian urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | 6.685.400.000,00 | | 8.957.800.000,00 | | 9.327.800.000,00 | | 10.577.800.000,00 | | 13.122.800.000,00 | |
| Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase) | 76,99 | 77,00 | 77,15 | 6.685.400.000,00 | 77,50 | 8.957.800.000,00 | 78,00 | 9.327.800.000,00 | 78,50 | 10.577.800.000,00 | 79,00 | 13.122.800.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | 3.592.097.514,00 | | 2.625.520.000,00 | | 3.255.000.000,00 | | 3.605.520.000,00 | | 3.690.000.000,00 | |
| Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) | 3,031 | 3,04 | 3,05 | 3.592.097.514,00 | 3,10 | 2.625.520.000,00 | 3,18 | 3.255.000.000,00 | 3,20 | 3.605.520.000,00 | 3,25 | 3.690.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| | Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai) | 3,02 | 3,02 | 3,02 | | 3,08 | | 3,12 | | 3,12 | | 3,22 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | | | | | | | | | | | | | | Inspektorat Daerah |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 32.566.509.985,00 | | 33.004.332.454,10 | | 34.349.418.346,23 | | 35.860.579.435,04 | | 37.614.371.844,25 | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 14.582.703.295,00 | | 14.778.752.400,83 | | 15.381.057.912,86 | | 16.057.728.940,83 | | 16.843.045.953,81 | |
| Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas perangkat daerah | Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (poin) | 68,20 | 68,40 | 68,60 | 14.582.703.295,00 | 68,80 | 14.778.752.400,83 | 69,00 | 15.381.057.912,86 | 69,20 | 16.057.728.940,83 | 69,40 | 16.843.045.953,81 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 3.811.270.000,00 | | 3.862.508.516,00 | | 4.019.924.386,15 | | 4.196.776.094,41 | | 4.402.023.030,56 | |
| Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan partisipasi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | 80,00 | 80,00 | 82,00 | 3.811.270.000,00 | 84,00 | 3.862.508.516,00 | 86,00 | 4.019.924.386,15 | 88,00 | 4.196.776.094,41 | 90,00 | 4.402.023.030,56 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| serta memperkuat karakter kebangsaan yang toleran, inklusif, dan berintegritas | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 9.291.372.685,00 | | 9.416.285.416,88 | | 9.800.044.509,37 | | 10.231.185.607,07 | | 10.731.550.518,55 | |
| Meningkatnya kualitas partisipasi politik masyarakat yang cerdas, beretika, dan demokratis | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | 70 | 72 | 75 | 9.291.372.685,00 | 78 | 9.416.285.416,88 | 80 | 9.800.044.509,37 | 82 | 10.231.185.607,07 | 85 | 10.731.550.518,55 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | 913.514.000,00 | | 925.795.234,77 | | 963.525.860,33 | | 1.005.915.014,44 | | 1.055.110.151,40 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya kapasitas, legalitas, dan partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola kelembagaan masyarakat yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi. | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) | 65 | 65 | 65,5 | 913.514.000,00 | 66 | 925.795.234,77 | 66,5 | 963.525.860,33 | 67 | 1.005.915.014,44 | 67,5 | 1.055.110.151,40 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 1.917.060.000,00 | | 1.942.832.855,08 | | 2.022.012.673,91 | | 2.110.968.674,37 | | 2.214.207.408,81 | |
| Meningkatnya ketahanan dan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi | 70,00 | 70,00 | 72,00 | 1.917.060.000,00 | 74,00 | 1.942.832.855,08 | 76,00 | 2.022.012.673,91 | 78,00 | 2.110.968.674,37 | 80,00 | 2.214.207.408,81 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| | Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 2.050.590.005,00 | | 2.078.158.030,54 | | 2.162.853.003,61 | | 2.258.005.103,92 | | 2.368.434.781,12 | |
| Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan deteksi dini pemerintah daerah serta efektivitas penanganan dan pemulihan konflik sosial secara terpadu | Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai) | 65,00 | 65,00 | 68,00 | 2.050.590.005,00 | 69,00 | 2.078.158.030,54 | 70,00 | 2.162.853.003,61 | 71,00 | 2.258.005.103,92 | 72,00 | 2.368.434.781,12 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | **7.377.076.192.922** | | **8.112.564.557.901** | | **8.921.496.979.625** | | **9.803.280.139.216** | | **10.783.608.153.136** | |

# Tabel 4.1.1.1 Rekap Pagu Program Perangkat Daerah

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1.028.356.960.512,000 | 1.031.370.937.133,090 | 1.040.937.313.496,290 | 1.092.744.606.450,360 | 1.125.000.000.000,000 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 429.254.039.488,000 | 431.269.072.425,000 | 478.969.072.425,000 | 491.569.072.425,000 | 534.267.357.847,990 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 4.000.000.000,000 | 4.692.453.473,890 | 5.205.896.684,970 | 5.773.061.052,680 | 6.403.076.315,500 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 10.000.000.000,000 | 1.452.725.205,680 | 1.611.680.834,870 | 1.787.267.865,700 | 1.982.312.751,560 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 5.000.000.000,000 | 27.273.605.050,530 | 30.257.853.574,840 | 33.554.341.659,360 | 37.216.133.417,040 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | 300.000.000,000 | 707.721.501,580 | 785.159.626,920 | 870.700.042,020 | 965.719.705,040 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 561.611.927.143,880 | 570.938.604.930,740 | 597.046.097.399,950 | 624.823.148.159,280 | 654.300.041.288,470 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 125.105.158.192,360 | 125.473.435.082,280 | 128.995.533.418,860 | 134.235.379.026,780 | 141.766.041.291,140 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 10.922.938.000,000 | 10.347.019.569,330 | 9.510.868.923,270 | 8.842.976.835,770 | 9.379.765.703,780 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 0,000 | 40.000.000,000 | 44.000.000,000 | 48.400.000,000 | 53.240.000,000 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 0,000 | 220.000.000,000 | 237.000.000,000 | 255.700.000,000 | 276.270.000,000 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 81.719.596.274,000 | 82.818.230.282,710 | 86.193.473.012,410 | 89.985.450.542,060 | 94.386.266.217,300 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 25.931.529.500,000 | 26.280.151.636,000 | 27.351.194.695,510 | 28.554.477.404,400 | 29.950.958.624,440 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 57.900.000.000,000 | 134.585.356.303,850 | 140.070.359.350,140 | 146.232.585.289,810 | 153.384.215.355,520 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 8.000.000.000,000 | 9.120.995.532,640 | 9.492.720.136,680 | 9.910.340.870,540 | 10.395.014.594,880 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 19.500.000.000,000 | 19.762.156.987,390 | 20.567.560.296,140 | 21.472.405.219,510 | 22.522.531.622,230 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 4.400.000.000,000 | 9.526.373.111,870 | 9.914.618.809,420 | 10.350.800.464,790 | 10.857.015.243,540 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 45.000.000.000,000 | 4.256.464.581,890 | 4.429.927.063,800 | 4.624.825.738,590 | 4.851.006.810,930 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 83.500.000.000,000 | 86.649.457.560,090 | 90.180.841.298,470 | 94.148.238.270,170 | 98.752.638.651,330 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 273.193.803.362,410 | 234.200.616.454,390 | 243.745.422.293,400 | 254.468.707.154,660 | 266.913.717.637,540 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 678.479.772.662,730 | 687.601.219.493,760 | 715.624.288.920,710 | 747.107.313.428,540 | 783.645.237.684,200 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 3.622.850.000,000 | 3.671.555.407,270 | 3.821.198.016,350 | 3.989.297.603,540 | 4.184.397.625,010 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.078.748.790,000 | 2.106.695.380,790 | 2.192.553.388,660 | 2.289.012.121,460 | 2.400.958.223,460 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 17.606.198.543,000 | 20.139.700.000,000 | 21.160.000.000,000 | 23.066.500.000,000 | 25.367.150.000,000 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 5.475.000.000,000 | 6.016.850.000,000 | 7.050.000.000,000 | 7.730.000.000,000 | 8.503.000.000,000 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 66.536.800.000,000 | 89.668.450.000,000 | 97.835.000.000,000 | 105.417.500.000,000 | 112.057.750.000,000 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 189.550.000.000,000 | 166.965.612.343,250 | 168.185.902.831,590 | 170.888.224.441,220 | 176.136.343.382,180 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 52.554.820.564,910 | 55.895.654.728,080 | 59.001.217.860,120 | 61.805.016.818,210 | 65.398.432.896,670 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.400.000.000,000 | 2.400.000.000,000 | 2.600.000.000,000 | 2.800.000.000,000 | 3.000.000.000,000 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 22.125.000.000,000 | 19.828.489.310,690 | 19.681.315.127,690 | 20.232.038.799,670 | 20.571.885.825,510 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 600.000.000,000 | 600.000.000,000 | 650.000.000,000 | 700.000.000,000 | 750.000.000,000 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 34.302.900.392,000 | 34.764.066.803,560 | 36.180.870.366,410 | 37.772.603.970,340 | 39.619.905.580,160 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.680.000.000,000 | 2.202.585.832,760 | 2.271.974.425,510 | 2.349.930.295,830 | 2.440.402.724,380 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 200.000.000,000 | 202.688.789,610 | 210.949.336,370 | 220.229.797,120 | 231.000.324,330 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 8.720.850.000,000 | 9.338.092.654,540 | 9.698.287.600,440 | 10.102.955.131,220 | 10.573.095.892,190 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 9.148.346.877,000 | 9.271.336.777,350 | 9.649.188.512,960 | 10.073.692.883,670 | 10.566.355.478,380 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 2.580.000.000,000 | 2.614.685.386,020 | 2.721.246.439,190 | 2.840.964.382,890 | 2.979.404.183,860 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 640.000.000,000 | 648.604.126,770 | 675.037.876,390 | 704.735.350,790 | 739.201.037,860 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 28.012.090.495,390 | 28.388.671.845,620 | 29.545.635.415,420 | 30.845.446.316,250 | 32.353.954.809,840 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 200.000.000,000 | 202.690.000,000 | 210.953.000,000 | 220.236.000,000 | 231.009.000,000 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 2.460.000.000,000 | 2.493.073.000,000 | 2.594.680.000,000 | 2.708.832.000,000 | 2.841.311.000,000 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 885.000.000,000 | 896.901.000,000 | 933.456.000,000 | 974.524.000,000 | 1.022.187.000,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 357.000.000,000 | 361.802.000,000 | 376.549.000,000 | 393.118.000,000 | 412.348.000,000 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 375.000.000,000 | 380.043.000,000 | 395.533.000,000 | 412.936.000,000 | 433.133.000,000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16.677.131.562,100 | 15.094.483.249,480 | 15.709.280.599,740 | 16.400.337.626,380 | 17.202.463.179,860 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1.752.700.000,000 | 1.972.500.000,000 | 2.052.978.000,000 | 2.143.309.032,000 | 2.248.116.839,000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 1.563.940.000,000 | 2.065.000.000,000 | 2.149.252.000,000 | 2.243.819.088,000 | 2.353.541.835,000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 257.059.094,000 | 350.000.000,000 | 364.280.000,000 | 380.308.320,000 | 398.905.396,000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 189.278.449,000 | 270.000.000,000 | 281.016.000,000 | 293.380.704,000 | 307.727.019,000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 390.000.000,000 | 560.000.000,000 | 582.848.000,000 | 608.493.312,000 | 638.248.634,000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 499.800.000,000 | 705.000.000,000 | 733.764.000,000 | 766.049.616,000 | 803.509.439,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 9.909.784.825,510 | 10.043.011.458,100 | 10.452.312.662,590 | 10.912.149.508,280 | 11.445.817.543,700 |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 15.000.000,000 | 15.201.659,220 | 15.821.200,230 | 16.517.234,780 | 17.325.024,320 |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1.252.000.000,000 | 1.268.831.822,990 | 1.320.542.845,680 | 1.378.638.529,990 | 1.446.062.030,310 |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 195.000.000,000 | 197.621.569,870 | 205.675.602,960 | 214.724.052,200 | 225.225.316,220 |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 108.000.000,000 | 109.451.946,390 | 113.912.641,640 | 118.924.090,450 | 124.740.175,140 |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 300.000.000,000 | 325.000.000,000 | 350.000.000,000 | 375.000.000,000 | 400.000.000,000 |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 900.000.000,000 | 1.000.000.000,000 | 1.100.000.000,000 | 1.200.000.000,000 | 1.300.000.000,000 |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 250.000.000,000 | 275.000.000,000 | 300.000.000,000 | 325.000.000,000 | 350.000.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 42.878.923.184,000 | 44.057.900.664,000 | 45.790.323.211,000 | 47.591.869.370,000 | 49.700.467.303,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.02 | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | 445.000.000,000 | 708.050.000,000 | 720.372.000,000 | 1.133.200.000,000 | 348.100.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 7.181.350.058,000 | 7.253.250.000,000 | 7.543.252.000,000 | 7.844.759.000,000 | 8.197.900.000,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 434.204.000,000 | 1.988.500.000,000 | 2.068.000.000,000 | 2.150.811.000,000 | 2.247.350.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 2.389.000.000,000 | 1.706.000.000,000 | 1.774.250.000,000 | 1.845.091.000,000 | 1.928.250.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 1.281.572.804,000 | 1.294.400.000,000 | 1.346.200.000,000 | 1.400.012.000,000 | 1.462.950.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | 149.749.000,000 | 455.500.000,000 | 491.200.000,000 | 529.979.000,000 | 551.700.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 5.051.758.000,000 | 5.102.000.000,000 | 5.306.100.000,000 | 5.518.620.000,000 | 5.766.600.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 482.000.000,000 | 486.800.000,000 | 506.300.000,000 | 526.544.000,000 | 550.300.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 1.328.000.000,000 | 1.341.300.000,000 | 1.394.900.000,000 | 1.450.729.000,000 | 1.515.900.000,000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 49.323.800.000,000 | 48.043.200.000,000 | 50.078.350.000,000 | 52.175.753.000,000 | 55.872.550.000,000 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8.384.661.366,110 | 8.497.130.957,130 | 8.843.430.067,700 | 9.232.486.070,780 | 9.684.008.724,460 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 351.000.000,000 | 355.718.825,770 | 370.216.085,330 | 386.503.293,950 | 405.405.569,200 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 278.750.000,000 | 282.497.500,520 | 294.010.637,570 | 306.945.279,740 | 321.956.702,040 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 450.000.000,000 | 456.049.776,630 | 474.636.006,830 | 495.517.043,530 | 519.750.729,740 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 150.000.000,000 | 152.016.592,210 | 158.212.002,280 | 165.172.347,840 | 173.250.243,250 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 17.050.191.186,550 | 19.431.213.112,590 | 19.924.987.257,230 | 19.723.256.151,590 | 20.933.761.927,120 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | 200.000.000,000 | 270.000.000,000 | 375.000.000,000 | 350.000.000,000 | 500.000.000,000 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 1.400.000.000,000 | 1.250.000.000,000 | 1.270.000.000,000 | 1.300.000.000,000 | 1.350.000.000,000 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 9.672.821.669,000 | 8.590.000.000,000 | 9.355.000.000,000 | 10.280.000.000,000 | 10.570.000.000,000 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, | 6.875.000.000,000 | 6.130.000.000,000 | 6.200.000.000,000 | 7.105.000.000,000 | 7.300.000.000,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 229.000.000,000 | 370.000.000,000 | 385.096.000,000 | 402.040.224,000 | 421.699.989,000 |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 631.500.000,000 | 820.000.000,000 | 853.456.000,000 | 891.008.064,000 | 934.578.355,000 |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 911.000.000,000 | 1.205.000.000,000 | 1.254.164.000,000 | 1.309.347.216,000 | 1.373.374.293,000 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 20.040.026.571,000 | 20.317.104.633,000 | 21.368.061.587,000 | 22.469.061.587,000 | 22.638.061.587,000 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 20.112.575.397,280 | 20.412.277.688,260 | 19.583.315.481,920 | 18.846.088.393,660 | 20.266.006.657,000 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 2.700.000.000,000 | 2.700.000.000,000 | 3.250.000.000,000 | 5.777.006.657,000 | 6.498.506.602,500 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 50.000.000,000 | 50.000.000,000 | 1.050.000.000,000 | 150.000.000,000 | 150.000.000,000 |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 24.339.201.681,200 | 15.206.475.731,000 | 16.815.781.737,000 | 17.555.781.737,000 | 21.505.087.794,000 |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 13.919.625.235,000 | 19.938.223.580,130 | 20.117.633.365,700 | 21.547.612.386,450 | 20.451.749.725,930 |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 15.683.450.951,000 | 19.561.570.559,000 | 19.965.558.958,000 | 20.259.558.958,000 | 20.306.558.957,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16.648.721.003,000 | 16.872.545.543,620 | 17.560.183.235,020 | 18.332.722.244,260 | 19.229.299.756,910 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 336.140.000,000 | 340.659.048,700 | 354.542.549,640 | 370.140.220,030 | 388.242.245,110 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 439.353.600,000 | 445.260.246,980 | 463.406.751,760 | 483.793.770,970 | 507.454.120,480 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 1.008.560.000,000 | 1.022.119.028,270 | 1.063.775.313,450 | 1.110.574.820,930 | 1.164.888.435,530 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 3.473.136.180,000 | 3.519.828.842,450 | 3.663.278.861,480 | 3.824.440.381,510 | 4.011.477.920,120 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 14.565.871.135,000 | 14.761.693.950,150 | 15.363.304.247,950 | 16.039.194.224,920 | 16.823.604.781,710 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.17.07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 9.177.045.489,000 | 9.300.421.212,000 | 9.679.458.278,740 | 10.105.294.331,160 | 10.599.502.421,780 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 1.614.542.000,000 | 1.636.247.818,810 | 1.702.932.817,210 | 1.777.851.285,530 | 1.864.798.628,230 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 13.553.172.135,550 | 13.735.380.277,950 | 14.295.163.338,560 | 14.924.061.748,940 | 15.653.935.795,100 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 501.045.200,000 | 507.781.225,650 | 528.475.762,160 | 551.725.413,730 | 578.708.018,520 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 500.158.800,000 | 506.882.908,930 | 527.540.834,700 | 550.749.355,270 | 577.684.225,080 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 531.708.200,000 | 538.856.457,430 | 560.817.459,660 | 585.489.945,070 | 614.123.833,250 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 511.118.000,000 | 517.989.443,850 | 539.100.014,540 | 562.817.067,230 | 590.342.118,860 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 70.000.000,000 | 70.941.076,360 | 73.832.267,730 | 77.080.428,990 | 80.850.113,520 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 15.835.800.008,630 | 16.048.695.681,620 | 16.702.757.513,600 | 17.437.575.115,920 | 18.290.374.690,140 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 3.562.500.000,000 | 3.610.394.065,000 | 3.757.535.054,100 | 3.922.843.261,260 | 4.114.693.277,140 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 11.725.000.000,000 | 11.882.630.291,130 | 12.366.904.844,730 | 12.910.971.856,350 | 13.542.394.013,880 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 1.500.000.000,000 | 1.520.165.922,110 | 1.582.120.022,780 | 1.651.723.478,420 | 1.732.502.432,480 |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 287.915.617,730 | 303.103.720,000 | 333.412.502,000 | 367.197.424,000 | 386.497.213,000 |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 364.000.000,000 | 318.781.397,000 | 350.657.864,000 | 386.190.271,000 | 406.488.318,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 23.145.360.853,900 | 23.145.360.853,000 | 23.145.360.853,000 | 23.145.360.853,000 | 23.145.360.853,000 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 5.002.750.000,000 | 26.000.000.000,000 | 27.000.000.000,000 | 28.000.000.000,000 | 29.000.000.000,000 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 250.000.000,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 242.000.000,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 235.000.000,000 | 5.000.000.000,000 | 5.000.000.000,000 | 5.000.000.000,000 | 5.000.000.000,000 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 4.788.650.000,000 | 3.000.000.000,000 | 3.000.000.000,000 | 3.000.000.000,000 | 3.000.000.000,000 |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18.373.019.945,200 | 18.626.747.845,290 | 19.406.255.163,750 | 20.282.006.168,170 | 20.298.368.642,200 |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.350.000.000,000 | 1.361.427.355,850 | 1.396.534.679,580 | 1.435.976.637,780 | 2.481.751.378,400 |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 277.436.000,000 | 281.165.835,180 | 292.624.700,430 | 305.498.369,970 | 320.439.029,900 |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 250.000.000,000 | 253.360.987,020 | 263.686.670,460 | 275.287.246,400 | 288.750.405,410 |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 152.200.000,000 | 154.246.168,900 | 160.532.444,980 | 167.594.875,610 | 175.791.246,820 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 26.200.000.000,000 | 28.800.000.000,000 | 31.660.000.000,000 | 34.806.000.000,000 | 36.863.000.000,000 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 2.270.209.000,000 | 2.780.209.000,000 | 3.593.209.000,000 | 2.300.209.000,000 | 2.310.209.000,000 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 15.207.902.780,600 | 13.264.283.000,000 | 12.291.283.000,000 | 12.712.283.000,000 | 13.833.283.000,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 7.808.350.000,000 | 7.110.751.065,060 | 6.657.931.355,050 | 6.940.587.312,080 | 6.724.608.937,720 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 820.000.000,000 | 881.000.000,000 | 934.000.000,000 | 949.793.749,000 | 848.000.000,000 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 1.084.200.000,000 | 1.272.200.000,000 | 1.177.200.000,000 | 1.082.200.000,000 | 1.087.200.000,000 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 49.450.000.000,000 | 27.872.390.571,870 | 31.082.144.224,640 | 34.705.494.748,850 | 39.129.196.256,030 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 16.420.000.000,000 | 14.800.000.000,000 | 14.800.000.000,000 | 14.800.000.000,000 | 14.800.000.000,000 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 0,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 | 500.000.000,000 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1.180.000.000,000 | 750.000.000,000 | 750.000.000,000 | 750.000.000,000 | 750.000.000,000 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 67.015.503.853,780 | 67.604.908.854,420 | 69.622.568.244,900 | 71.681.502.604,520 | 74.586.018.505,710 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 74.878.621.426,200 | 76.160.979.066,180 | 79.366.244.300,260 | 83.491.432.739,790 | 87.728.686.242,450 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 21.360.934.352,220 | 21.643.661.063,540 | 23.243.684.243,750 | 24.638.441.219,140 | 26.277.229.781,530 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1.250.000.000,000 | 1.266.804.935,090 | 1.318.433.352,320 | 1.376.436.232,020 | 1.443.752.021,070 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 1.170.000.000,000 | 1.181.427.355,860 | 1.216.534.679,580 | 1.255.976.637,770 | 1.301.751.378,410 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 150.000.000,000 | 200.000.000,000 | 200.000.000,000 | 230.000.000,000 | 280.000.000,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1.001.276.832,780 | 1.011.359.794,230 | 992.060.011,400 | 1.026.861.739,200 | 1.067.251.216,310 |
| 3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 93.660.000.000,000 | 94.919.160.170,000 | 98.787.574.220,000 | 103.133.613.990,000 | 108.177.451.880,000 |
| 3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 149.773.170.950,070 | 157.720.926.467,670 | 152.694.845.222,460 | 156.540.274.987,310 | 161.820.633.380,460 |
| 3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 2.200.000.000,000 | 8.729.576.680,000 | 9.620.442.700,000 | 10.522.527.760,000 | 11.541.003.560,000 |
| 3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 40.860.000.000,000 | 27.600.000.000,000 | 39.446.000.000,000 | 43.390.600.000,000 | 47.193.366.260,000 |
| 3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 3.28.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 2.800.000.000,000 | 4.212.750.000,000 | 4.582.150.000,000 | 4.967.865.000,000 | 5.401.626.500,000 |
| 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.29.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 25.283.214.232,000 | 25.623.120.451,210 | 26.667.386.317,790 | 27.840.585.704,680 | 29.202.153.438,560 |
| 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.29.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 520.000.000,000 | 526.990.853,000 | 548.468.274,560 | 572.597.472,520 | 600.600.843,260 |
| 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 1.528.302.000,000 | 1.548.848.412,730 | 1.611.971.463,370 | 1.682.888.197,020 | 1.765.191.288,380 |
| 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.29.05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 26.193.572.000,000 | 26.545.717.021,760 | 27.627.583.152,890 | 28.843.025.237,460 | 30.253.618.136,880 |
| 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.29.06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 21.525.000.000,000 | 21.814.380.982,230 | 22.703.422.326,900 | 23.702.231.915,380 | 24.861.409.906,080 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18.646.300.877,000 | 21.022.922.250,000 | 21.252.622.560,000 | 22.695.031.000,000 | 23.312.112.000,000 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 50.000.000,000 | 52.500.000,000 | 90.000.000,000 | 107.750.000,000 | 121.250.000,000 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 85.000.000,000 | 89.250.000,000 | 110.000.000,000 | 120.000.000,000 | 175.000.000,000 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | 97.808.974.257,000 | 101.389.316.155,860 | 105.462.538.896,050 | 108.823.037.513,280 | 113.838.038.607,330 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 2.024.960.000,000 | 2.126.208.000,000 | 2.269.750.000,000 | 2.399.480.000,000 | 2.610.900.000,000 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 2.818.244.000,000 | 1.962.500.000,000 | 2.106.780.000,000 | 2.241.600.000,000 | 2.559.000.000,000 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 973.500.000,000 | 1.022.170.000,000 | 1.070.750.000,000 | 1.227.000.000,000 | 1.183.350.000,000 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.02 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 15.795.000.000,000 | 12.334.250.000,000 | 13.153.960.000,000 | 14.235.000.000,000 | 15.468.000.000,000 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 115.000.000,000 | 120.750.000,000 | 126.660.000,000 | 135.240.000,000 | 148.750.000,000 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 250.000.000,000 | 310.000.000,000 | 510.000.000,000 | 598.750.000,000 | 628.685.000,000 |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 3.32.02 | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI | 233.000.000,000 | 236.133.000,000 | 245.757.000,000 | 256.569.000,000 | 269.117.000,000 |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 70.000.000,000 | 70.942.000,000 | 73.834.000,000 | 77.083.000,000 | 80.853.000,000 |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 268.000.000,000 | 271.604.000,000 | 282.674.000,000 | 295.111.000,000 | 309.545.000,000 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 196.344.693.925,540 | 198.984.341.794,720 | 207.093.914.417,510 | 216.204.760.547,190 | 226.778.439.886,970 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 2.191.800.000,000 | 2.221.266.445,380 | 2.311.793.777,290 | 2.413.498.346,670 | 2.531.532.554,340 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 3.331.000.000,000 | 3.375.781.791,030 | 3.513.361.197,250 | 3.667.927.271,090 | 3.847.310.401,730 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 105.373.698.192,000 | 106.790.336.718,560 | 111.142.558.522,640 | 116.032.140.874,730 | 121.706.792.291,330 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 2.904.438.700,000 | 2.943.485.823,060 | 3.063.447.081,470 | 3.198.219.728,290 | 3.354.631.408,490 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2.465.000.000,000 | 2.498.139.332,000 | 2.599.950.570,770 | 2.714.332.249,540 | 2.847.078.997,370 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2.628.045.000,000 | 2.663.376.300,510 | 2.771.921.743,510 | 2.893.869.058,900 | 3.035.396.236,780 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1.364.909.000,000 | 1.383.258.765,720 | 1.439.633.238,780 | 1.502.968.160,810 | 1.576.472.108,410 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 67.733.301.293,180 | 67.733.301.293,180 | 67.833.301.293,060 | 69.940.791.525,660 | 73.174.344.467,070 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 46.861.202.029,000 | 48.401.804.580,910 | 53.034.870.844,660 | 56.244.829.564,730 | 59.182.492.702,570 |
| 5.01 | PERENCANAAN | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 40.128.585.982,370 | 39.037.281.424,130 | 39.197.150.084,770 | 39.514.621.040,470 | 40.951.150.162,250 |
| 5.01 | PERENCANAAN | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 4.650.000.000,000 | 5.225.000.000,000 | 5.550.000.000,000 | 5.975.000.000,000 | 6.525.000.000,000 |
| 5.01 | PERENCANAAN | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 5.997.723.388,000 | 6.152.671.719,000 | 6.900.000.000,000 | 7.625.000.000,000 | 8.250.000.000,000 |
| 5.02 | KEUANGAN | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 201.655.080.146,270 | 202.950.393.513,400 | 208.931.451.345,330 | 215.688.269.789,460 | 223.590.950.047,630 |
| 5.02 | KEUANGAN | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 1.379.431.240.850,040 | 1.398.391.969.878,480 | 1.457.714.099.449,440 | 1.524.323.328.746,950 | 1.601.566.314.656,450 |
| 5.02 | KEUANGAN | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 3.207.955.441,700 | 3.251.083.028,080 | 3.383.580.357,660 | 3.532.436.880,530 | 3.705.193.737,360 |
| 5.02 | KEUANGAN | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 26.407.343.023,000 | 26.762.361.971,300 | 27.853.057.430,080 | 29.078.418.982,590 | 30.500.524.015,110 |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 14.665.000.000,000 | 14.977.630.426,640 | 15.177.630.426,640 | 16.027.630.426,640 | 16.517.647.866,900 |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 4.071.639.736,000 | 4.010.903.721,000 | 4.584.778.163,990 | 4.604.201.412,510 | 5.123.201.412,510 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 5.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18.305.419.905,120 | 19.818.321.954,830 | 20.626.014.257,210 | 21.533.430.791,820 | 22.606.541.702,610 |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7.308.070.000,000 | 6.139.514.378,500 | 6.389.729.230,900 | 6.670.837.635,290 | 6.977.080.674,000 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 733.386.035,000 | 806.504.622,000 | 900.000.000,000 | 989.321.771,000 | 1.025.000.000,000 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 5.05.03 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 11.370.000.000,000 | 12.503.589.000,000 | 13.775.000.000,000 | 15.135.970.000,000 | 15.875.000.000,000 |
| 5.07 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | 5.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 11.012.670.193,820 | 11.160.723.960,030 | 11.615.577.345,280 | 12.126.590.612,850 | 12.719.651.932,590 |
| 5.07 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | 5.07.02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 795.000.000,000 | 805.687.938,720 | 838.523.612,070 | 875.413.443,560 | 918.226.289,210 |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 33.984.962.043,530 | 33.274.201.765,320 | 34.102.882.348,980 | 34.556.242.442,640 | 34.310.412.567,300 |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6.685.400.000,000 | 8.957.800.000,000 | 9.327.800.000,000 | 10.577.800.000,000 | 13.122.800.000,000 |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 3.592.097.514,000 | 2.625.520.000,000 | 3.255.000.000,000 | 3.605.520.000,000 | 3.690.000.000,000 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 14.582.703.295,000 | 14.778.752.400,830 | 15.381.057.912,860 | 16.057.728.940,830 | 16.843.045.953,810 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 3.811.270.000,000 | 3.862.508.516,000 | 4.019.924.386,150 | 4.196.776.094,410 | 4.402.023.030,560 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 9.291.372.685,000 | 9.416.285.416,880 | 9.800.044.509,370 | 10.231.185.607,070 | 10.731.550.518,550 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 913.514.000,000 | 925.795.234,770 | 963.525.860,330 | 1.005.915.014,440 | 1.055.110.151,400 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.917.060.000,000 | 1.942.832.855,080 | 2.022.012.673,910 | 2.110.968.674,370 | 2.214.207.408,810 |

| KODE BIDANG | NAMA BIDANG URUSAN | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | PAGU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 2.050.590.005,000 | 2.078.158.030,540 | 2.162.853.003,610 | 2.258.005.103,920 | 2.368.434.781,120 |

## Tabel 4.1.1.2 Rekap Data Perangkat Daerah

| KODE SKPD | NAMA SKPD | TOTAL PROGRAM | TOTAL OUTCOME | TOTAL INDIKATOR OUTCOME | TOTAL KEGIATAN | TOTAL SIGMA OUTPUT | TOTAL SUBKEGIATAN | TOTAL OUTPUT | TOTAL PAGU (SUBKEGIATAN) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan | 6 | 6 | 37 | 18 | 27 | 241 | 241 | 1.476.911.000.000,00 | 1.496.766.514.789,77 | 1.557.766.976.642,89 | 1.626.299.049.495,12 | 1.705.834.600.037,13 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan | 5 | 11 | 33 | 21 | 67 | 142 | 142 | 54.908.669.774,21 | 55.646.859.079,31 | 57.914.737.249,34 | 60.462.626.023,40 | 63.419.602.632,02 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | RSUD dr. Doris Sylvanus | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 59 | 59 | 409.640.674.707,90 | 415.147.862.666,52 | 432.067.142.400,38 | 451.075.413.421,66 | 473.135.643.582,65 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0003 | RSJ Kalawa Atei | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 39 | 39 | 79.712.543.491,56 | 80.784.194.786,88 | 84.076.540.749,82 | 87.775.386.406,60 | 92.068.116.998,84 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | RSUD HANAU | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 29 | 29 | 153.378.135.362,57 | 155.440.143.049,64 | 161.775.079.342,54 | 168.892.178.170,17 | 177.151.995.069,88 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12 | 12 | 14 | 25 | 25 | 145 | 145 | 1.283.326.300.589,14 | 1.300.579.272.732,65 | 1.353.584.157.281,69 | 1.413.133.454.108,07 | 1.482.243.958.290,38 |
| 1.04.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 7 | 8 | 13 | 16 | 17 | 56 | 56 | 280.617.998.543,00 | 284.390.612.343,25 | 295.980.902.831,59 | 309.002.224.441,22 | 324.114.243.382,18 |

| KODE SKPD | NAMA SKPD | TOTAL PROGRAM | TOTAL OUTCOME | TOTAL INDIKATOR OUTCOME | TOTAL KEGIATAN | TOTAL SIGMA OUTPUT | TOTAL SUBKEGIATAN | TOTAL OUTPUT | TOTAL PAGU (SUBKEGIATAN) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 83 | 83 | 38.873.047.496,17 | 39.395.654.728,08 | 41.001.217.860,12 | 42.805.016.818,21 | 44.898.432.896,67 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 107 | 107 | 38.806.773.068,74 | 39.328.489.310,69 | 40.931.315.127,69 | 42.732.038.799,67 | 44.821.885.825,51 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 66 | 66 | 32.566.509.985,00 | 33.004.332.454,10 | 34.349.418.346,23 | 35.860.579.435,04 | 37.614.371.844,25 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial | 7 | 7 | 9 | 20 | 25 | 144 | 144 | 57.272.097.269,00 | 59.042.060.370,61 | 61.407.554.557,27 | 64.065.111.811,86 | 67.149.365.221,16 |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 9 | 10 | 10 | 23 | 23 | 78 | 78 | 32.860.090.495,39 | 33.301.859.845,62 | 34.659.071.415,42 | 36.183.855.316,25 | 37.953.457.809,84 |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 79 | 79 | 23.101.409.105,10 | 23.411.983.249,48 | 24.366.134.599,74 | 25.438.093.202,38 | 26.682.164.978,86 |
| 2.09.3.27.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 54 | 54 | 11.479.784.825,51 | 11.634.118.456,57 | 12.108.264.953,10 | 12.640.953.415,70 | 13.259.170.089,69 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 11 | 11 | 12 | 23 | 23 | 88 | 88 | 110.945.357.046,00 | 112.436.900.664,00 | 117.019.247.211,00 | 122.167.367.370,00 | 128.142.067.303,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 5 | 5 | 13 | 18 | 20 | 96 | 96 | 9.614.411.366,11 | 9.743.413.652,26 | 10.140.504.799,71 | 10.586.624.035,84 | 11.104.371.968,69 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 66 | 66 | 35.198.012.855,55 | 35.671.213.112,59 | 37.124.987.257,23 | 38.758.256.151,59 | 40.653.761.927,12 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 4 | 4 | 10 | 25 | 25 | 65 | 65 | 42.902.601.968,28 | 43.479.382.321,26 | 45.251.377.068,92 | 47.242.156.637,66 | 49.552.574.846,50 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 5 | 5 | 5 | 13 | 46 | 48 | 48 | 54.594.193.484,93 | 55.328.154.987,13 | 57.583.044.426,70 | 60.116.340.776,45 | 63.056.382.007,93 |

| KODE SKPD | NAMA SKPD | TOTAL PROGRAM | TOTAL OUTCOME | TOTAL INDIKATOR OUTCOME | TOTAL KEGIATAN | TOTAL SIGMA OUTPUT | TOTAL SUBKEGIATAN | TOTAL OUTPUT | TOTAL PAGU (SUBKEGIATAN) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 8 | 8 | 10 | 17 | 17 | 47 | 47 | 47.263.369.407,00 | 47.898.775.690,98 | 49.850.882.055,25 | 52.044.011.279,31 | 54.589.268.309,87 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 39 | 39 | 15.667.202.335,55 | 15.877.831.390,17 | 16.524.929.677,35 | 17.251.923.959,23 | 18.095.644.104,33 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | 66 | 66 | 32.623.300.008,63 | 33.061.885.959,86 | 34.409.317.435,21 | 35.923.113.711,95 | 37.679.964.413,64 |
| 2.22.3.26.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 10 | 10 | 10 | 24 | 28 | 103 | 103 | 100.713.760.853,90 | 102.067.751.424,87 | 106.277.505.077,64 | 110.900.855.601,85 | 116.324.557.109,03 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 48 | 48 | 20.402.655.945,20 | 20.676.948.192,24 | 21.519.633.659,20 | 22.466.363.297,93 | 23.565.100.702,73 |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 | 7 | 7 | 33 | 27 | 98 | 98 | 53.390.661.780,60 | 54.108.443.065,06 | 56.313.623.355,05 | 58.791.073.061,08 | 61.666.300.937,72 |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 6 | 6 | 10 | 20 | 20 | 77 | 77 | 136.342.003.721,20 | 138.174.978.539,15 | 143.806.276.022,19 | 150.132.859.094,45 | 157.475.235.391,40 |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Perkebunan | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 46 | 46 | 30.484.332.743,78 | 30.894.162.530,17 | 32.153.248.810,02 | 33.567.792.077,99 | 35.209.453.754,08 |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kehutanan | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 | 87 | 87 | 289.293.170.950,07 | 293.182.413.317,67 | 305.131.012.142,46 | 318.554.881.737,31 | 334.134.081.580,46 |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 60 | 60 | 75.050.088.232,00 | 76.059.057.720,93 | 79.158.831.535,51 | 82.641.328.527,06 | 86.682.973.613,16 |
| 3.30.3.31.0.00.01.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 10 | 10 | 10 | 24 | 24 | 58 | 58 | 138.566.979.134,00 | 140.429.866.405,86 | 146.153.061.456,05 | 152.582.888.513,28 | 160.045.085.607,33 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 8 | 16 | 20 | 30 | 88 | 121 | 121 | 316.603.584.817,54 | 320.859.986.970,98 | 333.936.580.549,22 | 348.627.716.237,22 | 365.677.653.885,42 |

| KODE SKPD | NAMA SKPD | TOTAL PROGRAM | TOTAL OUTCOME | TOTAL INDIKATOR OUTCOME | TOTAL KEGIATAN | TOTAL SIGMA OUTPUT | TOTAL SUBKEGIATAN | TOTAL OUTPUT | TOTAL PAGU (SUBKEGIATAN) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD | 2 | 2 | 3 | 15 | 30 | 66 | 66 | 114.594.503.322,18 | 116.135.105.874,09 | 120.868.172.137,72 | 126.185.621.090,39 | 132.356.837.169,64 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 5 | 6 | 9 | 16 | 16 | 78 | 78 | 62.879.695.405,37 | 63.725.046.765,13 | 66.322.150.084,77 | 69.239.912.811,47 | 72.626.150.162,25 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 66 | 66 | 1.435.042.217.847,04 | 1.453.334.850.903,74 | 1.512.606.017.593,81 | 1.579.195.282.498,42 | 1.656.476.088.753,82 |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | Badan Pendapatan Daerah | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 38 | 38 | 175.659.401.613,97 | 178.020.957.487,52 | 185.276.170.988,70 | 193.427.171.901,11 | 202.886.893.702,73 |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian Daerah | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 40 | 40 | 18.736.639.736,00 | 18.988.534.147,64 | 19.762.408.590,63 | 20.631.831.839,15 | 21.640.849.279,41 |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 43 | 43 | 25.613.489.905,12 | 25.957.836.333,33 | 27.015.743.488,11 | 28.204.268.427,11 | 29.583.622.376,61 |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | Badan Penghubung | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 30 | 30 | 11.807.670.193,82 | 11.966.411.898,75 | 12.454.100.957,35 | 13.002.004.056,41 | 13.637.878.221,80 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 45 | 45 | 44.262.459.557,53 | 44.857.521.765,32 | 46.685.682.348,98 | 48.739.562.442,64 | 51.123.212.567,30 |

Di samping program perangkat daerah pada tahun 2026-2030 tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menyusun anggaran per program perangkat daerah per urusan untuk tahun 2025. Rincian anggaran ini telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2025 yang disinkronisasi dengan dokumen RKPD Tahun 2025. Rincian tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1.2 Rincian Anggaran per Urusan per Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | 2,299,433,180,220.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1,046,206,014,473.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1,169,560,690,517.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 7,362,599,984.00 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 19,609,594,186.00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 56,694,281,060.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | 924,572,402,848.67 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 687,014,999,141.67 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 223,265,426,299.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 13,937,660,093.00 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 21,616,750.00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 332,700,565.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 1,118,735,535,148.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 81,719,596,277.60 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 25,931,529,500.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 24,854,144,000.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 17,180,099,000.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1,651,233,919.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 20,560,000,000.00 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 60,328,806,189.00 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 269,624,137,531.08 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 611,184,389,941.32 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 3,622,850,000.00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2,078,748,790.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 167,918,355,250.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16,130,651,123.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1,129,041,000.00 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 18,646,858,306.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 131,839,823,821.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 171,981,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN | | 116,351,236,110.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 77,506,746,795.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1,261,290,454.00 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 37,095,260,770.00 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 487,938,091.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | 43,165,300,778.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 32,967,115,310.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 403,031,160.00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 129,200,000.00 |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 5,070,153,882.00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 2,037,243,542.00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 1,258,556,884.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 1,300,000,000.00 |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | 43,210,657,858.85 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 27,993,385,616.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 215,558,762.85 |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1,276,159,500.00 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 2,361,889,000.00 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 11,077,629,980.00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 286,035,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | 15,466,656,647.62 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 12,782,204,393.61 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1,432,618,739.02 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 363,026,583.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 5,634,940.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 60,889,611.00 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 199,707,810.00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 622,574,570.99 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | 15,412,526,300.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10,940,357,050.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 15,000,000.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 4,015,667,500.00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 290,362,000.00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 151,139,750.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | 1,330,114,358.00 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 200,000,000.00 |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 885,500,000.00 |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 244,614,358.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | 150,067,175,714.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 35,423,963,027.00 |
| | | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | 784,255,058.00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 10,406,294,679.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 14,737,028,793.00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 560,250,704.00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 1,368,139,064.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | 176,549,653.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1,390,852,928.00 |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 476,588,333.00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 1,068,676,433.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 83,674,577,042.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 12,546,511,768.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 12,006,477,819.17 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 95,698,860.90 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 55,541,955.68 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 303,003,132.25 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 85,790,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | 38,480,627,510.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 22,917,606,973.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 354,162,000.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 7,281,096,482.00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 7,927,762,055.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | 382,897,074.00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 9,002,869.00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 218,813,277.00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 155,080,928.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | 39,345,715,879.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 17,053,190,599.00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 21,297,646,239.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 944,879,041.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 50,000,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19,042,181,073.61 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 25,183,612,295.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 22,209,624,328.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 13,282,707,750.00 |
| | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 540,201,835.00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 2,374,248,037.00 |
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 437,947,439.00 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 154,932,486.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 8,072,544,704.00 |
| | | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 22,890,814,341.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 4,509,972,815.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | 17,148,695,193.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 15,631,170,962.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 451,088,088.00 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 431,155,000.00 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 297,090,081.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 311,179,062.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 27,012,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | 41,490,104,124.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 17,894,992,021.94 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 4,174,917,048.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 16,420,195,054.06 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 3,000,000,000.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | 314,878,086.39 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 314,878,086.39 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 359,915,500.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19,649,678,389.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 19,154,595,000.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 323,000,000.00 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1,100,000,000.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 2,975,805,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | 22,719,658,150.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 20,480,716,150.00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1,978,033,000.00 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 260,909,000.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | 484,646,000.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 361,170,000.00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 123,476,000.00 |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | 57,160,515,767.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 42,776,657,117.50 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 1,289,857,619.50 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 7,285,812,230.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 3,952,740,800.00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 879,461,000.00 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 975,987,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | 86,780,000,000.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 80,275,000,000.00 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 6,130,000,000.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 375,000,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | 350,414,928,195.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 51,397,165,902.00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 282,276,701,597.00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 7,377,343,196.00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1,216,780,000.00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 6,857,357,500.00 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1,289,580,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | 532,998,207,074.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 96,756,534,974.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 355,040,015,718.00 |
| | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 9,145,711,200.00 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 67,921,464,182.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 4,134,481,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | 80,050,088,232.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 24,030,160,501.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 329,000,000.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 1,620,678,000.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 53,260,178,521.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 810,071,210.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | 145,039,103,991.81 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 17,799,349,076.00 |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 25,893,000.00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 28,211,100.00 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | 123,560,470,265.81 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 979,939,100.00 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 1,766,247,450.00 |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 878,994,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | 25,815,107,627.19 |
| | | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 25,509,300,627.19 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 57,793,000.00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 248,014,000.00 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | 554,185,500.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI | 232,397,500.00 |
| | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 69,943,000.00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 251,845,000.00 |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | SEKRETARIAT DAERAH | | 389,444,794,147.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 155,023,517,621.00 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 2,827,242,060.00 |
| | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 225,117,085,170.00 |
| | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 1,797,637,786.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1,401,000,000.00 |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1,542,554,948.00 |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 708,903,522.00 |
| | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 1,026,853,040.00 |
| | SEKRETARIAT DPRD | | 119,101,363,233.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 74,399,726,430.00 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 44,701,636,803.00 |
| | PERENCANAAN | | 35,121,550,570.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 28,610,735,045.40 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 2,580,915,036.60 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3,929,900,488.00 |
| | KEUANGAN | | 1,659,172,536,198.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 177,862,957,792.52 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 1,446,669,175,067.18 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 2,691,329,312.17 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 31,949,074,026.13 |
| | KEPEGAWAIAN | | 20,736,639,736.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16,040,298,276.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 4,696,341,460.00 |
| | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | 169,824,145,006.33 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 162,464,045,596.33 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7,360,099,410.00 |
| | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | 11,758,144,835.00 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 11,758,144,835.00 |
| | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | 16,950,449,301.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 15,191,793,522.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 1,758,655,779.00 |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | INSPEKTORAT DAERAH | | 44,713,332,637.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 35,771,154,747.00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6,038,359,962.00 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2,903,817,928.00 |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 39,399,048,753.00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 13,448,024,877.00 |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 3,192,314,000.00 |

| Klasifikasi | Urusan | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 11,677,654,499.56 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 844,153,297.00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 6,800,636,294.23 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 3,436,265,785.21 |

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sekumpulan indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian pembangunan pada setiap tujuan, sasaran, dan program pemerintah daerah yang dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat dua indikator kinerja yang akan mengukur pembangunan, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Seperti yang dijelaskan pada Bab I bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari periode pertama dari total empat periode dalam RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun yaitu Indikator Utama Pembangunan (IUP) harus tergambarkan pada empat periode RPJMD hingga tahun 2045 nanti. IUP menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program, serta menjadi dasar untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pembangunan secara berkala. Penyelarasan IUP periode pertama RPJPD pada IKU/IKD RPJMD untuk memastikan agar Pembangunan daerah konsisten dengan tujuan Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Daftar IKU dan IKD yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus penyelarasan IUP periode pertama RPJPD adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | | | IUP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | | |
| 1 | Indeks daya saing daerah | Indeks | 3,13 | 3,23 | 3,34 | 3,44 | 3,54 | 3,64 | 3,13 | 3,54 |
| 2 | Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) | Persentase | 1,08 | 1,24 | 1,39 | 1,55 | 1,7 | 1,86 | 1,62 | 1,43 |
| 3 | Rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (%) | Persentase | 1,94 | 2,05 | 2,16 | 2,26 | 2,37 | 2,48 | 1,94 | 2,37 |
| 4 | Tingkat inflasi (%) | Persentase | 3,7 | 3,65 | 3,6 | 3,55 | 3,5 | 3,45 | 3,7 | 3,5 |
| 5 | Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB) | Persentase | 38,5 | 38,55 | 38,6 | 38,65 | 38,7 | 38,75 | 38,5 | 38,7 |
| 6 | Ekspor barang dan jasa (% PDRB) | Persentase | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46 | 46,1 | 45,6 | 46 |
| 7 | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Juta Rupiah | 82,4 | 92,6 | 100 | 110 | 124 | 134 | | |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | Persentase | 5,6 | 6,03 | 6,46 | 6,88 | 7,3 | 7,4 | | |
| 9 | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Persentase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | Persentase | 19 | 19,3 | 19,75 | 20,15 | 20,6 | 21,1 | 15,76 | 18,57 |
| 11 | Tingkat pengangguran terbuka (%) | Persentase | 3,91 | 3,85 | 3,79 | 3,72 | 3,61 | 3,52 | 3,91 | 3,66 |
| 12 | Indeks kapabilitas inovasi | Indeks | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 2,97 | 3,1 | 3,23 | 2,59 | 3,10 |
| 13 | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | Indeks | 22,78 | 23,89 | 25,01 | 26,12 | 27,23 | 28,34 | | |
| 14 | Indeks ekonomi hijau daerah | Indeks | 80,88 | 81,66 | 82,44 | 83,22 | 84 | 84,78 | 80,88 | 84 |
| 15 | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non | Persentase | 15,19 | 15,43 | 15,67 | 15,9 | 16,14 | 16,38 | 15,19 | 16,14 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | | | IUP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 |
| | pertanian pada level provinsi (%) | | | | | | | | | |
| 16 | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%) | Persentase | 3,84 | 3,95 | 4,06 | 4,18 | 4,29 | 4,41 | 1,9 | 2,45 |
| 17 | Rasio kewirausahaan (%) | Persentase | 3,81 | 3,91 | 4,04 | 4,14 | 4,24 | 4,35 | 3,33 | 4,8 |
| 18 | Persentase desa mandiri (%) | Persentase | 20,46 | 20,88 | 21,16 | 21,86 | 22,35 | 22,82 | 1,61 | 4,5 |
| 19 | Tingkat Kemiskinan (%) | Persentase | 4,61 | 4,19 | 3,77 | 3,35 | 2,93 | 2,52 | 4,61 | 2,93 |
| 20 | Total kredit terhadap PDRB (%) | Persentase | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 24 | 24,53 | 24,9 | 21,8 | 30 |
| 21 | Indeks Modal Manusia | Indeks | 0,54-0,55 | 0,55-0,56 | 0,56-0,565 | 0,565-0,57 | 0,57-0,58 | 0,58-0,59 | | |
| | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | | | | | |
| 22 | 1) Literasi membaca | Persentase | 64,29 | 67,86 | 71,43 | 75 | 78,57 | 85,57 | 14,29 | 28 |
| 23 | 2) Numerasi | Persentase | 7,14 | 8,86 | 10,57 | 12,29 | 14 | 15,72 | 7,14 | 14 |
| | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | | | | | |
| 24 | 1) Literasi membaca | Persentase | 39,69 | 40,02 | 40,35 | 40,67 | 41 | 41,33 | 39,69 | 41 |
| 25 | 2) Numerasi | Persentase | 27,22 | 27,67 | 28,11 | 28,56 | 29 | 29,45 | 27,22 | 29 |
| 26 | Indeks Literasi Digital | Indeks | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,95 | 3,7 | 3,9 |
| 27 | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan | Persentase | 70,6 | 75,88 | 81,16 | 86,44 | 91,72 | 97 | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | | | IUP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 |
| | pengajaran/ (c) komputer untuk tujuan pengajaran/ (d) air minum layak/ (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin/ (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air/sanitasi/dan higienis bagi semua (WASH) | | | | | | | | | |
| 28 | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan, | Persentase | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | | |
| 29 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 74,27 | 75,95 | 77,62 | 79,3 | 80,97 | 82,65 | 74,27 | 80,97 |
| 30 | Indeks ketimpangan gender | Indeks | 0,43 | 0,421 | 0,412 | 0,403 | 0,394 | 0,385 | 0,516 | 0,46 |
| 31 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Indeks | 59,87 | 60,26 | 61,43 | 62,82 | 63,76 | 64,89 | | |
| 32 | Rumah tangga dengan akses hunian layak/terjangkau/dan berkelanjutan | Persentase | 64,53 | 67,15 | 69,77 | 72,38 | 75 | 77,62 | 64,53 | 75 |
| 33 | Kapasitas air baku | m3/detik | 1,52 | 1,64 | 1,76 | 1,88 | 2 | 2,12 | 1,52 | 2 |
| 34 | Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap | Persentase | 63,11 | 63,72 | 64,68 | 65,7 | 66,79 | 67,93 | | |
| 35 | Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi | Indeks | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 5,8 | 6,2 |
| 36 | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman | Persentase | 11,16 | 13,37 | 15,58 | 17,79 | 20 | 22,21 | 11,16 | 20 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | | | IUP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 |
| 37 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan | Persentase | 35,34 | 39,01 | 42,67 | 46,34 | 50 | 53,67 | 35,34 | 50 |
| 38 | Konsumsi listrik per kapita | kWh | 718 | 788,5 | 859 | 929,5 | 1000 | 1070,5 | 718 | 1000 |
| 39 | Intensitas energi primer | SBM/Rp Miliar | 183 | 179,75 | 176,5 | 173,25 | 170 | 166,75 | 183 | 170 |
| 40 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | Persentase | 20 | 20,75 | 21,5 | 22,25 | 23 | 23,75 | 17 | 30 |
| 41 | Persentase Desa Teraliri Listrik | Persentase | 98,73 | 98,98 | 99,23 | 99,48 | 99,73 | 100 | | |
| 42 | Indeks kualitas lingkungan hidup | Indeks | 76,34 | 76,51 | 76,68 | 76,84 | 77,01 | 77,18 | 76,34 | 77,91 |
| 43 | Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati | Indeks | 0,557 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,6 | 0,61 | 0,557 | 0,597 |
| 44 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | Persentase | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,2 | 80 | 27,61 | 35 |
| 45 | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) | Persentase | 8,5 | 8,13 | 7,75 | 7,38 | 7 | 6,63 | 8,5 | 7 |
| 46 | Indeks risiko bencana | Indeks | 94,85 | 93,97 | 93,09 | 92,21 | 91,33 | 90,45 | 94,85 | 91,33 |
| 47 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 74,43 | 74,63 | 74,91 | 75,15 | 75,4 | 75,7 | 73,65 | 74,42 |
| 48 | Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | Persentase | 36,8 | 37,85 | 38,9 | 38,95 | 41 | 42,05 | | |
| 49 | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna | Persentase | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | | | IUP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 |
| 50 | Angka kematian ibu | per 100,000 kelahiran hidup | 122 | 109 | 97 | 86 | 77 | 75 | 190 | 137,9 |
| 51 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | Persentase | 20,6 | 18,8 | 17,2 | 15,5 | 14,2 | 14 | 20,6 | 15,75 |
| 52 | Indeks pembangunan kebudayaan | Indeks | 60,89 | 61,12 | 61,35 | 61,58 | 61,81 | 62,04 | 62,13 | 64 |
| 53 | Indeks kerukunan umat beragama | Indeks | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 | 82 | 82,4 | 80,4 | 82 |
| 54 | Indeks pembangunan kualitas keluarga | Indeks | 72,89 | 73,56 | 74,22 | 74,89 | 75,55 | 76,22 | 66,05 | 67 |
| 55 | Rasio Gini | Persentase | 0,315 | 0,298 | 0,281 | 0,263 | 0,246 | 0,228 | | |
| 56 | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks | 77,57 | 79,25 | 79,35 | 79,5 | 79,8 | 79,9 | 70 | 75 |
| 57 | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Persentase | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 58 | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik | Indeks | 2,9 | 3,03 | 3,15 | 3,28 | 3,4 | 3,53 | 2,90 | 3,40 |
| 59 | Indeks integritas nasional | Indeks | 69,54 | 70,41 | 71,27 | 72,14 | 73 | 73,87 | 69,54 | 73 |
| 60 | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Nasional | Nilai | 54,05 | 54,95 | 55,85 | 56,75 | 57,65 | 58,55 | | |
| 61 | Rata-rata wilayah Monitoring Centre for Prevention | Persentase | 84 | 84,75 | 85,5 | 86,25 | 87 | 87,75 | | |
| 62 | Indeks reformasi birokrasi | Indeks | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 65 | 71 |
| 63 | Nilai SAKIP | Nilai | 71,8 | 73,5 | 76,68 | 78,5 | 81 | 83,5 | 71 | 81 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | | | IUP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 |
| 64 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terkelola dan Terukur | 3,16 | 3,35 |
| 65 | Indeks reformasi hukum | Indeks | 70 | 71,25 | 72,5 | 73,75 | 75 | 76,25 | 70 | 75 |
| 66 | Indeks pelayanan publik | Indeks | 2,5 | 2,63 | 2,75 | 2,88 | 3 | 3,13 | 2,5 | 3 |

**Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| **I** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | 11 | 11,16 | 13,37 | 15,58 | 17,79 | 20 | 22,21 | | | |
| 2 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 95 | 94,85 | 93,97 | 93,09 | 92,21 | 91,33 | 90,45 | | | |
| 3 | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | 130 | 122 | 109 | 97 | 86 | 77 | 75 | | | |
| 4 | Indeks Integritas Nasional | Persentase | 69 | 69,54 | 70,41 | 71,27 | 72,14 | 73 | 73,87 | | | |
| 5 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 25:25 | 25.38:25.38 | 27.81:27.81 | 30.31:30.31 | 32.82:32.82 | 35.31:35.31 | 37.81:37.81 | | | |
| 6 | Rasio Penduduk | % | 106,48 | 106,48 | 105,88 | 105,28 | 104,69 | 104,09 | 103,49 | | | |
| 7 | Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital | Persentase | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | (IKD) bagi penduduk wajib KTP | | | | | | | | | | | |
| 8 | Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi | Ha | 1.400 | 1.489 | 1.500 | 1.538 | 1.570 | 1.598 | 1.600 | | | |
| 9 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita | (Rp Juta) | 80 | 82,40 | 92,6 | 100 | 110 | 124 | 150 | | | |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | (%) | 5,17 | 4,61 | 4,3 | 4 | 3,6 | 3,43 | 3 | | | |
| 3 | Indeks Demokrasi Indonesia | indeks | 69,9 | 77,57 | 79,25 | 79,35 | 79,5 | 79,8 | 79,9 | | | |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | poin | 76,34 | 76,34 | 76,51 | 76,68 | 76,84 | 77,01 | 77,18 | | | |
| 5 | Indeks Modal Manusia | Indeks | 0,54 | 0.54-0.55 | 0.55-0.56 | 0.56-0.565 | 0.565-0.57 | 0.57-0.58 | 0.58-0.59 | | | |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,46 | 5,6 | 6,03 | 6,46 | 6,88 | 7,3 | 7,4 | | | |
| 7 | Rasio Gini | Indeks | 0,320 | 0,315 | 0,298 | 0,281 | 0,263 | 0,246 | 0,228 | | | |
| 8 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | (%) | 20.7:20. | 20,60 | 18,80 | 17,20 | 15,5 | 14,2 | 14 | | | |
| 9 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 1,94 | 1,94 | 2,05 | 2,16 | 2,28 | 2,37 | 2,48 | | | |
| 10 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,01 | 3,91 | 3,85 | 3,79 | 3,72 | 3,61 | 3,52 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 11 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,450 | 0,430 | 0,421 | 0,412 | 0,403 | 0,394 | 0,385 | | | |
| 12 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) | (%) | 66 | 72,89 | 73,56 | 74,22 | 74,89 | 75,55 | 76,22 | | | |
| 13 | Kontribusi PDRB Provinsi | (%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 14 | Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) | % | 98 | 98,73 | 98,98 | 99,23 | 99,48 | 99,73 | 100 | | | |
| 15 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal | (%) | 39 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 40 | 50 | |
| 16 | Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan | Rupiah | 5.388.734 | 5.388.734 | 8.066.551 | 10.744.367 | 13.422.183 | 16.100.000 | 18.777.816 | 5.388.734,85 | 16.100.000 | |
| 17 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | (%) | 43 | 43,97 | 46,98 | 49,99 | 52,99 | 56 | 59,01 | 43,97 | 56 | |
| 18 | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB | (%) | 23 | 23,19 | 24,89 | 26,6 | 28,3 | 30 | 31,70 | 23,19 | 30 | |
| 19 | Indeks Zakat Nasional (IZN) | Poin | 0 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | | | |
| 20 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 71 | 71,42 | 72,68 | 73,94 | 75,2 | 76,46 | 77,72 | | | |
| 21 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | % | 52 | 52,03 | 52,77 | 53,52 | 54,26 | 55 | 55,74 | 52,03 | 55 | |
| 22 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 68,71 | 69,00 | 69,50 | 70,00 | 70,50 | 71,00 | 71,50 | | | |
| 23 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Indeks | 125,89 | 126,90 | 126 | 127 | 127,04 | 128 | 128,05 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 24 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Persentase | 12,48 | 13,50 | 13,60 | 13,70 | 13,72 | 13,80 | 13,90 | | | |
| 25 | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | 54,83 | 55,16 | 55,50 | 55,83 | 56,16 | 56,50 | 56,83 | | | |
| 26 | Indeks Partisipasi Olahraga | | 0,300 | 0,314 | 0,321 | 0,328 | 0,335 | 0,342 | 0,348 | | | |
| 27 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) | (%) | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87,37 | 89,25 | |
| 28 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga | Persentase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 29 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa | Ton | 16.597,42 | 16.697 | 16.700 | 16.710 | 16.712 | 16.713 | 16.714 | | | |
| 30 | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan | Persentase | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 | 273 | | | |
| 31 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao | Ton | 1.604,63 | 1.610 | 1.613 | 1.615 | 1.620 | 1.623 | 1.627 | | | |
| 32 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 84,21 | 84,71 | 85,21 | 85,71 | 86,21 | 86,71 | 87,21 | | | |
| 33 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi | Ton | 237,83 | 247 | 257 | 267 | 277 | 278 | 288 | | | |
| 34 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet | Ton | 178.114,42 | 178.214 | 178.314 | 178.414 | 178.514 | 178.614 | 178.714 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 35 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit | Ton | 1.095.978 ,13 | 1.188.732 ,00 | 1.197.548 ,25 | 1.199.075 ,62 | 1.200.012 ,80 | 1.195.820 ,00 | 1.198.935 ,00 | | | |
| 36 | Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 0 | 15 | 30 | 45 | 55 | 65 | 75 | | | |
| 37 | Terwujudnya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, mewujudkan program pembentukan Perda sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah dan meningkatkan penataan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 38 | Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 | % | 50:55 | 55:60 | 60:65 | 65:70 | 70:75 | 75:80 | 80:85 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 39 | Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat | Angka | 2 | 14 | 42 | 84 | 126 | 168 | 200 | | | |
| 40 | Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) | % | 70,60 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | | | |
| 41 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | | | |
| 42 | Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan | % | 0 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | | | |
| 43 | Tingkat kepuasan pasien | Angka | 0 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | | | |
| 44 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,05 | 3,13 | 3,23 | 3,34 | 3,44 | 3,54 | 3,64 | | | |
| 2 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | (%) | 60 | 60,89 | 61,12 | 61,35 | 61,58 | 61,81 | 62,04 | | | |
| 3 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | (%) | 0,5 | 0,557 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,6 | 0,61 | | | |
| 4 | Total Kredit/PDRB | (%) | 22,46 | 22,70 | 23,10 | 23,60 | 24 | 24,53 | 24,90 | | | |
| 5 | Tingkat Inflasi | (%) | 3,7 | 3,70 | 3,65 | 3,60 | 3,55 | 3,5 | 3,45 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 6 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | (%) | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 | 82 | 82,4 | | | |
| 7 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | % | 64 | 64,29 | 67,86 | 71,43 | 75 | 78,57 | 85,57 | | | |
| 8 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | (%) | 1,62 | 1,08 | 1,24 | 1,39 | 1,55 | 1,70 | 1,86 | | | |
| 9 | Indeks Literasi Digital | Angka | 3,65 | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 3,95 | | | |
| 10 | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi | % | 15 | 15,19 | 15,43 | 15,67 | 15,90 | 16,14 | 16,38 | | | |
| 11 | Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi | Indeks | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | | | |
| 12 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | (%) | 18 | 19 | 19,30 | 19,75 | 20,15 | 20,60 | 21,10 | | | |
| 13 | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
| 14 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 74 | 74,27 | 75,95 | 77,62 | 79,30 | 80,97 | 82,65 | | | |
| 15 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar | % | 7 | 7,14 | 8,86 | 10,57 | 12,29 | 14,00 | 15,72 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | | | | | | | | | | | |
| 16 | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi | % | 1,5 | 3,84 | 3,95 | 4,06 | 4,18 | 4,29 | 4,41 | | | |
| 17 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | % PDRB | 38,5 | 38,5 | 38,55 | 38,6 | 38,65 | 38,7 | 38,75 | | | |
| 18 | Rasio Kewirausahaan | Persentase | 3 | 3,81 | 3,91 | 4,04 | 4,14 | 4,24 | 4,35 | | | |
| 19 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | % | 39 | 39,69 | 40,02 | 40,35 | 40,67 | 41,00 | 41,33 | | | |
| 20 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | % | 17 | 20 | 20,75 | 21,50 | 22,25 | 23 | 23,75 | | | |
| 21 | Ekspor Barang dan Jasa | % PDRB | 45,6 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46 | 46,1 | | | |
| 22 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | % | 27 | 27,22 | 27,67 | 28,11 | 28,56 | 29 | 29,45 | | | |
| 23 | Persentase Desa Mandiri | % | 20 | 20,46 | 20,88 | 21,16 | 21,86 | 22,35 | 22,82 | | | |
| 24 | Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Indeks | 22 | 22,78 | 23,89 | 25,01 | 26,12 | 27,23 | 28,34 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 25 | Indeks Ekonomi Hijau Daerah | Angka | 80 | 80,88 | 81,66 | 82,44 | 83,22 | 84 | 84,78 | | | |
| 26 | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal | Produk | 0 | 13.798 | 13.881 | 13.962 | 14.036 | 14.080 | 14.124 | | | |
| 27 | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal | % | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 52 | 60 | |
| 28 | Aset Perbankan Syariah/PDRB | Persentase | 0 | 1,18 | 1,28 | 1,35 | 1,4 | 1,42 | 1,47 | | | |
| 29 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 30 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | % | 39 | 39,2 | 40,3 | 42,67 | 46,34 | 50 | 53,67 | | | |
| 31 | Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni | % | 0,4 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | | | |
| 32 | Indeks Desa Membangun (IDM) | | 0,718 | 0,728 | 0,738 | 0,748 | 0,758 | 0,768 | 0,778 | | | |
| 33 | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0,4 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | | | |
| 34 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | Persentase | 15,75 | 19,00 | 19,30 | 19,75 | 20,15 | 20,60 | 21,10 | | | |
| 35 | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | % | -19,4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | | | |
| 36 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) | Ribu Orang | 5,00 | 5,47 | 5,85 | 6,24 | 6,62 | 7 | 7,38 | 5,47 | 7 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 37 | Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor | Persentase | 48,13 | 48,30 | 48,45 | 48,68 | 48,75 | 48,80 | 48,90 | | | |
| 38 | Persentase peningkatan status desa mandiri | % | 3,77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 39 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Angka | 68,20 | 68,40 | 68,60 | 68,80 | 69,00 | 69,20 | 69,40 | | | |
| 40 | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi | Nilai | 0 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,28 | 4 | |
| 41 | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | % | -0,02 | 1,62 | 2,21 | 2,89 | 3,36 | 4,12 | 4,87 | | | |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Indeks | 58 | 59,87 | 60,26 | 61,43 | 62,82 | 63,76 | 64,89 | | | |
| 2 | Rata-Rata Wilayah Monitoring Centre for Prevention | Angka | 83,9 | 84 | 84,75 | 85,5 | 86,25 | 87 | 87,75 | | | |
| 3 | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | 73 | 74,43 | 74,63 | 74,91 | 75,15 | 75,4 | 75,7 | | | |
| 4 | Indeks Reformasi Birokrasi | | 64 | 65 | 66,5 | 68 | 69,50 | 71 | 72,5 | | | |
| 5 | Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh/Kapita | 690 | 718 | 788,5 | 859 | 929,5 | 1.000 | 1.070,5 | | | |
| 6 | Kapasitas Air Baku | (%) | 1,4 | 1,52 | 1,64 | 1,76 | 1,88 | 2 | 2,12 | | | |
| 7 | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) | Persentase | 67 | 70,6 | 75,88 | 81,16 | 86,44 | 91,72 | 97 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | | | | | | | | | | | |
| 8 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | (%) | 8,6 | 8,5 | 8,13 | 7,75 | 7,38 | 7 | 6,63 | | | |
| 9 | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | Persentase | 60 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | | | |
| 10 | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. | % | 36 | 36,80 | 37,85 | 38,9 | 38,95 | 41,00 | 42,05 | | | |
| 11 | Rumah tangga dengan akses hunian layak/terjangkau/dan berkelanjutan | % | 64,8 | 64,53 | 67,15 | 69,77 | 72,38 | 75 | 77,62 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 12 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 2,8 | 2,9 | 3,03 | 3,15 | 3,28 | 3,40 | 3,53 | | | |
| 13 | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,2 | 80 | | | |
| 14 | Intensitas Energi Primer | (SBM/Rp Milyar) | 185 | 183 | 179,75 | 176,5 | 173,25 | 170 | 166,75 | | | |
| 15 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | (%) | 34 | 35,34 | 39,01 | 42,67 | 46,34 | 50 | 53,67 | | | |
| 16 | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | | | |
| 17 | Persentase kondisi mantap jalan provinsi | % | 87,33 | 82,81 | 83,31 | 83,81 | 84,31 | 84,81 | 85,31 | | | |
| 18 | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | % | 71 | 71,8 | 73,50 | 76,68 | 78,5 | 81 | 83,5 | | | |
| 19 | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah | Poin | 54 | 54,05 | 54,95 | 55,85 | 56,75 | 57,65 | 58,55 | | | |
| 20 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terkelola dan Terukur | | | |
| 21 | Indeks kapabilitas inovasi | Indeks | 2,59 | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 2,97 | 3,1 | 3,23 | | | |
| 22 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 70 | 70 | 71,25 | 72,50 | 73,75 | 75 | 76,25 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 23 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 2,3 | 2,5 | 2,63 | 2,75 | 2,88 | 3 | 3,13 | | | |
| 24 | Rasio Elektrifikasi | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 25 | Persentase Capaian Aksi HAM | % | 63 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 60 | 65 | |
| 26 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | 38 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 38 | 40 | |
| 27 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | (%) | 11 | 11,23 | 11,35 | 11,47 | 11,59 | 11,71 | 11,83 | 11,23 | 11,71 | |
| 28 | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun | (tahun) | 9,4 | 9,41 | 9,48 | 9,55 | 9,62 | 9,69 | 9,76 | 9,41 | 9,69 | |
| 29 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,3 | 13,32 | 13,63 | 13,93 | 14,24 | 14,58 | 14,89 | 13,01 | 13,37 | |
| 30 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi | (%) | 72 | 72,82 | 74 | 75,2 | 76,42 | 77,66 | 78,92 | 72,82 | 75,94 | |
| 31 | Aset Dana Pensiun/PDRB | (%) | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,51 | 0,05 | 0,42 | |
| 32 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | (%) | 7 | 7 | 10,25 | 13,5 | 16,75 | 20 | 23,25 | 7 | 20 | |
| 33 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di | (%) | 67,94 | 67,94 | 67,94 | 70,30 | 72,65 | 75,00 | 77,35 | 69,59 | 75 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Area Tempat Tinggalnya | | | | | | | | | | | |
| 34 | indeks kepuasan masyarakat | Indeks | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | | | |
| 35 | Indeks Rasa Aman | Angka | 0 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | | | |
| 36 | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Angka | 0 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,7 | 77 | | | |
| 37 | Persentase Penegakan Perda | % | 64,29 | 66,64 | 68,99 | 71,34 | 73,69 | 76,04 | 78,39 | | | |
| 38 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | | | |
| 39 | Indeks Integritas Nasional | Angka | 67,76 | 69,54 | 70,41 | 71,27 | 72,14 | 73,00 | 73,87 | | | |
| 40 | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Ton | 29.184,81 | 29.300 | 29.420 | 29.540 | 29.660 | 29.780 | 29.900 | | | |
| 41 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | | | |
| 42 | Nilai SAKIP | Angka | 71,00 | 71,00 | 73,50 | 76,00 | 78,50 | 81,00 | 83,50 | | | |
| 43 | Indeks Kualitas Lahan | Indeks | 75,38 | 83,96 | 84,03 | 84,1 | 84,17 | 84,24 | 84,31 | | | |
| 44 | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 2,67 | 2,69 | 2,63 | 2,75 | 2,88 | 3,00 | 3,13 | | | |
| 45 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Angka | 63,55 | 71,00 | 75,00 | 79,00 | 90,00 | 93,00 | 95,00 | | | |
| 46 | Persentase Keterlaksanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 47 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja | Angka | 61,5 | 63,2 | 64,8 | 66,1 | 68,3 | 70,5 | 72,9 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | Instansi Pemerintahan (SAKIP) | | | | | | | | | | | |
| 48 | Terlaksananya Kegiatan Reses 45 Anggota DPRD ke dalam daerah menghimpun aspirasi masyarakat | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| **V** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | | | |
| **AA** | **1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 3 | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) | Persentase | 68,33 | 69,06 | 69,78 | 70,51 | 71,15 | 71,79 | 72,43 | | | |
| 4 | Indeks Pemerataan Guru | Rasio | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,8 | | | |
| 5 | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui | Persentase | 70 | 73 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | | | |
| 6 | Persentase Guru SMA/SMK/PK yang bersertifikasi | % | 62,37 | 65 | 67,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 7 | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 8 | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | Persentase | 62,60 | 70,08 | 71,17 | 72,26 | 73,35 | 74,44 | 75,53 | | | |
| 9 | Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 70,52 | 71,12 | 71,72 | 72,32 | 72,92 | 73,52 | 74,12 | | | |
| 10 | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 70,27 | 71,57 | 72,87 | 74,17 | 75,47 | 76,77 | 78,07 | | | |
| 11 | Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 67,1 | 68,7 | 70,3 | 71,9 | 73,5 | 75,1 | 76,7 | | | |
| 12 | Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 75,94 | 76,44 | 76,94 | 77,44 | 77,94 | 78,44 | 78,94 | | | |
| 13 | Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 67,55 | 68,05 | 68,55 | 69,05 | 69,55 | 70,05 | 70,55 | | | |
| 14 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMA | Nilai | 59,27 | 60,87 | 62,47 | 64,07 | 65,67 | 67,27 | 68,87 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | berdasarkan Asesmen Nasional | | | | | | | | | | | |
| 15 | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,56 | 60,76 | 62,96 | 65,16 | 67,36 | 69,56 | 71,76 | | | |
| 16 | Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 65,32 | 65,92 | 66,52 | 67,12 | 67,72 | 68,32 | 68,92 | | | |
| 17 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 68,98 | 69,23 | 69,48 | 69,73 | 69,98 | 70,23 | 70,48 | | | |
| 18 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 68,01 | 68,51 | 69,01 | 69,51 | 70,01 | 70,51 | 71,01 | | | |
| 19 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | % | 87,14 | 88,93 | 90,72 | 92,51 | 94,31 | 96,1 | 97,89 | | | |
| 20 | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | % | 75,89 | 77,44 | 77,98 | 78,52 | 79,06 | 79,6 | 80,14 | | | |
| 21 | Iklim Inklusivitas SMA | Nilai | 59,52 | 61,02 | 62,52 | 64,02 | 65,52 | 67,02 | 68,52 | | | |
| 22 | Iklim Inklusivitas SMK | Nilai | 57,47 | 59,77 | 62,07 | 64,37 | 66,67 | 68,97 | 71,27 | | | |
| 23 | Iklim Inklusivitas SDLB | Nilai | 66,2 | 67,5 | 68,8 | 70,1 | 71,4 | 72,7 | 74 | | | |
| 24 | Iklim inklusivitas SMPLB | Nilai | 67,33 | 68,73 | 70,13 | 71,53 | 72,93 | 74,33 | 75,73 | | | |
| 25 | Iklim inklusivitas SMALB | Nilai | 64,8 | 66,4 | 68 | 69,6 | 71,2 | 72,8 | 74,4 | | | |
| 26 | Iklim keamanan SMA | Nilai | 71,66 | 82,4 | 83,6 | 84,8 | 86 | 87,2 | 88,4 | | | |
| 27 | Iklim keamanan SMK | Nilai | 70,72 | 71,92 | 73,12 | 74,32 | 75,52 | 76,72 | 77,92 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 28 | Iklim keamanan SDLB | Nilai | 78,1 | 78,6 | 79,1 | 79,6 | 80,1 | 80,6 | 81,1 | | | |
| 29 | Iklim keamanan SMPLB | Nilai | 72 | 73,2 | 74,4 | 75,6 | 76,8 | 78 | 79,2 | | | |
| 30 | Iklim keamanan SMALB | Nilai | 71 | 72,3 | 73,6 | 74,9 | 76,2 | 77,5 | 78,8 | | | |
| 31 | Iklim kebinekaan SMA | Nilai | 72,78 | 73,78 | 74,78 | 75,78 | 76,78 | 77,78 | 78,78 | | | |
| 32 | Iklim kebinekaan SMK | Nilai | 70,74 | 72,04 | 73,34 | 74,64 | 75,94 | 77,24 | 78,54 | | | |
| 33 | Iklim kebinekaan SDLB | Nilai | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | | | |
| 34 | Iklim kebinekaan SMPLB | Nilai | 65,11 | 66,91 | 68,71 | 70,51 | 72,31 | 74,11 | 75,91 | | | |
| 35 | Iklim kebinekaan SMALB | Nilai | 70,6 | 72,6 | 74,6 | 76,6 | 78,6 | 80,6 | 82,6 | | | |
| **AB** | **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | kabupaten/kota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | | | |
| 2 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | (%) | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87,37 | 89,25 | |
| 3 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | (%) | 99,02 | 99,25 | 99,30 | 99,35 | 99,40 | 99,45 | 99,50 | 99,5 | 99,5 | |
| 4 | Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengembangan Teknologi Kesehatan | % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | |
| 5 | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial | % | 94 | 96 | 96,10 | 96,20 | 96,30 | 96,40 | 96,50 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 6 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar | % | 94,24 | 65 | 70 | 76 | 83 | 90 | 93 | | | |
| 7 | Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Persentase | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 5 | 4,5 | | | |
| 8 | Persentase penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan secara tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 9 | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. | Orang | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | | | |
| 10 | Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi | % | 52 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | | | |
| 11 | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. | Kab/Kota | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 12 | Data profil kesehatan yang akurat dan terkumpul tepat waktu | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 13 | Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun | Persentase | 0 | 12,4 | 12,0 | 11,5 | 11 | 10 | 10 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 14 | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun | % | 10 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | | | |
| 15 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 54 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | | | |
| 16 | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun | % | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | | |
| 17 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 18 | Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar | Persentase | 40,91 | 40,91 | 45,45 | 50 | 54,55 | 59,09 | 63,64 | | | |
| 19 | Presentase lanjut usia yang mandiri | % | 0 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | | | |
| 20 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun. | (%) | 10 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | | | |
| 21 | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | Rata-rata Anak per Wanita | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | % | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,4 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | | | |
| 23 | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | |
| 24 | Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional | % | 67 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | | |
| 25 | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 26 | Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan | Kabupaten/Kota | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | | | |
| 27 | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna | % | 81,81 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 100 | | | |
| 28 | Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar | % | 0 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | |
| 29 | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis (dokter, perawat dan bidan) terhadap populasi (per 1.000 penduduk) | Angka | 4.38:4.38 | 4.74:4.74 | 4.81:4.81 | 4.82:4.82 | 4.84:4.84 | 4.86:4.86 | 4.88:4.88 | | | |
| **AC** | **1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Persentase | 11,10 | 15,86 | 18,10 | 20,12 | 21,19 | 22,02 | 22,69 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 2 | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | | |
| 3 | Terselenggaranya penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | Panjang Drainase yang Dibangun/Ditingkatkan | Meter | 128,13 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | | | |
| 5 | Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang Dibangun dan Ditingkatkan | Unit | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 6 | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | Persentase | 78,15 | 82,52 | 86,89 | 91,26 | 95,63 | 100 | 100 | | | |
| 7 | Jumlah Infrastruktur Persampahan yang Terbangun dan Ditingkatkan | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 8 | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi | % | 87,33 | 82,81 | 83,31 | 83,81 | 84,31 | 84,81 | 85,31 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 9 | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani | % | 24,89 | 25,38 | 27,81 | 30,31 | 32,82 | 35,31 | 37,81 | | | |
| 10 | Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi | Kawasan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 11 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi | % | 0:0 | 1.40:1.44 | 2.40:2.46 | 3.50:3.51 | 4.50:4.57 | 6.50:6.58 | 7.0:7.6 | | | |
| 12 | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) | % | 2 | 3,2 | 4,4 | 5,6 | 6,8 | 8 | 9,2 | | | |
| 13 | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | % | 0 | 0,023 | 0,073 | 0,123 | 0,173 | 0,223 | 0,273 | | | |
| **AD** | **1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | % | 100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 2 | Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani | % | 6,74 | 7,55 | 8,96 | 10,37 | 11,78 | 13,19 | 14,60 | | | |
| 3 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | (%) | 59,92 | 64,53 | 67,15 | 69,75 | 72,30 | 75,00 | 77,50 | | | |
| 4 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 5 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **AE** | **1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | Persentase | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | | | |
| 2 | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | Persentase | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | | | |
| 3 | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Persentase | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 4 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Indeks | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| 5 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Indeks | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| 6 | Persentase penanganan tanggap bencana darurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 7 | Persentase penanganan pra bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 8 | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 9 | Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 10 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | Persentase | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | |
| 11 | Persentase pelaksanaan pendampingan dan pemulihan pascabencana dengan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | terencana, cepat, dan terkaji sesuai kebutuhan dan ketersedian dokumen resiko bencana | | | | | | | | | | | |
| 12 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **AF** | **1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 3 | Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | Orang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| 4 | Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 5 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 6 | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 7 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 8 | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 9 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | | | | | | | | | | | |
| 10 | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **AG** | **2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | Persentase | 17,12 | 17,45 | 17,60 | 17,75 | 17,90 | 18,05 | 18,20 | | | |
| 2 | Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat | Orang | 112 | 112 | 256 | 320 | 384 | 448 | 480 | | | |
| 3 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 2,00 | 2,06 | 2,13 | 2,19 | 2,33 | 2,57 | 2,61 | | | |
| 4 | Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online | Perusahaan | 13829:13929 | 14027:14127 | 14227:14327 | 14427:14527 | 14627:14727 | 14827:14927 | 15027:15127 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 5 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | % | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | | | |
| 6 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 85,71 | 92,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **AH** | **2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persentase | 3,16 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | | | |
| 2 | Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan | Peserta | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 3 | Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan | % | 90 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | | | |
| 4 | Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA | kabupaten/kota | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | | | |
| 5 | Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah | Orang | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| 6 | Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Dokumen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| 7 | Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | Anak dari tindak kekerasan (%) | | | | | | | | | | | |
| **AI** | **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) | Ton | 36.334 | 38.500 | 200.000 | 225.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | | | |
| 2 | Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang di ambil | % | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | | |
| 3 | Skor Pola Pangan Harapan | Nilai | 91 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | | | |
| 4 | Penanganan daerah rawan pangan (%) | % | 2 | 8,8 | 8,8 | 7,7 | 6,6 | 5,5 | 4,4 | | | |
| **AJ** | **2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah bidang tanah yang diredistribusi | Bidang Tanah | 4.386 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | | | |
| 2 | Jumlah Laporan Penatagunaan Tanah | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Garapan | % | 60,71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | |
| 4 | Jumlah bidang tanah yang diredistribusi | Bidang Tanah | 4.386 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | | | |
| 5 | Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | % | 100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 6 | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria | Kepala Keluarga | 4.386 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | | | |
| 7 | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | % | 99,33 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | | |
| 8 | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota | % | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| **AK** | **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks kualitas lingkungan hidup | Angka | 74,80 | 76,34 | 76,51 | 76,68 | 76,84 | 77,01 | 77,18 | | | |
| 2 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | poin | 31,06 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | | | |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi | % | 12,68 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | | | |
| 4 | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 5 | Persentase Limbah B3 yang Terkelola | Persentase | 99,944 | 99,946 | 99,948 | 99,950 | 99,952 | 99,954 | 99,956 | | | |
| 6 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 52,13 | 70,45 | 70,65 | 70,85 | 71,05 | 71,25 | 71,45 | | | |
| 7 | Persentase Rekomendasi Kajian | Persentase | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | | | | | | | | | | | |
| 8 | Persentase RTH | Persentase | 0,235 | 0,245 | 0,255 | 0,265 | 0,275 | 0,285 | 0,295 | | | |
| 9 | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | |
| 10 | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persentase | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | | | |
| 11 | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | Persentase | 100 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | |
| 12 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 92,71 | 78,44 | 78,64 | 78,84 | 79,04 | 79,24 | 79,44 | | | |
| **AL** | **2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan | Persentase | 2,5 | 5 | 12,5 | 17,5 | 25 | 32,5 | 37,5 | | | |
| 3 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 64 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | | | |
| 4 | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | % | 5 | 7,5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 5 | Penyajian data kependudukan dalam skala satu Provinsi tahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 6 | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 96 | 97 | 97,25 | 97,50 | 97,75 | 98 | 99 | | | |
| 7 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Persentase | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | | | |
| 8 | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 50 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | | | |
| 9 | Perekaman KTP elektronik | % | 97,20 | 97,5 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | | | |
| 10 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 50 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | | | |
| **AM** | **2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 2 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | Persentase | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | | | |
| 3 | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | Persentase | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 4 | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | Persentase | 0 | 0 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | | | |
| 5 | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persentase | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | | | |
| 6 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | Persentase | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | | | |
| **AN** | **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jiwa | 2,26 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2 | 2 | | | |
| 2 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 38.4-38.5 | 38.5-38.4 | 38.4-38.2 | 38.2-38 | 38-37.8 | 37.8-37.6 | 37.8-37.6 | | | |
| 3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 8,1 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | | | |
| 4 | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | Persentase | 8,55 | 8,45 | 8,35 | 8,25 | 8,15 | 8,05 | 8,05 | | | |
| 5 | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern | % | 86,5 | 88,8 | 89 | 89,2 | 89,4 | 89,6 | 89,6 | | | |
| 6 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | Persentase | 66,4 | 66,4 | 66,5 | 66,6 | 66,7 | 66,8 | 66,9 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 7 | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | 0 | 63,6 | 63,7 | 63,8 | 63,8 | 64 | 64 | | | |
| 8 | Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR) | Indeks | 2,28 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,2 | 2,2 | | | |
| **AO** | **2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio konektivitas provinsi | Nilai | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | | |
| 2 | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi | Orang | 1.450.000 | 1.532.409 | 1.607.409 | 1.682.409 | 1.757.409 | 1.832.409 | 1.907.409 | | | |
| 3 | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi | Persentase | 100 | 98,5 | 98,75 | 99 | 99,25 | 99,50 | 99,75 | | | |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Nilai | 77,32 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | | | |
| 5 | V/C ratio di jalan Provinsi | Nilai | 0.36:0.37 | 0.32:0.33 | 0.33:0.34 | 0.34:0.35 | 0.35:0.36 | 0.36:0.37 | 0.37:0.38 | | | |
| **AP** | **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | % | 0 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | | |
| 2 | Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi | Level | 2,8 | 2,9 | 3,03 | 3,15 | 3,28 | 3,40 | 3,53 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | SPBE di Pemerintah Provinsi | | | | | | | | | | | |
| 3 | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Nilai | 0 | 0 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | | | |
| **AQ** | **2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha | % | 480 | 490 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | | | |
| 2 | Pertumbuhan Wirausaha | Persentase | 9,99 | 10 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 10,85 | 10,95 | | | |
| 3 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persentase | 1,50 | 2 | 2,50 | 3 | 3,50 | 4 | 4,50 | | | |
| 4 | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase | 2.609 | 2.634 | 2.659 | 2.684 | 2.709 | 2.734 | 2.759 | | | |
| 5 | Persentase Koperasi yang sehat/berkualitas | % | 21,50 | 25 | 27,50 | 30 | 32,50 | 35 | 37,50 | | | |
| 6 | Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih | Orang | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | | | |
| 7 | Persentase Koperasi Aktif | Persentase | 84,21 | 84,71 | 85,21 | 85,71 | 86,21 | 86,71 | 87,21 | | | |
| 8 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB | % | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 1,62 | 2,12 | |
| 9 | Kontribusi UMKM terhadap PDRB | Persentase | 13,15 | 14,00 | 15,75 | 16,50 | 16,75 | 17,25 | 17,75 | | | |
| **AR** | **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan | Persentase | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | Potensi Unggulan Daerah | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nilai Realisasi Penanaman Modal | triliun rupiah | 8,65 | 10 | 10,50 | 11,03 | 11,58 | 12,16 | 12,16 | | | |
| 3 | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan | Persentase | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | | | |
| 4 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persentase | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | | | |
| 5 | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | Persentase | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | | | |
| **AS** | **2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | % | 70,21 | 72,34 | 74,46 | 76,60 | 78,72 | 80,85 | 82,98 | | | |
| 2 | Persentase organisasi kepramukaan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menerima manfaat pengembangan kapasitas kepramukaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 3 | Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir | Kegiatan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | |
| 4 | Rasio Wirausaha Pemuda | Persentase | 2,01 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 5 | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | Persentase | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | | | |
| **AT** | **2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Poin | 2,42 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | | | |
| 2 | Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD | Persentase | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | | | |
| **AU** | **2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 46,30 | 46,84 | 47,39 | 47,93 | 48,47 | 49,02 | 49,56 | | | |
| 2 | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah | % | 0 | 0 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | | | |
| **AV** | **2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persentase | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 2 | Presentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang dilestarikan | Persentase | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 3 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Persentase | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 4 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | Persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 5 | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | Persentase | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| **AW** | **2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **AX** | **2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah | Nilai | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | | |
| 2 | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | |
| **AY** | **3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | Indeks | 99,42 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | | | |
| 2 | Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) | Indeks | 99,59 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | | | |
| 3 | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 141.244,64 | 145.481,98 | 149.486,44 | 152.476,17 | 155.525,69 | 158.636,21 | 161.808,93 | | | |
| 4 | Angka Konsumsi Ikan | Kg/KAP/TH | 33,73 | 34,24 | 34,75 | 35,27 | 35,80 | 36,34 | 36,88 | | | |
| 5 | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 137.867,02 | 142.003,03 | 146.263,12 | 150.651,02 | 155.170,55 | 159.825,66 | 164.620,40 | | | |
| 6 | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan | % | 93,62 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | perundangan yang berlaku | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB | Persentase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| **AZ** | **3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | Persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 2 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | Persentase | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | | | |
| 3 | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | Persentase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 4 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual | Persentase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| **BA** | **3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | % | 20 | 20 | 25 | 25 | 33 | 50 | 100 | | | |
| 2 | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan | % | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | |
| 3 | Persentase terlaksananya pembinaan, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | pengawaasan perizinan usaha perkebunan | | | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi perkebunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 5 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Persentase | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | |
| 6 | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | Persentase | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | | |
| 7 | Persentase terlaksananya penataan prasarana perkebunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 8 | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 9 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | |
| 10 | Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | |
| 11 | Peningkatan Produksi Hortikultura | Persentase | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 12 | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | Persentase | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | |
| 13 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | % | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,37 | 0,59 | | | |
| 14 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | % | 0,37 | 0,43 | 0,58 | 0,73 | 0,88 | 1,03 | 1,18 | | | |
| **BB** | **3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kawasan konservasi daerah yang operasional | Ha | 58.113 | 58.113 | 58.113 | 58.113 | 58.113 | 58.113 | 58.113 | | | |
| 2 | Pelaporan pengelolaan DAS Lintas Kab/Kota sesuai kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | Luas akses kelola hutan oleh masyarakat | Ha | 488.456 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 4 | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB | Persentase | 0,93 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,75 | | | |
| 5 | Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver(unit) | Unit | 304 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 6 | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi | % | 2,00 | 2,07 | 2,36 | 2,67 | 2,81 | 2,95 | 3,00 | | | |
| **BC** | **3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota | Meter | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 2 | Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar | % | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| **BD** | **3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | Persentase | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 2 | Nilai Ekspor Barang | Nilai | 4.023,50 | 4.000 | 4.100 | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 6.500 | | | |
| 3 | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase | 6,64 | 5,5 | 5 | 4,8 | 4,5 | 4 | 4 | | | |
| 4 | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 5 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 6 | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi | Persentase | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **BE** | **3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP | % | 170,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 2 | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 3 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **BF** | **3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan | | 7 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | | | |
| 2 | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan | | 7 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | | | |
| 3 | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang | | 7 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | | | |
| **BG** | **4.01 - SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Kerja Sama Daerah | Persentase | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | | | |
| 2 | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan | Persentase | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | | | |
| 3 | Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | | | |
| 4 | Tingkat Inflasi | % | 3,70 | 3,70 | 3,65 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | 3,45 | | | |
| 5 | Persentase terwujudnya Produk | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang Implementatif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigas, layanan hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur | | | | | | | | | | | |
| 6 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | | | |
| 7 | Return on Asset (ROA) BUMD | % | 2,30 | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,41 | 2,43 | 2,45 | 1,89 | 2,8 | |
| 8 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | % | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | | | |
| 9 | Inklusi Keuangan | (%) | 87,74 | 87,74 | 88,45 | 89,17 | 89,89 | 90,62 | 91,02 | 87,74 | 91 | |
| 10 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | | | |
| **BH** | **4.02 - SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Persentase Keterlaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **BI** | **5.01 - PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 3 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **BJ** | **5.02 - KEUANGAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | 6,55 | 6,56 | 6,55 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 2 | Persentase Capaian Realisasi Keuangan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan/ Subkegiatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 3 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Opini | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 4 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | | | |
| 5 | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| 6 | Rasio PAD | % | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | | | |
| 7 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | % | 6.21:6.21 | 6.21:6.21 | 6.21:6.21 | 6.21:6.21 | 6.21:6.21 | 6.21:6.21 | 6.21:6.21 | | | |
| 8 | Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) | % | 40,83 | 40,83 | 40,42 | 40,02 | 39,62 | 39,22 | 38,83 | | | |
| 9 | Manajemen Aset | Kategori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 10 | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja totaldalam APBD | % | -10,62 | -9,62 | -8,62 | -7,62 | -6,62 | -5,62 | -4,62 | | | |
| 11 | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja | % | 3,71 | 3,71 | 3,72 | 3,72 | 3,73 | 3,74 | 3,75 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | dalam APBD tahun sebelumnya | | | | | | | | | | | |
| **BK** | **5.03 - KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN | | 78,54 | 78,55 | 79,00 | 79,00 | 79,50 | 80,00 | 80,00 | | | |
| 2 | Persentase Kualitas Manajemen ASN Provinsi Kalimantan Tengah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **BL** | **5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Daya Manusia | Dokumen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| 2 | Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis | Dokumen | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | | | |
| 3 | Jumlah Dokumen Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Dokumen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 4 | Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN | % | 88,80 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | | | |
| **BM** | **5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | Persentase | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 2 | Jumlah Inovasi | Produk | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | | | |
| 3 | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah | Persentase | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| **BN** | **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | Persentase | 76,99 | 77,00 | 77,15 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | 79,00 | | | |
| 2 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,031 | 3,04 | 3,05 | 3,10 | 3,18 | 3,20 | 3,25 | | | |
| 3 | Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) | Nilai | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,08 | 3,12 | 3,12 | 3,22 | | | |
| **BO** | **8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Persentase | 65 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | | | |
| 2 | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | Persentase | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | | | |
| 3 | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase | 80,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | | | |
| 4 | Indeks Kewaspadaan Nasional | Nilai | 65,00 | 65,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | | | |
| 5 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan | Persentase | 70,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | IUP | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2029 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| | Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | |

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Spirit Pembangunan Kalimantan Tengah

Secara substansi, dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah selama lima tahun ke depan, khususnya pada periode 2025-2029. Dokumen ini telah secara rinci memberikan gambaran mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, hingga program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen ini kemudian akan menjadi pedoman pula bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun rencana kerja setiap tahunnya dan kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis bagi perangkat daerah. Dokumen telah disusun dengan komprehensif untuk memberikan kepastian perencanaan bagi pemerintah daerah.

Poin utama dalam perencanaan ini adalah bagaimana menciptakan spirit pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berdasarkan potensi lokal, alokasi sumber daya yang efisien, serta berpegang teguh pada kearifan lokal daerah. Selain itu, pembangunan haruslah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dengan pertimbangan dan penilaian yang tepat agar dapat menghasilkan dampak yang besar bagi masyarakat. Mandat nasional juga telah ditetapkan bagi Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mandat ini menjadi pekerjaan penting untuk dieksekusi oleh pemerintah disamping memenuhi program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan. Upaya ini perlu didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah provinsi saja, dalam pencapaiannya, termasuk dari pihak masyarakat, komunitas, media, bisnis, akademisi, hingga pihak-pihak berkepentingan lain yang memiliki satu spirit untuk pencapaian visi dan misi daerah dalam RPJMD. Maka, prinsip kolaborasi harus didorong secara berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Tengah.

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen perencanaan yang baik adalah dokumen yang dapat dilaksanakan sebagai acuan proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu beberapa penekanan skema pelaksanaan dalam setiap rancangan kebijakan, program, sampai dengan kegiatan dalam RPJMD yang nantinya akan dilakukan. Beberapa penekanan yang diperlukan tertuang sebagai berikut:

1. Dokumen ini merupakan dokumen acuan bagi gubernur dan wakil gubernur untuk melaksanakan pembangunan sekaligus merealisasikan program unggulan kepada masyarakat.
2. Penyusunan arah kebijakan dalam dokumen ini dilakukan secara *cascading* dengan memperhatikan arahan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sekaligus RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 sehingga dokumen ini telah sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan di level atasnya.
3. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 5 pengarustamaan pembangunan yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi: 1) gender dan inklusi sosial; 2) tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); 3) transformasi digital; 4) pembangunan rendah karbon; dan 5) pembangunan berketahanan iklim.
4. Perbaikan basis data pembangunan yang terintegrasi antarbidang perlu dilakukan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan ke depan, termasuk kerjasama dengan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah dalam pengukuran indikator di dalam data
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan harus dilakukan secara konsisten dan tepat waktu sebagai proses pengendalian pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan dan target pembangunan.

## 5.3 Skema Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam rangka pengendalian proses pembangunan daerah serta pemantauan capaian target pembangunan sebagaimana telah dalam dokumen RPJMD ini. Terdapat tiga jenis monitoring

dan evaluasi yang harus dilaksanakan, yaitu proses monitoring yang dilakukan setiap tahun yang juga diselaraskan dengan proses pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan ketika terjadi kondisi *force majeuere* selama masa pembangunan, dan proses evaluasi yang harus dilakukan sebelum proses perencanaan RPJMD pada periode selanjutnya. Detail proses monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029**

| No | Jenis | Waktu | | | | | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Monitoring | V | V | V | V | | Penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dengan RKPD; beserta monitoring capaian indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD |
| 2 | Peninjauan Kembali | | | V | | | Review terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan jika terjadi kondisi force majeure yang tidak bisa terhindarkan. |
| 3 | Evaluasi | | | | | V | Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target arah pembangunan dan pencapaian target indikator pembangunan, sebelum proses |

| No | Jenis | Waktu | | | | | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | perencanaan RPJMD periode selanjutnya dilaksanakan. |

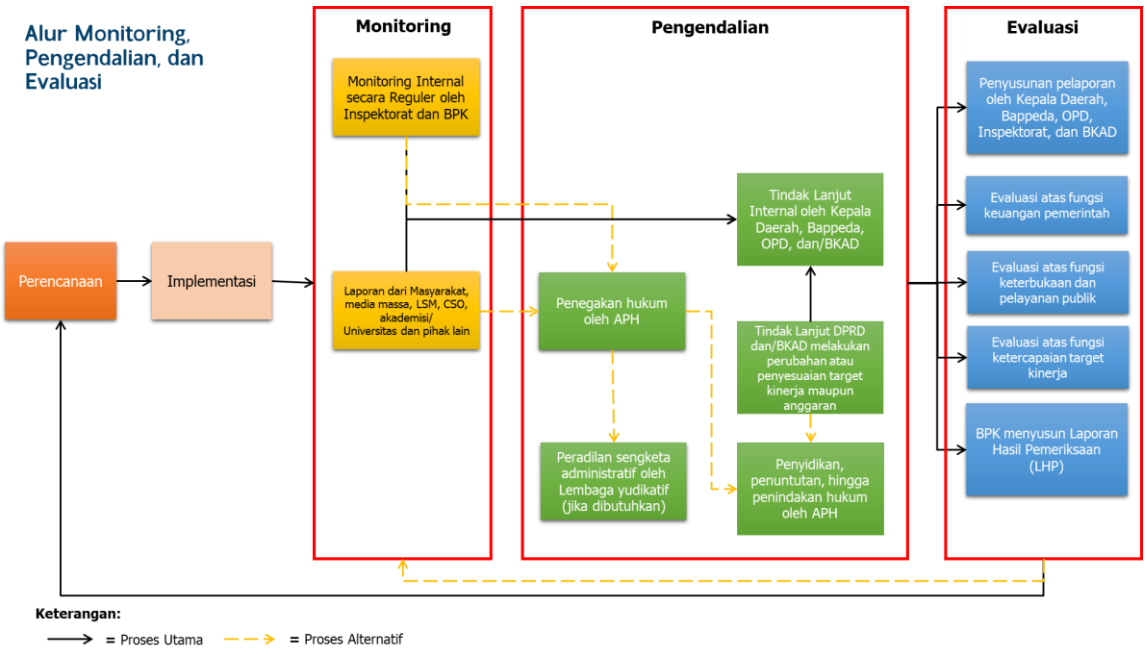
Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD nantinya harus dilakukan dengan prinsip demokratis, artinya dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hal ini difungsikan untuk meningkatkan partisipasi pembangunan oleh berbagai pihak. Beberapa forum dapat dirancang dalam upaya meningkatkan partisipasi pembangunan untuk dapat mengevaluasi ketercapaian pembangunan setiap tahunnya. Beberapa indikasi forum untuk monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2 Jenis Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029**

| No | Jenis Forum Monev | Sasaran Forum Monev | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Forum Monitoring Lintas OPD | Pelaksanaan forum dilakukan pada internal Pemerintah Daerah antar OPD | Dilaksanakan pada setiap tahun dan bertepatan dengan awal tahun anggaran |
| 2 | Forum Pengendalian Pembangunan Daerah | Forum ini disusun untuk memberikan ruang partisipasi pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah baik dari sisi eksekutif, legislatif, organisasi | Forum dillaksanakan setiap tahun pasca hasil monitoring kinerja setiap OPD dilaksanakan. |

| No | Jenis Forum Monev | Sasaran Forum Monev | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| | | masyarakat, akademisi, serta media, dll. | |
| 3 | Publikasi dan Sosialisasi Hasil Pembangunan Daerah | Skema ini dilaksanakan dengan sasaran melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan | Dilaksanakan setelah dua forum pengendalian pembangunan daerah. |

Dengan demikian, proses *monitoring*, *pengendalian*, dan *evaluasi* membentuk suatu siklus yang berkesinambungan dan saling menguatkan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam sistem perencanaan pembangunan**.** Detail skema monitoring, pengendalian, dan evaluasi dapat ditinjau pada gambar berikut ini.




**Gambar 5.3.1 Alur Pendetailan Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi**

**Monitoring** dimulai dengan prosespengawasan dan pelaporan, yakni:

1. Aktor pengawasan seperti Inspektorat dan BPK berperan melakukan pengawasan internal atas pelayanan dan keterbukaan publik, fungsi keuangan pemerintah, ketercapaian target kinerja, dan lain sebagainya. Lembaga pengawas tersebut dapat melakukan audit, review, hingga observasi lapangan.
2. Bersamaan, sebelum, atau sesudahnya dapat dilakukan pelaporan oleh masyarakat, media massa, LSM, CSO, dan akademisi/universitas. Mereka memberikan laporan berupa keluhan, kritik, indikasi penyimpangan, atau hasil riset terhadap implementasi program. Kedua jalur ini (pengawasan dan pelaporan) membentuk satu rantai deteksi awal yang bisa saling menguatkan. Laporan masyarakat bisa menjadi input bagi Inspektorat atau BPKP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu pula sebaliknya, hasil audit dapat memicu keterlibatan media dan masyarakat dalam menyuarakan temuan atau ketidakberesan.

Setelah temuan teridentifikasi, masuk tahap **pengendalian** untuk mencegah, memperbaiki, dan menindaklanjuti.

1. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, dan BKAD akan menindaklanjuti monitoring internal secara regular yang dilakukan oleh Inspektorat maupun BPK. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, dan BKAD bertanggung jawab untuk menyesuaikan pelayanan dan keterbukaan publik, keuangan pemerintah, target kinerja, hingga arah pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan hasil temuan, rekomendasi, atau masukan.
2. DPRD dan BKAD kemudian melakukan penyesuaian, atau penundaan alokasi anggaran untuk program atau kergiatan yang bermasalah serta penyesuaian target kinerja. DPRD memanfaatkan temuan dari proses

monitoring untuk menekan perbaikan anggaran dalam siklus anggaran tahun berjalan atau berikutnya.

3. Jika dalam proses monitoring terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan, maka akan masuk ke fase penegakan hukum awal:
   - Aktor penegak hukum (APH) dapat mulai menyelidiki kasus, baik berdasarkan laporan resmi dari APIP maupun hasil investigasi masyarakat/sumber lain.
   - Pada tahap ini, keterlibatan aktor penegak hukum bersifat respon terhadap indikasi awal pelanggaran.
4. Apabila muncul sengketa administratif atau hukum terkait hasil monitoring (misal: keberatan atas temuan atau sanksi), maka aktor peradilan sengketa yakni lembaga yudikatif akan masuk. Lembaga Yudikatif menjadi ruang penyelesaian formal jika ada konflik hukum antara pemerintah dan pihak lain berdasarkan hasil monitoring.
5. Jika ditemukan pelanggaran serius (korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya), maka aktor penegakan hukum kembali aktif:
   - APH akan melanjutkan proses ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga penindakan hukum.
   - Proses ini berjalan paralel atau lanjutan dari temuan monitoring, khususnya jika ada indikasi tindak pidana.

Selanjutnya, **Evaluasi** dilakukan setelah satu periode pelaksanaan program/kegiatan selesai, baik tahunan maupun akhir periode RPJMD/RKPD dengan didasarkan pada hasil monitoring regular maupun temuan lembaga pengawas. Detailnya:

1. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, Inspektorat, dan BKAD menyusun laporan evaluasi internal secara regular yang berkaitan dengan ketercapaian target kinerja, fungsi keuangan pemerintah, keterbukaan dan pelayanan publik.

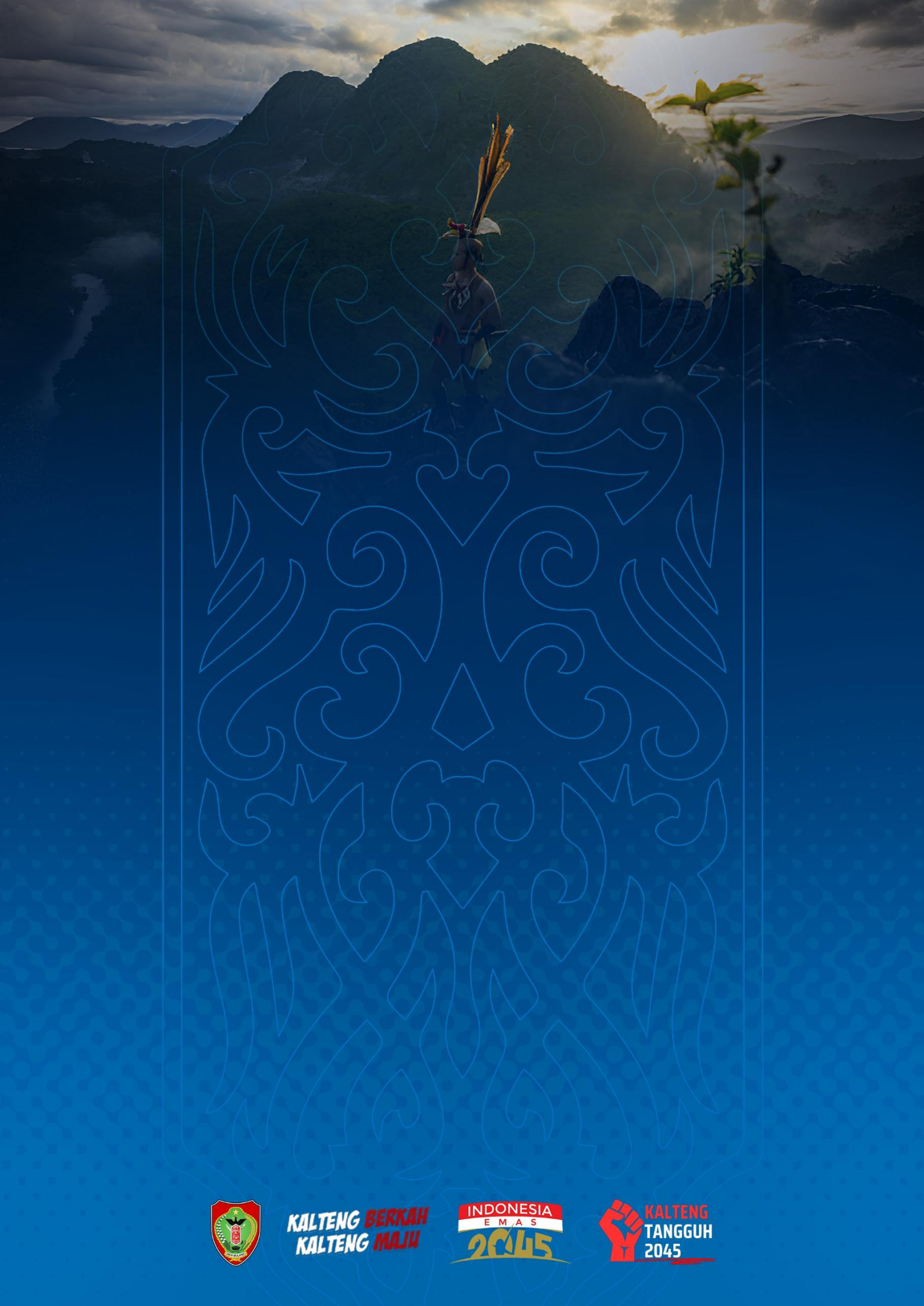
2. Sementara itu, lembaga pengawas yang berwenang juga dapat melakukan evaluasi atas ketercapaian target kinerja, fungsi keuangan pemerintah, keterbukaan dan pelayanan publik.
3. BPK secara regular juga akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi dasar akuntabilitas kepada DPR/DPRD.

Hasil evaluasi kemudian akan menjadi bahan perbaikan dan perencanaan ke depan. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan untuk menilai keberhasilan program. Jika terdapat temuan pelanggaran atau kegagalan kinerja, maka hasil evaluasi bisa kembali masuk ke siklus monitoring dan pengendalian baru, menciptakan *loop* perbaikan berkelanjutan. Namun, jika tidak ditemukan pelanggaran maka hasil evaluasi menjadi masukan dalam perencanaan dan/implementasi.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**AGUSTIAR SABRAN**


KALTENG BERKAH
KALTENG MAJU
INDONESIA
EMAS
2045
KALTENG
TANGGUH
2045